Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tangerang
Tahun 2025-2029







RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG



BUPATI TANGERANG
MOCH MAESYAL RASYID



WAKIL BUPATI TANGERANG
INTAN NURUL HIKMAH

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11.Rencana...

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang Pembangunan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RTRW Tahun 2011-2031, dan RPJMN Tahun 2025-2029.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan:
    a. Renstra Perangkat Daerah; dan
    b. RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
    c. bab III memuat Visi, Misi, dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
    d. bab IV memuat Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. bab V memuat penutup.

(2) RPJMD...

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
    a. bencana alam;
    b. goncangan politik;
    c. krisis ekonomi;
    d. konflik sosial budaya;
    e. gangguan keamanan;
    f. pemekaran Daerah; atau
    g. perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN: (3,32/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD Kabupaten Tangerang RPJMD Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Kabupaten Tangerang adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 terbagi dalam tahapan Perencanaan pembangunan pada periodisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 (satu) tahunan, yang dituangkan dalam:

a. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2025;
b. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2026;
c. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2027;
d. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2028; dan
e. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2029.

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Tangerang. Pentahapan rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RKPD Kabupaten Tangerang sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJMN, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD Kabupaten Tangerang dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang yang merupakan rencana Pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas Pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki kedudukan strategis sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. RPJMD menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyusunan anggaran, serta sebagai panduan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun renstra.

Kesesuaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ini dengan dokumen Perencanaan di provinsi dan Perangkat Daerah mutlak diperlukan untuk keterpaduan, kesinambungan, harmonisasi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Daerah dalam mewujudkan tujuan nasional serta visi dan misi Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada keunggulan lokal.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah untuk:

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
b. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;
d. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
e. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
f. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan; dan
g. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

a. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;

e. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang; dan
f. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0425

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh semangat yang tinggi, maka penyusunan " Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029" ini dapat diselesaikan. Penyusunan "Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ini merupakan salah satu amanat Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Noomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dengan segala keterbatasan Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 masih terdapat kekurangan, karena itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya seluruh Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 – 2029 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang ini, mudah-mudahan jerih payah bapak, Ibu dan saudara sekalian mendapat Restu dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban tugas pembangunan ini.

BUPATI TANGERANG



H. MOCH MAESYAL RASYID

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 5
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.5 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **9**
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 9
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi 9
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 39
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 61
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 75
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 173
2.1.6 Kerja Sama Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 175
2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tangerang 177
2.1.8 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tangerang 180
2.2 Gambaran Keuangan Daerah 182
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 182
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 201
2.2.3 Kerangka Pendanaan 204
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis 224
2.3.1 Permasalahan Pembangunan 224
2.3.2 Isu Strategis 245

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **274**
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 274
3.1.1 Visi dan Misi 274
3.1.2 Tujuan dan Sasaran 279
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 285
3.2.1 Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 285
3.2.2 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 287
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah 304

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **334**
4.1 Program Perangkat Daerah 334
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 431
4.3 Indikator Kinerja Daerah 433

BAB V PENUTUP **477**
DAFTAR PUSTAKA ..... **xviii**
LAMPIRAN ..... **xix**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang ... 10
Tabel 2.2 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 20242-6 14
Tabel 2.3 Kondisi Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2024 15
Tabel 2.4 Kondisi Kelembapan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 15
Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang 16
Tabel 2.6 Penggunaan Listrik per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 22
Tabel 2.7 Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang 25
Tabel 2.8 Penduduk Menurut Agama Kabupaten Tangerang Tahun 2024 37
Tabel 2.9 PDRB Per Sektor ADHK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 ... 41
Tabel 2.10 PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 41
Tabel 2.11 PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 (dalam Juta Rupiah) 44
Tabel 2.12 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf 2019-2023 55
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2024 65
Tabel 2.14 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang 71
Tabel 2.15 Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 71
Tabel 2.16 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 76
Tabel 2.17 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024 77
Tabel 2.18 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 2-78
Tabel 2.19 Penyebab Kematian Bayi Kabupaten Tangerang 2019-2024 91
Tabel 2.20 Rasio Posyandu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 93
Tabel 2.21 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 94
Tabel 2.22 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 94
Tabel 2.23 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 94
Tabel 2.24 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 95
Tabel 2.25 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) 104
Tabel 2.26 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam 105
Tabel 2.27 Rasio Jumlah Rumah Ibadah terhadap jumlah Penganut 108
Tabel 2.28 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 116
Tabel 2.29 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2023 117

Tabel 2.30 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 117
Tabel 2.31 Rasio KDRT Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 118
Tabel 2.32 Tersusunnya RPPLH Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 122
Tabel 2.33 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024..... 122
Tabel 2.34 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 126
Tabel 2.35 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 136
Tabel 2.36 Rasio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan 136
Tabel 2.37 Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 140
Tabel 2.38 Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023..... 142
Tabel 2.39 Investor Berskala Nasional Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 145
Tabel 2.40 Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMA dan PMDN Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 145
Tabel 2.41 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 155
Tabel 2.42 Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 156
Tabel 2.43 Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2024..... 156
Tabel 2.44 Usulan Penanganan pada Jaringan Irigasi Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2) Kementerian Pekerjaan Umum 157
Tabel 2.45 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 162
Tabel 2.46 Proporsi Produksi Perikanan (Ton) Berdasarkan Jenis Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 164
Tabel 2.47 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 167
Tabel 2.48 Kebijakan Inovasi yang Diimplementasikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 171
Tabel 2.49 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang 173
Tabel 2.50 Kerja Sama Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang..... 176
Tabel 2.51 Pendapatan LRA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 188
Tabel 2.52 Realisasi Belanja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 191
Tabel 2.53 Pembiayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 193
Tabel 2.54 Aset Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 197
Tabel 2.55 Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 201
Tabel 2.56 Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 202
Tabel 2.57 Komposisi Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 203

Tabel 2.58 Proyeksi PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 (dalam Miliar Rupiah) 205
Tabel 2.59 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030 209
Tabel 2.60 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030 211
Tabel 2.61 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030 213
Tabel 2.62 Proyeksi Pengeluaran Kapasitas Riil Kabupaten Tangerang Sesuai Prioritas Tahun 2025-2030 214
Tabel 2.63 Analisis Perbandingan Pemanfaatan *Creative Financing* dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah..... 217
Tabel 2.64 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Tangerang 227
Tabel 2.65 Sasaran Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 247
Tabel 2.66 Prioritas Nasional dan Isu Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 248
Tabel 2.67 Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional Tahun 2023-2030 250
Tabel 2.68 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tangerang..... 261
Tabel 2.69 Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029..... 267
Tabel 3.1 Perbandingan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 279
Tabel 3.2 Penyelarasan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Prioritas dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029..... 280
Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030..... 282
Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Menurut Tujuan, Sasaran, dan Bidang Urusan Perangkat Daerah 285
Tabel 3.5 Penyelarasan Arah Kebijakan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 . 288
Tabel 3.6 Arah Pembangunan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 288
Tabel 3.7 Arah Pembangunan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029..... 290
Tabel 3.8 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029..... 296
Tabel 3.9 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 303
Tabel 3.10 Penjabaran Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029..... 304
Tabel 3.11 Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030..... 307
Tabel 3.12 Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2025-2029 314

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 335
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 431
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 433
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 440

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang	10
Gambar 2.2	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 - 2024.....	21
Gambar 2.3	Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	21
Gambar 2.4	Perbandingan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	22
Gambar 2.5	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024	23
Gambar 2.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024	23
Gambar 2.7	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Perhitungan Baru) Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	23
Gambar 2.8	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024.....	24
Gambar 2.9	Perbandingan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024.....	24
Gambar 2.10	Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024.....	25
Gambar 2. 11	Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Tangerang.....	26
Gambar 2. 12	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Tangerang	26
Gambar 2. 13	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Tangerang	27
Gambar 2. 14	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Tangerang	27
Gambar 2. 15	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi.....	28
Gambar 2. 16	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tangerang	28
Gambar 2. 17	Peta Bahaya Bencana Likuefaksi Kabupaten Tangerang	29
Gambar 2. 18	Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Tangerang.....	29
Gambar 2. 19	Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Tangerang	30
Gambar 2.20	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024.....	31
Gambar 2.21	Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024.....	31
Gambar 2.22	Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024	
Gambar 2.23	Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024	32
Gambar 2.24	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Per Kecamatan Tahun 2024.....	32
Gambar 2.25	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024.....	33
Gambar 2.26	Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024	34

Gambar 2.27 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 34
Gambar 2.28 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Tangerang Tahun 2024 35
Gambar 2.29 Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 35
Gambar 2.30 Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 36
Gambar 2.31 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2023 36
Gambar 2.32 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 37
Gambar 2.33 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 38
Gambar 2.34 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 38
Gambar 2.35 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 39
Gambar 2.36 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 39
Gambar 2.37 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 40
Gambar 2.38 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023 40
Gambar 2.39 Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024 42
Gambar 2.40 Positioning Matrix Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang 43
Gambar 2.41 PDRB ADHB dan Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 44
Gambar 2.42 PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 45
Gambar 2.43 Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 45
Gambar 2.44 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 46
Gambar 2.45 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 46
Gambar 2.46 Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 47
Gambar 2.47 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 47
Gambar 2.48 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 47
Gambar 2.49 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 48
Gambar 2.50 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 48
Gambar 2.51 Perbandingan Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 49
Gambar 2.52 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 49

Gambar 2.53 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024..... 50
Gambar 2.54 Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 50
Gambar 2.55 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 50
Gambar 2.56 Perbandingan Persentase PAD terhadap Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024..... 51
Gambar 2.57 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 51
Gambar 2.58 Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 52
Gambar 2.59 Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Ditangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023..... 52
Gambar 2.60 Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 52
Gambar 2.61 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024..... 53
Gambar 2.62 Prevalensi Stunting Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 53
Gambar 2.63 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 54
Gambar 2.64 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 54
Gambar 2.65 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 55
Gambar 2.66 Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024..... 55
Gambar 2.67 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024..... 56
Gambar 2.68 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 56
Gambar 2.69 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 57
Gambar 2. 70 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024..... 57
Gambar 2.71 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023..... 58
Gambar 2.72 Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023..... 58
Gambar 2.73 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 58
Gambar 2.74 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2023..... 59
Gambar 2.75 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2024 59
Gambar 2.76 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 60
Gambar 2.77 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 60
Gambar 2.78 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 60

Gambar 2.79 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 61
Gambar 2.80 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 61
Gambar 2.81 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 62
Gambar 2.82 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 62
Gambar 2.83 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 63
Gambar 2.84 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 63
Gambar 2.85 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 64
Gambar 2.86 Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 64
Gambar 2.87 Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 64
Gambar 2.88 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 65
Gambar 2.89 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 66
Gambar 2.90 Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 66
Gambar 2.91 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 67
Gambar 2.92 Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Kabupaten Tangerang dan 69
Gambar 2. 93 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 69
Gambar 2.94 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 70
Gambar 2.95 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 70
Gambar 2.96 Nilai Tukar Petani Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024 73
Gambar 2.97 Laju Inflasi Kota Tangerang (termasuk Kabupaten Tangerang) dan Nasional Tahun 2019-2024 73
Gambar 2.98 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 74
Gambar 2.99 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 74
Gambar 2.100 Perbandingan Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2024 75
Gambar 2.101 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 75
Gambar 2.102 Indeks SPBE Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024 75
Gambar 2.103 Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 77
Gambar 2.104 Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 77

Gambar 2.105 Persentase Angka Kriminalitas atau Tindak Pidana yang Tertangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 78
Gambar 2.106 Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 78
Gambar 2.107 Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 80
Gambar 2.108 Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 80
Gambar 2.109 Angka Partisipasi Murni SMP/Mts/Paket B Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 81
Gambar 2.110 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 82
Gambar 2.111 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 82
Gambar 2.112 Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 82
Gambar 2.113 Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 83
Gambar 2.114 Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SLTP Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 84
Gambar 2.115 Angka Melanjutkan (AM) dari SLTP ke SLTA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 85
Gambar 2.116 Jumlah Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 85
Gambar 2.117 Jumlah Fasilitas Pendidikan SLTP Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 86
Gambar 2.118 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 86
Gambar 2.119 Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 87
Gambar 2.120 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 87
Gambar 2.121 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 87
Gambar 2.122 Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 88
Gambar 2.123 Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 88
Gambar 2.124 Proporsi Murid Kelasi 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 88
Gambar 2.125 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 89
Gambar 2.126 Persentase Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 89
Gambar 2.127 Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 90
Gambar 2.128 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 91
Gambar 2.129 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang 91
Gambar 2.130 Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang 92
Gambar 2.131 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 92

Gambar 2.132 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang 93
Gambar 2.133 Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024..... 93
Gambar 2.134 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 93
Gambar 2.135 Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 96
Gambar 2.136 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization Kabupaten Tangerang..... 96
Gambar 2.137 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 96
Gambar 2.138 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Tangerang..... 97
Gambar 2.139 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024 97
Gambar 2.140 Persentase Balita Pneumonia yang Ditangani di Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024 98
Gambar 2.141 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2019-2024 98
Gambar 2.142 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang..... 99
Gambar 2.143 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 99
Gambar 2.144 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023..... 99
Gambar 2.145 Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 100
Gambar 2.146 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 100
Gambar 2.147 Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 101
Gambar 2.148 Cakupan Puskesmas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 101
Gambar 2.149 Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 101
Gambar 2.150 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 102
Gambar 2.151 Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 102
Gambar 2.152 Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 103
Gambar 2.153 Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 103
Gambar 2.154 Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 104
Gambar 2.155 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 104
Gambar 2.156 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Tangerang 104
Gambar 2.157 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang 106

Gambar 2.158 Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 106
Gambar 2.159 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 . 106
Gambar 2.160 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 107
Gambar 2.161 Perbandingan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 107
Gambar 2.162 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024 107
Gambar 2.163 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 108
Gambar 2.164 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 108
Gambar 2.165 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 109
Gambar 2.166 Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 109
Gambar 2.167 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 110
Gambar 2.168 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 110
Gambar 2.169 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 110
Gambar 2.170 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Tangerang 111
Gambar 2.171 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 111
Gambar 2.172 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 112
Gambar 2.173 Persentase PPKS yang Tertangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 112
Gambar 2.174 Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 113
Gambar 2.175 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 113
Gambar 2.176 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 114
Gambar 2.177 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019-2024 114
Gambar 2.178 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 114
Gambar 2.179 Besaran dan Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 115
Gambar 2.180 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 115
Gambar 2.181 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 ... 116
Gambar 2.182 Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2019-2023 116

Gambar 2.183 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Tangerang 117
Gambar 2.184 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024..... 118
Gambar 2.185 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023 118
Gambar 2.186 Jumlah Kasus Korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024..... 119
Gambar 2.187 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024..... 120
Gambar 2.188 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024..... 120
Gambar 2.189 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024..... 121
Gambar 2.190 Persentase Luasan Lahan Bersertifikat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024..... 121
Gambar 2.191 Peningkatan Indeks Kualitas Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 122
Gambar 2.192 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 123
Gambar 2.193 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 123
Gambar 2.194 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 124
Gambar 2.195 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang..... 124
Gambar 2.196 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 124
Gambar 2.197 Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021..... 125
Gambar 2.198 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024..... 125
Gambar 2.199 Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 126
Gambar 2.200 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024..... 127
Gambar 2.201 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024..... 127
Gambar 2.202 Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Gambar 2.203 Total Fertility Rate Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 129
Gambar 2.204 Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024..... 129
Gambar 2.205 Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2019-2024 130
Gambar 2.206 Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 ... 130
Gambar 2.207 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 131

Gambar 2.208 Angka Kelahiran Remaja per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 132
Gambar 2.209 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 132
Gambar 2.210 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 132
Gambar 2.211 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 133
Gambar 2.212 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 133
Gambar 2.213 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 134
Gambar 2.214 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Kabupaten Tangerang 134
Gambar 2.215 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 134
Gambar 2.216 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 135
Gambar 2.217 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 135
Gambar 2.218 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 136
Gambar 2.219 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 137
Gambar 2.220 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 138
Gambar 2.221 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 138
Gambar 2.222 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 139
Gambar 2.223 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Melalui APBD dan APBDes Tahun 2019-2024 139
Gambar 2.224 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 139
Gambar 2.225 Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024 141
Gambar 2.226 Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 141
Gambar 2.227 Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 141
Gambar 2.228 Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 141
Gambar 2.229 Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 143
Gambar 2.230 Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 143
Gambar 2.231 Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 144
Gambar 2.232 Volume Usaha Koperasi Tangerang Tahun 2019-2024 144

Gambar 2.233 Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 146
Gambar 2.234 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 146
Gambar 2.235 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 146
Gambar 2.236 Jumlah Organisasi Kepemudaan Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 147
Gambar 2.237 Jumlah Wirausahawan Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 147
Gambar 2.238 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 148
Gambar 2.239 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Tangerang 2019-2024 148
Gambar 2.240 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 148
Gambar 2.241 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 149
Gambar 2.242 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 149
Gambar 2.243 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 150
Gambar 2.244 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022 150
Gambar 2.245 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Tangerang 151
Gambar 2.246 Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 151
Gambar 2.247 Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 151
Gambar 2.248 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Arsiparis Kabupaten Tangerang 152
Gambar 2.249 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 152
Gambar 2.250 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Domestik) Asal dan Tujuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023 152
Gambar 2.251 Jumlah Tamu (Domestik dan Mancanegara) pada Usaha Akomodasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022 153
Gambar 2.252 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 154
Gambar 2.253 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 154
Gambar 2.254 Luas dan Persentase Lahan Pertanian dengan Irigasi di Kabupaten Tangerang 155
Gambar 2.255 Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 159
Gambar 2.256 Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor 159
Gambar 2.257 Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Pertanian Menurut Menurut Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 160
Gambar 2.258 Jumlah Petani Milenial di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 161

Gambar 2.259 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 161
Gambar 2.260 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 162
Gambar 2.261 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 162
Gambar 2.262 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 163
Gambar 2.263 Persentase Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 163
Gambar 2.264 Produksi Perikanan (Ton) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 164
Gambar 2.265 Konsumsi Ikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 . 2-178
Gambar 2.266 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 165
Gambar 2.267 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 165
Gambar 2.268 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Kabupaten Tangerang 2019 - 2024 166
Gambar 2.269 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Tangerang 2019 - 2024 166
Gambar 2.270 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 167
Gambar 2.271 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 168
Gambar 2.272 Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang 2019 - 2024 168
Gambar 2.273 Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 169
Gambar 2.274 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 170
Gambar 2.275 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah 170
Gambar 2.276 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024 172
Gambar 2.277 Jumlah Temuan BPK Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024 172
Gambar 2.278 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 178
Gambar 2.279 Peta Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Banten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 178
Gambar 2.280 Kegiatan Bisnis Usaha PT Mitra Kerta Raharja Tahun 2023 181
Gambar 2. 281 Kegiatan Perumda Pasar Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) dalam Revitalisasi Pasar dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tangerang 182
Gambar 2. 282 Realisasi Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 183
Gambar 2. 283 Tren Surplus/Defisit Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 184
Gambar 2.284 Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 184
Gambar 2.285 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 185

Gambar 2.286 Dana Alokasi Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 185
Gambar 2.287 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 186
Gambar 2.288 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 186
Gambar 2.289 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 187
Gambar 2.290 Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 187
Gambar 2.291 Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 ... 189
Gambar 2.292 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 189
Gambar 2.293 Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 190
Gambar 2.294 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 190
Gambar 2.295 Pembiayaan Neto Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 192
Gambar 2.296 Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 192
Gambar 2.297 Likuiditas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 194
Gambar 2.298 Solvabilitas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 195
Gambar 2.299 Aktivitas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 195
Gambar 2.300 Modal Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 196
Gambar 2.301 Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 201
Gambar 2.302 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 202
Gambar 2.303 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024 204
Gambar 2. 304 Arah Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 256
Gambar 2. 305 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 258
Gambar 2. 306 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 259
Gambar 3.1 Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, RPJPN dan RPJPD Kabupaten Tangerang 275
Gambar 3.2 Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, dan RPJPD Kabupaten Tangerang 279
Gambar 3.3 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 304

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam periode lima tahun. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 merupakan upaya dalam menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai dokumen perencanaan, sesuai Pasal 263 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sementara itu, dalam Pasal 264 ayat (4), disebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih periode 2025-2030, yaitu Mochamad Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah, telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, dengan masa bakti 5 (lima) tahun, yaitu hingga 20 Februari 2030. Sebagai pemegang mandat kepemimpinan daerah, disusunlah RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 disusun menjabarkan visi, misi, serta program prioritas Kepala Daerah untuk Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses, mencakup: (1) pendekatan teknokratik, (2) pendekatan politik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik merupakan pendekatan perencanaan dengan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan tenaga ahli untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan *bottom up – top down* merupakan pendekatan dengan

memperhatikan sinkronisasi kebijakan antar lembaga vertikal dan horizontal. Selain itu, penyusunan ini juga memperhatikan hasil Konsultasi Publik, Musrenbang, serta masukkan dari perangkat daerah. Dokumen RPJMD ini dalam prosesnya akan mengalami penyesuaian substansi mengikuti sinkronisasi kebijakan antar lembaga, evaluasi dan masukkan partisipatif dari masyarakat, dan pendekatan politis dari pokok pikiran Kepala Daerah dan anggota dewan Kabupaten Tangerang.

Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang meliputi pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Sementara itu, pendekatan spasial mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING (*Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang*)". Melalui visi pembangunan tersebut diterjemahkan ke dalam 6 (enam) misi serta 5 (lima) program prioritas pembangunan. Pada akhir kepemimpinan lima tahun kedepan diharapkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,56-8,56 persen seiring dengan peningkatan per-kapita menjadi 69,75 juta. Pertumbuhan ekonomi didukung dengan daya saing sektor unggulan yaitu perindustrian dan perdagangan-jasa serta skalabilitas ekonomi mikro (UKM, koperasi, BUMD, dan kewirausahaan) yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,67 – 4,88 persen serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,62 persen. Selain itu, fokus pembangunan lima tahun ke depan adalah peningkatan daya saing SDM yang diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 77,93. Maka dari itu, Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan adalah Kabupaten Tangerang yang Berdaya Saing dengan landasan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada keunggulan lokal Kabupaten.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomro 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

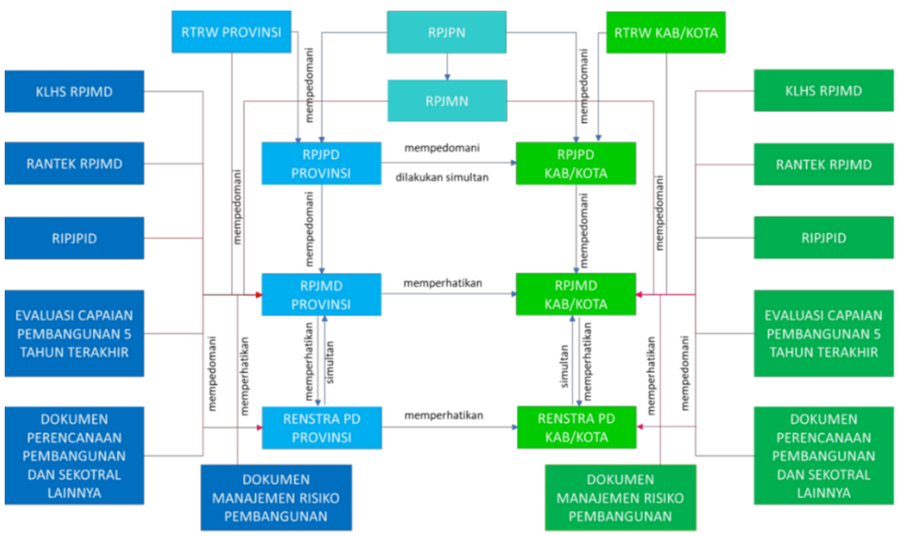
25. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang memiliki kedudukan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan pembangunan daerah. Untuk itu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2029 perlu melakukan proses sinkronisasi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal dari berbagai tingkatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 4, prinsip-prinsip dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu:

1. merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah;
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, perlu memedomani dokumen perencanaan seperti RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, serta memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, maupun dokumen perencanaan sektoral lainnya. Berikut ini keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di tingkat pusat maupun provinsi digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya
Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektor lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, serta RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 serta memperhatikan Renstra Perangkat Daerah;
2. RPJMD Kabupaten Tangerang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara simultan;
3. RPJMD Kabupaten Tangerang memperhatikan rekomendasi KLHS RPJMD; Rancangan Teknokratik RPJMD; Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID); Hasil Evaluasi Capaian Pembangunan 5 (lima) Tahun Terakhir, serta Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang;
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4.2 Tujuan

RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan;
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang penyusunan, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
Memuat 3 (tiga) Subbab yang menjabarkan kondisi dan isu strategis pembangunan daerah, yaitu (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah, menjelaskan kondisi daerah terkait aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum; (2) Gambaran Keuangan Daerah, menjelaskan kondisi keuangan daerah, yaitu gambaran ringkas kondisi keuangan daerah lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan; dan (3) Permasalahan dan Isu Strategis, menjelaskan permasalahan pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta rumusan isu strategis daerah dengan memperhatikan isu di tingkat global, nasional, dan regional.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat 2 (dua) Subbab yang menjabarkan arahan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, yaitu (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, menjelaskan visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai; dan (2) Strategi Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, menjelaskan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Memuat 2 (dua) Subbab yang terdiri dari: (1) Program Perangkat Daerah, memuat rangkaian program perangkat daerah serta indikator program menurut bidang urusan; dan (2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat penjelasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai ukuran dan/atau indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kesejahteraan, aspek layanan, dan aspek daya saing.

BAB V PENUTUP
Memuat penjelasan singkat mengenai harapan pencapaian dari dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 serta kaidah pelaksanaan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi wilayah secara detail. Analisis ini mencakup beberapa hal seperti geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, serta aspek pelayanan umum di suatu daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Selain itu, analisis gambaran kondisi daerah menjadi landasan dalam analisis isu dan permasalahan pembangunan Kabupaten Tangerang.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Geografi wilayah dan demografi merupakan landasan dalam pembangunan wilayah. Maka dari itu, dalam membangun Kabupaten Tangerang diperlukan analisis mengenai kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung lingkungan serta mengetahui kondisi pertumbuhan dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah.

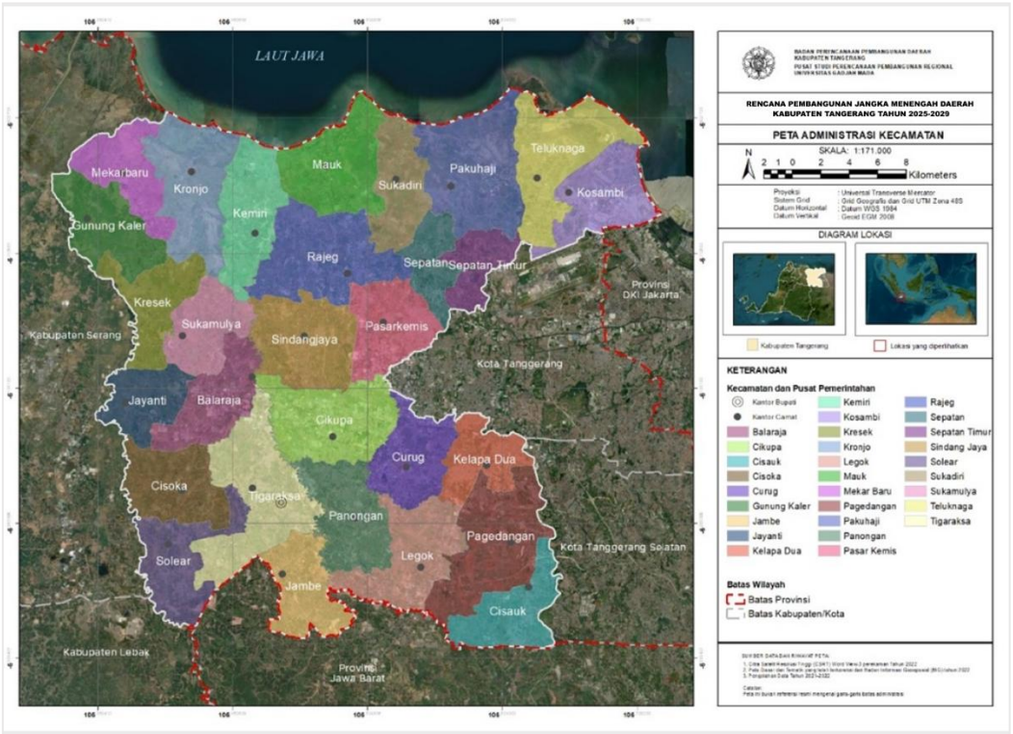
2.1.1.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

A. Karakteristik Lokasi

1. Letak Administrasi dan Geografis Wilayah

Wilayah Kabupaten Tangerang berada di koordinat 106°20’-106°44’ Bujur Timur dan 6°00’-6°21’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tangerang terletak yang strategis, berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada 9 November 2022, Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah 1.027,76 km² dengan Ibukota Kabupaten yaitu Tigaraksa Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Barat : Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak
- Sebelah Timur : Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Jakarta Timur



Gambar 2.1
Peta Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Sumber: ArcMap dan Badan Informasi Geospasial, 2023

Tabel 2.1
Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Balaraja	Balaraja	1. Cangkudu 2. Talagasari 3. Tobat 4. Sentul 5. Gembong 6. Sukamurni 7. Saga 8. Sentul Jaya
2	Jayanti	-	1. Pangkat 2. Pabuaran 3. Pasir Muncang 4. Sumur Bandung 5. Jayanti 6. Dangdeur 7. Cikande 8. Pasir Gintung
3	Tigaraksa	1. Tigaraksa 2. Kadu Agung	1. Pasir Bolang 2. Matagara 3. Pasir Nangka 4. Pete 5. Tegalsari 6. Pematang 7. Cisereh 8. Margasari 9. Cileles 10. Sodong 11. Tapos 12. Bantar Panjang
4	Jambe	-	1. Sukamanah 2. Jambe 3. Tipar Raya 4. Taban 5. Daru 6. Kutruk 7. Ranca Buaya 8. Mekarsari 9. Ancol Pasir 10. Pasir Barat
5	Cisoka	-	1. Cisoka 2. Caringin 3. Selapajang 4. Sukatani 5. Bojong Loa

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
			6. Cibugel 7. Cempaka 8. Carenang 9. Karang Harja 10. Jeungjing
	Kresek	-	1. Pasir Ampo 2. Rancaliat 3. Kemuning 4. Renged 5. Talok 6. Koper 7. Jengkol 8. Patrasana 9. Kresek
	Kronjo	-	1. Kronjo 2. Pagenjahan 3. Pasir 4. Muncung 5. Pagedangan Ilir 6. Pagedangan udik 7. Pasilian 8. Bakung 9. Blukbuk 10. Cirumpak
	Mauk	Mauk Timur	1. Mauk Barat 2. Tegal Kunir Kidul 3. Tegal Kunir Lor 4. Sasak 5. Gunung Sari 6. Kedung Dalem 7. Marga Mulya 8. Tanjung Anom 9. Jatiwaringin 10. Banyu Asih 11. Ketapang
	Kemiri	-	1. Patramanggala 2. Karang Anyar 3. Lontar 4. Kemiri 5. Ranca Labuh 6. Klebet 7. Legok Suka Maju
	Sukadiri	-	1. Sukadiri 2. Buaran Jati 3. Rawa Kidang 4. Pekayon 5. Karang Serang 6. Kosambi 7. Mekar Kondang 8. Gintung
	Rajeg	Sukatani	1. Rajeg 2. Rajeg Mulya 3. Pangarengan 4. Jambu Karya 5. Lembangsari 6. Sukamanah 7. Tanjakan 8. Tanjakan Mekar 9. Sukasari 10. Ranca Bango 11. Daon 12. Mekarsari
	Pasar Kemis	1. Sindangsari 2. Kutabumi 3. Kuta Jaya 4. Kuta Baru	1. Pasar Kemis 2. Sukamantri 3. Pangadegan 4. Gelam Jaya 5. Suka Asih
	Teluknaga	-	1. Teluknaga 2. Bojong Renged 3. Babakan Asem 4. Keboncau 5. Pangkalan 6. Kmp Melayu Tim 7. Kmp Melayu Brt 8. Muara 9. Lemo 10. Tanjung Pasir 11. Tegal Angus 12. Tanjung Burung 13. Kampung Besar
	Kosambi	1. Kosambi Barat	1. Kosambi Timur

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
		2. Salembaran Jaya 3. Dadap	2. Salembaran Jati 3. Rawa Rengas 4. Rawa Burung 5. Cengklong 6. Belimbing 7. Jati Mulya
	Pakuhaji	Pakuhaji	1. Paku Alam 2. Bonisari 3. Rawa Boni 4. Buaran Mangga 5. Buaran Bambu 6. Kalibaru 7. Kohod 8. Kramat 9. Sukawali 10. Surya Bahari 11. Kiara Payung 12. Laksana 13. Gaga
	Sepatan	Sepatan	1. Karet 2. Kayu Agung 3. Kayu Bongkok 4. Pondok Jaya 5. Pisangan Jaya 6. Mekar Jaya 7. Sarakan
	Curug	1. Curug Kulon 2. Sukabakti 3. Binong	1. Curug Wetan 2. Kadu 3. Kadu Jaya 4. Cukanggalih
	Cikupa	1. Sukamulya 2. Bunder	1. Cibadak 2. Talaga 3. Talagasari 4. Dukuh 5. Cikupa 6. Sukanagara 7. Bitung Jaya 8. Pasir Gadung 9. Sukadamai 10. Pasir Jaya 11. Budi Mulya 12. Bojong
	Panongan	Mekar Bakti	1. Ranca Iyuh 2. Peusar 3. Ranca Kalapa 4. Serdang Kulon 5. Mekar Jaya 6. Ciakar 7. Panongan
	Legok	Babakan	1. Caringin 2. Serdang Wetan 3. Babat 4. Ciangir 5. Legok 6. Palasari 7. Bojongkamal 8. Rancagong 9. Kemuning 10. Cirarab
	Pagedangan	Medang	1. Cicalengka 2. Pagedangan 3. Cijantra 4. Lengkong Kulon 5. Situ Gadung 6. Jatake 7. Cihuni 8. Kadu Sirung 9. Malang Nengah 10. Karang Tengah
	Cisauk	Cisauk	1. Mekar Wangi 2. Suradita 3. Sampora 4. Dangdang 5. Cibogo
	Sukamulya	-	1. Benda 2. Sukamulya 3. Kaliasin 4. Buniayu 5. Parahu 6. Merak 7. Bunar

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
			8. Kubang
	Kelapa Dua	1. Kelapa Dua 2. Bencongan 3. Bencongan Indah 4. Pakulonan Barat 5. Bojong Nangka	Curug Sangereng
	Sindang Jaya	-	1. Sindang Jaya 2. Wanakerta 3. Sukaharja 4. Sindangasih 5. Sindangpanon 6. Sindangsono 7. Badak Anom
	Sepatan Timur		1. Kedaung Barat 2. Lebak Wangi 3. Jati Mulya 4. Sangiang 5. Gempol Sari 6. Kampung Kelor 7. Pondok Kelor 8. Tanah Merah
	Solear	-	1. Solear 2. CIkuya 3. Cikasungka 4. Cirendeu 5. Cikareo 6. Pasanggrahan 7. Munjul
	Gunung Kaler	-	1. Gunung Kaler 2. Sidoko 3. Rancagede 4. Kedung 5. Cipaeh 6. Onyam 7. Tamiang 8. Kandawati 9. Cibetok
	Mekar Baru	-	1. Mekar Baru 2. Kedaung 3. Cijeruk 4. Waliwis 5. Klutuk 6. Jenggot 7. Kosambi Dalam 8. Gandaria

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025

2. Kondisi Topografi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 0-3%. Wilayah dengan dataran rendah berada di sisi utara Kabupaten Tangerang. Selain itu, terdapat wilayah dataran tinggi yang berada di bagian tengah ke arah selatan dengan kemiringan tanah rata-rata 0-8% menurun ke arah utara. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Tangerang didominasi dengan ketinggian wilayah 0-25 mdpl yang tersebar pada bagian wilayah Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Gunung Kaler, Kronjo, Mekarbaru, Pakuhaji, Sepatan dan Sepatan Timur. Sementara itu, pada sisi utara Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir yang memiliki garis pantai sepanjang ±50 km.

3. Geologi

Kabupaten Tangerang memiliki struktur batuan yang terbentuk dari alluvium meliputi lempung, kerikil, dan kerakal serta Tuff Banten (Banten Tuff) yang terdiri atas batu apung dan batu pasir tufaan. Wilayah utara Kabupaten Tangerang adalah daerah dengan keadaan bergelombang lemah, yang termasuk dalam kategori lahan bentukan asal pengendapan atau berjenis aluvial. Secara umum, jenis tanah di wilayah ini terdiri atas aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecokelatan, podsolik kuning, asosiasi podsolik kuning,

asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu yang kaya akan zat hara sehingga membuka peluang pengembangan pertanian dan budidaya. Jenis tanah tersebut terbentuk melalui proses pengendapan dalam sungai dan danau di daerah dataran dan cekungan. Selain itu, di wilayah dataran rendah juga dapat ditemukan jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik.

Karakteristik jenis tanah di wilayah Kabupaten Tangerang ini memiliki tekstur tanah yang didominasi oleh tekstur halus dan tekstur sedang. Namun, juga terdapat tekstur kasar seluas 3.553 Ha. Berdasarkan teksturnya, tanah di wilayah ini sangat cocok untuk digunakan sebagai kawasan budidaya pertanian dan tanaman keras.

4. Klimatologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan rata-rata temperatur suhu yang cenderung sedang dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sementara itu, jumlah curah hujan di wilayah ini berkisar pada 60,10 - 613,00 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 14 sampai 31 hari dalam satu bulan. Adapun jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember.

Tabel 2.2
Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	322,60	21	3,30
Februari	191,00	19	2,50
Maret	149,50	23	3,70
April	483,60	27	3,70
Mei	102,60	14	2,80
Juni	123,40	15	4,00
Juli	88,70	28	3,60
Agustus	234,80	31	5,70
September	76,50	30	5,50
Oktober	60,10	31	5,60
November	613,00	30	3,90
Desember	218,90	31	2,00

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata temperatur di wilayah ini berkisar antara 26,46 - 28,22℃. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai suhu 37,30℃ dan temperatur terendah mencapai 20,40℃.

Tabel 2.3
Kondisi Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Bulan	Suhu (℃)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,10	27,08	34,90
Februari	22,80	27,28	35,20
Maret	21,40	27,05	34,40
April	23,00	27,58	35,60
Mei	23,40	28,22	35,40
Juni	22,00	27,48	34,80
Juli	19,70	26,46	34,20
Agustus	20,80	27,33	34,80
September	21,30	27,59	36,30
Oktober	20,40	28,10	37,30
November	22,30	27,26	34,90
Desember	22,60	26,93	33,60

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Tabel 2.4
Kondisi Kelembapan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Bulan	Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	53,00	85,06	100,00
Februari	45,00	85,08	99,00
Maret	48,00	86,23	99,00
April	42,00	86,54	99,00
Mei	45,00	82,52	99,00
Juni	40,00	82,56	99,00
Juli	55,00	81,42	98,00
Agustus	70,25	76,91	88,50
September	66,75	77,10	92,25
Oktober	61,75	74,27	85,25
November	63,00	83,15	92,75
Desember	69,25	83,15	95,50

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata kelembapan di wilayah ini berkisar antara 74,27 – 86,54%. Kelembapan maksimum di wilayah ini mencapai 100% yang terjadi di bulan Januari. Sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan Oktober.

5. Hidrologi

Sumber daya air Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air permukaan dan air tanah. Wilayah Kabupaten Tangerang potensi cadangan air tanah yang tinggi, meskipun di Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga, dan Kosambi mengalami intrusi air laut dan eksploitasi untuk kegiatan industri. Sementara itu, sumber air permukaan berasal dari aliran sungai yang memiliki debit relatif tinggi meski berfluktuasi pada musim kemarau. Namun demikian, kualitas air yang berasal dari aliran sungai ini mulai menurun karena pencemaran yang merupakan akibat dari kegiatan sehari-hari masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Kondisi pencemaran tersebut juga memerlukan perhatian khusus karena tingginya pertumbuhan penduduk dan kegiatan masyarakat dapat berakibat pada peningkatan kebutuhan air.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, Kabupaten Tangerang memiliki kawasan resapan air seluas 1.555 Ha yang meliputi daerah aliran sungai Cidurian, Ciujung, Cubareo, dan Cimanceuri. Keempat DAS tersebut keberadaannya harus dijaga untuk menjaga keseimbangan alam dan ketersediaan air di wilayah ini. Sumber air permukaan di wilayah ini terdiri atas sungai, situ, rawa, ataupun embung.

Wilayah Kabupaten Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yang membentuk daerah aliran sungai yang cukup luas. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Cisadane dengan debit tahunan mencapai 77.644 m^3/detik, Sungai Cidurian dengan debit maksimum pada 1999 mencapai 21 m^3/detik, dan Sungai Cimanceuri dengan debit rata-rata hingga 9,3042 L/detik. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 38 sungai kecil yang melintas di wilayah ini. Sumber air lain yang dimanfaatkan adalah situ dan rawa. Kabupaten Tangerang memiliki 6 situ dan 12 rawa yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain itu, terdapat juga sumber air baku permukaan lain, yaitu Embung Gagak dan Embung Cigarukgak. Embung Gagak seluas 86.460 m^2 di Kampung Kebon Cabe Desa Gagak Kecamatan Pakuhaji yang memiliki debit hingga 45.5 L/detik. Sementara itu, Embung Cigarukgak di Desa Kemuning Kecamatan Kresek memiliki luas 1.770.000 m^2 dan mampu menghasilkan air dengan debit hingga 180 L/detik. Kedua embung tersebut memiliki peran sebagai pengelola air hujan dan sumber air di wilayah sekitar.

Berdasarkan data dari hasil kajian RISPAM, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai potensi cadangan air tanah dengan debit 3 -10 L/detik/Km^2. Selain itu, wilayah ini juga memiliki lima cekungan air bawah tanah (CABT) yang sangat potensial untuk dimanfaatkan, yaitu potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m^3/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m^3/tahun. Namun demikian, akibat penggunaan yang dilakukan oleh pelaku industri, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri untuk menjaga cadangan air di wilayah Kabupaten Tangerang.

6. Penggunaan Lahan

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian berupa sawah irigasi sebesar 50.709,86 Ha atau 49,52%. Sementara itu, wilayah terbangun di Kabupaten Tangerang didominasi oleh kawasan permukiman, baik permukiman perkotaan maupun permukiman perkotaan seluas 18.426,6 Ha atau 18%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menyebabkan tingginya alih fungsi lahan di wilayah ini. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri utamanya menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang

No	Guna Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	57.431	56,08
2	Kebun Campuran	16.835	16,44
3	Perkampungan	14.874	14,52
4	Perairan Darat	5.919	5,78
5	Perkebunan	2.183	2,13
6	Tegalan/Ladang	2.049	2
7	Jasa, Industri, dan Pergudangan	1.785	1,74
8	Sungai/Danau	1.126	1,1
9	Pertambangan	111	0,11
10	Tanah Terbuka	93	0,09
11	Padang	8	0,01

Sumber: RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kawasan lindung dan budidaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

1) Kawasan Lindung
   Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki peruntukan preservasi. Kabupaten Tangerang memiliki kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung yang berupa hutan bakau di sisi pantai utara seluas 1.555,32 Ha, kawasan resapan air seluas 1.555 Ha, kawasan sempadan pantai sebesar 325 Ha, kawasan sempadan sungai dengan luas 529 Ha, dan kawasan sekitar danau dan situ seluas 310 Ha. Masing-masing guna lahan tersebut memiliki peranan dan ketentuan pemanfaatan tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.
   Hutan lindung di Kabupaten Tangerang berlokasi di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi. Keberadaan hutan lindung ini pengelolaan dan pengembangannya diatur dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, salah satu program yang dikembangkan adalah rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada Kawasan Peruntukan Lindung.
2) Kawasan Budidaya
   Kabupaten Tangerang memiliki kawasan budidaya yang terdiri atas kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan.

B. Peran Strategis Daerah

Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Banten berada pada posisi geostrategis bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai lalu lintas perdagangan nasional dan internasional sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002. Dalam cakupan lebih makro, posisi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari penyangga Jakarta dan Jabodetabek menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan sektor perindustrian dan sektor jasa. Hal ini selaras dengan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Tangerang yaitu Industri Pengolahan dan Konstruksi)dan jasa keuangan yang berpeluang tumbuh cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah.

Kabupaten Tangerang memegang peran strategis dalam kontribusi infrastruktur terhadap wilayah sekitarnya, khususnya bagi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan secara lebih luas Provinsi Banten serta Jabodetabek. Peran ini didorong oleh posisi geografis Kabupaten Tangerang sebagai pintu gerbang Jakarta dan pusat pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pembangunan kewilayahan Pulau Jawa khususnya Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian Aglomerasi Jabodetabek dan Provinsi Banten, yaitu Pengembangan Jakarta-Tangerang *International Business Corridor* & Jakarta *Global City Urban Tourism* (Central-South), *Northern Coast New Economic Hub & Jakarta Global City Urban Tourism* (*North*), serta Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten. Pembangunan kawasan strategis tersebut ditunjang dengan pengembangan infrastruktur terpadu yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jalan Tol Merak-Jakarta, akses *double track* kereta api, MRT Balaraja-Cikarang, dan lain sebagainya. Hal tersebut menciptakan interaksi antar wilayah yang dapat menumbuhkan fenomena interdependensi. Fenomena tersebut mampu memicu pertumbuhan wilayah, *backwash effect,* dan *trickling down* yang membentuk hubungan sinergis

antar daerah. Kabupaten Tangerang tumbuh cepat melalui penyediaan infrastruktur, pusat kegiatan, dan permukiman. Maka dari itu, posisi strategis Kabupaten Tangerang menjadi potensi *Economic Engine* pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang dengan segala dinamika pembangunan dan industrinya, memegang peran strategis yang signifikan dalam kontribusi lingkungan hidup terhadap wilayah sekitarnya. Sebagai salah satu pusat industri dan permukiman padat di Jabodetabek, Kabupaten Tangerang menghasilkan volume limbah dan sampah yang sangat besar. Peran strategisnya terletak pada upaya pengelolaan limbah ini agar tidak mencemari wilayah sekitarnya dengan mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, termasuk tempat pemrosesan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan juga inisiatif pengurangan sampah dari sumbernya. Selain itu, melalui penerapan teknologi pengolahan limbah industri dan pengawasan ketat untuk mencegah pencemaran sungai dan udara yang dapat meluas dampaknya hingga ke daerah hilir dan sekitarnya. Sungai Cisadane sebagai salah satu sumber air baku Kabupaten Tangerang dan sekitarnya, sangat penting diperhatikan dalam upaya pencegahan pencemaran dari limbah domestik dan industri. Pengelolaan tata air, normalisasi sungai, dan pemeliharaan situ (danau keci) berkontribusi pada sistem pengendalian banjir, apalagi juga drainase dan serapan air di Kabupaten Tangerang buruk, maka risiko banjir di daerah hilir dan sekitarnya akan meningkat. Peran strategis lainnya dalam pelestarian ekosistem pesisir di bagian utara Kabupaten Tangerang juga sangat strategis. Konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove di pesisir Kabupaten Tangerang penting untuk mencegah abrasi pantai, menjaga keanekaragaman hayati laut, dan menyediakan habitat alami yang juga berfungsi sebagai penyangga ekologis bagi ekosistem pesisir regional. Dengan demikian, apa pun yang terjadi di Kabupaten Tangerang, baik positif maupun negatif dalam hal pengelolaan lingkungan, akan memiliki efek berantai dan signifikan terhadap kualitas lingkungan di wilayah sekitarnya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas batas administrasi dalam isu-isu lingkungan.

2.1.1.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan wilayah yang terdiri atas kawasan hutan lindung dengan luas 1.555,32 Ha yang meliputi Kecamatan Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Kecamatan, dan Kosambi serta kawasan resapan air dengan luas 1.555 Ha yang berada di hulu DAS Cidurian, Ciujung, Cibareo, dan Cimanceuri. Sementara itu, kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai (325 Ha), sempadan sungai (559 Ha), dan kawasan sekitar situ/danau atau waduk (310 Ha). Adapun kawasan cagar budaya tersebar dalam 19 lokasi.

Kawasan peruntukan budidaya di Kabupaten Tangerang terdiri atas 8 (delapan) kawasan yang meliputi kawasan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, serta transportasi. Kawasan pertanian terdiri atas 14.094 Ha kawasan tanaman pangan dan 49 Ha kawasan peternakan. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap dan 151 Ha kawasan perikanan budidaya. Selanjutnya, kawasan pertambangan dan

energi terdiri atas kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 95 Ha. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Tangerang memiliki luas 14.878 Ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Adapun peruntukan pariwisata Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 3 yakni pariwisata alam, budaya, dan buatan. Kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 2 yakni kawasan permukiman perkotaan dengan luas 66.543 Ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 2.900 Ha.

Meskipun terjadi konversi lahan yang masif, beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang, terutama di bagian selatan dan barat, masih memiliki potensi pertanian yang dapat dipertahankan dan dikembangkan. Sementara itu, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki berbagai potensi pengembangan wilayah. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang, wilayah Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk direncanakan sebagai kawasan strategis *dryport* dengan kegiatan utama meliputi transportasi dan pergudangan. Selain itu, kawasan reklamasi seluas 9.000 Ha di pantai utara direncanakan dikembangkan sebagai kawasan perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri.

Dari gambaran potensi sumber daya alam di atas, meskipun Kabupaten Tangerang lekat dengan citra industri dan urbanisasi, namun memiliki keunggulan komparatif untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

2.1.1.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

A. Kapasitas D3TLH Penyediaan Pangan

Daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan dalam pemanfaatan ruang difokuskan pada kawasan budidaya pertanian pangan. Ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, serta peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi yang mengurangi kualitas lingkungan. Analisis daya dukung dan daya tampung pangan dilakukan dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta status ambang batas daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah. Hasil analisis menunjukkan Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan daya dukung lahan, dengan 97.944,52 Ha atau 96% lahan terlampaui yang menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan penduduk.

B. Daya Dukung Daya Tampung Air

Daya dukung dan daya tampung air ini ditentukan oleh kinerja jasa lingkungan hidup yang mencakup bentang alam, vegetasi alami, dan penutupan lahan. Daya dukung dan daya tampung air dipengaruhi oleh ketersediaan dan kebutuhan air. Saat ini, ketersediaan air di wilayah tersebut mencapai 1.123.896.242,78 m^3/tahun, sementara kebutuhan air mencapai 1.797.028.714,27 m^3/tahun. Ketersediaan maupun kemampuan lahan dalam penyediaan air didominasi oleh lahan yang telah terlampaui seluas 84.338,35 hektar atau 83% dari total luas daerah yang menunjukkan lahan tersebut berada dalam kategori krisis air, terutama di wilayah utara dan barat.

C. Jasa Ekosistem Lingkungan Hidup

1. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Kondisi pengaturan tata air dan pengendalian banjir di Kabupaten Tangerang didominasi oleh jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir yang rendah sebesar 57% (2.785 ha). Sebanyak 34% luas lahan (1.688 ha)

dikategorikan golongan kelas sangat tinggi, dan kurang dari 1% (7 ha) merupakan kelas sedang.

2. Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah

Kondisi pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Tangerang didominasi jasa ekosistem pada kelas rendah sebesar 54% (2.657 ha). Sementara itu, sebesar 1% atau 45 ha lahan, merupakan jasa ekosistem dengan kelas sangat rendah.

Dominasi jasa ekosistem di kelas rendah tercermin pada keberadaan TPA Jatiwaringin yang sebelumnya menjadi lokasi pemrosesan limbah domestik di Kabupaten Tangerang. Namun, pada bulan Mei 2025, TPA ini ditutup secara permanen oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena belum dilakukannya peralihan dari sistem *open dumping*. Praktik *open dumping* menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk temuan kandungan logam berat yang melebih ambang batas di hulu Kali Cirarab. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah membutuhkan intervensi kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan.

3. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Dominasi penyediaan air bersih di Kabupaten Tangerang saat ini berada pada kelas sangat rendah dengan persentase 57% (2.811 ha), sementara penyediaan air bersih kelas sangat tinggi hanya mencapai 4% dari luas wilayah (186 ha).

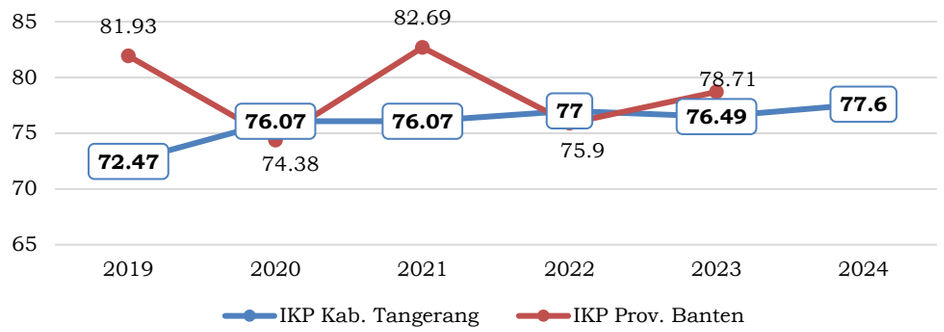
4. Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana

Perlindungan dan pencegahan bencana di Kabupaten Tangerang didominasi oleh wilayah dengan kelas rendah dan tinggi. Jasa ekosistem pada kelas rendah mencapai 54% (2.653 ha) dan 27% (1.308 ha) pada kelas tinggi.

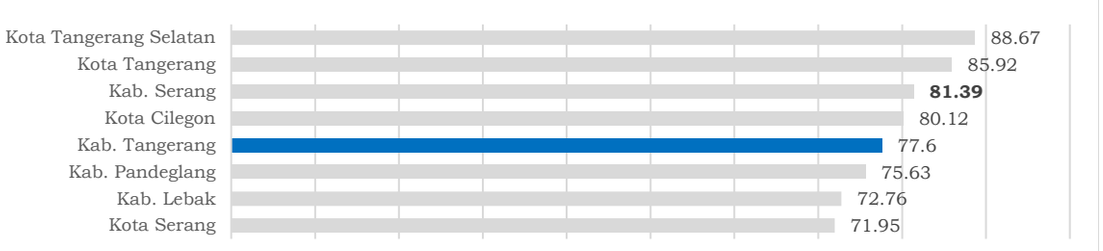
2.1.1.4 BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN

A) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di wilayah tertentu. IKP terdiri atas ketersediaan, keterjangkauan/aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan.



Gambar 2.2
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 - 2024
Sumber: Publikasi Indeks Ketahanan Pangan

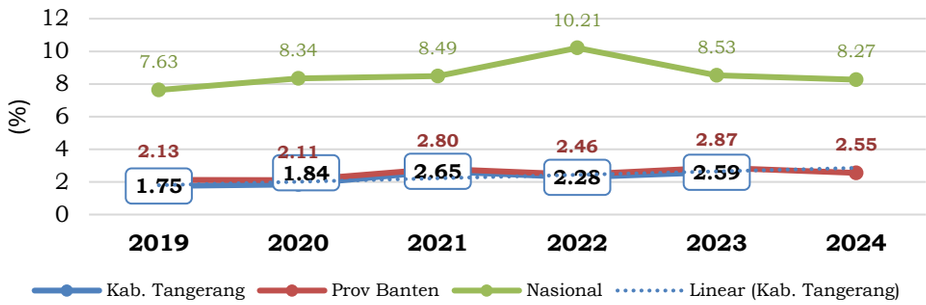


Gambar 2.3
Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Publikasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023

Capaian IKP Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 76,49 dan capaian ini lebih rendah dibandingkan IKP Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKP Kabupaten Tangerang tahun 2024 menempati peringkat ke-empat terendah. Di tahun 2024, capaian tersebut meningkat menjadi sebesar 77,6. Dalam enam tahun terakhir, IKP Kabupaten Tangerang cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2019-2024. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan Kabupaten Tangerang semakin baik meski sempat stagnan pada tahun 2021.

B) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.



Gambar 2.4
Perbandingan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 2,59 dan capaian ini lebih baik dibandingkan Provinsi Banten (2,87) dan nasional (8,27). Akan tetapi, merujuk pada tren dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (semakin rendah/buruk). Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kecukupan pangan yang bergizi dan berkelanjutan.

C) Penggunaan Listrik per Kapita

Penggunaan listrik per kapita menunjukkan konsumsi listrik dari aktivitas perekonomian, aktivitas rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, pelanggan listrik di Kabupaten Tangerang meningkat dengan rata-rata 11,9% per tahun. Hal ini selaras dengan penggunaan listrik yang juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk optimalisasi pemenuhan listrik serta transisi untuk penggunaan EBT sebagai sumber energi listrik alternatif di Kabupaten Tangerang.

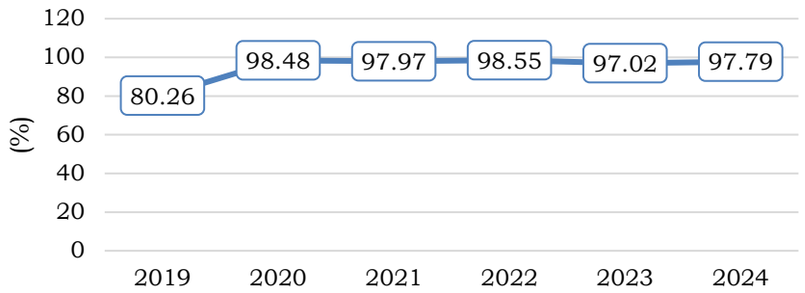
Tabel 2.6
Penggunaan Listrik per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Tahun	Penggunaan Listrik (KWh)*	Pelanggan Listrik	Penggunaan Listrik per Kapita (KWh)
2019	6.114.278.154,0	917.146,0	1.666,7
2020	5.851.133.660,0	969.308,0	1.509,1
2021	6.430.657.471,0	1.024.463,0	1.569,3
2022	6.824.099.764,0	1.082.241,0	1.576,4
2023	8.557.188.168,2	1.414.477,0	1.512,4
2024	4,198,706,165	1,423,968	11.794

Keterangan
*) Penggunaan Listrik (KWh) = Listrik yang Terjual (KWh) - Susut Hilang (KWh)
**) Penggunaan Listrik per Kapita (KWH) = Pengguna Listrik (KWh) / [Pelanggan Listrik (x4 dengan asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 jiwa)]
Sumber : BPS Provinsi Banten dan Olahan Penyusun (2024)

D) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Penyediaan air di Kabupaten Tangerang terukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak. Persentase rumah tangga berakses air minum layak terus meningkat drastis pada tahun 2020. Sedangkan pada 2020-2024 persentase tersebut cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Tangerang telah terlayani air minum layak, meski terdapat beberapa rumah tangga yang belum berakses air minum layak.

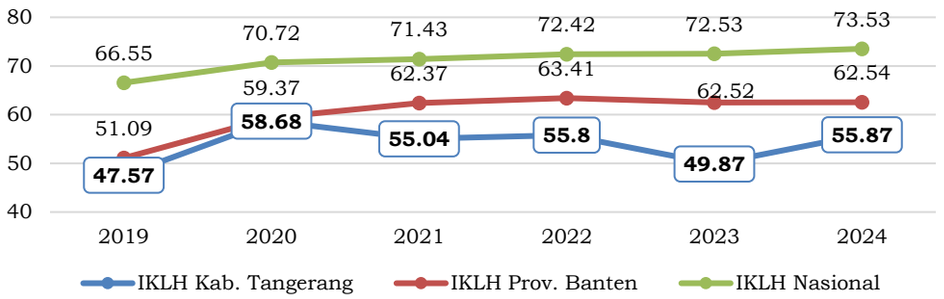


Gambar 2.5
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

2.1.1.5 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

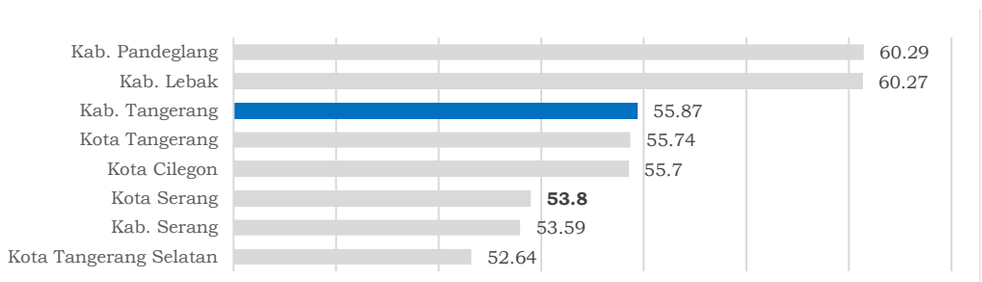
A) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



**Menggunakan metode perhitungan lama*

Gambar 2.6
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Buku IKLH Menteri KLHK 2015, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dan Tangerang Satu Data (diolah)



Gambar 2.7
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Perhitungan Baru) Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

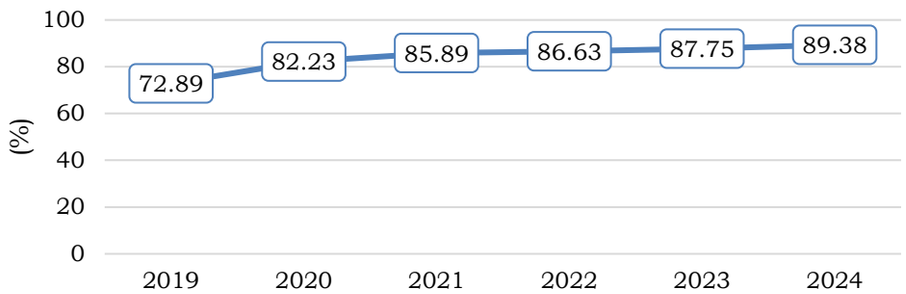
Pada tahun 2023, IKLH memiliki komponen perhitungan baru, yaitu (1) pada IKU berupa penambahan parameter PM 2.5; (2) pada IKA berupa perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-NA; serta (3) pada IKL berupa perubahan klasifikasi tutupan lahan dan memasukkan

faktor koreksi lahan gambut. Dengan konversi rumus baru, capaian IKLH Kabupaten Tangerang tahun 2024 adalah 55,87 dengan sub komponen IKU sebesar 73,33; IKA sebesar 55,69; serta IKL sebesar 23,86. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKLH Kabupaten Tangerang termasuk dalam ketiga terendah. Berdasarkan dokumen Profil IKLH, dijabarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian IKLH Kabupaten Tangerang yaitu peningkatan pemantauan kualitas udara, meningkatkan pelayanan IPAL domestik dan industri, pemeliharaan tanaman mangrove, dan lain sebagainya.

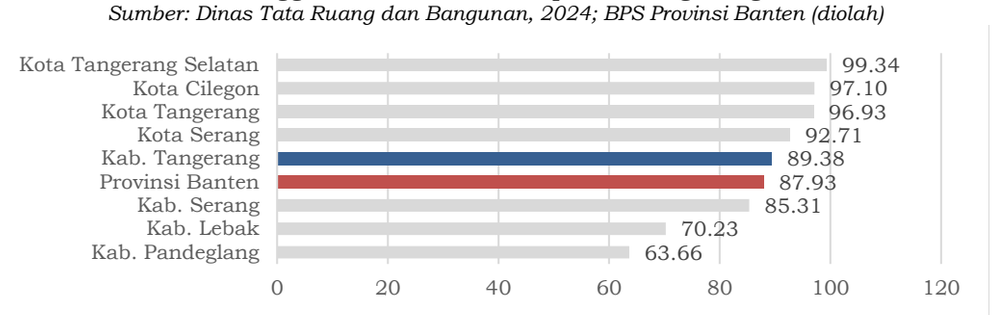
Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketahanan terhadap ancaman krisis iklim. Ancaman krisis iklim menjadi hal penting dalam arahan pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan berita menunjukkan ancaman krisis iklim di Kabupaten Tangerang yaitu El nino musim kemarau panjang dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir Tangerang.

B) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan rumah tangga. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki akses sanitasi yang baik. Pada tahun 2024, persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 89,38%. Pada kurun waktu 2019-2023, persentase rumah tinggal berakses sanitasi mengalami peningkatan yang mengindikasikan kualitas kebersihan di wilayah ini semakin meningkat. Meskipun begitu, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, capaian Kabupaten Tangerang terbilang masih cukup rendah, yaitu berada di posisi 4 terendah.



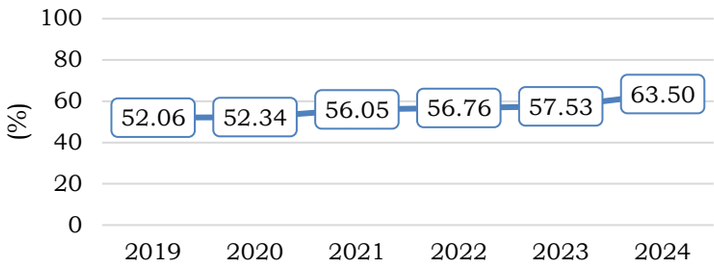
Gambar 2.8
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024; BPS Provinsi Banten (diolah)



Gambar 2.9
Perbandingan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

C) Timbulan Sampah yang Terkelola

Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2019-2024), tren menunjukkan peningkatan persentase timbulan sampah yang terkelola di Kabupaten Tangerang dan pada tahun 2023 mencapai 57,53% dan capaian 2024 sebesar 63,50%. Akan tetapi, capaian ini masih jauh dari yang diharapkan 100% timbulan sampah yang terkelola.



Gambar 2.10
Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

Tabel 2.7
Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang

Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah (unit)	Timbulan Sampah yang Dikelola (ton/tahun)
Bank Sampah	102	732,46
TPST 3R	36	22.985,58
TPA (TPA Jatiwaringin)	1	498.590,00
	Jumlah	522.308,04

Sumber: Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

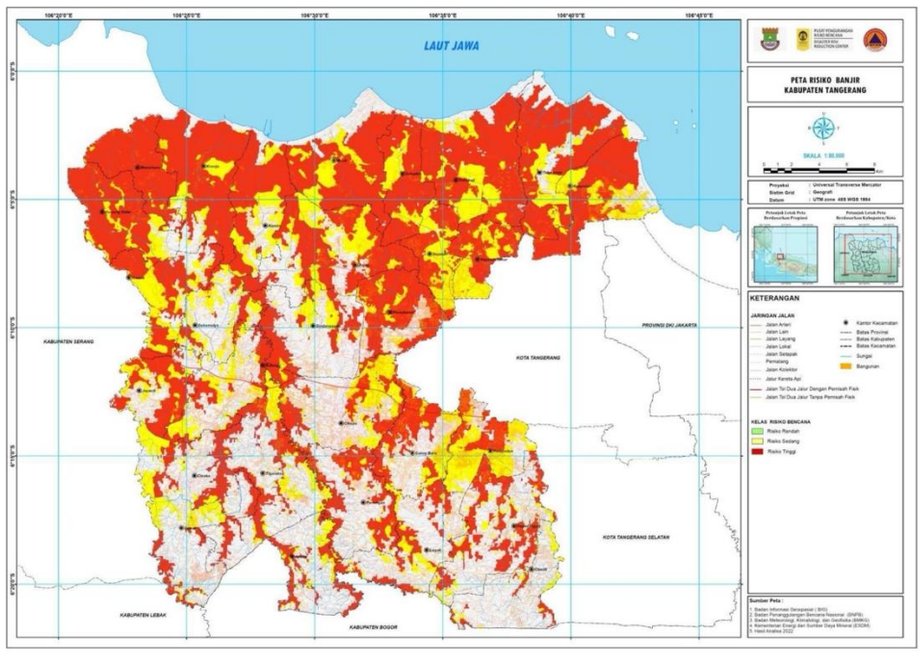
Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang dijelaskan bahwa rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah (tahun 2017-2019) stagnan pada angka 941 km^2. Sementara itu dari sisi armada sampah yang dapat mengangkut 2.925 ton/hari atau 51% dari total sampah yang ada. Maka dari itu diperlukan langkah dalam penanganan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS 3R, hingga layanan persampahan skala regional yaitu TPA.

2.1.1.6 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

3) Kebencanaan

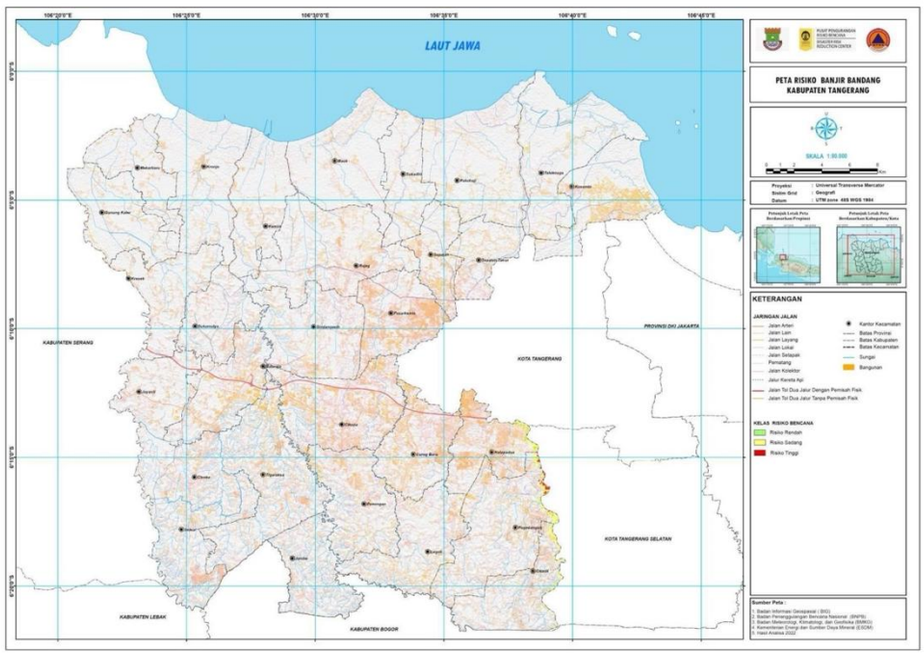
Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi, terutama terkait gempa bumi. Selain itu terdapat beberapa potensi kebencanaan seperti tsunami, banjir, dan kekeringan. Gempa bumi berpotensi terjadi di seluruh wilayah, sementara tsunami mengancam pesisir pantai utara, seperti Kecamatan Kronjo, Kemiri, dan Mauk. Banjir rob dan kekeringan juga menjadi ancaman, dipicu oleh perubahan siklus iklim global. Berdasarkan data InaRisk 2023, tingkat kebencanaan di Kabupaten Tangerang dikategorikan dalam tiga kelas bahaya: rendah, sedang, dan tinggi, yang mencakup bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan, likuefaksi, tsunami, abrasi, dan sebaran multibahaya.

- Bencana Banjir
  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya banjir dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa sebagian besar wilayah memiliki dampak dan risiko bahaya banjir dengan klasifikasi tinggi seluas 34.891,52 hektar yang cenderung berdampak pada kawasan permukiman perkotaan mencapai 17.372,71 hektar. Selain itu bahaya banjir juga berdampak pada kawasan tanaman pangan dan kawasan peruntukan industri.



Gambar 2. 11
Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Tangerang
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

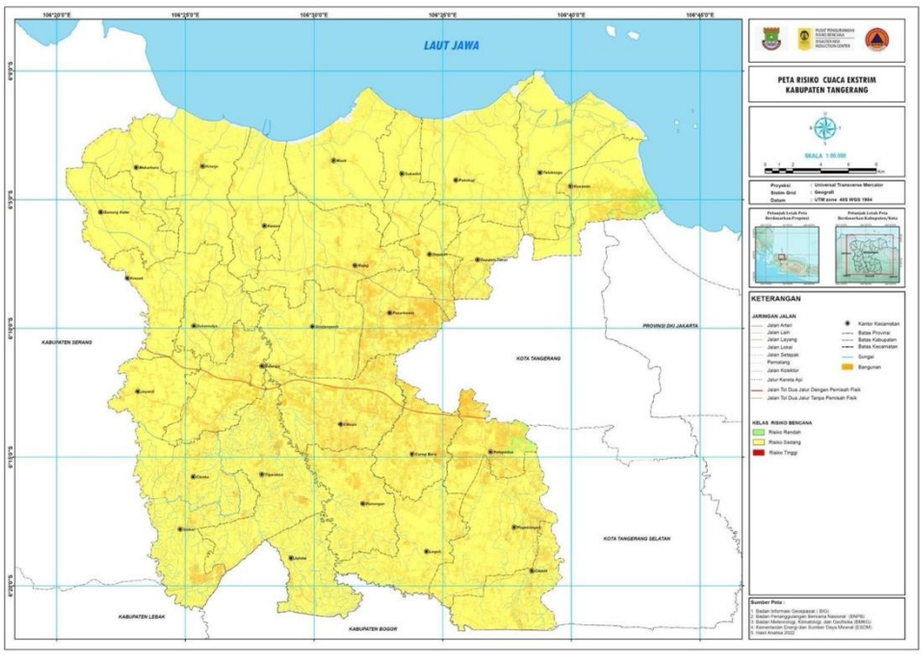
- Bencana Banjir Bandang
  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya banjir bandang dengan pola ruang, diketahui bahwa Kabupaten Tangerang memiliki dampak dan risiko bahaya banjir bandang dengan klasifikasi tinggi seluas 142,86 hektar, sedang seluas 90,42 hektar, dan rendah seluas 27,61 hektar dengan kecenderungan berdampak pada kawasan permukiman perkotaan seluas 76,87 hektar.



Gambar 2. 12
Peta Risiko Bencana Banjir Bandang Kabupaten Tangerang
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

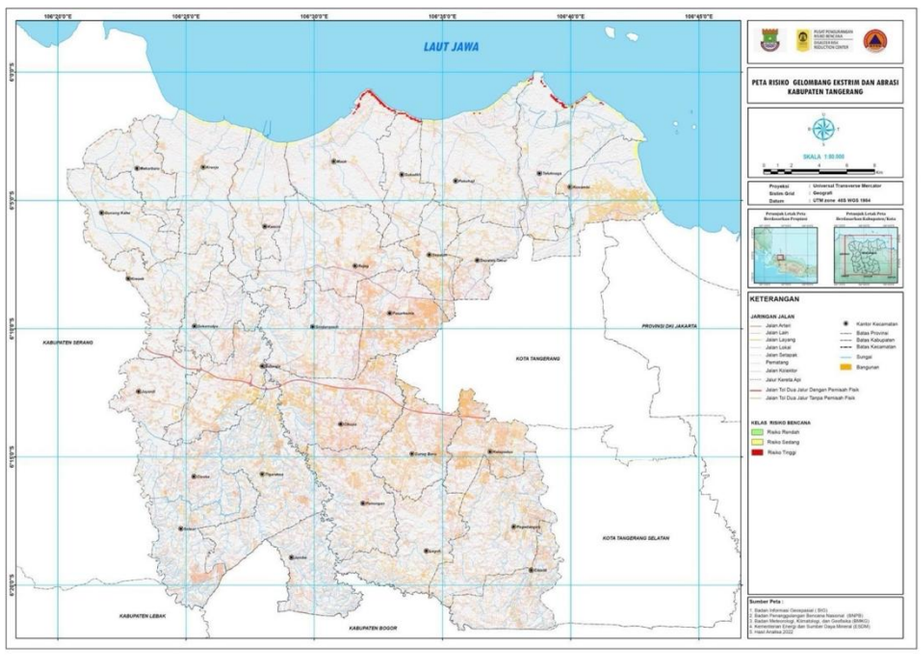
- Bencana Cuaca Ekstrem
  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya cuaca ekstrem dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman

perkotaan akan sangat terdampak dari adanya potensi bahaya cuaca ekstrem dengan luas 65.928,34 hektar, diikuti kawasan peruntukan industri dan kawasan tanaman pangan.



Gambar 2. 13
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Tangerang
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

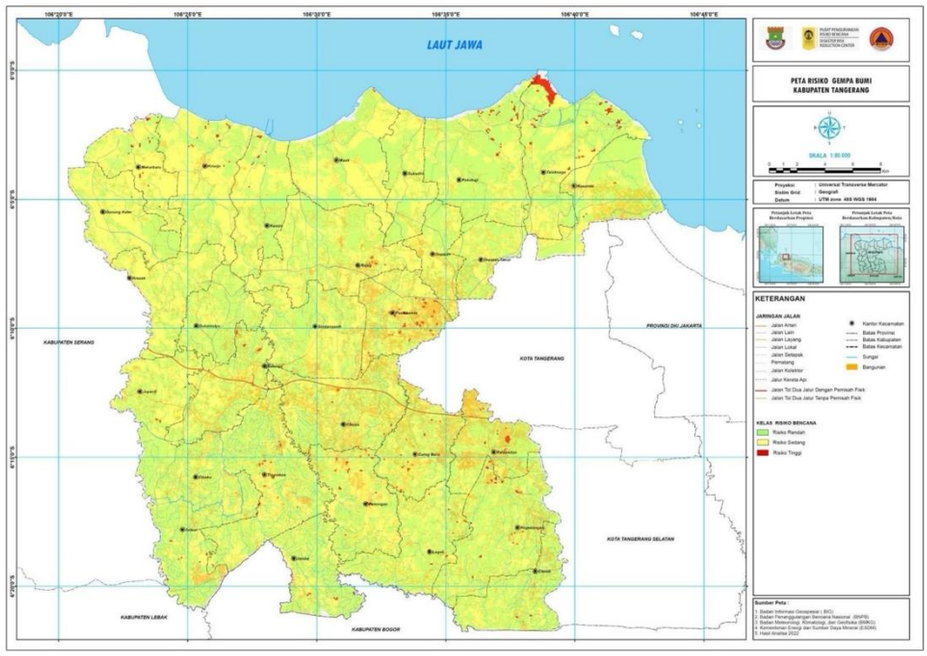
- Bencana Gelombang Ekstrem
  Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir di wilayah utara yang berpotensi mengalami bahaya gelombang ekstrem. Dampak dari potensi gelombang ekstrem dan abrasi paling besar terjadi di kawasan lindung dengan klasifikasi rendah yang luasnya mencapai 291,66 hektar, sedangkan dampak tertinggi terdapat di kawasan permukiman perdesaan seluas 83,92 hektar.



Gambar 2. 14
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Tangerang
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

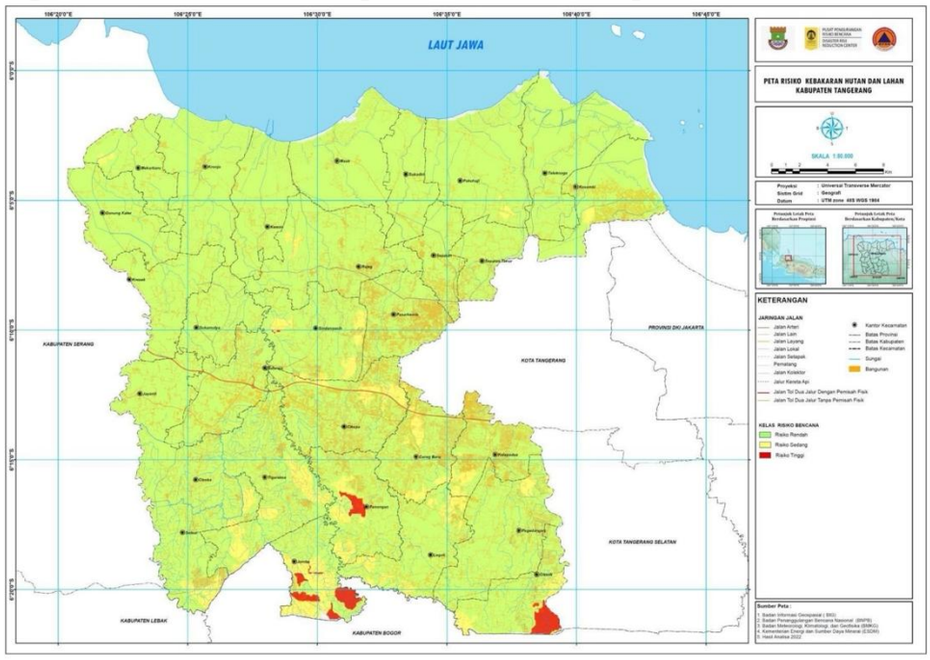
- Bencana Gempa Bumi
  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya gempa bumi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa wilayah yang

terdampak dengan status bahaya gempa bumi tinggi memiliki luasan paling kecil. Sebagian besar berada dalam kondisi bahaya gempa bumi rendah hingga sedang, terutama kawasan permukiman perkotaan yang memiliki klasifikasi sedang mencakup area seluas 48.136,67 hektar.



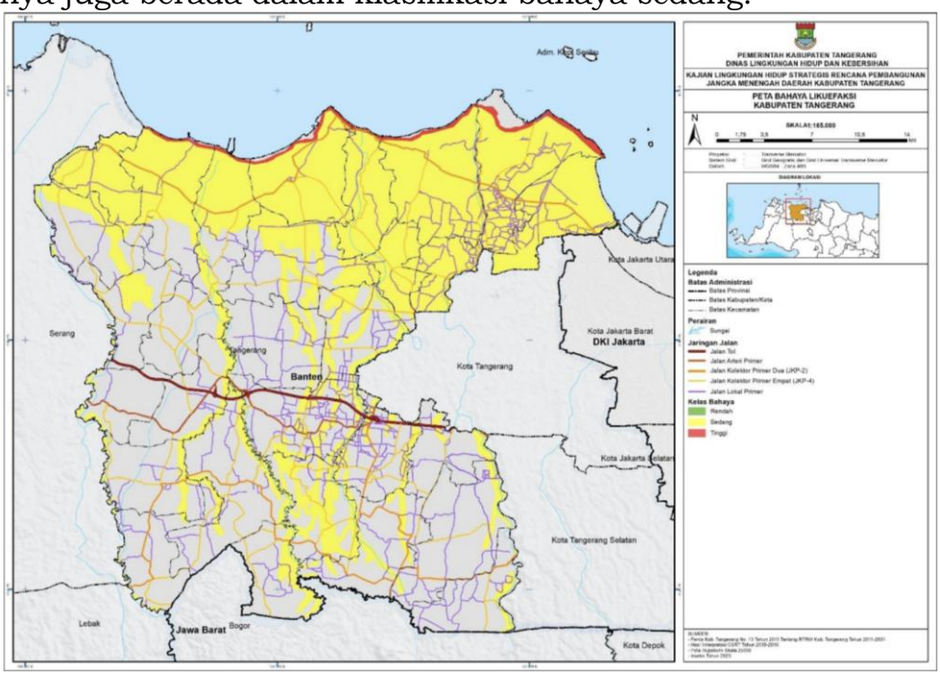
Gambar 2. 15
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

- Bencana Kebakaran Hutan
  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya kebakaran hutan dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan industri memiliki nilai bahaya tinggi mencapai 8,76, sementara sebagian besar area yang terdampak berada pada klasifikasi bahaya rendah hingga sedang, termasuk kawasan permukiman dan perkotaan.



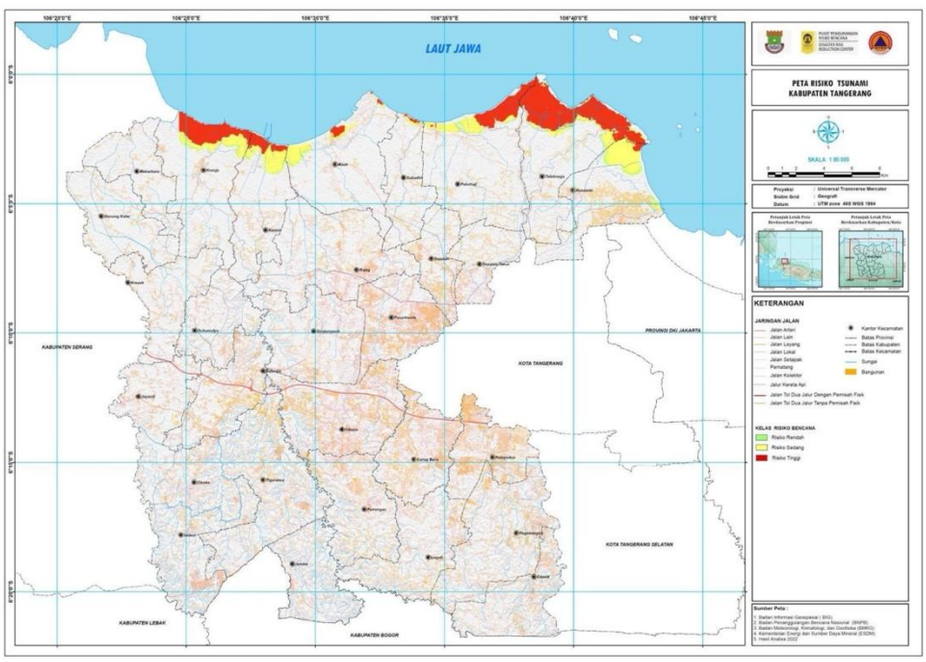
Gambar 2. 16
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tangerang
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

- Bencana Likuefaksi
  Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya likuefaksi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman perkotaan memiliki luas terbesar dalam klasifikasi bahaya sedang, yaitu 25.378,40 hektar. Sementara itu, sebagian besar kawasan lainnya juga berada dalam klasifikasi bahaya sedang.

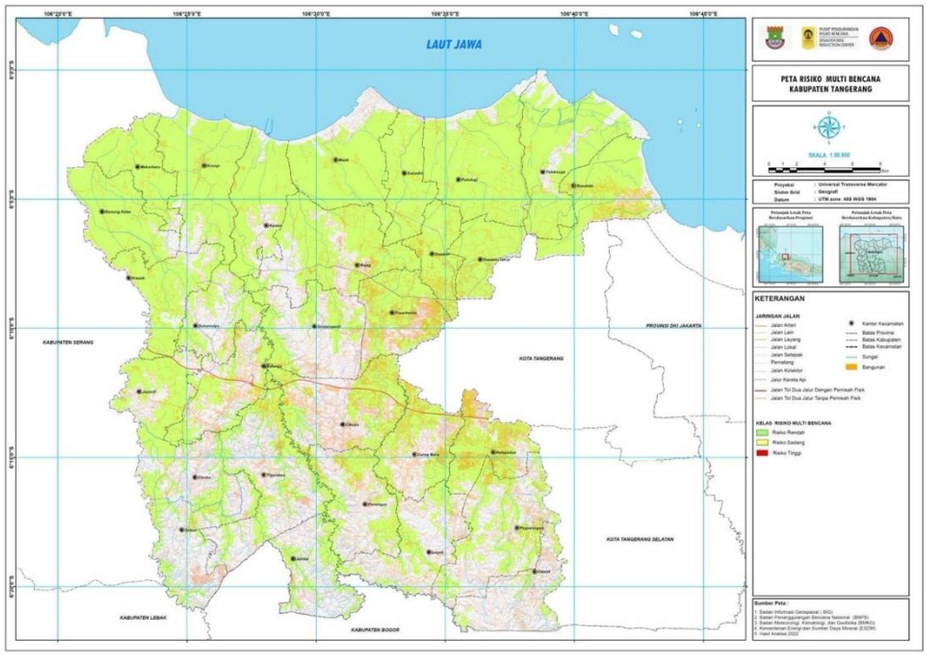


Gambar 2. 17
Peta Bahaya Bencana Likuefaksi Kabupaten Tangerang
Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

- Bencana Tsunami
  Secara administratif, wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir dengan risiko tsunami yang relatif rendah. Berdasarkan analisis, kawasan yang terdampak memiliki klasifikasi indeks bahaya rendah. Namun, ada beberapa area yang terkena dampak cukup luas, seperti kawasan hutan lindung seluas 341,79 hektar dan kawasan permukiman perkotaan seluas 264,55 hektar.



Gambar 2. 18
Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Tangerang
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2. 19
Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Tangerang
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

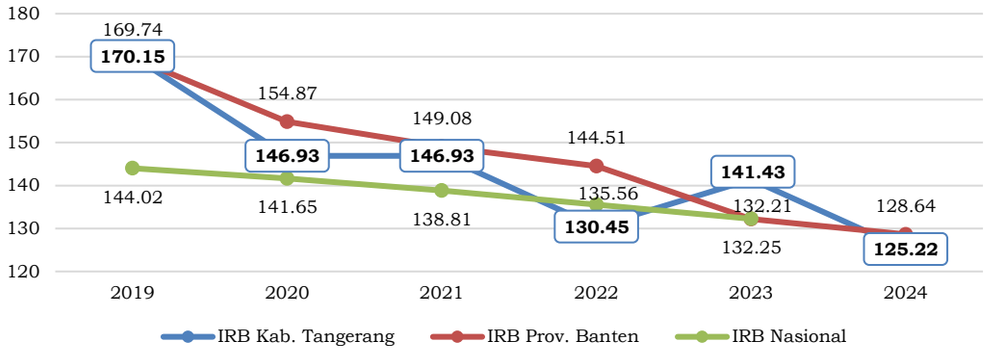
1) Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Pembangunan yang terus berkembang di Kabupaten Tangerang akan mempengaruhi lingkungan, terutama terkait dengan risiko bencana sehingga diperlukan *overlay* bahaya bencana dengan pola dan struktur ruang. Saat ini, perkembangan pola ruang di Kabupaten Tangerang akan sangat dipengaruhi oleh pembangunan tersebut, dan beberapa proyek pembangunan diproyeksikan akan terpengaruh oleh perubahan dalam pola ruang.

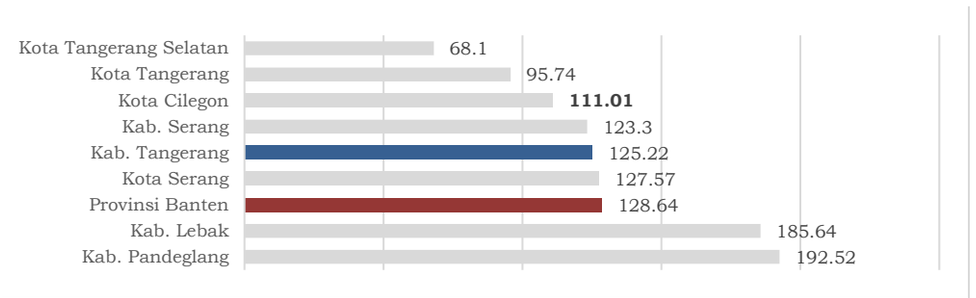
Selain itu, bencana kebakaran sering terjadi di kawasan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan yang tidak tertata. Bencana angin puting beliung kerap melanda Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, Kresek, Jayanti, Solear, Mauk, Sukadiri, Panongan, Cisoka, Tigaraksa, Jambe, dan Legok. Selain itu, ada wilayah yang rawan bencana banjir di Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Di bagian utara Kabupaten Tangerang, terdapat area yang rentan terhadap erosi atau abrasi akibat gelombang laut, seperti di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo.

2) Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang memiliki kerawanan bencana pada beberapa jenis bencana. Bencana kebakaran rawan terjadi pada kawasan peruntukan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan tidak tertata. Bencana angin puting beliung juga rawan terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, banjir dapat diakibatkan oleh pasang surut di kawasan pesisir dan banjir akibat luapan aliran sungai Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Sedangkan bencana kekeringan juga rawan terjadi pada musim kemarau.



Gambar 2.20
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024
Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Gambar 2.21
Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024, Kabupaten Tangerang memiliki indeks mencapai 125,22 yang tergolong 'Sedang' dan capaian tersebut lebih baik IRB Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki nilai indeks tertinggi keempat. Sementara itu, capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebesar 0,74 dalam kategori "Sedang". Dalam lima tahun terakhir, IRB dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tangerang menunjukkan tren perbaikan yang mengindikasikan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Tangerang semakin baik. Meskipun demikian, ancaman bencana akibat perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana di Kabupaten Tangerang.

2.1.1.7 ASPEK DEMOGRAFI

Dinamika perubahan penduduk berubah secara pesat dan perlu dianalisis untuk mengetahui kondisi saat ini dan yang akan datang. Dalam analisis ini memuat struktur, distribusi, dan proyeksi penduduk Kabupaten Tangerang.

A) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 3.459.706 jiwa penduduk yang tersebar di 29 kecamatan. Kecamatan Pasar Kemis merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dari wilayah lain yakni dengan penduduk 258.477 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Mekar Baru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 44.942 jiwa/km². Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang memiliki tren peningkatan yang terjadi secara signifikan dengan laju pertumbuhan 1,93% per tahun dari tahun 2020-2024.

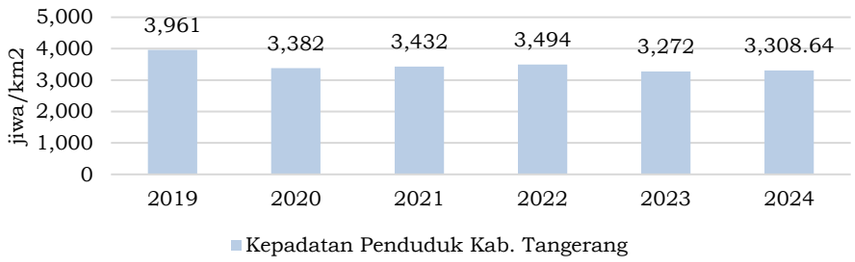


Gambar 2.22
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

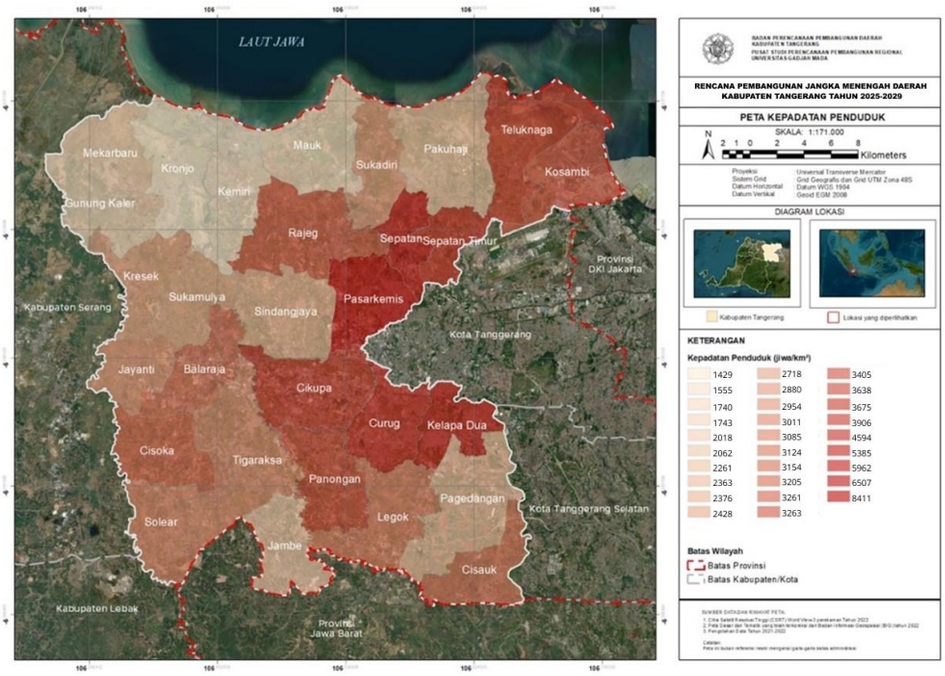
Fluktuasi penduduk di Kabupaten Tangerang merupakan cerminan dari dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di wilayah peyangga. Pergerakan ini tidak hanya disebabkan karena faktor alami seperti kelahiran dan kematian, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh migrasi (perpindahan penduduk) dan faktor eksternal. Pandemi covid-19 juga memiliki peran yang signifikan terhadap dinamika penduduk. Sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek, Kabupaten Tangerang merupakan daerah tujuan utama bagi pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

B) Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kabupaten Tangerang memiliki kepadatan penduduk mencapai 3.308,64 jiwa/km² yang berarti tiap 1 km² wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh kurang lebih 3.309 jiwa penduduk. Kecamatan terpadat di wilayah ini adalah Kecamatan Pasar Kemis (8.411 jiwa/km²), Kecamatan Kelapa Dua (6.507 jiwa/Km²), dan Kecamatan Sepatan (5.962 jiwa/km²). Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kemiri dengan kepadatan 1.555 jiwa/km².



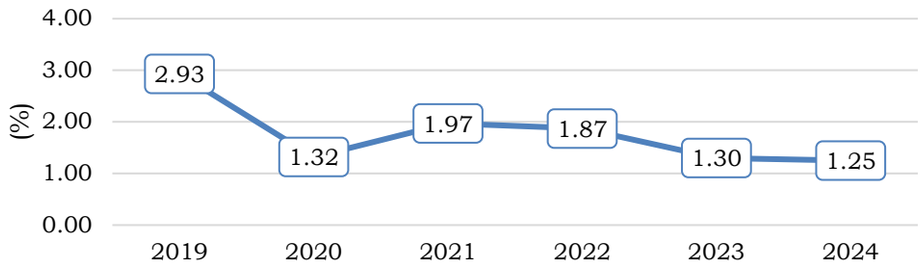
Gambar 2.23
Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025



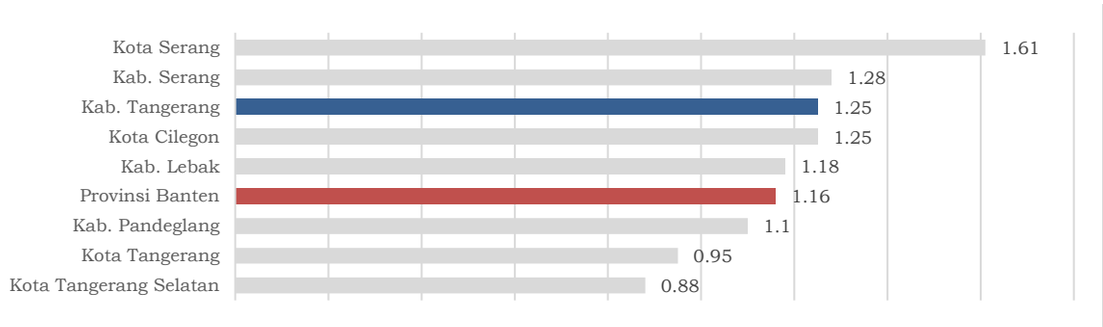
Gambar 2.24
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Per Kecamatan Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

C) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan fluktuatif, dengan laju pertumbuhan berkisar pada angka 1% sampai 3%. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mencapai nilai terendah hingga 1,25%. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini relatif rendah dengan tren yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah ini cenderung rendah yang berimplikasi terhadap *dependency ratio* dan bonus demografi.



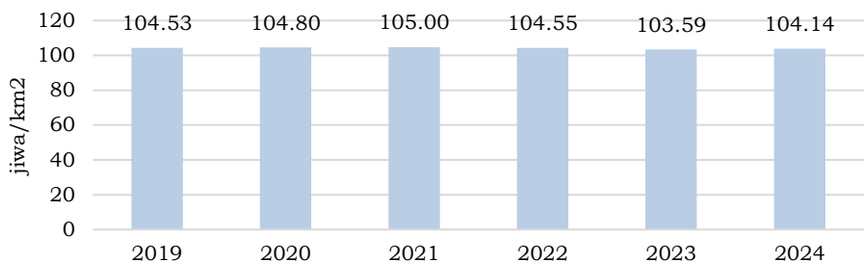
Gambar 2.25
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024



Gambar 2.26
Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

D) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

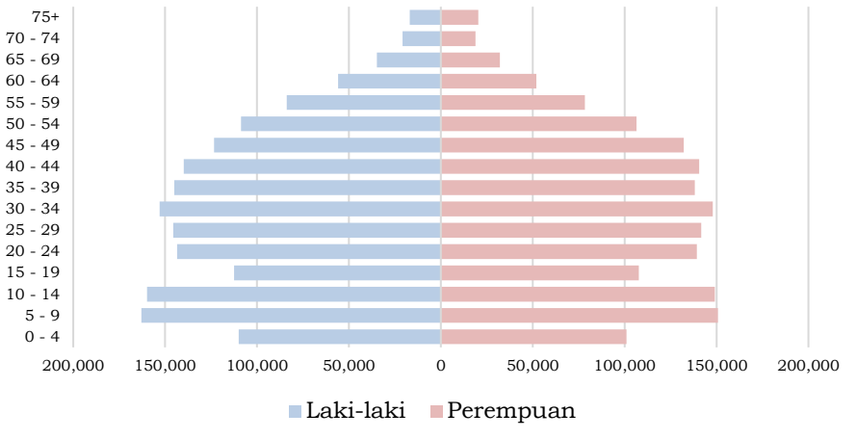
Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki di wilayah ini mencapai 1.716.760 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 1.645.840. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* di Kabupaten Tangerang mencapai 104,41 yang artinya terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Secara umum, rasio jenis kelamin Kabupaten Tangerang relatif sama pada kurun waktu 2019-2024, yakni berkisar pada angka 103-105.



Gambar 2.27
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

E) Penduduk Menurut Kelompok Umur

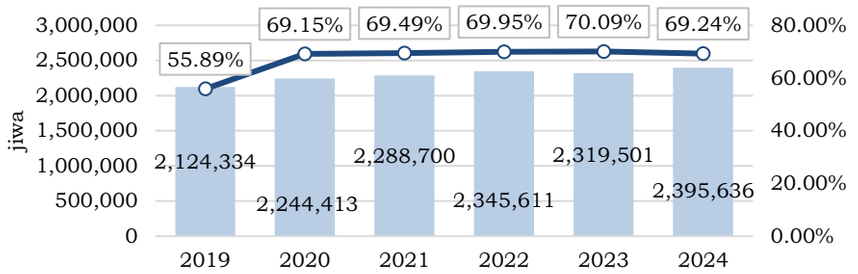
Penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini dapat dilihat dalam piramida penduduk yang tergolong dalam piramida ekspansif atau berbentuk seperti kerucut. Piramida tersebut menggambarkan jumlah masyarakat usia muda lebih tinggi dari kelompok umur lain yang dapat terjadi akibat tingginya angka kelahiran dan rendahnya tingkat kematian bayi. Tingginya jumlah penduduk usia muda ini menjadi peluang pada masa yang akan datang sebagai bonus demografi. Namun, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap rasio ketergantungan masyarakat non produktif.



Gambar 2.28
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

F) Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang dianggap sudah produktif atau termasuk dalam rentang usia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif Kabupaten Tangerang cenderung tinggi dan memiliki tren peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya jumlah penduduk usia produktif menjadi efek dari terjadinya bonus demografi. Tingginya angka produktif ini harus diseimbangkan dengan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.29
Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

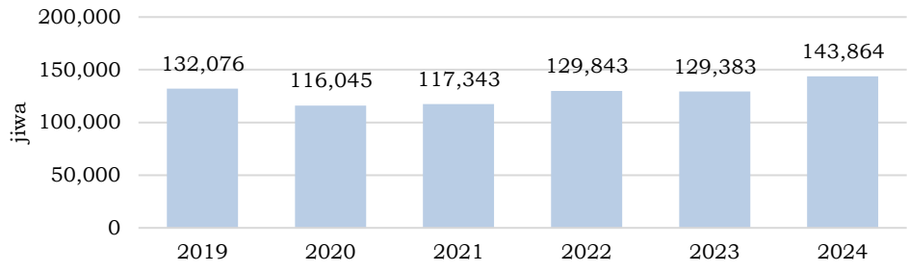
G) Bonus Demografi

Berdasarkan penduduk kelompok umur, Kabupaten Tangerang sedang menikmati bonus demografi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan usia non produktif. Kondisi seperti ini menjadi tantangan pembangunan daerah, diperlukan penanganan dan pengelolaan yang baik untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.

H) Penduduk Usia Lanjut

Penduduk usia lanjut adalah penduduk yang termasuk dalam usia lebih dari 65 tahun dan telah dianggap tidak produktif. Jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Tangerang sempat relatif stagnan. Penduduk usia lanjut Kabupaten Tangerang pada 2024 mencapai 143.864 jiwa penduduk.

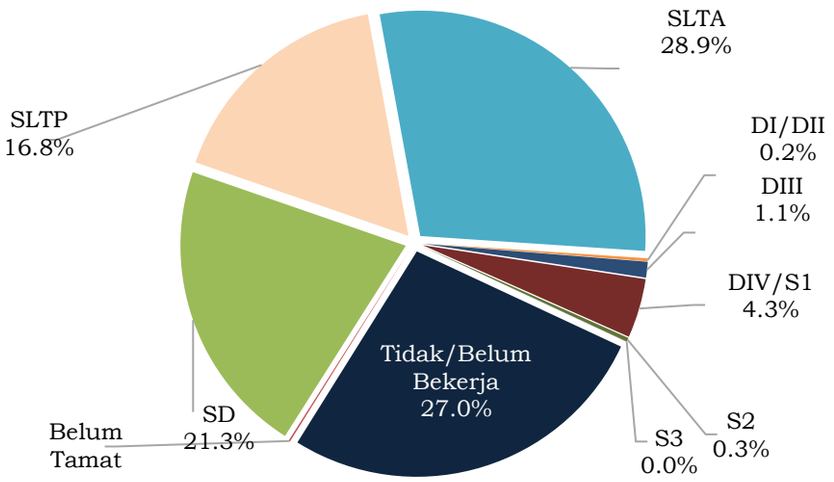
Tingginya jumlah penduduk usia lanjut ini perlu didukung program ramah lansia untuk menjaga kesejahteraan lansia.



Gambar 2.30
Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2025

I) Penduduk Menurut Pendidikan

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah aglomerasi perkotaan yang didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar (28,7%) dan SLTA (27,1%). Tingginya masyarakat dengan pendidikan sekolah dasar dan tidak/belum bekerja selaras dengan komposisi masyarakat Kabupaten Tangerang yang masih tergolong pada usia anak-anak. Sementara itu, tingginya tamatan SLTA diserap oleh sektor industri yang berkembang pesat di wilayah ini. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki penduduk tamatan diploma, sarjana, pascasarjana, dan doktor yang cukup tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa akselerasi pendidikan berkembang secara pesat di Kabupaten Tangerang. Selain itu, hal tersebut juga menggambarkan tingginya kualitas masyarakat Tangerang.



Gambar 2.31
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024

J) Penduduk Menurut Agama

Agama Islam merupakan agama yang memiliki penganut paling banyak di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 3.158.860 jiwa. Selain itu, hal ini juga didukung dengan keberadaan berbagai sarana prasarana yang terbesar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu, Kristen menjadi agama dengan penganut terbesar kedua di wilayah ini, yaitu sebesar

108.817jiwa. Sementara itu, Agama Budha dan Katolik di urutan berikutnya dengan jumlah penganut sebanyak 56.288 jiwa dan 46.182 jiwa.

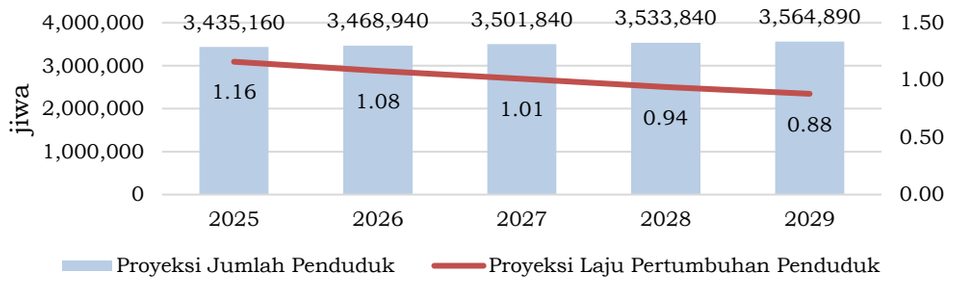
Tabel 2.8
Penduduk Menurut Agama Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Agama	Jumlah
Budha	56.288
Hindu	1.958
Islam	3.158.860
Katolik	46.182
Kristen	108.817
Lainnya	1.044

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2025

K) Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

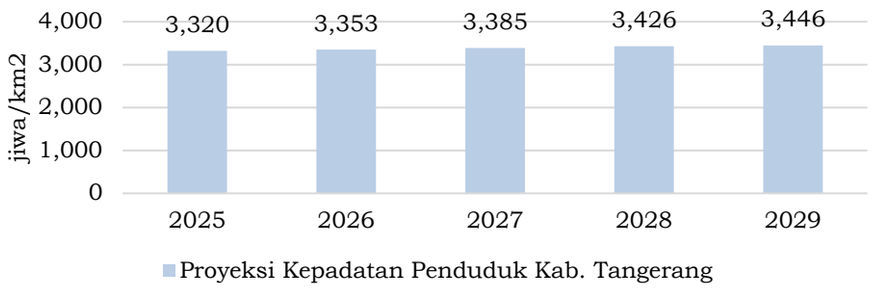
Proyeksi penduduk bermanfaat sebagai acuan dan target dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan, seperti sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, perumahan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang diperkirakan melambat secara bertahap hingga tahun 2030. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 3.564.900 jiwa.



Gambar 2.32
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

1) Proyeksi Kepadatan Penduduk

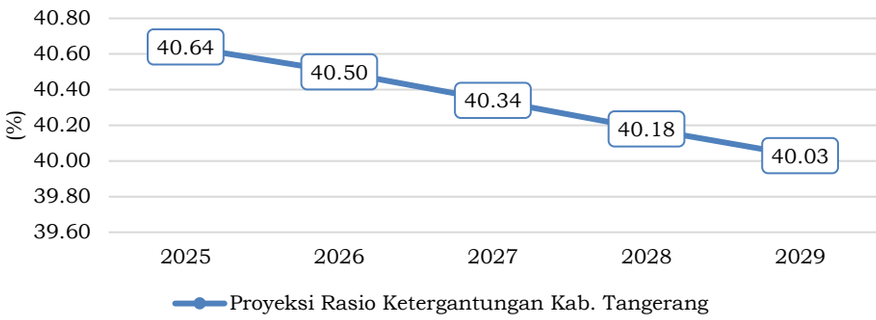
Kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan hasil proyeksi, kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2029 mencapai 3.446 jiwa yang berarti tiap 1 km² wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3.446 jiwa penduduk.



Gambar 2.33
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

2) Proyeksi Rasio Ketergantungan

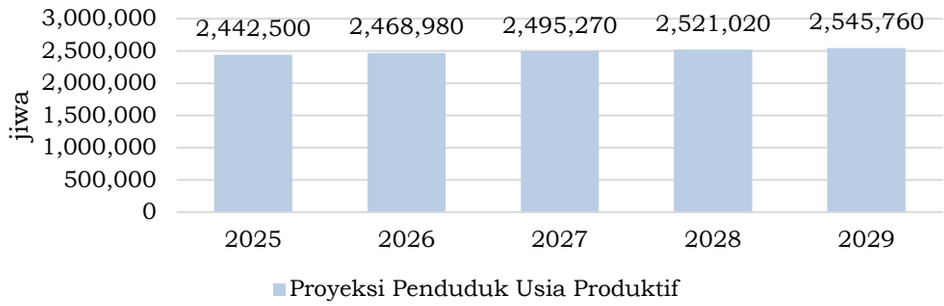
Aspek penting dalam kependudukan yang perlu diperhatikan adalah beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk produktif dengan usia non produktif. Semakin rendah angka beban ketergantungan, mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang cenderung menurun. Penurunan rasio ketergantungan ini terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2025 hingga 2029. Saat ini, Kabupaten Tangerang berada pada fase bonus demografi, ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari usia 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 70 persen dari total penduduk, serta besaran rasio ketergantungan kurang dari 50 persen.



Gambar 2.34
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

3) Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif di Kabupaten Tangerang diproyeksikan mengalami peningkatan pada kurun waktu 2025-2029. Peningkatan ini berkisar pada angka 2,4 hingga 2,5 juta penduduk usia produktif. Peningkatan ini salah satunya dapat berdampak pada peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah ini.



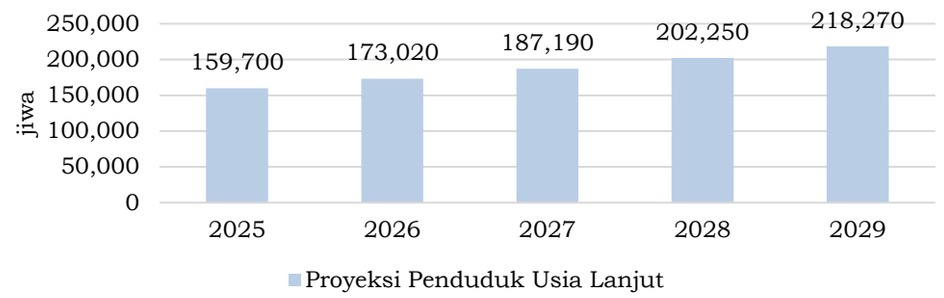
Gambar 2.35
Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

4) Bonus Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi pada rentang waktu 2025-2029, Kabupaten Tangerang masih mendapatkan bonus demografi yang ditandai dengan tingginya penduduk usia produktif. Bonus demografi ini perlu dimanfaatkan khususnya dalam mengelola produktivitas penduduk.

5) Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Dalam kurun waktu 2025-2029, terdapat peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang cukup signifikan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan fasilitas dan penanganan kesehatan maupun sosial bagi para lansia.



Gambar 2.36
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

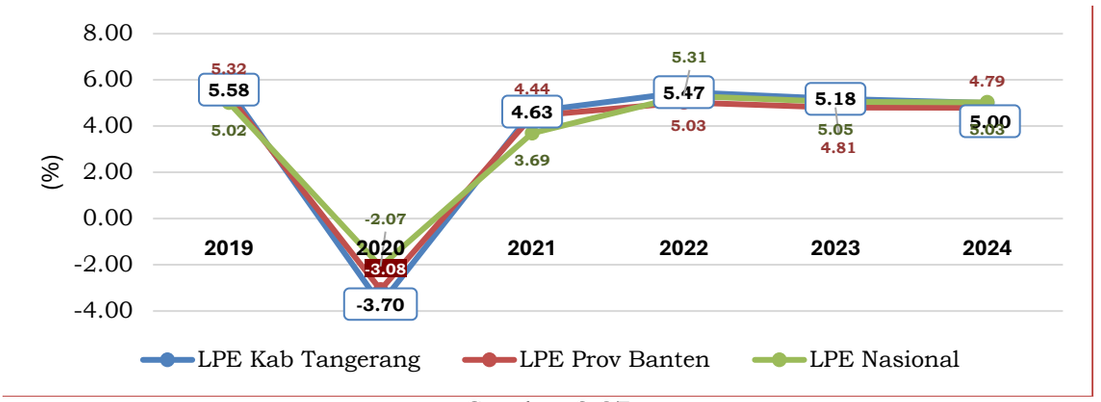
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketercapaian masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat dan mengetahui permasalahan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ini terdiri atas dua hal, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

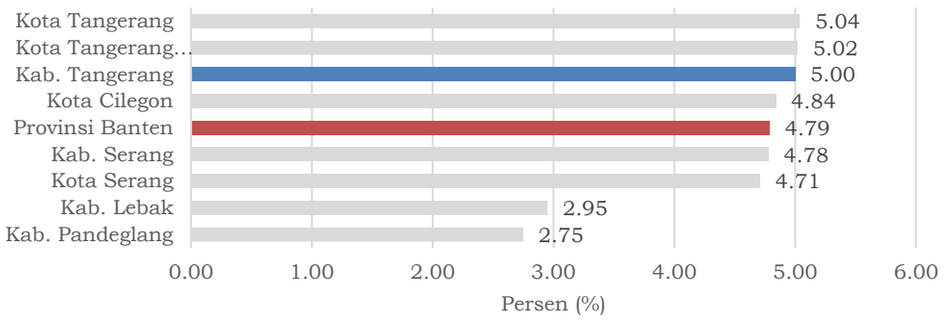
2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

A) Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE. Capaian LPE tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro wilayah dari berbagai sektor.



Gambar 2.37
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar 2.38
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2023
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian LPE Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga. Secara lebih detail, lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi (2024), yaitu Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya.

Tabel 2.9
PDRB Per Sektor ADHK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,84	-0,84	2,26	1,74	-0,28
B	Pertambangan dan Penggalian	2,30	-5,90	-9,45	-12,35	0,25	4,80
C	Industri Pengolahan	3,20	-8,47	4,26	5,44	7,01	4,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,23	-12,35	11,69	5,59	-0,45	-13,42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,71	8,60	5,81	1,35	5,69	1,93
F	Konstruksi	9,44	-3,29	11,96	8,25	1,74	5,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	-3,70	1,82	3,27	4,83	5,94
KETENTERAMAN	Transportasi dan Pergudangan	9,55	-5,32	9,90	7,89	5,84	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,86	-5,63	4,45	8,33	8,93	9,15
J	Informasi dan Komunikasi	9,69	9,12	5,17	6,84	9,34	6,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	1,56	6,07	6,81	-0,48	0,90
L	Real Estate	9,49	1,96	3,07	5,19	5,20	5,33
M, N	Jasa Perusahaan	9,20	-6,00	-2,25	4,46	8,52	8,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,75	-0,38	-0,76	1,09	3,17	26,36
P	Jasa Pendidikan	8,30	0,62	-1,10	-0.09	6,82	7,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,13	4,41	9,14	2,92	8,94	13,23
R,S.T,U	Jasa Lainnya	9,36	-6,11	1,39	7,77	10,98	4,68
Produk Domestik Regional Bruto		5,56	-3,76	4,70	5,47	5,18	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

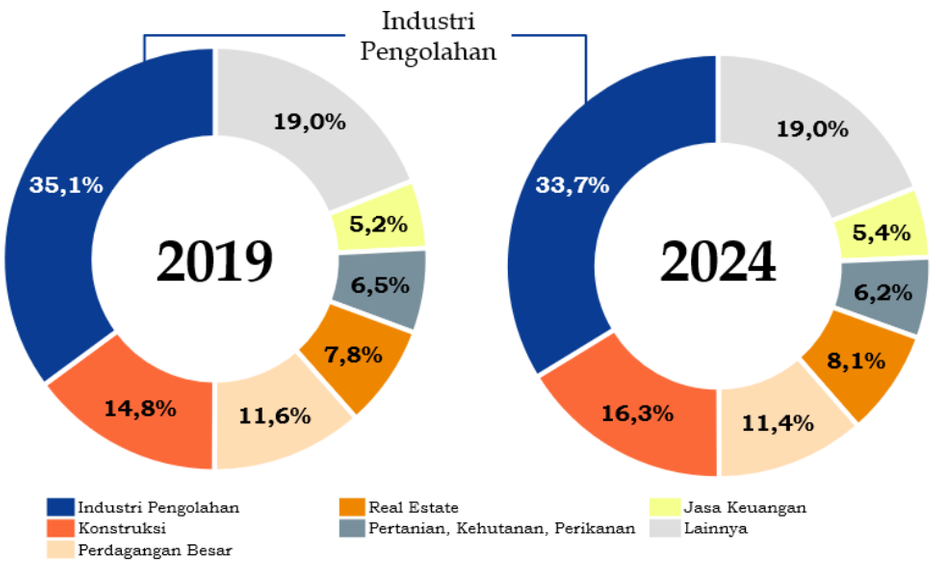
Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan *real estate* menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.10
PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
(dalam Miliar Rupiah)

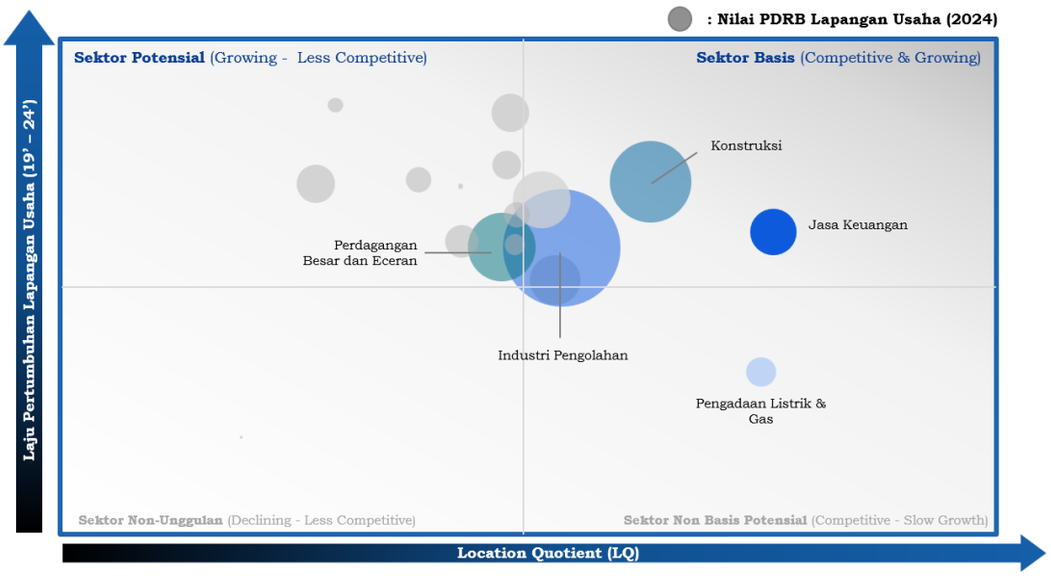
Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	9.045,55	9.435,98	9.473,10	10.135,98	10.921,46	11.456,58
B	Pertambangan dan Penggalian	58,54	55,54	50,93	45,88	47,24	51,19
C	Industri Pengolahan	49.164,34	45.200,55	48.117,52	53.176,12	58.318,29	62.789,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.693,53	4.096,16	4.630,76	4.936,40	4.893,85	4.053,44
E	Pengadaan Air	85,48	93,49	100,24	102,87	110,40	119,98
F	Konstruksi	20.797,30	20.159,33	23.459,65	26.926,03	28.336,15	30.437,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.234,31	15.934,12	16.403,33	17.698,47	19.324,82	21.127,95
KETENTERAMAN	Transportasi dan Pergudangan	4.320,45	4.148,08	4.651,38	5.330,79	6.083,52	6.711,58

Kode	Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.133,60	2.021,19	2.123,07	2.342,57	2.586,71	2.904,43
J	Informasi dan Komunikasi	4.505,50	4.898,70	5.144,75	5.553,03	6.132,02	6.587,77
K	Jasa Keuangan	7.290,26	7.412,07	8.239,97	9.597,07	9.774,50	9.966,91
L	Real Estate	10.957,41	11.392,27	11.859,43	12.706,97	13.853,03	15.035,63
M.N	Jasa Perusahaan	1.537,10	1.470,01	1.454,75	1.569,84	1.769,91	1.974,52
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.469,16	2.571,45	2.618,05	2.742,84	2.941,08	3.813,07
P	Jasa Pendidikan	3.899,57	3.981,03	3.957,24	4.030,36	4.404,83	4.941,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	656,87	695,57	774,48	811,76	917,22	1.063,50
R.S.T.U	Jasa lainnya	2.240,33	2.166,13	2.225,00	2.461,19	2.886,59	3.068,90
PDRB (dalam miliar rupiah)		140.089,29	135.731,68	145.283,68	160.168,18	173.301,26	186.104,15

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)



Gambar 2.39
Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dan Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

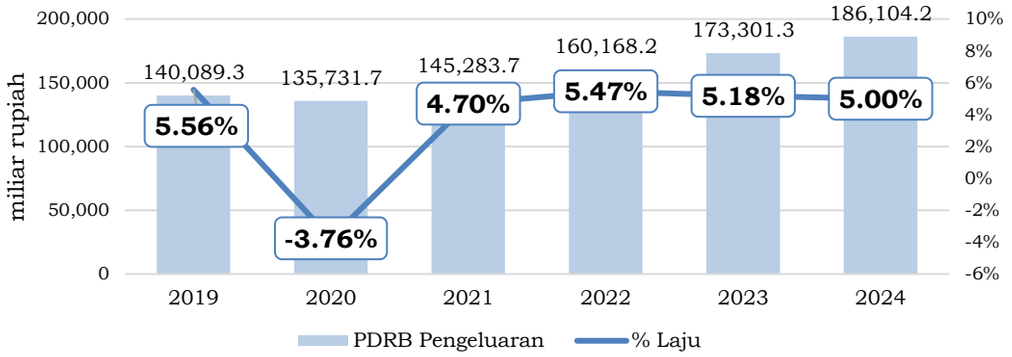


Gambar 2.40
Positioning Matrix Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang
Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Gambar di atas merupakan analisis *Positioning Matrix* Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang untuk mengetahui sektor unggulan berdasarkan tren laju dan besaran nilai PDRB dari 17 sektor lapangan usaha. Berdasarkan analisis tersebut, sebagian besar jenis lapangan usaha PDRB (termasuk lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar) merupakan Sektor Potensial. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing melalui akselerasi produktivitas tenaga kerja, pengembangan pasar dan *value added* lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar (Industri Pengolahan dan Konstruksi) dan jasa keuangan termasuk dalam kategori "Sektor Unggulan", yaitu yang tumbuh cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan posisi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari penyangga Jakarta dan Jabodetabek menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan sektor perindustrian dan sektor jasa.

2) PDRB Menurut Pengeluaran

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Pada tahun 2024, PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,2 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peningkatan utamanya setelah pandemi tahun 2019.



Gambar 2.41
PDRB ADHB dan Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Tabel 2.11
PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
(dalam Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	72.998.709,26	71.693.730,68	74.770.602,15	81.562.475,55	88.647.200,83	97.947.130
Konsumsi LNPRT	710.429,81	679.685,90	701.768,54	749.881,39	811.729,66	951.440
Konsumsi Pemerintah	5.031.644,99	4.621.839,02	4.890.012,15	5.219.166,20	6.001.089,65	6.914.430
Pembentukan Modal Tetap Bruto	35.233.021,18	35.450.044,41	37.900.875,49	40.717.192,10	46.853.056,17	50.185.960
Perubahan Inventori	4.346,34	716,21	61,28	300,11	49.843,77	240.860
Net Ekspor	26.111.136,01	23.285.665,67	27.020.356,91	31.919.161,45	30.945.748,91	29.864.320
Ekspor	98.587.772,18	94.833.778,71	105.562.340,92	132.194.567,86	150.386.973,45	
Impor	72.476.636,17	71.548.113,04	78.541.984,01	100.275.406,41	119.441.224,54	
PDRB	140.089.287,58	135.731.681,88	145.283.676,52	160.168.176,80	173.302.663,99	186.104.150

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

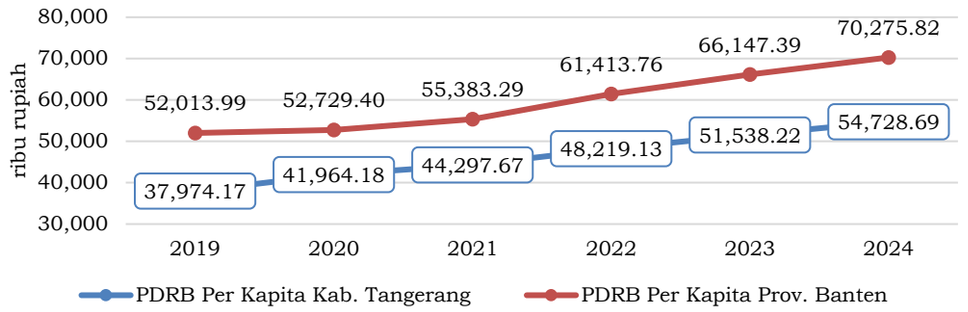
Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 52,63%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Triwulan IV 2024, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 2,15%.. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

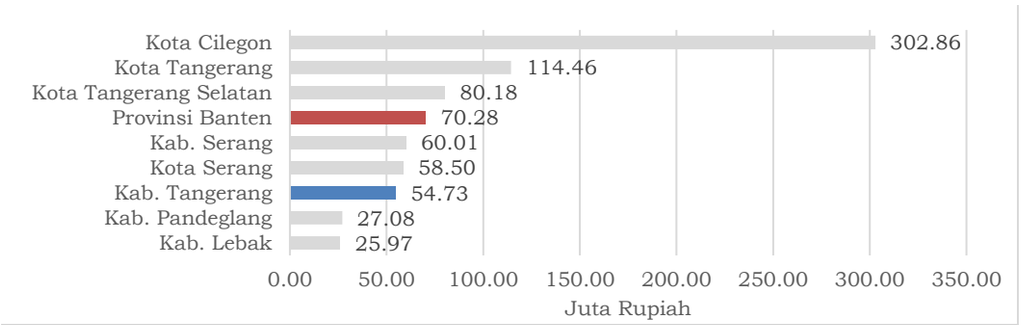
B) PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini

menunjukkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang dapat mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang di bawah Provinsi Banten.



Gambar 2.42
PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

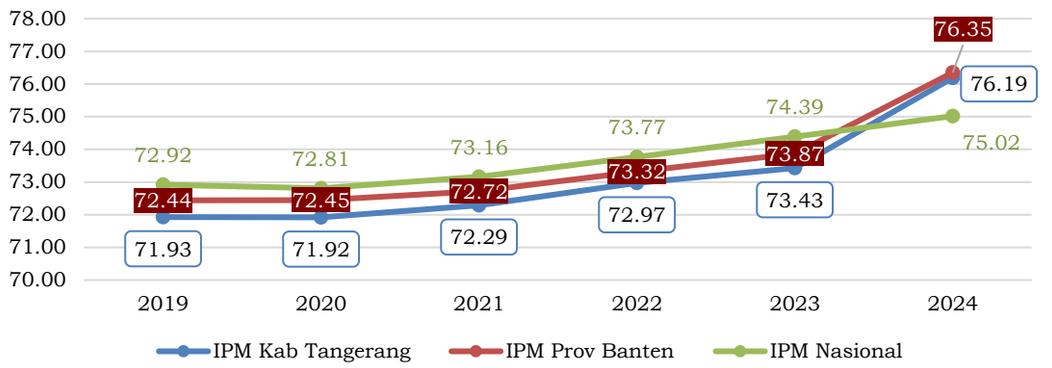


Gambar 2.43
Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Tangerang sebesar 54,73 juta rupiah dan capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian PDRB per kapita Kabupaten Tangerang terendah ketiga. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan nilai tambah sektor unggulan dalam rangka mendorong pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

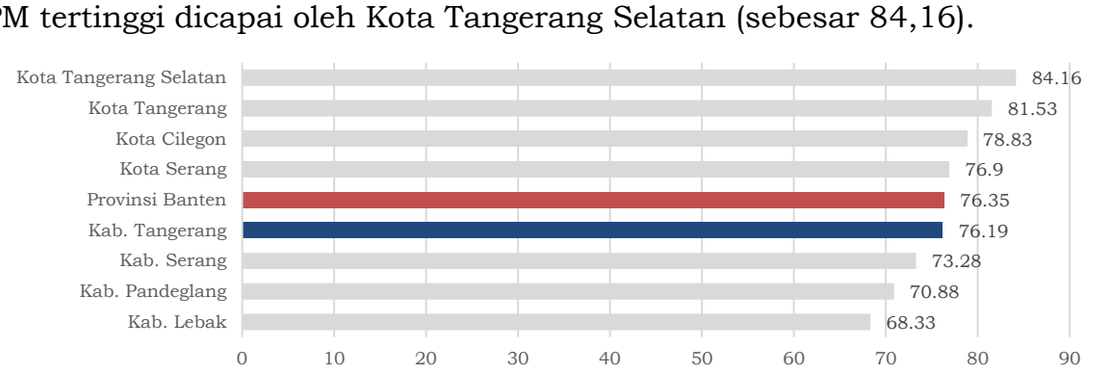
C) Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 76,19 dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan kualitas masyarakat di wilayah ini. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat tingkat pengeluaran per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tergolong rendah dan di bawah Provinsi Banten dan Nasional. Maka dari itu, diperlukan fokus penanganan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing SDM di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.44
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2025 (Hasil Long Form SP2020)

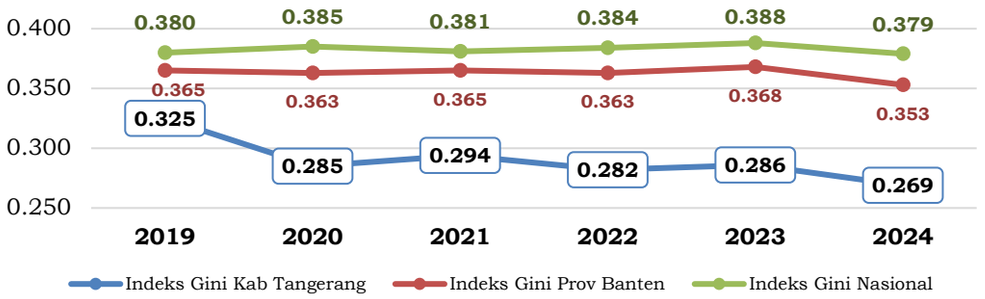
Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang masih menempati posisi keempat IPM terendah. Sementara itu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan (sebesar 84,16).



Gambar 2.45
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2025 (Hasil Long Form SP2020)

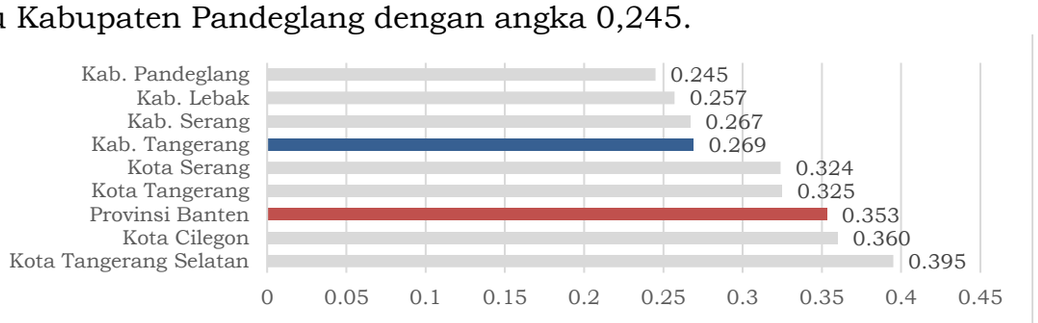
D) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu tolak ukur dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks gini Kabupaten Tangerang sebesar 0,269 dalam kategori 'Rendah'. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung merata dan tidak memiliki *gap* yang tinggi antar kelompok masyarakat yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan nasional.



Gambar 2.46
Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

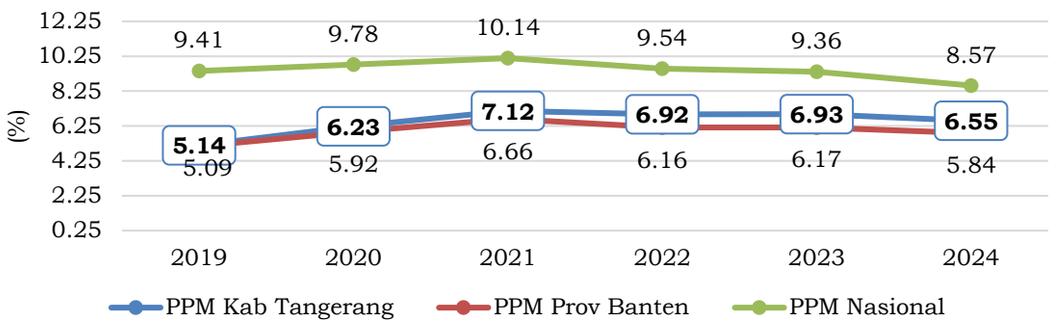
Indeks Gini Kabupaten Tangerang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-empat dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 0,353. Kabupaten/kota dengan indeks gini paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Tangerang dengan angka 0,395. Sementara itu, indeks gini paling rendah yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 0,245.



Gambar 2.47
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

E) Persentase Penduduk Miskin

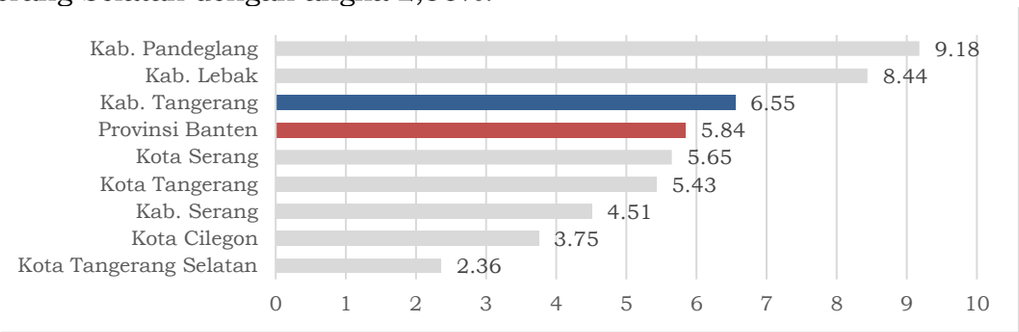
Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019-2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19. Pada periode tahun 2022-2024, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.48
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-tiga tertinggi dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 5,84%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang

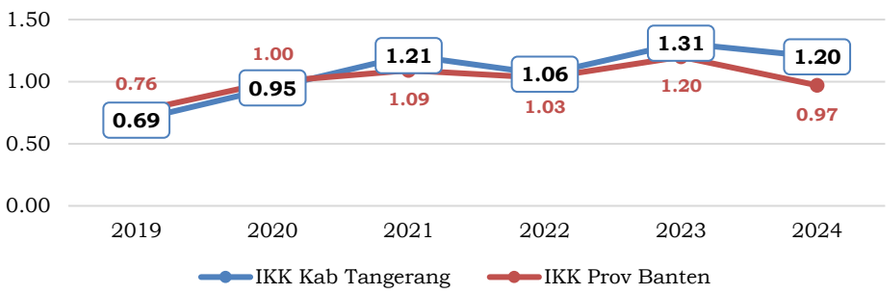
dengan angka 9,18%. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%.



Gambar 2.49
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

F) Rasio Kesenjangan Kemiskinan

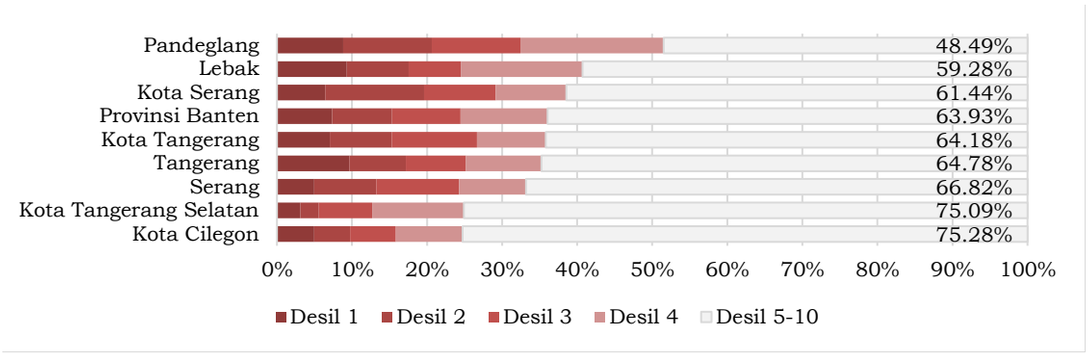
Rasio Kesenjangan Kemiskinan yang tinggi menunjukkan kualitas kesejahteraan yang belum optimal. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang relatif tinggi yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang mencapai nilai 1,20. Tingginya indeks ini mengindikasikan besarnya *gap* antara pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.50
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten
Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

G) Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga (Desil dan/atau Kemiskinan)

Tingkat kesejahteraan rumah tangga ditunjukkan dari persentase kelompok pendapatan dalam instrumen Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi keluarga dan individu. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%). Desil 1 termasuk dalam kelompok miskin dan Desil 2-4 termasuk dalam kelompok rentan miskin.

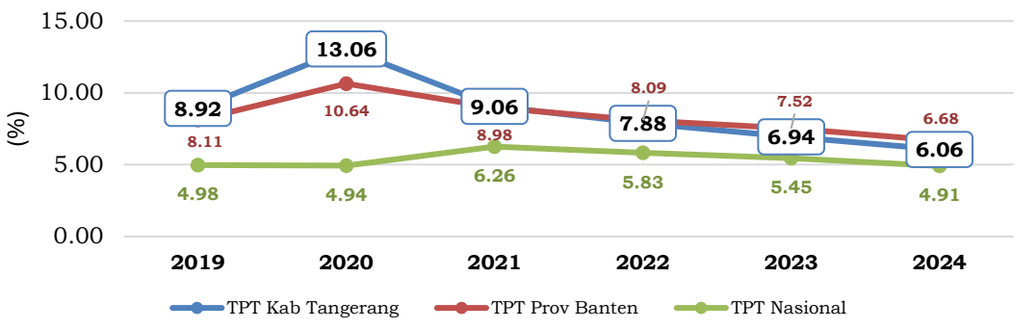


Gambar 2.51
Perbandingan Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (https://p3ke.kemenkopmk.go.id/)

Berdasarkan gambar di atas, jumlah rumah tangga pada desil 1-4 di Kabupaten Tangerang terendah ke-4 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Jumlah rumah tangga dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 295.195 KK atau 35,2% dari total KK. Sementara itu, jumlah individu dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 1.169.049 jiwa.

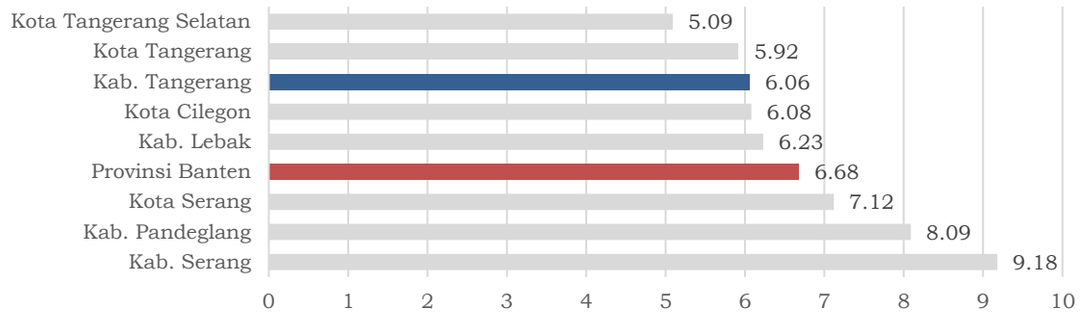
H) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan nilai persentase jumlah masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT digunakan sebagai alat evaluasi kondisi penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 6,06% (102.510) jiwa tergolong dalam kategori sedang dan berada di atas TPT nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.



Gambar 2.52
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

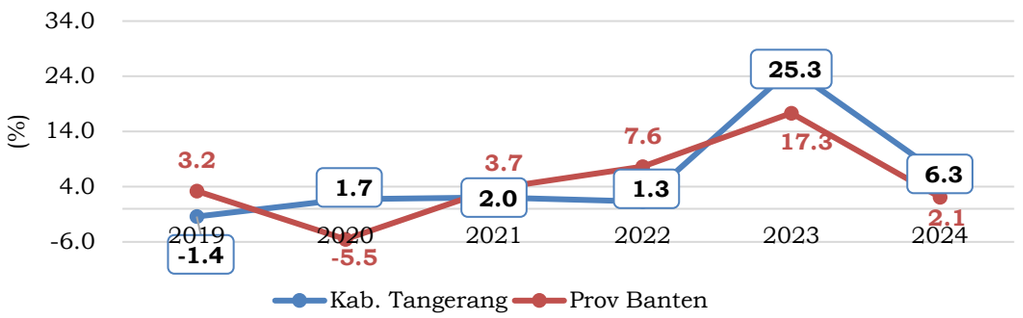
Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah dengan posisi ketiga terendah pada tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan TPT sebesar 5,09%, sementara TPT tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Serang sebesar 9,18%.



Gambar 2.53
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

I) Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

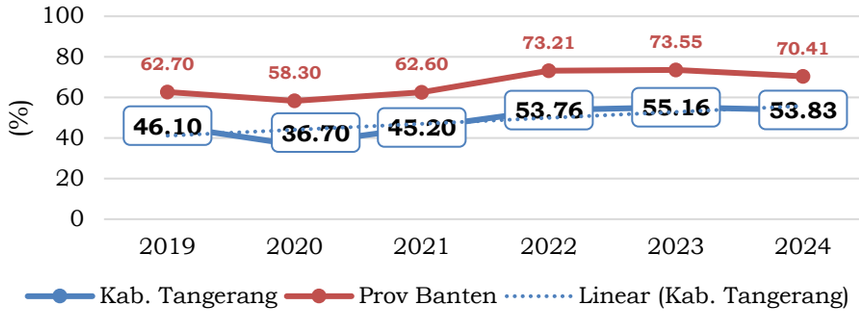
Laju pertumbuhan PDRB terhadap pekerja di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, tetapi menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan peningkatan partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan PDRB Kabupaten Tangerang. Secara umum laju pertumbuhan PDRB ini tergolong rendah dan diperlukan strategi dalam mendorong produktivitas tenaga kerja dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang.



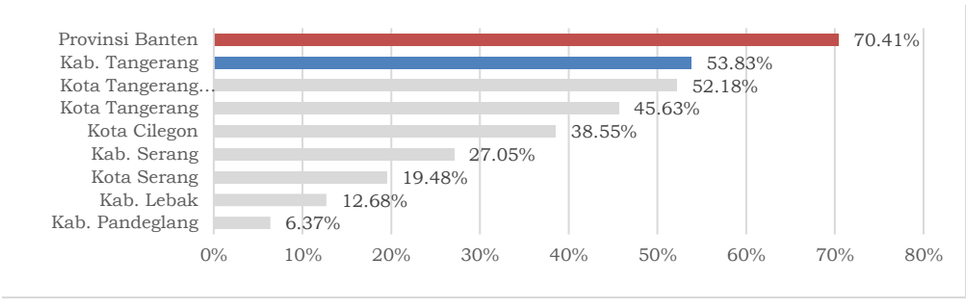
Gambar 2.54
Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Analisis Penyusun, Badan Pusat Statistik, 2024

J) Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dengan tren relatif meningkat pada kurun waktu 2019-2024. PAD Kabupaten Tangerang menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki proporsi terbesar. Akan tetapi, persentase PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten.



Gambar 2.55
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: Website DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024; Analisis Penyusun

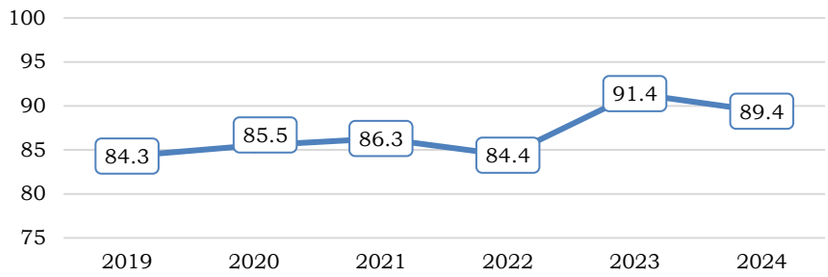


Gambar 2.56
Perbandingan Persentase PAD terhadap Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Website DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024; Analisis Penyusun

Pada tahun 2024, realisasi PAD Kabupaten Tangerang sebesar 4,56 triliun rupiah dengan pendapatan sebesar 8,48 triliun rupiah sehingga persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 53,83%. Capaian tersebut paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, tetapi lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Banten.

K) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

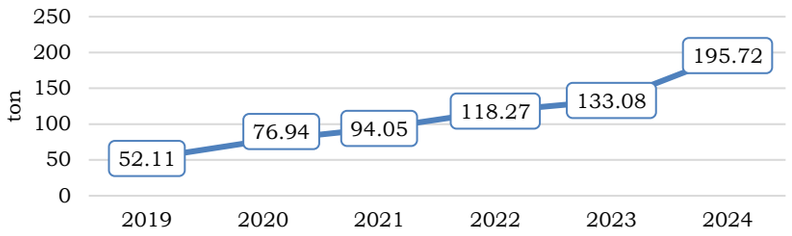
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui kondisi kualitas dan kuantitas cadangan pangan dalam suatu wilayah. Capaian Skor PPH Kabupaten Tangerang menunjukkan kecenderungan peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, Skor PPH Kabupaten Tangerang 84,3 meningkat hingga tahun 2021. Capaian ini menurun pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 91,4 pada tahun 2023. Peningkatan Skor PPH ini menunjukkan ketercukupan gizi dan keragaman komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat semakin ideal.



Gambar 2.57
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026

L) Penguatan Cadangan Pangan

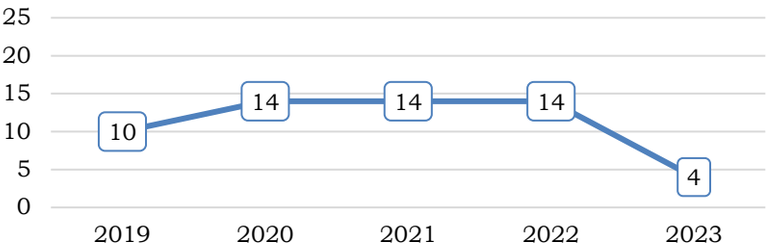
Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Dalam menjamin ketahanan pangan, Kabupaten Tangerang melakukan berbagai upaya penguatan cadangan pangan. Dalam kurun waktu 2019-2024, capaian penguatan cadangan pangan mengalami peningkatan.



Gambar 2.58
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

M) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penguatan ketahanan pangan juga dilaksanakan melalui program penanganan daerah rawan pangan. Penanganan daerah rawan pangan berfokus pada pemenuhan cadangan pangan dalam suatu daerah. Pada 2020- 2023 jumlah daerah rawan pangan yang ditangani mencapai 14 daerah dan pada tahun 2023 menurun menjadi 4 daerah.

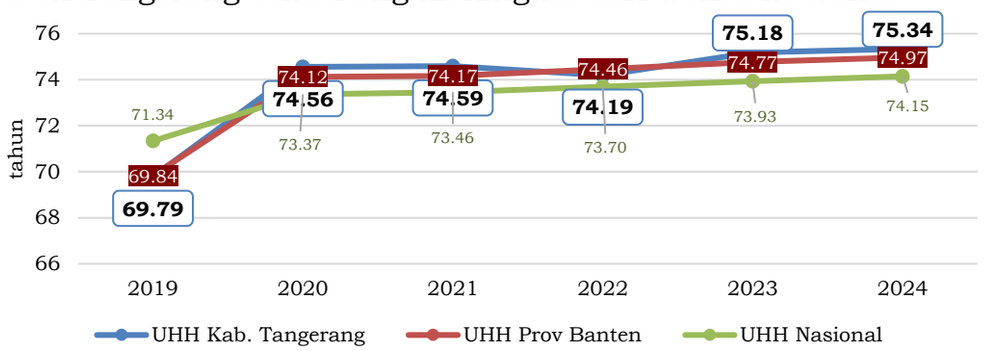


Gambar 2.59
Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Ditangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

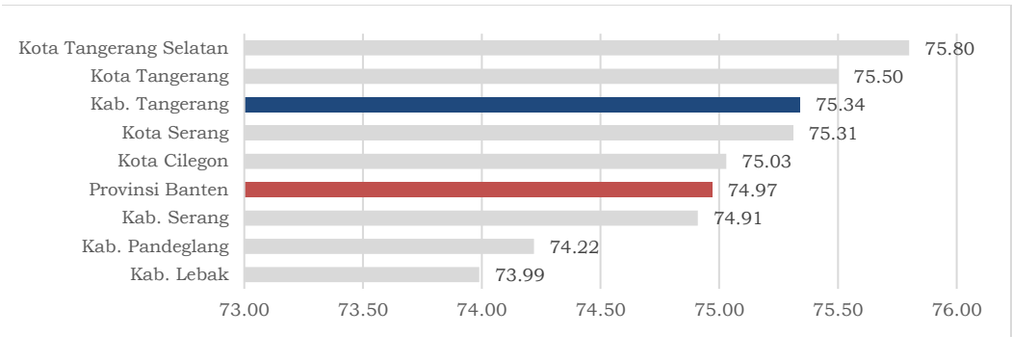
A) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai nilai 75,34 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang cukup tinggi. UHH masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.



Gambar 2.60
Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dam BPS Nasional, 2025 (Hasil Long Form SP2020)

Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, di tahun 2024, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dengan capaian tertinggi, berada di atas capaian Provinsi Banten dan Nasional. Namun, tetap diperlukan arahan strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kesehatan.

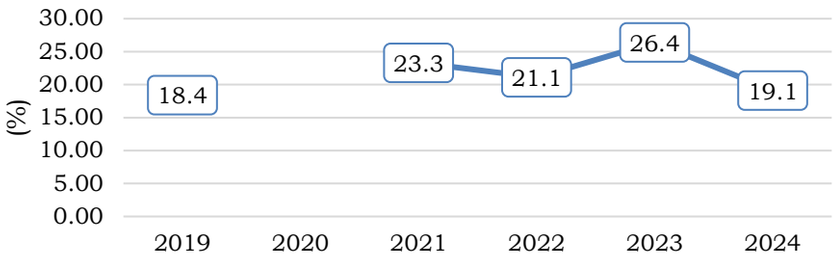


Gambar 2.61
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025 dan BPS Nasional 2025 (Hasil Long Form SP2020)

B) Prevalensi *Stunting*

Stunting merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. *Stunting* diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila *Z-Score* TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Penyebab dari *stunting* dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada *stunting*. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.

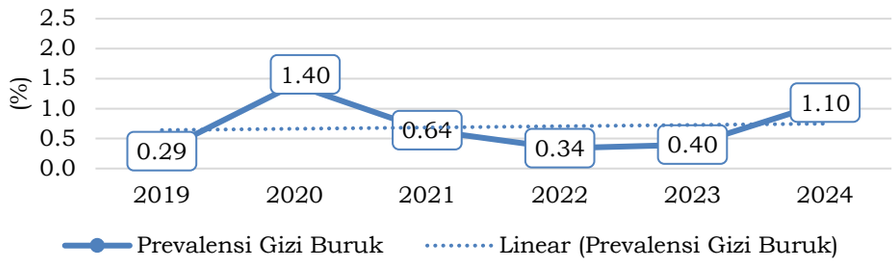
Angka *stunting* di Kabupaten Tangerang cenderung menurun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2017. Angka *stunting* tertinggi ada di tahun 2021 dengan 23,3%, dan mengalami penurunan ditahun 2024 menjadi 19,1%. Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi stunting untuk ditekan menuju angka 18% pada tahun 2025. Terjadi peningkatan di tahun 2022-2023, sehingga untuk bisa mencapai target nasional, Kabupaten Tangerang perlu menurunkan angka stunting rata-rata 4,2% per tahun hingga periode 2025.



Gambar 2.62
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024

C) Prevalensi Balita Gizi Buruk

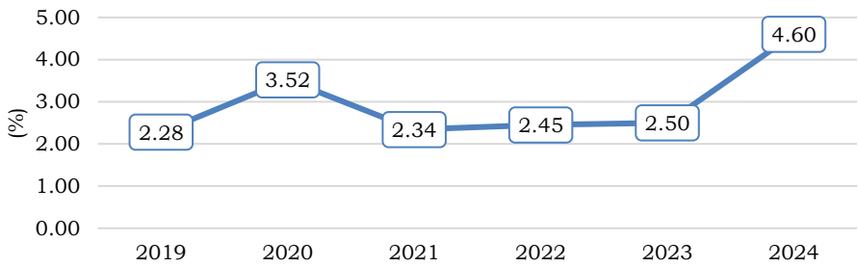
Gizi buruk merupakan kondisi berat badan balita yang lebih rendah dari rentang angka normal anak seusianya. Prevalensi balita gizi buruk menunjukkan kualitas kesehatan balita. Secara umum, prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan meski sempat naik pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang cenderung rendah. Meskipun begitu, di tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 1,10. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal asupan gizi balita.



Gambar 2.63
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2024

D) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang adalah balita yang menunjukkan indikasi kurangnya asupan energi dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan. Prevalensi balita dengan gizi kurang di Kabupaten Tangerang relatif stagnan meski sempat meningkat pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Tangerang tahun 2024 meningkat cukup drastis, mencapai 4.6% dari total balita. Hal ini mengindikasikan perlunya penanganan dan penanggulangan agar menjaga kualitas gizi balita dan terhindar dari kondisi kurang gizi.



Gambar 2.64
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2024

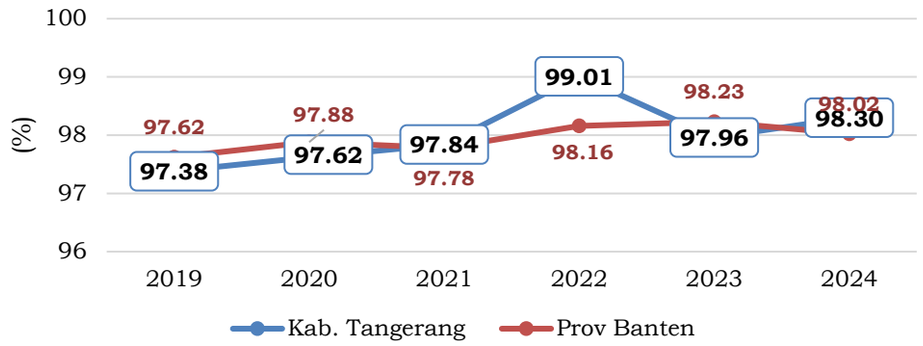
E) Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga aktif merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapsiagaan sumber daya, kemampuan, dan kemauan untuk mencegah dan menangani permasalahan kegawatdaruratan. Berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Tangerang berkisar pada angka 85,45%. Hal ini mengindikasikan masih adanya desa yang belum memiliki kesiapan dalam menangani dan menanggulangi kegawatdaruratan.

2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

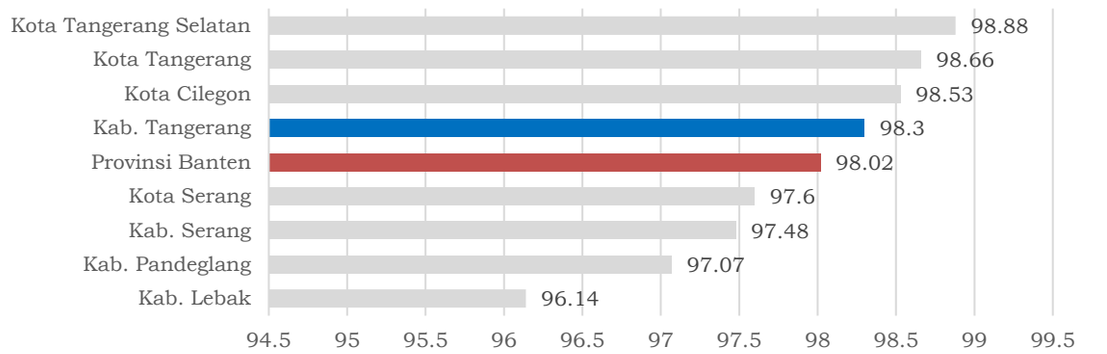
A) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator pengukur kualitas dan kemampuan masyarakat di atas 15 tahun dalam membaca dan menulis huruf. Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kabupaten Tangerang memiliki angka melek huruf 97,96% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mampu membaca dan menulis secara lancar. Masyarakat buta huruf didominasi dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Namun, juga terdapat beberapa masyarakat dalam rentan usia 15-19 tahun dan 35-39 tahun yang masih belum memiliki kemampuan baca tulis.



Gambar 2.65
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2025

Secara umum, angka melek huruf penduduk di atas 15 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada di atas capaian Provinsi Banten dan menempati peringkat keempat di antara Kabupaten/Kota lain. Kabupaten/Kota dengan angka melek huruf paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dengan angka sebesar 98,88. Sementara Kabupaten Lebak menjadi wilayah di Provinsi Banten dengan angka melek huruf paling rendah pada tahun 2024 dengan angka sebesar 96,16.



Gambar 2.66
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2.12
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf 2019-2023

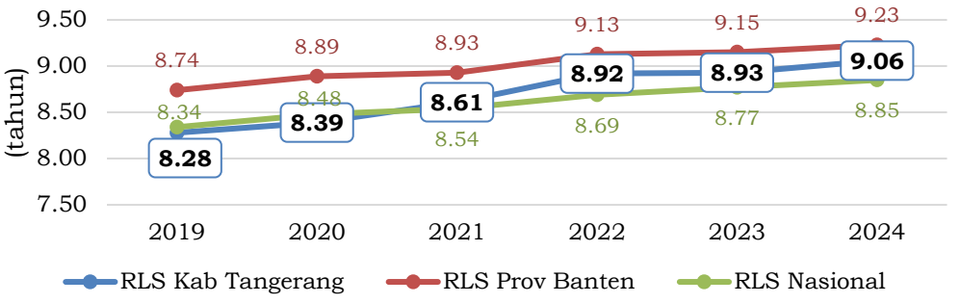
Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022	2023
15-19	99,98%	100,00%	99,84%	100,00%	99,92%
20-24	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25-29	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
30-34	100,00%	100,00%	99,38%	99,67%	100,00%
35-39	99,97%	100,00%	100,00%	99,81%	99,35%
40-44	100,00%	100,00%	99,30%	99,91%	100,00%
45-59	99,06%	96,66%	99,04%	100,00%	100,00%
50+	86,41%	89,22%	91,28%	95,81%	92,07%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

B) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

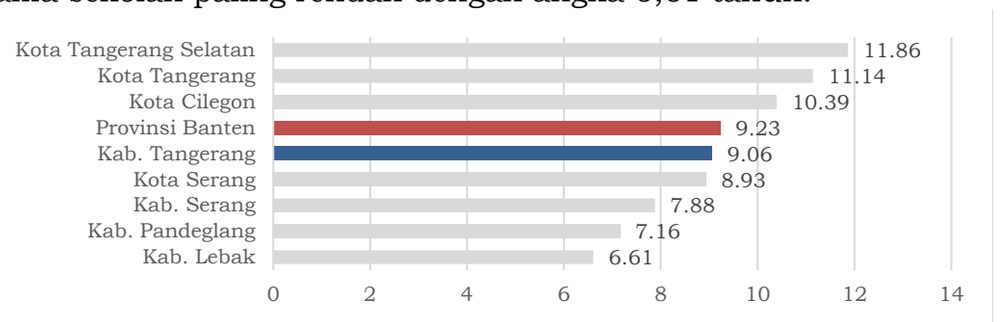
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan nilai yang menunjukkan rerata lama waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di atas 15 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Kabupaten Tangerang memiliki lama rerata sekolah 9,06 tahun atau hampir setara dengan waktu

menempuh pendidikan setara SMP. Secara umum RLS Kabupaten Tangerang terus meningkat dari waktu ke waktu yang menunjukkan peningkatan kualitas capaian pendidikan di wilayah ini. Namun, jika di sandingkan dengan wilayah yang lebih luas, Kabupaten Tangerang memiliki capaian RLS yang cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan diperlukannya upaya peningkatan dan pemupukan semangat dalam mengenyam pendidikan formal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.67
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2025

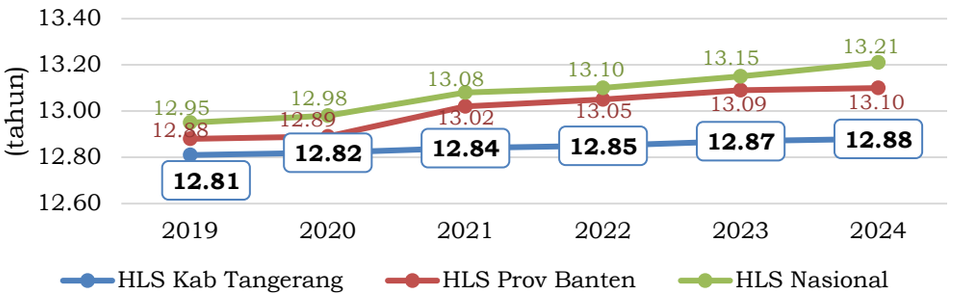
Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada pada posisi standar atau di tengah-tengah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, dan masih di bawah capaian Provinsi Banten yang mencapai angka 9,23 tahun. Wilayah di Provinsi Banten dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan yang mencapai angka 11,86 tahun. Sementara Kabupaten Lebak memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dengan angka 6,61 tahun.



Gambar 2.68
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

C) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

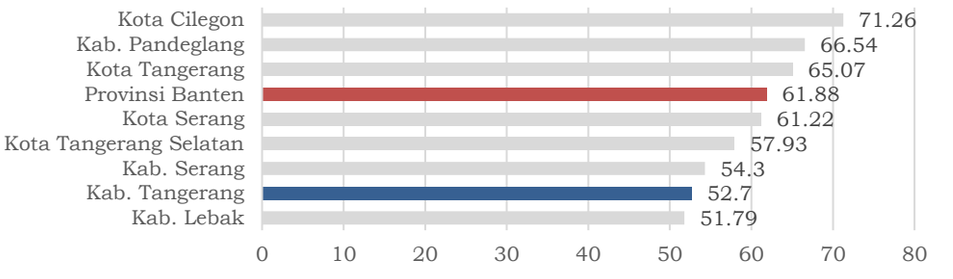
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun). Capaian HLS menunjukkan peluang anak di atas 7 tahun untuk mengenyam pendidikan formal di waktu tertentu. Dalam 6 tahun terakhir, capaian HLS di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dengan capaian yang masih di bawah capaian provinsi maupun nasional. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Tangerang memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 12 hingga 13 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan sampai tingkat Diploma I.



Gambar 2.69
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional
Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2025

D) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, indikator kunci urusan perpustakaan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2023, IPLM Kabupaten Tangerang adalah 49,93. Meskipun capaian di tahun 2024 telah meningkat menjadi 52,7, IPLM Kabupaten Tangerang masih berada di urutan kedua terendah di Provinsi Banten sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan iklim literasi yang berkelanjutan.

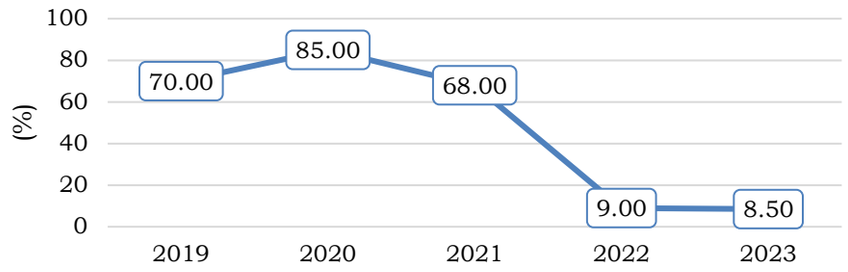


Gambar 2. 70
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025

2.1.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

A) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

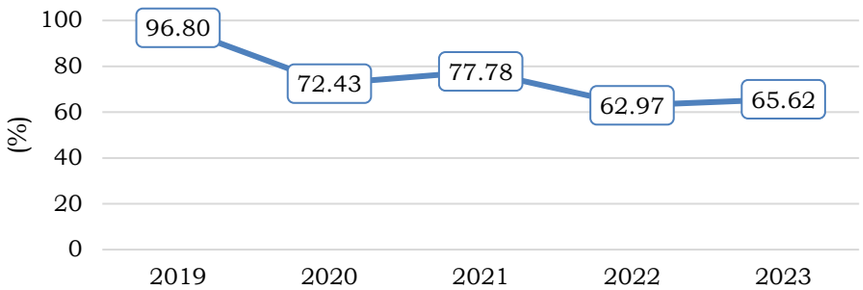
Persentase yang telah menerima jaminan sosial ditentukan dari jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah mendapatkan jaminan sosial dengan total jumlah penduduk yang menyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Diagram di bawah menunjukkan persentase penyandang cacat fisik di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dari tahun 2021 di mana persentase cakupan turun dari 68% menjadi 8,5% pada tahun 2023.



Gambar 2.71
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024

B) Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

PPKS merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau seseorang dan/atau keluarga yang karena suatu masalah, hambatan atau gangguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi angka persentase maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat. Pada grafik di bawah, persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menurun tiap tahunnya dari tahun 2019 mencakup 96,8% hingga pada tahun 2023 mencakup 65,62%.

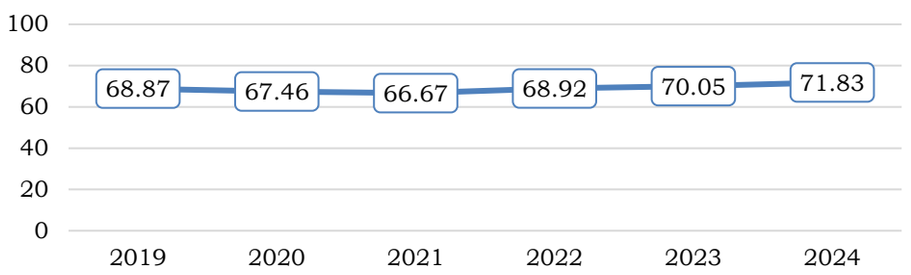


Gambar 2.72
Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024

2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan nilai kerukunan di antara aliran/pemahaman/mazhab yang ada serta pemeluk agama-agama yang telah diakui oleh negara, meliputi Islam, Hindu, Kristen, Budha, Katolik, dan Konghucu. Jika melihat dari standar kategori tinggi (61-80), Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir (2019-2024) memiliki nilai yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang rukun dalam hal agama.

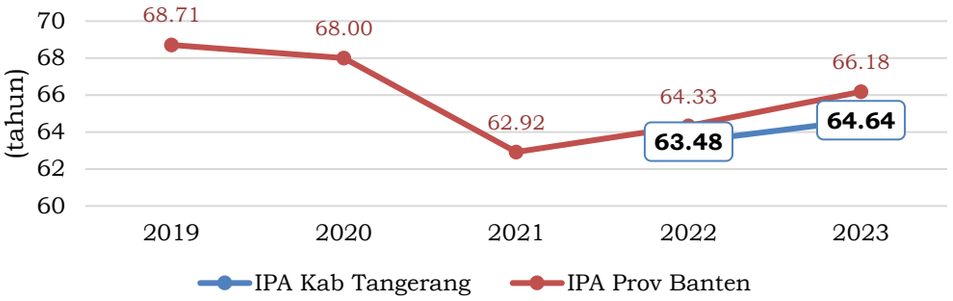


Gambar 2.73
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2024

2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

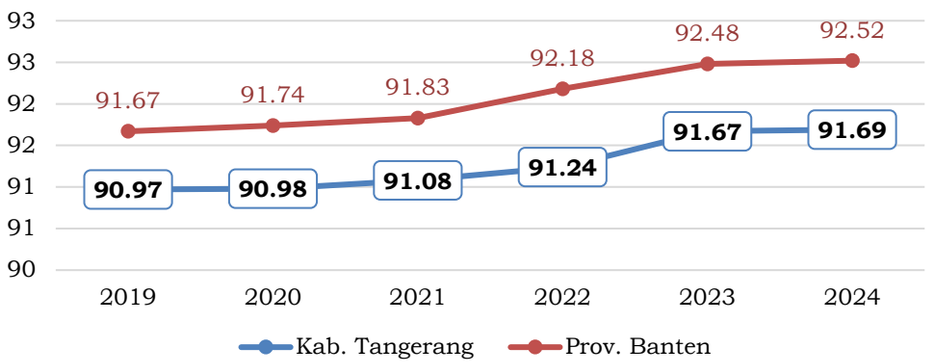
Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Capaian IPA Kabupaten Tangerang sebesar 63,48 di tahun 2022 dan 64,64 di tahun 2023. Meskipun menunjukkan peningkatan dalam 2 tahun terakhir, capaian tersebut masih berada di bawah Provinsi Banten.



Gambar 2.74
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2023
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021-2024

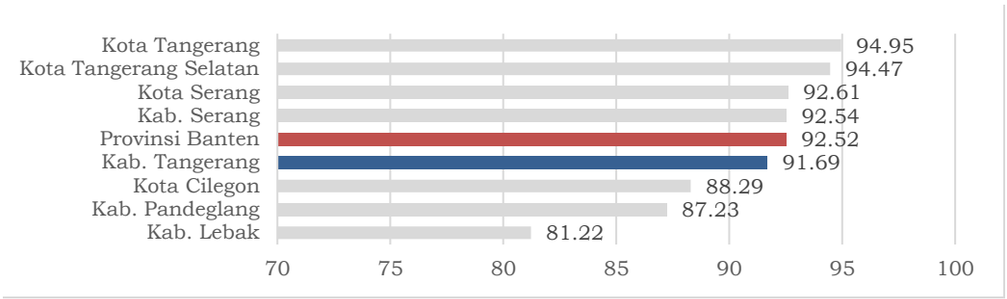
B) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang mengalami tren peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2019. Meskipun demikian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang selalu berada di bawah Provinsi Banten pada tahun 2019-2024.



Gambar 2.75
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten
Tahun 2019 – 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2025

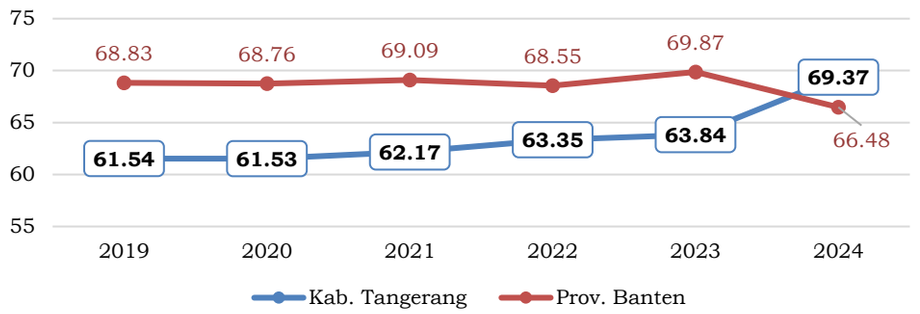
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 91,69 cenderung berada di posisi keempat terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak menjadi wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Gender paling rendah di Provinsi Banten tahun 2024 dengan indeks 81,22 Sementara IPG tertinggi di Provinsi Banten dicapai oleh Kota Tangerang dengan indeks sebesar 94,95.



Gambar 2.76
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

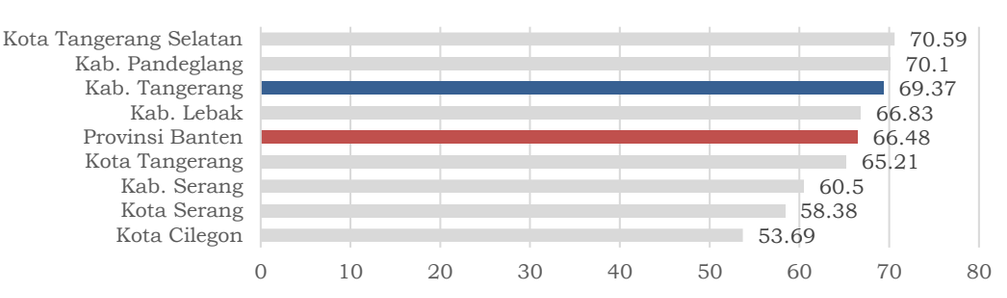
C) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. IDG Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan mencapai 69,37 pada tahun 2024.



Gambar 2.77
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025

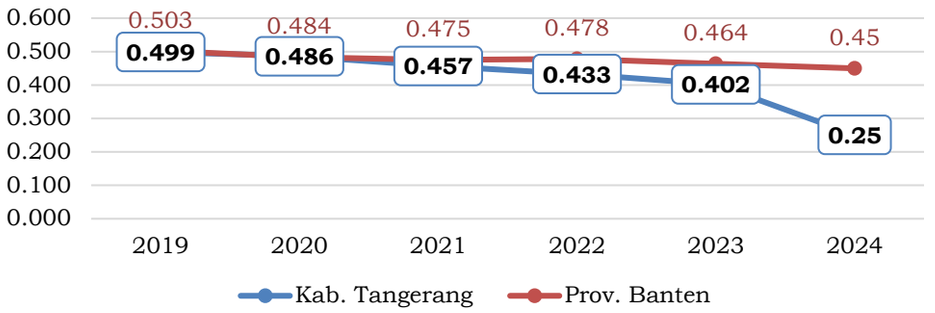
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Kota Cilegon menjadi wilayah dengan capaian IDG paling rendah di Provinsi Banten tahun 2024 dengan indeks 53,69. Sementara itu, IDG tertinggi di Provinsi Banten dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dengan indeks sebesar 70,59.



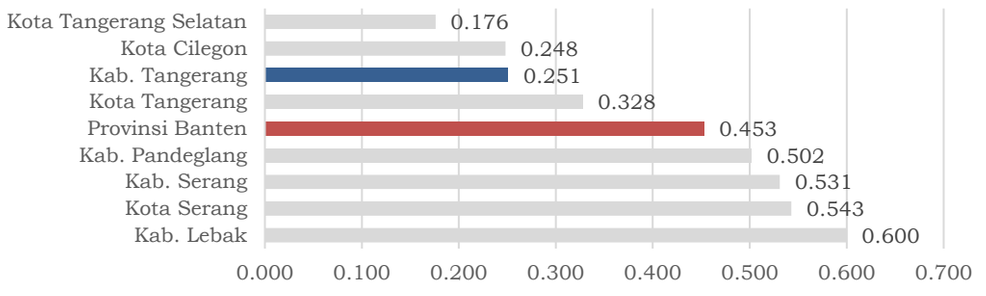
Gambar 2.78
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

D) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung Indeks Ketimpangan Gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang memiliki kecenderungan menurun, artinya perbaikan kesetaraan gender telah meningkat. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tangerang tergolong cukup baik, dengan posisi 3 terbaik di Provinsi Banten.



Gambar 2.79
Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2.80
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

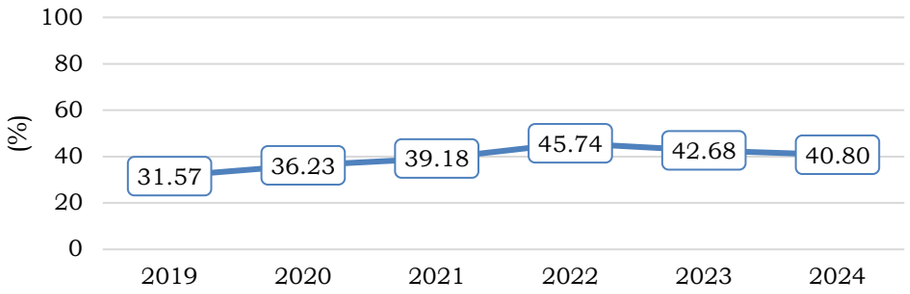
Aspek daya saing daerah bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing daerah. Aspek ini meliputi pemahaman mengenai (1) Daya saing SDM; (2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; (3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru; (4) Transformasi Digital; (5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; (6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; serta (7) Stabilitas Ekonomi Makro.

2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pada Kabupaten Tangerang, Rasio Ketergantungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan tersebut merupakan 100 orang yang berusia kerja dan dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif atau

dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi semakin meningkat dan tidak seiring dengan peningkatan jumlah orang produktif dan berusia kerja.

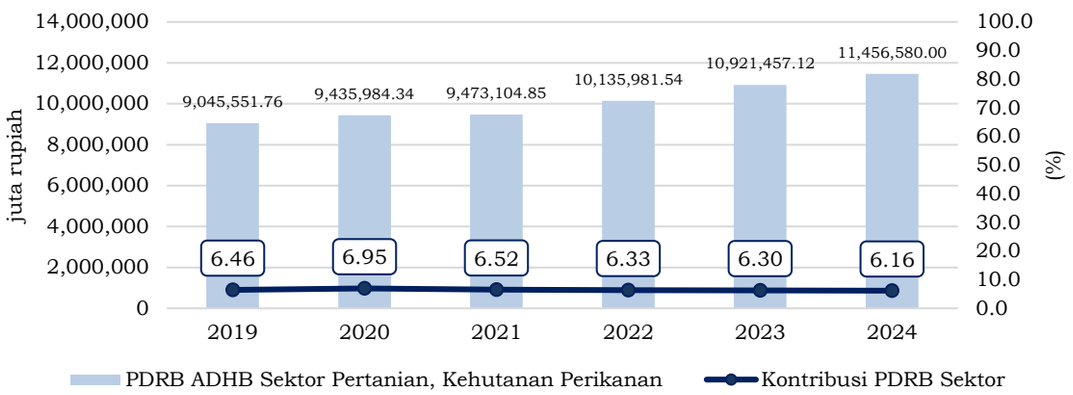


Gambar 2.81
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

2.1.3.2 IPTEK INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

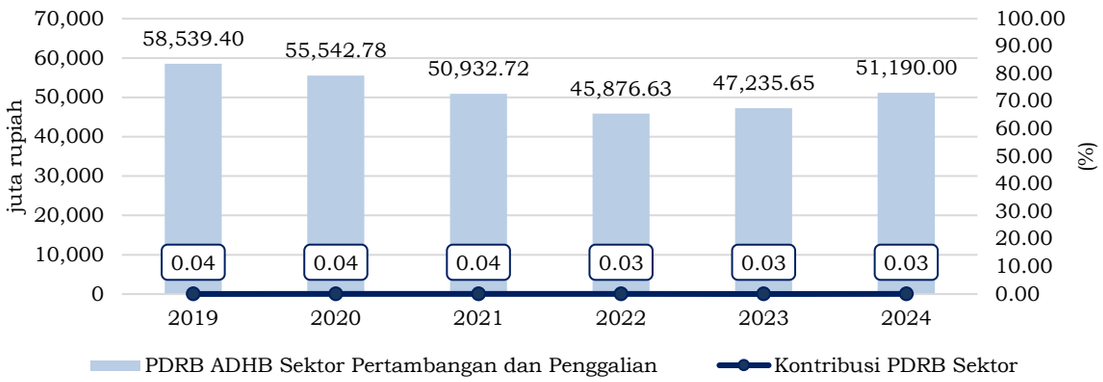
Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi berbagai wilayah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Tangerang bukan menjadi penyokong ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang relatif rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11.456,58 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 6,16% terhadap total PDRB Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.82
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

B) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

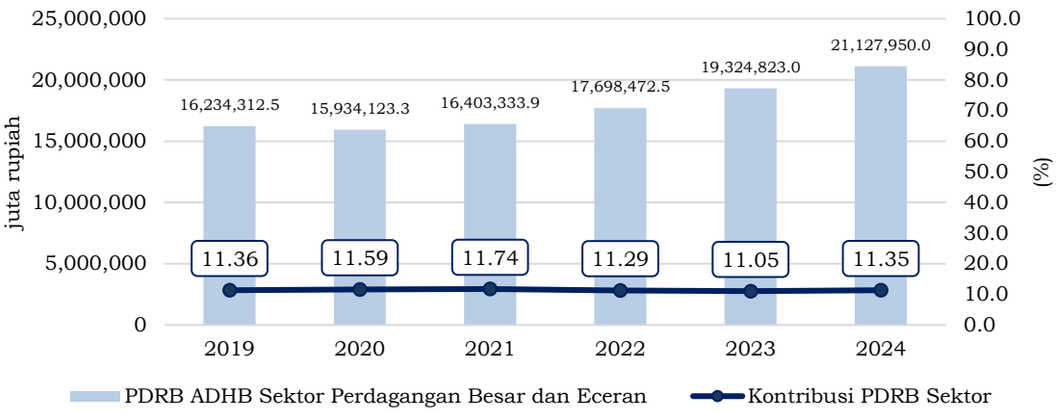
Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor primer dalam perekonomian. Kontribusi sektor pertambangan Kabupaten Tangerang cenderung rendah dan mencapai nilai 0,03% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan bukan merupakan sektor yang menyokong perekonomian Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.83
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

C) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

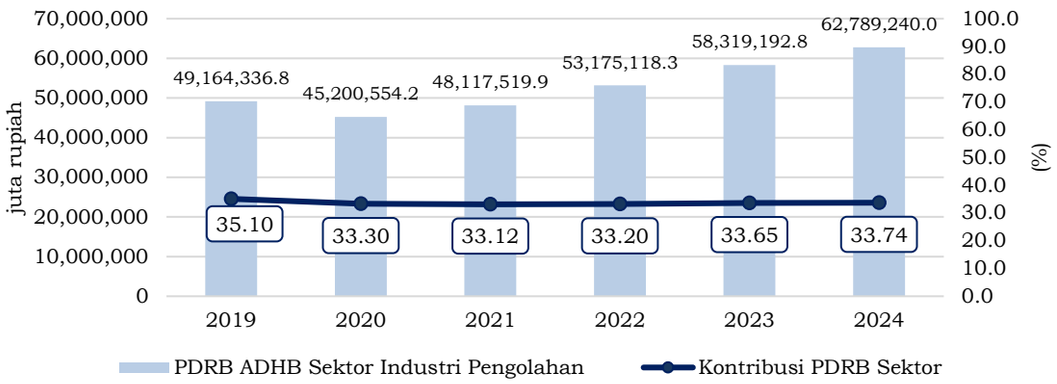
Sebagai salah satu kota penyangga Jabodetabek, Kabupaten Tangerang tumbuh didukung dengan kegiatan perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Tangerang cenderung tinggi meski mengalami tren penurunan. Dalam rentang waktu 2019-2024, kontribusi sektor perdagangan berkisar pada angka 11% dalam PDRB. Hal ini menunjukkan kuatnya perkembangan sektor perdagangan dalam menyokong ekonomi Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.84
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

D) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

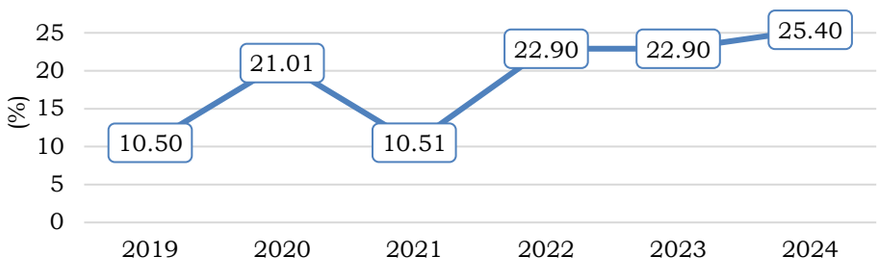
Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang. Sektor industri memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB meski tren pertumbuhannya cenderung stagnan. Kontribusi sektor industri dalam PDRB mencapai berkisar antara 34-35%. Hal ini menunjukkan bahwa industri menjadi sektor penyokong perekonomian Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.85
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

E) Pertumbuhan Industri

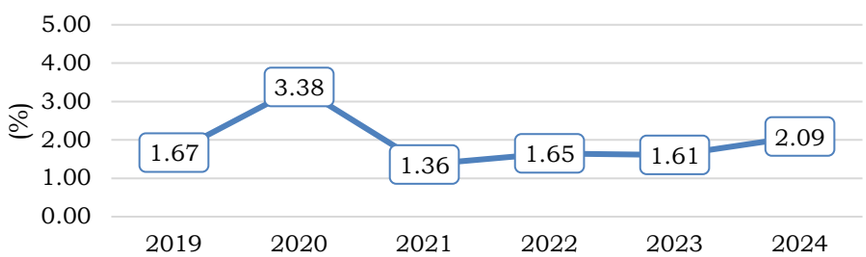
Industri sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat di Kabupaten Tangerang tidak sering dengan pertumbuhan industri di wilayah ini. Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020-2021 dan meningkat pada tahun 2022-2024. Pertumbuhan industri di wilayah ini berkisar antara 10-25%.



Gambar 2.86
Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang

F) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio ini menunjukkan jumlah wirausaha yang mempekerjakan orang dalam suatu daerah. Pada tahun 2019-2024, Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, capaian ini masih rendah sehingga diperlukan upaya untuk mendorong penciptaan wirausaha baru dan skalabilitas usaha.



Gambar 2.87
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

G) Partisipasi Angkatan Kerja

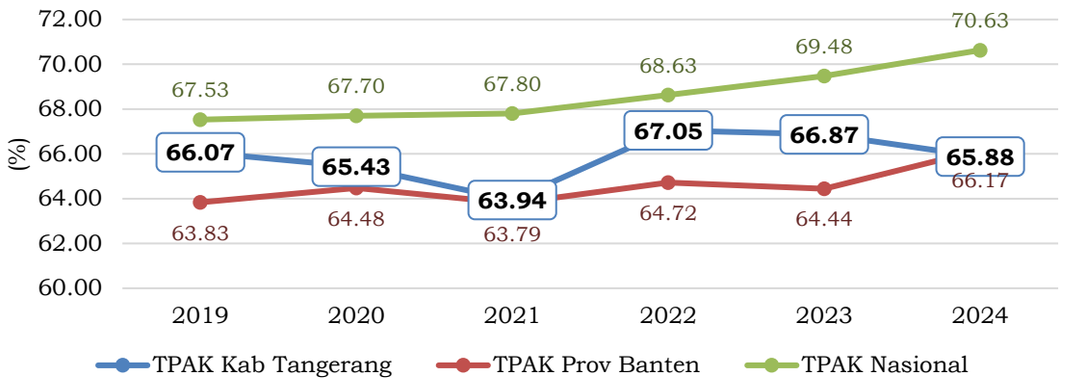
Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja 15 tahun ke atas terhadap total penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang rasio penyerapan angkatan kerja dalam lapangan pekerjaan. Pada 2024, angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Tangerang tergolong rendah dalam nilai 65,88%. Hal tersebut menunjukkan serapan angkatan kerja di wilayah ini masih cenderung rendah dan masih tingginya jumlah angkatan kerja yang menganggur di wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan lulusan sekolah dasar dan SLTP dalam lapangan pekerjaan. Sementara itu, masyarakat dengan lulusan SLTA dan perguruan tinggi cenderung sudah terserap dan mendapatkan pekerjaan lain.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2024

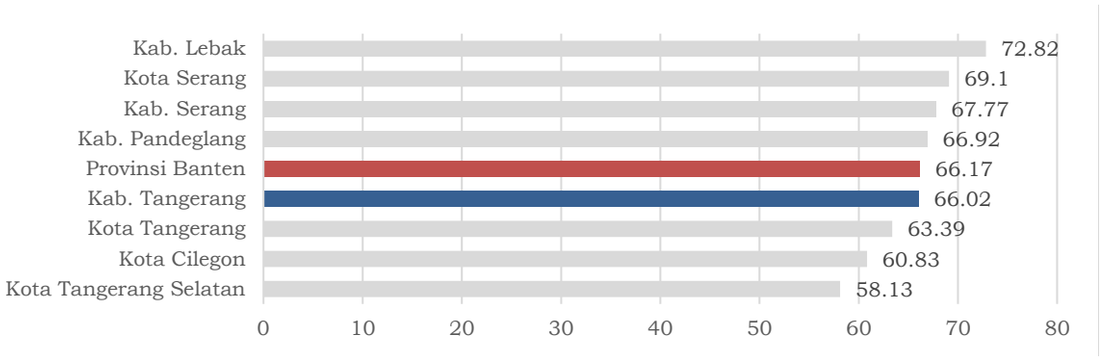
SD	SLTP	SLTA	PT	Total
58,54	55,73	74,82	79,27	65,88

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sementara itu, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Capaian TPAK di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam enam tahun (2019-2024). Persentase ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Tangerang mencapai persentase stagnan dan memerlukan optimalisasi yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja.



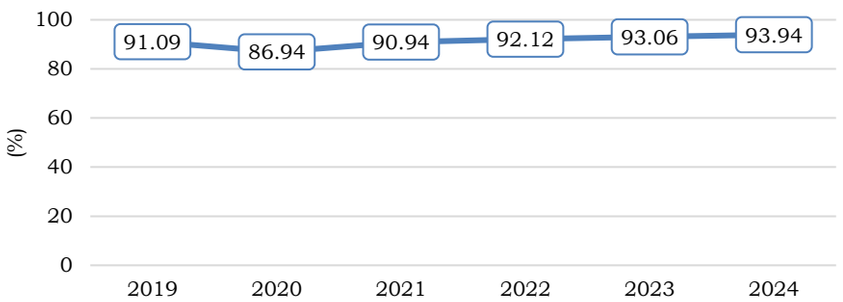
Gambar 2.88
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024



Gambar 2.89
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

H) Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

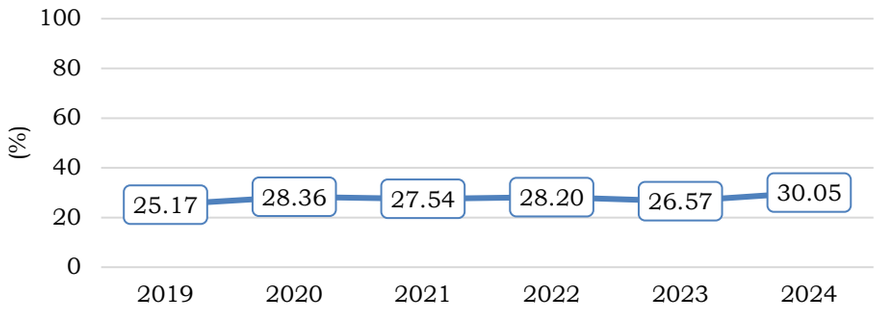
Rasio Kesempatan Kerja atau *employment to population ratio* merupakan proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam 5 tahun (2019-2024). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tangerang sudah bekerja.



Gambar 2.90
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

I) Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri merupakan seseorang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomi merupakan seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap. Sedangkan proporsi pekerja bebas keluarga terbagi menjadi tiga aspek yaitu pekerja bebas pertanian, pekerja keluarga dan pekerja bebas non pertanian. Pada grafik ini, kontribusi tenaga kerja ditambahkan dengan kontribusi pekerja berusaha sendiri dan dibandingkan dengan total kesempatan kerja akan menghasilkan nilai tingkat kesempatan kerja rentan.



Gambar 2.91
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

J) Kondisi Riset dan Inovasi

Mengacu pada Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, riset dan inovasi merupakan sebuah ekosistem terhubung yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di suatu daerah. Melalui ekosistem riset dan inovasi, daerah dapat melakukan akselerasi pembangunan dan menerapkan inovasi teknologi. Elemen-elemen yang membentuk ekosistem tersebut adalah: 1) kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah; 2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di daerah; 3) kemitraan riset dan inovasi di daerah; 4) budaya riset dan inovasi di daerah; 5) keterpaduan riset dan inovasi di daerah; dan 6) penyelarasan dengan perkembangan global.

Menurut dokumen RIPJPID Kabupaten Tangerang, pelaksanaan riset dan inovasi saat ini terbagi dalam prioritas-prioritas pengembangan Program Unggulan Daerah (PUD) dan penyelesaian permasalahan utama daerah. Prioritas pengembangan PUD di Kabupaten Tangerang terdiri dari:

1) Prioritas 1 : Pengembangan PUD Produk Laksa
2) Prioritas 2 : Pengembangan PUD Alas Kaki
3) Prioritas 3 : Pengembangan PUD Bandeng (dan Olahannya)
4) Prioritas 4 : Pengembangan PUD Produk Garmen dan Tekstil
5) Prioritas 5 : Pengembangan PUD Produk Ikan Asin
6) Prioritas 6 : Pengembangan PUD Jahe Merah
7) Prioritas 7 : Pengembangan PUD Kerajinan Anyaman Bambu
8) Prioritas 8 : Pengembangan PUD Lele (dan Olahannya)
9) Prioritas 9 : Pengembangan PUD Tas Tali Kur
10) Prioritas 10 : Pengembangan PUD Olahan Singkong

Sementara, prioritas permasalahan utama daerah yang diatasi oleh inovasi dan riset adalah sebagai berikut:

1) Derajat kesehatan yang masih rendah
2) Ketimpangan pembangunan ekonomi
3) Penyediaan infrastruktur lingkungan
4) Pengelolaan kebencanaan dan lingkungan hidup
5) Tata kelola pemerintahan yang belum kolaboratif

2.1.3.3 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

Penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Aspek pembangunan tersebut diukur melalui Indikator Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), serta porsi EBT dalam Bauran Energi Primer. Akan tetapi, kedua indikator tersebut belum dilakukan perhitungan di tingkat kabupaten. Maka dari itu sebagaimana Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Provinsi Banten, sehingga capaian

Provinsi Banten mencerminkan kondisi implementasi ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Tangerang.

Capaian *Green Economy Index* (GEI) Provinsi Banten tahun 2021 sebesar 41,83 (Bappenas, 2023). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, posisi tersebut mencerminkan kapasitas dan kesiapan Banten yang masih cenderung rendah dalam penerapan Ekonomi Hijau, terutama pada aspek yang berkaitan langsung dengan ekologi. Indikator lainnya yaitu Indeks Ekonomi Biru Indonesia untuk Provinsi Banten termasuk rendah yaitu 22,62. Selain itu, transisi EBT Provinsi Banten termasuk rendah yang ditunjukkan dengan realisasi EBT Provinsi Banten pada Tahun 2023 3,03% (0,83 MTOE) dari target 6,71%. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang, terlebih lagi tantangan ke depan yaitu menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah.

2.1.3.4 TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital merupakan berperan penting sebagai *enabler* percepatan pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berdaya saing. Transformasi digital dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan *super platform*, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital.

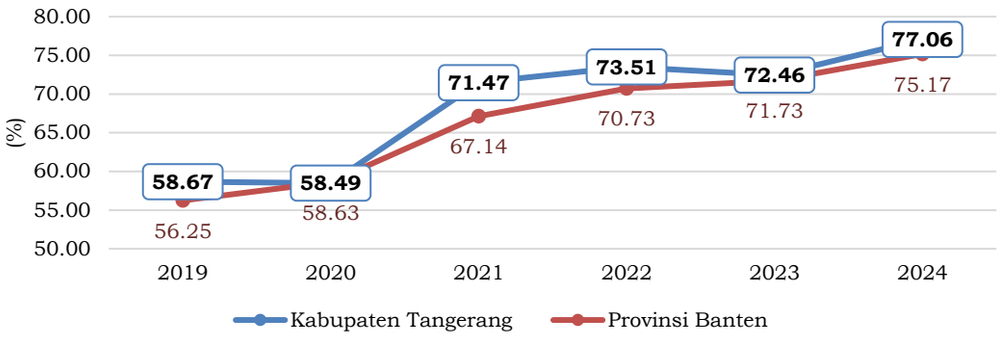
A) Indeks Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital suatu daerah dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Indeks Transformasi Digital Nasional. Akan tetapi, indikator tersebut belum dilakukan perhitungan di tingkat kabupaten. Maka dari itu sebagaimana Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Provinsi Banten, sehingga capaian Provinsi Banten mencerminkan transformasi digital di Kabupaten Tangerang.

Capaian Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Provinsi Banten tahun 2022 sebesar 55,83. Capaian tersebut di atas rata-rata nasional yaitu 49,20, tetapi masih jauh tertinggal dari Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mendorong transformasi digital di Kabupaten Tangerang melalui pengembangan infrastruktur digital, produksi talenta digital, dan tata kelola layanan publik melalui *e-government.*

B) Rumah Tangga dengan Akses Internet

Jangkauan dan akses terhadap internet menunjukkan keterbukaan terhadap informasi layanan dasar, peluang ekonomi (*e-commerce*), pengembangan sumber daya manusia (literasi digital), dan lain sebagainya. Kabupaten Tangerang sendiri memperlihatkan tren yang positif dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Dalam hal ini, pengguna internet di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga terbanyak di Provinsi Banten di bawah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

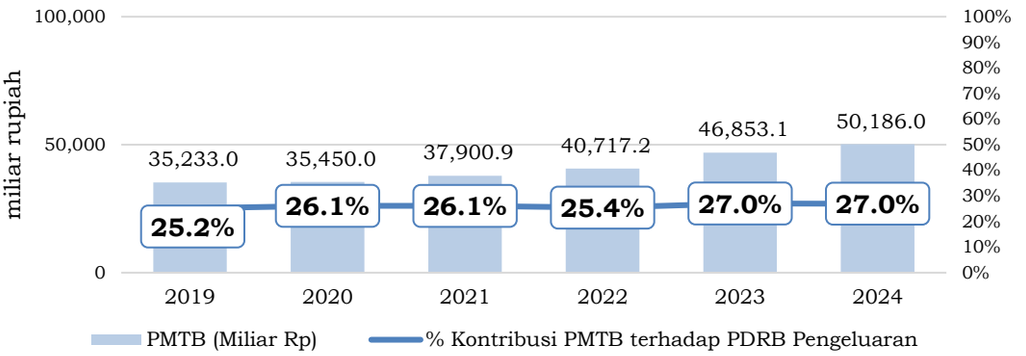


Gambar 2.92
Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten

2.1.3.5 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

A) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. PMTB mengukur besarnya investasi dalam aset tetap, yaitu aset yang digunakan dalam jangka panjang untuk menghasilkan barang atau jasa.



Gambar 2. 93
Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

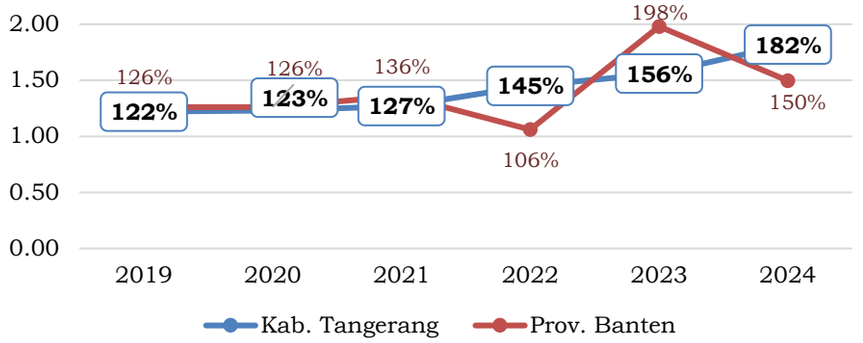
Pada tahun 2024, PMTB Kabupaten Tangerang memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Dalam lima tahun terakhir, Nilai PMTB mengalami peningkatan dengan rata-rata 7,3% per tahun dan selaras dengan peningkatan kontribusinya terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Tangerang.

Nilai PMTB berhubungan dengan realisasi investasi di Kabupaten Tangerang. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

B) Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio ekspor dan impor terhadap PDB merupakan indikator keterbukaan ekonomi suatu wilayah. Nilai indikator keterbukaan ekonomi dapat dihitung menggunakan perbandingan antara total nilai ekspor dan impor barang dan jasa pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan PDB dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi kegiatan ekspor dan impor,

semakin menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah. Nilai ekspor dan impor Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui PDRB ADHB menurut pengeluaran.



Gambar 2.94
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

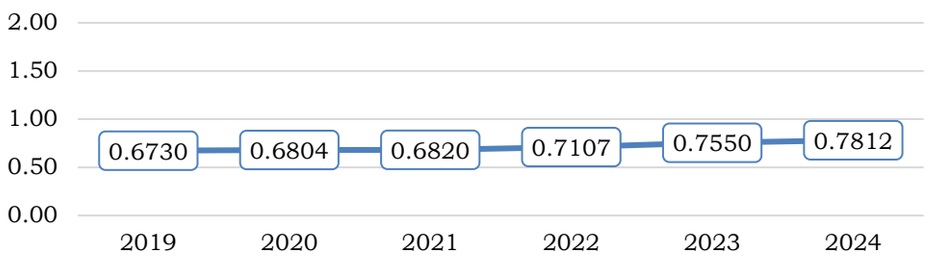
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Tangerang perlahan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ekspor atau penjualan barang dan jasa keluar daerah lebih tinggi daripada impor yang berdampak kepada peningkatan pasar dan daya saing ekonomi daerah.

2.1.3.6 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A) Indeks Desa

Indeks Desa merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan suatu desa dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan memedomani Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024. Indeks Desa diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Indeks Desa menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa dan digunakan sebagai indikator pembangunan dalam RPJP dan/atau RPJM nasional serta daerah. Pada periode sebelum tahun 2024, telah ada indikator Indeks Super untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Maka dari itu, dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa dalam lima tahun terakhir menggunakan Indeks Desa Membangun.



Gambar 2.95
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Capaian indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 0,7820 dengan status 'Maju'. Capaian IDM Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten (0,6930) dan nasional

(0,7034). Dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tangerang.

B) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan. Rasio rumah layak huni dapat dihitung dengan perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Kabupaten Tangerang memiliki rasio rumah layak huni yang menurun pada tahun 2019-2021. Cakupan ini menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk yang memiliki rumah layak huni.

Tabel 2.14
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang		
2019	2020	2021
0,30	0,27	0,26

Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024

C) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

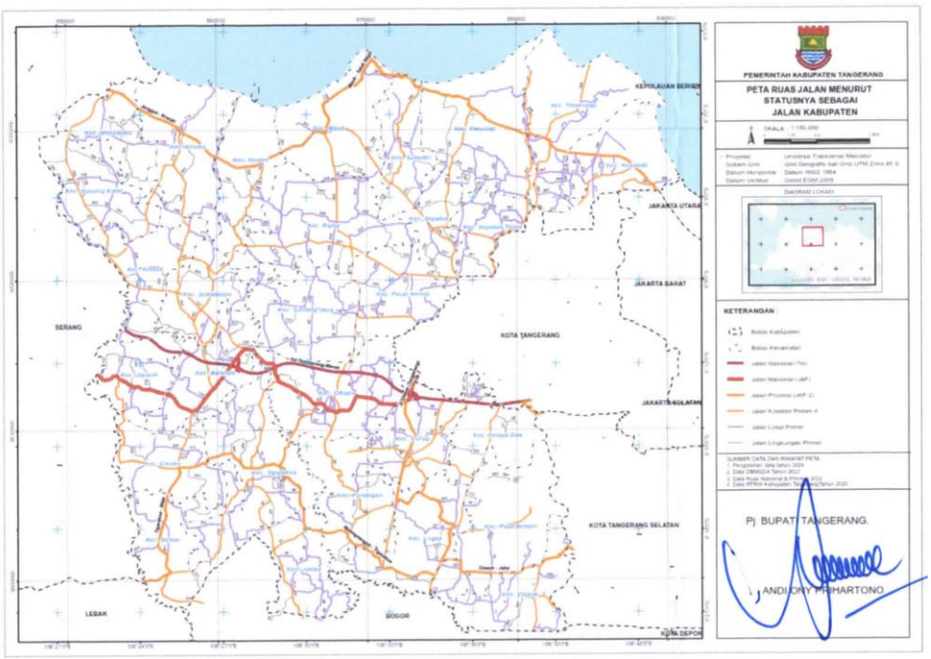
Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Tabel 2.15
Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024*)
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (km)	566,25	569,28	752,7	774,86	802,16	463,74
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang (km)	312,75	299,79	148	114,21	132,86	243,92
Panjang Jalan Total (km)	992,61	992,61	992,61	992,61	992,61	1096,26
Persentase Kondisi Jalan Mantap (%)	88,55%	87,55%	90,74%	92,59%	94,20%	64,55%

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2023
**) Estimasi Kondisi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 600.1/Kep.899-Huk/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten*

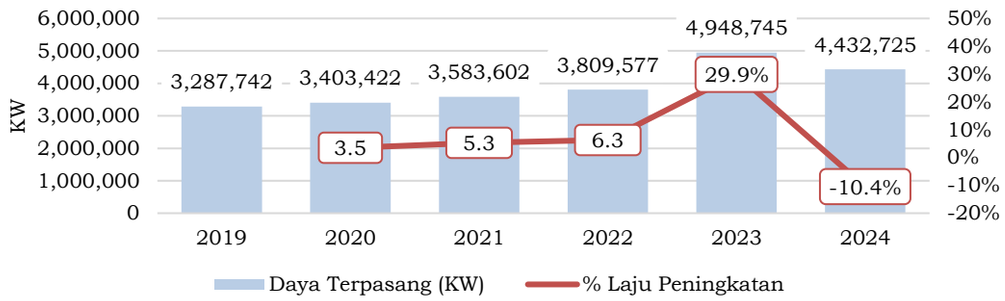
Proporsi panjang jalan di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren yang meningkat. Jika dilihat dari persentase, jalan mantap berhasil naik dari 88,55% pada tahun 2019 menjadi 94,20% pada tahun 2023. Angka proporsi jalan dalam kondisi mantap memperlihatkan seberapa panjang jalan yang sudah mencapai kelayakan (kondisi baik dan sedang). Jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat harus mendapatkan perbaikan segera demi menjaga keselamatan berkendara. Sementara itu, data tahun 2024 menunjukkan penurunan persentase jalan dalam kondisi mantap menjadi 64,55%, karena adanya penyesuaian status jalan kabupaten sesuai Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 600.1/Kep.899-Huk/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten. Berikut peta ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten sesuai surat keputusan tersebut.



Gambar 2.96
Peta Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten Tahun 2024
Sumber: Lampiran II Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 600.1/Kep.899-Huk/2024

D) Daya Listrik Terpasang

Daya listrik yang terpasang menunjukkan jumlah kWh yang mampu digunakan di kabupaten/kota masing-masing. Daya ini dialirkan untuk memberikan layanan listrik kepada rumah tangga. Pada tahun 2024, besaran daya terpasang di Kabupaten Tangerang sebesar 4,43 juta KW dan menjadi kabupaten yang memiliki daya listrik terbesar di Provinsi Banten.

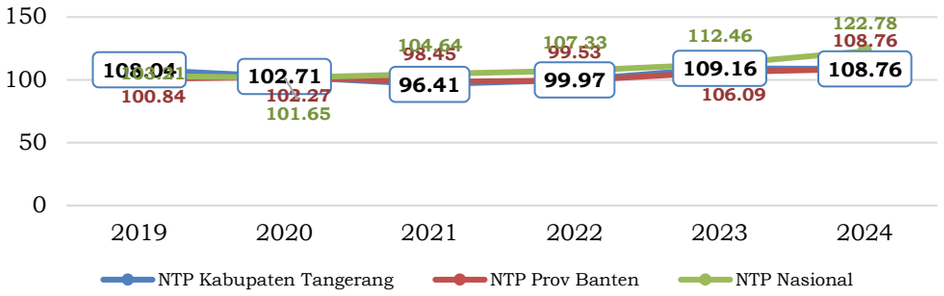


Gambar 2.97
Daya Listrik Terpasang di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

E) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani padi dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani padi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jurnal *Social Economic of Agriculture*, NTP di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan angka NTP. Pada tahun 2023, NTP Kabupaten Tangerang sebesar 109,16 dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten tetapi lebih rendah dibandingkan nasional. Capaian NTP Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019-2021 menunjukkan penurunan capaian NTP yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani Kabupaten Tangerang semakin menurun, meskipun angka tersebut tergolong cukup

tinggi. Meskipun sempat meningkat pada 2021-2023, capaian NTP kembali menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 108,76

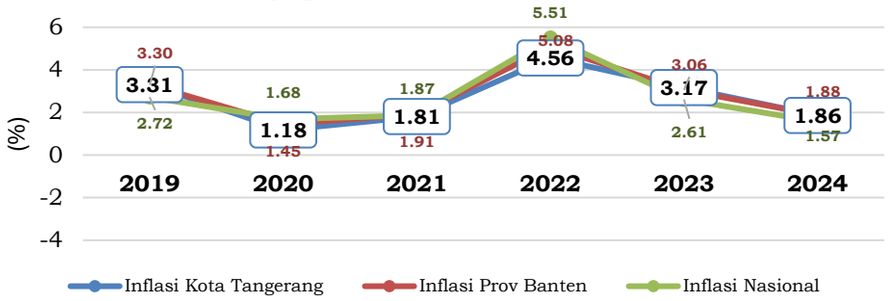


Gambar 2.98
Nilai Tukar Petani Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten; BPS Nasional; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.1.3.7 STABILITAS EKONOMI MAKRO

A) Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase peningkatan kenaikan harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga. Laju inflasi berpengaruh erat terhadap perekonomian masyarakat salah satunya adalah daya beli masyarakat. Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk pada inflasi Kota Tangerang[1]. Berdasarkan data BPD Kabupaten Tangerang, secara umum laju inflasi Kabupaten Tangerang meningkat drastis setelah menurun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2024), laju inflasi 2024 (yoy), inflasi tetap terjaga mengalami perlambatan dari tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Penurunan laju inflasi perlu diperhatikan, karena deflasi yang berkepanjangan bisa mengindikasikan pelemahan ekonomi. Maka dari itu diharapkan inflasi terus terjaga di 2,5%+1,0%.



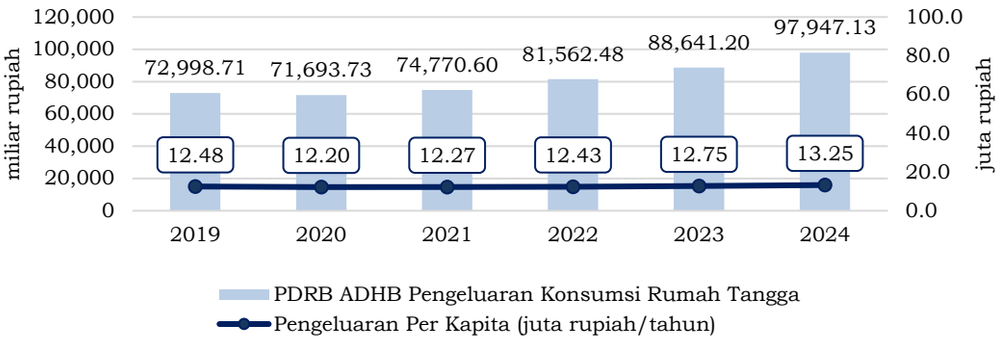
Gambar 2.99
Laju Inflasi Kota Tangerang (termasuk Kabupaten Tangerang) dan Nasional Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024); Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Banten, Bank Indonesia (2025)

B) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

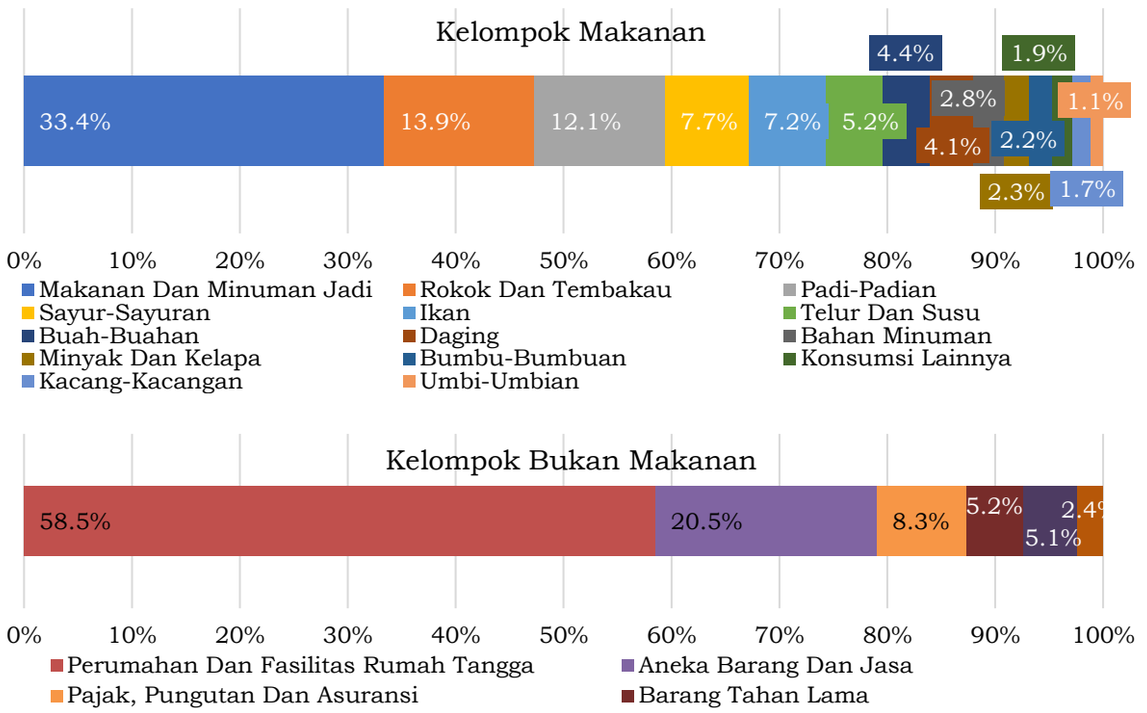
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dapat dilihat melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tangerang, pengeluaran konsumsi rumah tangga (2019-2024) meningkat 6,1% per tahun. Pada tahun 2021-2023 terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan

[1] Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk kepada inflasi Kota Tangerang sebagai *sister city* dengan pola konsumsi dan besaran PDRB yang hampir sama serta letak geografis yang berdekatan dengan Kabupaten Tangerang

penghasilan masyarakat yang tercermin pada peningkatan kinerja sektor Perdagangan, Transportasi, dan Pariwisata (Bank Indonesia, 2023)[2].



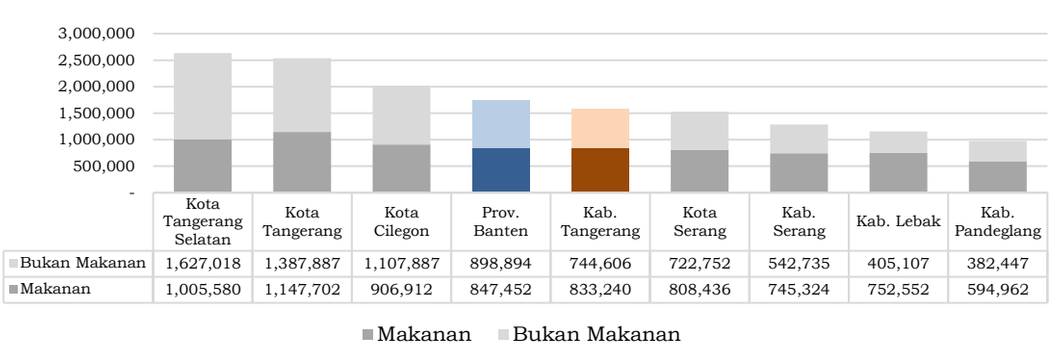
Gambar 2.100
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2.101
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Pada tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.577.846 per jiwa/bulan dengan pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp833.240 per jiwa/bulan (atau 52,43% dari total pengeluaran) dan pengeluaran kelompok bukan makanan sebesar Rp744.606 per jiwa/bulan (atau 47,57% dari total pengeluaran).

[2] Bank Indonesia (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Banten November 2023. *https://ketenteraman.bi.go.id/id/publikasi/*



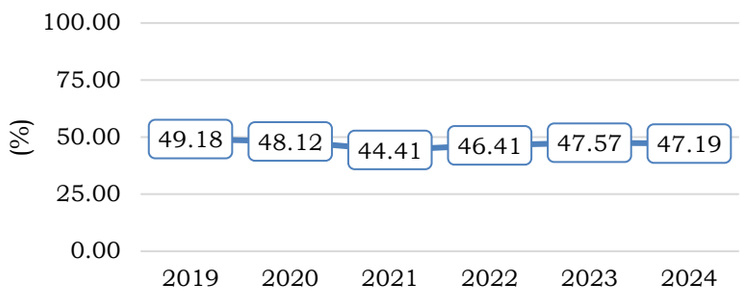
	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Prov. Banten	Kab. Tangerang	Kota Serang	Kab. Serang	Kab. Lebak	Kab. Pandeglang
Bukan Makanan	1,627,018	1,387,887	1,107,887	898,894	744,606	722,752	542,735	405,107	382,447
Makanan	1,005,580	1,147,702	906,912	847,452	833,240	808,436	745,324	752,552	594,962

Gambar 2.96
Perbandingan Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Perbandingan pengeluaran per kapita dapat mencerminkan perbandingan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan/atau kontribusi sektor ekonomi, serta potensi pasar dalam suatu daerah. Berdasarkan diagram di atas, bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Tangerang tertinggi keempat di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Selain itu, dari gambar di atas tercermin bahwa wilayah perkotaan memiliki kecenderungan pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan.

C) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan merupakan nilai seluruh kemampuan daya beli penduduk dalam bentuk non pangan. Konsumsi non pangan terdiri atas lima sektor dengan jumlah persentase terbesar adalah sektor perumahan dan fasilitas rumah tangga. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada kurun waktu 2019-2024 memiliki angka yang stagnan. Hal ini menandakan bahwa pendapatan masyarakat cenderung tidak diinvestasikan kepada sektor lain selain konsumsi pangan. Maka dari itu, sektor konsumsi non pangan yang penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang menjadi terbatas.



Gambar 2.97
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Aspek ini meliputi 4 (empat) sub-bab yaitu (1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; (2) Hukum Berkeadilan Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial; (3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan serta (4) Kinerja Urusan Pemerintah

Daerah yang terbagi atas fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non dasar dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan suatu penilaian atas upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2019 hingga 2022, IRB cenderung mengalami peningkatan dengan capaian 62,74 dengan kategori BB/baik, perlu sedikit perbaikan.

Mulai tahun 2023, komponen penilaian Indeks RB berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023. Didapatkan perolehan RB General sebesar 65,94 dan RB Tematik sebesar 10,73. Hasil akhir evaluasi menunjukkan bahwa capaian Indeks RB di Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah 76,67 dengan kategori BB. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 84,56 dengan kategori A-. Di tahun 2024, perolehan RB General adalah 75,14 dan RB Tematik sebesar 9,42.

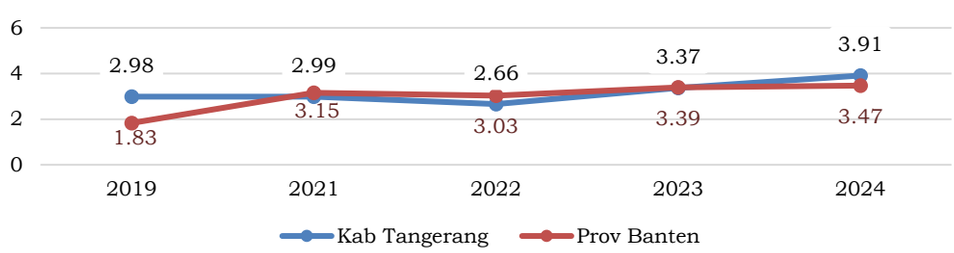
Tabel 2.16
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Indeks Reformasi Birokrasi					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
50,37	58,39	58,84	62,74	76,67	84,56

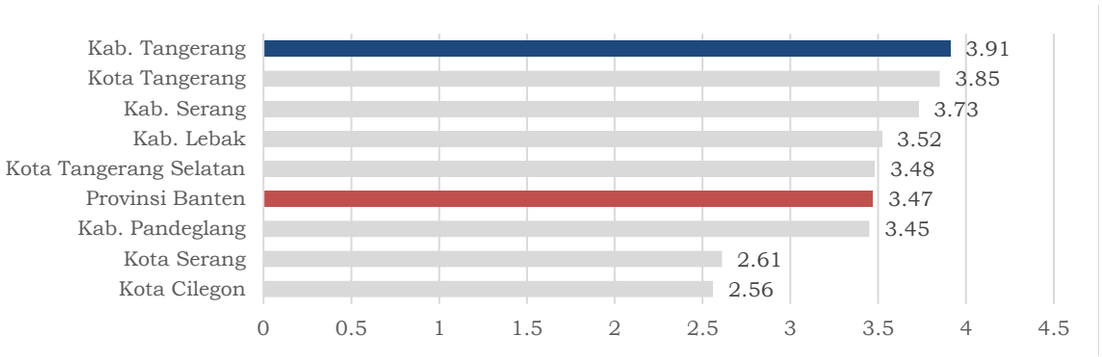
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

B) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Tangerang meningkat dalam 3 tahun terakhir, mencapai 3,91 dari nilai maksimal 5,00 di tahun 2024. Kabupaten Tangerang menduduki peringkat pertama dengan indeks SPBE tertinggi di Provinsi Banten, dibandingkan dengan kota/kabupaten lain, sekaligus lebih unggul dibandingkan capaian provinsi.



Gambar 2.98
Indeks SPBE Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020-2025



Gambar 2.99
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

C) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 adalah sebesar 4,08 dan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 4,17.

Tabel 2.17
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024

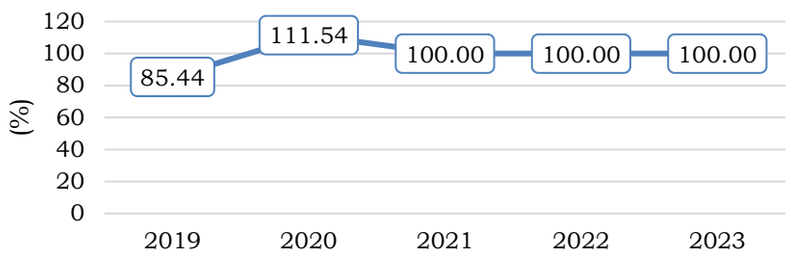
Indeks Pelayanan Publik			
2021	2022	2023	2024
3,91	4,12	4,08	4,17

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

A) Persentase Penegakan Perda

Dalam menjamin ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat diperlukan adanya penegakan peraturan daerah. Penyelesaian penegakan perda di wilayah ini sudah tergolong baik yakni pada 2020-2023 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjamin ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda.

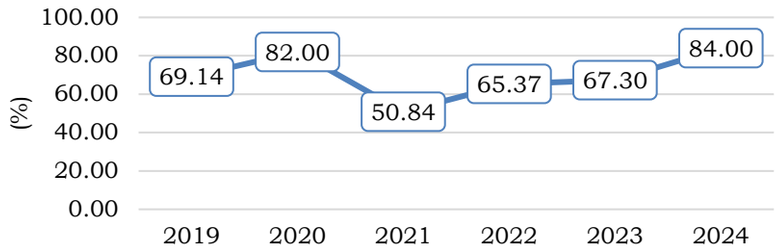


Gambar 2.100
Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024

B) Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator keamanan di mana tindak kriminal sudah ditangani dalam suatu wilayah tertentu. Angka kriminalitas yang tertangani dapat dihitung dengan jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Pada Kabupaten Tangerang, angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 1.309 kasus yang

tertangani pada tahun 2023. Dalam 6 tahun terakhir, capaian tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 84%. Hal ini menandakan bahwa instansi terkait dapat mengatasi kasus kriminalitas yang semakin meningkat dan tingkat keamanan juga semakin tinggi.

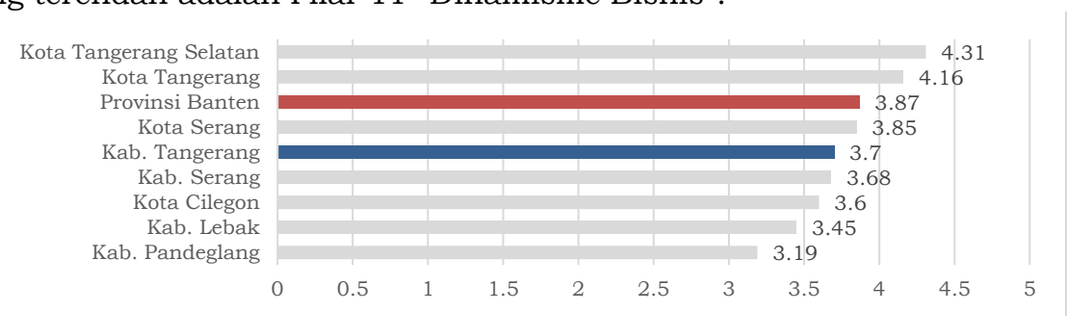


Gambar 2.101
Persentase Angka Kriminalitas atau Tindak Pidana yang Tertangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten

2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BUDAYA GENTAR KAWASAN

A) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah merupakan posisi relatif suatu daerah dengan standar faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta potensi yang dapat digali terhadap posisi daerah lain. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai 3,70 dan capaian ini berada di posisi keempat capaian IDSD tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan nilai IDSD Kabupaten Tangerang. Komponen pilar yang unggul di Kabupaten Tangerang adalah Pilar 10 “Ukuran Pasar”. Sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah Pilar 11 “Dinamisme Bisnis”.



Gambar 2.102
Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

B) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Di tahun 2024, capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebesar 63,15 dengan kategori sangat inovatif.

Tabel 2.18
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Indeks Inovasi Daerah					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.274	41,16	54,7	54,7	61,49	63,15

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

2.1.4.4 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Layanan Urusan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Aspek ini meliputi tiga fokus utama yaitu fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non dasar dan fokus layanan urusan pilihan.

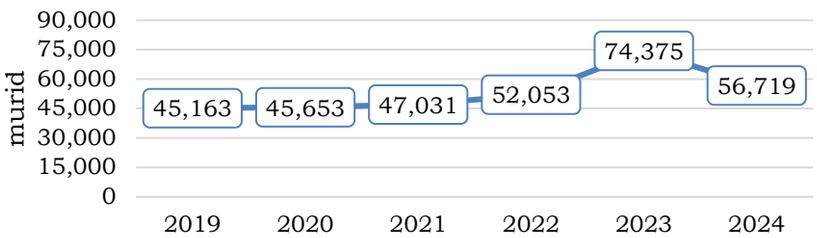
A) Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar merupakan pelayanan yang berfokus kepada kebutuhan wajib masyarakat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Fokus ini meliputi unsur pendidikan, unsur kesehatan, unsur pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur perumahan rakyat dan kawasan permukiman, unsur ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta unsur sosial.

1) Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

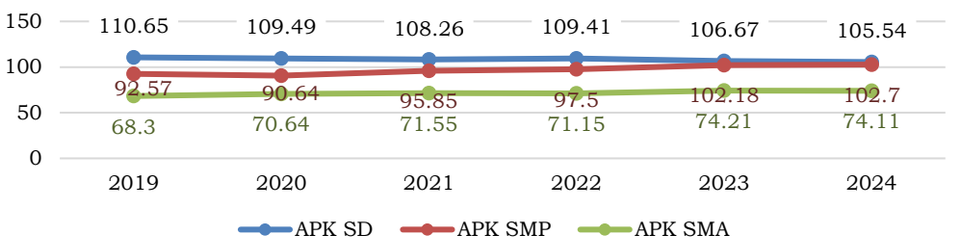
Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan yang berfokus pada pemberian stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tangerang berkembang pesat ditandai dengan tingginya jumlah murid PAUD. Selain itu, pertumbuhan PAUD juga memiliki tren positif pada kurun waktu 2019-2023. Namun, di tahun 2024 terjadi penurunan jumlah peserta didik PAUD yang cukup besar menjadi 56.719 siswa.



Gambar 2.90
Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 dan Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2024

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

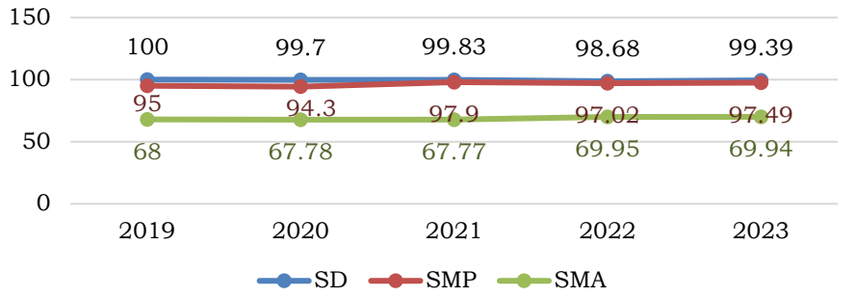
Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar sekolah dasar di Kabupaten Tangerang di tahun 2024 menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 105,54. Selain itu, angka partisipasi kasar SLTP juga tergolong tinggi. Kedua hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah penduduk yang bersekolah pada tingkat sekolah dasar dan SLTP yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian usia dengan jenjang yang ditempuh. Sedangkan APK SLTA berkisar pada nilai 74,11 yang mengindikasikan bahwa masih adanya penduduk usia SLTA yang belum/tidak mengambil pendidikan setara SLTA.



Gambar 2.91
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2020-2025

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Tangerang didominasi oleh jenjang sekolah dasar. Hampir seluruh masyarakat telah mengenyam bangku sekolah dasar. Sedangkan pada jenjang SLTP, angka pendidikan yang ditamatkan berkisar di angka 90. Hal ini menunjukkan adanya masyarakat yang belum menempuh pendidikan SLTP. Di sisi lain, masyarakat yang mampu menamatkan bangku pendidikan SLTA masih tergolong rendah dan berkisar pada angka 70. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mengenyam pendidikan SLTA.



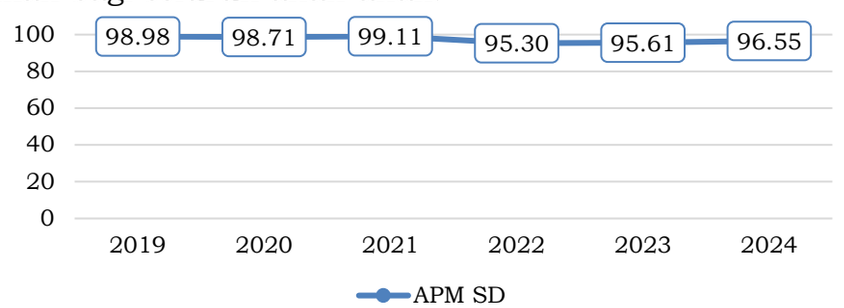
Gambar 2.103
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai. APM merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian jumlah masyarakat yang bersekolah sesuai dengan usianya.

- Angka Partisipasi Murni (APM) SD

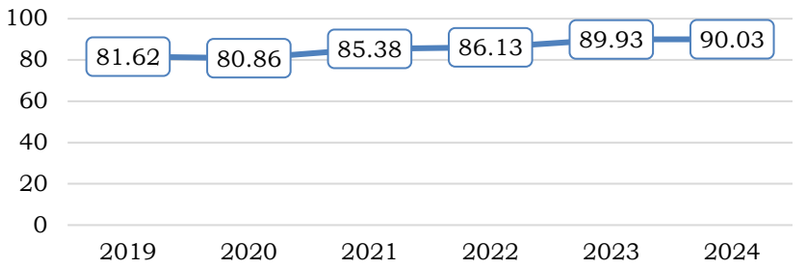
  APM tingkat sekolah dasar di Kabupaten Tangerang tergolong pada tingkat tinggi. Namun selama 2 tahun terakhir, APM tingkat sekolah dasar mengalami penurunan yang dimungkinkan karena masih ditemukannya anak yang tidak bersekolah sesuai dengan usianya. Harapannya seiring berjalannya waktu kondisi ini dapat diperhatikan untuk memberikan pendidikan bagi seluruh anak-anak.



Gambar 2.104
Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP

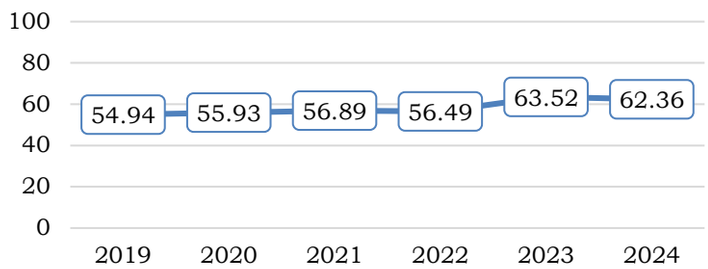
  Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP terus meningkat dari waktu ke waktu. Akan tetapi, peningkatan ini masih jauh dari ideal. APM SLTP di Kabupaten Tangerang berkisar dalam rentang nilai 80-90%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya masyarakat berusia SLTP yang tidak bersekolah. Maka dari itu diperlukan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi kondisi ini.



Gambar 2.105
Angka Partisipasi Murni SMP/Mts/Paket B Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA

  Angka Partisipasi Murni tingkat SLTA tergolong rendah meski pada 2023 telah meningkat tajam. Nilai APM yang jauh dari ideal ini memerlukan penanganan khusus agar masyarakat mampu melanjutkan pendidikan secara merata.



Gambar 2.95
Angka Partisipasi Murni SLTA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

e. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

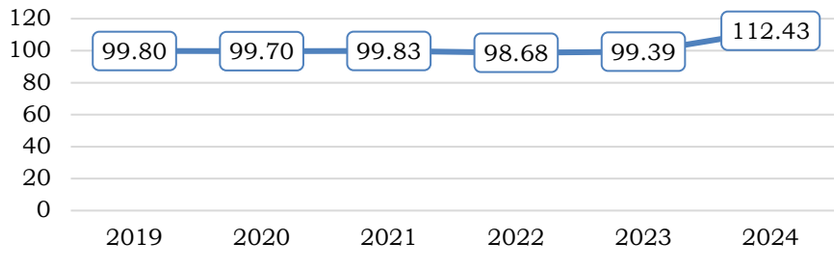
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio jumlah murid usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS menunjukkan ukuran daya serap sistem pendidikan dalam masyarakat sesuai dengan kelompok usianya.

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD

  Angka Partisipasi Sekolah PAUD menunjukkan angka partisipasi sekolah bagi siswa berusia 5-6 tahun atau setingkat TK/RA. Capaian APS PAUD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 adalah 8,30%. Berdasarkan capaian tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat setidaknya setengah penduduk Tangerang usia 5-6 tahun yang belum bersekolah dalam rangka persiapan pra-SD. Kecamatan yang penduduknya paling banyak bersekolah untuk persiapan pra-SD adalah Kec. Sepatan sebesar 72,9%. Sedangkan paling kecil pada Kec. Kemiri sebesar 26,47%.

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD

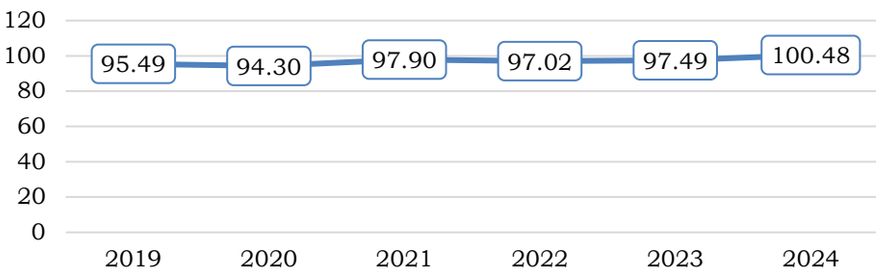
  Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 7-12 tahun menunjukkan nilai yang baik meski belum sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun sebagian besar menempuh pendidikan dasar. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa anak yang tidak/belum mengenyam pendidikan dasar.



Gambar 2.106
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP

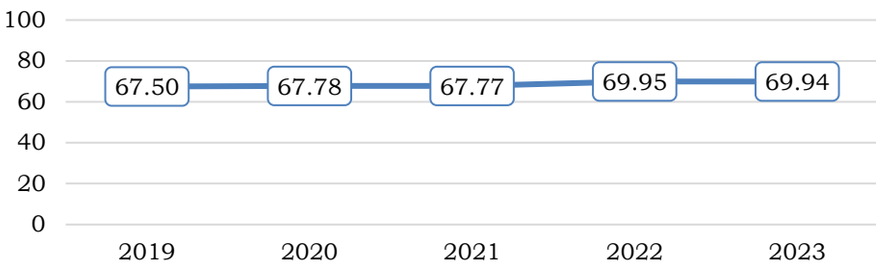
Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 13-15 tahun atau SLTP tergolong tinggi meski mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Tingginya nilai ini mengindikasikan bahwa banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan setara SLTP. Meskipun demikian masih terdapat sebagian penduduk dalam rentang usia tersebut yang belum mengenyam pendidikan menengah.



Gambar 2.107
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA

Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 16-18 tahun atau setingkat SLTA di Kabupaten Tangerang masih tergolong rendah meski telah meningkat dari waktu ke waktu. Rendahnya APS di rentang usia ini menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Tangerang. Hal ini seharusnya mampu menjadi perhatian tersendiri untuk memberikan pendidikan tingkat atas bagi masyarakat.



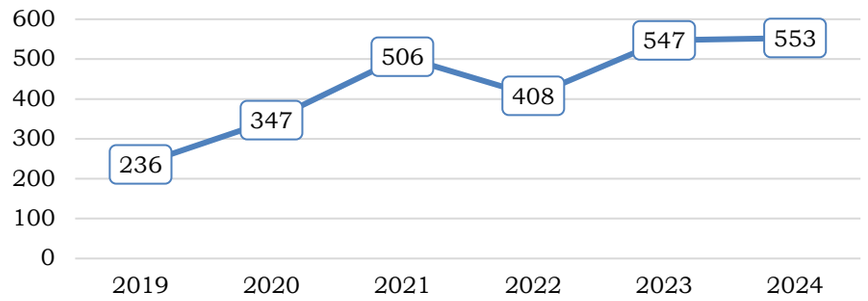
Gambar 2.108
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

f. Angka Putus Sekolah

- Angka Putus Sekolah SD

Putus sekolah merupakan fenomena yang masih terus berkembang di Kabupaten Tangerang. Jumlah siswa putus sekolah di wilayah ini cenderung berfluktuasi. Jumlah siswa SD yang putus sekolah mengalami

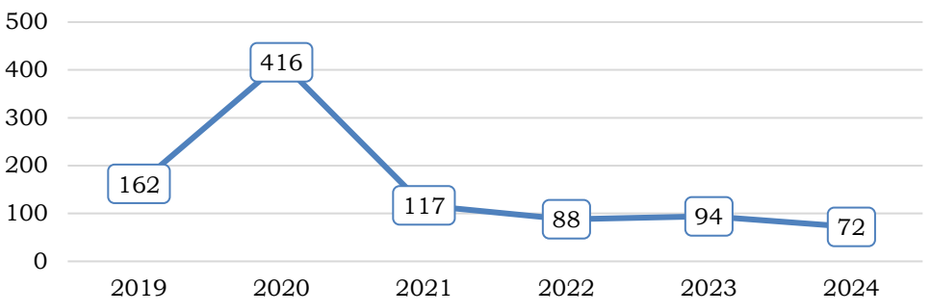
tren peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan masih tingginya masyarakat usia pendidikan dasar yang mengalami putus sekolah.



Gambar 2.109
Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- Angka Putus Sekolah (APS) SLTP

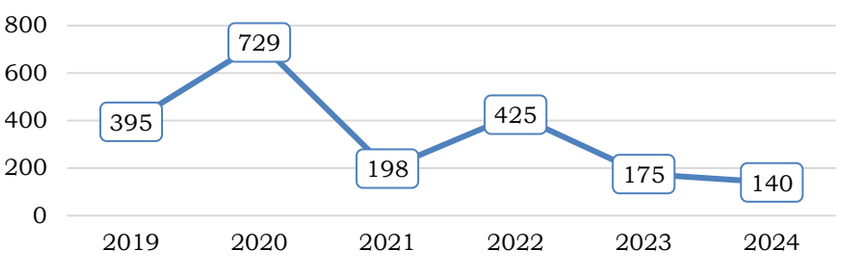
Fenomena putus sekolah juga banyak berkembang pada siswa SLTP. Jumlah siswa putus sekolah melonjak drastis pada 2020. Meskipun demikian jumlah siswa SLTP yang putus sekolah menurun pada 2021 menurun dari waktu ke waktu. Permasalahan adanya siswa yang putus sekolah ini perlu menjadi penanganan tersendiri khususnya untuk menciptakan generasi yang berkualitas.



Gambar 2.100
Angka Putus Sekolah (APS) SLTP Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- Angka Putus Sekolah (APS) SLTA

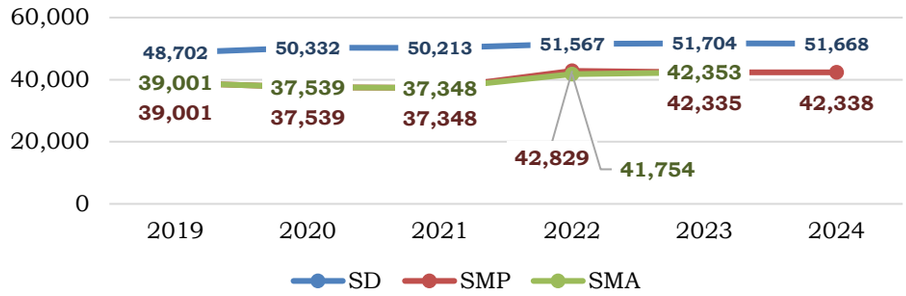
Jumlah siswa SLTA yang putus sekolah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2020, jumlah siswa SLTA yang putus sekolah mencapai 729 siswa, sedangkan pada 2024 jumlah tersebut dapat menurun hingga angka 140 siswa. Tingginya jumlah siswa yang putus sekolah dapat mempengaruhi kualitas dan kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.101
Angka Putus Sekolah (APS) SLTA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

g. Jumlah Kelulusan Siswa

Jumlah Kelulusan Siswa di Kabupaten Tangerang dalam rentang waktu 2019-2024 secara umum relatif mengalami peningkatan dari waktu ke waktu hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang.

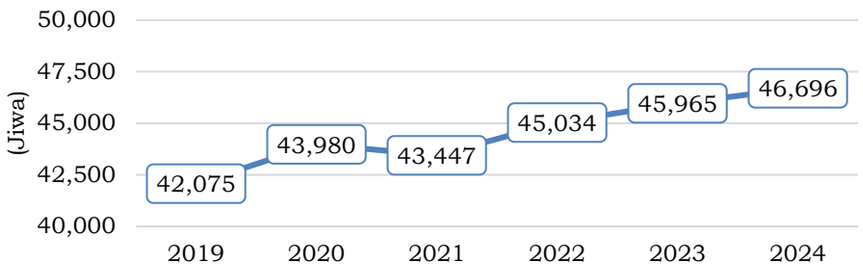


Gambar 2.102
Jumlah Siswa Lulus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2025

h. Angka Melanjutkan

➢ Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SLTP

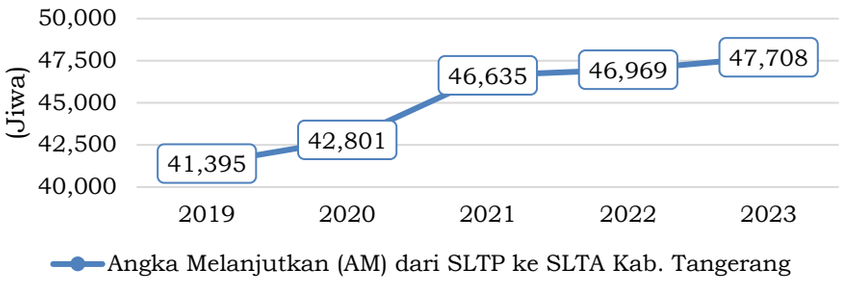
Angka melanjutkan dari SD ke SLTP merupakan persentase jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP. Angka melanjutkan dari SD ke SLTP Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tingginya angka melanjutkan ini mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan.



Gambar 2.110
Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SLTP Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

➢ Angka Melanjutkan (AM) dari SLTP ke SLTA

Angka melanjutkan dari SLTP ke SLTA merupakan persentase jumlah lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA. Angka melanjutkan dari SLTP ke SLTA Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya angka melanjutkan ini mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan.



Gambar 2.111
Angka Melanjutkan (AM) dari SLTP ke SLTA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

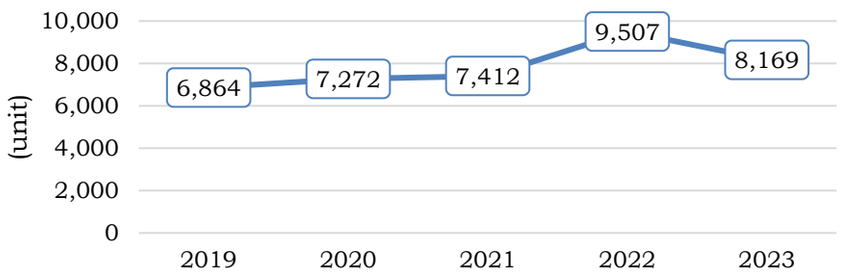
i. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Bentuk pendidikan nonformal diselenggarakan antara lain oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Data tahun 2024 menunjukkan, Kabupaten Tangerang memiliki 1.579 unit PAUD dengan status 16 PAUD negeri dan 1.563 PAUD swasta, 29,77% di antaranya telah terakreditasi. Kemudian terdapat 98 PKBM, 48,98% sudah terakreditasi, serta satu SKB terakreditasi.

j. Fasilitas Pendidikan

➢ Fasilitas Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik

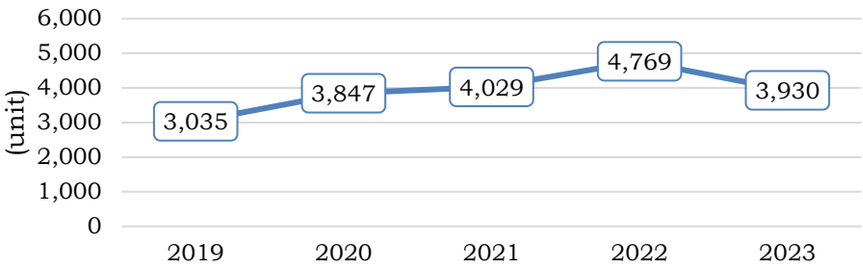
Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Penyediaan fasilitas SD dengan kondisi baik relatif meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pada 2023 jumlah fasilitas pendidikan SD dengan kondisi baik sempat mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dapat memberikan layanan pendidikan dengan kualitas yang baik.



Gambar 2.112
Jumlah Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

➢ Fasilitas Pendidikan SLTP Kondisi Bangunan Baik

Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Penyediaan fasilitas SLTP dengan kondisi baik meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pada 2023 jumlah fasilitas pendidikan SLTP dengan kondisi baik sempat mengalami penurunan yang cukup drastis.

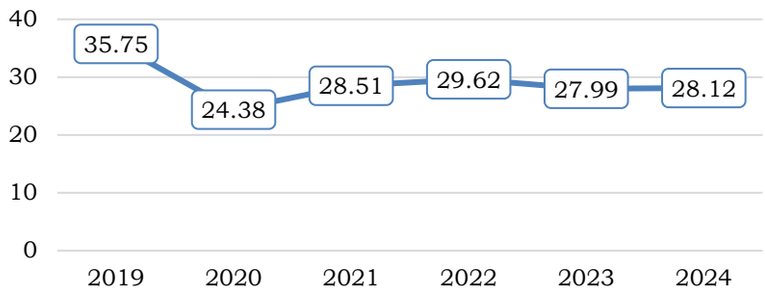


Gambar 2.113
Jumlah Fasilitas Pendidikan SLTP Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

k. Rasio Ketersediaan Sekolah

- Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

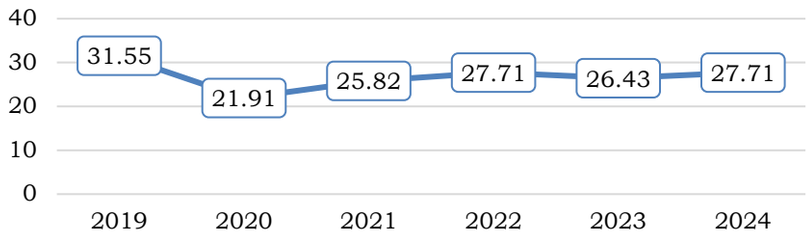
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar adalah persentase ketersediaan sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2019-2024, Kabupaten Tangerang cenderung stabil meski sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Rasio ini tergolong sedang dan menunjukkan ketersediaan pendidikan dasar di Kabupaten Tangerang berkisar antara 24-30 sekolah untuk 10.000 penduduk. Meskipun demikian rasio tersebut masih menunjukkan daya tampung penduduk usia pendidikan dasar dalam mengenyam pendidikan dasar.



Gambar 2.114
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2025

- Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah adalah persentase ketersediaan sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Dalam kurun waktu 2019-2024, Kabupaten Tangerang mengalami cenderung stabil meski sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2020. Rasio ini menunjukkan ketersediaan pendidikan menengah di Kabupaten Tangerang berkisar antara 21-31 sekolah untuk 10.000 penduduk. Meskipun demikian rasio tersebut masih menunjukkan daya tampung yang cukup baik untuk penduduk usia pendidikan menengah dalam mengenyam pendidikan menengah.

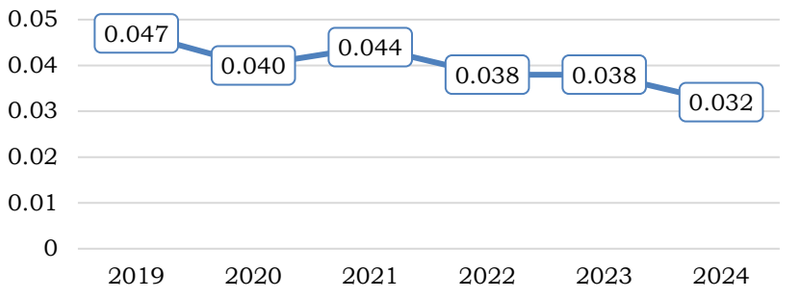


Gambar 2.115
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2025

1. Rasio Guru Terhadap Murid

➢ Sekolah Pendidikan Dasar

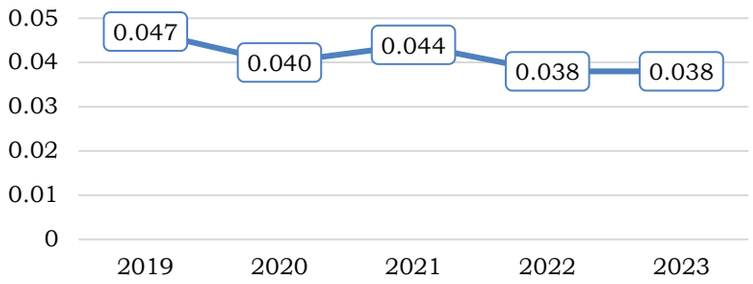
Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid pendidikan dasar. Kabupaten Tangerang memiliki rasio yang rendah hal ini menunjukkan jumlah guru yang masih sedikit dibanding dengan jumlah murid pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2019-2024, Kabupaten Tangerang cenderung stagnan dengan kecenderungan tren menurun.



Gambar 2.116
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2025

➢ Sekolah Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid pendidikan menengah. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang cenderung meningkat meski sempat mengalami penurunan pada kurun 2021-2022. Kabupaten Tangerang memiliki rasio yang cenderung rendah, hal ini menunjukkan jumlah guru yang masih sedikit dibanding dengan jumlah murid pendidikan menengah.

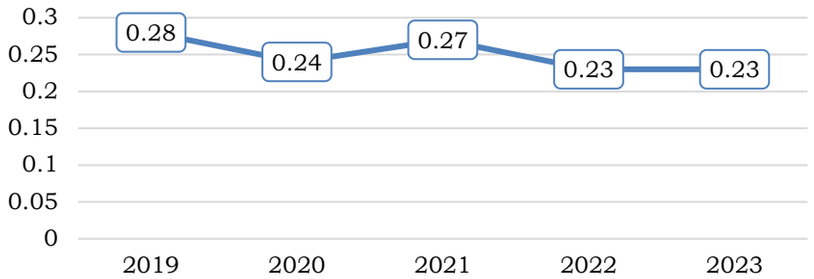


Gambar 2.117
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

m. Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

➢ Sekolah Dasar

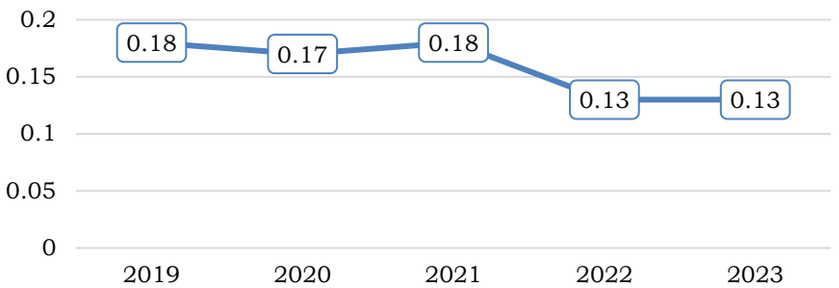
Rasio guru terhadap murid per kelas di sekolah dasar Kabupaten Tangerang berada pada kisaran angka 0,2. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah guru pada setiap kelas di sekolah dasar.



Gambar 2.118
Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

➢ Sekolah Menengah

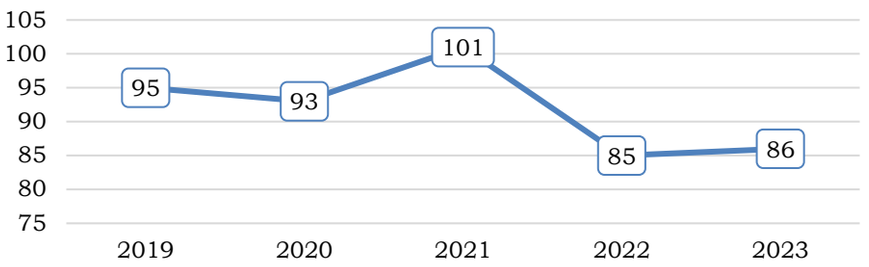
Rasio guru terhadap murid per kelas di sekolah menengah Kabupaten Tangerang relatif menurun dan berada pada kisaran angka 0,13-0,18. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah guru pada setiap kelas di sekolah menengah.



Gambar 2.119
Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

n. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

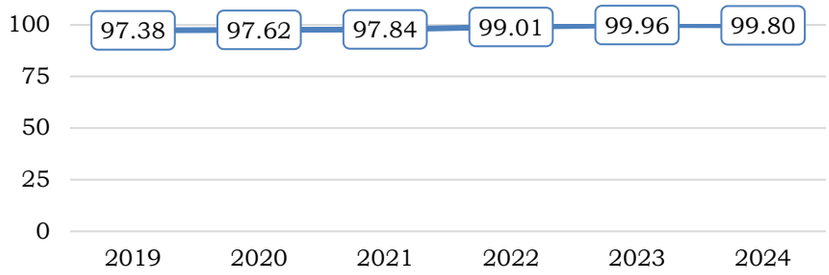
Proporsi murid kelas 1 yang dapat menamatkan sekolah dasar mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2019-2023. Secara umum proporsi ini tergolong baik, tetapi jumlah tersebut belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya murid belum dapat menamatkan sekolah dasar.



Gambar 2.120
Proporsi Murid Kelasi 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

o. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

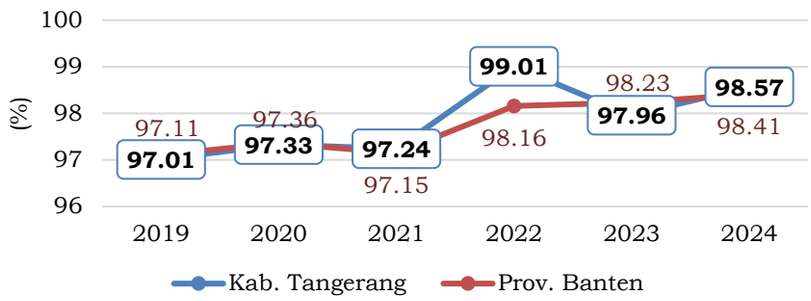
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun merupakan persentase masyarakat dalam rentang usia 15-24 tahun yang mampu membaca dan menulis per jumlah masyarakat usia 15-24 tahun. Angka ini cenderung mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 99,90 pada tahun 2024. Capaian yang belum mencapai 100% tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang masih mengalami buta aksara.



Gambar 2.121
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

p. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

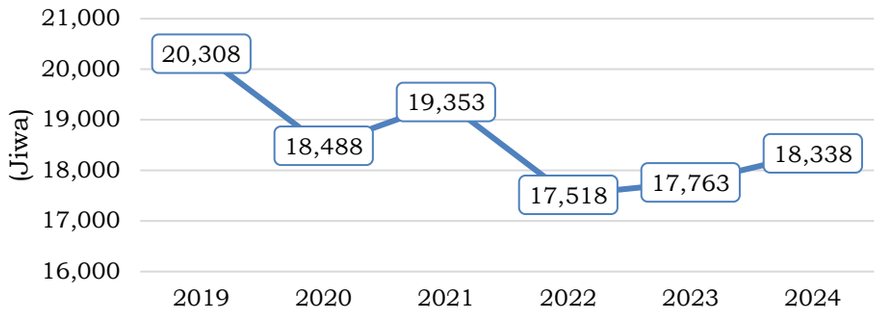
Penduduk usia >15 tahun yang tidak buta aksara menunjukkan jumlah masyarakat dewasa yang memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Secara umum, Kabupaten Tangerang memiliki persentase memiliki tren meningkat dan belum menyentuh 100%. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.



Gambar 2.122
Persentase Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

q. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan jumlah guru yang memiliki ijazah S1/D-IV. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi ini cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2024. Meskipun demikian guru yang memenuhi kualifikasi ini cenderung tinggi. Tingginya jumlah ini menunjukkan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.123
Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

r. Persentase Sekolah yang sudah Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Inklusivitas merupakan salah satu aspek yang perlu dipenuhi dalam bidang pendidikan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang adil dan tanpa diskriminasi, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2022, persentase sekolah yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Tangerang sebesar 45%. Angka tersebut kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 50%. Angka tersebut diharapkan akan terus meningkat seiring perbaikan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas.

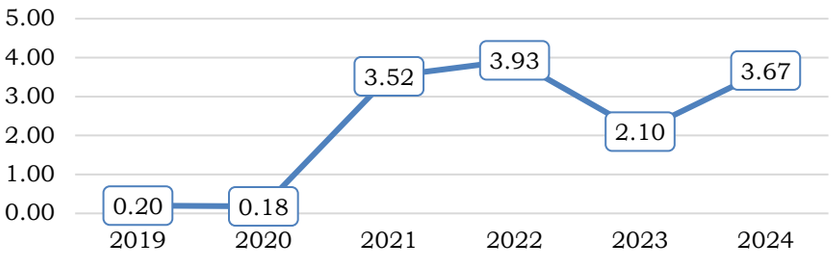
s. Persentase Sekolah yang Memenuhi Syarat Pendidikan Inklusi

Indikator lain yang menunjukkan inklusivitas di bidang pendidikan adalah persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan khusus. Sebuah sekolah dapat dikatakan siap melaksanakan pendidikan inklusif jika memenuhi persyaratan seperti tenaga profesional yang memadai, sarana-prasarana yang mendukung, kurikulum inklusif, hingga lingkungan kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Di tahun 2022, persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi di Kabupaten Tangerang sebesar 52,98% dan meningkat di tahun 2023 menjadi 54,765%.

2) Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi atau AKB merupakan jumlah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran bayi pada suatu tahun tertentu. Pada lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang memuncak pada tahun 2022. Dimulai dengan angka 0,2 pada tahun 2019 dan 0,18 pada tahun 2020. Lalu diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022, yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 mencapai angka 3,52 dan 3,93. Lalu tahun berikutnya, nilai AKB turun dari lonjakan menjadi 2,1 pada tahun 2023. Namun di tahun 2024, capaian kembali meningkat sebesar 3,67.



Gambar 2.124
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2025

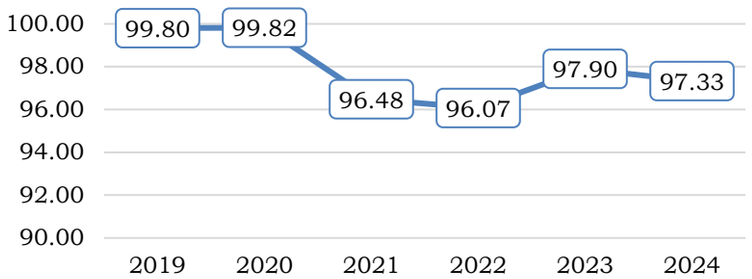
Tabel 2.19
Penyebab Kematian Bayi Kabupaten Tangerang 2019-2024

Penyebab Kematian Bayi							
No	Penyebab	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	BBLR	42	84	76	42	125	96
2	Asfiksia	67	50	89	67	47	48
3	Tetanus	1	1	1	1	0	2
4	Sepsis	39	24	24	39	1	0
5	Kelainan Kongenital	20	34	32	20	37	31
6	Ikterus	2	1	1	0	0	0
7	Pendarahan Intrakranial	0	0	0	0	0	0
8	Pneumonia	2	0	1	1	10	1
9	Diare	0	0	5	0	5	1
10	Lain-lain	54	9	22	56	11	19
Total		227	203	251	226	256	198

Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan persentase bayi lahir dan mampu bertahan hidup hingga mencapai usia 1 tahun. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan ibu dan anak dan efektivitas sistem kesehatan di sekitarnya. AKHB dapat dihitung dengan rumus (1-angka kematian bayi). Berdasarkan rumus tersebut, angka kematian bayi ditentukan dengan jumlah kematian bayi dengan usia di bawah 1 tahun dengan kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama.

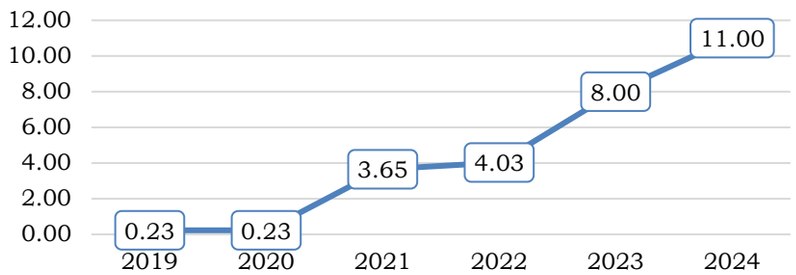


Gambar 2.125
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2025

AKHB Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan menurun lagi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penyebaran COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Lalu AKHB kembali menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 97,33 dari tahun sebelumnya.

c. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

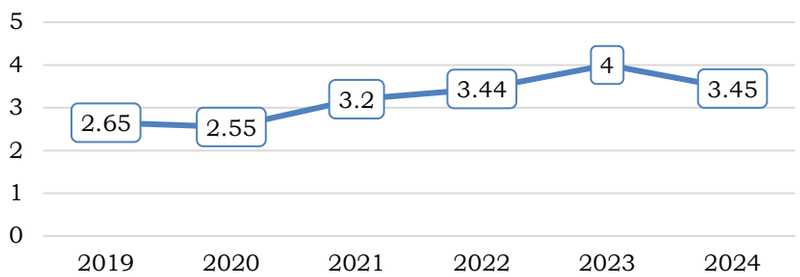
Angka kematian balita merupakan jumlah kematian anak yang berusia 0 - 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada tahun tersebut. Dalam lima tahun terakhir, angka kematian balita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 2.126
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2025

d. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

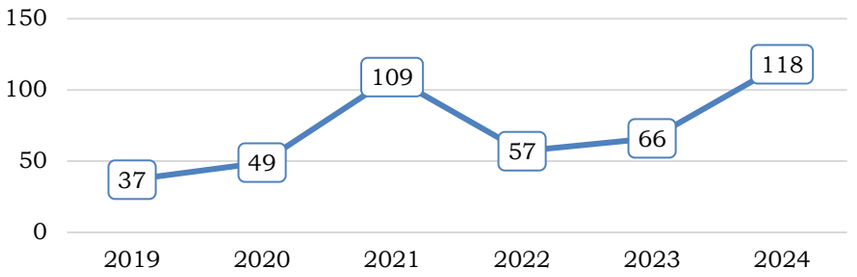
Angka kematian neonatal merupakan jumlah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian neonatal Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai sebesar 4. Angka tersebut kemudian menurun di tahun 2024 menjadi 3,45.



Gambar 2.127
Angka Kematian Neonatal Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Buku Resume Analisis Statistik Sektoral Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025

e. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

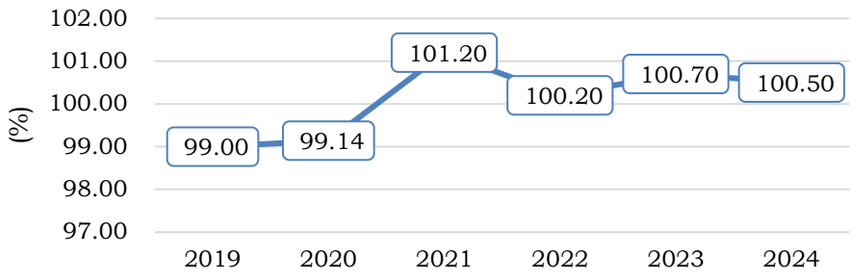
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup ibu. AKI digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan ibu, baik dari kesehatan ibu, status gizi, perilaku hidup sehat, serta tingkat pelayanan kesehatan yang juga memberi fokus kepada ibu yang sedang hamil, melahirkan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021 dan mencapai angka 109 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup ibu. Angka tersebut mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 mencapai angka 66. Pada tahun 2024 dilaporkan angka kematian ibu sekitar 34 jiwa dengan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 118.



Gambar 2.128
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2025

f. Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase persalinan ibu hamil di fasilitas kesehatan cenderung meningkat, bahkan di tahun 2021 hingga tahun 2024 persentasenya telah mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah berupaya menekan angka kematian ibu melalui persalinan di lingkungan mendukung dengan bantuan tenaga medis terlatih.



Gambar 2.129
Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2025

g. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu wadah kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dan dibimbing oleh petugas kesehatan. Kesuksesan posyandu dapat dinilai dari penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah menentukan rasio minimal posyandu tiap daerah 1 : 100. Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Tangerang menurun dari tahun 2019 di angka 1 : 52 hingga pada tahun 2024 mencapai angka 1 : 120. Hal ini menandakan bahwa jumlah posyandu belum optimal dalam mengikuti perkembangan jumlah balita.

Tabel 2.20
Rasio Posyandu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024

Rasio Posyandu per Satuan Balita						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Posyandu Aktif	1.293	1.263	1.180	1.375	1.310	2.024
Balita	67.861	126.855	186.023	193.345	247.253	243.841
Rasio Posyandu per Satuan Balita	1 : 52	1 : 100	1 : 158	1 : 141	1 : 189	1:120

Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang, 2025

h. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang semakin meningkat lima tahun terakhir, terutama pada fasilitas dasar yaitu puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (Pustu).

Tabel 2.21
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Puskesmas	1 : 63.522	1 : 69.491	1 : 83.830	1 : 74.394	1 : 75.213	1:78.629
Rasio Poliklinik	1 : 6.639	1 : 7.263	1 : 6.045	1 : 5.288		1:6.313
Rasio Pustu	1 : 68.170	1 : 76.440	1 : 86.096	1 : 86.140	1 : 87.089	1:82.373

Sumber: Profil dan Data Statistik Kabupaten Tangerang, 2023-2025

i. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan lanjut yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Kesediaan fasilitas rumah sakit di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 25 unit menjadi 29 unit pada tahun 2024. Dengan membandingkan jumlah penduduk dan fasilitas rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang, rasio rumah sakit belum memenuhi dari sisi rasio 1 : 100.000.

Tabel 2.22
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	25	25	27	27	27	29
Penduduk	2.794.969	3.057.599	3.185.552	3.273.321	3.309.365	3,459,706
Rasio	1 : 116.457	1 : 132.939	1 : 117.983	1 : 121.234	1 : 122.569	1: 119,300

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

j. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan dokter yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Tangerang. Sebagian besar rasio menurut jenis dokter menurun dalam enam tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dokter yang dapat memberikan pelayanan untuk penduduk Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.23
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Rasio Dokter per Satuan Penduduk						
Jenis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter Spesialis	1 : 4.068	1 : 4.223	1 : 3.765	1 : 3.609	1 : 3,313	1:2,709
Dokter Umum	1 : 6.767	1 : 7.568	1 : 2.907	1 : 2.805	1 : 2,968	1: 1,520
Dokter Gigi	1 : 20.108	1 : 21.685	1 : 22.277	1 : 21.118	1 : 20,179	1:6,359
Dokter Spesialis Gigi	1 : 64.999	1 : 67.947	1 : 69.251	1 : 68.194	1 : 68,945	1:34,254
Rata-Rata	1 : 2.180	1 : 2.327	1 : 1.495	1 : 1.438	1 : 1.423	1:11.210

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

k. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga Medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019-2023, angka rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Tangerang menurun. Hal ini menandakan bahwa jumlah tenaga medis setiap tahunnya meningkat. Di tahun 2024, capaian rasio tenaga medis meningkat yang menunjukkan terjadi penurunan jumlah tenaga medis.

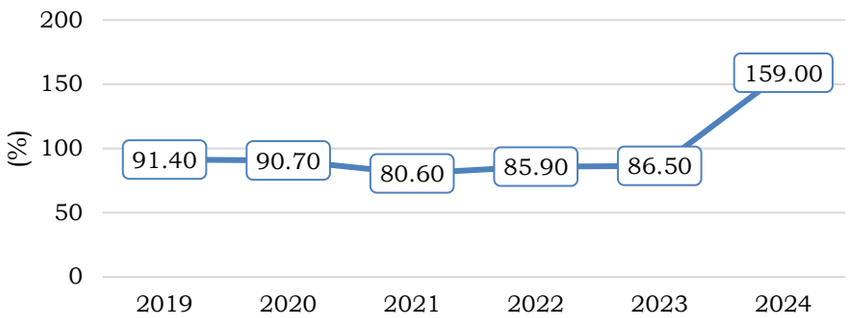
Tabel 2.24
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk						
Tenaga Medis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perawat	1 : 1.481	1 : 932	1 : 843	1 : 895	1 : 919	1 :2.236
Bidan	1 : 2.516	1 : 2.100	1 : 1.638	1 : 2.225	1 : 2.270	1 :5.179
Farmasi	1 : 9.671	1 : 6.304	1 : 8.824	1 : 9.949	1 : 9.592	1 :32.034
Tenaga Kesehatan Masyarakat		1 : 40.232	1 : 96.532	1 : 32.409	1 : 33.428	1 :41,186
Tenaga Kesehatan Lingkungan		1 : 48.533	1 : 46.846	1 : 39.919	1 : 40.358	1 :22,465
Tenaga Gizi	1 : 32.500	1 : 27.796	1 : 25.484	1 : 23.720	1 : 23.471	1 :9,970
Ahli Teknologi Laboratorium Medik		1 : 20.116	1 : 10.548	1 : 10.732	1 : 10.573	1 :2,236

Sumber: BPS Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2025

l. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

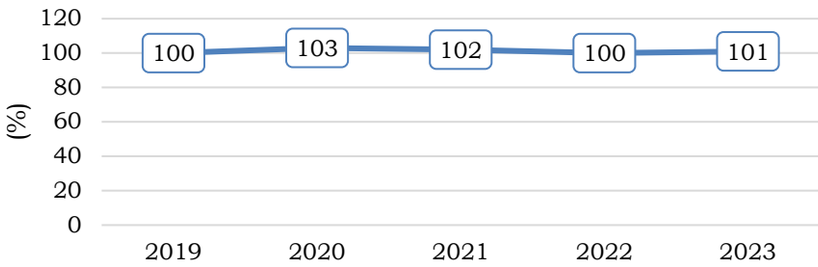
Kabupaten Tangerang memiliki cakupan komplikasi fluktuatif. Berdasarkan grafik di bawah ini, bahwa pada tahun 2019 mencapai cakupan yang cukup tinggi yaitu 91,4%, menurun pada tahun 2020 mencapai angka 90,7%, dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 80,6%. Pada tahun 2023, cakupan komplikasi yang bisa ditangani kebidanan meningkat menjadi 86,50%. Angka-angka ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan bidan kesulitan dalam menangani pasien. Pada tahun 2024, cakupan komplikasi yang bisa ditangani kebidanan meningkat di atas 100%, menjadi 159%.



Gambar 2.130
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2023-2025

m. Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Dalam lima tahun terakhir, cakupan pertolongan oleh tenaga kerja kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang selalu berada di angka 100% bahkan lebih, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 103%. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kesehatan pada Kabupaten Tangerang meningkat.

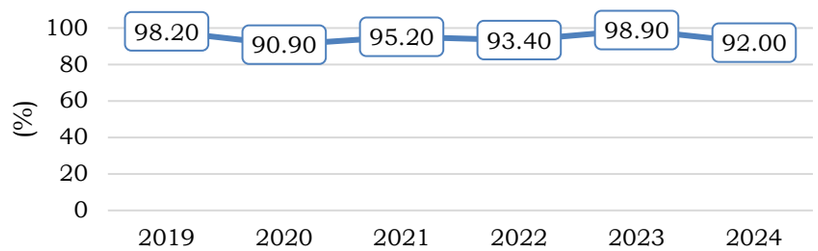


Gambar 2.131
Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Open Data dan Data Sektoral Kabupaten Tangerang, 2025

n. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI merupakan salah satu indikator dari unsur kesehatan dalam mengukur keberhasilan pemberian imunisasi kepada anak-anak. UCI yang diterapkan pada kelurahan/desa adalah gambaran daerah di mana angka UCI di atas 80% merupakan persentase bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap di dalam daerah tersebut.

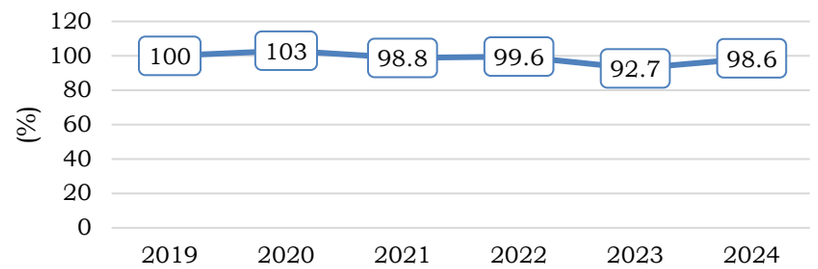
Dalam enam tahun terakhir, cakupan UCI Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif. Dari tahun 2019 yang mencapai angka 98,2% lalu menurun pada tahun 2020 dengan angka 90,9%. Angka UCI kemudian naik pada tahun 2021 hingga mencapai 95,2% dan menurun lagi pada tahun 2022 dengan angka 93,4%. Pada tahun 2024, cakupan UCI menurun dengan capaian sebesar 92,00%. Hal ini menandakan bahwa upaya imunisasi anak-anak di Kabupaten Tangerang perlu ditingkatkan kembali.



Gambar 2.132
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Open Data dan Data Sektoral Kabupaten Tangerang, 2025

o. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan merupakan persentase di mana jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan suatu wilayah kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang dicatat pada suatu wilayah pada waktu yang sama.

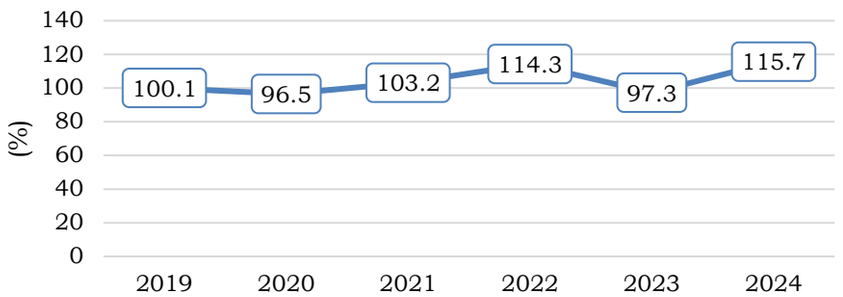


Gambar 2.133
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Dalam enam tahun terakhir, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuatif. Berdasarkan grafik diatas, capaian pada tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2024 mencapai 98,6% yang menandakan bahwa perlunya peningkatan dalam penyediaan fasilitas dan kesadaran kesehatan baik dari instansi terkait dan masyarakat Kabupaten Tangerang.

p. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

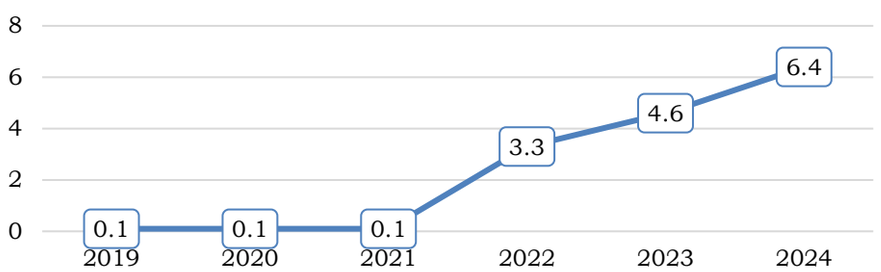
Program imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi kesehatan untuk melindungi penduduk dari penyakit tertentu, dengan pertimbangan pembiayaan yang paling *cost effective*. Imunisasi campak merupakan imunisasi yang biasa dilakukan pada usia 1 tahun dengan pemberian vaksinasi. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terhitung dengan jumlah anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah anak usia 1 tahun pada tahun sama. Dalam tahun 2019-2023, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang menurun. Di tahun 2024, Kabupaten Tangerang mencapai angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir sebesar 115,7%.



Gambar 2.134
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Resume Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang

q. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Kasus AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) merupakan kasus kelumpuhan pada anak usia < 15 tahun. Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,1 menjadi 6,4 pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat menandakan bahwa semakin baik fasilitas kesehatan Kabupaten Tangerang untuk mendeteksi penyakit AFP.

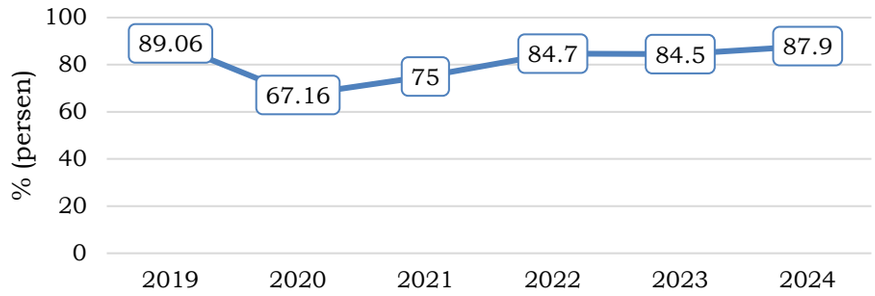


Gambar 2.135
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

r. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia balita adalah balita mengalami batuk, kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas yang tidak normal. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan persentase penderita pneumonia balita (usia 0-59 bulan) yang ditangani sesuai standar di sarana kesehatan

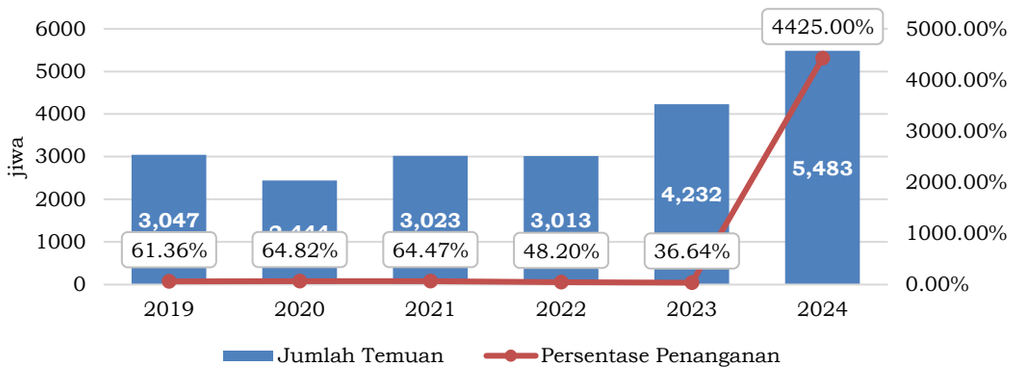
daerah. Cakupan balita pneumonia yang ditangani oleh Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan, dari 89,06% pada tahun 2019 menjadi 87,9% pada tahun 2023. Meskipun persentase ini cukup tinggi, cakupan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan peningkatan fasilitas pendukung penanganan pneumonia di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.136
Persentase Balita Pneumonia yang Ditangani di Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2025

s. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

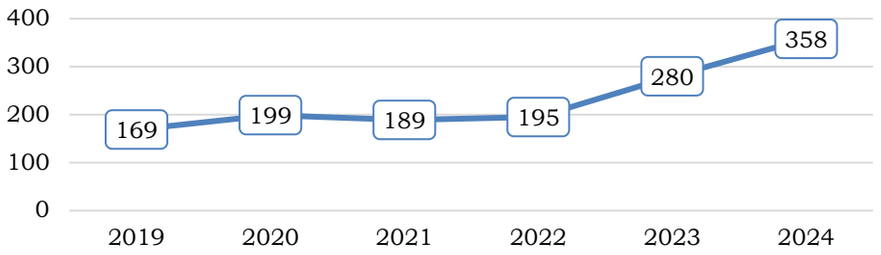
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Tuberculosis Bakteri Tahan Asam) merupakan penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam suatu wilayah tertentu. Cakupan penemuan yang ada di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2019 berjumlah 3.047 dan tahun 2024 mencapai 5.483 temuan. Sementara itu, persentase penanganan penderita penyakit TBC BTA cenderung mengalami penurunan dari 61,36% menjadi 44,25% pada tahun 2024 sehingga pencegahan dan penanganan penyakit TBC BTA perlu ditingkatkan.



Gambar 2.137
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2025

t. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

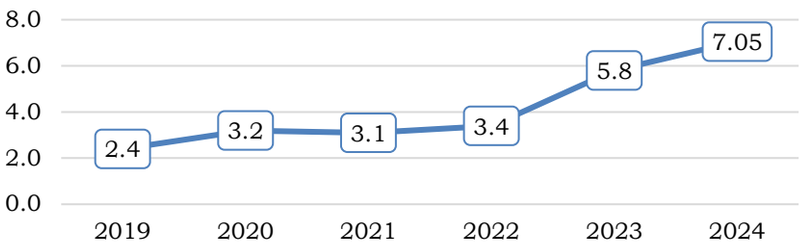
Prevalensi Tuberkulosis merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat. Prevalensi Tuberkulosis didapatkan dengan membandingkan jumlah kasus tuberkulosis dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu per 100.0000 penduduk. Dalam lima tahun terakhir, tingkat prevalensi tuberkulosis Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dan pada tahun 2024 mencapai angka 358 kasus tiap 100.000 penduduk. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kabupaten Tangerang perlu ditingkatkan untuk menurunkan jumlah penduduk yang menderita tuberkulosis seperti pemberian edukasi kepada masyarakat setempat.



Gambar 2.138
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2025

u. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

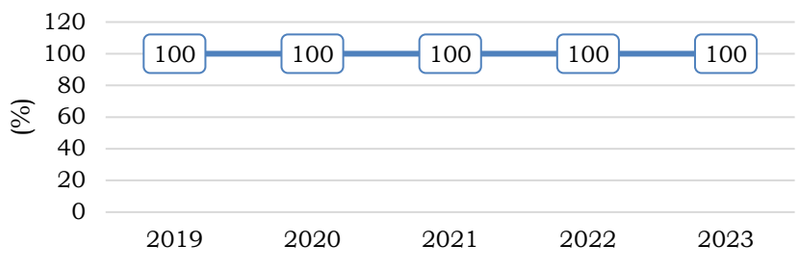
Tingkat kematian karena tuberkulosis di Kabupaten Tangerang meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, kematian akibat tuberkulosis tercatat 2 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 7 kasus per 100.000. Hal ini menandakan bahwa selain upaya pencegahan, Kabupaten Tangerang juga perlu meningkatkan upaya penyembuhan baik dari kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan.



Gambar 2.139
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2025

v. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

DBD atau Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk dengan manifestasi klinis demam tinggi, fenomena hemoragik, dan dapat menyebabkan kematian. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Tangerang tertangani dengan baik hingga dalam lima tahun mencakup 100% pasien dapat ditangani.

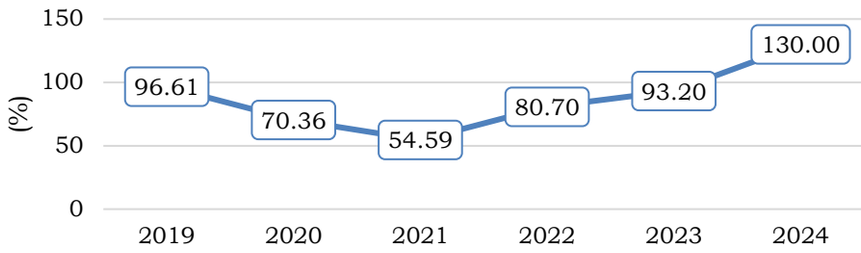


Gambar 2.140
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024

w. Penderita Diare yang Ditangani

Diare merupakan penyakit yang memberikan dampak kepada pasien dengan sering buang air besar dengan kondisi cair. Pada Kabupaten

Tangerang, penderita diare yang ditangani mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 130%.



Gambar 2.141
Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2025

x. Angka Kejadian Malaria

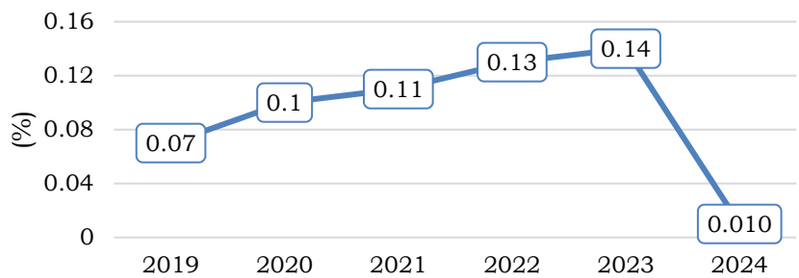
Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit melalui gigitan nyamuk. Pada tahun 2019-2022 tidak ditemukan kejadian malaria di Kabupaten Tangerang, tetapi pada tahun 2023 terdapat 9 angka kejadian malaria yang tercatat oleh Dinas Kesehatan.

y. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Pada tahun 2019-2023 tidak ditemukan kematian akibat malaria di Kabupaten Tangerang yang tercatat oleh Dinas Kesehatan. Capaian ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang dapat menangani angka kejadian malaria yang terjadi pada tahun 2023.

z. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat. Angka prevalensi HIV/AIDS didapatkan berdasarkan persentase jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 0,14%. Prevalensi yang meningkat berimplikasi bahwa fasilitas kesehatan dan instansi terkait di Kabupaten Tangerang masih kurang memadai dalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS. Namun di tahun 2024, capaian prevalensi mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,01 menunjukkan adanya peningkatan dalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS.

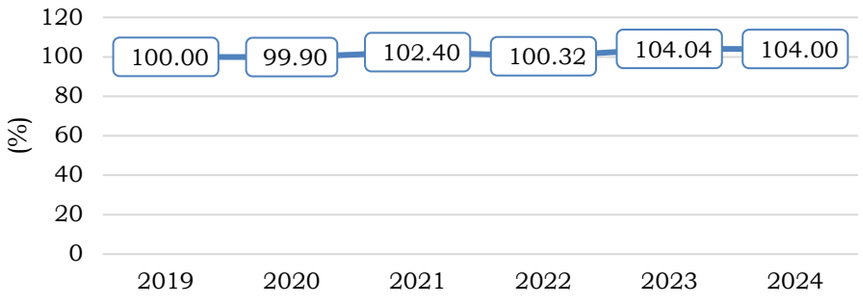


Gambar 2.142
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2025

aa. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan angka persentase kunjungan bayi yang berumur 29 hari hingga 11 bulan pada sarana pelayanan kesehatan seperti polindes, puskesmas, pustu, rumah sakit, rumah sakit bersalin ataupun di tempat lain seperti rumah, tempat penitipan anak, posyandu dan sebagainya melalui kunjungan petugas kesehatan. Cakupan kunjungan bayi

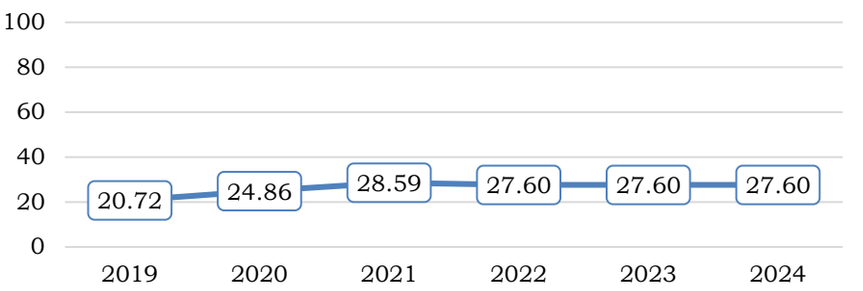
pada Kabupaten Tangerang telah mencapai klasifikasi tinggi yang bahkan melampaui 100% dalam kurun waktu empat tahun terakhir.



Gambar 2.143
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2025

bb. Cakupan Puskesmas

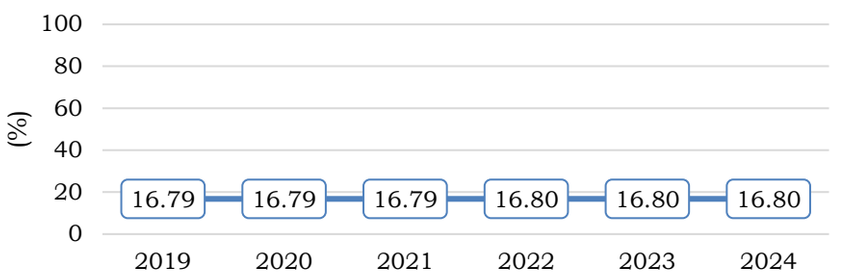
Cakupan puskesmas merupakan persentase jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Cakupan puskesmas diharapkan untuk meningkat karena selaras dengan penyediaan fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah. Cakupan puskesmas Kabupaten Tangerang mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2019 di angka 20,72% hingga pada tahun 2024 mencapai 27,6%.



Gambar 2.144
Cakupan Puskesmas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

cc. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Cakupan puskesmas pembantu ditentukan oleh persentase jumlah pembantu puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan puskesmas pembantu mengalami kecenderungan stabil dari tahun 2019 di angka 16,79% hingga pada tahun 2024 mencapai 16,8%.

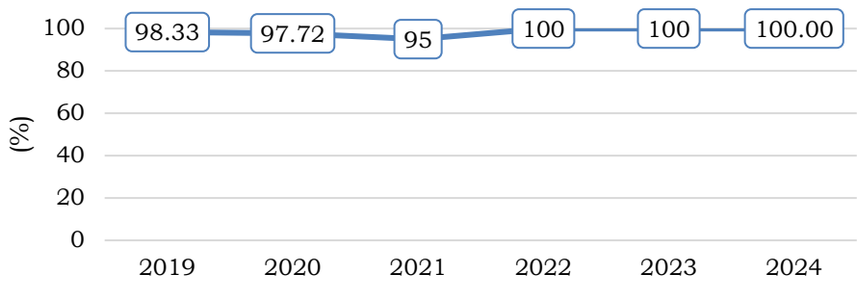


Gambar 2.145
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

dd. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan antenatal sesuai standar dan secara lengkap serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada triwulan ke-1, 1 kali pada triwulan ke-2 dan 2 kali pada triwulan ke-3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 juga menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil dan manajemen program KIA dalam suatu wilayah.

Dalam lima tahun terakhir, persentase kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat. Pada tahun 2019, cakupan kunjungan ibu hamil K4 mencapai 98,33% dan menurun pada tahun 2020 di angka 97,72% dan 95% pada tahun 2021. Cakupan ini meningkat pesat di angka 100% pada tahun 2022 hingga 2024. Cakupan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah sadar akan pentingnya pemeriksaan kehamilan yang sesuai standar.

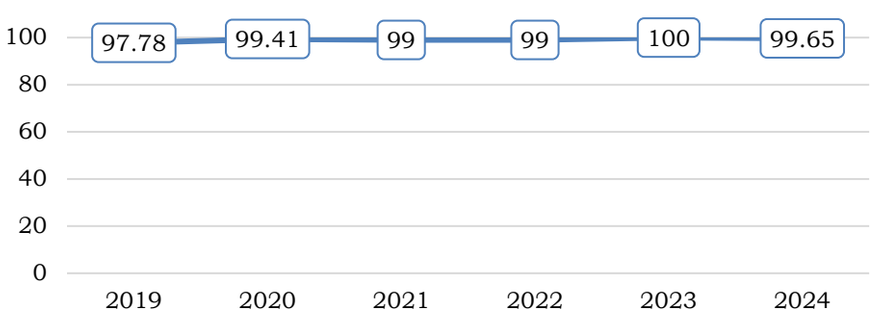


Gambar 2.146
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

ee. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas merupakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang sesuai standar, dimulai dengan 6 jam pasca melahirkan hingga 42 hari oleh tenaga kesehatan. Pada pelayanan nifas, untuk melakukan deteksi dini komplikasi pada ibu diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan minimal 3 kali dengan beberapa ketentuan waktu, yaitu:

a. Kunjungan nifas pertama pada lingkup waktu 6 jam hingga 3 hari setelah persalinan
b. Kunjungan nifas kedua pada kurun waktu 2 minggu setelah persalinan
c. Kunjungan nifas ketiga pada kurun waktu 6 minggu setelah persalinan.

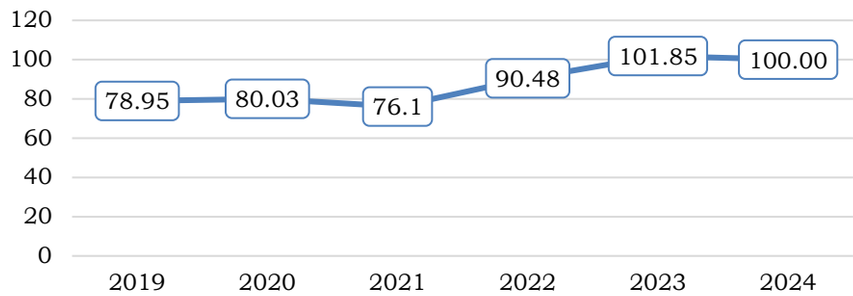


Gambar 2.147
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, cakupan pelayanan nifas Kabupaten Tangerang dalam lima tahun mengalami peningkatan pesat. Pada tahun 2019, cakupan pelayanan nifas mencapai angka 97,78% yang sudah mencapai target SPM cakupan pelayanan nifas yaitu 90%. Angka ini kemudian naik pada tahun 2020 yaitu 99,41% dan turun pada tahun 2021 di angka 99%. Angka ini kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 99,65% pada tahun 2024. Grafik ini menandakan bahwa kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu nifas sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.

ff. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

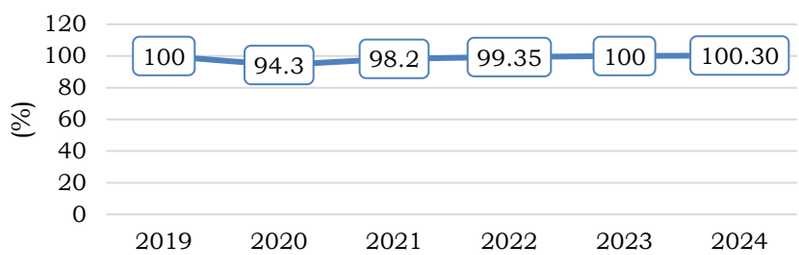
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan jumlah persentase bayi usia 0 - 28 hari dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang memiliki cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat drastis hingga mencapai persentase 100. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan terhadap neonatus meningkat.



Gambar 2.148
Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

gg. Cakupan Pelayanan Anak Balita

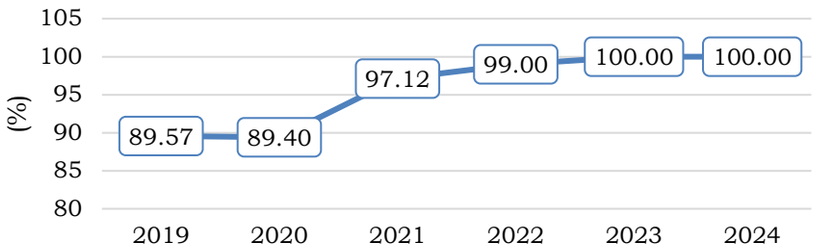
Pelayanan Anak Balita merupakan salah satu skala kesehatan dalam suatu wilayah. Cakupan pelayanan anak balita pada Kabupaten Tangerang memiliki angka yang cukup stabil. Pada tahun 2019, angka cakupan mencapai 100%. Angka cakupan pelayanan anak balita kemudian turun pada tahun 2020 dengan angka 94% dan angka tersebut naik menjadi 98% pada tahun 2021. Angka tersebut terus naik hingga pada tahun 2024 mencapai 100,3%.



Gambar 2.149
Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

hh. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

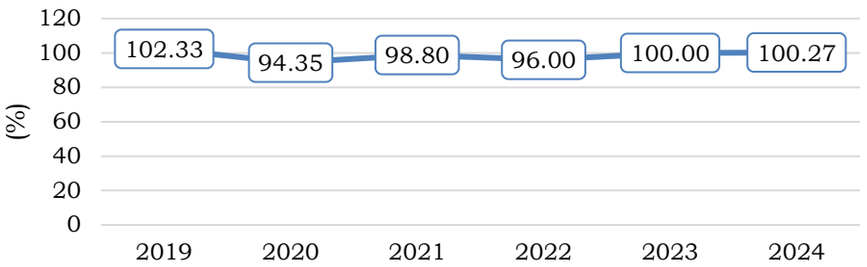
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, cakupan penjaringan kesehatan telah mencapai 89,57%, sudah cukup tinggi, dan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki komitmen kuat dalam memastikan kesehatan siswa.



Gambar 2.150
Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

ii. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan persentase pasien miskin yang bisa mengakses sarana pelayanan kesehatan strata 1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin diharapkan untuk meningkat karena selaras dengan penyediaan fasilitas kesehatan setara dalam suatu wilayah. Cakupan ini ditentukan oleh jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat miskin. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang mencakup pelayanan yang cukup stabil dengan persentase di atas 90%.



Gambar 2.151
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

jj. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) merupakan persentase banyaknya rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan diagnosis dan penanganan permasalahan pada jalan nafas, ventilasi pernafasan, dan sirkulasi pembuluh darah, serta dapat melakukan resusitasi dasar, stabilisasi dan evakuasi. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% yang menandakan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan gawat darurat sudah sangat baik dan telah mencakup seluruh wilayah.

Tabel 2.25
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)						
Jenis	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit Umum	Jumlah	20	20	20	22	22
	Cakupan	100%	100%	100%	100%	100%
Rumah Sakit Khusus	Jumlah	5	5	5	5	5
	Cakupan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2024

kk. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam adalah persentase timbulnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019, Kabupaten Tangerang mencakup 4 desa/kelurahan dan tahun 2023 mencapai 5 desa/kelurahan. Peningkatan jumlah ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah meningkatkan pelayanan kesehatan dalam penyelidikan epidemiologi.

Tabel 2.26
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam				
2019	2020	2021	2022	2023
4 desa/kel.	274 desa/kel.	274 desa/kel.	3 desa/kel.	5 desa/kel.

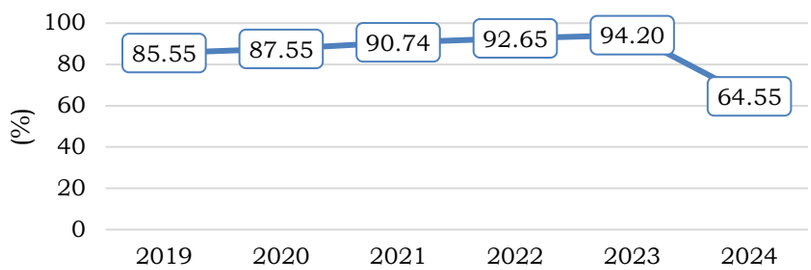
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

➢ Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

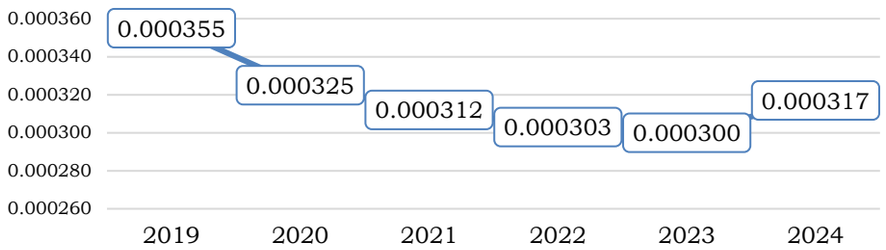
Sebagai wilayah dengan lokasi yang sangat strategis, Kabupaten Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik didukung dengan kondisi yang baik sebesar 94,20%. Nilai ini cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2023. Kualitas jalan yang baik di wilayah ini menjadi peluang tersendiri untuk mengembangkan Kabupaten Tangerang salah satunya menjadi pilihan jalan alternatif yang menghubungkan berbagai lokasi. Lokasinya yang strategis dan dilalui oleh berbagai kendaraan memberikan dampak buruk pada kondisi jalan yang menurun. Di tahun 2024, capaian tersebut mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 64,55%. Hal tersebut memerlukan perhatian untuk kembali meningkatkan kualitas jaringan jalan.



Gambar 2.152
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

➢ Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

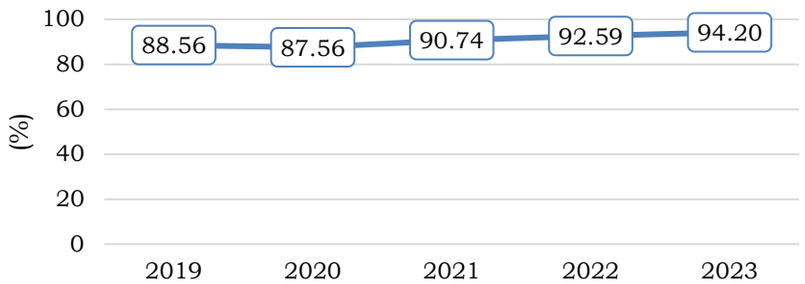
Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan aksesibilitas yang baik. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan dari kurun waktu 2019-2024. Rasio panjang jalan di Kabupaten Tangerang cenderung rendah berkisar di angka 0,0003, pembukaan jalan baru serta pembangunannya menambah panjang jalan di Kabupaten Tangerang menjadi sekitar 1.096,26 Km.



Gambar 2.153
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

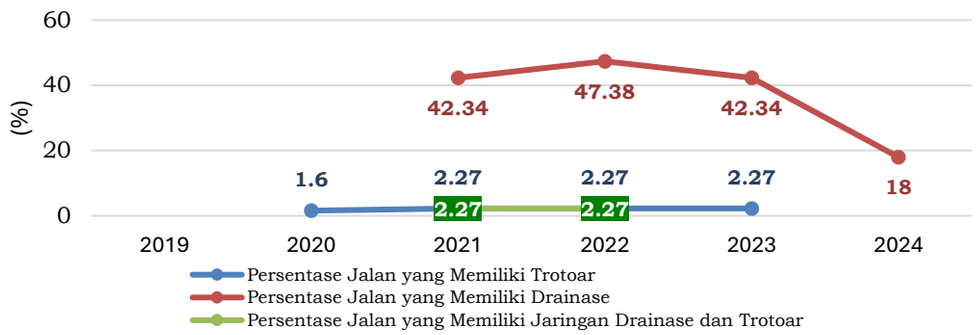
Tumbuhnya permukiman yang tidak terencana berakibat pada munculnya kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Sebagai kawasan yang tumbuh dari aglomerasi Jabodetabek, sebagian besar permukiman di wilayah ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Hal ini menunjukkan aksesibilitas yang baik di wilayah ini.



Gambar 2.154
Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten
Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 meter)

Trotoar dan drainase merupakan elemen penting dalam pembangunan jalan. Penyediaan trotoar dan drainase di jalanan Kabupaten Tangerang masih sangat rendah dan belum menyeluruh di seluruh wilayah. Hanya 2,27% jalan di Kabupaten Tangerang yang memiliki trotoar dan drainase.

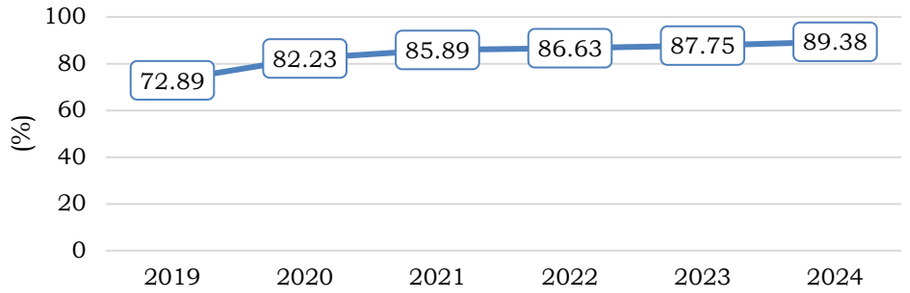


Gambar 2.155
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2025

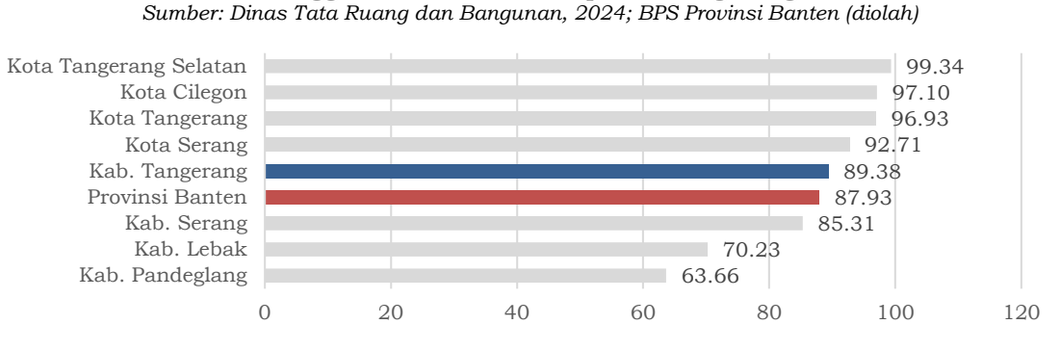
- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan rumah tangga. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki akses sanitasi yang

baik. Pada tahun 2024, persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 89,38%. Pada kurun waktu 2019-2023, persentase rumah tinggal berakses sanitasi mengalami peningkatan yang mengindikasikan kualitas kebersihan di wilayah ini semakin meningkat. Meskipun begitu, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, capaian Kabupaten Tangerang terbilang masih cukup rendah, yaitu berada di posisi 4 terendah.



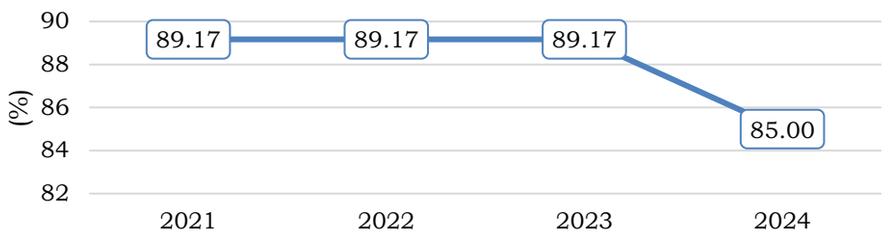
Gambar 2.156
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024; BPS Provinsi Banten (diolah)



Gambar 2.157
Perbandingan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

- Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, sebesar 85% dari total drainase di wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kondisi yang baik atau tidak terdapat sumbatan. Sedangkan persentase sisanya atau 15% mengalami sumbatan dan memerlukan penanganan.

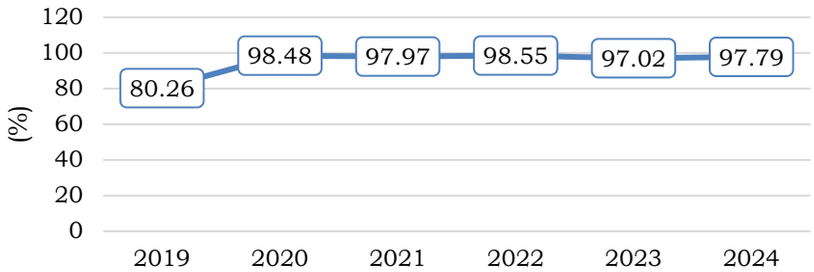


Gambar 2.158
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2025

- Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Penyediaan air di Kabupaten Tangerang terukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak. Persentase rumah tangga berakses air minum layak terus meningkat drastis pada tahun 2020. Sedangkan pada 2020-2024 persentase tersebut

cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Tangerang telah terlayani air minum layak, meski terdapat beberapa rumah tangga yang belum berakses air minum layak.



Gambar 2.159
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

- Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Sebagai wilayah yang terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai macam rumah ibadah. Masjid di wilayah ini menjadi jumlah terbesar sesuai dengan jumlah penganutnya yang mendominasi wilayah ini. Namun jika dilihat berdasarkan rasio terhadap jumlah penganutnya, rumah ibadah umat Konghucu memiliki cakupan yang lebih tinggi karena rasio yang cenderung rendah, yakni 1 rumah ibadah melayani 94 orang.

Tabel 2.27
Rasio Jumlah Rumah Ibadah terhadap jumlah Penganut

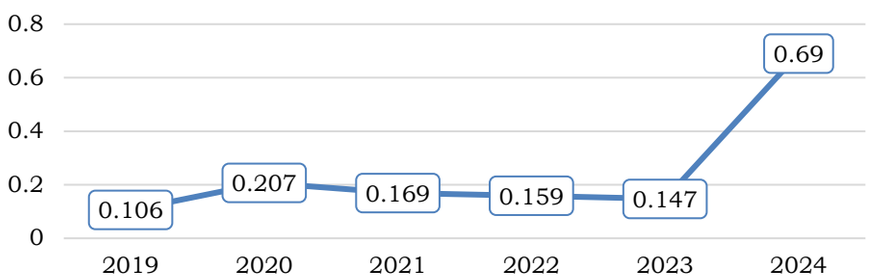
	Budha	Hindu	Islam	Khatolik	Konghucu	Kristen
Jumlah	43	1	1395	5	8	341
Rasio	1:1261,65	1:1935	1:2201	1:8654,60	1:94,13	1:299,96

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024

b. Penataan Ruang

- Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Sebagai wilayah perkotaan, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah ruang terbuka hijau yang cukup terbatas. Ruang terbuka hijau tersebut belum banyak yang memiliki hak pakai atau hak guna. Rasio RTH tiap satuan wilayah yang ber HPL/HGB mengalami penurunan yang berkisar di angka 0,01. Di tahun 2024, capaian rasio RTH meningkat hingga 0,69.

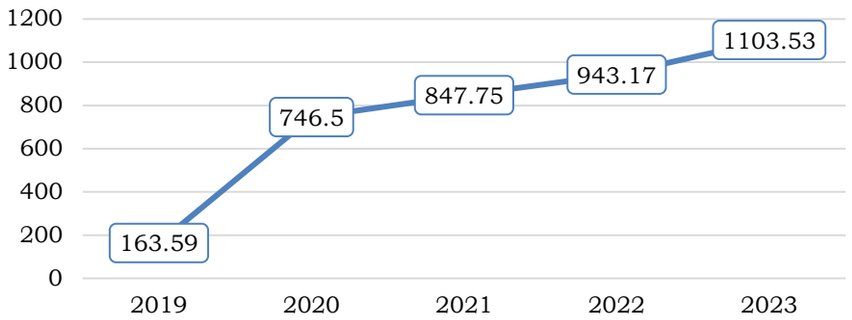


Gambar 2.160
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2025

- Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur perkotaan yang wajib dimiliki dalam suatu wilayah. Luasan RTH wajib yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu

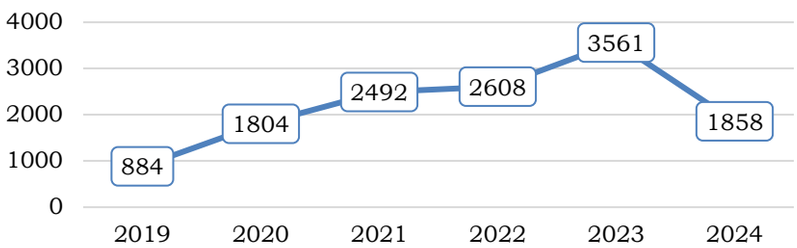
ke waktu. Hal ini menunjukkan pentingnya penyediaan ruang hijau dalam pelayanan masyarakat.



Gambar 2.161
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin membangun bangunan merupakan salah satu izin yang diperlukan dalam mendirikan bangunan. Jumlah bangunan di wilayah ini yang memiliki IMB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan penataan ruang. Meskipun demikian jumlah IMB ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada di wilayah ini. Di tahun 2024, terjadi penurunan hingga sebesar 1858 sehingga perlu upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.



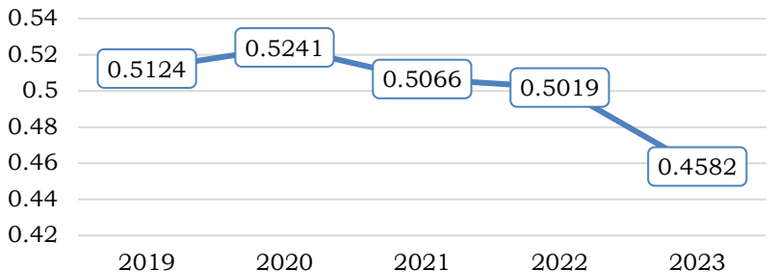
Gambar 2.162
Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Perubahan penggunaan ruang merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di lapangan. Salah satu bentuk perubahan penggunaan ruang adalah berubahnya peruntukan ruang publik. Perubahan penggunaan ruang di Kabupaten Tangerang mencapai 1.838,90 Ha pada 2020. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 1.969,92 Ha. Hal ini dapat berdampak dan peningkatan kebutuhan ruang publik di Kabupaten Tangerang.

- Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

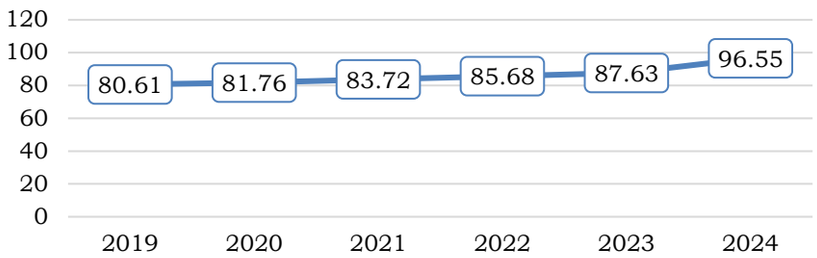
Sebagai salah satu indikator kualitas tata ruang, tutupan lahan dapat terukur melalui pemotretan citra udara. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan di Kabupaten Tangerang relatif stagnan dan berkisar pada angka 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari luas daratan di Kabupaten Tangerang tertutup oleh pepohonan.



Gambar 2.163
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- Ketaatan Terhadap RTRW

Rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang. Keterwujudan RTRW sangat dipengaruhi oleh ketaatan terhadap RTRW. Dalam rentang tahun 2019-2024, ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dalam upaya perwujudan penataan ruang.

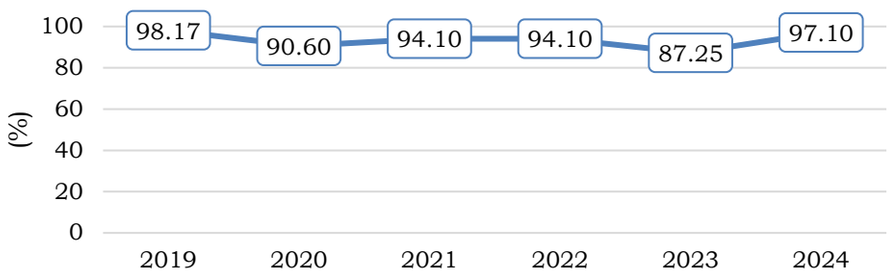


Gambar 2.164
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren menurun dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, cakupan masih mencapai 98,17%. Tetapi persentase tersebut mengalami penurunan bertahap hingga pada tahun 2023 mencapai 87,25%, yang kemudian meningkat menjadi 97,10% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya program dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak dan aman untuk dihuni penduduk Kabupaten Tangerang.

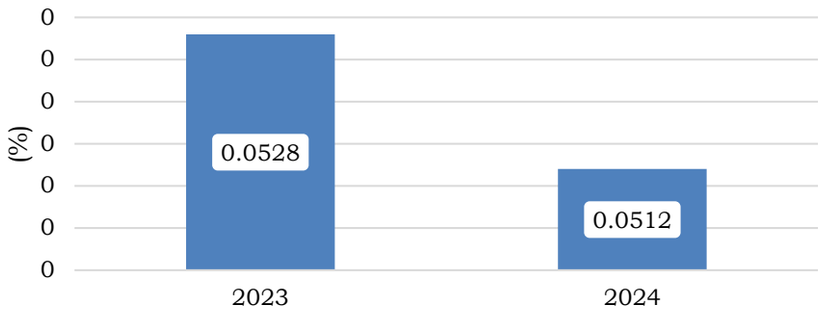


Gambar 2.165
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024

b. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam tahun 2023-2024. Pada tahun 2023,

persentase permukiman kumuh tercatat sebesar 0,0528%, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,0512% pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa upaya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terus dilaksanakan.



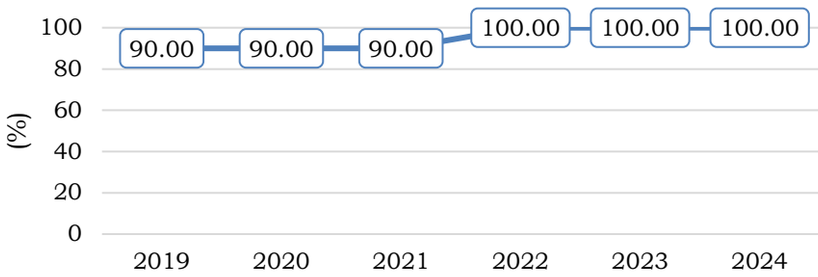
Gambar 2.166
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Tangerang
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan tren lima tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah memiliki fokus untuk penanganan dan perumahan dan permukiman kumuh. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 600.2/Kep.1040-Huk/2024 tentang Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwasanya jumlah luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Tangerang sebesar 2.863,22 Ha berada di 1.683 RT/RW, 241 Kelurahan/Desa dan 29 Kecamatan. Luasan kawasan kumuh tersebut terdiri atas (1) Kewenangan Kabupaten Tangerang dengan luas 1.446,98 Ha; (2) Kewenangan Provinsi dengan luas 847,48 Ha; dan (3) Kewenangan Pemerintah Pusat dengan luas 568,76 ha.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

c. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

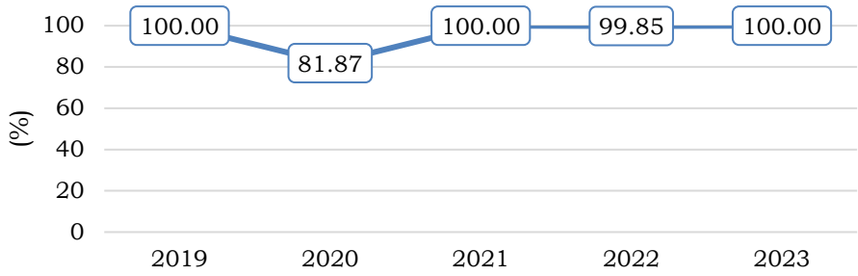
Petugas perlindungan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Cakupan Linmas di Kabupaten Tangerang tergolong baik karena sudah mencapai angka 100% pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan layanan perlindungan masyarakat di wilayah ini sudah baik.



Gambar 2.167
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024

d. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 di wilayah Kabupaten Tangerang sudah baik ditandai dengan tingkat penyelesaian pelanggaran mencapai 100% pada 2019, 2021, dan 2023. Sedangkan pada tahun 2020, penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan yang cukup signifikan.



Gambar 2.168
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024

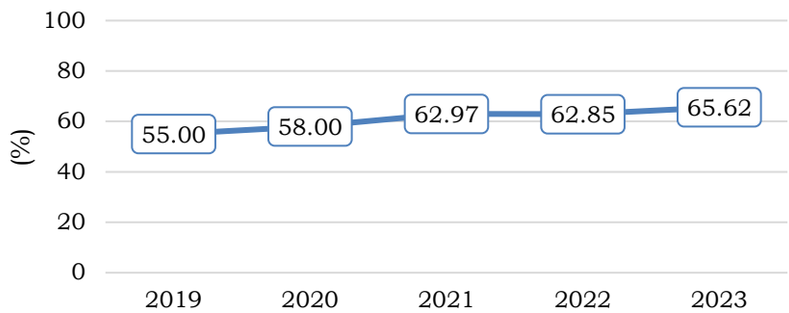
e. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang mengancam permukiman perkotaan. Dalam menangani kebakaran, cakupan pelayanan kebakaran di wilayah ini telah mencapai angka 100% pada kurun waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan tingkat layanan kebakaran wilayah ini sudah tergolong baik.

6) Sosial

a. Persentase PPKS yang Tertangani

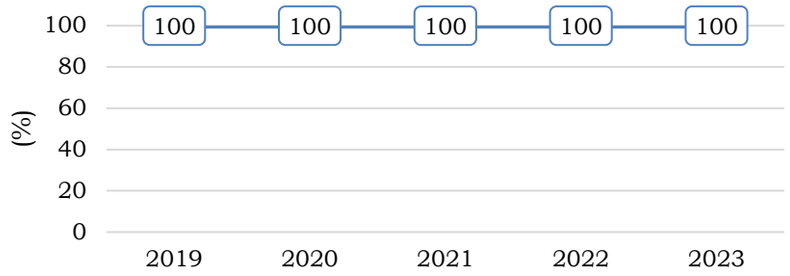
Persentase PPKS yang tertangani merupakan persentase PPKS yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dan juga dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Persentase ini ditentukan oleh PPKS yang tertangani dibandingkan dengan total jumlah PPKS pada suatu wilayah. Pada grafik di bawah, dapat dilihat bahwa PPKS yang tertangani mengalami fluktuasi menurun dalam kurun lima tahun. Pada tahun 2019, persentase PPKS yang tertangani mencapai 55% dan cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 cakupannya menjadi 65,62%.



Gambar 2.169
Persentase PPKS yang Tertangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024

b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Persentase LKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial ditentukan berdasarkan jumlah LKS yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sosial dibandingkan dengan jumlah LKS yang seharusnya menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan sosial.

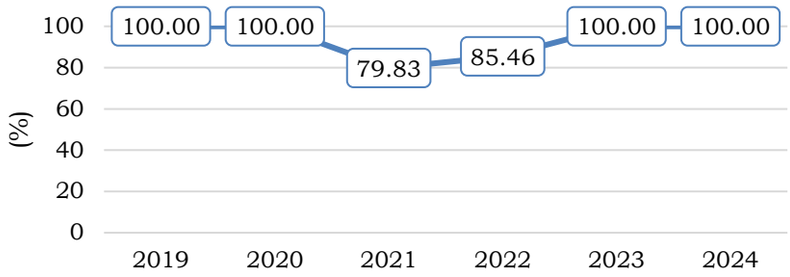


Gambar 2.170
Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan grafik di atas, lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang sangat baik dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu sebesar 100%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa lembaga kesejahteraan sosial sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan berupa fasilitas atau sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.

c. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat ditentukan dengan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dibandingkan dengan total korban bencana selama masa tanggap darurat. Berdasarkan grafik di bawah, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cukup stabil mendekati 100%. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang dapat menangani masalah secara dini.



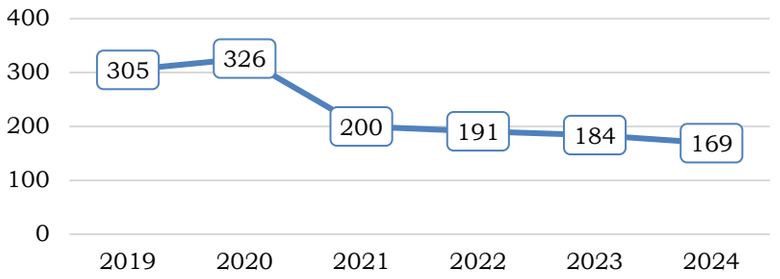
Gambar 2.171
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2025

B) Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1) Tenaga Kerja

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

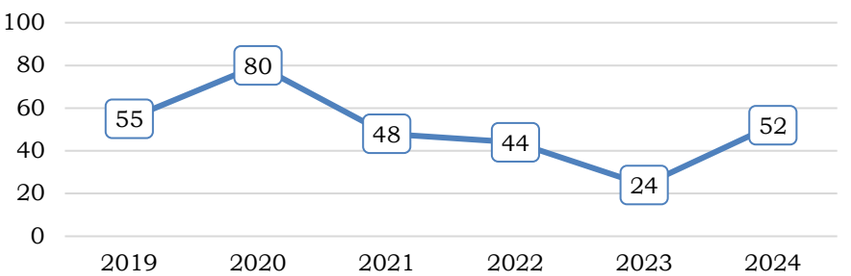
Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah fenomena yang banyak terjadi di dunia kerja. Pada 2021-2024, jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Tangerang cenderung menurun drastis hingga angka 169. Meskipun demikian sengketa pengusaha-pekerja sempat meningkat pada tahun 2020 yakni saat Pandemi yang mungkin terjadi akibat tingginya kasus PHK.



Gambar 2.172
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

b. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

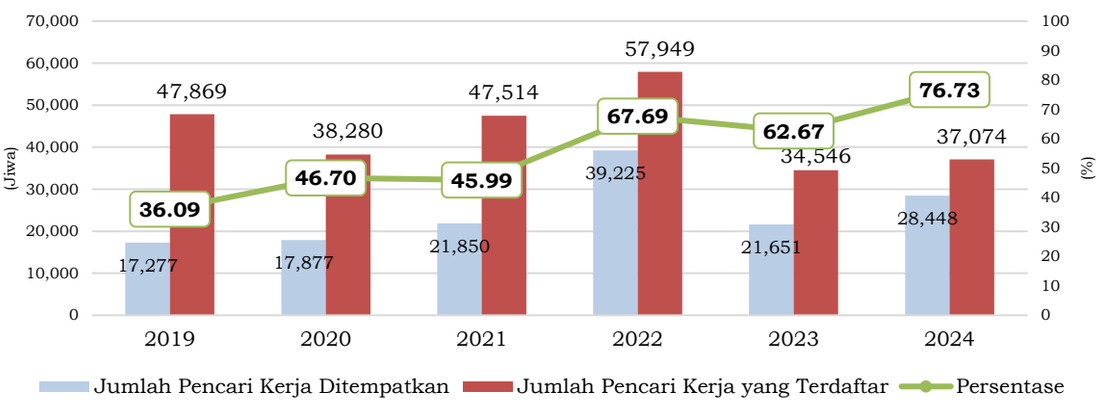
Sengketa perusahaan dengan pekerja sebagian diselesaikan melalui perjanjian bersama. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama memiliki kecenderungan tren yang sama dengan jumlah sengketa pengusaha-pekerja. Namun, jumlah penyelesaian kasus ini masih jauh dari jumlah kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan masih adanya kasus ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan melalui perjanjian bersama.



Gambar 2.173
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

c. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Berdasarkan data tahun 2019-2024, menunjukkan peningkatan persentase pencari kerja yang ditempatkan. Akan tetapi, jumlah pencari kerja yang ditempatkan masih belum mengakomodasi seluruh pencari kerja di wilayah ini.

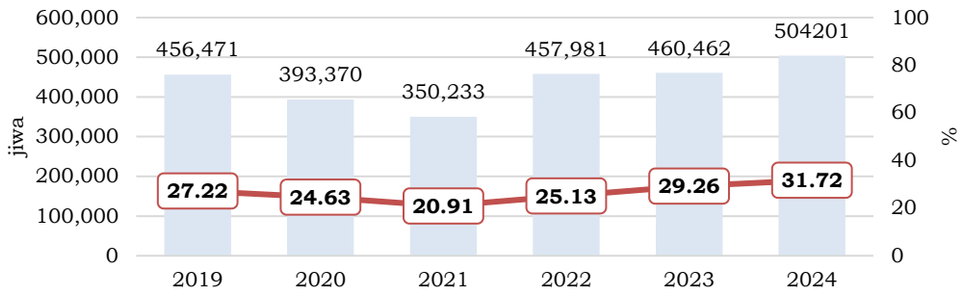


Gambar 2.174
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

d. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Program Jamsostek merupakan program penyediaan asuransi yang ditujukan bagi para pekerja. Besaran pekerja/buruh yang telah menjadi peserta program ini cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan yang

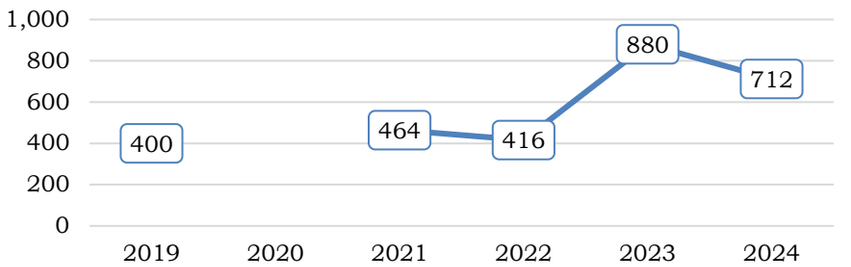
cukup signifikan pada tahun 2019-2021. Sementara itu, pada 2023 dan 2024 mengalami peningkatan hingga ke angka 460.462 dan 504.201jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya penjaminan keselamatan pekerja/buruh. Akan tetapi, persentase besaran pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek masih rendah.



Gambar 2.175
Besaran dan Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

e. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satu bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan sesuai kompetensi pekerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan pelatihan sesuai kompetensi karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan menurun hingga 712.



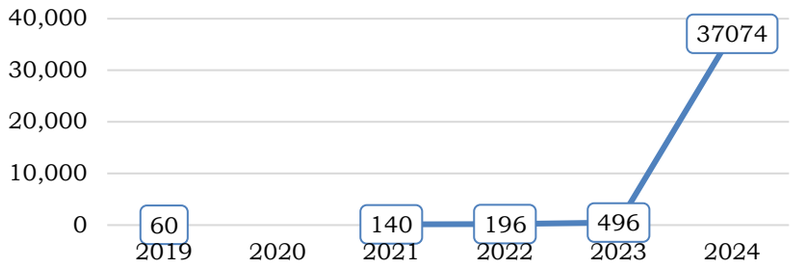
Gambar 2.176
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

f. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain pelatihan sesuai kompetensi pekerja, juga terdapat pelatihan berbasis masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada 2022 dan 2023 yakni 68 dan 204 jiwa.

g. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain kedua pelatihan di atas, terdapat pelatihan lain yang dilakukan, yakni pelatihan kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2024. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.



Gambar 2.177
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

h. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja salah satunya dapat digambarkan melalui pendidikan terakhir tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2021-2024, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, terdapat 1 lulusan S1/S2/S3 di antara 10 pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.28
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

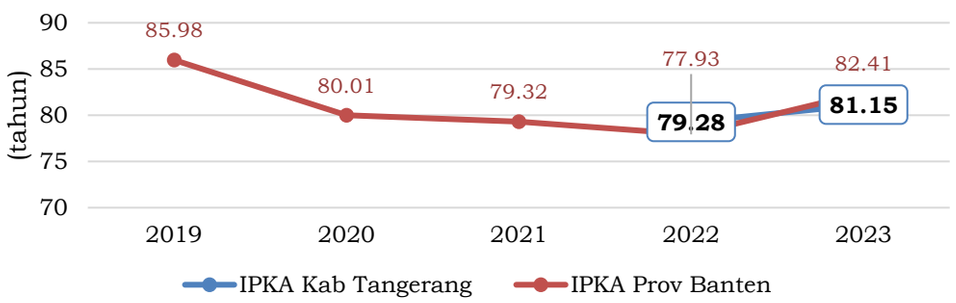
Rasio Lulusan S1/S2/S3					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	2:17	1:8	1:11	1:10

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian pembangunan perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak dengan disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Capaian IPKA Kabupaten Tangerang dihitung mulai tahun 2022 dengan capaian 79,28 dan meningkat hingga 81,15 di tahun 2023. Sementara, capaian IPKA di Provinsi Banten cenderung menurun hingga tahun 2022, dan baru meningkat di tahun 2023 menjadi 82,41.



Gambar 2.178
Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2019-2023
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021-2024

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan memiliki jumlah yang meningkat tiap tahunnya yaitu PNS 58,2% dan PPPK mencapai 66,6%. Grafik peningkatan pada partisipasi perempuan berimplikasi bahwa perempuan diberdayakan dalam lembaga pemerintah.

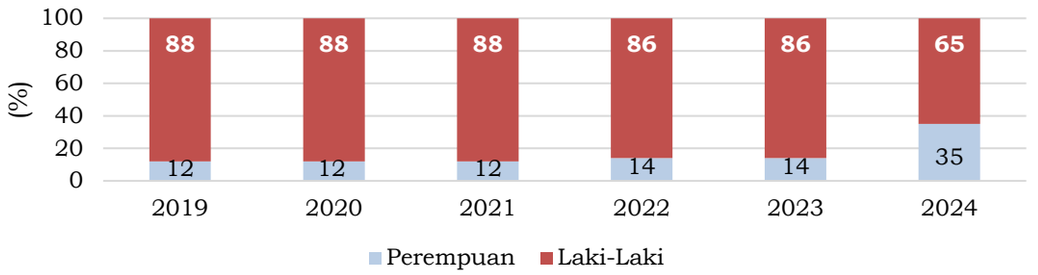
Tabel 2.29
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2023

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah				
Uraian	2020	2021	2022	2023
PNS	44,48%	55,6%	57,7%	58,2%
PPPK	*PPPK mulai ada di tahun 2022*	*PPPK mulai ada di tahun 2022*	67,8%	66,6%

Sumber: BPS dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, 2024

c. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Berdasarkan hasil pemilu 2024, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Daerah belum mencukupi target keterwakilan 35% perempuan. DPRD perempuan di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 19 anggota legislatif perempuan dari 55 anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang atau 65%.



Gambar 2.179
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

d. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemberdayaan perempuan pada lembaga swasta. Pada tahun 2019, partisipasi perempuan di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 23,18% lalu angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 58,17%.

Tabel 2.30
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta				
2019	2020	2021	2022	2023
23,18%	-	55,58%	57,70%	58,17%

Sumber: Buku Data Sektoral 2024 Kabupaten Tangerang

e. Rasio KDRT

KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan dan dilakukan oleh pasangan suami istri. Pada Kabupaten Tangerang, rasio KDRT mengalami fluktuasi peningkatan jumlah kasus dari tahun 2019 Kabupaten memiliki rasio 1 kasus KDRT dari 37.140 rumah tangga. Namun angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 1 kasus dari 24.723 rumah tangga. Lalu rasio tersebut menurun pada tahun 2021 mencapai 1 kasus dari 25.987 rumah tangga, hingga pada tahun 2022 meningkat lagi di angka 1 kasus dari 20.621 rumah tangga.

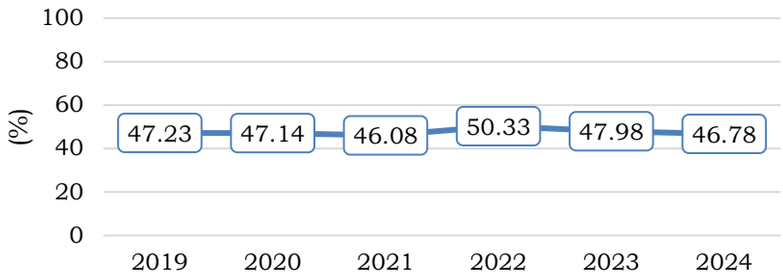
Tabel 2.31
Rasio KDRT Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

Rasio KDRT						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KDRT	25	32	31	40	36	35
RT	928.509	791.148	805.595	824.820		
Rasio KDRT	1 : 37.140	1 : 24.723	1 : 25.987	1 : 20.621		

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

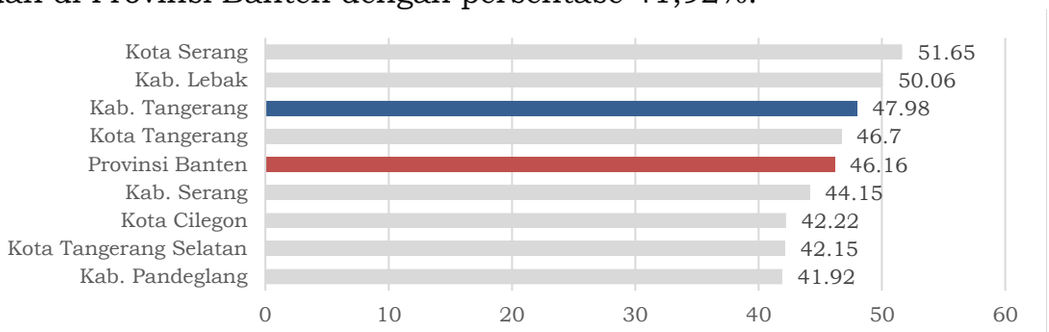
f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun 5 tahun. Pada tahun 2019, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai persentase 47,23%. Persentase ini menurun pada tahun 2021 menjadi 46,08% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 50,33%. Lalu partisipasi angkatan kerja perempuan kembali menurun menjadi 46,78% pada tahun 2024.



Gambar 2.180
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Buku Data Sektoral 2024 Kabupaten Tangerang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Meskipun belum mencapai angka 50%, TPAK perempuan Kabupaten Tangerang berada di atas TPAK Provinsi Banten. Di samping itu, Kota Serang menjadi wilayah dengan TPAK perempuan paling tinggi di Provinsi dengan angka 51,65%; sementara Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan TPAK perempuan paling rendah di Provinsi Banten dengan persentase 41,92%.

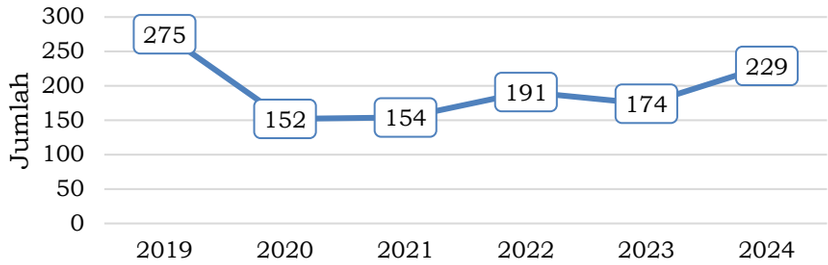


Gambar 2.181
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

g. Jumlah Kasus korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah Kasus korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 275. Angka tersebut

berfluktuasi dengan kembali meningkat dari tahun sebelumnya hingga menjadi 229 pada tahun 2023.



Gambar 2.182
Jumlah Kasus Korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, 2025

h. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio ini berada di angka 91,41%, yang berarti jumlah perempuan yang bersekolah di SD sedikit lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Lalu rasio ini menurun pada tahun 2020 menjadi 91,3%. Tetapi pada tahun 2023, rasio APM meningkat signifikan menjadi 96,63% yang menandakan bahwa perempuan yang dapat mengenyam pendidikan dasar semakin meningkat dan upaya dalam kesetaraan gender berhasil.

i. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio APM berada di 93,87% dan pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 94%. Kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bersekolah di SMP lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, rasio APM meningkat menjadi 110,43% yang menandakan bahwa jumlah perempuan melebihi laki-laki. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program kesetaraan gender berhasil.

j. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio APM mencapai 121,65% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 119,34%. Pada tahun 2023, rasio tersebut turun lagi menjadi 102,93%. Meskipun rasio APM menurun, jumlah siswa perempuan di SMA masih melebihi jumlah siswa laki-laki.

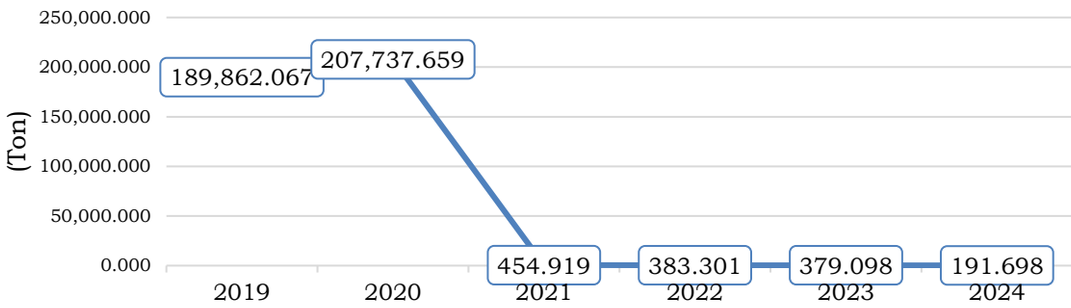
k. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi

Pada tahun 2023, rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang tercatat mencapai 109,96%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa perempuan sedikit melebihi jumlah mahasiswa laki-laki. Rasio ini menandakan bahwa program kesetaraan gender pada pendidikan terlaksana dengan baik.

3) Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

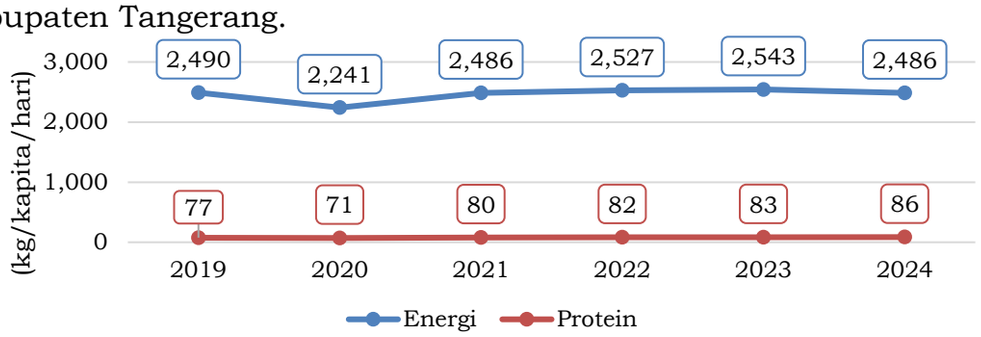
Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Penyediaan pangan Kabupaten Tangerang cenderung menurun terutama pada tahun 2021-2024. Pada tahun tersebut, ketersediaan pangan utama berkisar antara 370.000 - 450.000 ton. Sedangkan pada 2019-2020 ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang berkisar antara 180.000.000 - 207.737.659 ton. Penurunan yang signifikan ini memerlukan penanganan untuk memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang



Gambar 2.183
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2025

b. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

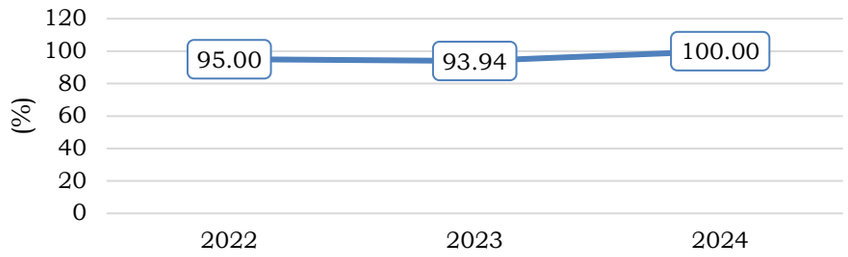
Energi dan protein sebagai salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam tubuh manusia memerlukan pasokan yang mencukupi. Ketersediaan energi di Kabupaten Tangerang relatif sama dari tahun 2019-2024, yakni berkisar antara 2.200-2.500 kg/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan protein cenderung stagnan pada angka 70-86 kg/kapita/hari. Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan protein dan energi per kapita di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.184
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2025

c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah salah satu upaya menjamin kualitas ketahanan pangan dalam suatu wilayah. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan ini tergambar pada persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan. Persentase tersebut cenderung tinggi yakni berkisar di angka 90% dan telah mencapai 100% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kualitas pangan di wilayah ini cenderung baik. Pada tahun 2020-2021 tidak dilakukan pengukuran, karena *refocusing* untuk penanganan pandemi.

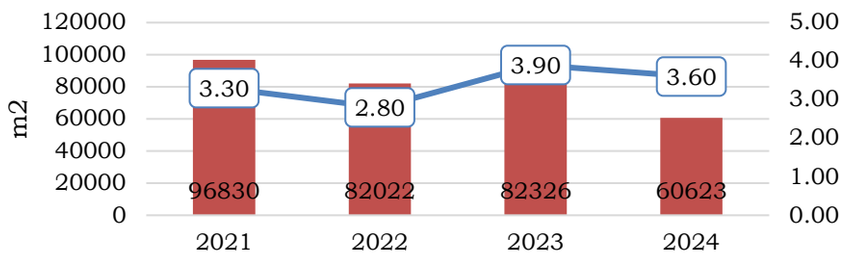


Gambar 2.185
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2025

4) Pertanahan

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Kabupaten Tangerang memiliki grafik persentase luas lahan bersertifikat yang meningkat dalam tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, lahan di Kabupaten Tangerang yang memiliki sertifikat mencapai 37,839,610 m2 dengan persentase 3,3%. Angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2024 mencapai 60,623 bidang dengan luas 41,544,732 m2 dengan persentase 3,6%.



Gambar 2.186
Persentase Luasan Lahan Bersertifikat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024
Sumber: Buku Ranwal RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, 2025

b. Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada seseorang/perusahaan untuk memperoleh dan menggunakan tanah. Bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, Kabupaten Tangerang telah melakukan 100% penyelesaian izin lokasi dari tahun 2019-2023. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang memudahkan penyelesaian izin lokasi di dalam daerah.

5) Lingkungan Hidup

a. Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang telah memiliki dokumen ini sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Tersusunnya RPPLH Kabupaten

Penyusunan RPPLH Kabupaten Tangerang baru dimulai pada tahun 2021 yang berisi sub RPPLH atau peta D3LTH. Sementara itu, pada tahun selanjutnya tersusun dokumen *review* RPPLH Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.32
Tersusunnya RPPLH Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota				
2020	2021	2022	2023	2024
Tidak Ada	Ada (Sub RPPLH/Peta D3LTH)	Ada (*Review*)	Ada (*Review*)	Ada (revisi/verifkasi KLH)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

c. Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten

RPPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan harus seiring dengan rencana pembangunan. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, RPPLH tahun 2025-2055 menjadi dasar penyusunan RPJPD 2025-2045.

d. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan salah satu dokumen yang menjadi bahan pertimbangan dalam berbagai perencanaan. Pada 2021, KLHS di Kabupaten Tangerang terdapat pada KLHS RDTR Cipati dan Cisojati. Sedangkan pada 2022 terdapat 4 KLHS RDTR, 1 KLHS RPJMD, dan 1 KLHS RPJPD. Tahun 2023 terdapat peningkatan pada KLHS yakni menjadi 6 KLHS RDTR, 1 KLHS RPJMD, 1 KLHS RPJPD. Di tahun 2024 terdapat 2 KLHS RDTR.

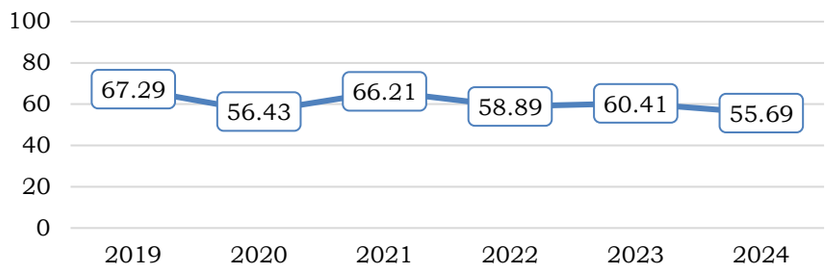
Tabel 2.33
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P** tingkat daerah/provinsi				
2020	2021	2022	2023	2024
Tidak Ada	Ada (KLHS RDTR Cipati dan Cisojati)	KLHS RDTR = 4 KLHS RPJMD = 1 KLHS RPJPD = 1	KLHS RDTR = 6 KLHS RPJMD = 1 KLHS RPJPD = 1	KLHS RDTR = 1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

e. Peningkatan Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah indeks yang menggambarkan kondisi/kualitas air pada suatu wilayah. Indeks kualitas air di Kabupaten Tangerang cenderung berfluktuasi pada tiap tahunnya. Secara umum kualitas air ini tergolong sedang hingga buruk yang berkisar pada angka 56-67. Rendahnya kualitas air ini disebabkan akibat adanya polutan dalam air permukaan dan air tanah.

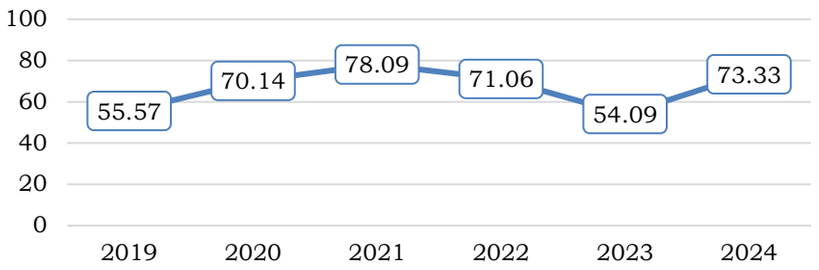


Gambar 2.187
Peningkatan Indeks Kualitas Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

f. Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tangerang meningkat pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Kondisi ini kembali meningkat pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 berada pada angka 73,33 (51-100) menunjukkan kualitas udara yang "sedang" atau "tidak sehat" untuk

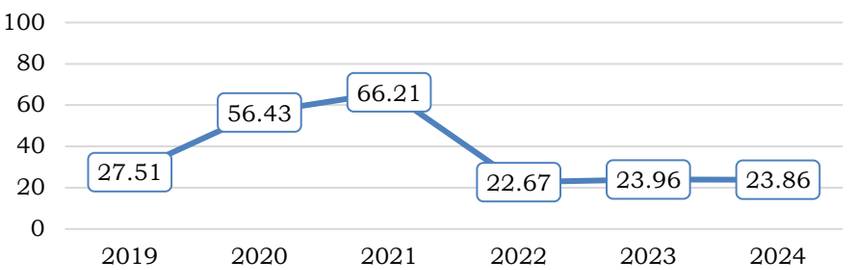
kelompok rentan. Kualitas udara ini cenderung sedang mengarah ke kondisi yang kurang baik sehingga diperlukan adanya penanganan untuk meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.188
Peningkatan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

g. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

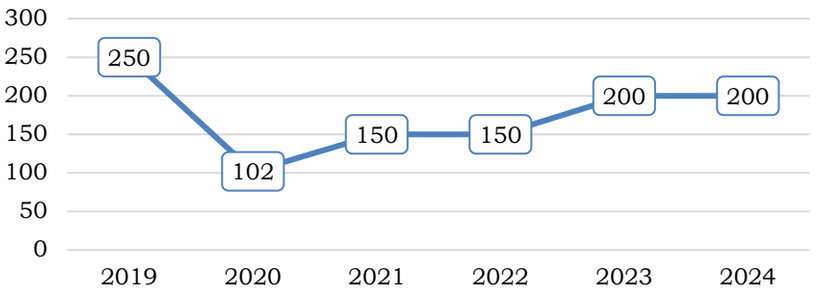
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini terjadi akibat perubahan penghitungan luasan area lahan *mangrove*. Secara umum kondisi tutupan lahan di wilayah ini cenderung buruk ditandai nilai indeks yang rendah. Hal ini terjadi akibat tingginya penggunaan lahan untuk lahan terbangun.



Gambar 2.189
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

h. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

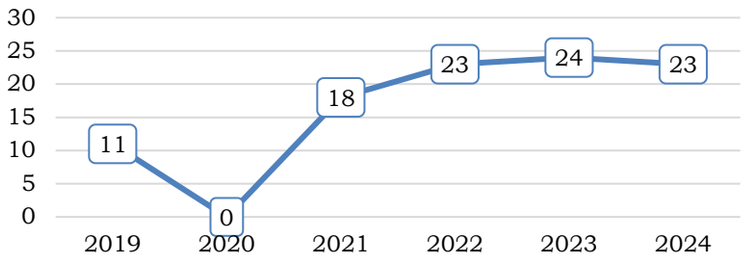
Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Pembinaan dan pengawasan ini mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2023. Sedangkan pada 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara umum pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan besarnya upaya untuk menjaga lingkungan wilayah Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.190
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

i. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

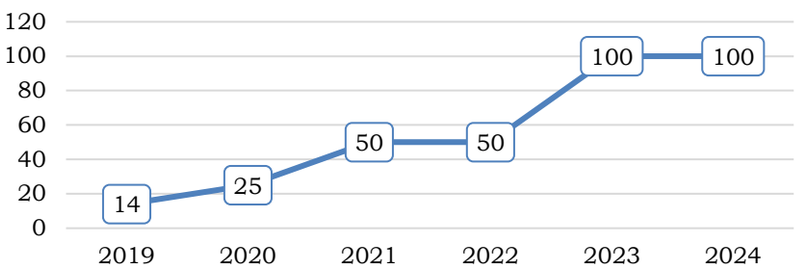
Penghargaan lingkungan hidup merupakan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Penghargaan lingkungan hidup diberikan kepada instansi/ wilayah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Meskipun sempat vakum pada masa pandemi Covid-19, pemberian penghargaan ini semakin meningkat dari 2021-2023. Pada tahun 2024 terdapat 23 penghargaan yang diberikan. Banyaknya jumlah penghargaan yang diberikan mengindikasikan peningkatan kualitas lingkungan hidup di berbagai instansi/wilayah.



Gambar 2.191
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

j. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak lintas Kabupaten/Kota yang Ditangani

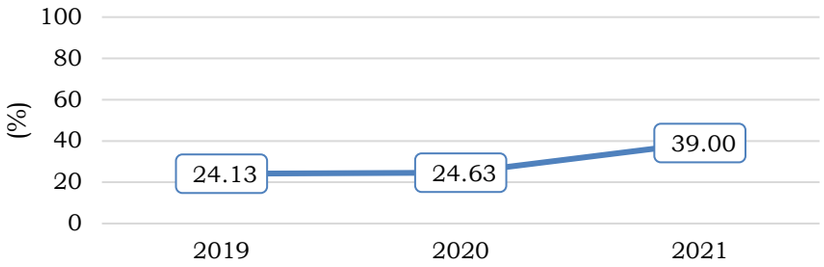
Aduan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap perizinan lingkungan hidup. Pengaduan masyarakat terkait perizinan lingkungan hidup Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap perizinan lingkungan hidup.



Gambar 2.192
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

k. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten

Sampah memiliki cara penanganan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Penanganan sampah pada kondisi khusus di Kabupaten Tangerang masih terbatas. Dalam rentang waktu 2019-2021 sampah yang tertangani pada kondisi khusus hanya berkisar pada 20-27% yang tiap tahunnya meningkat perlahan. Hal ini memerlukan penanganan khususnya dalam mengelola sampah kondisi khusus.

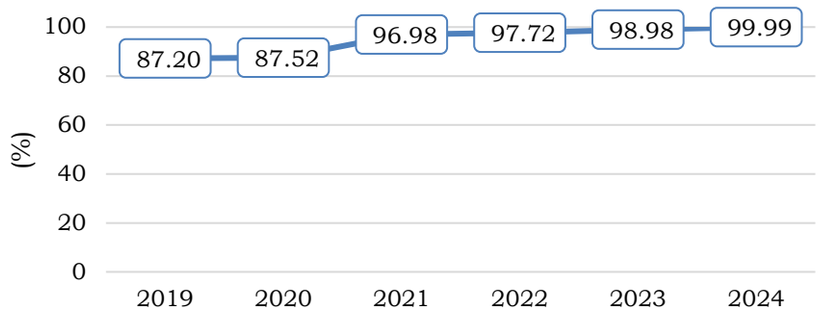


Gambar 2.193
Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

l. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

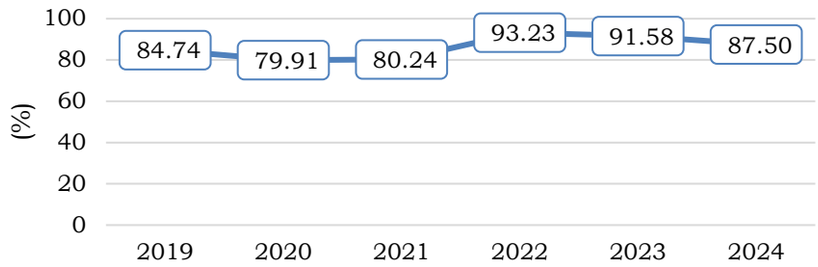
Kabupaten Tangerang memiliki rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk yang cenderung stabil pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mencapai 87,20%. Lalu rasio ini turun di angka 87,52% pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 pada angka 96,98% dan terus meningkat mencapai 99,99% pada tahun 2024. Berdasarkan grafik tersebut, penduduk Kabupaten Tangerang sudah taat administrasi dan terdaftar secara resmi menjadi penduduk Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.194
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2025

m. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Rasio bayi berakta kelahiran ditentukan berdasarkan jumlah bayi yang berakta kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh bayi yang lahir pada tahun dan wilayah yang sama. Kabupaten Tangerang memiliki rasio bayi berakta kelahiran yang secara umum meningkat. Hal ini menandakan bahwa keluarga bayi yang lahir di Kabupaten Tangerang sudah cukup taat administrasi.



Gambar 2.195
Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2025

n. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Rasio pasangan yang memiliki akta nikah di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, rasio tercatat mencapai 50,28%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 54,16%. Peningkatan ini menunjukkan upaya optimalisasi administrasi pencatatan pernikahan dan kesadaran masyarakat mengenai dokumen resmi.

o. Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kabupaten

Ketersediaan *database* kependudukan skala kabupaten merupakan salah satu aspek yang menentukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif mengenai data kependudukan. Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2023 telah tersedia *database* kependudukan skala kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sudah memiliki *database* yang baik untuk mendukung data kependudukan.

p. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2009, KTP berbasis NIK merupakan KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus dan berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pada Kabupaten Tangerang, penerapan KTP Nasional sudah berbasis NIK yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sudah menciptakan lingkungan yang pemerintahnya memiliki keakuratan data penduduk.

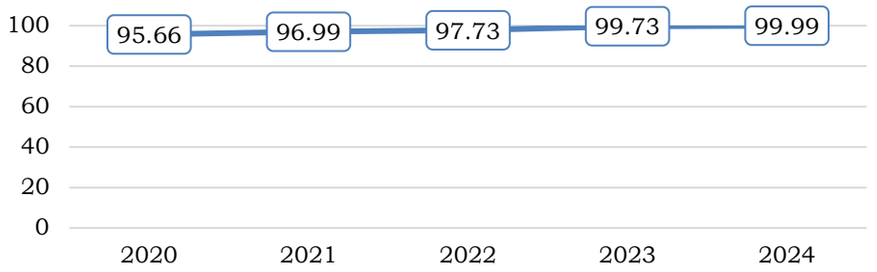
Tabel 2.34
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024

q. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

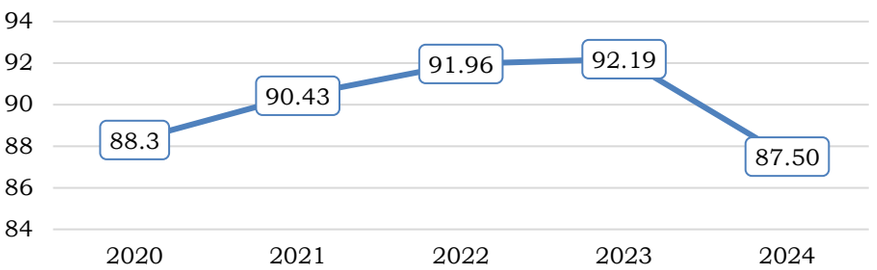
Penerbitan KTP merupakan persentase jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk yang wajib ber-KTP. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam kurun tahun 2020-2024. Peningkatan ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang sudah taat administrasi dan memiliki KTP.



Gambar 2.196
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2025

r. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerbitan akta kelahiran merupakan persentase jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah bayi pada kurun waktu yang sama. Berdasarkan grafik di bawah ini, Kabupaten Tangerang memiliki cakupan penerbitan akta kelahiran yang meningkat. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak bayi yang sudah terdaftar dalam administrasi pemerintah. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan hingga sebesar 87,50%.



Gambar 2.197
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2025

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

s. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 cenderung stagnan di angka 274 kelompok atau sama dengan jumlah kelurahan/desa di wilayah ini.

t. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan perempuan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 cenderung stagnan di angka 274 kelompok atau sama dengan jumlah kelurahan/desa di wilayah ini.

u. Jumlah BUMDes

BUMDes berperan penting dalam mendorong optimalisasi potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang memiliki 83 BUMDes. Akan tetapi, pada tahun 2023 baru hanya 2 BUMDes yang mendapatkan bantuan penyertaan modal. Tahun 2024 BUMDes yang sudah mempunyai badan hukum sebanyak 15

v. Persentase LSM Aktif

LSM atau lembaga swadaya masyarakat berperan dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan/atau mencapai haknya. Pada tahun 2023, terdapat 46 LSM yang bergerak aktif di Kabupaten Tangerang. Jumlah ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

w. Persentase LPM Berprestasi

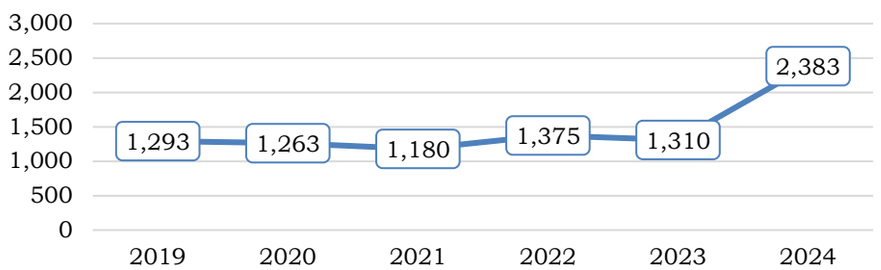
Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang berkembang pesat ditandai dengan 125 LPM yang tergolong dalam LPM berprestasi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang

x. Persentase PKK Aktif

PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan perempuan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga. Jumlah PKK yang bergerak aktif di Kabupaten Tangerang mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan seluruh PKK berpartisipasi aktif mendukung pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan keluarga.

y. Jumlah Posyandu Aktif

Posyandu adalah upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jumlah posyandu yang aktif mengalami fluktuasi. Secara umum jumlah posyandu aktif di Kabupaten Tangerang berkisar antara 1.100-1.300. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2024, hingga sebesar 2.383. Tingginya jumlah posyandu yang aktif menunjukkan adanya upaya pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat bawah.



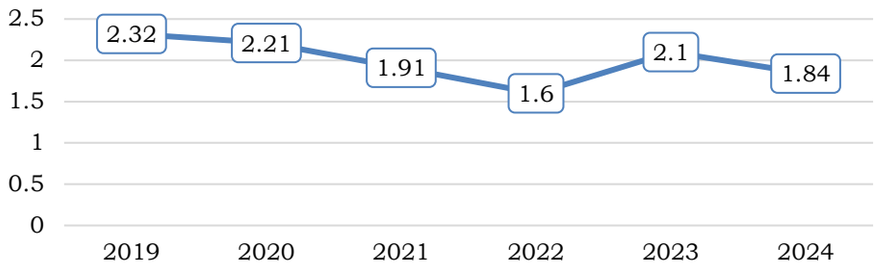
Gambar 2.198
Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Data Statistik Sektoral

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

z. *Total Fertility Rate* (TFR)

Total fertility rate atau TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksi. Kabupaten Tangerang memiliki rata-rata TFR pada tahun 2019-2024 mencapai angka 2. Hal ini menandakan bahwa wanita dengan usia 15-49 tahun secara rata-rata memiliki 2 anak selama masa usia suburnya. TFR 1,84 di tahun 2024,

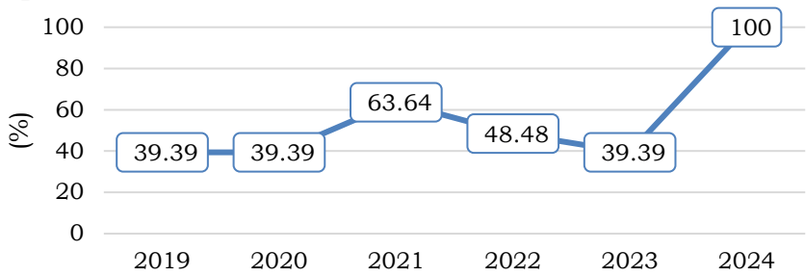
populasi cenderung mengalami penurunan alami dalam jangka panjang jika tidak ada faktor lain seperti imigrasi.



Gambar 2.199
Total Fertility Rate Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, RPJMD 2019-2024

aa. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Kampung KB adalah yang melaporkan kegiatannya di Kampung KB ke Pokja Kampung KB tingkat kota. Semakin tinggi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB maka menunjukkan semakin baik perhatian pemerintah daerah terhadap program kampung KB. Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cenderung stagnan dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 angka ini meningkat hingga 63,63% dan angka tersebut kembali menjadi 39,39%, tahun 2024 Kabupaten Tangerang melakukan integrasi program Kampung KB sehingga angka mencapai 100%.



Gambar 2.200
Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber : Open data Kabupaten Tangerang, 2025

bb. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh perangkat daerah untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan penduduk di wilayah tertentu. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk mengacu pada proporsi atau persentase dari semua lembaga pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemanfaatan dokumen strategis. Di tahun 2019-2022, belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Di tahun 2023, terdapat 2% Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

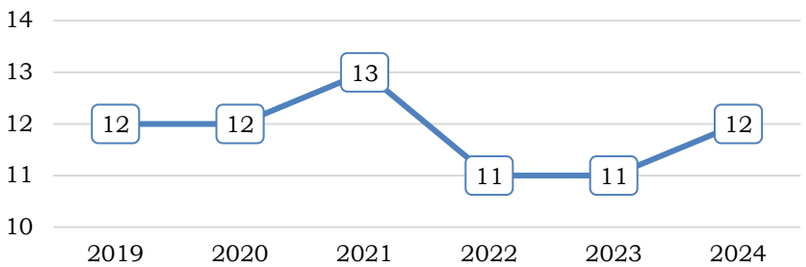
cc. Jumlah Kebijakan yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Pengendalian penduduk merupakan usaha pemerintah dalam mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah yang ditentukan oleh

kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang baru memiliki 1 kebijakan berkaitan dengan program pengendalian penduduk di Kabupaten Tangerang. Adanya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2046 menjadi salah satu arah kebijakan dalam perencanaan kependudukan di Kabupaten Tangerang.

dd. Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

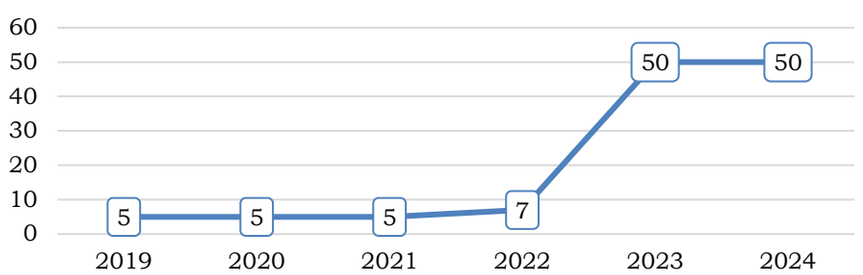
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan meningkat di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), selama kurun waktu 2019-2023, cenderung menurun dari capaian 13 sektor pada tahun 2021 menjadi 11 sektor pada tahun 2022 dan 2023 12 sektor di 2024.. Hal ini menandakan bahwa perlu peningkatan sektor-sektor di Kabupaten Tangerang dalam upaya memperhatikan masa depan penduduk dalam perencanaan dan pelaksanaan program.



Gambar 2.201
Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2019-2024
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, 2025

ee. Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

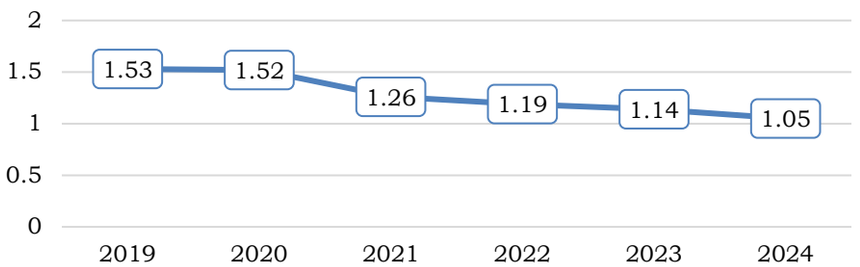
Pada tahun 2019-2023, jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini memuncak pada tahun 2024 dengan besaran 50 kerja sama. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan dan mengindikasikan bahwa kependudukan merupakan salah satu program prioritas.



Gambar 2.202
Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

ff. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

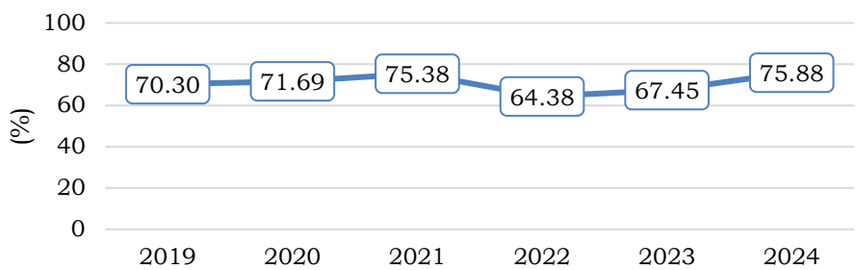
Rata-rata jumlah anak per keluarga ditentukan berdasarkan jumlah anak yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yang ada di suatu daerah. Dalam tahun 2019-2023, rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, rata-rata tersebut mencapai 1,53 dan angka ini sedikit menurun pada tahun 2020 mencapai 1,52. Tetapi pada tahun 2024, jumlah tersebut menurun hingga mencapai 1,05 atau 1 anak. Penurunan ini menandakan bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Tangerang berhasil.



Gambar 2.201
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

gg. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 Tahun

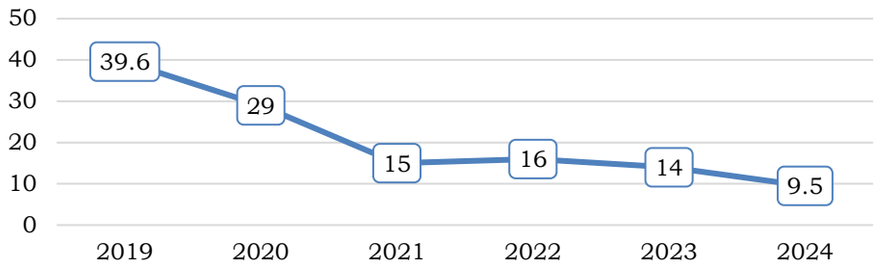
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 tahun dihitung dengan jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur. Pada Kabupaten Tangerang, dalam kurun waktu 2019-2024, angka pemakaian kontrasepsi/CPR mengalami fluktuasi yang meningkat pada tahun 2024 pada persentase 75,88%. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya pemakaian kontrasepsi/CPR pada pasangan PUS di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.203
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 tahun
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

hh. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

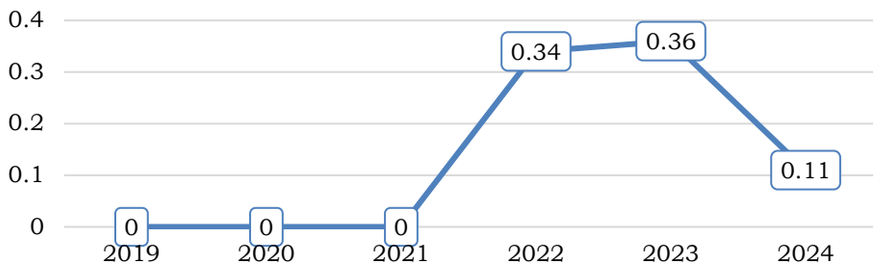
ASFR atau *age specific fertility rate* merupakan banyaknya kelahiran dari 1.000 wanita kelompok umur 15-19 tahun yang dibandingkan dengan jumlah wanita kelompok 15-19 tahun. ASFR Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2019-2023. Pada tahun 2024, angka tersebut mencapai 9,5 yang menandakan bahwa dalam 1000 wanita usia 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang terdapat 9 orang yang sudah memiliki anak. Dengan penurunan angka ASFR menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat bahwa melahirkan di bawah 20 tahun menyebabkan risiko kesehatan tinggi bagi ibu dan anak.



Gambar 2.204
Angka Kelahiran Remaja per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

ii. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

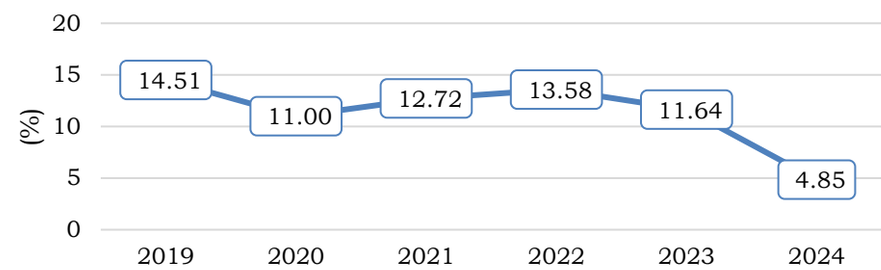
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2021 cakupannya nol (0). Pada tahun 2022, cakupannya mencapai 0,34 kemudian naik menjadi 0,36 di tahun 2023, mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 0,11. Hal ini menandakan bahwa perempuan di bawah 20 tahun di Kabupaten Tangerang sudah memiliki pengetahuan yang semakin baik mengenai menikah muda dan program pendewasaan usia kawin pertama sudah berhasil dilakukan.



Gambar 2.205
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

jj. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

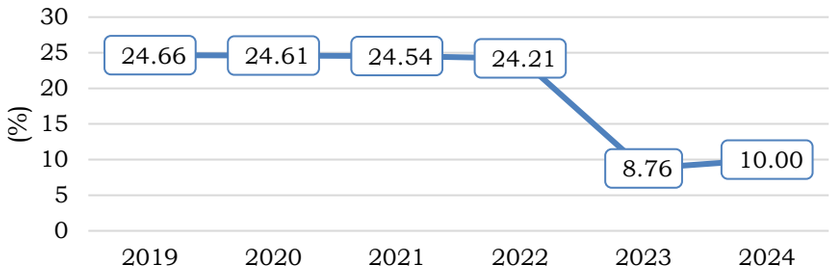
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi belum terlayani KB. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses jangkauan, informasi, dana, dukungan dan kualitas (Sarana, prasarana dan tenaga) pelayanan KB. Kabupaten Tangerang memiliki cakupan PUS yang rendah menurun pada tahun 2019-2024, dengan capaian 4,85% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pelayanan KB yang ada pada Kabupaten Tangerang semakin baik.



Gambar 2.206
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 - 2024
Sumber : BPS 2024, RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

kk. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

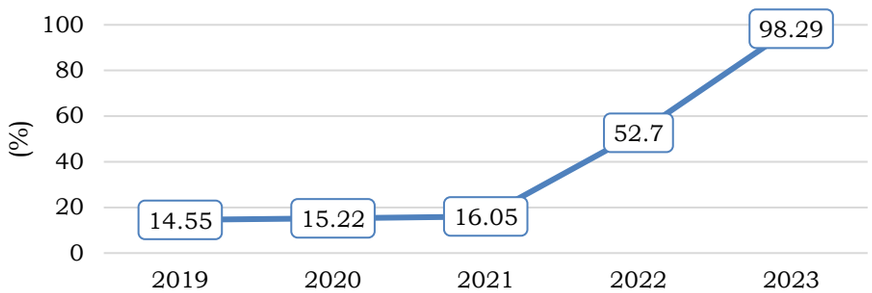
MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari metode operasi wanita, operasi pria dan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD dan alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Semakin tinggi pengguna MKJP maka menunjukkan semakin baik partisipasi masyarakat terhadap program kependudukan. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cukup rendah dengan angka terendah pada tahun 2024 yaitu 10%.



Gambar 2.207
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber : Buku Ranwal RPJPD Kabupaten Tangerang dan DPPKB, 2025

ll. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

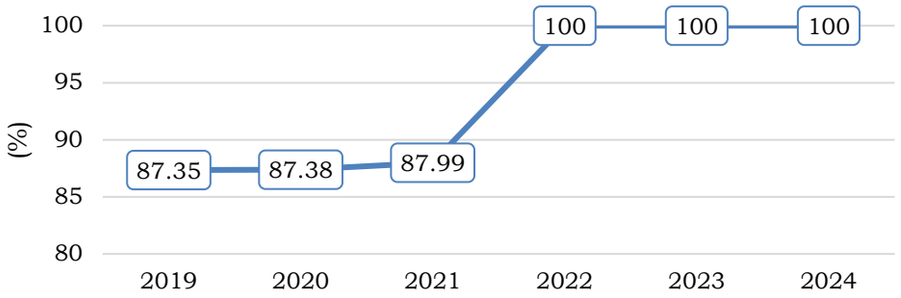
Kabupaten Tangerang memiliki persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang meningkat dalam tahun 2019-2023, dengan capaian telah mencapai 98,29% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga semakin baik.



Gambar 2.208
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023
Sumber : RKPD dan DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

mm. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

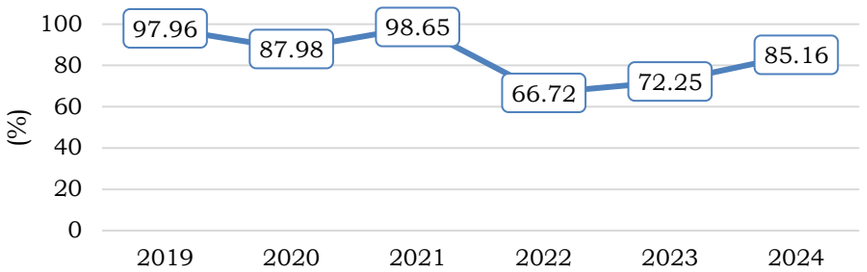
Bina keluarga balita atau BKB merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dalam membina tumbuh dan berkembangnya anak usia balita. Pada tahun 2019-2023, cakupan BKB meningkat hingga mencapai 100% di tahun 2022 hingga 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB terhadap pembinaan keluarga balita semakin tinggi.



Gambar 2.209
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

nn. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

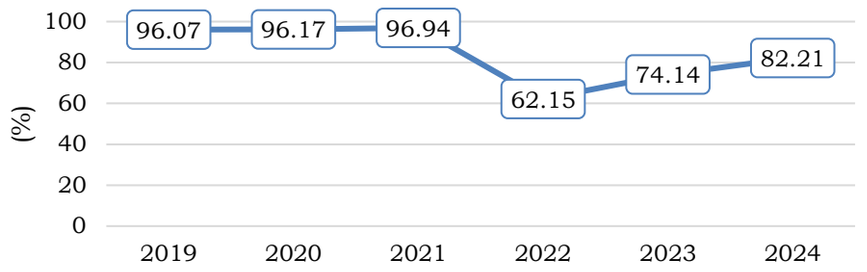
Bina keluarga remaja (BKR) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk membina tumbuh dan berkembangnya remaja usia 10-24 tahun. Pada tahun 2019-2024, cakupan BKR menunjukkan penurunan dengan capaian 85,16% di tahun 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB terhadap pembinaan keluarga remaja semakin menurun.



Gambar 2.210
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD dan DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

oo. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

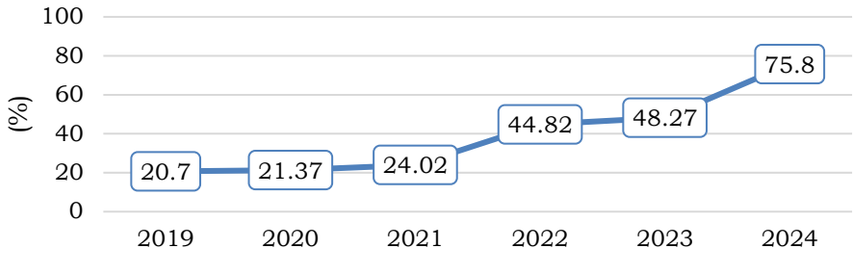
Bina keluarga lansia atau BKL merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga lansia yang sehat, mandiri, dan produktif. Pada tahun 2019-2023, cakupan BKR menunjukkan penurunan dengan capaian 82,21% di tahun 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB Kabupaten Tangerang terhadap pembinaan keluarga lansia semakin menurun.



Gambar 2.211
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

pp. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

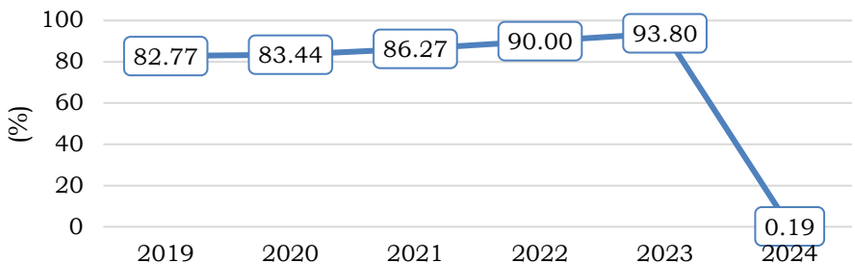
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan kegiatan pelayanan keluarga melalui konseling, bimbingan, pemberian KIE dan fasilitas keluarga sejahtera. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang meningkat, sebesar 75,8% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya penyediaan sarana konseling keluarga di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.212
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

qq. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

PIK-R merupakan wadah bagi remaja untuk melaksanakan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa meningkat dalam kurun waktu 2019-2023. Dapat dilihat dalam grafik di bawah, jika persentase tersebut sudah cukup baik, terutama dalam tahun 2023 mencapai 93,8%. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak remaja yang peduli dan ingin mempersiapkan diri mereka untuk memiliki ilmu berkeluarga. Tahun 2024 turun menjadi 0,19%.



Gambar 2.213
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

rr. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan petugas program KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kabupaten Tangerang memiliki PKB/PLKB yang meningkat dalam kurun waktu 2019-2023. Meskipun cakupan stabil 100% tiap tahunnya, jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan meningkat dari 7 pada tahun 2019 menjadi 60 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang semakin peduli dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

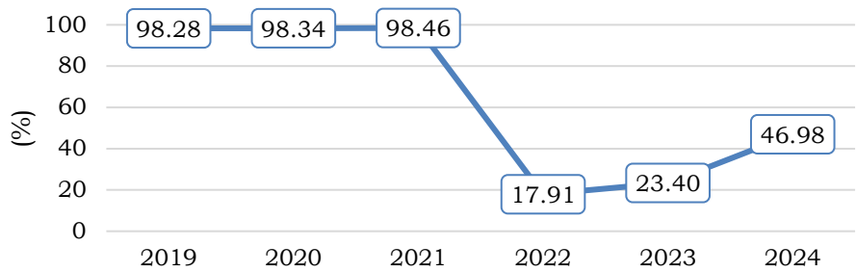
Tabel 2.35
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKB/PLKB yang diberdayakan	7	7	8	23	60	31
Total PKB/PLKB	7	7	8	23	60	31
Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

ss. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

UPPKS merupakan salah satu kelompok kegiatan masyarakat yang melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 46,98% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin sedikit anggota UPPKS yang melakukan KB mandiri.



Gambar 2.214
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

tt. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

PPKBD merupakan petugas yang bekerja langsung di lapangan dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk. PPKBD bertujuan untuk memberikan penyuluhan, motivasi, dan konseling kepada masyarakat, serta melakukan pengarsipan program KB di desa/kelurahan tempat tugasnya. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah menyediakan 1 petugas pada tiap desa/kelurahan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberikan pelayanan yang optimal.

Tabel 2.36
Rasio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

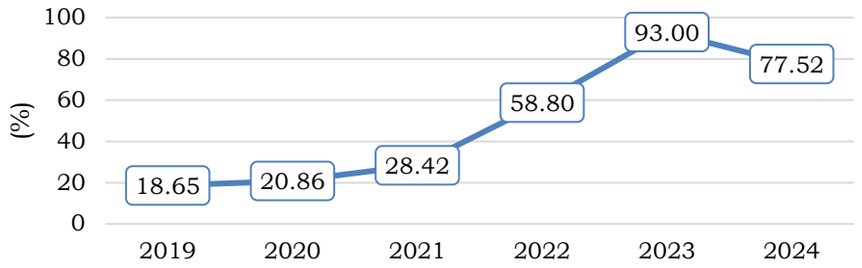
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Petugas Pembantu Pembina KB	274	274	274	274	274	274
Jumlah Desa	274	274	274	274	274	274
Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1

Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

uu. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi ditentukan berdasarkan jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang daerah dibandingkan dengan perkiraan permintaan masyarakat. . Pada Kabupaten Tangerang, cakupan tersebut mengalami

peningkatan drastis dalam lima tahun (2019-2023). Pada tahun 2019, cakupan tersebut hanya mencapai 18,65%, sedangkan pada tahun 2024 cakupan tersebut mencapai 77,52%. Peningkatan ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan kontrasepsi.



Gambar 2.215
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

vv. Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

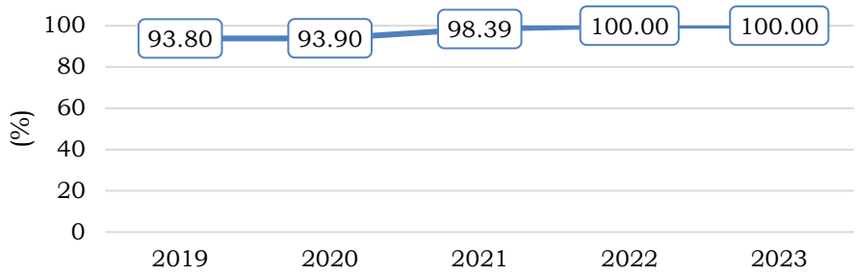
Seluruh faskes dan jejaringnya di Kabupaten Tangerang telah bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Hal ini menandakan bahwa fasilitas pendukung kesehatan Kabupaten Tangerang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat baik dari pelayanan program jaminan sosial maupun keluarga berencana. Tahun 2023 sekitar 100% faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR, sedang tahun 2024 sekitar 52,77%.

ww. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa merupakan ketersediaan informasi dan data anggota keluarga mengenai demografi, keluarga berencana dan ketahanan serta pembinaan keluarga. Kabupaten Tangerang telah mencakup 100% atau seluruh desa dalam kurun waktu 2019-2024. Cakupan tersebut dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah sangat baik dalam penyediaan informasi.

xx. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

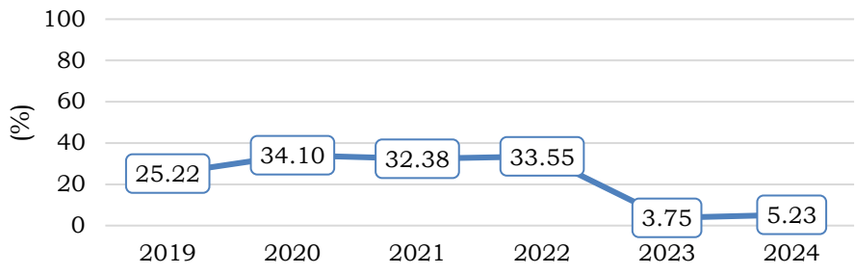
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga terhitung berdasarkan jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dibandingkan dengan total jumlah kelompok kegiatan dalam suatu daerah. Kabupaten Tangerang memiliki cakupan yang meningkat selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2021. Selanjutnya, cakupan ini stabil di angka 100% ada tahun 2022 dan 2023. Grafik ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang terus berupaya memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada keluarga.



Gambar 2.216
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2024

yy. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

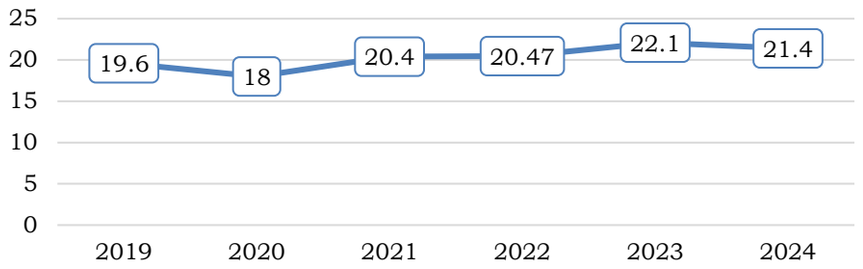
Pada Kabupaten Tangerang, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, cakupan ini mencapai angka 25,22% dan meningkat pada tahun 2020 mencapai 34,10% lalu stabil pada tahun 2021 dengan angka 32,38%, dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 33,55%. Akan tetapi, persentase tersebut menurun cukup signifikan pada tahun 2024 hingga di angka 5.23%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus berupaya melakukan pemantauan terhadap masyarakat, terutama dalam tumbuh kembang anak.



Gambar 2.217
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

zz. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

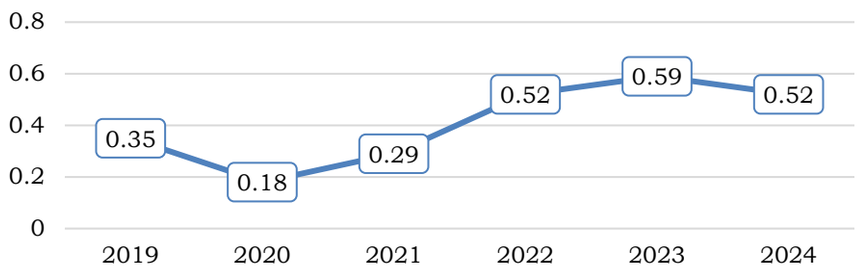
Umur kawin pertama atau UKP merupakan saat dimulainya masa reproduksi dan menjadi indikator penekanan laju pertumbuhan penduduk. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan usia dalam kurun waktu lima tahun (2019-2023). Pada tahun 2019, rata-rata usia kawin pertama wanita berada di usia 19,6 tahun dan menurun pada tahun 2020 menjadi 18 tahun. Lalu pada tahun 2024, rata-rata tersebut meningkat menjadi usia 21,4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program penekanan jumlah penduduk menunjukkan keberhasilan dengan terus berupaya melalui pemantauan pernikahan usia muda.



Gambar 2.218
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

aaa. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (PPKB) melalui APBD dan APBDes pada tahun 2024 mencapai 0,52% di Kabupaten Tangerang. Dalam 6 tahun terakhir, persentase pembiayaan program cenderung mengalami peningkatan yang menandakan bahwa pemerintah semakin memperhatikan program-program yang terkait dengan kependudukan.

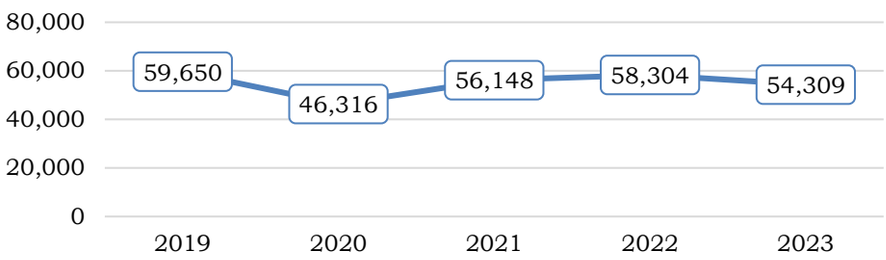


Gambar 2.219
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Melalui APBD dan APBDes Tahun 2019-2024
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

9) Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum menjadi salah satu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat untuk bermobilisasi. Pengguna angkutan umum di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu meski sempat mengalami penurunan drastis pada 2020 yakni hanya mencapai 46.316 unit. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2023 di Kabupaten Tangerang mencapai 54.309 unit. Tingginya arus ini menunjukkan angkutan umum masih menjadi transportasi andalan masyarakat dalam mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.



Gambar 2.220
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

b. Rasio Ijin Trayek

Izin trayek menjadi salah satu syarat dalam pengembangan angkutan umum. Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan, selama tahun 2019 hingga 2023, jumlah izin trayek di wilayah ini stagnan di angka 1.408 izin. Jumlah izin trayek yang sama ini menunjukkan tidak adanya penambahan atau pengurangan trayek baru di wilayah Kabupaten Tangerang.

c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Kir merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Uji kir menjadi salah satu syarat kendaraan untuk transportasi. Uji kir di Kabupaten Tangerang relatif berfluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah uji kir mengalami penurunan hingga 46.316, namun kondisi tersebut dapat kembali meningkat menjadi 67.597 uji kir pada tahun 2024.

Tabel 2.37
Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Jenis Angkutan Umum		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Barang	Pick up	25.661	20.376	23.464	23.960	21.813	19.205
	Light Truck	18.320	16.662	23.485	25.020	23.515	21.127
	Truck	12.290	7.052	7.018	7.107	6.954	6.533
	Tr. Head	0	161	187	16		
	Mobil Box						19.205
Mobil Bus	Bus	315	209	103	178	198	310
	Micro Bus	823	514	562	847	804	735
Mobil Penumpang	Taxi	153	58	34	0	0	364
	Angkutan Kota	1.762	1.043	913	727	546	118
Kend. Tempelan		326	235	371	431	447	
Kend. Khusus		0	6	11	18	32	
JUMLAH		59.650	46.316	56.148	58.304	54.309	65.957

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai/Udara/Terminal Bus

Sarana transportasi memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat. Kabupaten Tangerang hanya memiliki 2 bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Budiarto. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 2 dermaga, yaitu Dermaga Kronjo dan Derma Cituis. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran transportasi darat, Kabupaten Tangerang yang memiliki 29 kecamatan tidak memiliki satu pun terminal. Satu-satunya terminal bus yang ada di wilayah Kecamatan Pasar Kemis sudah tidak berfungsi lagi.

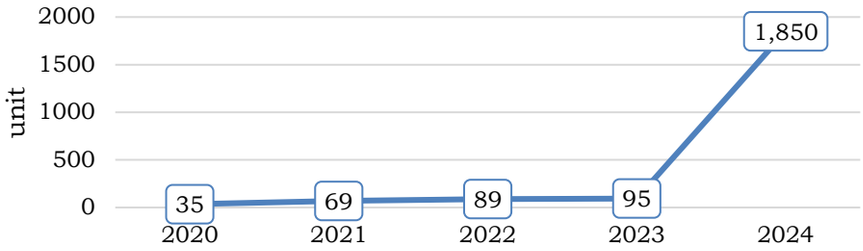
e. Layanan Angkutan Darat

Sesuai dengan jumlah izin trayek di wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah ini memiliki jumlah angkutan darat yang sama, yakni 1.408 angkutan penumpang darat. Jumlah ini stagnan dari tahun 2019-2023 menunjukkan tidak adanya penambahan angkutan darat untuk meningkatkan cakupan transportasi di wilayah ini.

f. Pemasangan Rambu-rambu

Pemasangan rambu-rambu sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan pemasangan rambu dari 35

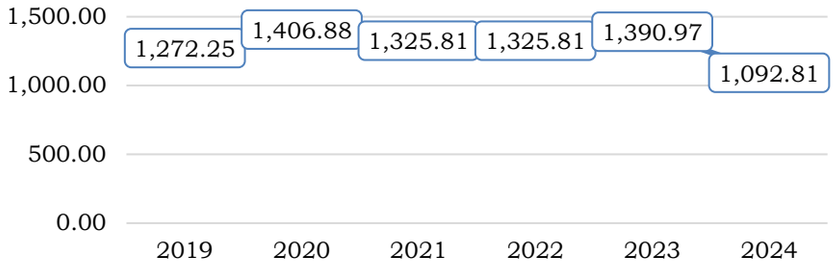
unit menjadi 1.850 unit rambu. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan.



Gambar 2.221
Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

g. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

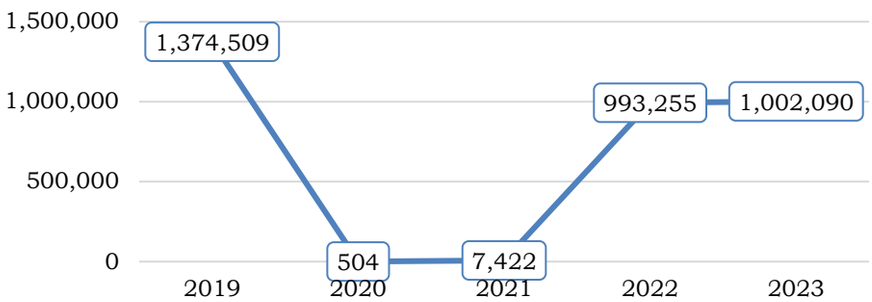
Kendaraan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi wilayah. Tingginya jumlah kendaraan ini juga berakibat pada penurunan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Tangerang berkisar di angka 1.200-1.400. Nilai tersebut menandakan tiap 1 km jalan melayani 1.200-1.400 kendaraan.



Gambar 2.222
Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

h. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut dalam angkutan umum di Kabupaten Tangerang tergolong besar yakni mencapai 1.002.090 pada tahun 2023. Angka ini sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021 yang terjadi akibat adanya pandemi *covid-19*.



Gambar 2.223
Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

i. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun

Jumlah orang dan barang yang diangkut melalui Dermaga Kronjo dan Dermaga Cituis memiliki tren yang sama yakni sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Berdasarkan jumlahnya, Dermaga Cituis mengangkut barang dan orang yang lebih banyak daripada Dermaga Kronjo. Hal ini menunjukkan kapasitas dermaga Cituis yang lebih tinggi. Selain itu,

tingginya animo penggunaan transportasi laut ini menunjukkan eksistensi transportasi laut.

Tabel 2.38
Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Jumlah Barang dan orang yang terangkut		Dermaga Kronjo	Dermaga Cituis
2019	Barang (Kg)	501.600	1.800.000
	Orang	2.012	14.400
2020	Barang (Kg)	1.003.200	3.600
	Orang	4.025	28.800
2021	Barang (Kg)	1.984.000	3.821.000
	Orang	5.660	15.321
2022	Barang (Kg)	714.000	13.333.000
	Orang	3.354	3.105.000
2023	Barang (Kg)	1.864.000	2.520.000
	Orang	5.982	21.600

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

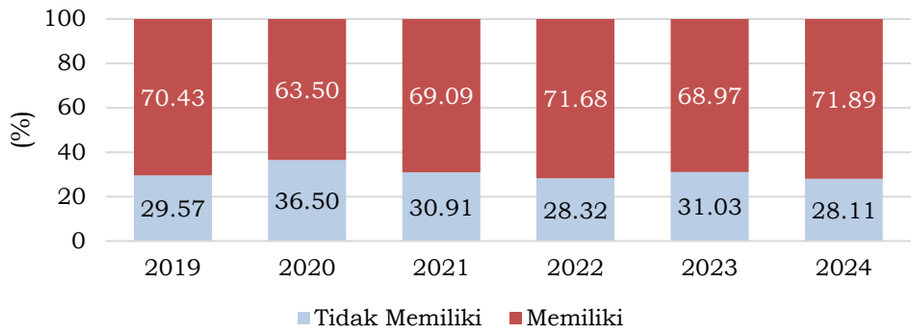
10) Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan Layanan telekomunikasi Kabupaten Tangerang telah dipenuhi oleh operator telepon seluler dengan cakupan 100% dan melayani 246 dari 246 desa. Hal ini menandakan bahwa daerah Kabupaten Tangerang sudah maju dan cepat dalam pertukaran informasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh.

b. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

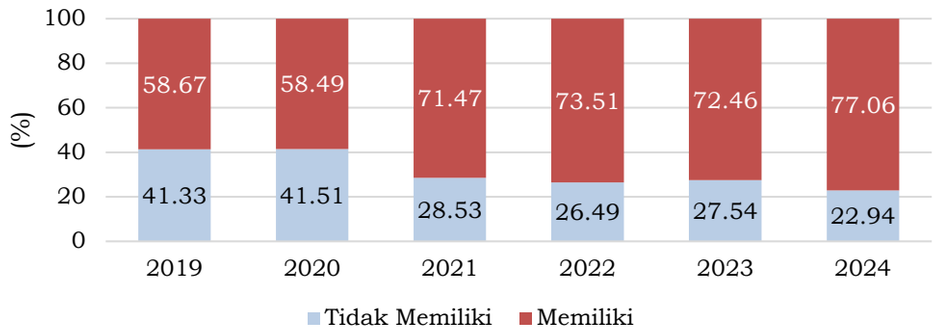
Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2019-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2024, persentase penduduk yang memiliki HP/Telepon mencapai 71,89% dan yang tidak memiliki terdapat 28,11%.



Gambar 2.224
Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Buku Profil Statistik Kab. Tangerang Tahun 2025

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

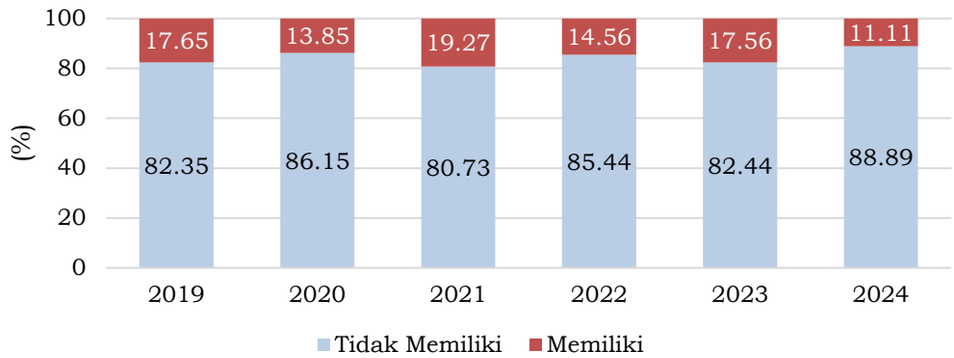
Persentase rumah tangga Kabupaten Tangerang dengan akses internet pada tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang mengakses internet mencapai 77,06% dan yang tidak sebesar 22,94%. Hal ini menandakan bahwa pengaruh akses internet pada kehidupan penduduk Kabupaten Tangerang semakin besar, salah satunya pada penyebaran informasi dan telekomunikasi.



Gambar 2.225
Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

d. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Persentase rumah tangga Kabupaten Tangerang yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2019-2024 cenderung stagnan. Pada tahun 2024, persentase penduduk memiliki komputer pribadi mencapai 11,11% dan yang tidak memiliki terdapat 88,89%. Hal ini menandakan bahwa tren memiliki komputer pribadi pada kehidupan penduduk Kabupaten Tangerang tidak terjadi. Teknologi digital mengubah pola konsumsi media masyarakat dari konvensional menjadi digital. Pemanfaatan perangkat dari sistem kabel (*wire*) ke nirkabel (*wireless*) sudah banyak digunakan masyarakat.

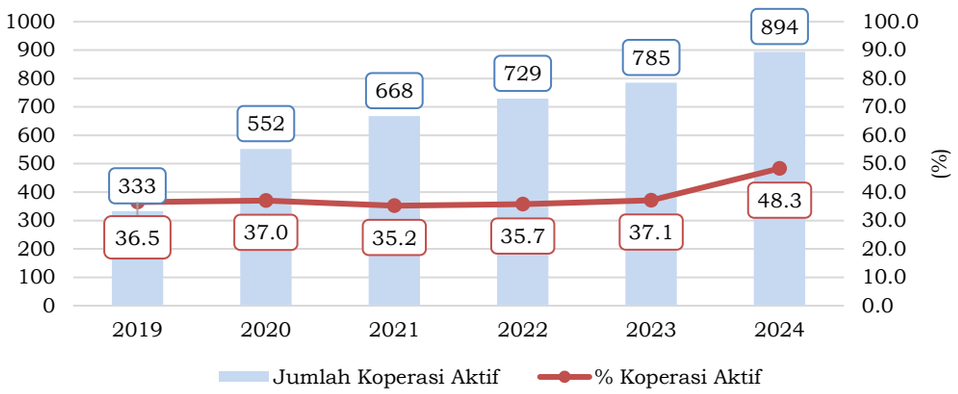


Gambar 2.226
Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Buku Profil Statistik Kab. Tangerang Tahun 2025

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

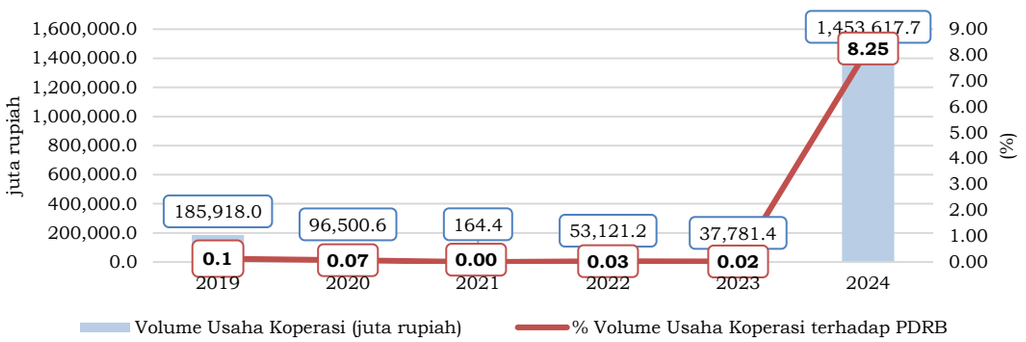
Koperasi sebagai pemantik ekonomi masyarakat saat ini mulai tergeser dengan munculnya berbagai inovasi dalam bidang keuangan. Meskipun demikian, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2024. Meskipun demikian jumlah ini cenderung rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain.



Gambar 2.227
Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025

b. Volume Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi menunjukkan skalabilitas aktivitas usaha koperasi di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2024, volume usaha koperasi di Kabupaten Tangerang mencapai 1,45 triliun rupiah dan capaian ini paling tinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan volume usaha koperasi melalui peningkatan akses koperasi terhadap pemodalan serta optimalisasi dan inovasi layanan koperasi.



Gambar 2.228
Volume Usaha Koperasi Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

c. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Seiring berjalannya waktu, semakin tingginya jumlah usaha mikro dan kecil yang berkembang menyokong perekonomian masyarakat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tangerang. Selama kurun waktu 2021-2023 terdapat peningkatan persentase usaha mikro dan kecil, yaitu dari 96,96 pada tahun 2021 menjadi 98,51% pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan tingginya dan pesatnya perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayah Kabupaten Tangerang.

12) Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor merupakan seseorang/sekelompok orang/perusahaan yang melakukan penanaman modal pada suatu daerah/perusahaan. Investor menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari sejumlah dana yang diberikan. Sedangkan daerah/perusahaan yang ditanamkan modal dapat mempercepat program dan pembangunan ekonominya. Pada Kabupaten Tangerang, jumlah investor dalam tahun 2019-2023 mengalami

peningkatan dengan tahun 2019 sejumlah 2.776 investor dan tahun 2023 sejumlah 15.399 investor. Peningkatan ini menandakan bahwa perekonomian di Kabupaten Tangerang akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.39
Investor Berskala Nasional Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMDN	1.140	2.173	3.223	4.009	10.863	17.630
PMA	1.636	1.778	1.680	1.677	4.536	1.565
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2.776	3.951	4.903	5.686	15.399	19.195

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin tinggi nilai suatu investasi atau penanaman modal yang ditanamkan oleh investor, maka semakin tinggi perputaran perekonomian dalam suatu wilayah. Perputaran ekonomi dalam suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

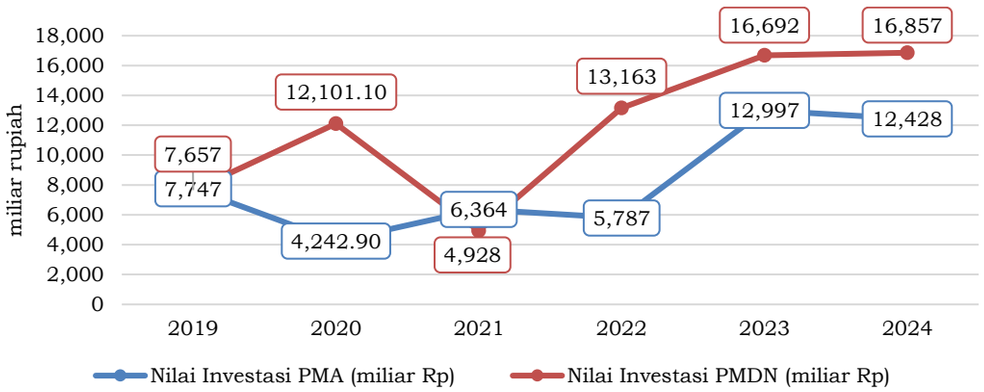
Tabel 2.40
Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMA dan PMDN Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2024

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PMA						
Nilai Investasi (Miliar Rp)	7.747	4.242,9	6.364	5.787	12.997	12.428
Jumlah Proyek (proyek)	1.636	1.778	1.680	1.677	4.536	1.565
PMDN						
Nilai Investasi (Miliar Rp)	7.657	12.101,1	4.928	13.163	16.692	16.857
Jumlah Proyek (proyek)	1.140	2.173	3.223	4.009	10.863	17.630

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025

Pada tahun 2019-2024, jumlah nilai investasi berskala nasional Kabupaten Tangerang cenderung meningkat, baik dari nilai investasi maupun jumlah proyek. Dapat dilihat pada grafik di bawah, nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2019 mencapai 15.403 miliar rupiah. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 29.285 miliar rupiah, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tangerang semakin meningkat ditandai dengan semakin banyaknya investasi yang masuk. Selain itu, jika dilakukan perbandingan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi (ICOR) dalam lima tahun terakhir menunjukkan nilai ICOR Kabupaten Tangerang masih berada pada kisaran normal yaitu 3-4, yang dapat diinterpretasikan bahwa investasi digunakan secara efisien (Bappeda, 2024)[3].

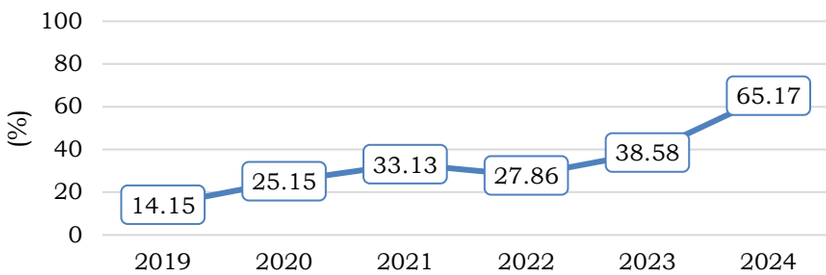
[3] Analisis ICOR Kabupaten Tangerang dalam Dokumen Pengembangan Dan Penataan Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2024)



Gambar 2.229
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

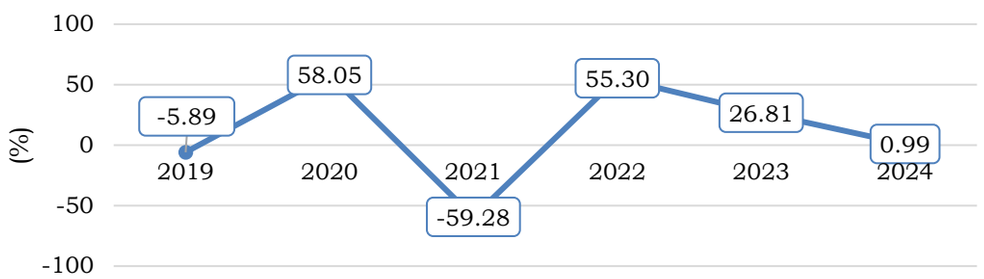
Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Penanaman modal daerah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal. Rasio daya serap dapat dihitung dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dibandingkan Jumlah seluruh PMA/PMDN. Pada Kabupaten Tangerang, rasio tenaga kerja mengalami peningkatan dalam tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,15% dan meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 65,16%. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang semakin meningkat.



Gambar 2.230
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah), 2025

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

Kenaikan dan penurunan realisasi nilai investasi merupakan gambaran kondisi capaian investasi pada tahun evaluasi dikurangi dengan realisasi sebelum evaluasi yang dibandingkan dengan capaian realisasi sebelum evaluasi. Dapat dilihat pada grafik di bawah, Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi pada nilai realisasi PMDN. Hal ini menandakan bahwa penanaman modal dan investasi di Kabupaten Tangerang masih belum stabil.



Gambar 2.231
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah), 2025

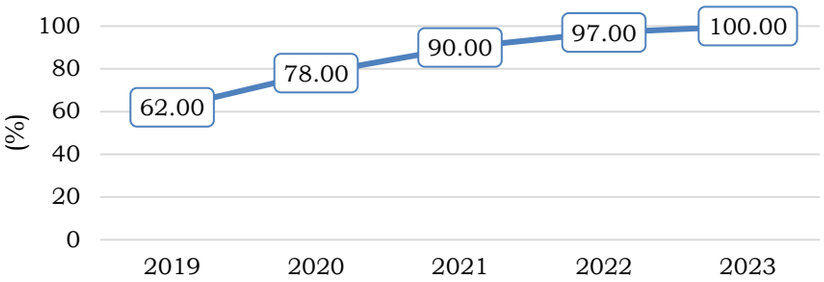
e. Lama Proses Perijinan

Sistem perijinan dan non-perijinan di Kabupaten Tangerang diatur dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Jenis perizinan dan non-perizinan diberikan berdasarkan urusan pemerintah daerah. Prosedur perizinan dan non-perizinan terdiri dari verifikasi, permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, serta pemberian keputusan. Jangka waktu pelayanan DPMPTSP ditetapkan paling lama 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non-perizinan secara lengkap dan benar. Selain itu, pemohon dapat mengajukan pengaduan melalui DPMPTSP paling lambat 30 hari kerja sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sistem informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis web di Kabupaten Tangerang yaitu “SIPINTER”.

13) Kepemudaan dan Olahraga

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

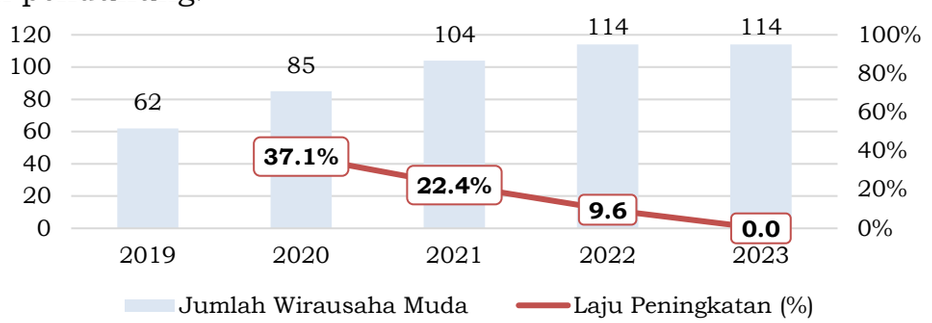
Organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 2019-2023 dan telah mencapai 100%. Pada tiap-tiap tahunnya, seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang aktif menjalankan kegiatan masing-masing. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan kualitas pemuda di wilayah ini.



Gambar 2.232
Jumlah Organisasi Kepemudaan Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2024

b. Wirausaha Muda

Wirausahawan muda di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan daya saing pemuda di wilayah ini. Perkembangan wirausahawan muda perlu didukung dengan adanya berbagai kegiatan pendukung.

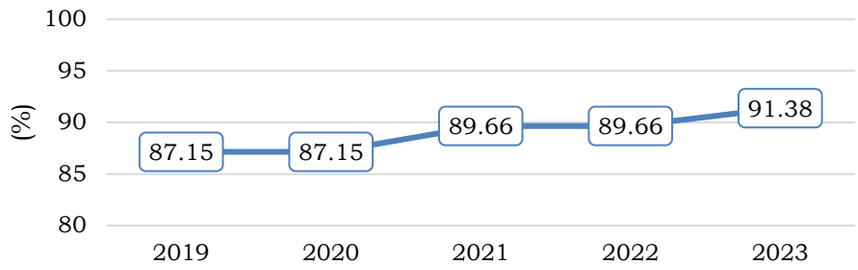


Gambar 2.233
Jumlah Wirausahawan Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2024

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan dari kurun waktu 2019-2023. Peningkatan pembinaan olahraga ini menunjukkan bertambahnya jenis olahraga yang

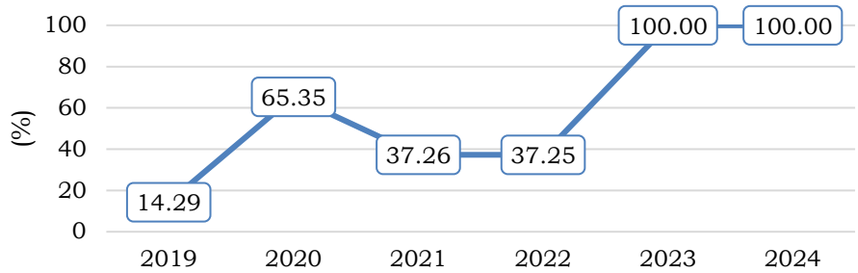
dibina dan dikembangkan di wilayah Kabupaten Tangerang. Sayangnya jumlah ini cenderung belum optimal dan masih terdapat beberapa jenis olahraga yang belum dibina.



Gambar 2.234
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2024

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

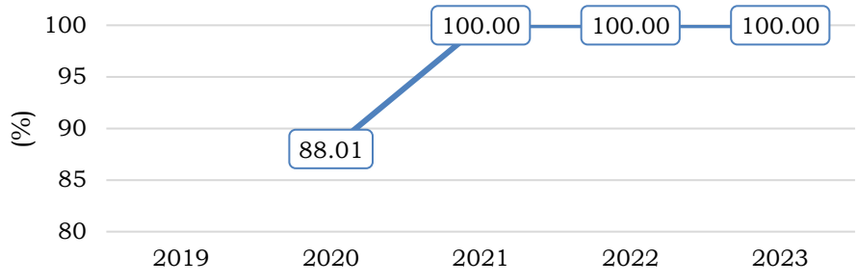
Sertifikasi pelatih menjadi salah satu indikator kinerja pelatih olahraga. Cakupan pelatih bersertifikasi mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun sebelumnya cakupan pelatih bersertifikasi tergolong rendah. Di tahun 2023 dan 2024, cakupan pelatihan yang bersertifikasi telah mencapai 100%.



Gambar 2.235
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Tangerang 2019-2024
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2025

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

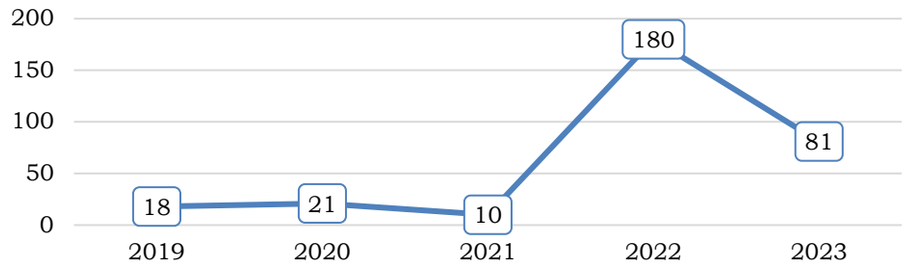
Atlet muda merupakan salah satu aset daerah yang harus dibina dan dilatih. Cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2023 dan telah mencapai 100%. Hal ini perlu dipertahankan untuk membentuk atlet yang berkualitas.



Gambar 2.236
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2024

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi merupakan atlet daerah yang mampu meraih prestasi di berbagai ajang. Tahun 2022 menjadi tahun dengan atlet berprestasi terbesar yakni terdapat 180 atlet berprestasi. Pada tahun 2023 jumlah atlet berprestasi menurun menjadi 81. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kualitas atlet dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

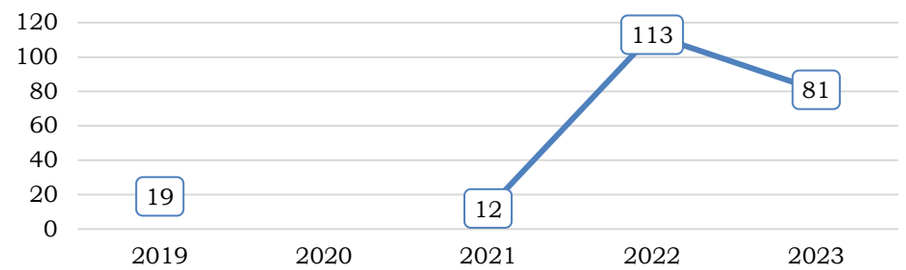


Gambar 2.237
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi bidang olahraga erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Semakin tinggi prestasi olahraga, semakin sejahtera bangsa itu, demikian pula sebaliknya. Semakin banyak atlet berprestasi menunjukkan berhasilnya pembinaan atlet yang telah dilakukan.

Berdasarkan data dari bidang Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2019 Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 19 prestasi olahraga. Jumlah ini sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 12 prestasi. Seiring dengan tren jumlah atlet berprestasi, jumlah prestasi olahraga Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023.



Gambar 2.238
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

14) Statistik

a. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sistem data dan statistik yang terintegrasi dalam Kabupaten Tangerang sudah tersedia dari tahun 2022. Sistem data ini berupa Portal Satu Data Kabupaten Tangerang yang dapat diakses melalui internet. Sistem data yang tersedia dapat menghasilkan informasi yang terintegrasi dengan cepat dan tepat, baik dengan antar OPD maupun masyarakat.

b. Buku “Kabupaten Dalam Angka”

Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan buku Kabupaten Dalam Angka yang merupakan hasil kerja sama dari BPS Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Publikasi buku ini dilakukan secara rutin untuk menyampaikan perkembangan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang.

c. Buku “PDRB”

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah pendataan statistik yang dapat mengetahui kondisi ekonomi dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan suatu daerah. PDRB diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tangerang yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selama kurun waktu tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan buku PDRB.

15) Persandian

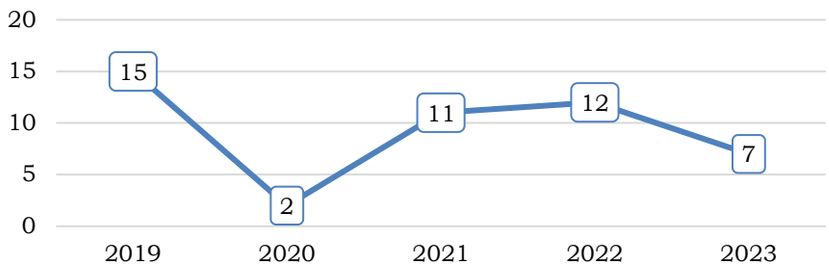
a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu tahun 2019-2024 belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam aktivitas komunikasi. Hal ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya dalam penggunaan persandian.

16) Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

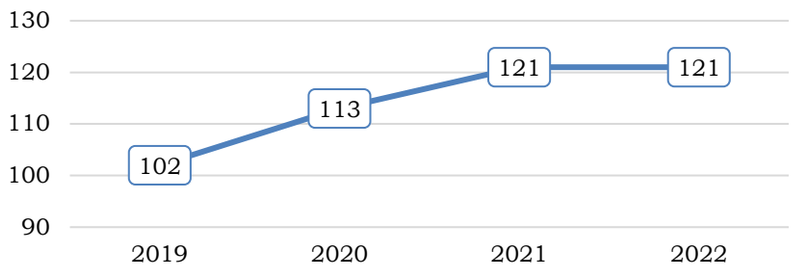
Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi karena pandemi yang semakin menurun lima tahun terakhir. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa minat pertunjukan kebudayaan pada masyarakat Kabupaten Tangerang semakin menurun tiap tahunnya.



Gambar 2.239
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

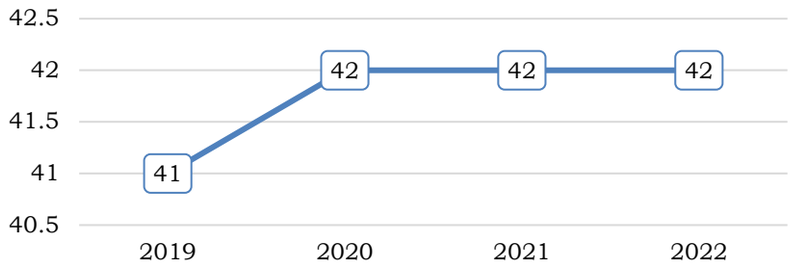
Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada Kabupaten Tangerang mengalami sedikit peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022. Hal ini mengindikasikan mulai adanya kesadaran penduduk Kabupaten Tangerang dalam menjaga warisan budaya.



Gambar 2.240
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

c. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi dan inventarisasi pada karya budaya di wilayah. Grafik di bawah ini menunjukkan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi masih belum banyak. Selama tiga tahun terakhir karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 42 karya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman budaya.

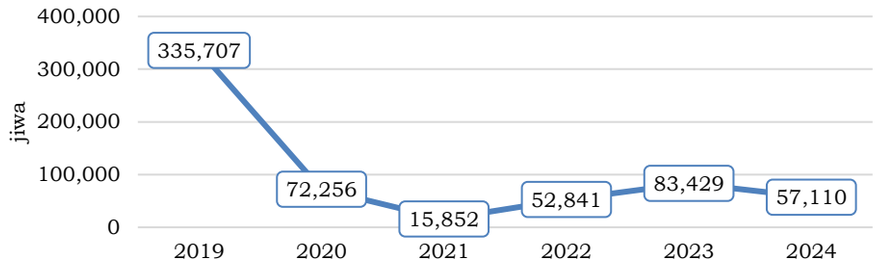


Gambar 2.241
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

17) Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

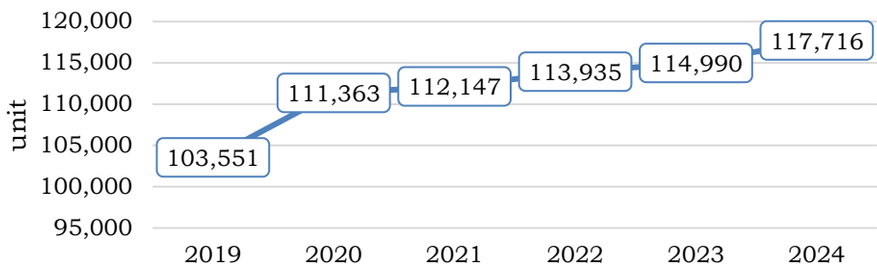
Perpustakaan merupakan salah satu ruang publik yang bertujuan sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan sekarang mulai tergeser. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan pada kurun waktu 2020-2021 dan 2023-2024. Meskipun demikian pada tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut masih jauh dari jumlah normal pada kondisi sebelum pandemi.



Gambar 2.241
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2025

b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Sebagai sumber pengetahuan, perpustakaan menyediakan berbagai sumber wawasan salah satunya adalah buku. Jumlah buku yang tersedia di Kabupaten Tangerang meningkat dari tahun 2019 ke 2024. Peningkatan jumlah buku ini merupakan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat maupun kualitas perpustakaan di Kabupaten Tangerang.

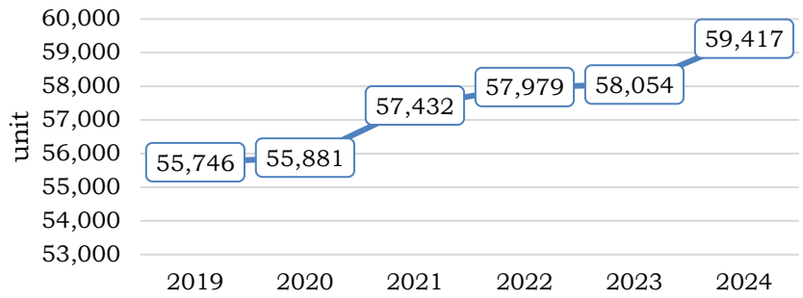


Gambar 2.242
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2025

c. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Selain jumlah buku yang terus bertambah, koleksi judul buku di perpustakaan juga mengalami peningkatan. Koleksi judul buku pada tahun 2024 mencapai 59.417 judul atau jumlah terbesar pada kurun waktu 6 tahun

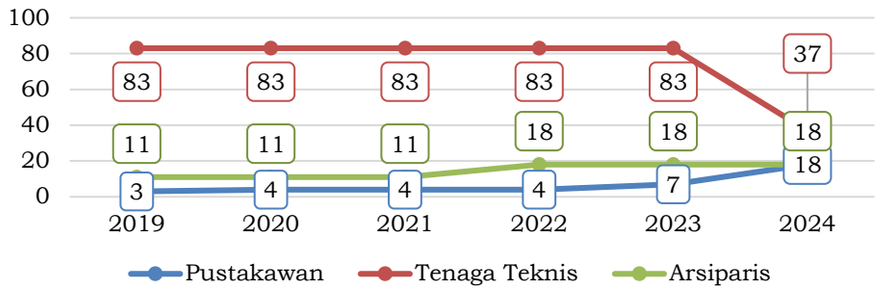
terakhir. Beragamnya judul buku di perpustakaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik di tiap perpustakaan.



Gambar 2.243
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2025

d. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Tenaga yang bekerja di perpustakaan menjadi salah satu indikator kualitas perpustakaan. Selama tahun 2024 terdapat 18 orang pustakawan, dengan 37 tenaga teknis. Arsiparis di wilayah Kabupaten Tangerang juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 18 orang arsiparis yang sebelumnya hanya 7 orang.

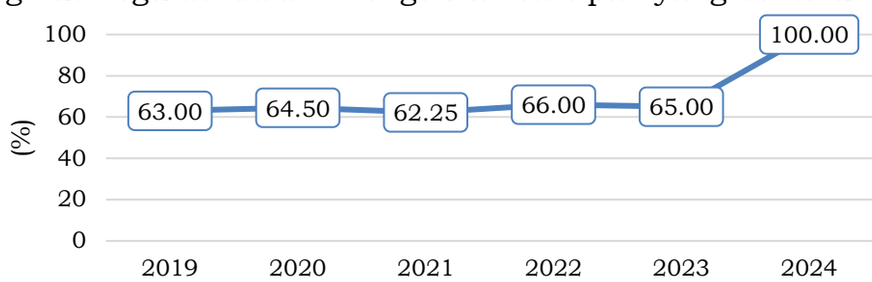


Gambar 2.244
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Arsiparis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2025

18) Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah mengelola arsip secara baku di Kabupaten Tangerang cenderung sedikit meningkat dalam kurun waktu 2019-2024, dan telah mencapai 100% di tahun 2024. Peningkatan jumlah ini mengindikasikan bahwa beberapa perangkat daerah Kabupaten Tangerang telah mengikuti regulasi dalam mengelola kearsipan yang berlaku.



Gambar 2.245
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Renstra Disperpusip Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

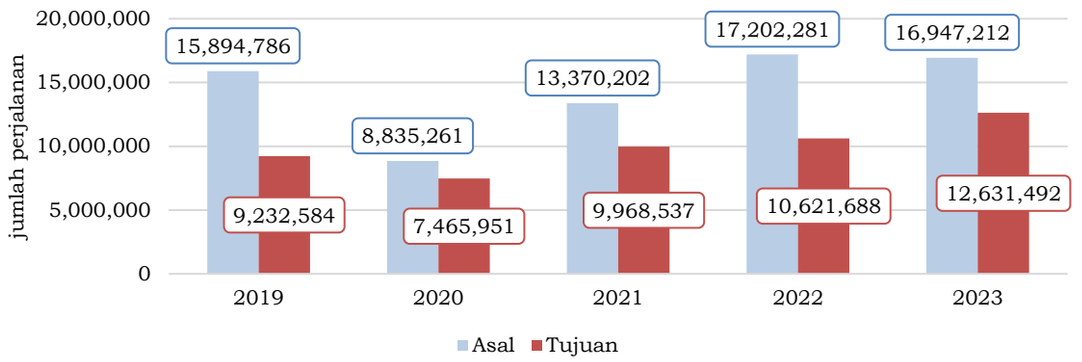
SDM dalam mengelola kearsipan bertanggung jawab untuk menata arsip data-data administrasi dan birokrasi. Dengan adanya SDM yang kompeten, kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang meningkatkan SDM pengelola kearsipan dengan mengadakan satu kegiatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang mendukung peningkatan kualitas SDM pengelolaan kearsipan.

C) Fokus Layanan Urusan Pilihan

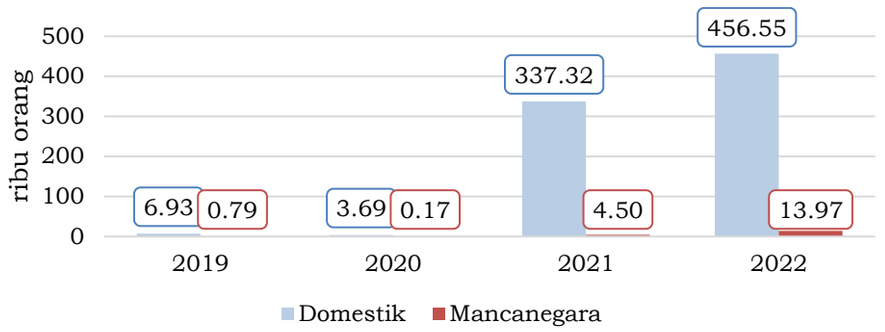
1) Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 29,58 juta perjalanan dengan 57,3% di antaranya merupakan perjalanan asal Kabupaten Tangerang. Tren menunjukkan penurunan drastis jumlah perjalanan pada pandemi (2020-2021) dan meningkat kembali hingga tahun 2023. Selain itu, tren menunjukkan jumlah perjalanan asal Kabupaten Tangerang ke luar wilayah lain lebih tinggi dibandingkan perjalanan dengan tujuan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.246
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Domestik) Asal dan Tujuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023
Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah (2024)



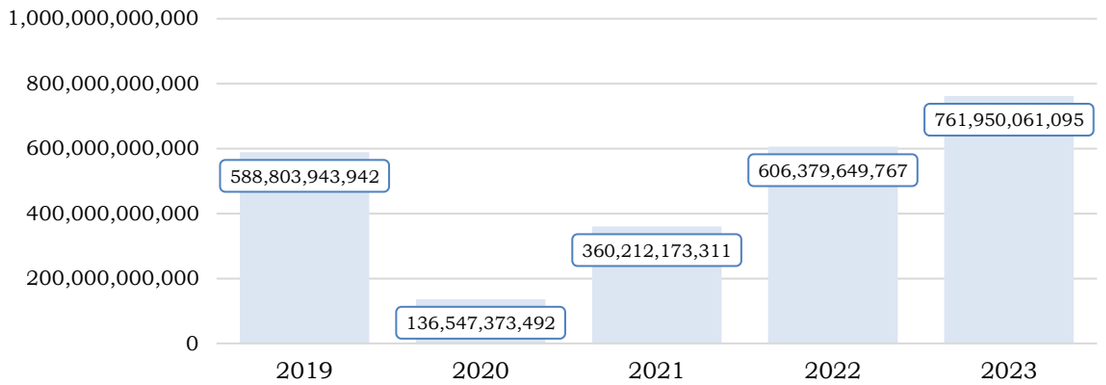
Gambar 2.247
Jumlah Tamu (Domestik dan Mancanegara) pada Usaha Akomodasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan grafik di atas dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah tamu domestik dan mancanegara pada usaha akomodasi di Kabupaten Tangerang. Peningkatan drastis pada tahun 2021-2022 menunjukkan sektor pariwisata Kabupaten Tangerang kembali bangkit setelah pandemi. Namun, pada kurun waktu 2016-2018 jumlah tamu pada usaha akomodasi mencapai 450 – 550 ribu pengunjung. Selain itu, data dari BPS Provinsi Banten (2024) menunjukkan bahwa rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Kabupaten Tangerang yaitu 1,67 hari. Maka dari

itu diperlukan arahan strategis dalam meningkatkan daya tarik wisata alam dan sektor MICE (*Meetings, Incentives, Conferences*, dan *Exhibitions*) di yang diharapkan dapat meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

b. PAD Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkembang pesat dan terukur melalui PAD sektor pariwisata. PAD sektor pariwisata dihitung berdasarkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. PAD pariwisata mengalami penurunan signifikan sebesar -46,22% pada tahun 2019-2020 karena pandemi covid. Akan tetapi dapat meningkat sebesar +28,37% pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2023, PAD sektor pariwisata Kabupaten Tangerang sebesar Rp 761.95 miliar. Kontribusi terbesar adalah pajak restoran sebesar Rp 515,40 juta atau 67,64% dari total PAD pariwisata Kabupaten Tangerang. Hal ini menunjukkan adanya resiliensi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Tangerang.

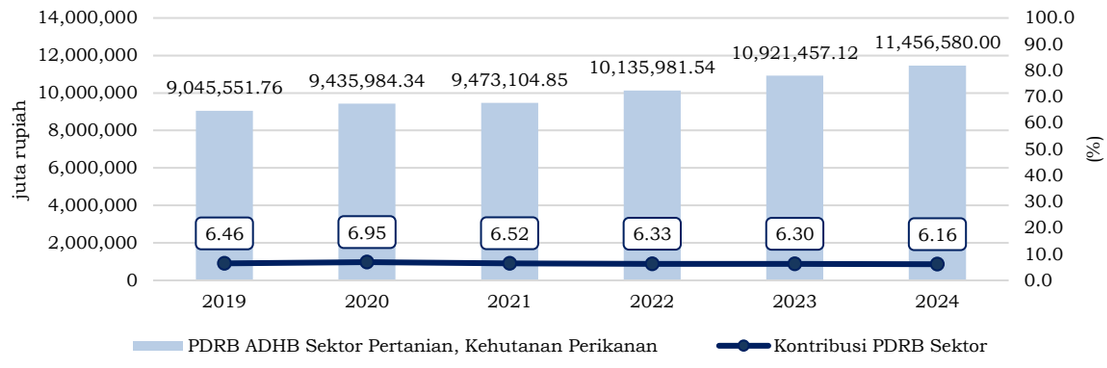


Gambar 2.248
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

2) Pertanian

a. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi berbagai wilayah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Tangerang bukan menjadi penyokong ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang relatif rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11.456,58 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 6,16% terhadap total PDRB Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.249
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2025

b. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tangerang, kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 302.614 dan angka tersebut meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 357.704. Jumlah yang meningkat ini memberikan harapan bahwa kelompok petani dapat mendukung sektor pertanian.

c. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya merupakan nilai produksi rata-rata persatuan luas per komoditas tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada periode satu tahun. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2019-2024. Tercatat pada tahun 2019, produktivitas mencapai 48,05 kuintal/ha dan meningkat menjadi 51,17 kuintal/ha pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan bahwa produktivitas pertanian pangan di Kabupaten Tangerang semakin meningkat dan dapat berkelanjutan mendukung kebutuhan masyarakat.

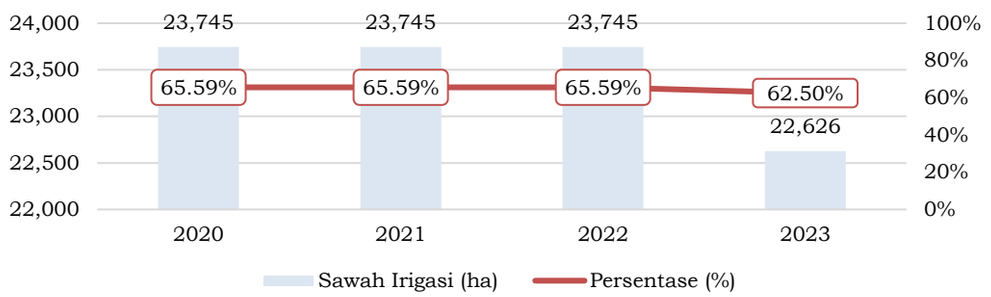
Tabel 2.41
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
48,05 Ku	48,37 Ku	48,85 Ku	49,24 Ku	49,00 Ku	51,17 Ku

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2025

d. Cakupan Layanan Irigasi pada Lahan Pertanian

Infrastruktur irigasi berperan penting dalam menjamin ketersediaan air dalam periode tanam di lahan pertanian untuk mendorong produktivitas hasil pertanian. Dengan adanya irigasi juga memungkinkan tanaman pertanian untuk ditanam tanpa mengikuti musim dan dengan adaptasi teknologi dalam irigasi dapat mendorong efisiensi dalam penggunaan air sehingga menekan biaya operasional. Luas dan persentase lahan pertanian dengan irigasi di Kabupaten Tangerang cenderung stagnan pada tahun 2020-2021 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 62,5%



Gambar 2.250
Luas dan Persentase Lahan Pertanian dengan Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2023
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Adapun luas lahan sawah yang dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 seluas 14.094 Ha meliputi wilayah berikut:

Tabel 2.42
Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Balaraja	3,12
2	Gunung Kaler	2.227,76
3	Jambe	19,62
4	Kemiri	1.607,04
5	Kresek	1.344,10
6	Kronjo	1.899,26
7	Legok	40,73
8	Mauk	1.751,71
9	Mekarbaru	1.634,30
10	Pakuhaji	55,29
11	Rajeg	1.129,15
12	Sepatan	19,44
13	Sepatan Timur	117,11
14	Sindang Jaya	73,17
15	Sukadiri	1.280,73
16	Sukamulya	891,47
	Total Luas	14.094

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang, 2025

Sementara itu, dari data infrastruktur untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi, masih terdapat daerah irigasi dengan kondisi rusak. Berikut kondisi daerah irigasi kecil di Kabupaten Tangerang tahun 2024.

Tabel 2.43
Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No	Nama Daerah Irigasi	Keterangan	Kondisi	Kecamatan	Desa
1	DI GUNUNG KALER 1	Terbangun Tahun 2022	Rusak Sedang	Gunung Kaler	Cibetok, Tamiang,
2	DI GUNUNG KALER 2	Terbangun Tahun 2022	Rusak Sedang	Gunung Kaler	Sidoko, Cipaeh, Kedung, Ranca Gede,Tamiang
3	DI GUNUNG KALER 3	Terbangun Tahun 2022	Rusak Sedang	Gunung Kaler	Kedung, Gunung Kaler, Onyam, Kandawati
4	DI KRONJO 1	Terbangun Tahun 2022	Rusak Sedang	Kronjo	Bakung, Pasir, Cirumpak, Rancailat, Blukbuk
5	DI KRONJO 2	Terbangun Tahun 2022	Rusak Sedang	Kronjo	Blukbuk, Pagenjahan, Pagedangan Udik, Bakung
6	DI KRONJO 3	Terbangun Tahun 2022	Rusak Sedang	Kronjo	Kronjo, Klutuk, Pasilian, Pagenjahan
7	DI MAUK 1	Terbangun Tahun 2020	Rusak Sedang	Mauk	Jati Waringin, Kedung Dalam, Lembang Sari, Gunung Sari
8	DI MAUK 2	Terbangun Tahun 2021	Rusak Sedang	Mauk	Margamulya, Tegalkunir Lor, Tegalkunir Kidul, Jatiwaringin
9	DI MEKARBARU 1	Terbangun Tahun 2022	Rusak Sedang	Mekarbaru	Kedaung, Cijeruk, Jenggot
10	DI MEKARBARU 2	Terbangun Tahun 2022	Rusak Sedang	Mekarbaru	Jenggot, Mekarbaru, Waliwis, Kosambi Dalam, Gandaria
11	DI RAJEG 1	Terbangun Tahun 2021	Tidak Berfungsi	Rajeg	Lembang Sari, Ranca Bango, Rajeg, Pangarengan
12	DI RAJEG 2	Terbangun Tahun 2021	Tidak Berfungsi	Rajeg	Pangarengan, Daon, Jambu Karya, Sukamanah, Sukatani
13	DI SUKADIRI 1	Terbangun Tahun 2021	Rusak Sedang	Sukadiri	Pekayon, Buaran Jati, Gintung, Kosambi

No	Nama Daerah Irigasi	Keterangan	Kondisi	Kecamatan	Desa
14	DI SUKADIRI 2	Terbangun Tahun 2021	Rusak Sedang	Sukadiri	Gintung, Sukadiri, Buaran Mangga, Rawa Kidang, Mekar Kondang
15	DI KEMIRI 1	Konstruksi 2024	Baik	Kemiri	Lontar, Karanganyar, Patramanggala
16	DI KEMIRI 2	Konstruksi 2024	Baik	Kemiri	Kemiri, Ranca Labuh, Klebet
17	DI KEMIRI 3	Konstruksi 2024	Baik	Kemiri	Klebet, Karanganyar, Patramanggala
18	DI KRESEK 1	Konstruksi 2024	Baik	Kresek	Jengkol, Rengat, Patrasana,Koper, Pasir Ampo
19	DI SUKAMULYA 2	Konstruksi 2024	Belum Terbangun	Sukamulya	Buni Ayu, Benda, Bunar, Merak
20	DI SUKAMULYA 1	Konstruksi 2024	Baik	Sukamulya	Benda, Kali Asin, Merak, Perahu, Sukamulya, Kubang
21	DI KRESEK 2	DED 2024	Belum Terbangun	Kresek	Rancailat, Kemuning, Jengkol, Blukbuk
22	DI KRESEK 3	DED 2024	Belum Terbangun	Kresek	Jengkol, Talok, Rengat

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan kondisi tersebut, telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan pada jaringan irigasi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2) sebagai berikut.

Tabel 2.44
Usulan Penanganan pada Jaringan Irigasi Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2) Kementerian Pekerjaan Umum

No	Nama Saluran	Panjang (Km)	Kewenangan	Usulan Penanganan	Kondisi
1	Saluran Induk Cisadane Barat	23,319	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
2	Saluran Induk Cisadane Barat Laut	13,829	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
3	Saluran Induk Cisadane Utara	12,059	BBWS C2	Normalisasi Saluran, Perbaikan Tanggul Saluran	Rusak Berat
4	Saluran Induk Garukgak	1,553	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
5	Saluran Sekunder Banyawakan	3,658	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
6	Saluran Sekunder Belimbing	8,454	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
7	Saluran Sekunder Bugel	3,701	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
8	Saluran Sekunder Karang Serang Laut	6,913	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
9	Saluran Sekunder Kedaung	14,682	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
10	Saluran Sekunder Kendal	2,058	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
11	Saluran Sekunder Kepuh	4,628	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
12	Saluran Sekunder Keramat	1,989	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
13	Saluran Sekunder Mauk	7,627	BBWS C2	Normalisasi Saluran, Perbaikan Tanggul Saluran, Perbaikan Pintu Air	Rusak Berat
14	Saluran Sekunder Nibung	4,491	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
15	Saluran Sekunder Pabuaran	3,908	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
16	Saluran Sekunder Pagedangan	8,023	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang

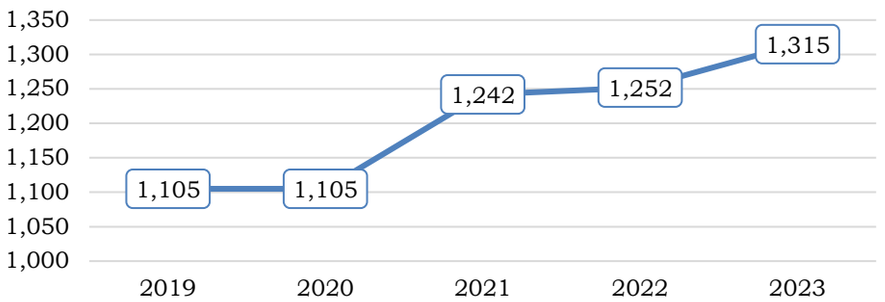
No	Nama Saluran	Panjang (Km)	Kewenangan	Usulan Penanganan	Kondisi
17	Saluran Sekunder Pekayon	1,261	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
18	Saluran Sekunder Pisangan	8,876	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
19	Saluran Sekunder Plawad	1,128	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
20	Saluran Sekunder Rawa Kalem	1,481	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
21	Saluran Sekunder Rawa Kidang	5,730	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
22	Saluran Sekunder Sukadiri	1,128	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
23	Saluran Sekunder Sumur Daon	3,689	BBWS C2	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
24	Saluran Induk Cidurian	27,387	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
25	Saluran Sekuder Semut	1,441	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
26	Saluran Sekunder Bakung	1,354	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
27	Saluran Sekunder Benda	2,572	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
28	Saluran Sekunder Cayur	1,307	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
29	Saluran Sekunder Cayur Ajeg	1,889	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
30	Saluran Sekunder Cinamprak	0,968	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
31	Saluran Sekunder Gabus	1,988	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
32	Saluran Sekunder Garukgak	9,352	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
33	Saluran Sekunder Glebeg	3,198	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
34	Saluran Sekunder Karang Getak	0,879	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
35	Saluran Sekunder Ketapang Barat	0,621	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
36	Saluran Sekunder Ketapang Timur	0,962	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
37	Saluran Sekunder Klutuk	1,028	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
38	Saluran Sekunder Koper	7,515	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
39	Saluran Sekunder Kosambi Dalam	2,390	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
40	Saluran Sekunder Kramat	5,248	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
41	Saluran Sekunder Kubang	1,924	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
42	Saluran Sekunder Kwaron	3,242	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
43	Saluran Sekunder Leweung Gede	13,608	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
44	Saluran Sekunder Malang Nengah	6,658	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
45	Saluran Sekunder Merak	7,979	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
46	Saluran Sekunder Pasir	2,912	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
47	Saluran Sekunder Patrasana	10,071	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
48	Saluran Sekunder Putat	2,502	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
49	Saluran Sekunder Ranca Bango	1,203	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
50	Saluran Sekunder Rarangan	1,954	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang

No	Nama Saluran	Panjang (Km)	Kewenangan	Usulan Penanganan	Kondisi
51	Saluran Sekunder Ringleding	7,984	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
52	Saluran Sekunder Saga	3,885	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
53	Saluran Sekunder Sarakan	0,951	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang
54	Saluran Sekunder Talok	2,549	BBWS C3	Normalisasi Saluran	Rusak Sedang

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang, 2025

e. Cakupan Bina Kelompok Petani

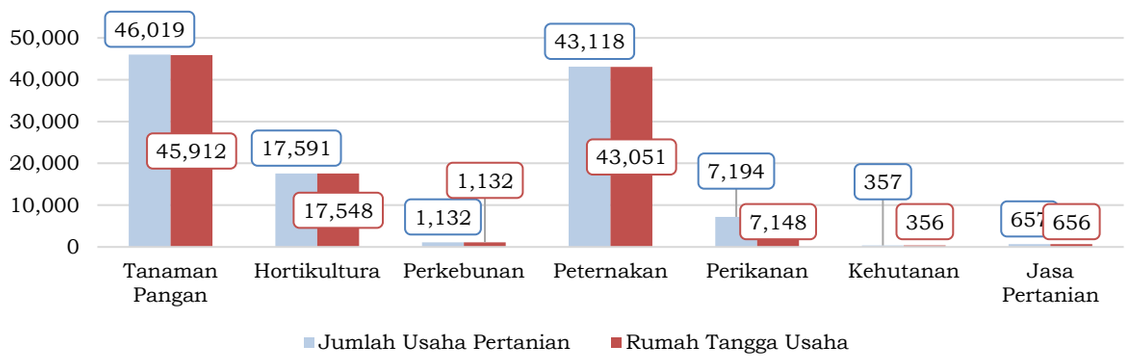
Kelompok Petani merupakan perkumpulan yang dikembangkan dari dan untuk petani dengan tujuan untuk memperkuat kepentingan petani. Cakupan bina kelompok tani pada Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2019-2023. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak jenis kelompok tani yang terbina maka semakin meningkat kesejahteraan petani di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.251
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2024

f. Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian

Berdasarkan Sensus Pertanian BPS (2024), Jumlah Usaha Pertanian adalah banyaknya unit usaha pertanian yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya. Sementara itu, Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang memelihara / menguasai / melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ ditukar.



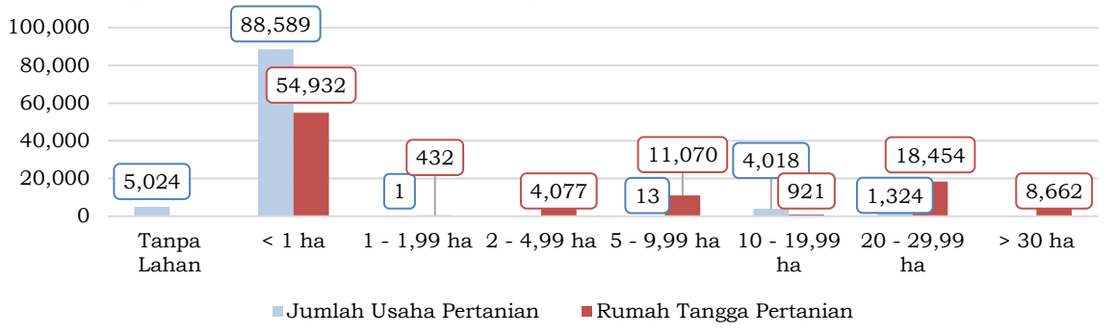
Gambar 2.252
Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

Pada tahun 2023, Jumlah Unit Usaha Pertanian di Kabupaten Tangerang mencapai 99.008 unit usaha, 99,93% (98.936 unit) di antaranya merupakan Usaha Pertanian Perorangan. Jumlah unit usaha pertanian perorangan paling banyak terdapat di Kecamatan Sindang Jaya yaitu 8,89%

(8.798 unit) dari keseluruhan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Tangerang sebesar 98.548 rumah tangga. Subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan merupakan sub sektor yang paling dominan dan/atau terbanyak dibandingkan sub sektor lainnya.

g. Penguasaan Lahan Pertanian

Penguasaan lahan pertanian berpengaruh kepada kesejahteraan petani. Pentingnya penguasaan lahan bagi petani adalah pengaruhnya pada sistem bagi hasil, hak untuk berusaha petani, sumber daya lahan yang terbatas, dan tingkat pendapatan petani. Dampak lebih jauh jika penguasaan lahan petani yang sangat rendah berpengaruh pada kemiskinan struktural di suatu wilayah (Halim & Faisal, 2022)[4].



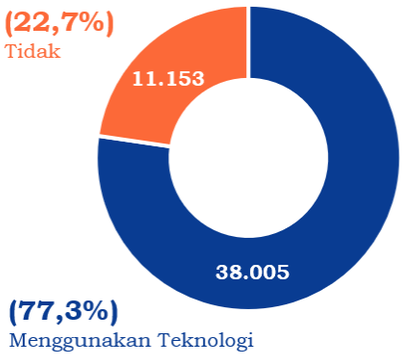
Gambar 2.253
Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Pertanian Menurut Menurut Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

Pada tahun 2023, jumlah petani gurem di Kabupaten Tangerang yaitu 78.464 atau 85,25% dari keseluruhan petani pengguna lahan pertanian. Berdasarkan grafik di atas, penguasaan lahan pertanian didominasi oleh lahan < 1 ha dengan jumlah usaha pertanian sebesar 94,59% dan rumah tangga pertanian sebesar 55,74%. Berdasarkan sub sektor pertanian, sub sektor dengan jumlah dan persentase petani gurem terbesar adalah sub sektor peternakan yaitu sebesar 40.619 petani atau 94,8% dari keseluruhan petani pengguna lahan sub sektor peternakan. Selain itu, persentase pertani gurem terbesar di sektor hortikultura (93,4%) dan perkebunan (87,2%).

h. Petani Milenial dan *Urban Farming*

Petani milenial merupakan penduduk berumur 19-39 tahun yang melalukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, dan/atau melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital dan/atau alat mesin pertanian (alsintan) modern.

[4] Halim, A., & Faisal, M. (2022). Analisis hubungan penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap. *Pallangga Praja*, *4*(1), 11-22.



Rincian Petani Milenial Berdasarkan Gender dan Kelompok Umur (2023)

	Laki-laki	Perempuan
Menggunakan teknologi	34.386	3.619
< 19 tahun	5	0
19-39 tahun	5.291	236
39+ tahun	29.090	3.383
Tidak menggunakan teknologi	10.594	559
Jumlah Petani Milenial	**44.980**	**4.178**

Gambar 2.254
Jumlah Petani Milenial di Kabupaten Tangerang Tahun 2023
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

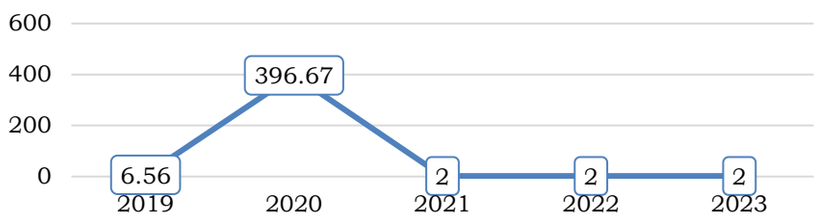
Berdasarkan diagram di atas, petani milenial di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 49.158 petani dan 77,3% di antaranya menggunakan teknologi digital dan alat pertanian modern. Dukungan penyediaan dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur pertanian diperlukan untuk mendorong produktivitas pertanian dan regenerasi petani/

Urban Farming adalah kegiatan mengusahakan pertanian di lahan yang terbatas, sebagian besar menggunakan media tanam, tidak di permukaan lahan secara langsung atau menggunakan pot dan sejenisnya, serta menggunakan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertikulture, media terpal, dan sejenisnya. Berdasarkan data dari Sensus Pertanian BPS Kabupaten Tangerang (2023), terdapat 118 Usaha Pertanian Perorangan dan 117 Rumah Tangga Usaha Pertanian dengan *Urban Farming*. Kecamatan Cikupa merupakan kecamatan dengan jumlah UPP dan RTUP terbanyak (40,7% dari total usaha *Urban Farming*).

3) Kehutanan

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Hutan dan lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang dilakukan proses rehabilitasi untuk mengembalikan ke fungsi awal. Rehabilitasi paling banyak dilakukan pada tahun 2020 yakni mencapai 396,67 Ha. Sedangkan pada tahun lain dalam kurun waktu 2019-2023, jumlah rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya dilakukan pada lahan seluas 2 Ha.



Gambar 2.255
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2024

4) Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% pada kurun waktu 2019-2022. Persentase ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik PLN, listrik Non PLN dan bukan listrik. Pada tahun 2023, persentase listrik PLN mencapai 99,76%, listrik non PLN mencapai 0,02% dan bukan listrik 0,22%. Di tahun 2024, persentase rumah tangga pengguna listrik PLN telah mencapai 100%. Persentase ini

mengindikasikan bahwa energi listrik yang dibutuhkan masyarakat sudah bisa ditanggung oleh PLN.

Tabel 2.45
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

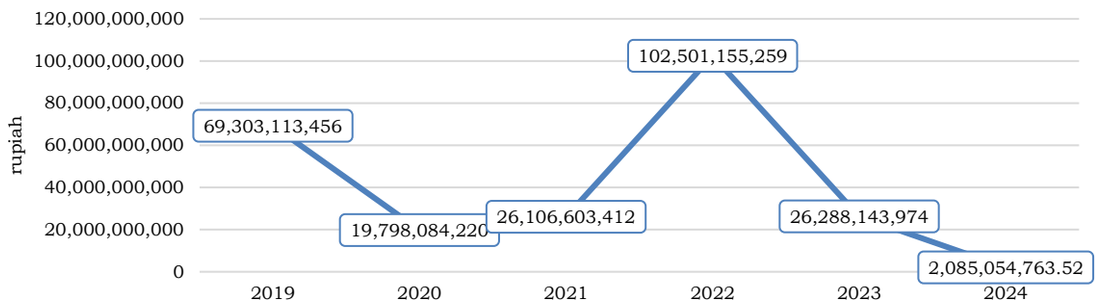
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik						
Jenis Listrik	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Listrik PLN	99,84%	99,23%	99,96%	99,94%	99,76%	100%
Listrik Non-PLN	0,16%	0,77%	0,04%	0,06%	0,02%	0
Bukan Listrik	0	0	0	0	0,22%	0

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

5) Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

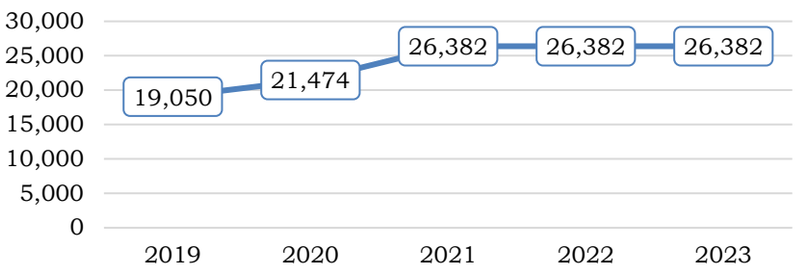
Ekspor bersih adalah nilai total barang dan jasa ekspor suatu wilayah dikurangi nilai semua barang dan jasa yang diimpor. Nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 2019-2024. Nilai ekspor bersih Kabupaten Tangerang cenderung tinggi yang menunjukkan kuatnya nilai ekspor dan perkembangan perdagangan wilayah Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.256
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang/usaha informal. Pada 2019-2021, cakupan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan Namun, pada tahun selanjutnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sama dengan jumlah 26.382 kelompok. Jumlah ini tergolong tinggi yang mengindikasikan cakupan pembinaan dan upaya pengembangan perdagangan yang semakin meningkat dan merata.

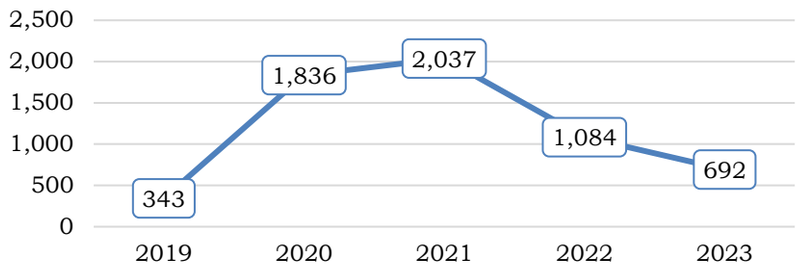


Gambar 2.257
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

6) Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

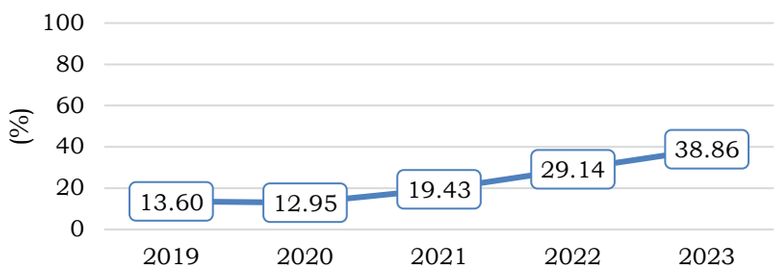
Kabupaten Tangerang memiliki cakupan bina kelompok pengrajin yang berfluktuatif. Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2016 mencapai 343 perajin. Angka ini meningkat pesat ketika pandemi pada tahun 2020 menjadi 1.836 pengrajin dan 2.037 pengrajin pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022, cakupan tersebut menurun menjadi 1.084 pengrajin dan 692 pengrajin pada tahun 2023. Fluktuasi ini menandakan bahwa program untuk mendukung pengrajin Kabupaten Tangerang masih belum optimal.



Gambar 2.258
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

b. Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor

Pelaku usaha Industri Kecil-Menengah (IKM) yang memiliki kapasitas untuk ekspor menunjukkan daya saing dan inovasi produk di pasar internasional. Dalam lima tahun terakhir, beberapa IKM binaan pemerintah melakukan ekspor ke berbagai negara hingga Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Pada tahun 2021, 42 produk UMKM mengikuti *World Expo* Dubai 2021 serta 21 UMKM/IKM diikutsertakan dalam Indonesia *Trade Promotion Center* di Korea Selatan. Pada tahun 2023, ribuan produk makanan IKM di ekspor ke Taiwan. Pada awal tahun 2024, IKM binaan melalukan ekspor produk sepatu *dox* (4.044 pasang sepatu) ke Senegal.



Gambar 2.259
Persentase Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan grafik di atas, tren dalam lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan peningkatan pelaku IKM yang berpeluang ekspor. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mengakselerasi kapasitas pelaku IKM untuk mengakses pasar ekspor melalui kemitraan inovasi produk, permodalan, manajemen bisnis usaha, promosi, dan lain sebagainya.

7) Transmigrasi

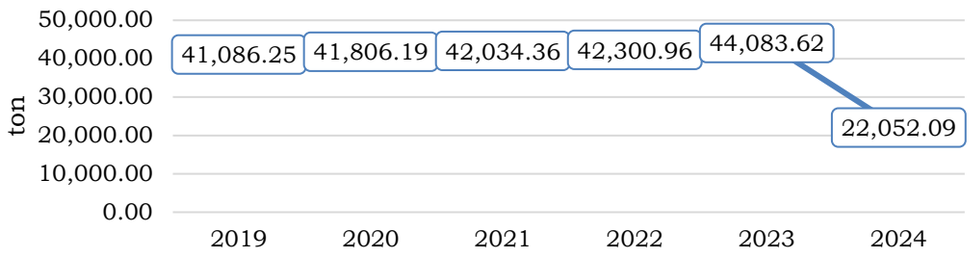
c. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi swakarsa merupakan pemberangkatan transmigrasi atas biaya sendiri di Kabupaten Tangerang tidak ada transmigrasi swakarsa, adapun Dinas Tenaga Kerja melakukan transmigrasi swakarya yaitu seleksi terhadap calon transmigran yang dibiayai oleh APBD.

8) Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan seluruh hasil kegiatan yang didapatkan dan diolah dari penangkapan dan budidaya ikan/binatang air yang dilakukan pada air tawar dan air laut. Jumlah produksi perikanan didapatkan dari perorangan maupun usaha perikanan. Produksi perikanan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, produksi perikanan mencapai 41.068,25 ton dan pada tahun 2024 mencapai 22.052,09 ton.



Gambar 2.260
Produksi Perikanan (Ton) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2023 dan 2025

Kabupaten Tangerang memiliki produksi perikanan yang terbagi menjadi dua, yaitu penangkapan dan budidaya. Pada produksi perikanan penangkapan, sumber yang memiliki kontribusi tinggi yaitu perikanan tangkap di laut dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024 yaitu 21,962.18 ton. Sedangkan pada jenis perikanan budidaya, sumber yang memiliki kontribusi tertinggi di Kabupaten Tangerang yaitu Tambak yang mencapai angka tertinggi 10,942 ton pada tahun 2024.

Tabel 2.46
Proporsi Produksi Perikanan (Ton) Berdasarkan Jenis Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

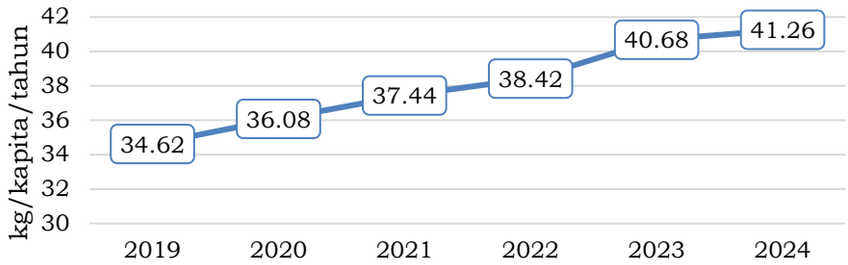
Produksi Perikanan						
Jenis Perikanan	Produksi (Ton)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penangkapan	20.798,49	21.023,71	21.063,25	21.148,45	21.920,57	22,052.09
Perikanan Tangkap di Laut	20.590,52	20.814,30	20.942,33	21.059,60	21.831,19	21,962.18
Perikanan Perairan Daratan	207,97	209,41	120,92	88,85	89,38	89.92
Rawa/Swamp	104,29	11,08	24,74	24,88	25,03	19.78
Waduk/Situ/Danau	103,68	15,99	35,34	35,54	35,75	35.97
Sungai	0	182,34	60,84	28,43	28,6	34.17
Budidaya	20.287,80	20.705,65	20.907,51	21.088,55	22.073,67	20,604
Tambak	12.137,70	11.625	11.896	11.992	12.569,12	10,942
Kolam Air Tenang	7.536,70	8.479,65	8.411,33	8.495,00	8.881,76	9.030,17
Sawah	0	0	0	0	0	
Jaring Apung Tawar	613,4	601	600,18	601,55	622,79	632.43
Budidaya Laut	0	0	0	0	0	
Total	41.086,25	41.806,19	42.034,36	42.300,96	44.083,62	42.656,09

Sumber: Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2023 dan 2025; Analisis Penyusun

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan didapatkan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga ditambahkan dengan konsumsi di luar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat selama setahun per kapita. Pada lima tahun terakhir, konsumsi ikan Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai angka 41,26 kg/kapita/tahun. Peningkatan ini dapat

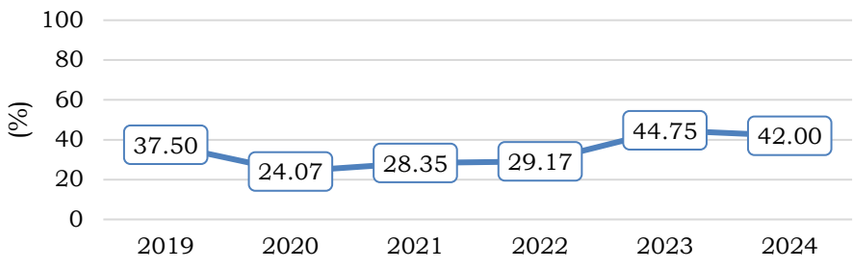
berimplikasi bahwa ikan menjadi makanan yang semakin digemari oleh masyarakat.



Gambar 2.261
Konsumsi Ikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2025

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

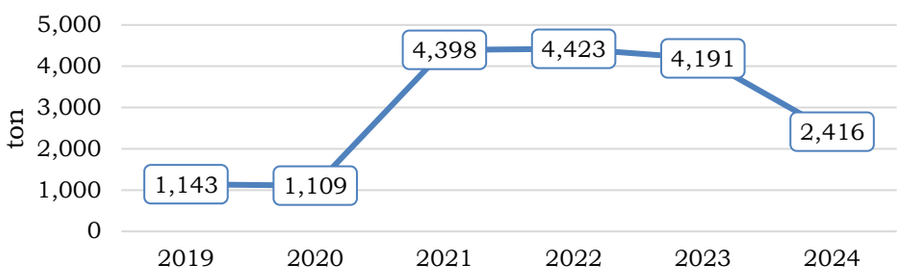
Cakupan bina kelompok nelayan pada Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun 2019-2023. Hal ini dapat berimplikasi bahwa upaya pembinaan yang dilakukan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2023, angka tersebut meningkat drastis hingga 44,75% yang menandakan bahwa upaya kesejahteraan nelayan juga sangat meningkat. Selain itu, pada tahun 2023-2024 hanya ada 1 nelayan (dari 4270 nelayan) yang mendapatkan bantuan permodalan. Di tahun 2024, capaian kembali menurun menjadi 42%. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui pengadaan sarana-prasarana serta pendanaan dalam rangka mengakselerasi produktivitas perikanan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.262
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2025

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

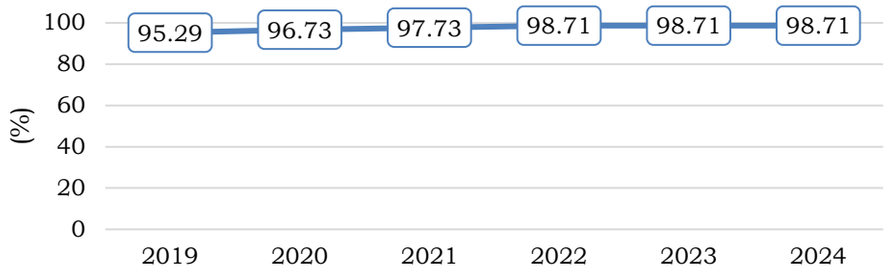
Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan jumlah produksi ikan/binatang air yang dihasilkan oleh kelompok nelayan dalam kurun waktu tertentu. Di Kabupaten Tangerang, terdapat lonjakan yang tinggi dari tahun 2020 yang hanya 1.109 ton menjadi 4.398 ton pada tahun 2021. Peningkatan ini berimplikasi bahwa kebutuhan perikanan Kabupaten Tangerang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, meskipun capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 2.416 ton.



Gambar 2.263
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2025

e. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Dalam lima tahun terakhir proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman terjadi peningkatan di Kabupaten Tangerang. Grafik ini dapat berimplikasi bahwa semakin banyak ikan yang ditangkap aman untuk dikonsumsi karena masih mencapai 98.71% dari batasan 80% tangkapan maksimum lestari Kabupaten Tangerang.

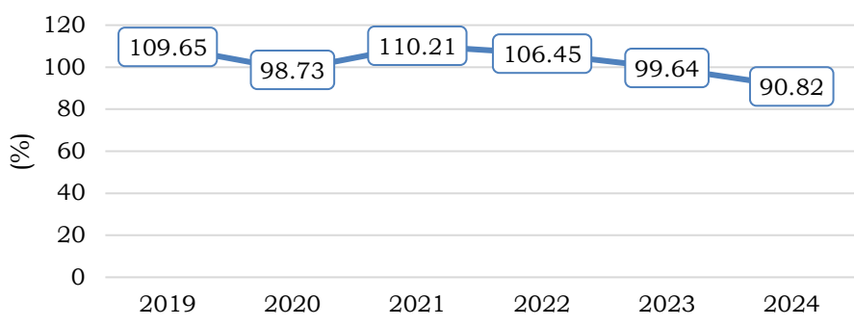


Gambar 2.264
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman
Kabupaten Tangerang 2019 - 2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2025

f. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Jika NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN = 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. Sementara itu, jika NTN <100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit.

Dalam lima tahun terakhir, nilai tukar nelayan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, 2021, dan 2022, nilai NTN lebih dari 100, dan menunjukkan kesejahteraan nelayan lebih baik. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2024 terjadi penurunan nilai NTN. Namun demikian, sektor perikanan Kabupaten Tangerang masih menjadi sumber penghasilan nelayan ke depannya.



Gambar 2.265
Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Tangerang 2019 - 2024
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2025

D) Fokus Layanan Urusan Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang layanan masyarakat. Capaian indeks meningkat di tahun 2020, tetapi terus menurun hingga tahun 2023,

sebesar 84,79. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan instansi pelayanan publik perlu kembali memaksimalkan pelayanan masyarakat.

Tabel 2.47
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat				
2019	2020	2021	2022	2023
83,66	86,36	85,95	85,18	84,79

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, 2024

2) Perencanaan Pembangunan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda

RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan jangka panjang pembangunan suatu daerah. Selama kurun waktu 2019-2023 terdapat dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam Perda dalam tiap-tiap tahunnya.

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada

Selaras dengan RPJPD, dokumen RPJMD juga menjadi salah satu instrumen perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, dalam kurun waktu 2019-2023, dalam tiap-tiap tahunnya terdapat dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam Perda/Perkada.

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada

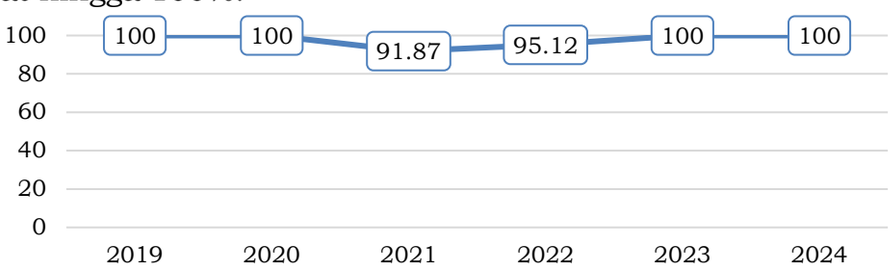
Dokumen RKPD di wilayah ini juga telah ditetapkan dengan perkada pada tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan adanya tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan daerah.

d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan Perda

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang, Kabupaten Tangerang telah memiliki dokumen RTRW yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011 – 2031.

e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

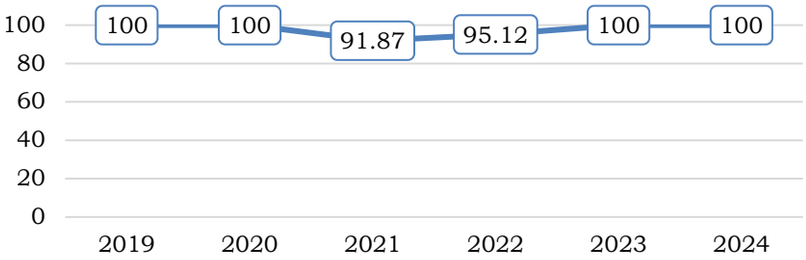
Secara umum, penjabaran konsistensi program RPJMD dalam RKPD telah terlaksana dengan baik meski mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Namun di tahun 2023 dan 2024 capaian tersebut kembali meningkat hingga 100%.



Gambar 2.266
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2025

f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Penjabaran program RKPD dalam APBD belum menunjukkan konsistensi yang baik. Pada tahun 2019 hingga 2020, program RKPD telah dijabarkan dengan baik ke dalam APBD. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan, meskipun pada tahun 2022 kembali meningkat dan kembali ke capaian 100% di tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan penjabaran konsistensi untuk dapat mewujudkan perencanaan yang baik di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.267
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2025

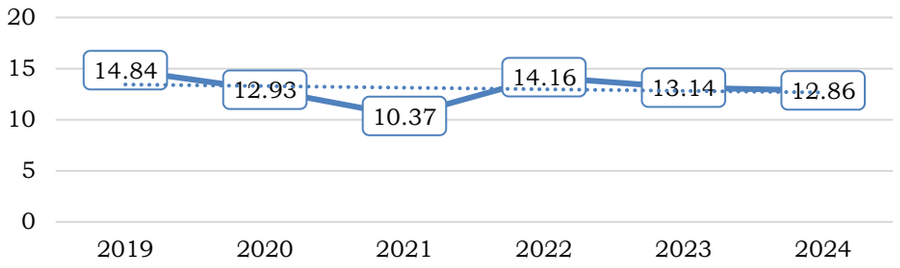
3) Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Selama 16 tahun berturut-turut, Kabupaten Tangerang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* dari BPK mengenai laporan keuangan Kabupaten Tangerang. Laporan keuangan yang telah disajikan meliputi hal-hal material, posisi keuangan daerah (neraca), laporan arus kas, laporan realisasi anggaran (LRA), serta data-data yang membersamai. Opini WTP yang didapatkan oleh Kabupaten Tangerang mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang dilakukan telah disajikan secara wajar, memadai, dan informatif.

b. Persentase SILPA

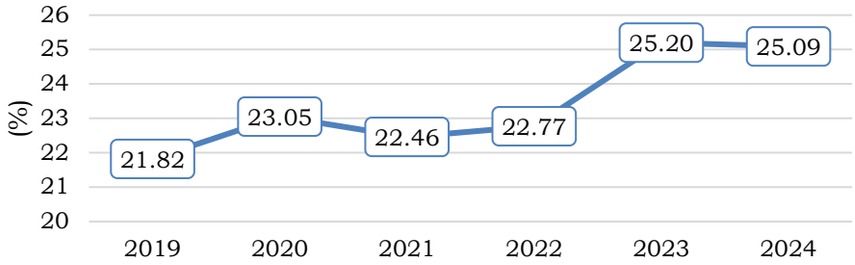
SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya mencapai angka nol, yang menandakan bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Tetapi realisasinya, SILPA terbentuk karena pelampauan target pendapatan, tidak tercapainya target realisasi belanja serta SILPA tahun sebelumnya. Pada grafik di bawah, persentase SILPA yang ada menggambarkan besaran transaksi yang berjalan di Kabupaten Tangerang. Persentase SILPA fluktuatif cenderung menurun menandakan mulai stabilnya perencanaan dan penyerapan anggaran.



Gambar 2.268
Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang 2019 - 2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

c. Persentase Belanja Pendidikan

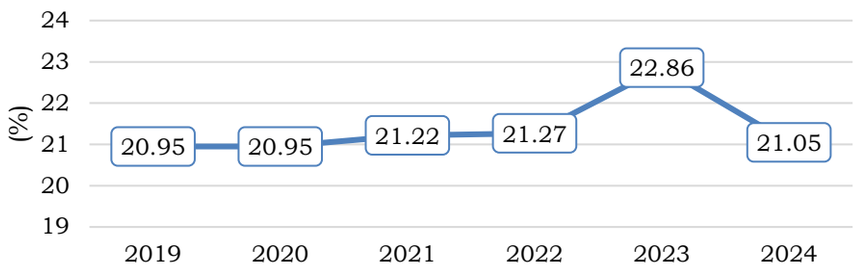
Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kabupaten Tangerang memiliki persentase belanja pendidikan yang stabil meningkat setiap tahunnya. Pada grafik di bawah, dalam tahun 2019 - 2023 persentase yang semula berada di 21,82% stabil pada tahun 2020. Lalu persentase tersebut meningkat terus hingga pada tahun 2024 mencapai 25,09%.



Gambar 2.269
Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: BPKAD2 Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

d. Persentase Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan. Kabupaten Tangerang memiliki persentase belanja kesehatan yang stabil meningkat setiap tahunnya. Pada grafik di bawah, dalam tahun 2019 - 2023 persentase yang semula berada di 20,95% stabil pada tahun 2020. Lalu persentase tersebut meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 22,86%, dan 2024 sebesar 21,06%.



Gambar 2.269
Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: BPKAD2 Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

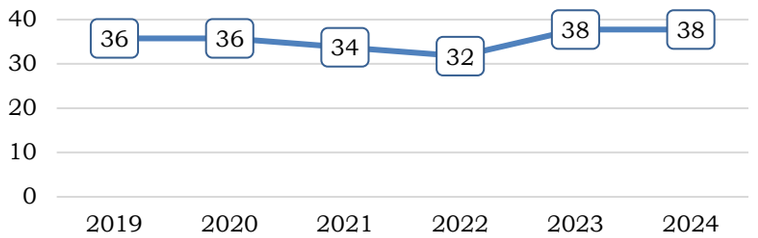
a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai di Kabupaten Tangerang mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan layanan di wilayah ini. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan mencapai lima hari. Nilai ini cenderung stagnan dalam kurun waktu 2019 - 2023.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengembangan kompetensi ASN dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan. Berdasarkan informasi dari instansi terkait, pejabat maupun ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan pelatihan formal masih relatif sedikit.

b. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

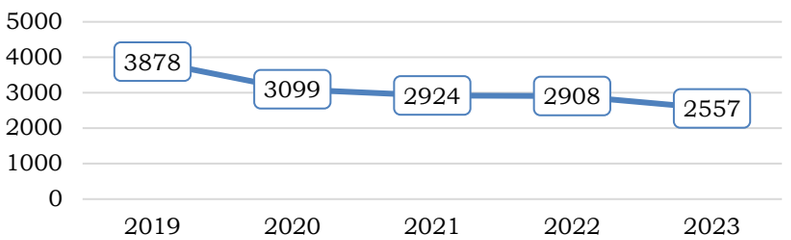
Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang cenderung sama tiap tahunnya, yakni berkisar pada jumlah 32-38 jabatan. Selanjutnya, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, yakni mencapai angka 38 jabatan.



Gambar 2.271
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2025

c. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

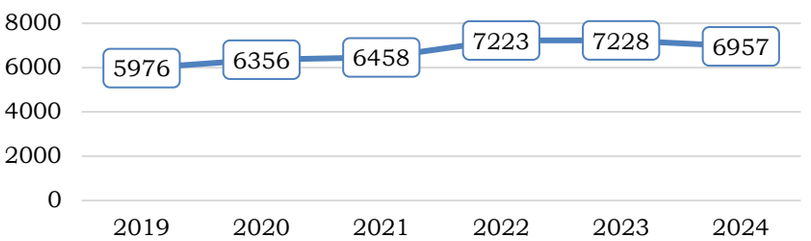
Jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2023. Pada 2023, terdapat 2557 jabatan administrasi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan jabatan administrasi yang semakin terbatas dari waktu ke waktu.



Gambar 2.270
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2024

d. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional tertentu di pemerintahan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan bertambahnya jumlah jabatan fungsional tertentu dalam pemerintahan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.271
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2025

5) Penelitian dan Pengembangan

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan hasil perbandingan antara jumlah kelitbangan (ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah) dalam

RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang mencapai persentase 100% yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang semakin baik dalam implementasi rencana kelitbangan.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan persentase realisasi program inovasi dan invensi pemerintah. Persentase ini ditentukan dengan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memanfaatkan 100% hasil kelitbangan yang menandakan bahwa Kabupaten Tangerang terus berkembang untuk menerapkan nilai praktis dan konteks keilmuan.

c. Penerapan SIDa : Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan adalah persentase hasil perbandingan antara jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang mencapai persentase 100%. Hal ini menandakan bahwa penerapan kebijakan inovasi di Kabupaten Tangerang telah semakin berkembang.

d. Jumlah Inovasi yang diimplementasikan

Jumlah inovasi daerah yang diimplementasikan merupakan banyaknya dokumen inovasi daerah yang disusun oleh seluruh perangkat daerah dan ditetapkan oleh keputusan kepala daerah. Kabupaten Tangerang memiliki peningkatan jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam lima tahun terakhir (2019-2023). Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin inovatif dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan potensi-potensi yang ada.

Tabel 2.48
Kebijakan Inovasi yang Diimplementasikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

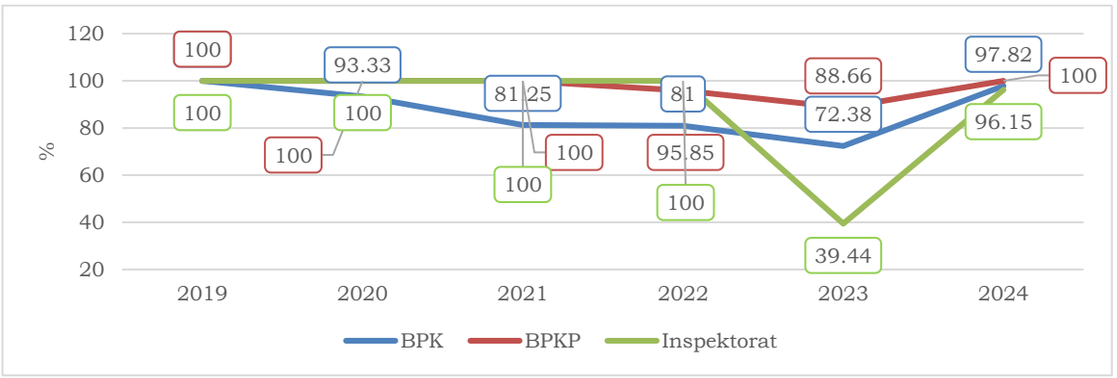
Jumlah Inovasi yang diimplementasikan				
2019	2020	2021	2022	2023
45	45	56	68	81

Sumber: SK Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang dan RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang 2019-2024

6) Pengawasan

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan

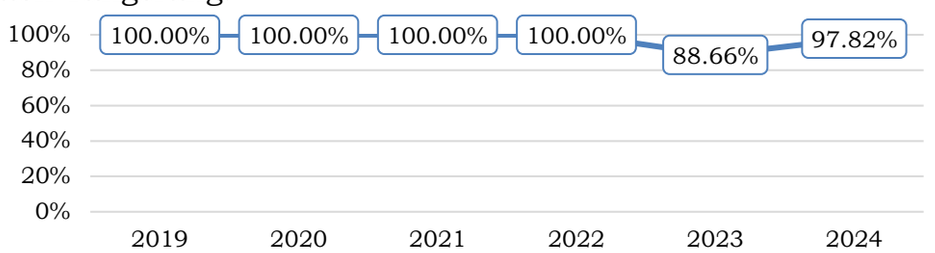
Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Tangerang belum sempurna. Baik temuan dari BPK maupun Inspektorat, masih menunjukkan adanya temuan yang belum ditangani. Hal ini semakin menurun dan pada 2023 mencapai nilai terendah dalam kurun waktu 2019-2023. Hal ini memerlukan pengoptimalan untuk meningkatkan tindak lanjut temuan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.272
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang, 2025

b. Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK merupakan temuan yang didapatkan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah temuan ini mencerminkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Tangerang. Jumlah temuan BPK di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2022 dan menurun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya sistem pelaporan pemerintahan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.273
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024
Sumber: BPK Kabupaten Tangerang, 2025

7) Sekretariat Dewan

a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten

Rencana kerja tahunan merupakan pedoman bagi sekretariat dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang juga menunjukkan kegiatan akan terlaksana dengan lebih efisien. Kabupaten Tangerang telah menyediakan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD kabupaten dalam kurun waktu 2019-2023.

b. Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam RPJMD dan RPJPD dapat meningkatkan keselarasan visi, misi, dan isu strategis daerah yang akan diselesaikan dengan program kerja DPRD. Kabupaten Tangerang telah melakukan integrasi program kerja DPRD dalam RPJMD dan RPJPD dalam tahun 2019-2023.

c. Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Program kerja DPRD Kabupaten Tangerang telah terintegrasi dalam kurun waktu 2019-2023 pada dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD, baik untuk fungsi pengawasan, pembentukan perda, serta fungsi anggaran.

2.1.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut. maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kabupaten Tangerang meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance* dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tabel di bawah ini merupakan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.49
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	SATUAN	CAPAIAN						OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Bidang Urusan Pendidikan									
1.1	Pendidikan	APS PAUD	persen (%)				70,21	72,07	64,99	Dinas Pendidikan
		APS Dasar	persen (%)				98,13	98,78	98,99	Dinas Pendidikan
		APS Kesetaraan	persen (%)				0,12	9,7	13,43	Dinas Pendidikan
		Literasi SD	persen (%)				51,59	58,16	56,17	Dinas Pendidikan
		Literasi SMP	persen (%)				39,54	63,14	66,85	Dinas Pendidikan
		Numerasi SD	persen (%)				60,03	45,97	50,92	Dinas Pendidikan
		Numerasi SMP	persen (%)				52,97	57,41	60,51	Dinas Pendidikan
		Proporsi Satpen PAUD Akre B	persen (%)				54,58	49,02	48,64	Dinas Pendidikan
		Proporsi Guru PAUD S1/D4	persen (%)				55,16	55,01	55,01	Dinas Pendidikan
		Iklim Inklusivitas SD	nilai				81,91	54,46	56,68	Dinas Pendidikan
		Iklim Inklusivitas SMP	nilai				72,94	53,84	54,74	Dinas Pendidikan
		Iklim Keamanan SD	nilai				81,91	72,26	72,63	Dinas Pendidikan
		Iklim Keamanan SMP	nilai				75,96	65,07	66,70	Dinas Pendidikan
		Iklim Kebhinekaan SD	nilai				86,23	70,70	67,70	Dinas Pendidikan
		Iklim Kebhinekaan SMP	nilai				75,42	68,54	66,63	Dinas Pendidikan
2	Bidang Urusan Kesehatan									
2.1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			100	99,04	100	100	Dinas Kesehatan
2.2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			100	100	100	100	Dinas Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	SATUAN	CAPAIAN						OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			100	100	99,77	99,63	Dinas Kesehatan
2.4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			93,57	92,38	98,07	98,73	Dinas Kesehatan
2.5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			89,32	96,32	95,08	100	Dinas Kesehatan
2.6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			53,24	86,33	98,61	98,56	Dinas Kesehatan
2.7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	persen (%)			84,45	70,8	97,27	100	Dinas Kesehatan
2.8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			85,62	87,34	100	100	Dinas Kesehatan
2.9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			80,65	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen (%)			76,66	90,71	96,45	100	Dinas Kesehatan
2.11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			53,42	72,19	98,75	100	Dinas Kesehatan
2.12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	persen (%)			76,43	69,67	100	100	Dinas Kesehatan
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum									
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen (%)			36,46	34,78	72,43	100	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen (%)			0,52	2,11	91,89	100	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni	persen (%)			15,00	62,50	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen (%)			0	66,27	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman
5	Bidang Urusan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	persen (%)			100	100	99,54	100	Satpol PP
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen (%)			59,56	100	100	100	BPBD
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen (%)			100	100	92,8	100	BPBD
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pelayanan penyelamatan	persen (%)			78,11	84,29	100	100	BPBD

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	SATUAN	CAPAIAN						OPD PENANGGUNG JAWAB
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		dan evakuasi korban bencana								
5.5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen (%)			78,36	86,38	96,95	100	BPBD
6	Bidang Urusan Sosial									
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen (%)			20,29	75,82	97,33	100	Dinas Sosial
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen (%)			17,28	84,82	97,33	100	Dinas Sosial
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen (%)			17,47	84,63	97,33	100	Dinas Sosial
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	persen (%)			65,55	90,00	93,33	100	Dinas Sosial
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen (%)			40	69,91	88,37	100	Dinas Sosial

Sumber : Dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Berdasarkan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir, maka rencana pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk capaian SPM yang belum memenuhi standar, yaitu (1) Pendidikan kesetaraan; (2) Pendidikan anak usia dini; (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; (4) Pelayanan kesehatan balita; serta (5) Pelayanan kesehatan pada usia produktif.

2.1.6 KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Kerja sama daerah merupakan usaha bersama yang melibatkan antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah di luar negeri. Penyelenggaraan kerja sama daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, yang didasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan saling menguntungkan pihak yang bekerja sama. Kerja sama daerah menjadi salah satu solusi kolaboratif dalam mengatasi keterbatasan bagi pemerintah daerah, baik dari segi pembiayaan, teknologi, maupun kapasitas SDM dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan segera melaksanakan program kolaborasi unggulan, yang fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrem, pengembangan UMKM, dan pengurangan limbah makanan. Bentuk kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di 10 Desa

Program ini merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Swiss German University melalui *Academic Research*

and Community Service. Program kerja sama ini mencakup pembentukan 10 desa binaan di Kabupaten Tangerang dengan tujuan mengembangkan potensi lokal dan peningkatan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknologi tepat guna, dan pendampingan pemasaran produk lokal. Bentuk inovasi yang dikembangkan melalui kerja sama ini adalah pengembangan tanaman mangrove, produksi minyak kemiri beromega, dan pemanfaatan tempe semangit. Selain itu, pemerintah daerah melalui kerja sama ini juga berupaya meningkatkan produksi sumber daya alam potensial di wilayah pesisir, yaitu bandeng melalui olahan sate sosis bandeng.

2) Program Inkubator Bisnis Ekonomi (Inkube)

Program dengan tujuan meningkatkan daya saing UMKM ini, diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang dan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis (PI2B) Institut Teknologi Indonesia. Program Inkube menjadi wadah yang mempertemukan pelaku usaha dengan investor serta sarana peningkatan kualitas UMKM. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam pelaksanaan program, yaitu:

- Pra Inkubasi : tahap menyeleksi tenant yang potensial
- Inkubasi Tahap Awal : tahap menyusun strategi bisnis
- Inkubasi Tahap Pengembangan : tahap implementasi rencana bisnis
- Inkubasi Tahap Akhir : tahap peluncuran produk di pasar
- Paska Inkubasi : tahap evaluasi dan pengembangan jejaring

3) Workshop Internasional Hari Mangrove

Kegiatan *workshop* ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang dilakukan untuk membahas pengelolaan limbah makanan dan pembentukan ekonomi sirkular.

Selain ketiga program unggulan tersebut, Kabupaten Tangerang juga memiliki bentuk kerja sama lain, baik yang sudah, sedang maupun akan berjalan, sesuai tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.50
Kerja Sama Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

No	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bentuk Kerja Sama
1)	Kabupaten Tangerang	PIK 2	a. Program Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tangerang. (Pihak PIK 2 dengan Dinas Kesehatan) b. Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Berkualitas dalam rangka Percepatan Desa *Open Defecation Free* (ODF) dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tangerang (Pihak PIK 2 dengan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman) c. Penyediaan fasilitas *shuttle* rute perintis yang memberikan akses PIK2 menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya. (Pihak PIK 2 dengan Aliansi Peduli Transportasi)
2)	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Cirebon	Pengendalian inflasi terkait stabilisasi harga komoditas bawang merah.
3)	Kabupaten Tangerang (DPKP)	Perum Bulog	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Anggaran Perubahan Tahun 2024 melalui pengadaan beras sebagai cadangan pangan sebanyak 51.800 kg

No	Pihak Pertama	Pihak Kedua	Bentuk Kerja Sama
4)	Kabupaten Tangerang	IPB University	Program Beasiswa Utusan Daerah (BUD)
5)	Bank Banten	Kabupaten Tangerang	Penyediaan sarana prasarana serta pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan di Kabupaten Tangerang
6)	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Sidrap	Penempatan transmigrasi di satuan permukiman Lagading, Kecamatan Pitu Riase Sidrap
7)	Kabupaten Tangerang (RSUD Tigaraksa)	BPJS Kesehatan	Perjanjian kerja sama fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta memperluas cakupan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di Kabupaten Tangerang.
8)	Kabupaten Tangerang (Dinas Tenaga Kerja)	Politeknik Penerbangan Indonesia Curug	Pelatihan ketenagakerjaan (Pelatihan *Hygiene and Sanitation* serta Pemeliharaan AC Gedung Bandara Udara)
9)	Kabupaten Tangerang (Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan)	PLTU Banten 3 Lontar	Pengelolaan sampah di sungai Cisadane
10)	Kabupaten Tangerang (RSUD Balaraja)	Bank Banten	Pengelolaan pembayaran dan layanan rumah sakit melalui layanan perbankan yang modern dan terintegrasi

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

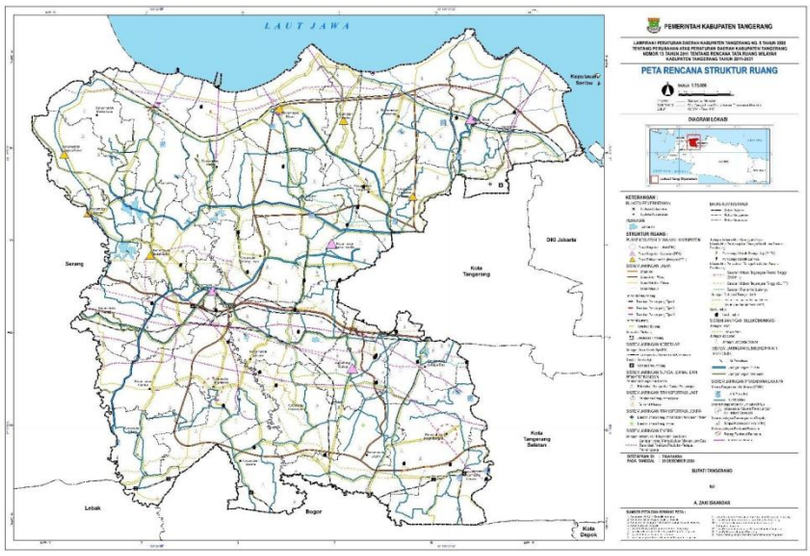
2.1.7 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN TANGERANG

A) Struktur Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang

Penataan ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Upaya perwujudan kondisi tersebut lakukan melalui kebijakan penataan ruang meliputi:

a. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
b. Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten;
c. Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;
d. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
e. Rencana pengembangan RTH

Kelima kebijakan penataan ruang tersebut diwujudkan dalam rencana struktur dan pola ruang sebagai berikut:



Gambar 2.274
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031

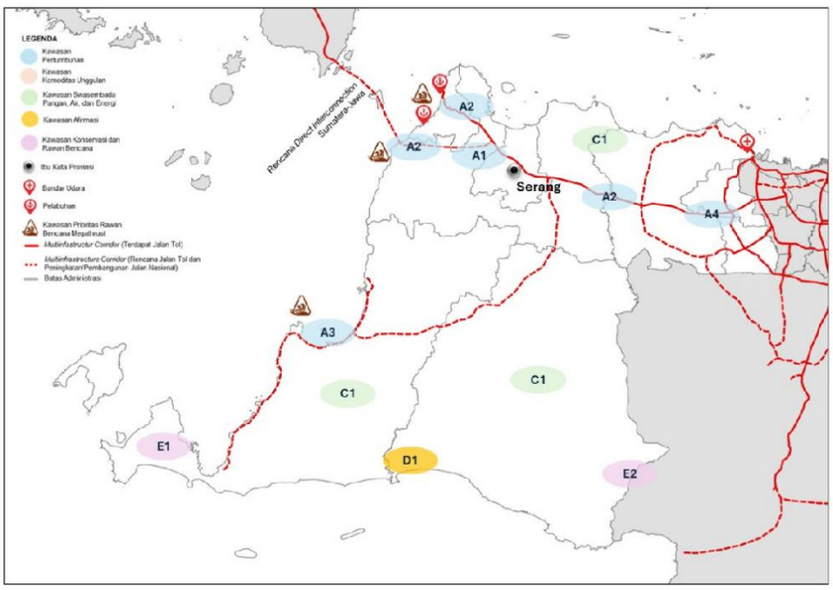
- Sistem Pusat Permukiman
  - Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jabodetabek yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman, transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan.
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Tangerang meliputi Kecamatan Kronjo, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Pagedangan.
- Sistem Jaringan Transportasi
  - Pengembangan terminal bus tipe A yaitu Terminal Balaraja serta terminal bus tipe B yaitu Terminal Pasar Kemis dan Terminal Teluk Naga.
  - Pengembangan Pelabuhan Sepatan dan Pelabuhan Pakuhaji sebagai Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pengembangan Pelabuhan Cituis dan Pelabuhan Tanjung Pasir sebagai Pelabuhan Penyeberangan
  - Pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai Bandar Udara Pengumpul
  - Pengembangan Bandar Udara Budiarto sebagai Bandar Udara Pengumpan
- Sistem Jaringan Energi
  - Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
  - Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik
- Sistem Jaringan Telekomunikasi
  - Pengembangan jaringan tetap dan jaringan bergerak telekomunikasi di wilayah kabupaten/kota.
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air
  - Pengembangan sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air di wilayah kabupaten/kota.
- Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
  - Pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan sistem jaringan persampahan yang meliputi pengembangan TPS Kecamatan Curug, pengembangan TPA di Cilegon, pengembangan TPST Kronjo, pengembangan TPST Kresek, pengembangan TPA Jatiwaringin menjadi TPST Jatiwaringin.

- Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air baku.
- Pengembangan prasarana mitigasi bencana.
- Penyediaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat, serta membangun sistem sanitasi individu atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan IPAL komunal.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Tangerang turut memedomani Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Dalam RTR Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 mengarahkan rencana pengembangan wilayah khususnya Kawasan pertumbuhan ekonomi seperti Kawasan industri di Pasar Kemis dan Cikupa serta rencana infrastruktur jalan tol menghubungkan *gate* Cikupa dengan Rajeg atau simpang susun *Gate* Cikupa. Maka dari itu diperlukan koordinasi pengembangan proyek infrastruktur dengan Provinsi Banten dan wilayah sekitar.

B) Arah Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tangerang dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dijabarkan arah pembangunan dalam lima tahun ke depan fokus pembangunan kewilayahan Pulau Jawa dan Provinsi Banten adalah membangun kawasan-kawasan strategis yang didukung dengan infrastruktur yang terpadu. Dalam dokumen tersebut dijabarkan Arah Pembangunan Kewilayahan Pulau Jawa khususnya Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian Aglomerasi Jabodetabek dan Provinsi Banten.



Gambar 2.275
Peta Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Banten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Gambar di atas merupakan arah pengembangan kewilayahan Provinsi Banten. Khusus wilayah Kabupaten Tangerang memiliki arah pembangunan kewilayahan yaitu (1) Kawasan Aglomerasi Jakarta / WM Jakarta; (2) Jakarta-Tangerang *International Business Corridor* & Jakarta *Global City Urban Tourism (Central-South);* (3) *Northern Coast New Economic Hub & Jakarta Global City Urban Tourism (North);* (4) Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang Tangerang (A2), dan Jakarta-Tangerang *International Business Corridor;* serta (5) Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten.

2.1.8 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN TANGERANG

A) PDAM Tirta Kerta Raharja

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (PERUMDAM TKR) merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang bergerak dibidang Air Bersih. PERUMDAM TKR didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan Perda No. 10/HUK/1976 tanggal 13 April 1976 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2023, PERUMDAM TKR mencatatkan laba sebesar 106,03 miliar rupiah (+3,8% dari tahun 2022).

PERUMDAM TKR melayani 3 (tiga) daerah pelayanan kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dari 186.433 SL, 54% berada di Kota Tangerang, 38% berada di Kabupaten Tangerang, dan 8% berada di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Cakupan Layanan untuk Kabupaten Tangerang saat ini baru mencapai 37,74% (1.393.608 jiwa) dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Jumlah IPA yang dimiliki PERUMDAM TKR saat ini adalah 13 IPA dengan kapasitas produksi sebesar 5.587,5 L/D. Kapasitas produksi tersebut dapat melayani Pelanggan sebesar 186.433 SL Domestik (Desember 2021) dan 14 SL Air Curah sebesar 382.200 SL.

Dalam upaya mengoptimalkan produksi dan meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air minum, PERUMDAM TKR melakukan kerjasama usaha dalam hal pengolahan IPA di antaranya dengan PT. Traya Tirta Cisadane dan PT. Tirta Kencana Cahaya Mandiri. Selain itu, juga dilakukan Kerjasama Air Curah (kegiatan penjualan air) oleh PERUMDAM TKR kepada mitra yaitu pengembang perumahan, perusahaan atau PDAM lain seperti PAM Jaya, BSD City, Lippo Karawaci, Bintaro, Alam Sutera, Bandara Soekarno Hatta, PERUMDAM Kota Tangerang dan lainnya

B) PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda)

PT Mitra Kerta Raharja merupakan BUMD *Holding Company* di Kabupaten Tangerang yang didirikan pada tahun 2006 dengan usaha di bidang Pertanian dan Agrobisnis, Farmasi, Kepelabuhan, Keuangan dan Permodalan, Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Bandara dan Dermaga, Multimedia, Pasar, Air bersih, Pengelolaan air limbah, Perbengkelan, Persampahan, Jasa konstruksi, Perparkiran, Pengelolaan jalan tol. Perseroan daerah ini didirikan dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 19 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2018, PT Mitra Kerta Raharja mendirikan anak perusahaan / *sub-holding* yaitu PT. Gemilang Agung Raharja. PT. Gemilang Agung Raharja (GAR) memiliki bisnis usaha perpakiran yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Pada tahun 2023, PT Mitra Kerta Raharja memiliki total aset sebesar 19,88 miliar rupiah (+19% dari tahun 2022) dan pendapatan sebesar 3,63 miliar rupiah (+98,95% dari tahun 2022). Beberapa kegiatan / penugasan PT. Mitra Kerta Raharja (MKR) pada tahun 2023, yaitu (1) Pengelolaan Kawasan Ketapang Urban Aquaculture; (2) Pengelolaan Pusat Kawasan Agropolitan (Puskagro) bersama PT Benteng Pangan Utama; (3) Pengembangan Properti Eks Kantor Pemkab Tangerang; (4) Bekerjasama dengan PT Jaya Mitra Sarana dalam bidang pengelolaan air bersih.




Gambar 2.276
Kegiatan Bisnis Usaha PT Mitra Kerta Raharja Tahun 2023
Sumber: Dokumen Company Profile PT. Mitra Kerta Raharja

C) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja Gemilang

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama-sama Pemerintah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Jabar Banten, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Nomor 06 tahun 2007, tanggal 06 Juni 2007, Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Lembaga Pinjaman Mikro (LPM). Komposisi kepemilikan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang terdiri atas 79,34% Pemerintah Kab. Tangerang, 20% Pemerintah Prov. Banten, 0,24% Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan 0,42% PT. Bank BJB. Pada tahun 2023, total aset PT. BPR Kerta Raharja Gemilang sebesar 588,78 miliar rupiah (+1,9% dari tahun 2022) dan laba sebesar 4,5 miliar rupiah (-52,3% dari tahun 2022).

BPR Kerta Raharja Gemilang memiliki 3 (tiga) produk atau layanan, yaitu Tabungan, Deposito, dan Kredit. Pada tahun 2023, total dana pihak ketiga deposito sebesar 67,26 miliar rupiah (+3,8% dari tahun 2022) dan tabungan sebesar 92,78 miliar rupiah (+19,0% dari tahun 2022).

D) LPM UMKM Kabupaten Tangerang

Lembaga Pinjaman Mikro (LPM) UMKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman dalam skala kecil untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaga Pinjaman Mikro (LPM) berperan dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM dan mendorong inklusi keuangan UMKM yang diharapkan dapat mendorong skalabilitas usaha UMKM dan penguatan ekonomi lokal. Lembaga keuangan skala mikro tersebut bergerak dalam entitas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK). Kabupaten Tangerang memiliki 10 (sepuluh) PDPK, yaitu PDPK Balaraja, PDPK Kresek, PDPK Curug, PDPK Kronjo, PDPK Serpong, PDPK Mauk, PDPK Sepatan, PDPK Legok, PDPK Pasar Kamis, dan PDPK Tigaraksa.

E) Perumda Pasar Niaga Kerta Rahaja

Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) adalah perusahaan daerah yang mengelola pasar rakyat di Kabupaten Tangerang. Perumda Pasar NKR Kabupaten Tangerang, didirikan dengan Perda No. 25 Tahun 2004, tertanggal 14 Juli 2004, yang telah diperbaharui melalui Perda No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Perda No. 25 Tahun 2004 dan Perda No 17 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua Perda No. 25 Tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005. Perumda ini didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpasaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebagai pemegang saham tunggal Perusahaan Daerah Pasar sekaligus sebagai pemilik. Bupati Kabupaten Tangerang sebagai pemilik PERUMDA Pasar, mengangkat Dewan Pengawas untuk

melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan dan mengangkat Direksi untuk menjalankan Operasional PERUMDA Pasar.





Gambar 2. 277
Kegiatan Perumda Pasar Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) dalam Revitalisasi Pasar dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tangerang
Sumber: Media Berita Online

Perumda Pasar NKR memiliki fungsi dan tugas pokok dalam membangun, mengembangkan, merevitalisasi sarana perniagaan dengan target setiap tahun diharapkan satu unit pasar dapat direvitalisasi. Perumda Pasar NKR telah mengelola 19 pasar tradisional, di antaranya Pasar Kelapa Dua, Pasar Curug, Pasar Karawaci, Pasar Kutabumi, dan lain sebagainya. Kegiatan pengelolaan meliputi revitalisasi kios pasar, membangun fasilitas penunjang perniagaan (parkir, MCK, kantor pasar, *cold storage*, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan lain sebagainya. Selain itu, Perumda Pasar NKR melakukan pemantauan operasi pasar kegiatan perniagaan utamanya pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah. Gambaran keuangan daerah digunakan untuk mencermati dan mengetahui kondisi kemampuan keuangan daerah di masa lalu dan masa yang akan datang.

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari komponen Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah yang terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sementara itu, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah, dengan komponen penyusunnya yaitu: (1) Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang selanjutnya diperinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan terhadap semua komponen APBD tahun sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan segala peluang dan hambatan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

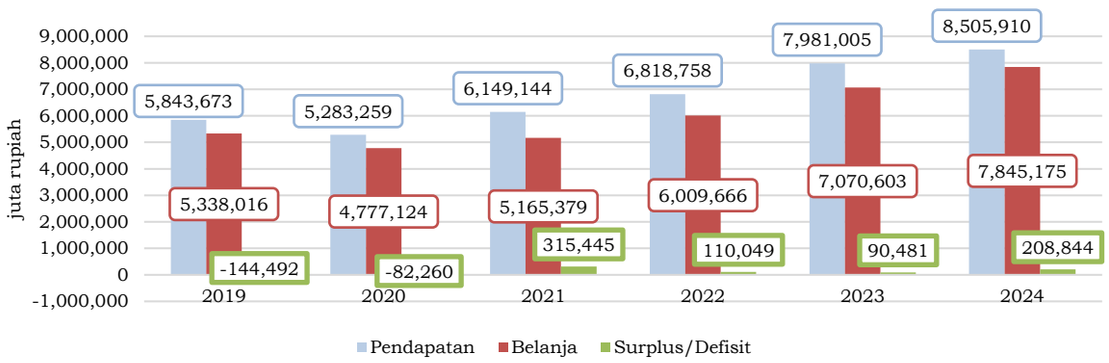
daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam peraturan tersebut disebutkan, keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak keluarga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

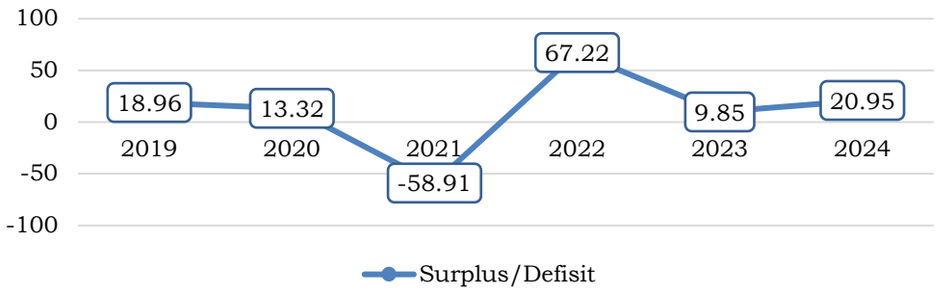
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengelola keuangan daerah berdasarkan pada asas umum, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kurun waktu 2019-2024, APBD Kabupaten Tangerang memiliki tren meningkat pada setiap tahunnya. Meskipun mengalami distraksi *covid-19*, pertumbuhan rata-rata APBD Kabupaten Tangerang meningkat. Peningkatan tersebut membuktikan resiliensi keuangan daerah saat mengalami pandemi *covid-19*.



Gambar 2. 278
Realisasi Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

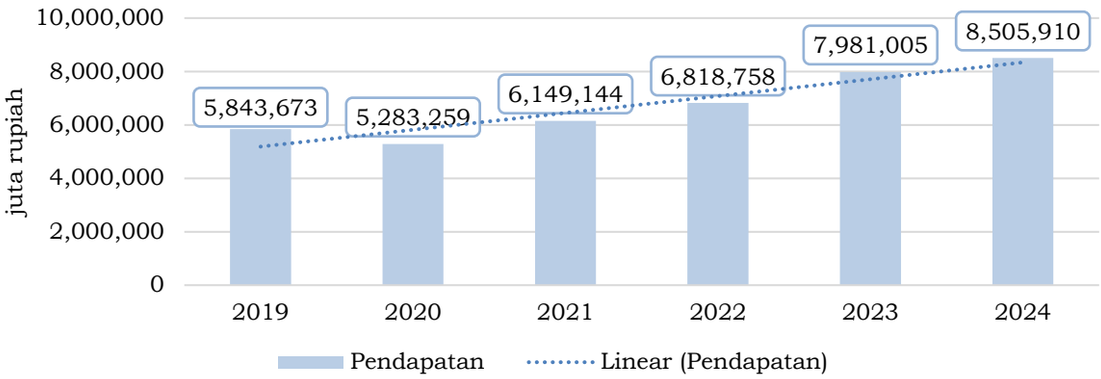
Meskipun tren surplus/defisit Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi, namun fluktuasi ekonomi yang berakibat pada defisit anggaran pada masa pandemi *covid-19* mampu ditutupi oleh net pembiayaan.



Gambar 2. 279
Tren Surplus/Defisit Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

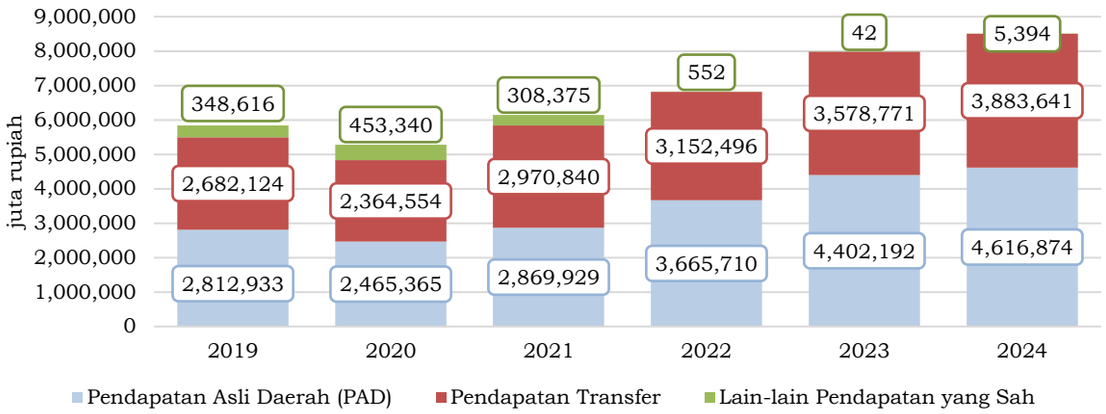
A) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nilai pendapatan daerah sangat berpengaruh pada kemampuan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Maka dari itu, dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah sebagai alat ukur dan pembanding pada masing-masing sumber pendapatan.



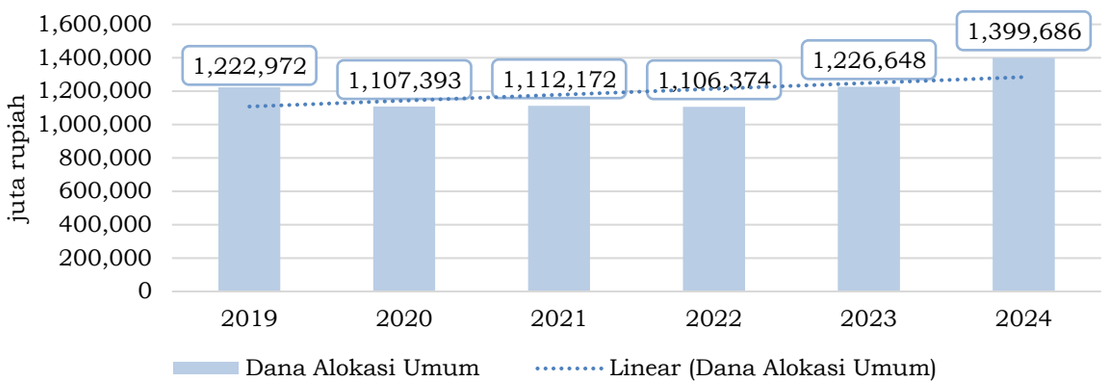
Gambar 2.280
Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2019-2024), pendapatan daerah Kabupaten Tangerang memiliki tren peningkatan sebesar 7,8% per tahun. Akan tetapi, pendapatan daerah Kabupaten Tangerang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 saat kondisi pandemi *covid-19*. Pendapatan daerah terdiri atas beberapa komponen seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen-komponen tersebut semakin meningkat menandakan setiap tahunnya.



Gambar 2.281
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

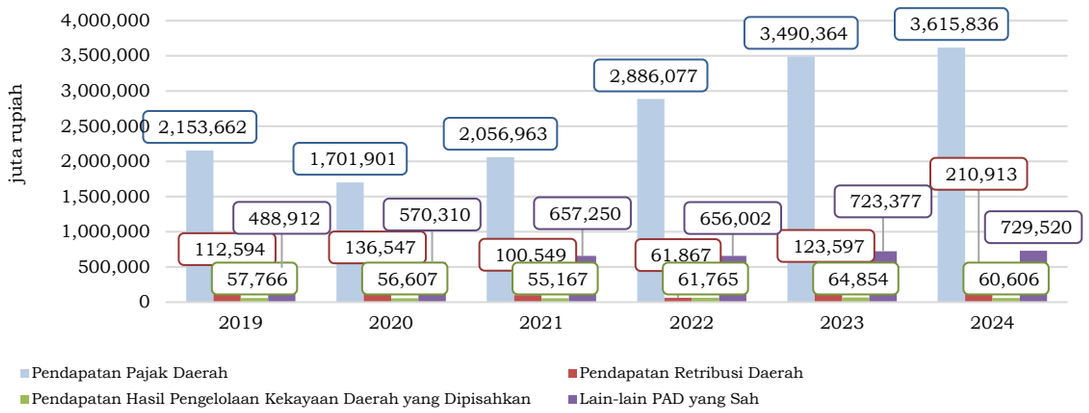
Komponen yang memiliki proporsi terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat dari waktu ke waktu dengan sumbangan terbesar dari pendapatan pajak daerah dengan rata-rata yang mencapai angka 42,5% dari pendapatan daerah pada tahun 2024. Sementara itu, pendapatan transfer memiliki tren yang peningkatan yang meski sempat mengungguli PAD Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. Proporsi terbesar yang menyokong dana transfer adalah pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum sebesar 16,45% terhadap pendapatan LRA tahun 2024.



Gambar 2.282
Dana Alokasi Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

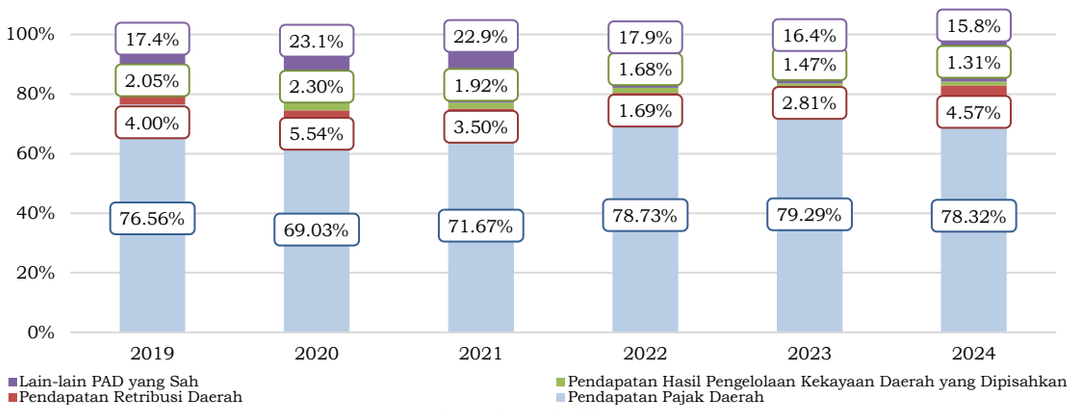
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu komponen variabel sumber pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDyD) dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2019-2023 memiliki tren pertumbuhan yang meningkat kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan pada masa pandemi *covid-19*.



Gambar 2.283
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

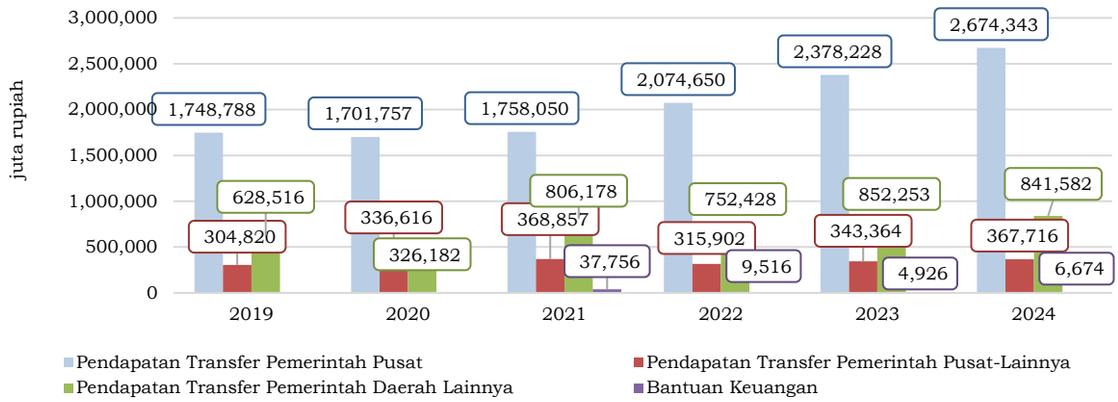
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang disumbang oleh pajak daerah dengan proporsi terbesar pada tiap tahunnya. Proporsi pajak daerah tiap tahunnya selalu berkisar pada rentang 70-80% total PAD.



Gambar 2.284
Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

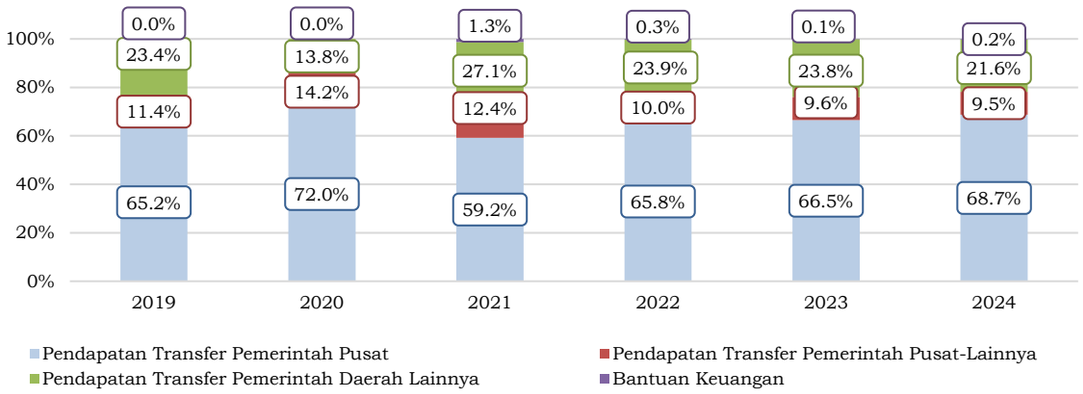
2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer Kabupaten Tangerang diperoleh dari transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Pendapatan transfer Kabupaten Tangerang kurun waktu 2019-2024 memiliki tren yang meningkat.



Gambar 2.285
Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Pendapatan transfer Kabupaten Tangerang didominasi oleh proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berkisar pada rentang 60-70% dari total jumlah pendapatan transfer. Transfer pemerintah pusat terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, proporsi terbesar lainnya disumbang oleh transfer daerah lainnya yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.



Gambar 2.286
Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari sumber ini mengalami penurunan drastis dalam kurun waktu 2019-2024.

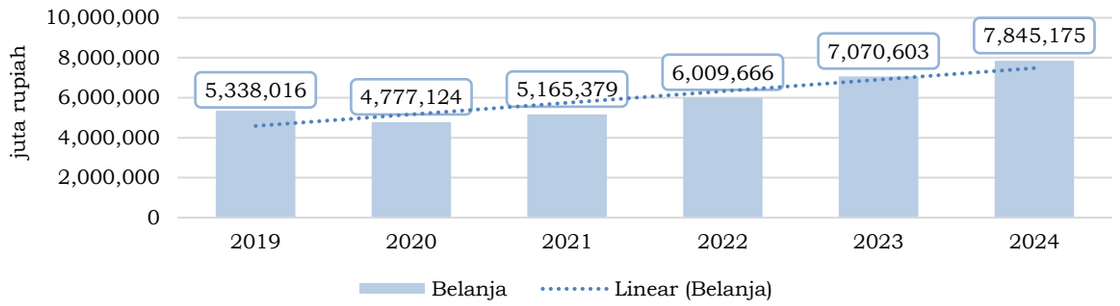
Tabel 2.51
Pendapatan LRA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN-LRA	5.843.672.646.281	5.283.259.300.737	6.149.143.629.405	6.818.758.206.108	7.981.005.385.558	8.505.910.087.435,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.812.933.124.762	2.465.364.759.567	2.869.928.724.492	3.665.710.323.870	4.402.192.318.342	4.616.874.819.974,54
Pendapatan Pajak Daerah	2.153.661.721.883	1.701.900.649.848	2.056.962.543.593	2.886.076.753.678	3.490.363.924.921	3.615.835.888.430
Pendapatan Retribusi Daerah	112.593.677.767	136.547.373.492	100.548.519.872	61.867.064.298	123.597.357.167	210.912.730.996
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	57.766.074.188	56.606.567.271	55.167.387.998	61.764.968.006	64.854.494.983	60.606.042.461
Lain-lain PAD yang Sah	488.911.650.924	570.310.168.956	657.250.273.029	656.001.537.888	723.376.541.271	729.520.158.087,54
PENDAPATAN TRANSFER	2.682.123.916.519	2.364.554.056.170	2.970.840.235.913	3.152.496.052.937	3.578.770.570.116	3.883.641.267.461
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.748.787.956.936	1.701.756.758.490	1.758.050.071.356	2.074.650.440.787	2.378.228.091.338	2.674.343.487.264
Bagi Hasil Pajak	160.484.375.585	212.364.539.597	274.645.743.666	221.567.284.104	310.872.332.383	401.180.626.000
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.602.889.923	1.586.590.101	2.438.853.402	3.559.626.000	6.468.973.603	5.391.595.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.222.971.999.000	1.107.392.704.000	1.112.171.609.000	1.106.373.855.092	1.226.647.862.650	1.399.685.929.647
Dana Alokasi Khusus (DAK)	363.728.692.428	380.412.924.792	368.793.865.288	743.149.675.591	834.238.922.702	868.085.336.617
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	304.820.252.828	336.615.552.000	368.856.747.000	315.901.807.430	343.363.714.000	367.715.943.900
Dana Penyesuaian	304.820.252.828	336.615.552.000	67.576.212.000	-	6.477.097.000	12.391.928.500
Transfer Dana Desa	-	-	301.280.535.000	315.901.807.430	336.886.617.000	355.324.015.400
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	628.515.706.755	326.181.745.680	806.177.824.517	752.428.103.428	852.252.763.778	841.581.836.297
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	628.515.706.755	326.181.745.680	806.177.824.517	752.428.103.428	852.252.763.778	841.581.836.297
Bantuan Keuangan	-	-	37.755.593.040	9.515.701.292	4.926.001.000	6.673.741.700
Bantuan Keuangan	-	-	37.755.593.040	9.515.701.292	4.926.001.000	6.673.741.700
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	348.615.605.000	453.340.485.000	308.374.669.000	551.829.301	42.497.100	5.394.000.000
Pendapatan Hibah	348.615.605.000	453.340.485.000	308.374.669.000	-	42.497.100	5.394.000.000
Pendapatan Lainnya	-		-	551.829.301	-	

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

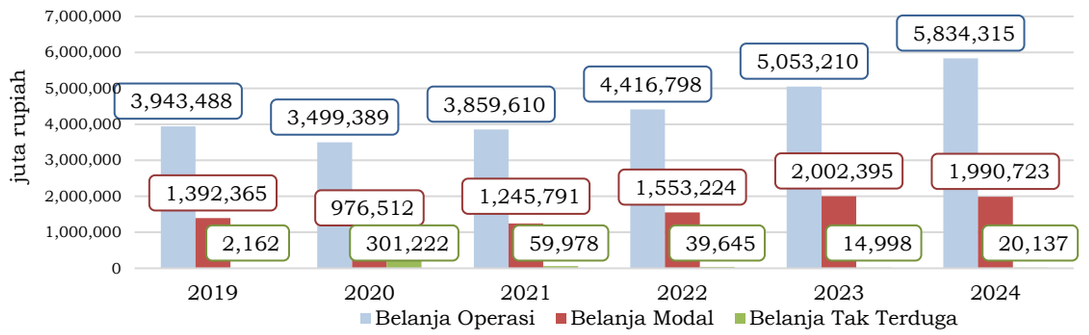
B) Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam kurun waktu 2019-2024, menunjukkan peningkatan pada belanja daerah dengan rata-rata sebesar 8,0% per tahun meskipun pada 2020 sempat mengalami penurunan.



Gambar 2.287
Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

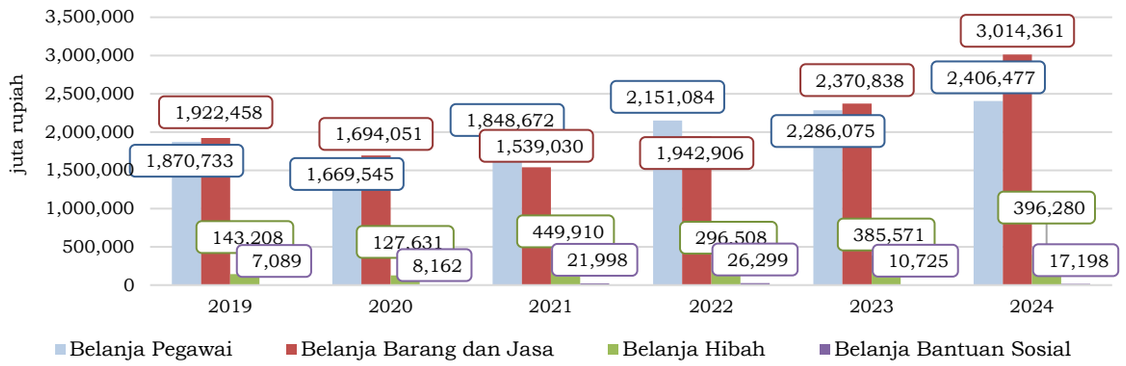
Belanja daerah di Kabupaten Tangerang terdiri atas tiga jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja daerah Kabupaten Tangerang didominasi oleh belanja operasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Belanja modal juga memiliki tren peningkatan yang sejalan dengan belanja operasi. Sementara itu, belanja tak terduga memiliki proporsi terendah dengan tren yang menurun kecuali pada 2020 saat terjadi pandemi *covid-19*.



Gambar 2.288
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

1) Belanja Operasi

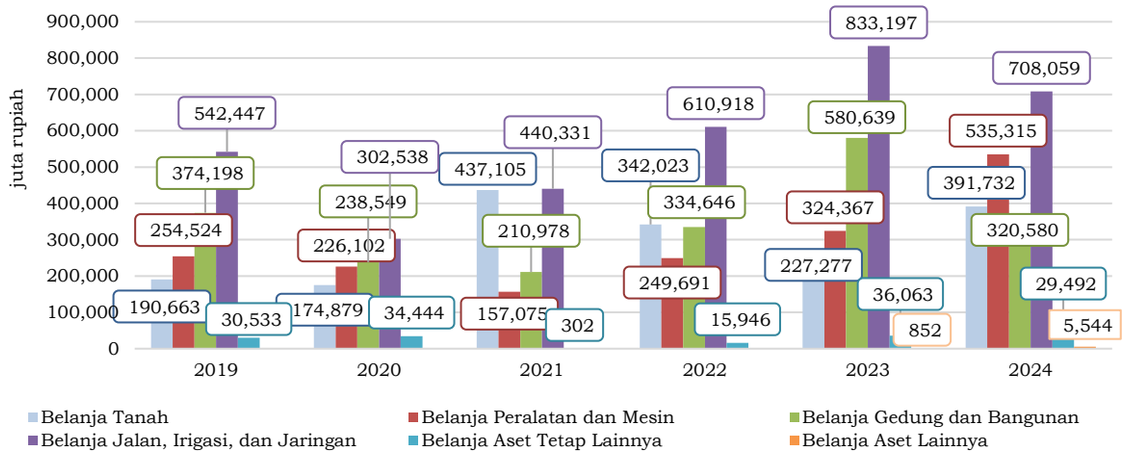
Belanja operasi terdiri atas empat jenis yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Belanja pegawai serta barang dan jasa menjadi sumber belanja terbesar yang mendominasi dalam proporsi belanja operasi yaitu sebesar 41,2% (2024). Kedua jenis belanja tersebut memiliki tren yang sama yaitu relatif meningkat meski keduanya sama-sama mengalami penurunan. Sementara itu, belanja hibah juga mengalami peningkatan meski nilainya relatif kecil. Belanja bantuan sosial menjadi jenis belanja operasi dengan proporsi terendah yaitu sebesar 0,3% pada tahun 2024.



Gambar 2.289
Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal memiliki tren yang relatif meningkat meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Dalam realisasi belanja modal, proporsi belanja tertinggi digunakan dalam belanja jalan, irigasi, dan jaringan yaitu sebesar 35,6% pada tahun 2024.



Gambar 2.290
Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Belanja tak terduga mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2019-2024. Belanja tak terduga mengalami peningkatan drastis pada masa pandemi *covid-19*. Meskipun demikian, pada tahun berikutnya belanja tak terduga mengalami penurunan.

4) Belanja Transfer

Dalam kurun waktu 2019-2024, realisasi belanja transfer cenderung mengalami peningkatan sebesar 5,9% (rata-rata per tahun) dan hanya menurun saat pandemi. Pada tahun 2024, realisasi belanja transfer mencapai 869,6 miliar rupiah yang terdiri dari transfer bagi hasil sebesar 347,2 miliar rupiah dan transfer bantuan keuangan sebesar 522,2 miliar rupiah. Realisasi belanja transfer Kabupaten Tangerang tahun 2024 difokuskan untuk program/kegiatan pembangunan desa.

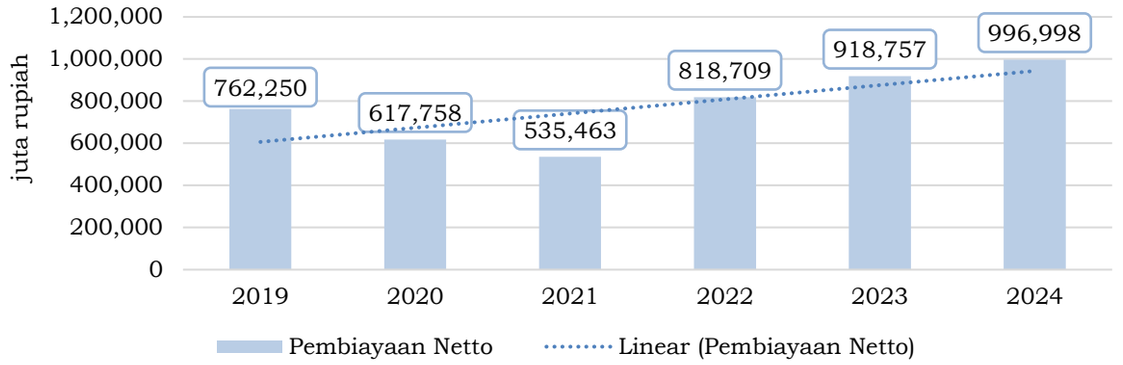
Tabel 2.52
Realisasi Belanja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	5.338.015.766.404	4.777.124.008.370	5.165.378.967.163	6.009.666.292.139	7.070.603.058.354	7.845.174.721.433
BELANJA OPERASI	3.943.488.092.710	3.499.389.280.347	3.859.610.157.225	4.416.797.617.312	5.053.210.174.035	5.834.315.106.367
Belanja Pegawai	1.870.732.534.034	1.669.545.457.895	1.848.671.982.738	2.151.084.483.213	2.286.075.345.833	2.406.476.664.779
Belanja Barang dan Jasa	1.922.458.206.350	1.694.051.144.953	1.539.029.767.368	1.942.905.906.358	2.370.838.280.571	3.014.360.678.622
Belanja Hibah	143.208.266.826	127.631.000.549	449.909.957.119	296.508.477.741	385.571.297.631	396.279.562.966
Belanja Bantuan Sosial	7.089.085.500	8.161.676.950	21.998.450.000	26.298.750.000	10.725.250.000	17.198.200.000
BELANJA MODAL	1.392.365.179.428	976.512.264.804	1.245.790.580.493	1.553.223.517.661	2.002.395.147.585	1.990.722.872.612
Belanja Tanah	190.663.045.773	174.879.250.388	437.105.252.384	342.022.722.332	227.277.177.586	391.732.280.665
Belanja Peralatan dan Mesin	254.524.178.235	226.101.911.006	157.074.680.027	249.690.508.222	324.366.940.867	535.315.347.072
Belanja Gedung dan Bangunan	374.198.318.620	238.548.536.514	210.977.934.794	334.646.202.898	580.639.094.647	320.580.002.197
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	542.446.989.238	302.538.105.154	440.330.930.828	610.918.173.051	833.196.833.734	708.059.201.545
Belanja Aset Tetap Lainnya	30.532.647.562	34.444.461.742	301.782.460	15.945.911.158	36.063.250.751	29.492.455.730
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	851.850.000	5.543.585.403
BELANJA TAK TERDUGA	2.162.494.267	301.222.463.219	59.978.229.445	39.645.157.166	14.997.736.734	20.136.742.454
Belanja Tak Terduga	2.162.494.267	301.222.463.219	59.978.229.445	39.645.157.166	14.997.736.734	20.136.742.454
BELANJA TRANSFER	650.148.754.100	588.395.766.747	668.319.977.231	699.043.340.179	819.921.420.195	869.579.700.196
Transfer Bagi Hasil	202.796.024.306	157.385.248.029	210.492.145.819	246.063.603.379	327.417.814.437	347.428.524.162
Transfer Bantuan Keuangan	447.352.729.794	431.010.518.718	457.827.831.412	452.979.736.800	492.503.605.758	522.151.176.034

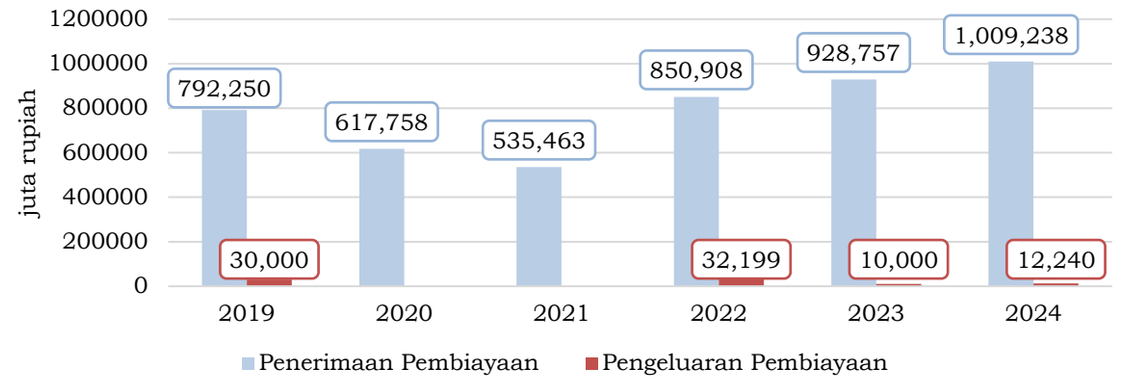
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

C) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan/pengeluaran daerah yang perlu/akan dibayar/diterima kembali dan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan neto daerah mengalami peningkatan dari kurun waktu 2019-2024 sebesar 5,5% per tahun. Hal ini menunjukkan nilai yang positif yang mampu melebihi nilai defisit, sehingga memberikan SILPA yang positif.



Gambar 2.291
Pembiayaan Neto Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025



Gambar 2.292
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Tangerang terdiri atas penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Meski sempat berfluktuasi pada kurun waktu 2019-2021, penerimaan pembiayaan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 hingga 2024.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi pada periode waktu 6 (enam) tahun terakhir.

Tabel 2.53
Pembiayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	792.249.631.880	617.757.759.057	535.463.426.368	850.908.111.379	928.757.388.059	1.009.238.295.068
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	792.249.631.880	617.757.759.057	535.463.426.368	850.908.111.379	928.757.388.059	1.009.238.295.068
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		-	
Pengeluaran Pembiayaan	29.999.998.600	0	0	32.199.297.110	10.000.000.000	12.240.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	24.999.998.600	-	-	32.199.297.110	10.000.000.000	
Penyetaraan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	-	-		-	12.240.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya		-	-		-	
PEMBIAYAAN NETTO	762.249.633.280	617.757.759.057	535.463.426.368	818.708.814.269	918.757.388.059	996.998.295.068

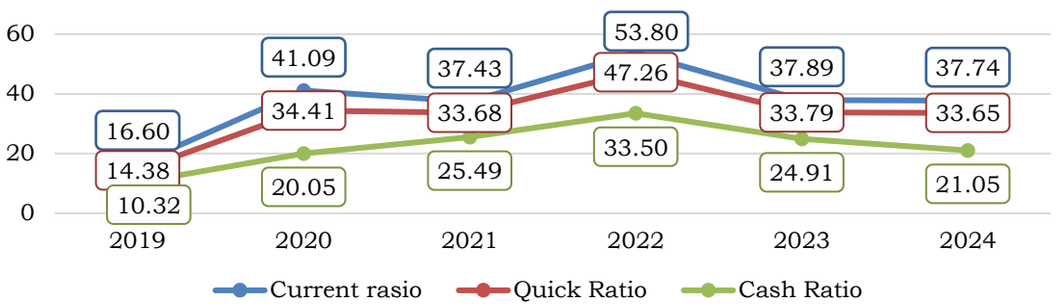
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

A) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri atas 3 jenis rasio yakni *current ratio, quick ratio,* dan *cash ratio. Current ratio* merupakan alat ukur kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya. *Current ratio* keuangan Kabupaten Tangerang memiliki tren meningkat dari tahun 2019-2023 meski sempat menurun pada 2021 dan 2023. Nilai *current ratio* Kabupaten Tangerang menunjukkan tingginya jumlah aset lancar yang dapat digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya tanpa harus memperhatikan persediaan. Sementara itu, *quick ratio* adalah alat ukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar yang paling likuid (tanpa memperhatikan persediaan) dengan kewajiban lancar. *Quick ratio* Kabupaten Tangerang memiliki tren yang sama dengan *current ratio* yakni meningkat meski mengalami penurunan pada 2021 dan 2024. Nilai *quick ratio* Kabupaten Tangerang tergolong tinggi menandakan tingginya jumlah aktiva lancar yang paling likuid untuk memenuhi kewajiban lancar tanpa memperhatikan persediaan. Sementara itu, *cash ratio* juga memiliki tren peningkatan meski sempat menurun pada tahun 2024.

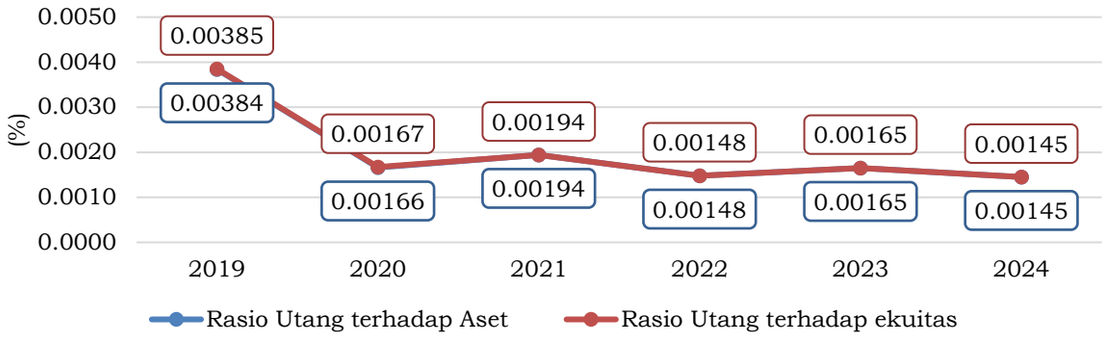


Gambar 2.293
Likuiditas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

B) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan pemerintah daerah untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva maupun ekuitas. Rasio solvabilitas terdiri atas dua jenis yaitu rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun panjang dengan jumlah seluruh aset yang dimilikinya. Sementara itu, rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah untuk

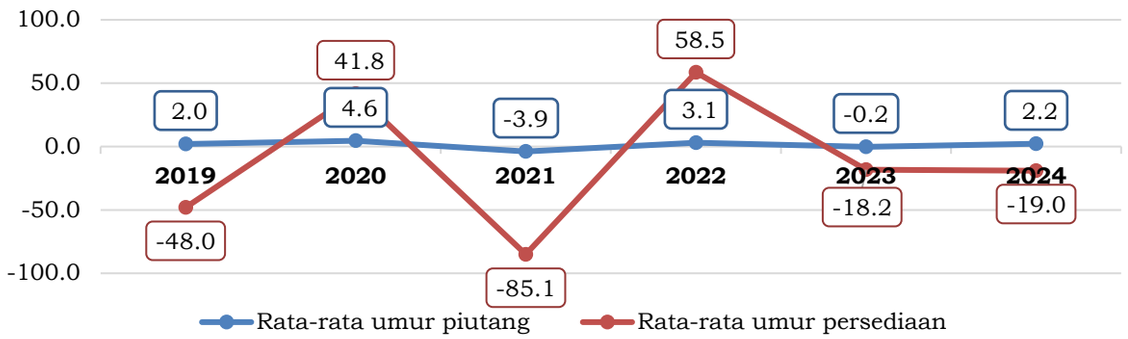
memenuhi seluruh kewajiban dengan ekuitas yang dimiliki. Kedua jenis rasio tersebut memiliki tren yang sama dengan nilai yang tidak jauh berbeda. Rasio tersebut memiliki tren cenderung menurun meski berfluktuasi dengan nilai berkisar antara 0,00145% - 0,0038% yang mengindikasikan aset Kabupaten Tangerang hanya dibiayai 0,00158% - 0,0038% kewajiban. Rasio tersebut masih sangat jauh di bawah 100% artinya Kabupaten Tangerang akan mampu membayar utang menggunakan ekuitas apabila mengalami kegagalan pembayaran utang.



Gambar 2.294
Solvabilitas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

C) Rasio Aktivitas

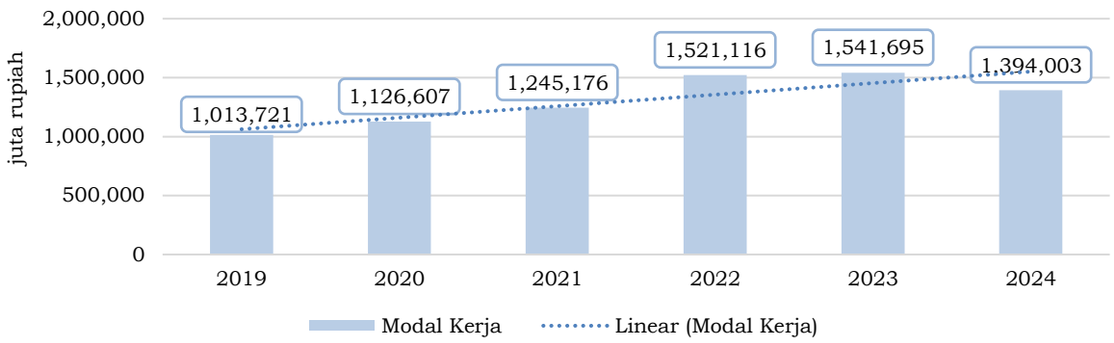
Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan sebagai alat identifikasi tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah yang terdiri atas rerata umur piutang dan rerata umur persediaan. Rata-rata umur piutang menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk melunasi piutang. Rata-rata umur piutang Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2024 berkisar dalam rentang -3,9 hingga 4,6 dengan tren yang berfluktuasi tiap tahunnya. Sementara itu, rata-rata umur persediaan adalah menunjukkan jumlah hari dana tertanam dalam bentuk persediaan. Rata-rata umur persediaan Kabupaten Tangerang menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari waktu ke waktu.



Gambar 2.295
Aktivitas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

D) Modal Kerja

Modal kerja adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan daerah dalam melaksanakan operasional harian tanpa menggunakan selain aset lancar. Nilai modal kerja Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan signifikan dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.296
Modal Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Tabel 2.54
Aset Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	670.753.471.314,16	563.576.894.619,16	871.426.399.490,00	965.269.250.926,00	1.041.067.964.671,00	798.695.408.252,54
Kas di Kas Daerah	526.631.115.391,16	382.036.355.068,16	643.703.360.122,00	678.514.220.262,00	727.106.142.239,00	621.028.924.781,00
Kas di Bendahara Penerimaan	6.940.000,00	7.295.165,00	681.940,00	7.498.645,00	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.680.570,00	41.115.681,00	-	66.479.350,00	5.247.344,00	-
Kas BLUD	105.469.801.746,00	161.893.532.313,00	224.847.574.769,00	284.304.419.675,00	309.753.994.557,00	176.376.586.014,54
Kas di Bendahara FKTP	-					
Kas di Bendahara BOS	12.323.666.501,00	5.595.339.172,00	2.874.782.659,00	2.345.048.694,00	1.772.475.007,00	466.232.990,00
Kas Dana BOK Puskesmas						817.618.138,00
Kas Lainnya	1.306.268.506,00	14.003.257.220,00	-	31.584.300,00	2.430.105.524,00	
Setara Kas	24.999.998.600,00	-	-	-	-	
Investasi Jangka Pendek		-	-	-	-	
Piutang Pendapatan	896.093.177.901,00	1.028.176.883.119,00	897.083.066.453,00	1.011.325.417.556,00	1.000.892.217.146,77	1.083.587.719.787,01
Piutang Pajak	699.356.732.658,00	711.426.978.175,00	706.139.886.445,00	757.008.077.164,00	796.677.320.421,00	827.435.304.231,00
Piutang Retribusi	5.100.704.816,00	4.256.364.189,00	2.120.994.485,00	2.785.168.453,00	2.837.279.027,00	2.241.120.368,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				-	-	
Piutang Lain-lain (PAD yang Sah)	87.109.928.801,00	22.140.679.045,00	34.178.385.358,00	74.819.850.969,00	31.638.726.663,77	21.708.536.334,01
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	43.649.645.702,00	-	-	-	-	

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	60.876.165.924,00	290.352.861.710,00	154.643.800.165,00	176.712.320.970,00	169.738.891.035,00	232.202.758.854,00
Penyisihan Piutang	(632.930.293.440,88)	(624.805.879.991,82)	(617.206.483.376,39)	(615.171.812.638,87)	(629.933.667.815,22)	(647.419.237.205,55)
Beban Dibayar Di Muka	42.976.754,54	44.290.212,19	12.083.333,34	38.333.333,34	126.250.000,00	85.500.000,00
Persediaan	144.729.374.357,84	187.717.297.245,92	128.044.978.299,36	188.465.363.654,19	171.335.392.331,60	167.776.665.534,32
JUMLAH ASET LANCAR	1.078.688.706.886,66	1.154.709.485.204,45	1.279.360.044.199,31	1.549.926.552.830,66	1.583.488.156.334,15	1.402.720.010.039,32
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Program	37.293.058.088,00	48.707.031.554,00	44.471.125.330,00	35.250.308.229,00	37.648.052.974,00	59.776.718.160,00
Dana Bergulir	37.293.058.088,00	48.707.031.554,00	44.471.125.330,00	35.250.308.229,00	37.648.052.974,00	59.776.718.160,00
Deposito Jangka Panjang		-	-	-	-	
Investasi Permanen	1.028.846.624.292,56	1.026.798.085.805,63	1.023.711.826.866,00	1.052.443.111.794,34	1.061.419.444.540,37	1.075.372.158.617,45
Penyetaraan Modal Pemerintah Daerah	1.028.846.624.292,56	1.026.798.085.805,63	1.023.711.826.866,00	1.052.443.111.794,34	1.061.419.444.540,37	1.075.372.158.617,45
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1.066.139.682.380,56	1.075.505.117.359,63	1.068.182.952.196,00	1.087.693.420.023,34	1.099.067.497.514,37	1.135.148.876.777,45
ASET TETAP						
Tanah	7.605.873.762.094,00	7.859.447.998.418,00	8.352.273.885.332,00	9.466.070.944.967,70	13.939.404.254.737,70	14.302.726.461.242,70
Peralatan dan Mesin	1.721.964.560.982,69	1.900.778.880.283,07	2.077.110.389.680,35	2.243.975.527.855,94	2.580.837.724.336,43	3.011.248.023.355,19
Gedung dan Bangunan	4.407.089.959.051,00	4.646.736.675.138,00	4.772.916.867.901,00	5.085.826.398.575,89	5.468.263.632.549,29	5.884.337.520.893,27
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.479.068.097.030,29	6.802.248.168.553,29	7.381.564.089.162,29	7.998.002.235.979,29	8.918.767.634.390,52	9.596.908.003.766,09
Aset Tetap Lainnya	68.802.025.396,22	73.929.801.578,73	76.115.654.215,52	78.153.399.019,52	83.227.014.575,52	92.553.092.386,52
Konstruksi dalam Pengerjaan	14.381.592.639,00	14.891.220.719,00	24.941.650.856,00	113.952.437.839,00	21.123.573.313,00	21.998.732.760,00
Akumulasi Penyusutan	(5.804.618.704.820,20)	(6.587.583.589.045,85)	(7.371.579.780.112,46)	(8.179.660.097.500,27)	(9.000.652.886.847,71)	(9.945.186.666.644,74)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JUMLAH ASET TETAP	14.492.561.292.373,00	14.710.449.155.644,20	15.313.342.757.034,70	16.806.320.846.737,10	22.010.970.947.054,70	22.964.585.167.759,03
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	14.254.375,00	-	6.400.000,00	-	-	-
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	14.254.375,00	-	6.400.000,00	-	-	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga					615.621.126.518,71	622.616.292.393,75
Aset Pemanfaatan					671.380.077.047,12	679.658.610.555,12
Akumulasi Penyusutan Aset Pemanfaatan					(55.758.950.528,41)	(57.042.318.161,37)
Aset Tidak Berwujud	61.552.083,33	34.927.083,33	214.208.333,33	146.104.166,66	1.561.963.166,59	7.058.085.197,64
Aset Tidak Berwujud Lainnya	106.500.000,00	106.500.000,00	303.500.000,00	303.500.000,00	1.807.448.000,00	8.028.864.840,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(44.947.916,67)	(71.572.916,67)	(89.291.666,67)	(157.395.833,34)	(245.484.833,41)	(970.779.642,36)
Aset Lain-lain	317.081.732.238,13	61.704.090.752,84	37.295.811.054,87	73.694.379.351,61	51.644.861.338,28	95.808.834.198,85
Aset Lain-lain	369.503.974.669,65	98.182.181.702,80	106.248.455.020,38	174.052.892.499,79	172.467.585.434,35	283.613.354.167,64
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(52.422.242.431,52)	(36.478.090.949,96)	(68.952.643.965,51)	(100.358.513.148,18)	(120.822.724.096,07)	(187.804.519.968,79)
JUMLAH ASET LAINNYA	317.157.538.696,46	61.739.017.836,17	37.516.419.388,20	73.840.483.518,27	668.827.951.023,58	738.442.115.790,24
JUMLAH ASET	16.954.547.220.336,70	17.002.402.776.044,50	17.698.402.172.818,20	19.517.781.303.109,30	25.362.354.551.926,80	26.240.896.170.366,04

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	64.967.983.641,51	28.102.517.777,96	34.183.600.535,37	28.810.371.017,84	41.793.390.264,28	37.668.893.782,55
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	282.373.112,00	-	-	345.541.609,00	487.849.788,00	1.979.028,00
Pendapatan Diterima Dimuka	9.703.718.021,41	7.408.557.950,26	9.217.244.766,67	11.009.260.359,25	11.411.017.840,58	14.965.873.388.85
Utang Belanja	42.663.257.723,00	10.672.291.434,00	24.094.922.378,70	16.401.280.960,59	29.584.026.873,70	22.392.994.203,70
Utang Jangka Pendek Lainnya	12.318.634.785,10	10.021.668.393,70	871.433.390,00	1.054.288.089,00	310.495.762,00	308.047.162,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	135.217.583,67	161.322.250,33	104.073.250,33	108.240.916,99	45.011.999,99	120.024.208,32
Utang Jangka Panjang Lainnya	161.322.250,33	104.073.250,33	108.240.916,99	45.011.999,99	120.024.208,32	120.024.208,32
JUMLAH KEWAJIBAN	65.103.201.225,18	28.263.840.028,29	34.287.673.785,70	28.918.611.934,83	41.838.402.264,27	37.788.917.990,87
EKUITAS						
Ekuitas	16.889.444.019.111,50	16.974.138.936.016,20	17.664.114.499.032,50	19.488.862.691.174,50	25.320.516.149.662,50	26.203.107.252.375,17
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16.954.547.220.336,70	17.002.402.776.044,50	17.698.402.172.818,20	19.517.781.303.109,30	25.362.354.551.926,80	26.240.896.170.366,04

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

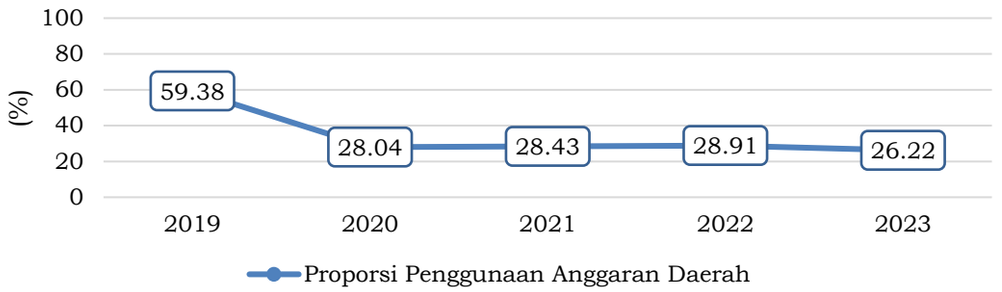
Proporsi penggunaan anggaran merupakan analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Tangerang. Proporsi penggunaan anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk penentuan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.55
Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

NO	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran + Transfer)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
I	Tahun Anggaran 2019	3.943.488.092.710	6.641.313.274.464	59,38%
II	Tahun Anggaran 2020	1.669.545.457.895	5.953.915.541.864	28,04%
III	Tahun Anggaran 2021	1.848.671.982.738	6.502.018.921.625	28,43%
IV	Tahun Anggaran 2022	2.151.084.483.213	7.439.952.269.607	28,91%
V	Tahun Anggaran 2023	2.286.075.345.833	8.720.445.898.744	26,22%

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024

Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Tangerang didapatkan dari persentase total pembelanjaan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Tangerang, yang terdiri atas Belanja Daerah, Pembiayaan Pengeluaran, dan Transfer Daerah. Pada grafik di bawah, proporsi penggunaan anggaran daerah Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, proporsi penggunaan anggaran daerah mencapai persentase 59,38% dan angka tersebut menurun drastis di tahun 2020 mencapai 28,04%. Persentase tersebut kemudian stabil hingga di tahun 2023 mencapai angka 26,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Tangerang semakin baik, seiring dengan penurunan dalam proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.



Gambar 2.297
Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024

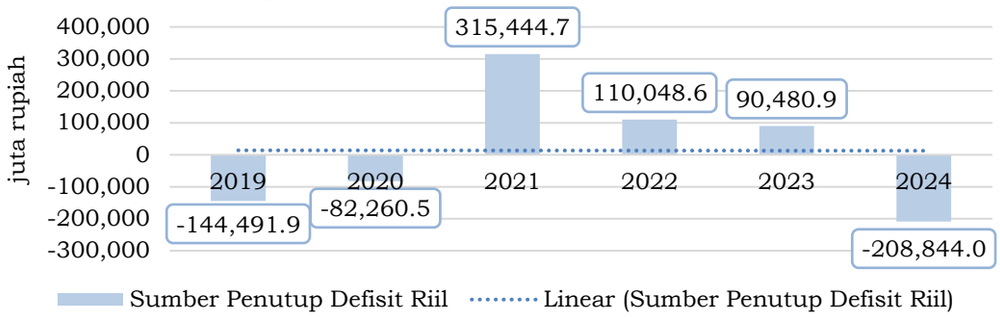
2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang merupakan gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran-anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan

daerah. Adapun analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui analisis sumber penutup.

A) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis sumber penutup defisit riil diterapkan untuk menutup defisit yang ada di dalam APBD. Dalam penutupan defisit anggaran di Kabupaten Tangerang, digunakan dua pos pemecah anggaran yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.



Gambar 2.298
Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memiliki APBD yang berfluktuasi. Pada tahun 2019, Kabupaten Tangerang mengalami defisit sebesar -Rp144.491.874.223,- dan pada tahun 2023 surplus mencapai Rp90.480.907.009,-. Hal ini menandakan bahwa jumlah anggaran riil Kabupaten Tangerang semakin stabil surplus dan menunjukkan konsep APBD dan APBD riil bisa selaras. Namun di tahun 2024 defisit anggaran mencapai -Rp208.844.334.193,-.

Tabel 2.56
Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Perhitungan Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023							
No	Komposisi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.843.672.646.281	5.283.259.300.737	6.149.143.629.405	6.818.758.206.108	7.981.005.385.558	8.505.910.087.435,54
Dikurang realisasi							
2	Belanja Daerah	5.338.015.766.404	4.777.124.008.370	5.165.378.967.163	6.009.666.292.139	7.070.603.058.354	7.845.174.721.433.00
3	Pengeluaran Transfer	650.148.754.100	588.395.766.747	668.319.977.231	699.043.340.179	819.921.420.195	869.579.700.196,00
Surplus/Defisit Riil		-144.491.874.223	-82.260.474.380	315.444.685.011	110.048.573.790	90.480.907.009	-208.844.334.193,46

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang 2020-2025

B) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran anggaran (belanja) selama satu periode anggaran. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja serta sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran, di mana dengan mengetahui besaran SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Semakin tinggi SiLPA menunjukkan kurang cermatnya penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.57
Komposisi Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Komposisi Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)						
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pelampauan penerimaan PAD	195.000.000.000	302.911.284.641	318.042.675.095	336.852.345.298	392.238.899.453	
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0	0	0	0	99.550.851.840	
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	0	551.829.301	0	
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	422.757.759.057	207.592.000.036	532.865.436.284	591.353.213.460	517.448.543.775	
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0	24.994.000.000	0	0	0	
Jumlah SiLPA	792.249.631.880	617.757.759.057	535.463.426.368	850.908.111.379	1.009.238.295.068.00	788.153.857.662,54

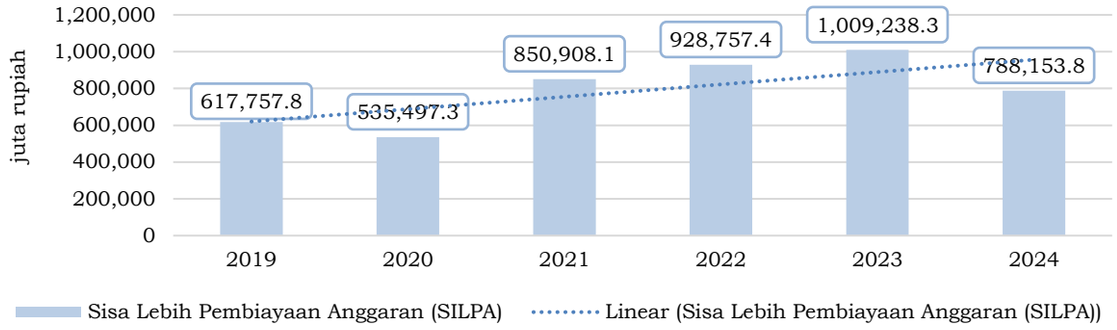
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang 2020-2025

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran SiLPA Kabupaten Tangerang menunjukkan fluktuasi. SiLPA mencapai titik terendah di tahun 2021 dengan angka Rp535.463.426.368,- yang terus menurun sejak tahun 2019. Penurunan SiLPA pada kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh pandemi covid-19. Sementara itu, titik tertinggi SiLPA Kabupaten Tangerang terjadi pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp928.757.388.059,-. Besaran SiLPA pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat semakin menurun, hal tersebut perlu diupayakan oleh pemerintah provinsi karena semakin kecil nilai SiLPA mengindikasikan semakin baik dan sinergisnya perencanaan penganggaran dengan realisasinya.

C) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, merupakan selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan neto pada tahun berkenaan. SILPA juga merupakan pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun. Analisis SILPA bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Besaran sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Tangerang didapatkan dari selisih saldo kas neraca daerah yang dihitung berdasarkan jumlah kas dan setara kas daerah dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Dalam

kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran sisa lebih (riil) pembiayaan di kabupaten ini menunjukkan besaran yang selalu meningkat.



Gambar 2.299
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk memberikan pendanaan kepada program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun anggaran 2019-2023 maka dapat disusun analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2025-2029.

Sebelum dilakukan alokasi dana ke berbagai pos pembelanjaan dan pengeluaran, besaran tiap sumber penerimaan memperhatikan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, meliputi:

a. Penerimaan retribusi pajak diutamakan alokasi dana kepada program yang berkaitan langsung dengan peningkatan layanan di mana retribusi pajak diambil
b. Penerimaan dana alokasi umum diutamakan bagi belanja umum, pegawai, dan operasional rutin pemerintah
c. Penerimaan dana alokasi khusus diprioritaskan sesuai dengan tujuan pendanaan
d. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan untuk perbaikan layanan dan perbaikan lingkungan

2.2.3.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan perhitungan proyeksi yang mengacu pada rata-rata pertumbuhan tahunan, PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang diperkirakan akan tumbuh dari 113.998,21 miliar rupiah pada tahun 2024, menjadi 147.870,29 miliar rupiah di tahun 2030, dengan laju pertumbuhan rata-rata tahunan hampir mencapai 5%. Beberapa sektor yang mengalami peningkatan signifikan dan mendominasi adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.58
Proyeksi PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 (dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Realisasi (dalam miliar rupiah)								Proyeksi (dalam miliar rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024**	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.339,40	5.498,45	5.622,08	5.781,50	5.732,64	5.863,37	5.964,17	5.947,36	6.039,69	6.133,45	6.228,67	6.325,36	6.423,56	6.523,28
B	Pertambangan dan Penggalian	35,87	37,92	38,79	36,50	33,05	29,02	29,04	30,44	29,73	29,05	28,37	27,71	27,07	26,44
C	Industri Pengolahan	33.887,15	34.778,08	35.890,71	32.752,13	34.147,21	36.003,68	38.528,02	40.305,36	41.316,54	42.353,08	43.415,63	44.504,84	45.621,37	46.765,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.408,41	1.490,37	1.427,30	1.251,07	1.397,36	1.475,50	1.468,83	1.271,76	1.253,35	1.235,21	1.217,33	1.199,71	1.182,35	1.165,23
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	70,53	74,19	79,17	85,98	90,97	92,21	97,45	99,33	104,31	109,54	115,03	120,80	126,85	133,21
F	Konstruksi	10.909,63	11.802,04	12.916,15	12.491,21	13.985,16	15.139,01	15.402,35	16.323,70	17.290,99	18.315,60	19.400,92	20.550,55	21.768,31	23.058,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.113,12	10.991,87	11.675,61	11.244,17	11.449,34	11.823,97	12.395,24	13.131,18	13.630,33	14.148,46	14.686,28	15.244,54	15.824,03	16.425,54
H	Transportasi dan Pergudangan	2.461,27	2.697,43	2.955,03	2.797,73	3.074,77	3.316,51	3.511,11	3.723,23	3.950,03	4.190,64	4.445,90	4.716,72	5.004,03	5.308,85

Lapangan Usaha		Realisasi (dalam miliar rupiah)								Proyeksi (dalam miliar rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024**	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.302,58	1.414,83	1.525,99	1.440,15	1.504,19	1.629,58	1.775,02	1.937,37	2.050,42	2.170,06	2.296,69	2.430,70	2.572,53	2.722,64
J	Informasi dan Komunikasi	4.436,55	4.807,00	5.272,80	5.753,68	6.051,14	6.465,40	7.069,44	7.527,07	8.117,52	8.754,28	9.440,99	10.181,57	10.980,25	11.841,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.128,68	4.659,19	4.692,76	4.765,93	5.055,38	5.399,38	5.373,70	5.421,83	5.637,04	5.860,79	6.093,41	6.335,28	6.586,74	6.848,19
L	Real Estat	6.385,00	7.681,62	8.410,61	8.575,46	8.838,72	9.297,47	9.780,36	10.301,27	11.029,77	11.809,79	12.644,97	13.539,22	14.496,70	15.521,90
M, N	Jasa Perusahaan	764,55	873,19	953,52	896,31	876,14	915,25	993,21	1.076,52	1.130,45	1.187,09	1.246,56	1.309,02	1.374,60	1.443,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.175,56	1.332,18	1.448,75	1.443,24	1.432,30	1.447,94	1.493,84	1.887,52	2.019,62	2.160,97	2.312,20	2.474,02	2.647,17	2.832,44
P	Jasa Pendidikan	1.844,48	2.146,00	2.324,12	2.338,53	2.312,76	2.312,25	2.468,24	2.641,30	2.780,32	2.926,67	3.080,71	3.242,86	3.413,55	3.593,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333,07	400,78	445,38	465,03	507,53	522,45	569,05	644,33	708,02	778,01	854,92	939,43	1.032,29	1.134,34
R,S.T, U	Jasa Lainnya	1.110,60	1.326,26	1.450,39	1.361,78	1.380,70	1.487,98	1.651,37	1.728,64	1.841,43	1.961,57	2.089,55	2.225,89	2.371,11	2.525,82
Produk Domestik Regional Bruto		82.183,60	92.011,40	97.129,16	93.480,40	97.869,36	103.220,97	108.570,44	113.998,21	118.929,55	124.124,23	129.598,15	135.368,23	141.452,53	147.870,29

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2.2.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A) Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam penggerakan struktur APBD. Pendapatan adalah sumber pendanaan atau roda yang menggerakkan penyelenggaraan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Pendapatan daerah didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen penting dalam pendapatan daerah yang dapat menentukan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Arah kebijakan daerah pendorong kenaikan PAD Kabupaten Tangerang antara lain:

a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak.
c. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola dalam rangka meningkatkan PAD
d. Optimalisasi kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
e. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data seluruh potensi sumber pendapatan daerah.
f. Peningkatan peran dan fungsi petugas pelayanan dan pengamatan potensi yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan.
g. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah.
h. Pengoptimalan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
i. Peningkatan pelayanan publik dalam hal kecepatan pelayanan pembayaran maupun dari kemudahan untuk memperoleh informasi.
j. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah.
k. Penerapan pola insentif dan disinsentif.
l. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung peningkatan pendapatan daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan dana yang bertujuan untuk pelaksanaan desentralisasi atau mempersempit jarak ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pendapatan transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi hasil pajak/bukan pajak.

Arah kebijakan daerah yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan transfer Kabupaten Tangerang antara lain:

a. Peningkatan koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam rangka alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Mengintensifikasikan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga tingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan
c. Mengoptimalkan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat dalam

memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berada di Kabupaten Tangerang, serta mendukung pencapaian visi dan misi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dana tersebut meliputi dana hibah, baik dari kementerian, lembaga, maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana darurat, dan dana lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan daerah yang dilakukan untuk meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dengan kementerian lembaga.

Berdasarkan capaian kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, maka pendapatan sampai dengan tahun 2029 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi.

Tabel 2.59
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH						
4:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.616.874.819.974,54	4.829.025.720.935	4.975.700.000.000	5.196.850.000.000	5.499.000.000.000	5.638.125.000.000
4:01:01	Pajak Daerah	3.615.835.888.430	3.843.600.000.000	4.035.700.000.000	4.240.850.000.000	4.525.000.000.000	4.638.125.000.000
4:01:02	Retribusi Daerah	210.912.730.996	194.899.255.391	183.000.000.000	188.000.000.000	200.000.000.000	220.000.000.000
4:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.606.042.461	67.312.451.838	62.000.000.000	63.000.000.000	64.000.000.000	65.000.000.000
4:01:04	Lain-lain PAD yang Sah	729.520.158.087,54	723.214.013.706	695.000.000.000	705.000.000.000	710.000.000.000	715.000.000.000
4:02	PENDAPATAN TRANSFER	3.883.641.267.461	3.543.189.648.887	3.543.189.648.887	3.543.189.648.887	3.543.189.648.887	3.543.189.648.887
4:02:01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		3.184.669.699.000	3.184.669.699.000	3.184.669.699.000	3.184.669.699.000	3.184.669.699.000
4:02:02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		358.519.949.887	358.519.949.887	358.519.949.887	358.519.949.887	358.519.949.887
4:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.394.000.000	0	0	0	0	0
4:03:03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		4.829.025.720.935	4.975.700.000.000	5.196.850.000.000	5.499.000.000.000	5.638.125.000.000
	Jumlah Pendapatan	8.505.910.087.435,54	8.372.215.369.822	8.518.889.648.887	8.740.039.648.887	9.042.189.648.887	9.181.314.648.887

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Penyusunan proyeksi keuangan Kabupaten Tangerang didasarkan pada kinerja dalam lima tahun terakhir dan target pendapatan asli daerah pada RPJMD tahun 2024 - 2029 dari instansi terkait. Selain itu, dalam penyusunan proyeksi ini juga menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Optimalisasi sektor perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten Tangerang sebagai kawasan penyangga Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan pendapatan dapat terjadi seiring dengan pergeseran pertumbuhan pusat-pusat perkotaan.
- Optimalisasi pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai pusat transportasi dan logistik nasional yang mendorong perekonomian wilayah khususnya pendapatan daerah

B) Kebijakan dan Proyeksi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah bertujuan untuk memberikan dorongan atau stimulan terhadap pengembangan ekonomi daerah secara makro dalam kerangka pengembangan yang memberikan efek *multiplier* kepada kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tangerang terdiri atas:

a. Belanja wajib dan mengikat ditentukan sesuai dengan perundang-undangan;
b. Belanja program dan kegiatan diprioritaskan terhadap hal-hal yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan memiliki efek *multiplier* dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
c. Belanja pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah ditentukan sesuai fungsi dan tugas pencapaian sasaran Perangkat Daerah dan Pembangunan daerah;
d. Rasionalisasi terhadap belanja personil daerah secara selektif;
e. Mengikuti *mandatory spending* yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan meliputi alokasi anggaran pendidikan, alokasi anggaran kesehatan, dana transfer umum, serta alokasi dana desa.

-

Tabel 2.60
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
5	BELANJA						
5:01	BELANJA OPERASI	5.834.315.106.367	6.025.870.362.449	6.180.092.220.677	6.227.305.677.335	6.395.502.052.188	6.295.502.052.188
5:01:01	Belanja Pegawai	2.406.476.664.779	2.805.311.576.632	2.880.935.285.540	2.880.935.285.540	2.880.935.285.540	2.880.935.285.540
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	3.014.360.678.622	2.763.849.204.330	2.881.768.747.773	2.925.857.185.162	2.945.857.185.162	2.945.857.185.162
5:01:05	Belanja Hibah	396.279.562.966.00	436.792.287.368	397.470.893.245	400.595.912.514	548.792.287.367	448.792.287.367
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	17.198.200.000,00	19.917.294.119	19.917.294.119	19.917.294.119	19.917.294.119	19.917.294.119
5:02	BELANJA MODAL	1.990.722.872.612	1.576.196.389.334	1.550.628.735.710	1.703.550.279.052	1.807.888.904.199	2.033.701.404.198
5:02:01	Belanja Modal Tanah	391.732.280.665	164.207.760.806	138.640.107.182	120.844.091.105	85.717.477.439	85.717.477.439
5:02:02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	535.315.347.072	301.368.823.256	301.368.823.256	383.104.289.599	443.923.334.862	506.829.584.862
5:02:03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.580.002.197	419.511.745.882	419.511.745.882	457.632.650.940	657.632.650.940	657.632.650.940
5:02:04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	708.059.201.545	657.496.997.282	657.496.997.282	679.940.417.994	593.144.120.086	693.144.120.086
5:02:05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.492.455.730	26.055.698.667	26.055.698.667	50.558.964.487	16.001.455.944	78.907.705.944
5:02:06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.543.585.403	7.555.363.441	7.555.363.441	11.469.864.927	11.469.864.927	11.469.864.927
5:03	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.136.742.454	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
5:03:01	Belanja Tidak Terduga	20.136.742.454	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
5:04	BELANJA TRANSFER	869.579.700.196	994.183.692.500	1.023.798.692.500	1.037.111.192.500	994.183.692.500	1.023.798.692.500
5:04:01	Belanja Bagi Hasil	347.428.524.162	442.885.000.000	472.500.000.000	485.812.500.000	442.885.000.000	472.500.000.000
5:04:02	Belanja Bantuan Keuangan	522.151.176.034	551.298.692.500	551.298.692.500	551.298.692.500	551.298.692.500	551.298.692.500
	Jumlah Belanja	7.845.174.721.433	8.607.215.369.822	8.753.889.648.887	8.975.039.648.887	9.277.189.648.887	9.416.314.648.887
	Total Surplus/(Defisit)	-208.844.334.193,46	-235.000.000.000	-235.000.000.000	-235.000.000.000	-235.000.000.000	-235.000.000.000

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah juga mengalami peningkatan. Penyusunan proyeksi belanja daerah ini sesuai dengan kondisi lima tahun terakhir dengan beberapa asumsi meliputi:

- Optimalisasi penggunaan dana pada belanja operasional seiring dengan perkembangan isu strategis mengenai pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan layanan umum;
- Sementara itu, belanja modal diproyeksikan menurun seiring dengan mulai terpenuhinya kebutuhan pembangunan fisik wilayah di Kabupaten Tangerang. Adapun penggunaan dana dioptimalkan dalam upaya perwujudan pengentasan isu-isu strategis di Kabupaten Tangerang.

C) Kebijakan dan Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih, baik defisit maupun surplus, antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan terdiri atas dua yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman obligasi, dan hasil penjualan aset daerah serta penerimaan piutang. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran utang. Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang terdiri atas:

a. Mengupayakan penurunan SILPA secara bertahap. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki perencanaan dan penganggaran APBD;
b. Optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat;
c. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan keuangan daerah.

Tabel 2.61
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030

Kode	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
6	PEMBIAYAAN						
6:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.009.238.295.068	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
6:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
6:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.240.000.000.00	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
6:02:02	Penyertaan Modal Daerah		15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Pinjaman Daerah						
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto		235.000.000.000	235.000.000.000	235.000.000.000	235.000.000.000	235.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	788.153.857.662,54	0	0	0	0	0

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, kerangka pendanaan akan dilakukan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Kapasitas riil direncanakan memiliki prioritas dalam belanja, yaitu Belanja Prioritas I untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan standar pelayanan minimal, Belanja Prioritas II untuk belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan Belanja Prioritas III yaitu Belanja Urusan Lainnya.

Tabel 2.62
Proyeksi Pengeluaran Kapasitas Riil Kabupaten Tangerang Sesuai Prioritas Tahun 2025-2030

URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	6.980.014.642.469,80	7.486.003.292.808,38	7.935.687.954.281,79	8.412.179.671.884,86	8.918.868.365.523,43	9.452.932.013.319,04	10.015.642.921.571,80
Belanja Prioritas I (Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal)	2.917.554.691.617,90	3.171.571.123.923,14	3.445.858.086.684,35	3.741.958.986.043,18	4.061.531.490.021,67	4.406.355.838.026,43	4.778.242.133.633,59
Belanja Prioritas II (Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah)	2.843.721.965.596,33	3.020.102.518.219,67	3.142.880.907.318,21	3.269.154.480.089,18	3.400.135.812.851,23	3.532.603.322.704,83	3.666.323.447.092,49
Belanja Urusan Lainnya	1.218.737.985.255,57	1.294.329.650.665,57	1.346.948.960.279,23	1.401.066.205.752,50	1.457.201.062.650,53	1.513.972.852.587,78	1.571.281.477.325,32

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2.2.3.4 Skema Pendanaan Pembangunan Daerah

Pendanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang bersumber dari pendanaan pemerintah dan pendanaan non-pemerintah harus digunakan secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan dampak pembangunan serta mendorong partisipasi swasta / non-pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pendanaan daerah.

Dalam lima tahun terakhir, tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan belanja dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas seiring dengan tuntutan penyediaan fasilitas pelayanan publik. Selain keterbatasan ruang fiskal daerah, ketergantungan pada dana transfer pusat menjadi tantangan utama dalam mendanai proyek pembangunan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan pendanaan yang lebih inovatif, yang dikenal sebagai *creative financing*.

Creative financing merujuk pada serangkaian mekanisme pembiayaan non-tradisional yang dirancang untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan instrumen pasar keuangan, serta partisipasi publik dan swasta secara lebih aktif. Mekanisme tersebut tidak sekadar inovasi finansial, melainkan strategi yang berorientasi pada *leveraging asset* dan potensi fiskal dengan tiga prinsip utama berupa diversifikasi sumber pendanaan, mitigasi risiko fiskal, serta efisiensi dan akuntabilitas.

Maka dari itu, diperlukan penjajakan berbagai opsi instrumen *creative financing* dalam mendukung program pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut.

1. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

   Skema pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan pemerintah dan badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antar pihak. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat 22 jenis infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat dikerja samakan dalam KPBU seperti penyediaan hunian, SPAM, pengolahan sampah, dan lain sebagainya. Skema ini memungkinkan sektor swasta untuk berperan dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur publik dengan prinsip pembagian risiko dan keuntungan.
2. Penerbitan Sukuk Daerah

   Sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen pembiayaan berbasis aset (*asset-backed securities*) yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah pusat telah sukses menerbitkan sukuk negara, termasuk untuk proyek infrastruktur melalui skema *project-based* sukuk. Inovasi ini berpotensi direplikasi di tingkat daerah.
3. Pinjaman Daerah

   Skema pembiayaan alternatif melalui utang daerah dalam suatu perjanjian pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank dan non-bank maupun lembaga lainnya, penerbitan obligasi daerah, dan lain sebagainya. Skema ini dapat dilakukan dengan syarat pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai, tingkat risiko yang terkendali, jenis proyek strategis dan investasi jangka panjang.
4. *Green Bonds*

   Green bonds adalah obligasi yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk dan keberhasilan ini membuka peluang untuk replikasi di tingkat lokal.
5. Pemanfaatan Aset Daerah

Pemanfaatan aset daerah yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan pendapatan melalui berbagai skema pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah (BGS). Selain itu, pemberian penugasan terhadap BUMD dalam melakukan kerja sama *Business-to-Business* (B2B) untuk pemanfaatan aset daerah.

6. *Crowdfunding* (Hibah) untuk Pembangunan Sosial

   Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dari publik melalui platform digital. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi atau berkolaborasi dengan *platform crowdfunding* untuk mendanai proyek-proyek berdampak langsung, seperti pembangunan fasilitas publik atau program beasiswa.

7. Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

   Skema pembiayaan alternatif berupa dukungan perusahaan-perusahaan yang dapat disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah, misalnya pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kegiatan konservasi lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya.

8. Pendanaan terkait Pemanfaatan Ruang

   Alternatif pendanaan yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan ruang, seperti Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), peralihan hak membangun atau *Transfer Development Rights* (TDR), dan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

9. Pendanaan Berbasis Iklim atau *Green Climate Fund* (GCF)

   Penyaluran dana penanggulangan dampak perubahan iklim menjadi salah satu pembiayaan kreatif dalam mendukung pembangunan rendah karbon.

Tabel 2.63
Analisis Perbandingan Pemanfaatan *Creative Financing* dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

	KPBU (PPP)	Sukuk Daerah	*Green Bonds*	*Crowdfunding*
Jenis Proyek yang Sesuai	Infrastruktur publik skala besar: jalan, jembatan, air minum, sanitasi, transportasi	Proyek dengan nilai keagamaan/sosial, pembangunan pasar, rumah sakit, sekolah	Proyek ramah lingkungan: energi terbarukan, pengelolaan sampah, transportasi publik rendah emisi	Proyek kecil atau komunitas: fasilitas umum, UMKM, pendidikan, pelestarian budaya
Karakteristik Utama	• jangka panjang • berbasis pengembalian investasi (*user charge*/ *tariff* atau *availability payment*) • melibatkan investor swasta	• berbasis aset (*underlying asset*) • mengacu pada prinsip syariah • diterbitkan oleh Pemda dengan persetujuan pusat dan OJK	• mengacu pada standar lingkungan (*green taxonomy*) • dapat diterbitkan daerah jika memenuhi persyaratan teknis dan regulatif	• platform daring berbasis kontribusi publik • bersifat sosial atau investasi mikro
Kelebihan	• mengurangi beban APBD langsung • transfer risiko kepada mitra swasta • meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek	• menarik investor berbasis syariah • potensi meningkatkan inklusi keuangan syariah daerah • dapat memperkuat citra dan nilai religius daerah	• akses pada pasar keuangan berwawasan lingkungan • dapat menarik investor ESG • mendukung target pembangunan rendah karbon	• pelibatan masyarakat secara langsung • transparan dan cepat dihimpun • cocok untuk proyek bernilai kecil-menengah
Tantangan Implementasi	• proses persiapan kompleks dan panjang • membutuhkan SDM dan kajian kelayakan yang kuat • resiko hukum dan kontraktual	• regulasi ketat dan teknis kompleks • terbatasnya SDM yang memahami sukuk • harus ada aset yang jelas sebagai dasar penerbitan	• harus memenuhi verifikasi “green” • perlu pelaporan berkelanjutan • proyek harus benar-benar ramah lingkungan	• tidak cocok untuk proyek berskala besar • daya tarik terbatas jika tidak dikomunikasikan dengan baik • perlu platform legal dan akuntabel

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2025

Skema *creative financing* merupakan bentuk inovasi pendanaan pembangunan utamanya pengembangan infrastruktur strategis dan jangka panjang, terdapat beberapa poin penting peluang implementasi skema *creative financing*.

1. Diversifikasi Sumber Pendanaan Pembangunan

   Salah satu pilar utama dalam strategi pembiayaan pembangunan daerah adalah diversifikasi sumber pendanaan. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan alokasi belanja rutin dalam APBD sering kali membatasi ruang fiskal daerah untuk melakukan investasi publik yang bersifat strategis dan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara proaktif mengeksplorasi alternatif pendanaan di luar skema konvensional, seperti melalui kemitraan dengan sektor swasta, pemanfaatan aset daerah, atau penerbitan surat utang daerah. Diversifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas fiskal dan memperluas cakupan pembiayaan pembangunan tanpa membebani anggaran secara langsung.

   Penerapan pendekatan *blended finance*, yang mengombinasikan dana publik dan swasta, juga memberikan peluang strategis untuk memanfaatkan potensi dana filantropi, pembiayaan berbasis hasil (*results-based financing*), maupun pendanaan dari lembaga keuangan internasional. Di sisi lain, pengembangan ekosistem keuangan daerah, termasuk pasar obligasi daerah dan pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan lokal, menjadi prasyarat penting dalam mendorong diversifikasi sumber dana yang efektif dan berkelanjutan. Strategi ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dasar, layanan publik, dan program strategis lainnya.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Proyek

   Tata kelola proyek pembangunan yang efektif merupakan fondasi bagi keberhasilan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif. Skema seperti Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, maupun pembiayaan hijau memerlukan kepastian hukum, transparansi proses, serta akuntabilitas yang tinggi dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pengelolaan proyek menjadi urgensi yang tidak terelakkan apabila pemerintah daerah ingin menjadi aktor yang kredibel di mata investor dan mitra pembangunan.

   Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan studi kelayakan, analisis risiko, dan manajemen kontrak menjadi aspek krusial. Selain itu, penyusunan daftar proyek prioritas (*project pipeline*) yang terstruktur dan terbuka akan meningkatkan daya tarik investasi serta mempermudah proses matching dengan skema pembiayaan yang sesuai. Dalam jangka panjang, perbaikan tata kelola proyek tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, tetapi juga memperkuat daya saing daerah sebagai destinasi investasi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

   Pendekatan pembiayaan pembangunan yang inovatif menuntut adanya pergeseran paradigma dari model sentralistik menuju pendekatan kolaboratif. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha bukan hanya relevan dalam konteks sosial-politik, melainkan juga memiliki dimensi ekonomi dan keuangan yang signifikan. Melalui skema seperti *crowdfunding*, *community bonds*, atau program

corporate social responsibility (CSR) yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat menghimpun dana sekaligus memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap program pembangunan.

Peningkatan partisipasi juga memperkuat prinsip inklusivitas dalam pembangunan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan legitimasi kebijakan publik. Melibatkan pelaku usaha lokal dalam proyek pembangunan daerah melalui model kolaboratif, baik sebagai penyedia jasa, mitra investasi, maupun konsultan teknis, juga dapat mempercepat alih teknologi dan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Di era digital, platform partisipatif berbasis teknologi informasi juga membuka ruang baru untuk pelibatan warga secara real-time dalam proses perencanaan dan penganggaran.

4. Dukungan Kebijakan Nasional dan Regulasi

   Keberhasilan implementasi pembiayaan inovatif di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kerangka kebijakan dan regulasi nasional yang mendukung. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah menginisiasi berbagai langkah strategis, seperti pembentukan Komite KPBU, penerbitan Peraturan Presiden terkait pembiayaan infrastruktur non-APBN, serta penguatan kerangka hukum penerbitan obligasi daerah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengembangkan panduan penerbitan green bonds dan mendorong penguatan regulasi pasar modal daerah.

   Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan seperti ketidakterpaduan antar-regulasi, keterbatasan panduan teknis, serta lambatnya proses sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting, termasuk dalam bentuk penyediaan asistensi teknis, *capacity building*, serta insentif fiskal yang mendorong keberanian daerah untuk berinovasi. Harmonisasi regulasi dan penciptaan ekosistem hukum yang kondusif akan mempercepat penetrasi instrumen *creative financing* dalam kerangka pembangunan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Akan tetapi dalam menjalankan skema *creative financing*, terdapat beberapa risiko dan tantangan utamanya berkaitan dengan kapasitas pemerintah dan dukungan regulasi, yaitu sebagai berikut.

1. Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

   Salah satu tantangan mendasar dalam penerapan skema pembiayaan inovatif di daerah adalah terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Banyak pemerintah daerah masih menghadapi kekurangan dalam hal keahlian teknis yang diperlukan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengelola skema pembiayaan alternatif seperti Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, maupun instrumen pasar modal lainnya. Keterbatasan ini mencakup pemahaman atas analisis kelayakan finansial, manajemen risiko, serta pemrosesan dokumen hukum dan kontrak kompleks.

   Selain itu, kelembagaan di tingkat daerah sering belum memiliki unit khusus atau struktur organisasi yang secara permanen mengelola portofolio pembiayaan non-konvensional. Ketiadaan unit semacam ini membuat proses koordinasi internal menjadi tidak efisien dan memperlambat pengambilan keputusan. Tanpa adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM secara sistematis, sulit bagi daerah untuk menjadi mitra yang kredibel dan

kompetitif di mata investor maupun lembaga pembiayaan, sehingga berpotensi menghambat realisasi proyek pembangunan strategis yang berbasis *creative financing*.

2. Keterbatasan Aset dan Proyek Layak Finansial

   Salah satu prasyarat dalam menarik pembiayaan kreatif adalah keberadaan proyek yang secara finansial layak (*bankable*) dan dapat menarik minat investor atau mitra pembiayaan. Namun, banyak daerah menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek pembangunan yang memenuhi standar kelayakan tersebut. Faktor-faktor seperti skala proyek yang kecil, ketidakpastian pendapatan, atau model bisnis yang belum jelas sering kali menjadi penghalang dalam mengakses skema pembiayaan alternatif.

   Di sisi lain, aset milik pemerintah daerah yang berpotensi dimonetisasi atau dijadikan jaminan proyek sering kali belum terinventarisasi secara sistematis, atau menghadapi kendala hukum dan administrasi dalam pemanfaatannya. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam mengembangkan skema seperti *land value capture*, pemanfaatan aset melalui *securitization*, atau penggunaan barang milik daerah sebagai kontribusi non-tunai dalam KPBU. Tanpa pengelolaan aset yang aktif dan strategis, upaya diversifikasi pendanaan melalui mekanisme kreatif akan sulit diwujudkan secara optimal.

3. Kepastian Hukum dan Regulasi Teknis

   Kerangka hukum dan regulasi yang mendukung merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi *creative financing*. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pembiayaan alternatif, seperti Peraturan Presiden tentang KPBU dan regulasi OJK tentang penerbitan obligasi daerah, namun di tingkat teknis masih terdapat celah regulatif yang menjadi hambatan. Ketidakjelasan prosedur, tumpang tindih kewenangan antar-instansi, serta kurangnya panduan teknis sering menciptakan ketidakpastian dalam proses perencanaan dan implementasi proyek.

   Ketiadaan standar operasional baku untuk skema pembiayaan baru juga menimbulkan risiko hukum bagi pejabat daerah yang mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, keraguan terhadap perlindungan hukum menghambat inisiatif-inisiatif inovatif, meskipun proyek tersebut potensial secara ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya harmonisasi regulasi dan pembentukan sistem pendampingan hukum yang memadai, agar iklim kelembagaan di daerah lebih kondusif terhadap inovasi dalam pembiayaan pembangunan.

4. Tantangan Sosial dan Politik

   Di samping aspek teknis dan kelembagaan, tantangan sosial dan politik juga mempengaruhi kelancaran implementasi skema *creative financing*. Persepsi publik terhadap kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta atau penggunaan dana publik untuk proyek berisiko sering kali bersifat skeptis. Ketika komunikasi publik tidak dilakukan secara efektif, potensi resistensi sosial meningkat, terutama jika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau tidak melihat manfaat langsung dari proyek yang didanai.

   Secara politik, dinamika dalam lembaga legislatif daerah juga dapat menjadi faktor penghambat, khususnya apabila terdapat ketidaksepahaman atau resistensi terhadap pendekatan baru dalam

pembiayaan pembangunan. Proses persetujuan proyek yang melibatkan modal swasta atau instrumen utang, seperti obligasi daerah, sering kali menghadapi perdebatan panjang yang tidak selalu berbasis pada analisis ekonomi, melainkan pertimbangan politis jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang transparan dan pendekatan partisipatif yang inklusif agar resistensi sosial-politik dapat diminimalkan dan legitimasi proyek dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi strategis dalam mewadahi *creative financing* sebagai skema pembiayaan alternatif unuk pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Bappenas (2025)[5] merumuskan beberapa strategi dalam meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah antara lain

- Memperkuat kerangka perencanaan pendanaan/pembiayaan pembangunan daerah melalui alokasi pendanaan berbasis kriteria serta tata kelola yang akuntabel dalam seluruh tahapan mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, implementasi, dan audit.
- Perluasan sumber-sumber pendanaan melalui dukungan regulasi sesuai peraturan perundang-undangan serta konsolidasi dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah untuk pendanaan jangka panjang
- Dukungan kebijakan insentif untuk menarik investasi pembiayaan non-pemerintah melalui fasilitasi skema-skema pendanaan yang dilakukan swasta.
- Berkolaborasi lintas sektor (nasional dan global) untuk menarik investasi swasta yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan.
- Memperkuat sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pendanaan proyek-proyek pendanaan APBD dan sumber pendanaan lainnya
- Mengembangkan skema/strategi model bisnis kerja sama pemerintah dan badan usaha

Berdasarkan peluang, tantangan, dan arahan strategis dari kebijakan, maka dari itu dirumuskan poin-poin arah kebijakan dalam menjalankan *creative financing* dalam RPJMD Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut.

1. Penguatan Perencanaan dan Identifikasi Proyek Potensial

   Langkah awal yang fundamental dalam penerapan skema *creative financing* adalah penguatan sistem perencanaan pembangunan yang mampu mengidentifikasi proyek-proyek potensial dengan kelayakan finansial dan sosial yang tinggi. Proyek semacam ini harus disusun secara sistematis dalam bentuk *project pipeline* yang dapat dijadikan acuan bagi calon investor dan mitra pembiayaan. Penguatan perencanaan ini tidak hanya menyangkut aspek teknokratik, tetapi juga memerlukan integrasi antara proses perencanaan fiskal dan strategi pembiayaan non-konvensional.

   Maka dari itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme evaluasi kelayakan proyek tidak hanya dari sisi manfaat sosial (social return), tetapi juga dari aspek keekonomian dan kelayakan komersial (*bankability*). Dalam praktiknya, proyek-proyek prioritas pembangunan seperti infrastruktur transportasi, energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan sanitasi sering kali memiliki

[5] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

potensi untuk dikembangkan melalui skema pembiayaan alternatif. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, potensi ini dapat dioptimalkan untuk mengurangi beban anggaran dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

2. Pembentukan Unit Teknis Pendanaan Alternatif

   Dalam mendukung implementasi *creative financing* secara terstruktur dan berkelanjutan, perlu dibentuk unit khusus di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas menangani perencanaan, negosiasi, dan pengelolaan pendanaan alternatif. Unit ini berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas perangkat daerah dan sekaligus menjadi *clearing house* bagi proyek-proyek yang potensial untuk dibiayai melalui skema non-APBD. Di beberapa negara, keberadaan *Project Development Facility* (PDF) atau *Public-Private Partnership Unit* (PPPU) telah terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan proyek kreatif secara signifikan. Unit tersebu diharapkan memiliki kewenangan teknis dan administratif untuk melakukan evaluasi dokumen kelayakan, memfasilitasi penyusunan skema pembiayaan, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan calon mitra pembiayaan, baik dari sektor swasta, lembaga donor, maupun pasar modal. Dalam jangka panjang, unit ini dapat memainkan peran strategis sebagai katalisator bagi pengembangan ekosistem *creative financing* yang lebih mapan dan profesional di tingkat daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

   Keberhasilan implementasi kebijakan pendanaan inovatif sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi reformasi pembiayaan pembangunan. Aparatur daerah perlu dibekali dengan kompetensi teknis yang memadai dalam aspek perencanaan proyek, analisis keuangan, manajemen risiko, serta pemahaman atas kerangka hukum dan regulasi pembiayaan alternatif. Kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan tematik, lokakarya terpadu, pertukaran pengetahuan antar-daerah (*peer learning*), maupun pendampingan langsung oleh lembaga teknis atau mitra pembangunan. Selain itu, sinergi dengan perguruan tinggi, asosiasi profesional, dan lembaga riset juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan basis pengetahuan yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program *creative financing* secara kredibel dan berkelanjutan.

4. Membangun Kolaborasi Multipihak

   Pendekatan *creative financing* pada hakikatnya bersandar pada kolaborasi antar-aktor pembangunan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek berskala besar, terutama yang memerlukan pembiayaan jangka panjang dan kompleksitas teknis tinggi. Oleh karena itu, membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi krusial dalam menciptakan tata kelola kolaboratif yang produktif. Kolaborasi multipihak juga menciptakan ruang bagi inovasi sosial dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Di sisi lain, keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan akan memperkuat legitimasi dan memperbesar kemungkinan keberhasilan proyek. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi ruang dialog, membentuk forum kemitraan

pembangunan, atau meluncurkan program partisipatif yang mendorong kontribusi nyata dari berbagai pihak dalam kerangka pembiayaan inovatif.

5. Peningkatan Akuntabilitas dan Tata Kelola

   Creative financing membawa peluang besar, namun juga menuntut standar tata kelola yang lebih tinggi. Mengingat sebagian skema pembiayaan alternatif bersifat jangka panjang, kompleks, dan melibatkan aktor non-pemerintah, maka transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan menjadi sangat penting. Kegagalan dalam mengelola proyek dengan baik dapat berimplikasi pada risiko fiskal dan reputasi yang signifikan bagi pemerintah daerah. Maka dari itu, sistem pengawasan internal perlu diperkuat, termasuk dalam aspek audit proyek, pengendalian mutu, serta pelaporan kinerja secara berkala. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *value for money* (VfM) dan *good governance* harus dijadikan acuan dalam pemilihan mitra, penentuan skema pembiayaan, hingga penilaian dampak pembangunan. Keterbukaan informasi kepada publik dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan proyek juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan inisiatif *creative financing* di tingkat daerah.

Creative financing tidak hanya sekadar pendekatan teknis pembiayaan, tetapi merupakan strategi pembangunan yang memadukan inovasi kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan optimalisasi aset daerah. Dalam konteks penyusunan RPJMD, integrasi pendekatan *creative financing* dapat menjadi instrumen kunci untuk mendorong percepatan pembangunan. Melalui pemanfaatan skema *creative financing* (e.g. KPBU, sukuk, *green bond*, *crowdfunding*, dan lain sebagainya), pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperkuat kapasitas pembiayaan dan tata kelola pembangunan. Keberhasilan implementasinya ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, serta komitmen politik terhadap inovasi. Dengan mengintegrasikan kerangka pendanaan inovatif ke dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat membangun fondasi pembangunan jangka menengah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisis permasalahan dan isu strategis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Tangerang lima tahun ke depan. Rumusan permasalahan dan isu ini menjadi dasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk menjaga keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan pembangunan yang dicanangkan.

2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan formulasi yang tersusun atas *gap* kondisi capaian pembangunan dan hasil jaringan permasalahan yang dirasakan oleh perangkat daerah. Analisis permasalahan digunakan untuk mengetahui kondisi yang menghambat pencapaian pembangunan Kabupaten Tangerang.

2.3.1.1 Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Geografi dan demografi merupakan dua hal yang saling terkait dan mendasari pembangunan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, kondisi geografi dan demografi perlu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Tangerang.

A) Permasalahan Geografi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang strategis yang dilewati oleh jalur nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Letaknya yang strategis berdampak pada tingginya pertumbuhan wilayah ini. Pertumbuhan metropolitan Jabodetabek berpengaruh erat pada tumbuhnya perkotaan di wilayah ini. Di sisi lain pertumbuhan ini berakibat pada tingginya alih fungsi lahan dan pertumbuhan lahan terbangun di wilayah ini. Hal tersebut dapat berakibat pada makin menurunnya kualitas lingkungan.

Pesatnya pertumbuhan perkotaan ini dapat meningkatkan risiko bencana di wilayah ini seperti bencana banjir maupun abrasi. Peningkatan risiko kebencanaan ini dapat berpengaruh erat pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain mengancam kebencanaan, alih fungsi lahan pertanian dapat mengancam ketahanan pangan di wilayah ini.

B) Permasalahan Demografi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini cenderung terpusat pada kawasan perkotaan seperti Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kelapa Dua, dan Kecamatan Sepatan. Sedangkan di wilayah lain proporsi penduduk cenderung sedang. Tingginya penduduk di wilayah ini berakibat pada ketidaksesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, memerlukan perencanaan dan penataan yang matang untuk mengembangkan Kabupaten Tangerang.

Penduduk di wilayah ini memiliki rasio jenis kelamin yang berkisar di angka 100 yang berarti jumlah perempuan dan laki-laki di wilayah ini cenderung setara. Sedangkan jika dilihat dari distribusi usia, usia penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh penduduk usia muda atau piramida penduduk ekspansif. Hal ini menunjukkan bonus demografi yang sedang berlangsung di wilayah ini. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang.

2.3.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Kabupaten Tangerang disokong oleh sektor industri pengolahan. Akan tetapi, pertumbuhan industri pengolahan cenderung melemah atau mengalami deindustrialisasi dini. Pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Tangerang cenderung stagnan ditandai dengan laju

pertumbuhan ekonomi yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Selain itu, indikator Persentase Penduduk Miskin cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Permasalahan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan dengan indikator persentase penduduk berpendapatan Desil 1-4 (atau 40% terendah) sebesar 35,2% atau sekitar 1,2 juta jiwa. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Kualitas masyarakat Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sayangnya nilai tersebut masih jauh jadi kondisi Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Tangerang. Selain itu, di Kabupaten Tangerang masih terdapat balita dengan gizi buruk dan kurang gizi. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi peningkatan kualitas gizi balita. Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang masih belum optimal.

2.3.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing

Aspek daya saing Kabupaten Tangerang dilihat dari empat unsur yaitu ekonomi daerah, SDM, infrastruktur daerah, iklim investasi, serta riset dan inovasi. Berdasarkan perhitungan indeks daya saing daerah, Kabupaten Tangerang memiliki komponen pilar rendah pada unsur keterampilan, pasar tenaga kerja, serta sistem keuangan jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional. Hal ini menandakan bahwa produktivitas Kabupaten Tangerang terhadap tiga unsur tersebut masih belum optimal. Jika melihat dari unsur ekonomi daerah, Kabupaten Tangerang memiliki rasio kewirausahaan daerah dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita yang stagnan menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat belum meningkat.

Aspek daya saing dari unsur SDM, dapat dilihat dari data angka partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja serta proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Kabupaten Tangerang yang tidak bekerja. Dari unsur infrastruktur dan iklim investasi, dapat dilihat dari angka kriminalitas yang tertangani meningkat, bahwa Kabupaten Tangerang memiliki masalah dalam ketenteraman dan keamanan masyarakat.

Sementara, dari unsur riset dan inovasi, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM peneliti, baik secara jumlah fungsional maupun keahlian dan keterampilan yang sesuai kebutuhan riset. Tidak hanya kualitas dan kuantitas SDM, terbatasnya anggaran daerah dalam pengadaan riset memengaruhi keberlanjutan kegiatan. Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan riset dan inovasi adalah hambatan kultural birokrasi, kolaborasi antar pihak belum optimal, serta hilirisasi dan komersialisasi yang belum optimal. Dibutuhkan penyelesaian yang dilakukan secara maksimal sehingga riset dan inovasi dapat menjadi peluang daerah dalam menyongsong era globalisasi dan transformasi digital. Untuk mendukung upaya tersebut, perlu penciptaan lingkungan riset yang kondusif melalui penetapan regulasi, dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penyelesaian masalah-masalah di atas perlu diutamakan, mengingat kelima unsur tersebut merupakan dasar dari kemampuan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

2.3.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tangerang memiliki beberapa permasalahan yang terbagi dalam aspek pelayanan umum meliputi fokus pelayanan urusan wajib dasar, fokus pelayanan urusan wajib non dasar,

fokus layanan urusan pilihan, fokus pendukung urusan, fokus penunjang urusan, dan fokus pengawas urusan. Penjelasan permasalahan aspek pelayanan umum terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Permasalahan Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Tangerang

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar			
1	Pendidikan	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Masih kurangnya kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi minimal
			Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata
			Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan murah
			Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya Pendidikan
			Belum tersedianya kebijakan daerah yang terbarukan
		Belum optimalnya pembentukan karakter peserta didik	Menurunnya karakter siswa dalam hal spiritual, kreativitas, kemandirian, nalar kritis, kolaborasi dan kebhinekaan global
			Masih terjadi perundungan, kekerasan dan penyalahgunaan narkotika di Satuan Pendidikan
		Belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat	Minat baca masyarakat yang masih rendah
			Kurangnya akses masyarakat terhadap buku fisik/digital
		Kurangnya ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal
		Belum maksimalnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas	Masih terbatasnya akses peserta didik penyandang disabilitas dalam pendidikan
			Masih terdapat siswa yang putus sekolah
2	Kesehatan	Belum meratanya distribusi fasilitas kesehatan sesuai standar	Belum optimalnya integrasi layanan kesehatan dan koordinasi lintas sektor
			Masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan sarana prasarana, akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar
			Pertambahan penduduk yang tidak terduga melebihi ketersediaan alat kesehatan di suatu wilayah
			Kurangnya kesesuaian dan ketersediaan peralatan medis dan sediaan obat
			Sistem informasi kesehatan yang kurang terintegrasi

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan kesehatan	Masih terdapat kesenjangan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)
			Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan
			Belum optimalnya rekrutmen tenaga kesehatan spesialis
			Masih banyak terjadi pengunduran diri tenaga kesehatan spesialis (PNS) dari RS pemerintah
			Belum optimalnya kompetensi SDM kesehatan
		Belum optimalnya pelayanan jaminan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat	Kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan
			PHK dari perusahaan menyebabkan peralihan covering jaminan kesehatan bagi pekerja
		Belum optimalnya tingkat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat (*PHBS)*
			Belum adanya fasilitator masyarakat/program yang mendukung pembentukan lingkungan sehat
			Rasio jumlah fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak belum sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk
			Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil
			Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan neonatal
			Kurangnya asupan pangan bergizi pada masa kehamilan dan 1000 HPK
			Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
			Belum ada sistem monitoring stunting yang terintegrasi
			Perencanaan obat dengan metode konsumsi dan morbiditas untuk menganalisis kebutuhan obat, tetapi proses perencanaan belum berjalan dengan optimal.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan bangunan dan pemanfaatan lahan yang belum terintegrasi dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang
			Masih banyaknya bangunan yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh
			Kurangnya pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Belum adanya konsep penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi.
			Belum tersedianya data spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak	Menurunnya rasio rumah layak huni menjadi 87,25 persen di tahun 2023
			Belum optimalnya ketersediaan prasarana sarana umum perumahan dan Kawasan permukiman
			Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
			Belum optimalnya regulasi penanganan dan fungsi pengawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni
		Belum terpenuhinya dan meratanya prasarana permukiman yang memadai	Belum optimalnya pendataan wilayah dan infrastruktur perumahan dan permukiman
			Kecenderungan masyarakat menggunakan sarana-prasarana mandiri dan alami yang tidak sesuai dengan standar
		Berkembangnya industri rumah tangga polutif di kawasan perumahan padat	Belum optimalnya regulasi pengawasan (mekanisme insenif-disinsentif) untuk kegiatan industri dan permukiman
			Belum optimalnya pendataan wilayah kawasan permukiman dan industri rumah tangga yang sesuai/tidak sesuai standar
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya pencegahan gangguan kamtibmas	Belum optimalnya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
		Belum optimalnya penindakan gangguan kamtibnas	Belum optimalnya kegiatan patroli
			Belum optimalnya tindak penertiban gangguan keamanan
		Belum optimalnya penanganan konflik di masyarakat	Belum terbentuknya forum di tingkat kelurahan dan desa
			Masih rendahnya pelayanan kebencanaan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana
			Pelaksanaan kewaspadaan diri daerah belum optimal
		Kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat	Masih ada masyarakat yang menyalahgunakan narkoba
			Kurang optimalnya tindak pencegahan, penindakan, dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
		Belum optimalnya pemahaman ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Belum maksimalnya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai tantangan zaman
			Masih kurangnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antar suku serta umat beragama
		Belum optimalnya pemahaman politik dalam negeri	Belum maksimalnya pengamalan nilai-nilai pancasila di masyarakat
			Masih adanya organisasi/kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi pancasila sebagai dasar negara dan ingin mengganti dengan ideologi lain
6	Sosial	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan PPKS	Masih rendahnya fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial
			Belum optimalnya fungsi rumah singgah/UPT
			Penyediaan sarana prasarana pendukung di rumah singgah/UPT masih kurang
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan PPKS	Kurang optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pada bidang sosial
			Terbatasnya Jumlah Pekerja Sosial (Peksos) dan Penyuluh Sosial (Pensos) dalam penanganan PPKS (berdasarkan analisa beban kerja
			Masih rendahnya SDM PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PPKS
		Belum optimalnya ketersediaan data administrasi terkait layanan PPKS	Belum optimalnya koordinasi lintas lembaga atau sektor
			Pergantian operator desa tanpa disertai *knowledge transfer*
			Adanya kesulitan untuk mengikuti permintaan dari pusat mengenai penyediaan data (sumber data kemiskinan beragam)
			Masih sulit mendapatkan data PPKS yang akurat
			Adanya stigma negatif dan rasa malu dari keluarga
			Ketersediaan data *By Name By Addres* (BNBA) belum tervalidasi secara *update*
			Belum terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PPKS
		Masih rendahnya bantuan sosial dan terbatasnya akses permodalan bagi PPKS	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
			Regulasi/kebijakan yang terlalu rumit membatasi PPKS untuk mendapatkan akses permodalan

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Belum optimalnya peran dan kontribusi seluruh perangkat daerah
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Tenaga Kerja	Belum optimalnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan serta missmatch dengan lapangan kerja	Kompetensi pencari kerja yang masih rendah
			Masih banyak pencari kerja yang tidak terserap di dunia kerja
			Belum optimalnya kerja sama pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan pemberi kerja
			Masih banyak perusahaan yang tidak menyampaikan informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja
		Belum optimalnya sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Keterbatasan pendataan dan sistem informasi layanan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja
			Belum optimalnya sistem birokrasi dalam pelayanan jamsostek
			Masih tingginya kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan buruh
		Belum optimalnya kelembagaan dan sumber daya dalam pengelolaan tenaga kerja	Belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik
			Belum optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada perusahaan/pekerja/serikat pekerja/serikat buruh
			Belum tersedianya data baku jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja formal dan non formal dan jumlah pengangguran yang valid dan terukur
			Masih terbatasnya kompetensi pegawai di Dinas Tenaga Kerja
			Terbatasnya kuantitas tenaga fungsional mediator (tidak sebanding dengan luasan pekerjaan yang ditangani)
2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan anak-anak	Belum tercapainya sasaran pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Belum tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif
			Adanya Keterbatasan jumlah anak yang ikut serta pelatihan kreativitas anak
			Belum optimalnya kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) karena masa transisi dari P2WKSS (Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)
			Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi kreatif, pendidikan, sosial, hukum dan politik tingkat kecamatan, desa dan kelurahan

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Belum optimalnya revitalisasi Gerakan Sayang Ibu di tingkat kecamatan, Rumah Sakit dan perusahaan
			Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan keterwakilan dalam pemerintahan
			Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
		Terbatasnya kuantitas SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak	Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Rendahnya jumlah forum anak tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan
			Belum optimalnya koordinasi antara sekolah dengan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
		Belum optimalnya kualitas SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak	Kurangnya pemahaman aparatur lintas sektoral dan desa/kelurahan dalam memahami pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak
			Rendahnya SDM Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terlatih KHA
			Rendahnya SDM Sekolah Ramah Anak (SRA) tingkat SD/MTs, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang terlatih KHA (Konvensi Hak Anak)
			Rendahnya SDM Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang terlatih KHA dan peran sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor)
			Belum optimalnya kegiatan Serikat Perempuan Kepala Keluarga tingkat Kecamatan karena SDM belum terlatih
		Belum optimalnya komunikasi antar pihak dalam program pemberdayaan perempuan dan anak-anak	Kurangnya sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Masih kurangnya koordinasi terkait pengumpulan data pengelolaan data gender dan anak
			Belum optimalnya sinergitas Perangkat Daerah terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)
		Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan	Banyak anak-anak yang belum ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Anak Nasional tingkat kabupaten
			Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang PERCANTIK (Perempuan Cerdas, Apresiatif, Negosiatif, Talen Inovatif, dan Kreatif)

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang Pusat Pembelajaran Keluarga
			Belum optimalnya keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan
		Belum optimalnya pembinaan penanganan kasus pemberdayaan perempuan dan anak-anak	Terbatasnya kapasitas anggaran daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3	Pangan	Cadangan pangan daerah yang terbatas dan belum optimal	Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat belum optimal sehingga nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang untuk jenis pangan kacang-kacangan, biji berminyak, umbi-umbian, gula, sayur dan buah masih di bawah skor PPH yang ideal.
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Tangerang belum memenuhi target kebutuhan CPPD berdasarkan perhitungan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebanyak 204,56 Ton/Tahun dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pengadaan CPPD.
			Masih adanya pangan segar yang tidak aman beredar di masyarakat.
		Kurang meratanya cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya	Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.
			Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan di daerah rentan rawan pangan
			Masih kurangnya jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang memadai seperti Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Gabah.
		Belum optimalnya kelembagaan dan SDM pengelola cadangan pangan	Masih kurangnya jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan sehingga penguatan Cadangan Pangan di masyarakat belum optimal.
			Masih kurangnya pengetahuan dan keinginan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk melakukan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dihasilkan.
4	Pertanahan	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah Belum optimalnya ketaatan terhadap rencana tata ruang

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
5	Lingkungan hidup	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kompleksnya permasalahan lingkungan	Penurunan kualitas udara
			Penurunan kuantitas dan kualitas air bersih
			Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau
			Kompleksitas permasalahan lingkungan yang ada dihadapi
			Adanya dinamika perubahan peraturan lingkungan hidup
			luas lahan RTH sangat terbatas sedangkan target per tahun 5 Ha karna kebijakan lahan bukan pada DLHK
		Penanganan dan pengelolaan sampah yang belum optimal	Kurangnya pengelolaan sampah
			Masih kurangnya kelompok masyarakat yang mengolah sampah dari sumber
			Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah sehingga masih banyak yang membuang sampah sembarangan.
			Kurang optimalnya pengelolaan sampah di TPS 3R dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPS 3R serta tingginya biaya operasional pengolahan sampah di TPS 3R.
			Masih kurangnya armada pengangkutan sampah serta masih terdapat beberapa kendaraan truk sampah yang umurnya sudah di atas 15 Tahun (tidak layak)
			Pengelolaan sampah TPA masih open dumping, dan diperlukan biaya tinggi untuk pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan
		Rendahnya sumber daya dalam pemantauan, pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terbatasnya SDM yang memadai sesuai bidang dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup
			Kurangnya sarana prasarana pembinaan pengawasan dan pemantauan lingkungan seperti peralatan transportasi
			Kurang memadainya sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
			Terbatasnya lahan tanaman mangrove yang jelas kepemilikannya, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mangrove dalam menjaga ekosistem
		Belum optimalnya upaya untuk menurunkan GRK dan adaptasi-mitigasi terhadap krisis iklim	Belum optimalnya tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT sebagai alternatif listrik ramah lingkungan
			Belum ketatnya regulasi dan pengawasan limbah hasil industri

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Keterbatasan kapasitas untuk inovasi penanganan krisis iklim dan aksi penurunan GRK daerah
6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan akta kelahiran masih di bawah target 100 persen
			Capaian rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di bawah 100%
7	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Rendahnya kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan (meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mensejahterakan kehidupan masy. desa)	Kurang efektifnyanya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa
			Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan kelembagaan desa
		Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan (ormas)	Masih terjadinya berbagai permasalahan politik dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan
			Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat belum optimal
			Belum optimalnya etika dan budaya politik
			Masih banyak ormas yang belum melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART ormas
8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Belum optimalnya layanan pengendalian kependudukan dan KB	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program-program yang diselenggarakan oleh DPPKB, seperti program KB, pendidikan keluarga, dan perlindungan anak. Hal ini dapat menghambat pencapaian target penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas hidup keluarga
			Masih adanya kendala dalam memperoleh data kependudukan yang akurat dan terkini, yang diperlukan untuk perencanaan strategis serta evaluasi program-program DPPKB
			Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengendalian kependudukan
			Perubahan pola hidup dan nilai budaya yang mungkin tidak selaras dengan tujuan pembangunan keluarga berencana dan perlindungan anak, seperti perubahan dalam pandangan terhadap ukuran keluarga dan peran gender
9	Perhubungan	Belum optimalnya penyediaan transportasi umum	Rasio konektivitas masyarakat terhadap layanan jasa transportasi masih rendah
			Belum optimalnya tata kelola kelembagaan sistem angkutan perkotaan dan angkutan umum massal
			Belum optimalnya integrasi peraturan mengenai rencana induk trasnportasi umum yang melibatkan kerjasama daerah

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Belum terdapat terminal tipe C sebagai titik simpul dari berbagai trayek
			Keterbatasan sarana prasarana penunjang angkutan umum massal
		Banyaknya jumlah titik kemacetan yang belum tertangani	Belum adanya kesepakatan kesamaan data jumlah titik kemacetan yang dijadikan prioritas antar instansi terkait
			Belum adanya komitmen dari masing-masing instansi terkait dalam menangani titik kemacetan yang disepakati bersama sesuai dengan kewenangannya
			Belum adanya rencana tindak lanjut dari masing-masing instansi terkait dalam menangani titik kemacetan yang disepakati bersama sesuai dengan kewenangannya
		Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan terkait pelayanan publik yang efektif efisien dan akuntabel
			Belum maksimal peningkatan kualitas SDM seiring berjalannya waktu
		Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perhubungan	Banyaknya permintaan masyarakat akan penerangan jalan umum yang belum terpenuhi
			Banyaknya permintaan masyarakat akan marka jalan terutama speed trap dan zebra cross yang belum terpenuhi
			Terbatasnya SDM untuk pemeliharaan lampu penerangan jalan umum
			Terbatasnya armada mobil skylift untuk pemeliharaan
			Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana gedung, lajur dan alat uji, sehingga belum dapat melayani uji berkala KIR secara maksimal.
			Belum maksimalnya zonasi atau pemetaan lokasi parkir, sehingga program parkir yang ada tidak berjalan dengan baik.
			Infrastruktur transportasi yang belum mendukung keselamatan, seperti kondisi jalan yang buruk atau minimnya fasilitas penyeberangan pejalan kaki
			Belum optimalnya pengawasan pemungutan liar oleh juru parkir
			Kurangnya sosialisasi mengenai retribusi
		Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan lalu lintas	Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pelayan pengujian terhadap pelaksanaan teknis kendaraan terhadap keselamatan jalan
			Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas
10	Komunikasi dan informatika	Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika	Belum adanya regulasi yang cukup dalam pengelolaan SPBE (peta rencana dan arsitektur)
			Kurangnya keterbukaan Perangkat Daerah sebagai badan publik terhadap kebutuhan akses informasi dari masyarakat
			Keterbatasan dalam penegakan atau kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dalam menjaga keamanan informasi
		Belum optimalnya pemanfaatan layanan komunikasi dan informatika	Penerapan prinsip SDI pada penyelenggaraan statistik sektoral belum seluruhnya diterapkan oleh produsen data
			Kurangnya pemahaman masyarakat akan layanan kedaruratan (contoh: melakukan panggilan darurat namun tidak bertanggungjawab/prank panggilan)
11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Belum optimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah	Jumlah koperasi aktif yang semakin menurun dari waktu ke waktu
			Belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola koperasi
			Masih terbatasnya akses permodalan dalam mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah
12	Penanaman modal	Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam program penanaman modal	Belum terakomodirnya pemberian insentif penanaman modal yang dituangkan dalam peraturan turunannya
			Sosialisasi yang belum massif mengenai Perda penyelenggaraan penanaman modal ke masyarakat dan investor
			Adanya perubahan regulasi secara cepat
		Kurang terintegrasinya data penanaman modal antar perangkat daerah terkait	Masih sulitnya mendapatkan data potensi investasi, lemahnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait
			Kurangnya akurasi antara data di setiap wilayah dengan dinas yang dibutuhkan untuk penyampaian informasi pada sistem
			Data profil peluang investasi belum up to date.
			Kurangnya rekonsiliasi dan validasi data yang ada di wilayah kecamatan
			Pameran belum dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah terkait

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
		Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam peningkatan penanaman modal	Belum ada SDM yang menguasai bahasa asing (minimal Bahasa Inggris) dan mempunyai kemampuan publik speaking sebagai tenaga promosi dan fasilitator pada saat pameran dan mempromosikan Kabupaten Tangerang dalam menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri
			Terbatasnya SDM pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan baik secara kualitas maupun kuantitasnya
		Belum optimalnya pengelolaan penanaman modal	Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder
			Belum adanya IPRO (Investmen Project Ready to Offer) yang akan ditawarkan ke investor
			Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi sektor riil yang optimal
13	Kepemudaan dan olahraga	Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya pengembangan kegiatan kepemudaan
			Minimnnya pelatihan yang berkaitan dengan kepemudaan
		Belum optimalnya pengembangan dan daya saing olahraga	Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional
			Belum optimalnya upaya pembinaan terhadap atlet
			Rendahnya cakupan pelatih yang bersertifikasi
14	Statistik	Belum optimalnya interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah	Penerapan Prinsip SDI pada penyelenggaraan statistik sektoral belum seluruhnya diterapkan oleh produsen data
			Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral belum mengacu kepada Proses Bisnis Statistik/ Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)
15	Persandian	Belum optimalnya operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE	Keterbatasan kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia (pegawai) maupun sumber daya TIK (infrastruktur dan peralatan yang mendukung persandian dan keamanan informasi)
			Keterbatasan dalam penegakan atau kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dalam menjaga keamanan informasi
16	Kebudayaan	Belum optimalnya pembinaan pelaku seni dan budaya	Kurangnya minat masyarakat, terutama pemuda dan remaja, untuk melestarikan kesenian tradisional
			Menurunnya permintaan untuk penampilan kesenian tradisional
			Generasi muda tidak berminat mengembangkan bakat seni yang dimiliki karena mereka beranggapan sektor seni tidak menjanjikan masa depan dan kesejahteraan

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Pergeseran minat pemuda kepada budaya modern lain / budaya asing
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas pendukung seni dan kebudayaan	Minimnya fasilitasi pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana seperti lapangan, museum, gedung kesenian, gedung opera, dan sebagainya
			Pembangunan sarana kesenian dan pariwisata masih sebatas perencanaan
		Belum optimalnya pendataan cagar dan warisan budaya	Belum adanya warisan budaya khas Kabupaten Tangerang yang diresmikan/ terdaftar menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tingkat Provinsi dan Nasional
			Belum adanya penetapan cagar budaya tingkat Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten
17	Perpustakaan	Belum optimalnya layanan perpustakaan	Kurangnya dorongan yang visioner dan revolusioner terkait pengembangan perpustakaan perpustakaan
			Koleksi buku digital dan fisik yang terbatas
			Masih adanya egosektoral dan belum optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan terutama dalam menentukan kebijakan terkait
			Belum terdapatnya data kepustakawanan yang valid, update dan up to date
			Terbatasnya kuantitas tenaga perpustakaan baik fungsional maupun teknis
18	Kearsipan	Belum optimalnya digitalisasi kearsipan	Belum semua Perangkat Daerah/BUMD menerapkan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara optimal
			Belum maksimalnya pengelolaan arsip statis secara profesional, salah satunya bersumber dari penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah yang berakibat kurang maksimalnya layanan akses arsip statis
			Belum melaksanakan pengelolaan arsip secara maksimal dalam rangka mewujudkan ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa
			Belum terpenuhinya SDM kearsipan (arsiparis) di setiap Perangkat Daerah yang berakibat rendahnya pengelolaan arsip dinamis secara profesional dan belum tertibnya administrasi kearsipan di Perangkat Daerah (pencipta arsip)
			Rendahnya pemahaman ASN akan pentingnya penyelenggaraan kearsipan
Fokus Layanan Urusan Pilihan			
1	Kelautan dan perikanan		Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
		Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam mempromosikan potensi perikanan	Belum optimalnya sistem pemasaran produk
		Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan bina kelompok nelayan	Terbatasnya kegiatan pembinaan kelompok nelayan dan kemitraan dengan pelaku usaha/pasar
			Rendahnya regenerasi petani atau minat generasi muda untuk bekerja di sektor perikanan
			Kesejahteraan peternak pembudidaya dan nelayan yang masih rendah
		Belum optimalnya produktivitas sektor perikanan	Tingginya biaya operasional produksi
			Masih rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan sektor perikanan
			Kurangnya infrastruktur pendukung pertanian, seperti kolam budidaya, pakan ikan, dan lain sebagainya
			Kurangnya akses petani terhadap teknologi perikanan/ budidaya modern dan informasi terkait praktik perikanan yang efisien.
			Terbatasnya kapasitas riset dan pengembangan produk hasil perikanan yang memberikan nilai tambah
		Belum optimalnya gerakan gemar makan ikan untuk peningkatan gizi dan pencegahan kerawanan pangan	Masih rendahnya angka konsumsi ikan
2	Pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan daerah	Pelaku usaha pariwisata belum memenuhi standar usaha sesuai peraturan berlaku
			Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi SDM bidang pariwisata
			Belum optimalnya kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah/pelaku usaha/ sektor privat untuk pengembangan aktivitas pariwisata
			Belum terpadunya pengelolaan wisata di daerah
		Kurangnya daya tarik objek dan produk wisata	Belum optimalnya perawatan dan perlindungan ekosistem wisata alam
			Keterbatasan sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata
			Terbatasnya akses informasi objek dan produk wisata sebagai bentuk promodsi dan pemasaran wisata akomodasi

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
3	Pertanian	Belum optimalnya produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Keterbatasan lahan pertanian yang tersedia, akibat dari urbanisasi dan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri
			Kurangnya usaha diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan masyarakat
			Terbatasnya permodalan bagi petani untuk meningkatkan produksi, seperti akses terhadap kredit usaha pertanian
			Keadaan lingkungan yang tidak menentu karena perubahan iklim yang tidak terduga, seperti curah hujan yang tidak stabil sehingga menyebabkan kekeringan atau kebanjiran
		Belum optimalnya fasilitas pendukung pertanian	Kurangnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan informasi terkait praktik pertanian yang efisien
			Kurangnya infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi yang memadai, jalan yang baik, dan sarana transportasi untuk distribusi hasil pertanian.
		Rendahnya kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian	Belum optimalnya manajemen kelembagaan kelompok tani
			Rendahnya regenerasi petani atau minat generasi muda untuk bekerja di sektor perikanan dan peternakan
			Kesejahteraan petani yang masih rendah
		Rendahnya kualitas dan daya saing produk pertanian dan peternakan	Rendahnya daya saing harga produk pertanian di pasar
			Terbatasnya kemampuan petani untuk mengakses pasar
			Terbatasnya kapasitas riset dan pengembangan produk hasil pertanian yang memberikan nilai tambah
4	Perdagangan	Belum optimalnya pengelolaan perdagangan	Kurang personil/petugas dalam pendataan harga bahan pokok dan barang penting lainya
			Luasnya wilayah pendataan sehingga tidak mencapai target
			Belum tersedianya aplikasi untuk memudahkan dalam menyimpan data
		Daya saing dan diversifikasi produk perdagangan-jasa (skala domestik dan global) yang rendah	Belum optimalnya fasilitas pendukung aktivitas perdagangan
			Belum optimalnya riset dan inovasi dalam pengembangan produk pelaku usaha yang berdaya saing di pasar domestik dan global utamanya untuk membangun ekosistem perdagangan dan logistik digital
			Keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan dan jasa

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Belum terintegrasinya simpul logistik (*backbone*)
5	Perindustrian	Belum optimalnya regulasi terkait pengembangan industri	Adanya dinamika regulasi terkait pengembangan industri
			Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penindakan
		Belum optimalnya fasilitas pendukung perindustrian	Belum optimanya sarana pendukung pengolahan limbah hasil industri yang mengakibatkan pencemaran dan polusi
			Belum optimalnya riset dan inovasi dalam hilirisasi nilai tambah industri serta efisiensi kinerja operasional industri
6	Transmigrasi	Pelaksanaan program transmigrasi yang terbatas pada ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian	Kuota dan lokasi transmigran ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Fokus Pendukung Urusan			
1	Sekretariat Daerah	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan standar pelayanan	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan prima
			Belum optimalnya kualitas SDM aparatur yang professional, kreatif, inovatif, dan berintegritas
			Belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah
			Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan
			Belum optimalnya waktu penyelesaian
			Penanganan pengaduan belum optimal
2	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi
			Belum meratanya pelaksanaan kegiatan Reses di daerah pemilihan
Fokus Penunjang Urusan			
1	Perencanaan	Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan	Belum integrasi antara perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
			Pengendalian belum maksimal
			Belum ada perencanaan terkait pengukuran kinerja per individu
			Pelibatan dan peran serta perguruan tinggi, akademisi, swasta, komunitas, media belum maksimal dilibatkan

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
			Evaluasi terhadap kebijakan belum berjalan
2	Keuangan	Belum optimalnya tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah	Belum optimalnya pengamanan fisik BMD
			Belum optimalnya pemanfaatan BMD
			Belum optimalnya pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)
3	Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	Belum maksimalnya tata kelola dan manajemen ASN	Implementasi NSPK saat terjadinya penunjukan Bupati (Pj Bupati) mengakibatkan perlunya Persetujuan Teknis dari Kepala BKN dan Surat Persetujuan Tertulis Izin Pelantikan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga proses ini memakan waktu lebih lama
			Penghitungan dan penetapan formasi Jabatan Fungsional belum berdasarkan rekomendasi Instansi pembina dan penetapan formasi dari Kemenpan-RB berdampak pada perencanaan pengadaan jabatan fungsional kurang tepat
			Kebijakan Penyetaraan Jabatan berdampak pada tidak fleksibelnya mutasi dan rotasi jabatan fungsional (dalam rangka penyegaran organisasi) mengingat Jabatan Fungsional yang melekat pada pegawai terdampak penyetaraan, serta alokasi peta jabatan yang harus dihitung ulang
			Adanya hambatan pengembangan karir pejabat fungsional karena proses uji kompetensi di instansi pembina menunggu antrian dan kuota nasional
		Belum optimalnya pelaksanaan program kepegawaian dan pengembangan SDM	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan ASN, karena kurangnya pemahaman mengenai penilaian kompetensi
			Belum optimalnya Pengembangan kompetensi berbasis Corporate University
			Belum tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan
			Pelaksanaan penilaian kompetensi belum sepenuhnya secara digital karena sistem aplikasi masih dalam proses pembuatan
			Kinerja dan disiplin ASN masih belum optimal
			Pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal
			Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pengembangan kompetensi untuk bahan kebijakan pengembangan karir PNS dan PPPK
		Terbatasnya fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM	Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan

No.	Bidang Urusan	Masalah	Indikasi Masalah
4	Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan
			Belum optimalnya penerapan inovasi daerah
			Masih terbatasnya kerjasama
Fokus Pengawas Urusan			
1	Pengawasan	Belum optimalnya kinerja pengawasan daerah	Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pengawasan
			Keterbatasan teknologi dan infrastruktur dalam mendukung fungsi pengawasan
			Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah
			Kompleksitas regulasi dan kebijakan yang sering berubah
			Pelaksanaan SPIP belum optimal
			Belum optimalnya pelaksanaan zona integritas

Sumber: Analisis Penyusun, FGD, Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang (2025)

2.3.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan hasil identifikasi yang didasarkan pada evaluasi dan permasalahan pembangunan. Selain itu, isu strategis juga mengakomodir potensi dan tantangan dalam suatu wilayah. Rumusan isu strategis ini berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan di wilayah Kabupaten Tangerang.

2.3.2.1 Isu Global

Pesatnya transformasi global dan nasional membawa banyak dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang mendasari identifikasi isu global dan nasional untuk menjadi salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan di Kabupaten Tangerang. Penyusunan isu global dan nasional ini merupakan hasil formulasi yang bersumber pada SDG's serta isu strategis dalam Dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 maupun Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029.

A) Demografi Dunia

Pertumbuhan penduduk memberikan dampak pada berbagai lini kehidupan salah satunya dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, pertumbuhan penduduk ini berkaitan erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan penduduk ini merupakan salah satu hal yang harus dikendalikan untuk menjaga kestabilan ekosistem. Di sisi lain, demografi nasional bergerak ke arah bonus demografi. Hal ini menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja dan jumlah penduduk usia tua cenderung meningkat sehingga memerlukan peningkatan lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

B) Perubahan Iklim

Pesatnya pertumbuhan kegiatan masyarakat berdampak banyak terhadap perubahan lingkungan salah satunya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena yang mampu mengancam stabilitas ekosistem. Perubahan iklim mampu meningkatkan berbagai risiko bencana. Selain itu, perubahan iklim juga mampu berdampak pada perubahan cuaca ekstrem dan penurunan keanekaragaman hayati. Tidak hanya berpengaruh pada alam, perubahan iklim juga dapat berdampak pada kehidupan manusia seperti halnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan pangan. Perubahan iklim yang terjadi perlu ditangani melalui program pengurangan emisi karbon. Berbagai program dicanangkan untuk mengurangi laju perubahan iklim dan meminimalisir dampak perubahan iklim bagi kegiatan sehari-hari.

C) Kemajuan Teknologi

Berbagai inovasi muncul selaras dengan percepatan perkembangan teknologi masyarakat. Perkembangan teknologi memberikan berbagai dampak dalam kehidupan seperti percepatan informasi, peningkatan produktivitas dan efektivitas. Perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan untuk membantu penyelenggaraan kegiatan. Sayangnya kemajuan teknologi ini memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Saat ini teknologi mulai menggeser tenaga manusia dan menyebabkan pengurangan lapangan kerja. Selain itu, keamanan data dan risiko kejahatan siber menjadi salah satu ancaman dalam perkembangan teknologi.

D) Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal geopolitik khususnya mengenai kedaulatannya atas sumber daya alam, teritorial, dan

strategis di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah persaingan kepentingan antara kekuatan besar di Laut Cina Selatan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan klaimnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan kepulauan strategis. Di sisi lain, dari segi geoekonomi, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar konsumen terbesar di Asia Tenggara dan produsen utama sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang. Namun, tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap ada, yakni infrastruktur, regulasi bisnis, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Perkembangan geopolitik dan geoekonomi Indonesia memainkan peran penting dalam dinamika regional dan global, serta menentukan arah kebijakan domestik yang berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

E) Urbanisasi global

Pertumbuhan penduduk saat ini cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Pesatnya pembangunan perkotaan memiliki dualisme. Selain mampu meningkatkan daya saing dan kualitas hidup, pembangunan perkotaan juga menyebabkan ketertinggalan di wilayah perdesaan. Hal ini terjadi akibat kuatnya arus urbanisasi untuk memenuhi kehidupan masyarakat. *Urban bias* atau pembangunan yang lebih diutamakan pada wilayah perkotaan merupakan salah satu hal yang memantik urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan. Hal ini menunjukkan perlunya pembangunan wilayah perdesaan untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan perkotaan.

2.3.2.2 Isu Nasional

A) Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan Rencana Kerja Pemerintah. Visi RPJM Nasional 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan dalam 8 Misi (Asta Cita) yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), dan 320 program kerja. Kedelapan Asta Cita (Misi) dituangkan menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, yaitu:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan.
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan sasaran utama untuk mengukur kinerja pembangunan dalam lima tahun ke depan. Sasaran utama pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65
Sasaran Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

	Sasaran Utama Pembangunan	Indikator Kinerja		
		Indikator Pembangunan	Target 2025	Target 2029
1	Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3	8,0
		GNI Per Kapita (USD)	5.410	8.000
		Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	9,1
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	21,9
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	4,5 – 5,0
		Rasio Gini (Indeks)	0,378 – 0,382	0,372 – 0,375
		Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (%)	21,4	22,4
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Indeks (Ranking)	33	29
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,59
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*	Penurunan intensitas Emisi GRK (%)	35,53	45,17
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	76,49	77,20

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Permasalahan utama pembangunan kewilayahan di Indonesia adalah ketimpangan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin dari kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia mendominasi dengan mencapai 79,55% terhadap PDRB nasional serta capaian Indeks Williamson yang tinggi yaitu 0.709 pada tahun 2024. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia mencapai 10,5% dibandingkan Kawasan Barat Indonesia mencapai 8,5%.

Permasalahan dan tantangan pembangunan lainnya adalah pembangunan wilayah perdesaan. Isu utama pembangunan perdesaan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi sebesar 12,22%, kapasitas fiskal desa yang rendah, penghasilan masyarakat yang bergantung di sektor primer dengan nilai tambah rendah, serta kesenjangan infrastruktur dasar antara desa-kota. Permasalahan di wilayah perkotaan adalah urbanisasi dan *urban sprawl* yang berdampak pada masifnya perubahan alih fungsi lahan, penurunan daya dukung wilayah, dan kesenjangan infrastruktur perkotaan. Tantangan ke depan adalah mendorong perekonomian dan pendapatan per kapita masyarakat perkotaan melalui pengentasan kemiskinan, daya tarik investasi, serta kerja sama pengelolaan kawasan aglomerasi/ metropolitan dalam keterpaduan pembangunan kewilayahan.

Tabel di bawah ini menjabarkan berbagai isu prioritas nasional yang dituangkan dalam Rancangan Awal RPJM Nasional Tahun 2025-2029:

Tabel 2.66
Prioritas Nasional dan Isu Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

	Prioritas Nasional – Asta Cita	Isu Pembangunan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Memperkokoh Ideologi Pancasila
		Memperkokoh Demokrasi
		Hak Asasi Manusia
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa memalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Sistem Pertahanan dan Keamanan
		Swasembada Pangan
		Swasembada Energi
		Swasembada Air
		Ekonomi Syariah
		Ekonomi Digital
		Ekonomi Hijau
		Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur Berkelanjutan
		Pendalaman Sektor Keuangan
		Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
		Produktivitas UMKM dan Koperasi
		Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan
		Kesehatan
		Keluarga, Perempuan, Anak, dan Pemuda
		Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		Olahraga
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Hilirisassi dan Industrialisasi
		Konektivitas *Backbone* dan Logistik
		Ekonomi Domestik dan Global
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kemiskinan
		Perumahan dan Permukiman
		Perdesaan
		Perkotaan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi Politik
		Reformasi Hukum
		Reformasi Birokrasi
		Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
		Pencegahan dan Pemberantasan Judi dan Penyelundupan
		Produktivitas BUMN
		Optimalisasi Pendapatan Negara
		Pengendalian Inflasi
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Keagamaan
		Kebudayaan
		Pembangunan Berketahanan Iklim
		Pengelolaan Risiko Bencana

Sumber : Dokumen Ringkasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Sementara itu, pembangunan kewilayahan Pulau Jawa juga memiliki berbagai isu dan tantangan dalam mewujudkan arah pembangunan "Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Isu utama pembangunan kewilayahan Pulau Jawa adalah (1) Inefisiensi kawasan perkotaan dan metropolitan dalam melayani kota itu sendiri; (2) Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam perindustrian; (3) Infrastruktur logistik yang belum terintegrasi; (4) Kesenjangan keterampilan dan *mismatch* lapangan kerja; (5) Tingginya prevalensi stunting, wasting, dan *underweight*; serta (6) Tingginya kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa mencapai 8,11% pada tahun 2023.

Target pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa di tahun 2029 sebesar 7,9 persen setiap tahunnya. Strategi untuk mencapai target tersebut adalah melalui peningkatan produktivitas, pengembangan industri, pembangunan

pusat-pusat pertumbuhan baru, dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dijabarkan secara kewilayahan sebagai berikut:

1) Peningkatan produktivitas melalui pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi yang tersebar di 11 Kawasan dan pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan yang tersebar di 10 Kawasan di wilayah Jawa
2) Pengembangan industri melalui pengembangan Kawasan Pengembangan Industri yang tersebar di 10 Kawasan di wilayah Jawa
3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan Kawasan Perkotaan baik Kawasan Aglomerasi, Wilayah Metropolitan, maupun Non-Wilayah Metropolitan, yang tersebar di 20 Kawasan di wilayah Jawa
4) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan, yang tersebar di 8 Kawasan di wilayah Jawa

Dalam mendukung pengembangan kawasan-kawasan di atas, dibutuhkan prasyarat baik dari tata ruang, pertanahan, infrastruktur dan layanan dasar, mitigasi bencana, desentralisasi dan otonomi daerah, kesetaraan gender serta pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan.

Target penurunan kemiskinan di Pulau Jawa dalam periode 2025-2029 adalah sebesar 3,79 4,79 persen dan target Indeks Modal Manusia (IMM) di Pulau Jawa dalam periode 2025-2029 sebesar 0,56–0,789. Guna mewujudkan target-target tersebut, utamanya dikembangkan tiga strategi, yaitu (1) Pemberdayaan Ekonomi Lokal Bernilai Tinggi, Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar & Konektivitas, serta Perluasan Akses & Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (2) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Universal; serta (3) Peningkatan Modal Manusia, yang dijabarkan secara kewilayahan sebagai berikut:

1) Pemberdayaan Ekonomi Lokal Bernilai Tinggi, Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar & Konektivitas, serta Perluasan Akses & Kualitas Pendidikan dan Kesehatan antara lain melalui percepatan pembangunan pada Kawasan Afirmasi (Kawasan Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan), yang tersebar di 4 Kawasan di wilayah Jawa;
2) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Universal, antara lain melalui Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, yang tersebar pada 16 lokasi prioritas di wilayah Jawa;
3) Peningkatan Modal Manusia, antara lain melalui Penguatan Perguruan Tinggi Menuju World Class University, pada 4 lokasi prioritas, serta Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada 10 lokasi prioritas yang juga bertempat pada 10 Kawasan Pengembangan Industri.

B) Dokumen Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2030

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. Dalam mewujudkan Agenda TPB 2030, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Dokumen Peta Jalan TPB Tahun 2023-2030. Peta jalan TPB ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemangku kebijakan dalam sinkronisasi

pencapaian target TPB di tingkat daerah, termasuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tabel di bawah ini merupakan strategi pencapaian TPB Nasional tahun 2023-2030.

Tabel 2.67
Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional Tahun 2023-2030

Tujuan SDGs	Strategi
Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	✓ Pertumbuhan ekonomi "*Broad-based*" atau inklusif ✓ Investasi sumber daya manusia ✓ Perlindungan sosial ✓ Tidak ada yang tertingggal (*No one left behind)*
Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan, dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	✓ Meningkatkan produksi pangan dan mengembangkan pertanian berkelanjutan ✓ Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang ✓ Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi
Tujuan 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	✓ Menekan kematian ibu dan anak, meningkatkan akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi ✓ Pengendalian penyakit menular ✓ Penanggulangan penyakit menular ✓ Penanggulangan masalah penyalahgunaan zat (e.g. NAPZA)
Tujuan 4 – Pendidikan Berkualitas Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	✓ Mendorong berkembangnya kemampuan literasi dan numerasi dan penyelesaian sekolah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi ✓ Peningkatan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru ✓ Menghilangkan disparitas partisipasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
Tujuan 5 – Kesetaraan Gender Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	✓ Menekan perkawinan usia dini ✓ Pengawasan dan perlindungan anak ✓ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak perempuan dan juga pemberdayaan perempuan ✓ Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelantikan untuk mencapai posisi strategis / manajerial
Tujuan 6 – Air Bersih dan Sanitas Layak Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	✓ Pengembangan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman ✓ Pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman ✓ Pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman ✓ Pengawasan kualitas air minum dan sanitasi ✓ Akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (90 % rumah tangga) ✓ Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)
Tujuan 7 – Energi Bersih dan Terjangkau Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua	✓ Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik ✓ Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan dengan meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	✓ Pertumbuhan PDB riil per kapita melalui pengembangan infrastruktur, reformasi regulasi investasi, dan peningkatan kualitas SDM ✓ Mengakselerasi akses UMKM ke layanan keuangan melalui stimulus Subsidi Bunga Ultra Mikro, restrukturisasi kredit UMKM, penguatan akses modal untuk UMK ✓ Penurunan pengangguran dan peningkatan daya saing produktivitas tenaga kerja ✓ Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB dan peningkatan jumlah wisman
Tujuan 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	✓ Meningkatkan nilai tambah sektor industri manufaktur melalui hilirisasi industri, inovasi penciptaan nilai tambah industri, serta pengurangan ketergantungan terhadap produk impor ✓ Upskilling dan reskilling tenaga kerja dengan kebutuhan pasar industri ✓ Peningkatan anggaran riset ✓ Peningkatan akses dan adopsi masyarakat terhadap TIK
Tujuan 10 – Berkurangnya Kesenjangan Mengurangi Kesejangan Intra dan Antar Negara	✓ Redistribusi pendapatan melalui peningkatan nilai tambah sektor industri, insentif fiskal untuk industri padat karya, membatasi berkembangnya sektor padat modal ✓ Reformasi subsidi (misal subsidi energi BBM) ✓ Sistem registrasi penduduk yang terintegrasi

Tujuan SDGs	Strategi
Tujuan 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	✓ Penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau ✓ Penyediaan hunian yang sesuai dengan tata ruang serta memperhatikan kerawanan bencana dan dampak perubahan iklim ✓ Perluasan kebijakan dan program hunian layak kepada segmentasi rumah tangga yang belum terlayani, terutama rumah tangga dengan penghasilan tidak tetap/informal ✓ Penanganan permukiman kumuh dan peremajaan kota secara inklusif dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
Tujuan 12 – Konsumsi Produksi yang Bertanggungjawab Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	✓ Penerapan ekonomi sirkular ✓ Melakukan pengelolaan FLW secara bertahap sepanjang system makanan ✓ Meningkatkan kualitas pangan dengan pemanfaatan digitalisasi dan *Internet of Things* (IoT) dalam kegiatan di rantai pasokan
Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	✓ Peningkatan efisiensi energi ✓ Pembangunan dan pengelolaan energi baru terbarukan ✓ Pelaksanaan restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi melalui penanaman kembali lahan hutan yang telah rusak. ✓ Pelaksanaan upaya menahan laju deforestasi setiap tahun melalui penerapan moratorium hutan, primer, dan penerapan RTRW ✓ Peningkatan produktivitas pertanian terutama melalui peningkatan intensifikasi padi dan penambahan sawah irigasi. ✓ Penanganan sampah dan limbah industri melalui pola manajemen limbah yang lebih terstruktur
Tujuan 14 – Ekosistem Lautan Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	✓ Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) ✓ Mengembangkan industri perikanan hulu-hilir ✓ Memperkuat efektivitas pengelolaan, instrumen, sinergi tata kelola dan institusi pengelola kawasan konservasi ✓ Menjaga kesehatan ekosistem dan mempromosikan pemanfaatan KKL secara berkelanjutan ✓ Menyediakan pendanaan kawasan konservasi jangka panjang
Tujuan 15 – Ekosistem Daratan Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	✓ Pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta restorasi lahan gambut ✓ Pelaksanaan upaya menahan laju deforestasi setiap tahun melalui penerapan moratorium hutan primer, dan penerapan RTRW ✓ Menjaga luas mangrove dan melaksanakan rehabilitasi mangrove
Tujuan 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	✓ Penguatan Dukungan Manajemen yang dilakukan dengan memperluas pembangunan Zona Integritas (ZI), WBK dan WBBM ✓ Peningkatan kapasitas lembaga demokrasi dan pembinaan partai politik ✓ Peningkatan layanan pencatatan sipil yang mudah, cepat, dan inovatif
Tujuan 17 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	✓ Optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi administrasi yang berkelanjutan serta kebijakan perpajakan yang adaptif dengan tetap menjaga iklim investasi ✓ Mendorong penerapan teknologi dalam ekosistem ekonomi digital ✓ Mendorong pertumbuhan perdagangan luar negeri barang ✓ dan jasa Indonesia melalui pemanfaatan rantai produksi global dan perluasan produk serta pasar tujuan ekspor

Sumber : Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2030, Kementerian PPN/Bappenas (2024)

2.3.2.3 Isu Regional Provinsi Banten dan Wilayah Sekitar

A) Arahan dalam RPJM Nasional untuk Pengembangan Wilayah Provinsi Banten dan Jabodetabek

Berdasarkan posisi geostrategis, Provinsi Banten merupakan pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta sebagai daerah khusus pengembangan ekonomi. Dari sisi perdagangan, selain menjadi penghubung jalur perdagangan Sumatera dan Jawa, Provinsi Banten merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Lokasi

wilayah Provinsi Banten juga menjadi titik potensial aglomerasi perekonomian dan permukiman.

Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari aglomerasi Jabodetabek merupakan isu pembangunan jangka panjang dengan tantangan mendorong *Economic Engine* yang tetap berlandaskan daya dukung dan prinsip keberlanjutan. Tren dalam 10 tahun terakhir menunjukkan wilayah Jabodetabek mengalami transformasi struktur ekonomi ke tersier dengan sektor penopang perekonomian adalah sektor Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, serta Perdagangan dan Reparasi. Tantangan pembangunan kedepan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Jabodetabek mengarahkan ke sektor ekonomi tersier yang berorientasi pada pengembangan industri teknologi dan informasi digital untuk pasar global.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi kerjasama Jabodetabek dalam membangun *Economic Engine* terintegrasi. Sinergi kerjasama tersebut berupa kerjasama pengembangan sektor unggulan Jabodetabek, pengembangan potensi pasar dan skala ekonomi di tingkat global, serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jabodetabek[6]. Provinsi Banten dengan Kabupaten Tangerang sebagai bagian yang integral, memiliki beberapa tantangan rencana pembangunan yaitu pembangunan MRT Balaraja Cikarang, pembangunan Kota Baru Publik Maja, pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan *coastal reservoir* di muara Sungai Cisadane.

Berdasarkan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029, terdapat identifikasi isu kewilayahan yang meliputi:

- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan;
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa;
- Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian;
- Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri;
- Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi *covid-19*.

Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan fokus pembangunan kewilayahan Pulau Jawa dan Provinsi Banten adalah membangun kawasan-kawasan strategis yang didukung dengan infrastruktur yang terpadu. Dalam dokumen tersebut dijabarkan Arah Pembangunan Kewilayahan Pulau Jawa khususnya Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian Aglomerasi Jabodetabek dan Provinsi Banten, yaitu Pengembangan Jakarta-Tangerang *International Business Corridor* & Jakarta *Global City Urban Tourism (Central-South), Northern Coast New Economic Hub* & Jakarta *Global City Urban Tourism (North)*, serta Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten.

Selain itu, isu strategis pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Provinsi Banten menjadi arahan *positioning* Kabupaten Tangerang

---

[6] Supriatna., KETENTERAMAN (2024). Paparan Masa Depan Aglomerasi Jabodetabek Pasca Ibukota. Musrenbang RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

dalam rencana pembangunan daerah. Di bawah ini merupakan isu strategis Provinsi Banten, yaitu:

a. Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing

Kualitas SDM dapat dibentuk berdasarkan unsur yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing, Provinsi Banten menghadapi berbagai tantangan yaitu pendidikan berkualitas yang belum merata, aspek kesehatan yang belum menyentuh derajat kesehatan yang tinggi, serta aspek perlindungan sosial yang belum optimal pelaksanaannya.

b. Pembangunan perekonomian yang tangguh dan inklusif

Pembangunan perekonomian dapat terbentuk dari pemerataan ekonomi wilayah. Dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan inklusif, Provinsi Banten memiliki berbagai tantangan, yaitu pemerataan perekonomian belum optimal karena pertumbuhan perekonomian wilayah utara dan selatan masih belum merata, sektor unggulan yang meliputi sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata belum dikelola secara maksimal, serta inovasi yang mendorong investasi dalam wilayah masih perlu ditingkatkan.

c. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas

Tata kelola pemerintahan Provinsi Banten memiliki isu dalam penyelenggaraan pemerintah, meliputi aspek pengaturan regulasi dan hukum, digitalisasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan integritas, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan dan integritas pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan akuntabel dapat mengurangi berbagai isu dan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan wilayah.

d. Pembangunan keamanan wilayah, demokrasi substansial dan ekonomi makro berketahanan yang tangguh

Provinsi Banten memiliki isu dalam pembangunan keamanan wilayah, meliputi keamanan, ketertiban dan kesadaran berdemokrasi masih rendah, kebijakan ekonomi makro belum stabil, ketahanan wilayah dan kerja sama daerah belum optimal. Beberapa isu tersebut dapat dipengaruhi oleh angka kriminalitas, kehidupan berdemokrasi, pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, fungsi intermediasi perbankan serta isu potensial yang terkait dalam pembangunan sumber daya alam, sosial budaya dan lingkungan.

e. Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal

Isu strategis pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal pada Provinsi Banten memiliki beberapa isu yang membawahinya. Isu-isu tersebut meliputi keaktifan kehidupan sosial belum optimal dan pembangunan keluarga dan gender masih lemah. Keaktifan kehidupan sosial belum optimal ditentukan berdasarkan kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya, serta kehidupan beragama yang juga ditentukan oleh dua indeks yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan dan indeks Kerukunan Umat Beragama. Sementara itu, pada pembangunan keluarga dan gender masih lemah menggunakan standar nilai IKK, angka kesetaraan gender, serta kualitas ketahanan ekonomi.

f. Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan

Manajemen kewilayahan dapat dilihat dari aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Pada Provinsi Banten aspek isu strategis tersebut meliputi daya dukung lingkungan yang masih rendah, kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, risiko bencana yang masih tinggi, serta kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang yang belum optimal. Aspek isu tersebut

ditentukan melalui penggunaan lahan kritis, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Risiko Bencana, kapasitas daerah, serta urbanisasi.

B) Isu Strategis PMO Jabodetabekpunjur

Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari aglomerasi Jabodetabekpunjur yang akan mempengaruhi secara langsung dalam pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan dokumen PMO TKPR Jabodetabepunjur, terdapat beberapa isu strategis di Wilayah Aglomerasi Jabodetabekpunjur yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, yaitu:

1) Tingginya Potensi Ancaman Banjir. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur berada pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Citarum dan Ciujung-Cidanau-Cidurian yang secara historis rawan terhadap bencana banjir. Kerugian ekonomi akibat bencana banjir di Jabodetabekpunjur dari tahun 2002 hingga 2020 mencapai 19,2 triliun rupiah.
2) Tingginya Kemacetan Lalu Lintas. Kemacetan wilayah Jabodetabekpunjur disebabkan oleh mode share angkutan umum yang rendah (19,5%) , sistem transportasi publik belum efektif dan menjangkau seluruh wilayah, ekspansi *urban sprawl* , serta sarana prasarana transportasi yang belum inklusif dan andal.
3) Ketersediaan Air Bersih Belum Terpenuhi. Pelayanan air bersih jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur hanya mencapai 29% serta dihadapkan dengan tantangan ketersediaan air baku serta efisiensi infrastruktur SPAM.
4) Kerentanan Bencana di Wilayah Pesisir dan Pantai. Wilayah pantai utara Jabodetabekpunjur termasuk wilayah Kabupaten Tangerang pesisir yang rentan terhadap bencana pesisir seperti banjir rob, *land subsidence*, dan abrasi.
5) Pengelolaan dan Kapasitas Penampungan Sampah yang Belum Optimal. Sebesar 13 juta ton sampah (40,71%) yang dihasilkan setiap tahunnya tidak dapat terkelola di kawasan Jabodetabekpunjur. Hal ini disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang melebihi kapasitas, kurangnya infrastruktur pendukung, pencemaran *impermeable surface* yang tidak layak, dan minimnya kegiatan daur ulang sampah.
6) Tumbuhnya Permumkiman Kumuh yang Tidak Terkandali. Hal ini disebabkan oleh disparitas ekonomi dan rendahnya kemampuan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan; belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya; dan pertambahan penduduk dan semakin berkurangnya ketersediaan lahan.
7) Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir. Tipologi Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur yang berbentuk hamparan dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan serta memiliki curah hujan yang tinggi membuat area hulu memiliki kerentanan terhadap bencana tanah, longsor, dan banjir. Penyebab utama dari terjadinya bencana-bencana tersebut kebanyakan. Tingginya ancaman bencana ini juga diperparah dengan alih fungsi lahan yang menyebabkan permasalahan lingkungan, terutama pada area hutan dan sempadan sungai.

C) Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 menjadi landasan penting dalam merumuskan Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045. Isu strategis dalam RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi: Provinsi Banten yang masih berada di posisi *upper-midle income*
2) Pendidikan dan inovasi: Peningkatan partisipasi sekolah melalui dukungan merdeka belajar dan pengembangan pola pikir berinovasi
3) Kesehatan: Peningkatan fasilitas kesehatan dan penyelesaian kasus-kasus kesehatan
4) SDM, kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat dan desa: Peningkatan kapasitas SDM & pembangunan dan kemandirian desa terutama pembenahan pada desa tertinggal
5) Daya saing infrastruktur dan kewilayahan: Peningkatan infrastruktur laut, darat, dan udara serta pengembangan kewilayahan sektor pariwisata dengan dukungan interkonektivitas telekomunikasi
6) Daya saing investasi, industri, dan perdagangan: Peningkatan investasi guna mendukung pengembangan industrialisasi dan perdagangan
7) Tata kelola pemerintahan: Mendorong birokrasi berdampak
8) Lingkungan dan kebencanaan: Peningkatan kualitas lingkungan & kewaspadaan bencana.

Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yaitu *"Provinsi Banten sebagai Gerbang Investasi Strategis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa"*. Dalam mewujudkan visi tersebut, dirumuskan melalui misi berikut:

1) Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Banten yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing
2) Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Banten yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif
3) Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Banten yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional
4) Misi 4 : Mewujudkan Keamanan Banten yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial dan Perekonomian Daerah yang Stabil
5) Misi 5 : Mewujudkan Sosial Budaya Banten yang Beradap dan Ekologi yang Lestari

D) Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029 juga menjadi landasan dalam penyusunan arah pembangunan dan kebijakan Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Pemantapan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani
2) Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah
3) Penanggulangan kemiskinan
4) Peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM
5) Penanggulangan pengangguran terintegrasi
6) Peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial
7) Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan
8) Penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana

Visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu *"Banten Maju, Adil, Merata Tidak Korupsi"*. Dalam mewujudkan visi tersebut, dirumuskan melalui misi berikut:

1) Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh
2) Misi 2 : Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial
3) Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif
4) Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas
5) Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana



Gambar 2. 300
Arah Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029
Sumber : Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

2.3.2.4 Isu dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang

A) Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 bersesuaian dengan periode tahap pertama RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dengan fokus pada Penguatan Modal Dasar. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 dengan visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan".

Isu strategis jangka panjang merupakan isu yang dirumuskan berdasarkan kondisi Kabupaten Tangerang, kondisi luar yang memberikan pengaruh, dan kebijakan nasional dan regional selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 terdapat lima isu strategis yakni:

a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia merupakan isu strategis Kabupaten Tangerang. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam isu strategis tersebut meliputi partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, kurangnya pemberdayaan sosial, serta pembangunan dan pemberdayaan gender dan anak yang belum optimal. Selain itu, diperlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah pesisir.

b. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan konstruksi

melambat, memicu deindustrialisasi dini. Selain itu, sektor ekonomi berbasis sumber daya alam seperti pertanian dan perikanan belum optimal karena masalah kapasitas SDM dan kelembagaan. Ketimpangan distribusi pendapatan juga menjadi isu, meskipun Indeks Gini menunjukkan ketimpangan rendah. Produktivitas tenaga kerja yang rendah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, investasi dalam pelatihan tenaga kerja, dan penerapan IPTEK diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Integrasi ekonomi domestik-regional dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur juga penting untuk mendukung posisi strategis Kabupaten Tangerang sebagai penyangga Jakarta.

c. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kabupaten Tangerang memiliki penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur bagi pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan lingkungan menjadi salah satu isu strategis. Isu penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tangerang ditunjukkan oleh belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lingkungan perkotaan, dan belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi.

d. Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pada Kabupaten Tangerang, isu strategis ketahanan sosial dan pengendalian lingkungan hidup memiliki target pembangunan yang membawahinya. Target pembangunan meliputi karakter masyarakat dalam keberagaman budaya, pembangunan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, serta anak, pengelolaan sumber daya alam, kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, serta manajemen kebencanaan.

e. Tata Kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintahan adalah aspek penting dalam pembangunan daerah karena terkait dengan kontrol dan pengawasan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan pembangunan. Isu tata kelola pemerintah Kabupaten Tangerang meliputi Profesionalitas ASN, kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, stabilitas perekonomian daerah, tata laksana pemerintah yang akuntabel serta penegakan hukum dan pembinaan demokrasi.

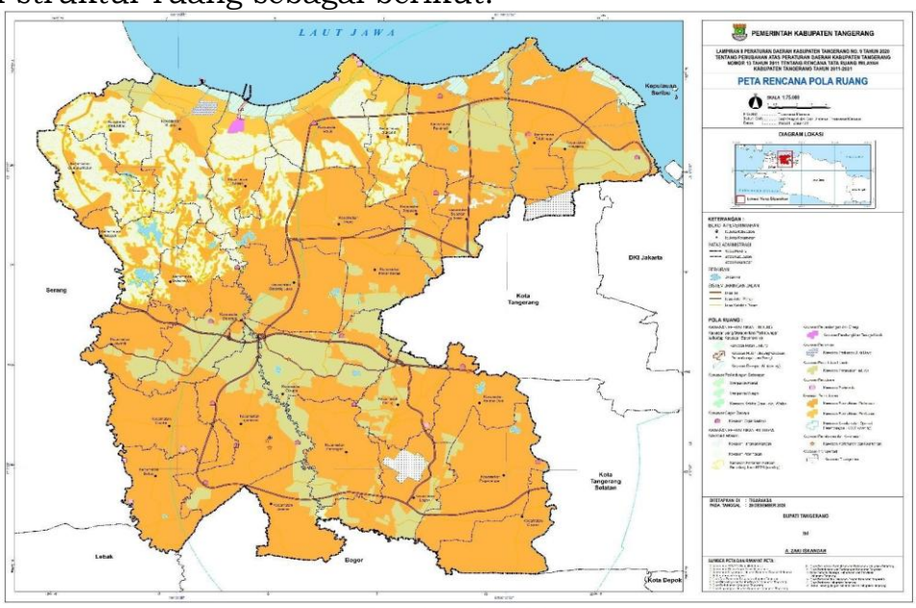
B) Dokumen RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang perlu dipedomani dalam RPJMD adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penataan ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Upaya perwujudan kondisi tersebut lakukan melalui kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
2. Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten;
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;

4. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
5. Rencana pengembangan RTH

Kelima kebijakan penataan ruang tersebut diwujudkan dalam rencana pola dan struktur ruang sebagai berikut:



Gambar 2. 301
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031

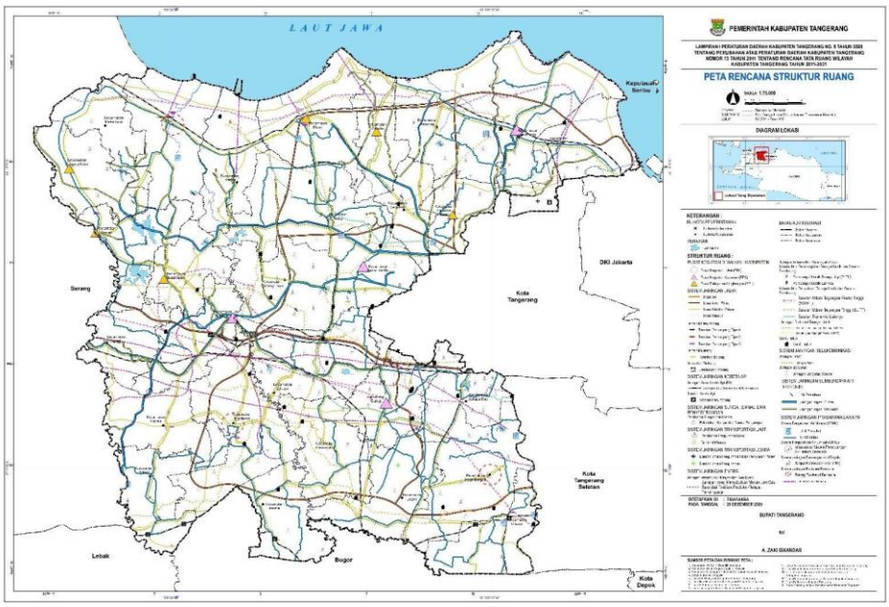
Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kawasan lindung dan budidaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki peruntukan preservasi. Kabupaten Tangerang memiliki kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung yang berupa hutan bakau di sisi pantai utara seluas 1.555,32 Ha, kawasan resapan air seluas 1.555 Ha, kawasan sempadan pantai sebesar 325 Ha, kawasan sempadan sungai dengan luas 529 Ha, dan kawasan sekitar danau dan situ seluas 310 Ha. Masing-masing guna lahan tersebut memiliki peranan dan ketentuan pemanfaatan tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.

2) Kawasan Budidaya

Kabupaten Tangerang memiliki kawasan budidaya yang terdiri atas kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan.



Gambar 2. 302
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031

Rencana sistem perkotaan terdiri dari pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi kawasan perkotaan di sekitar Jabodetabekpunjur yaitu kecamatan Balaraja dan kecamatan Tigaraksa; pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi kecamatan Kronjo, kecamatan Tigaraksa, dan kecamatan Pagedangan; serta pengembangan pusat-pusat kegiatan lain seperti PPK dan PPL yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Rencana jaringan prasarana diperlihatkan dengan perencanaan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Pengembangan jaringan transportasi didukung dengan rencana pembangunan jalan tol, peningkatan kelas terminal tipe A, tipe B, dan tipe C, dan reaktivasi sistem jaringan rel kereta api. Selain itu, perencanaan transportasi laut juga dilaksanakan melalui pengembangan pelabuhan meliputi pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpul lokal, dan terminal khusus laut. Kemudian, pengembangan bandar udara dilaksanakan di bandar udara Soekarno-Hatta dan bandar udara Budiarto.

C) Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi landasan perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah

Kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang dapat berdampak negatif pada lingkungan, terutama dalam penyediaan pangan dan air, serta menghambat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa infrastruktur seperti jaringan jalan, rel kereta api, telekomunikasi, dan energi memiliki tingkat risiko multi bahaya yang tinggi, dengan panjang total yang signifikan. Keterbatasan infrastruktur juga mempengaruhi capaian SDGs, khususnya kualitas air bersih yang baru mencapai 56,43%. Oleh karena itu, diperlukan prioritas penanganan pembangunan infrastruktur untuk memastikan pembangunan daerah tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

b. Pendangkalan aliran sungai serta terkendala dalam penanganan normalisasi fungsi sungai

Rendahnya pengelolaan air limbah domestik dan industri di Kabupaten Tangerang menyebabkan penurunan kualitas penyediaan air dan meningkatkan risiko lingkungan, termasuk banjir seluas 17.372,71 Ha, banjir bandang 76,86 Ha, dan cuaca ekstrem 65.928,34 Ha. Kondisi ini memperburuk pencemaran lingkungan, terutama di kawasan permukiman dan industri, karena limbah yang terhubung dengan saluran drainase dan sungai akan membebani kapasitas aliran dan mempercepat pendangkalan aliran sungai. Dampak buruk ini juga mengurangi kualitas air, mengancam keanekaragaman hayati ekosistem sungai, serta menurunkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Penanganan yang lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan kewajiban pemenuhan standar industri.

c. Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyediaan pangan dan air di Kabupaten Tangerang mengalami dampak signifikan akibat alih fungsi lahan yang mengurangi luas lahan produksi pangan dan kapasitas penyediaan air. Saat ini, lahan produksi pangan seluas 96% dari luas total lahan dan kapasitas penyediaan air di 83% wilayah Kabupaten Tangerang telah terlampaui oleh pembangunan permukiman dan industri, yang meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem. Perubahan ini juga menurunkan kualitas ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Saat ini belum ada upaya penanganan isu alih fungsi lahan sehingga capaian indikator SDGs terkait pertanian dan pengelolaan sumber daya alam belum tercapai. Meskipun ada regulasi perlindungan lahan sawah, dampak negatif alih fungsi lahan terus berlanjut, mengancam kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang.

d. Optimalisasi tata kelola pemerintahan

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan pengelolaan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian SDGs, terutama pada indikator pertumbuhan PDRB dan validitas akta kelahiran, memerlukan perhatian lebih. Untuk mencapai target program SDGs, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya serta tata kelola yang efektif. Hal ini akan mendukung pemenuhan target pembangunan berkelanjutan (TPB) hingga 2030, terutama dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan.

D) Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat peran IPTEK, riset, dan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. *Knowledge Based Policy* menjadi landasan penyusunan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) guna peningkatan tata kelola pemerintah, pelayanan publik, kualitas kebijakan, serta daya saing daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjalankan fungsi pengembangan riset dan inovasi daerah untuk penyelenggaraan pembangunan merumuskan dokumen RIPJID Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

Permasalahan dan isu pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tangerang, yaitu (1) keterbatasan SDM peneliti; (2) minimnya anggaran pengembangan riset dan inovasi daerah; (3) hambatan kultural birokrasi; (4) belum optimalnya kolaborasi riset dan inovasi; (5) belum optimalnya upaya komersialisasi dan hilirisasi hasil riset. Maka dari itu dalam dokumen ini dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah yang diharapkan menjadi arahan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

Tabel 2.68
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tangerang

No	Bidang Permasalahan	Permasalahan Prioritas	Strategi	Arah Kebijakan
1	Kesejahteraan Masyarakat	Derajat kesehatan masyarakat masih rendah	Mengembangkan program pencegahan dan penanganan masalah kematian ibu dan bayi, stunting dan balita gizi buruk, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular (HIV AIDS, kasus ISPA, diare, TBC, dan DBD.	▪ Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas ▪ Optimalisasi respon kegawatdaruratan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan ▪ Meningkatkan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang ▪ Meningkatkan ketersediaan obat dan logistik kesehatan ▪ Meningkatkan program jaminan sosial dan bantuan langsung bagi masyarakat miskin dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dan balita gizi buruk
2	Ekonomi	Ketimpangan pembangunan ekonomi	Meningkatkan pemerataan dan pembukaan akses terhadap fasilitas bagi masyarakat demi mengurangi ketimpangan ekonomi	▪ Penyusunan dan penguatan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi ▪ Kebijakan *Job Matching* antara vokasi dan industri ▪ Pembangunan perumahan yang berada di dalam wilayah perkotaan yang terkoneksi baik dengan pusat aktivitas, sumber ekonomi, dan transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan ▪ Meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern
3	Lingkungan	Infrastruktur serta Pengelolaan kebencanaan dan lingkungan hidup	Meningkatkan riset dan inovasi di daerah serta kemitraan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan menyelaraskan sesuai perkembangan global	▪ Optimalisasi kebijakan disertai dengan basis data riset dan inovasi ▪ Menyediakan anggaran guna memanfaatkan serta melindungi kekayaan intelektual ▪ Diperlukan kerja sama dengan kemitraan baik lokal maupun internasional untuk membentuk jaringan sehingga memudahkan dalam transfer teknologi dan memberikan penghargaan ▪ Mengadakan sosialisasi serta latihan teknis dan mengembangkan hingga implementasi ▪ Meningkatkan sinkronisasi antar lembaga serta pelaku industri hingga terbentuk klaster guna menerapkan *predict* and *prevent*
4	Tata Kelola Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang belum kolaboratif	Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak (stakeholder) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan	▪ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ▪ pemerintahan ▪ Mengembangkan forum komunikasi dan konsultasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ▪ Mengimplementasikan sistem *e-governance* untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi

Sumber: Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

2.3.2.5 Rumusan Isu Strategis Jangka Menengah

Berdasarkan rumusan masalah, isu strategis, dan potensi Kabupaten Tangerang, rumusan isu strategis Kabupaten Tangerang lima tahun ke depan meliputi:

A) Tata Kelola Pemerintahan

1) Penyelenggaraan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi berkaitan dengan integrasi sektor pelayanan publik, pengawasan daerah, dan berbagai sektor mulai dari kependudukan, kearsipan, persandian, komunikasi dan informatika, statistik pemberdayaan masyarakat dan desa, pengelolaan aset daerah hingga manajemen ASN. Penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Tangerang saat ini masih belum optimal dan efektif. Permasalahan terkait reformasi birokrasi berkaitan dengan beberapa aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi daerah, maupun koordinasi antar sektor.

2) Penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik

Kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan yang disusun oleh berbagai elemen pendukung. Mulai dari ideologi Pancasila, wawasan dan karakter masyarakat, kehidupan berpolitik, organisasi kemasyarakatan, pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang, serta secara umum mencakup ketahanan sosial, ekonomi dan budaya.

3) Pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu pondasi penting yang berkorelasi positif dalam mewujudkan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Keamanan merupakan bagian yang terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban adalah : 1) belum optimalnya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, 2) belum optimalnya penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, serta 3) belum optimalnya penanganan konflik di masyarakat.

B) Perekonomian dan Daya Saing Daerah

Perekonomian dan daya saing daerah merupakan isu strategis Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah. Dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang komprehensif.

1) Perekonomian yang Maju

Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan dua aspek yang saling terkait dalam menentukan kemajuan daerah. Produktivitas ekonomi mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dalam menghasilkan nilai tambah. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam ekonomi suatu daerah yang dapat dilihat dari peningkatan pemasukan daerah. Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, perlu diidentifikasi performa komoditas unggulan (perindustrian, perdagangan, dan jasa) serta komoditas potensial (pertanian, perikanan, dan pariwisata).

Sektor perindustrian serta perdagangan-jasa menjadi tulang-punggung perekonomian Kabupaten Tangerang. Akan tetapi, kedua sektor tersebut memiliki permasalahan dari sisi produktivitas, nilai tambah (hilirisasi), daya saing produk, infrastruktur pendukung, daya saing tenaga kerja, serta tata kelola berkelanjutan. Akar permasalahan ini adalah: (1) belum optimalnya sistem pengawasan dan kepastian regulasi; (2) keterbatasan infrastruktur penghubung pusat-pusat perekonomian (*supply*

dan pasar); (3) terbatasnya kemitraan untuk rantai hilirisasi dan inovasi produk; serta (4) keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM.

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi komoditas potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Tangerang. Akan tetapi, sektor tersebut memiliki berbagai permasalahan dari sisi kapasitas SDM pertanian, produktivitas, daya saing produk, infrastruktur pendukung, manajemen/kelembagaan, serta faktor iklim dan geografis wilayah. Akar permasalahan ini adalah (1) keterbatasan infrastruktur dan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha; (2) rendahnya regenerasi petani/ nelayan; (3) kesejahteraan petani; (4) belum optimalnya kemitraan dan manajemen kelompok tani dan nelayan; serta (5) adaptasi-mitigasi terhadap cuaca/iklim. Selain itu, Kabupaten Tangerang memiliki potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi sumber pendapatan daerah. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya tata kelola kawasan strategis pariwisata, kurangnya daya tarik objek wisata, belum optimalnya pemanfaatan sektor MICE (*Meetings, Incentives, Conferences*, dan *Exhibitions*), serta keterbatasan sarana-prasarana penunjang aktivitas wisata.

2) Skalabilitas Ekonomi Mikro

Perekonomian yang maju harus diikuti dengan penurunan ketimpangan dan penguatan ekonomi mikro. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing dan skalabilitas ekonomi di akar rumput yang meliputi UMKM, koperasi, BUMD, BUMDes, serta kewirausahaan. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah dapat dilihat dari sisi produktivitas, tata kelola usaha dan kelembagaan, rantai dan akses pasar, keterbatasan permodalan. Akar permasalahan ini adalah: (1) terbatasnya kemitraan untuk rantai hilirisasi dan inovasi produk; (2) keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM; serta (3) keterbatasan informasi dan kemitraan untuk mengakses pasar.

3) Daya Saing dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Pembangunan kualitas dan penyerapan tenaga kerja merupakan aspek dalam isu strategis perekonomian dan daya saing daerah. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja di suatu daerah. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah *missmatch* dengan lapangan pekerjaan, keterbatasan informasi lapangan kerja, keterbatasan pelatihan tenaga kerja, keterbatasan layanan perlindungan ketenagakerjaan. Akar permasalahan ini adalah: (1) terbatasnya kemitraan antara tenaga kerja dan perusahaan; (2) keterbatasan pendataan dan sistem informasi ketenagakerjaan; serta (3) belum optimalnya tata kelola, regulasi, dan pengawasan ketenagakerjaan.

4) Daya Saing Daerah dan Iklim Investasi

Peningkatan nilai tambah perekonomian didorong melalui daya saing daerah untuk berinovasi dan menghasilkan produk dengan keunggulan kompetitif, terlebih posisi Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Maka dari itu diperlukan integrasi ekonomi atau kerja sama lintas wilayah dan lintas *stakeholder* (e.g. pemerintah, badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) yang dilandasi dengan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dari sisi kewenangan/kelembagaan, tata kelola pemerintah, kepastian regulasi, dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Akar permasalahan ini adalah: (1) belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan serta koordinasi antar K/L dan OPD terkait; (2) belum optimalnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal; (3) belum optimalnya adaptasi terhadap perubahan sistem perijinan menjadi OSS; serta (4) keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM.

C) Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan gambaran kondisi kesehatan individu maupun masyarakat di Kabupaten Tangerang. Untuk itu perlu diwujudkan derajat kesehatan yang merata dan berkualitas sebagai bentuk keberhasilan pembangunan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan kesehatan yang masih menjadi sorotan di Kabupaten Tangerang berkaitan dengan distribusi fasilitas kesehatan, kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat, serta tingkat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, termasuk di dalamnya problem *stunting*. Akar permasalahan dari beberapa hal tersebut berkutat seputar kualitas dan kapasitas SDM, pelaksanaan regulasi, serta koordinasi antar sektor yang mendukung penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

D) Kualitas Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek dasar yang membentuk daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang. Sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang, yakni : 1) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, 2) belum optimalnya pembentukan karakter peserta didik, 3) belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat, 4) kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, 5) belum maksimalnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

E) Pemenuhan, Penataan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

1) Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar merupakan aspek dari isu pemenuhan, penataan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur lingkungan masyarakat. Lingkup infrastruktur dasar meliputi infrastruktur Standar Pelayanan Minimum (SPM), permukiman yang layak, infrastruktur perhubungan dan transportasi, serta sarana penunjang sektor perekonomian.

Infrastruktur Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi standar penghidupan yang layak dan pemerintah diharuskan menjamin akses masyarakat terhadap layanan/ infrastruktur tersebut. Akan tetapi permasalahannya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap infrastruktur tersebut dari sisi ekonomi, sarana prasarana pendukung (jalan dan transportasi), dan geografis wilayah. Sanitasi dan permukiman layak merupakan infrastruktur dasar dan meningkatkan *quality of life* masyarakat. Akan tetapi permasalahannya adalah belum optimalnya regulasi penanganan permukiman tidak layak huni, minimnya inventarisasi/ pendataan cakupan permukiman kumuh, serta kecenderungan masyarakat menggunakan sarana-prasarana bermukim mandiri/ alami yang tidak sesuai standar.

Dukungan infrastruktur berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi permasalahannya adalah terbatasnya infrastruktur pendukung pada komoditas unggulan (perindustrian dan perdagangan) serta komoditas potensial (pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata). Akar permasalahan tersebut adalah keterbatasan anggaran, minimnya kemitraan untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur, serta belum optimalnya regulasi dan/atau skema insentif-disinsentif untuk pengembangan infrastruktur tersebut. Selain itu, infrastruktur perhubungan dan transportasi menjadi *backbone* pergerakan dan perekonomian daerah.

Akan tetapi permasalahannya adalah belum optimalnya tata kelembagaan bidang perhubungan, terbatasnya sarana-prasarana jalan dan pengawasan ketertiban lalu lintas, serta belum terintegrasinya moda transportasi umum.

2) Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan

Pengembangan Infrastruktur wilayah harus berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya regulasi dan skema insentif-disinsentif bagi infrastruktur berkelanjutan, belum optimalnya tata kelola dan koordinasi lintas OPD dan K/L untuk pengembangan infrastruktur berkelanjutan, belum optimalnya kemitraan untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur, serta keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM dalam pengembangan infrastruktur.

3) Kerjasama Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas wilayah dan lintas *stakeholder.* Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Tangerang dalam bagian aglomerasi Jabodetabek yang memiliki agenda kerjasama pembangunan dan layanan yang infrastruktur terintegrasi. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan serta koordinasi antar K/L dan OPD serta belum optimalnya tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi.

4) Pengembangan pembangunan wilayah utara dan tengah Kabupaten Tangerang

Isu kesenjangan wilayah utara dan tengah menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam merespon kebutuhan masyarakat akan pemerataan dan efisiensi pembangunan. Pengembangan wilayah tidak akan berhasil tanpa dukungan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas harus terintegrasi dengan rencana tata ruang. Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah di bagian utara dan tengah Kabupaten Tangerang dapat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

F) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Ketahanan Air, Energi, dan Pangan

Ketahanan air, pangan, dan energi merupakan kebutuhan dasar manusia dan harus dapat terpenuhi dalam jangka panjang. Akan tetapi, terdapat berbagai permasalahan dalam menjamin ketahanan daerah. Tantangan ketahanan air adalah penurunan kualitas dan kuantitas air bersih yang ditunjukkan dengan hasil neraca air menunjukkan defisit air serta 83% wilayah merupakan daerah krisis air[7]. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih serta keterbatasan sarana-prasarana pengelolaan air baku dan air bersih.

Pengelolaan cadangan pangan daerah merupakan aspek yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dalam suatu daerah. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas serta belum meratanya cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam hal ketahanan energi, cakupan layanan infrastruktur energi telah memenuhi, tetapi tantangan kedepannya adalah transisi penggunaan

---

[7] Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

energi baru terbarukan. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya tata kelola dan manajemen dalam pengembangan EBT serta keterbatasan sarana-prasarana dalam pengadaan dan pengembangan EBT di Kabupaten Tangerang.

2) Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Hidup

Perlindungan kawasan konservasi dan lindung berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan *quality of life.* Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi, belum ketatnya regulasi dan fungsi pengawasan terhadap kawasan konservasi, belum optimalnya pendataan/ inventarisasi kawasan lindung/ konservasi, serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup.

3) Resiliensi terhadap Bencana

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki risiko terhadap bencana, sehingga manajemen risiko bencana yang responsif dan terpadu menjadi kunci dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah: (1) belum optimalnya tata kelola manajemen penanggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana; (2) terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana; serta (3) belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Tabel 2.69
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Capaian indeks reformasi birokrasi 76,67/100 dengan kategori sangat baik (2023) - Capaian indeks kepuasan masyarakat 84,79/100 (2023)	Belum optimalnya reformasi birokrasi	- Optimalisasi tata kelola pemerintahan - Tingkat SDM rendah terhadap pelayanan pemerintah berbasis elektronik	- Demografi Dunia - Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi - Kemajuan Teknologi - Urbanisasi Global	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Tata Kelola Pemerintah
	Belum optimalnya kesatuan bangsa dan politik			Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata kelola pemerintahan yang berintegritas	
	Belum optimalnya pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pembangunan keamanan wilayah, demokrasi substansial dan ekonomi makro berketahanan yang tangguh	
- Sektor perindustrian dan sektor perdagangan-jasa berkontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Tangerang, akan di proyeksikan meningkat karena Kabupaten Tangerang menjadi wilayah aglomerasi Jabodetabek dan pengembangan kawasan strategis nasional - Sektor pariwisata akan meningkat dengan adanya peningkatan daya tarik wisata di sektor MICE	Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan (perindustrrian, perdagangan,jasa) dan komoditas potensial (pertanian, perikanan, pariwisata) berlandaskan prinsip berkelanjutan	- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah - Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri	- Perubahan Iklim - Kemajuan Teknologi - Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- Pembangunan perekonomian yang tanggung dan inklusif	Perekonomian dan Daya Saing Daerah
- Adanya program inkubasi bisnis untuk penciptaan wirausaha muda	Lemahnya daya saing kewirausahaan serta	- Belum optimalnya	- Kemajuan Teknologi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	- Pembangunan perekonomian yang	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
dan peningkatan skalabilitas usaha mikro kecil - Peningkatan persentase IKM yang berpeluang ekspor (pada tahun 2023 mencapai 38,86%	skalabilitas usaha mikro - kecil menengah, koperasi, dan BUMD	pembangunan infrastruktur wilayah	- Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi"	lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	tanggung dan inklusif	
	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan serta pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	- Demografi Dunia	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	- Pembangunan perekonomian yang tanggung dan inklusif - Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing	
- Sektor perindustrian dan perdagangan-jasa yang berorientasi padat karya berpotensi meningkatkan serapan tenaga kerja	Lemahnya daya saing tenaga kerja dan belum optimalnya jaminan kesejahteraan tenaga kerja	Peningkatan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	- Demografi Dunia - Kemajuan Teknologi	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	- Pembangunan perekonomian yang tanggung dan inklusif - Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing	
- Kabupaten Tangerang bagian dari wilayah aglomerasi Jabodetabek yang mendorong *spillover effect* dan daya saing daerah untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi - Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN (pada tahun 2023 mencapai 26,81%)	Belum optimalnya daya saing daerah dan manajemen iklim investasi	- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah	- Kemajuan Teknologi - Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi"	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- Pembangunan perekonomian yang tanggung dan inklusif - Pembangunan keamanan wilayah, demokrasi substansial dan ekonomi makro	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					berketahanan yang tangguh	
- Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang tahun 2024 menempati urutan ketiga tertinggi apabila dibandingkan dengan kab/kota lain di Provinsi Banten dengan capaian 70,88 tahun - Beberapa cakupan pelayanan kesehatan (kunjungan ibu hamil, pelayanan nifas, kunjungan bayi, pelayanan anak balita, penemuan dan penanganan DBD, dll) telah mencapai 100% pada tahun 2023	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah	- Demografi Dunia - Perubahan Iklim - Urbanisasi Global	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing - Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan	Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial
-	Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pendidikan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah	- Demografi Dunia - Kemajuan Teknologi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing	Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial
	Belum optimalnya penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar yang terpadu, berkualitas, dan ramah lingkungan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah	- Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi - Urbanisasi global	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan	- Pembangunan perekonomian yang tangguh dan inklusif - Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan	Pemenuhan, Penataan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
				agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
- Data potensial bidang perdagangan : 14 item hilir mudik jalur logistik Terdapat 50 pasar, agen LPG, pangkalan, SPBU dll (kurang lebih 3880 unit) - Terdapat beberapa rencana pengembangan kawasan sbb: 1. Kabupaten Tangerang memiliki kawasan Urban Akuakultur di Ketapang 2. Rencana pembangunan kawasan pesisir di Desa Ketapang 3. Rencana kawasan permukiman nelayan di Kronjo 4. Rencana penataan kawasan permukiman Desa Surya Bahari 5. Rencana Tanjung Pasir Mangrove 6. Penataan permukiman nelayan kawasan Cituis - Upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengadaan kolam budidaya dan kolam pakan ikan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur berlandaskan kesesuaian pemanfaatan ruang dan daya dukung wilayah			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa memalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
Kabupaten Tangerang bagian dari wilayah aglomerasi Jabodetabek yang mendorong spillover effect dan daya saing daerah untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kerjasama antar daerah (utamanya aglomerasi Jabodetabek) untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Adanya program dan kegiatan desa mandiri pangan (mis. Mandiri Tahan Pangan, ketahanan pangan kawasan pesisir Tangerang, dll) - Adanya program mengenai peningkatan kapasitas dan pelayanan air bersih (mis. Instalasi Pelayanan Air Bersih, Instalasi Pengolahan Air, dll) - Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki potensi air baku dari DAS, sumber air permukaan, dan CAT	Belum optimalnya ketahanan air, energi, dan pangan	- Rendahnya kualitas lingkungan hidup - Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri - Belum Optimalnya Kinerja Saluran Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Industri	- Perubahan Iklim - Kemajuan Teknologi - Demografi Dunia	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa memalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup	- Rendahnya kualitas lingkungan hidup - Pendangkalan aliran sungai serta terkendala dalam penanganan normalisasi fungsi sungai - Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri - Belum Optimalnya Kinerja Saluran Pengelolaan Air Limbah Domestik dan	- Perubahan Iklim	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		Industri				
	Belum optimalnya manajemen risiko bencana	- Rendahnya Tingkat Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman dan Perumahan Perdesaan - Rendahnya kualitas lingkungan hidup - Pendangkalan aliran sungai serta terkendala dalam penanganan normalisasi fungsi sungai - Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri"	- Perubahan Iklim - Kemajuan Teknologi	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan	
- Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, meski capaian indeksnya baru 63,84 - Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial telah	Belum optimalnya ketahanan sosial masyarakat	Belum Optimal dalam Kesetaraan Gender, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Demografi Dunia	- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing - Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal	Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
mencapai 100% pada tahun 2019 - 2023				- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		
- Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2023 mencapai 100%	Belum optimalnya pengembangan seni budaya dan olahraga	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah	- Demografi Dunia - Kemajuan Teknologi	- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	- Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing - Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal	

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi dan misi pembangunan. Visi dan misi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 merupakan visi dan misi dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode kepemimpinan tahun 2025-2029. Visi dan misi pembangunan diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang. Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Visi dan Misi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang.

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

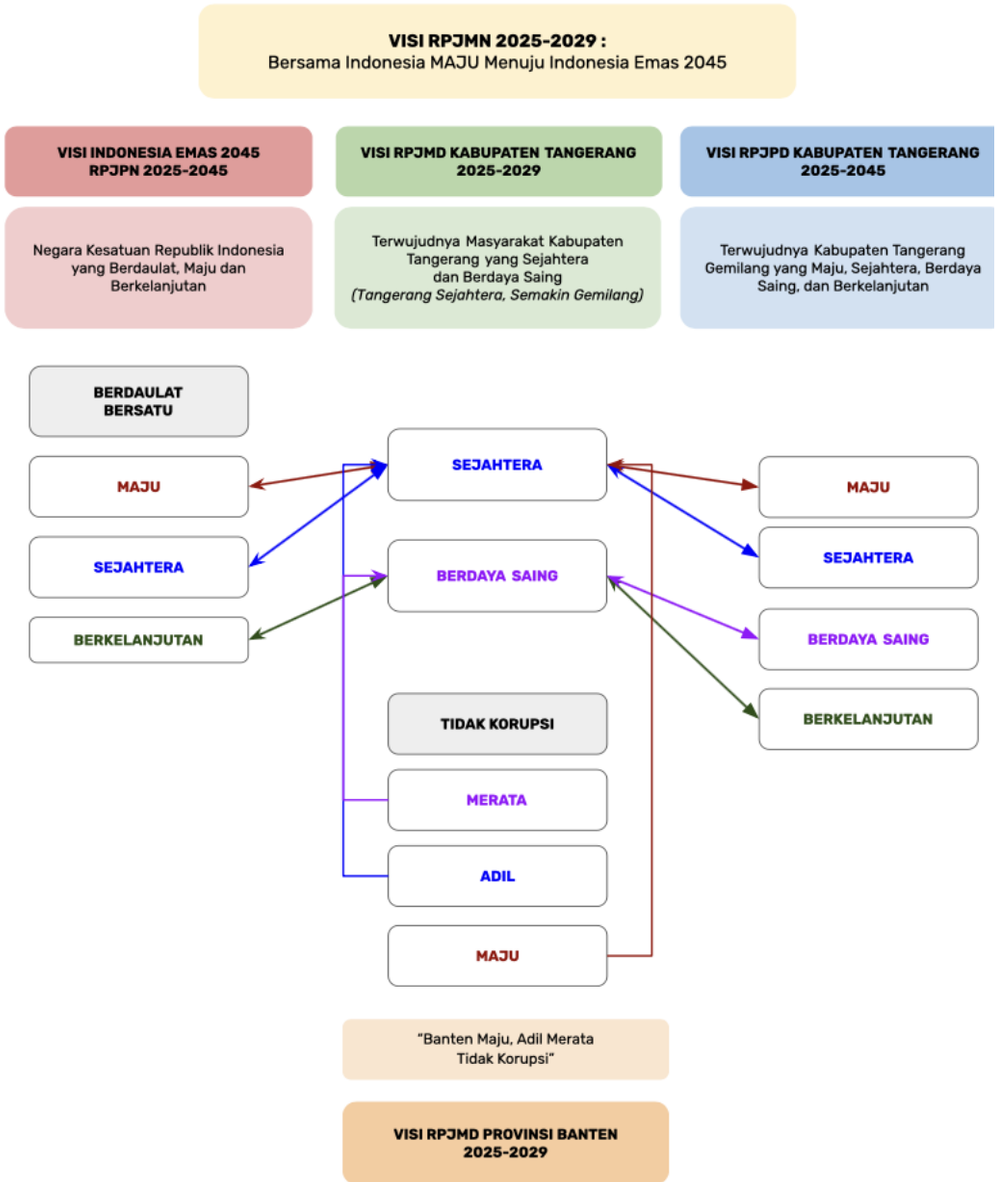
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"
(Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)

Penjabaran visi di atas merujuk pada kata kunci sebagai berikut:

a) Sejahtera
   Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama.
   Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus didunia keagamaan.
b) Berdaya Saing
   Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas.
   Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi buruk, Kemudahan berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Tangerang selaras dengan Visi Asta Cita RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang diterjemahkan dalam 8 Misi (Asta Cita) yang didukung

oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu *"Banten Maju, Adil, Merata Tidak Korupsi"* yang diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan. Kata kunci Visi RPJMD Kabupaten Tangerang telah selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten, yaitu pembangunan yang maju dan berdaya saing yang berlandaskan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.1
Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, RPJPN, RPJMD Provinsi Banten dan RPJPD Kabupaten Tangerang
Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Visi Pembangunan Daerah diterjemahkan dalam Misi Pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, serta arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Rumusan misi di bawah ini didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan serta misi calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang diformulasikan ke dalam 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Pemerintahan yang akuntabel dan efisien merupakan bagian dari prinsip *good governance.* Prinsip akuntabel menjadi acuan dalam menjalankan program dan kebijakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepercayaan publik. Efisiensi diperlukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif.

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal serta pencegahan terhadap gangguan keamanan masyarakat yang efektif. Perwujudan pelayanan publik yang optimal mulai dari administrasi hingga layanan pengaduan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan melalui pendekatan yang lebih responsif. Melalui penerapan sistem yang lebih sederhana dan efisien dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan keperluan administrasi tanpa melewati birokrasi yang berbelit. Selain itu, hal yang menjadi prioritas adalah penguatan SDM sektor pelayanan yang diharapkan dapat menciptakan aparat/birokrat memiliki kompetensi dan sikap profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan tindakan preventif yang intregratif dengan pelayanan publik. Koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat melalui program-program keamanan lingkungan dan sosialisasi keamanan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, lingkungan aman dan kondusif sangat sesuai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial.

2. Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang kuat, produktif, dan berdaya saing menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan tingkat kemiskinan, menekan ketimpangan, kapasitas tenaga kerja yang berdaya saing, serta adaptif terhadap tantangan global dan nasional (e.g. geoekonomi, pembangunan berkelanjutan, penurunan GRK, transisi EBT, dan lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pondasi ekonomi kerakyatan serta memperkuat sistem perdagangan dan jasa untuk pengembangan ekonomi daerah.

Perekonomian yang maju ditunjukkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai tambah sektor unggulan (e.g. industri, perdagangan dan jasa, serta manufaktur) dan sektor potensial (e.g. pertanian, perikanan, peternakan, serta pariwisata). Peningkatan nilai tambah perekonomian didorong melalui daya saing tenaga kerja untuk berinovasi dan menghasilkan produk dengan keunggalan kompetitif. Selain itu, perekonomian yang maju ditunjang dengan infrastruktur penghubung dalam integrasi ekonomi domestik dan regional dalam mengakses pasar dan kemudahan pergerakan orang – barang. Selain itu, akses terhadap pasar juga berhubungan dengan menjaga kestabilan kebutuhan pokok agar distribusi barang dan daya beli masyarakat tetap terjaga demi ketahanan sosial-ekonomi daerah. Integrasi ekonomi membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan lintas *stakeholder* (e.g. pemerintah, badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) yang dilandasi dengan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif.

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkeadilan diwujudkan melalui peningkatan daya saing dan skalabilitas ekonomi di akar rumput yang meliputi UMKM, koperasi, badan usaha desa, serta kewirausahaan. Skalabilitas ekonomi mikro didorong melalui kemudahan akses terhadap

pemodalan, pengembangan kapasitas tenaga kerja dalam manajemen usaha, inkubasi bisnis kewirausahaan, serta kemudahan akses terhadap pasar.

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkelanjutan menunjukkan komitmen untuk transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui pengetatan regulasi untuk aktivitas perekonomian dengan prinsip berkelanjutan dan sirkular serta investasi terhadap transisi energi baru terbarukan (EBT).

3. Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas

Kesehatan masyarakat yang berkualitas di Kabupaten Tangerang dapat diwujudkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh optimalisasi pemberian layanan kesehatan dengan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas di setiap kecamatan, serta peningkatan pola hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat. Pengoptimalan layanan kesehatan diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan. Selain peningkatan kuantitas, perlu ditunjang dengan pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi rekrutmen tenaga kesehatan serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemberian jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu perlu dilakukan secara merata di seluruh wilayah dan untuk seluruh lapisan.

Terwujudnya kesehatan yang berkualitas juga perlu didukung melalui pemenuhan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Pembangunan dan perbaikan unit-unit layanan kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan layanan serta pemenuhan kebutuhan peralatan medis yang sesuai standar. Upaya tersebut juga sejalan dengan target untuk menekan angka kesakitan dan stunting, yang diimbangi dengan peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai program kesehatan yang bersifat preventif, seperti edukasi, pemeriksaan kesehatan berkala, pemenuhan gizi masyarakat, dan penerapan PHBS, digalakkan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.

4. Misi Keempat : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, optimalisasi layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif menjadi salah satu komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya yang memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, baik dari kelompok disabilitas maupun anak-anak di daerah terpencil, dengan fasilitas pendidikan sesuai standar yang tersedia secara merata. Peningkatan kualitas pembelajaran salah satunya ditunjukkan dengan penguatan literasi dan numerasi sebagai dasar kemampuan akademik peserta didik. Kemampuan akademik perlu diimbangi dengan pembentukan karakter peserta didik melalui pendekatan kurikulum muatan lokal. Selain penghayatan nilai budaya, nilai-nilai toleransi perlu disisipkan dalam pendidikan sejak dini, sebagai modal dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tangerang.

Upaya-upaya sebelumnya perlu didukung dengan pengoptimalan kuantitas dan kualitas maupun kompetensi tenaga pendidik, melalui pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pengadaan pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Di samping itu, perwujudan sistem pendidikan yang berkualitas juga didukung melalui pengembangan potensi kepemudaan, seni budaya, dan olahraga. Hal tersebut dapat menumbuhkan kecakapan dalam bekerja sama, memiliki kedisiplinan tinggi, serta akan menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai luhur.

5. Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur terpadu merupakan landasan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan *Quality of Life* bagi wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui peningkatan penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan. Infrastruktur dasar menjadi fondasi dalam mendorong daya saing sumber daya manusia (e.g. pendidikan, kesehatan, dan permukiman) serta mengakselerasi aktivitas perekonomian wilayah (e.g. nilai tambah sektor, perhubungan dan perdagangan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar serta mewujudkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tangerang.

Pengembangan infrastruktur wilayah harus berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Hal ini terwujud melalui (1) Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara, (2) pengembangan *Blue-Green Infrastructure* dan infrastruktur penunjang Energi Baru Terbarukan (EBT); serta (3) Keterpaduan penataan bangunan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan perencanaan tata ruang serta daya dukung lingkungan.

Pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas wilayah dan lintas *stakeholder.* Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Tangerang dalam bagian aglomerasi Jabodetabek yang memiliki agenda kerjasama pembangunan dan layanan yang infrastruktur terintegrasi. Selain itu, juga beberapa proyeks strategis nasional di Kabupaten Tangerang yang membutuhkan kerjasama lintas K/L dan *stakeholder* terkait. Berbagai opsi skema pembiayaan kreatif seperti KPBU diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar di Kabupaten Tangerang. Kerjasama dan kolaborasi juga membuka peluang untuk mendorong realisasi investasi dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur.

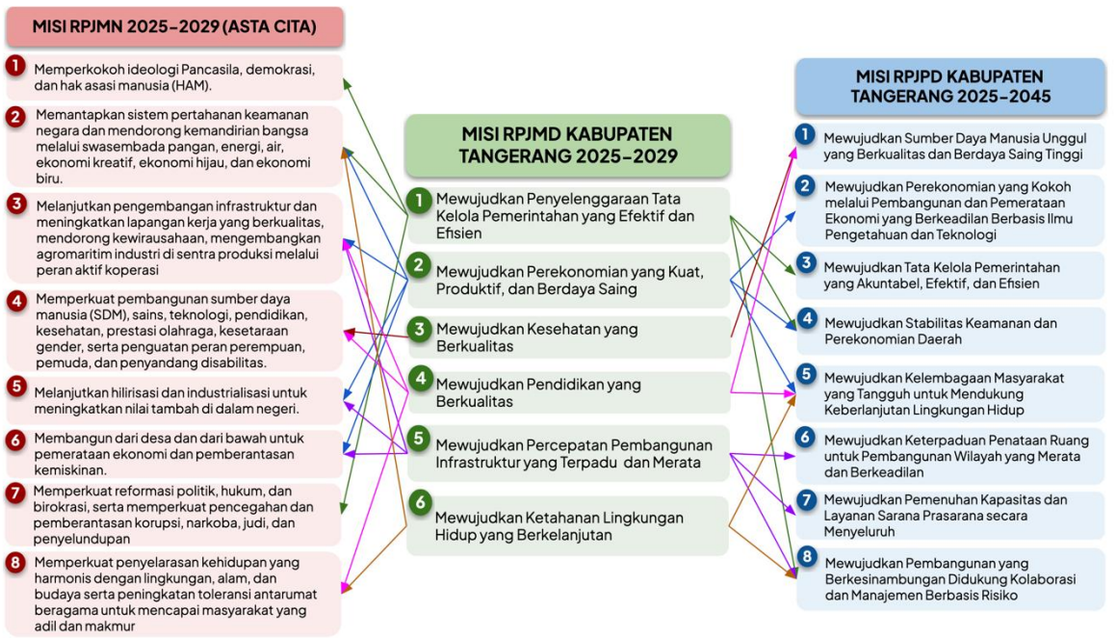
6. Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologis menjadi landasan dan penyangga pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui (1) Peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan daerah; (2) Peningkatan perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup; (3) Peningkatan manajemen risiko bencana yang responsif. Strategi dalam pencapaian misi ini adalah meningkatkan penanganan masalah lingkungan, serta melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati untuk generasi masa depan.

Ketahanan air, pangan, dan energi merupakan kebutuhan dasar manusia dan harus dapat terpenuhi dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan energi memerlukan langkah strategis dalam efisiensi pendayagunaan sumber daya alam, diversifikasi dan konservasi energi, dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Perlindungan kawasan konservasi dan lindung berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Maka dari itu, diperlukan arahan strategis dalam perlindungan ekosistem melalui optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi, penegakan regulasi pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, serta pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki risiko terhadap bencana, sehingga manajemen risiko bencana yang responsif dan terpadu menjadi kunci dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Manajemen risiko bencana diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana



Gambar 3.2
Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, dan RPJPD Kabupaten Tangerang
Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing, ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang sesuai dengan arah Provinsi Banten, khususnya indikator makro pembangunan dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

No	Target RPJMD Provinsi Banten 2025-2029			Target RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029		
	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20-5,30	7,23-7,90	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27	7,56
2	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	72,35-75,10	104,00-106,40	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	57,51	69,75
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,0	3,8	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	21,18	21,00
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,50	2,42-3,42	Tingkat Kemiskinan (%)	5,94	4,67
5	Rasio Gini (nilai)	0,344-0,365	0,326-0,330	Rasio Gini (nilai)	0,266-2,70	0,243-0,258
6	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56	0,59	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	76,62	79,42
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,45	56,65	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	18,21	19,62
8	IKLH (nilai)	66,92	67,93	IKLH (nilai)	61,57	72,26
9	TPT (%)	6,87-7,24	6,39-6,82	TPT (%)	6,06-6,62	5,50-5,62

Sumber : Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029; Analisis Penyusun

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan sebagai arahan strategis dalam kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran adalah penjabaran tujuan dan dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sebagai tolak ukur pembangunan daerah.

Adapun penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten. Dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 terdapat 8 Misi (Asta Cita)

dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Dalam RPJMD Provinsi Banten memiliki arah pembangunan kewilayahan untuk masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 3.2
Penyelarasan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Prioritas dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

RPJM Nasional 2025-2029		RPJMD PROVINSI BANTEN 2025-2029		RPJMD KABUPATEN TANGERANG 2025-2029	
VISI Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		VISI Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi		VISI Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)	
ASTA CITA	*QUICK WINS*	MISI	INTERVENSI SUPER PRIORITAS	ISU STRATEGIS	MISI
PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 PRIORITAS 7	✓ Menaikkan gaji ASN (TNI/Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), serta pensiunan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh	Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Digitalisasi tata kelola pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
PRIORITAS 2 PRIORITAS 3 PRIORITAS 5 PRIORITAS 6	✓ Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%. ✓ Menambah dan memberikan program kartu-kartu kesejahteraan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran. ✓ Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	Pengembangan hilirisasi industri dan optimalisasi pengembangan KEK dan PSN	Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing
PRIORITAS 4	✓ Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. ✓ Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif	Penataan tata kelola rumah sakit dan pelayanan kesehatan serta pengembangan konsep *hospital tourism/ medical tourism*	Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas
PRIORITAS 3 PRIORITAS 4 PRIORITAS 8	✓ Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. ✓ Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak.		Pengembangan *Center of Excellence, Science Park* dan *Technopark*. pengembangan layanan pendidikan dasar-menengah dan pendidikan tinggi	Kualitas Layanan Pendidikan	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas
PRIORITAS 3 PRIORITAS 5 PRIORITAS 6	✓ Membangun dan melanjutkan infrastruktur desa dan kota, termasuk infrastruktur transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Pengembangan transportasi publik massal yang terintegrasi serta pengembangan jalan tol, nasional, provinsi, dan kab/kota sebagai penunjang mobilitas barang dan jasa	Pemenuhan, Penataan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
PRIORITAS 2 PRIORITAS 8	✓ Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pengembangan energi terbarukan serta peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sumber : Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029; Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 (diolah)

Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

1) Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif
   Sasaran :
   - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
   - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing

1) Tujuan Pertama : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
   Sasaran :
   - Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial

- Meningkatnya skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD
- Mengendalikan Harga Bahan Pokok

2) Tujuan Kedua : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
   Sasaran :
   - Meningkatnya Kemandirian Desa
   - Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
   - Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Misi Ketiga : Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas

1) Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
   Sasaran:
   - Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal
   - Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat

Misi Keempat : Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas

1) Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat
   Sasaran:
   - Meningkatnya Pelayanan Pendidikan
   - Meningkatnya Daya Saing Pemuda
   - Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama

Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

1) Tujuan : Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan.
   Sasaran :
   - Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas
   - Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu

Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

1) Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Derah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
   Sasaran :
   - Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
   - Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan

Tabel 3.3
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	BASELINE		TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING" (Tangerang Sejahtera. Semakin Gemilang)	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Mewujudkan Birokrasi yang Responsif. Akuntabel. dan Inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	76,67	84,56	85,12	85,68	86,24	87,38	87,96	88,54	88,54
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (indeks) **)	4,08	4,17	4.23	4.27	4.30	4.34	4.37	4.40	4,40
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks PEMDI	N/A	N/A	N/A	1,91	2,1	2,3	2,50	2,70	2,70
				Indeks Professionalitas ASN (indeks) **)	83,71	82,28	82,40	82,5	82,55	82,60	82,70	83,00	83,00
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)	73,456	73,96	74,46	74,96	75,46	75,96	76,46	76,96	76,96
				Nilai AKIP (nilai) **)	73,01	75,2	76	77	78	79	80,10	80,20	80,20
				Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (indeks)	N/A	99,8	91	92	93	94	95	96	96
				Maturitas SPIP (indeks) **)	3	3	4	4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,00	5,27	5,77	6,31	6,91	7,56	8,27	8,27
				Tingkat Inflasi (%) **)	3,17	1,8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%) **)	33,65	33,74	33,55 - 33,75	33,55 - 33,75	33,60 - 33,80	33,60 - 33,80	33,65 - 33,85	33.70 - 33.90	33.70 - 33.90
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,05	11,35	11,15 - 11,35	11,21 - 11,37	11,25 - 11,40	11,29 - 11,43	11,31 - 11,45	11.33 - 11.50	11.33 - 11.50
				Kontribusi sektor pertanian. kehutanan. dan perikanan terhadap PDRB (%)	6,3	6,16	6,07	6,1	6,14	6,14	6,2	6,21	6.21
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (%) **)	1,49	1,56	1,76	1,83	1,91	1,99	2,07	2,15	2,15
				Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (% PDRB) **)	26,97	26,97	27,02	27,08	27,14	27,20	27,26	27,32	27,32
			Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD	Rasio Volume Usaha Koperasi (%) **)	1,25	1,25	1,26	1,27	1,29	1,30	1,31	1,33	1,33
			Mengendalikan Harga Bahan Pokok	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5,08	4,13	5,11	5,14	5,16	5,18	5,23	5,28	5,28

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	BASELINE		TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan (%)**	6,93	6,55	5,94	5,59	5,27	4,96	4,67	4,4	4,4
			Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa (Indeks)	0,755	0,7812	0,7830	0,7850	0,7910	0,8010	0,8100	0,8190	0,8190
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)**	66,87	65,88	68,08	68,69	69,31	69,93	70,56	71,19	71,19
			Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) (indeks)	N/A	57.8	58	59	60	61	62	63	63
				Indeks Ketimpangan Gender (indeks) **	N/A	0,400	0,397	0,395	0,392	0,390	0,388	0,388	0,388
	Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun) **	75,18	75,34	77,70	78,90	80,12	81,37	82,63	83,89	83,89
			Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	N/A	N/A	20	46	55	61	70	70	70
				Prevalensi Stunting (%)**	26,4	26,4	20,09	17,5	17	16,5	16	15,5	15,5
			Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)**	N/A	N/A	98	99	99	99	99	99	99
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (indeks) **	64,71	64,24	65	66	67	68	69	70,00	70,00
	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat		Indeks Pendidikan (indeks)	N/A	0,68	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72
				Indeks Harmoni (indeks)	N/A	7,06	7,09	7,12	7,15	7,18	7,21	7,24	7,24
			Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah (tahun) **	8,93	9,06	9,63	9,88	10,13	10,39	10,66	10,66	10,66
				Harapan lama sekolah (tahun) **	12,87	12,88	13,43	13,63	13,83	14,03	14,24	14,24	14,24
			Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)	5,08	N/A	5,11	5,14	5,16	5,18	5,23	5,28	5,28
			Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) **	49,93	N/A	52	52,73	53,48	54.23	54,55	56,00	56,00
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	52,70	52,70	60	61	62	63	64	65	65
				Indeks Karakter Masyarakat (indeks)	N/A	N/A	69,00	73,50	78,00	82,50	87,00	91,50	91,50
	Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (indeks)	N/A	N/A	78	80	82	84	86	88	88
			Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas	Indeks Infrastruktur (indeks)	N/A	N/A	38,98	46,44	52,66	58,23	58,23	65,33	65,33

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	BASELINE		TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Dasar yang Terpadu. Berkualitas. dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu	Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW (%) **)	87,63	N/A	96	96,49	96,98	97,48	98	98,52	98,52
				Persentase RTH (%) **)	N/A	N/A	21,10	21,10	22,45	21,10	22,50	25,00	25,00
	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**)	N/A	N/A	18,21	18,55	18,9	19,26	19,62	19,99	19,99
				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	76,49	77,6	78,16	79,01	79,87	80,73	81,61	82,49	82,49
			Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) **)	49,79	55,87	61,57	61,74	61,91	62,09	62,26	62,43	62,43
				Indeks Risiko Bencana (indeks) **)	141,43	125,22	125,00	124,00	123,00	122,00	121,00	120,00	120,00
			Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	64,67	63,91	65,59	71,47	83,17	87,05	88,73	90,41	90,41
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)**)	2,59	N/A	2,20	2,06	1,92	1,80	1,68	1,56	1,56

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 Strategi RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, strategi RPJMD dijelaskan sebagai rencana tindakan komprehensif pembangunan daerah lima tahunan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD serta dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan dan harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode terkait. Dalam penyusunan RPJMD, strategi dapat berfungsi sebagai peta jalan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Strategi memegang poin penting untuk memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, strategi menjadi wawasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola setiap program dan kegiatan dengan menyusun langkah serta tahapan untuk mencapai tujuan.

Strategi pembangunan disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD yang ditarik dari tujuan dan sasaran pembangunan. Perumusan strategi pembangunan dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebijakan lintas sektor dan bidang urusan yang berkontribusi terhadap pencapaian kondisi akhir periode RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Strategi Pembangunan Menurut Tujuan, Sasaran, dan Bidang Urusan Perangkat Daerah

TUJUAN / SASARAN RPJMD	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD	STRATEGI PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN/PD UTAMA	BIDANG URUSAN / PD PENDUKUNG
Tujuan 1 : Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif				
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintah yang terstandarisasi, transparan, dan efektif yang ditunjukkan melalui capaian Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,37	• Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar • Optimalisasi digitalisasi kearsipan • Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) • Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS • Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum • • Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan (meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa) • Mendorong pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada prinsip demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik	Kecamatan; DISDUKCAPIL; Dinas Perpustakaan dan Arsip; DPMPTSP; DISKOMINFO	Seluruh OPD
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja organisasi daerah yang akuntabel dalam menjamin keterpaduan pembangunan daerah yang diukur dengan capaian indikator nilai AKIP sebesar 80,64	• Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD • Meningkatkan kinerja pengawasan daerah • Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE • Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika • Optimalisasi interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah • Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal • Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah • Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan • Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah • Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang obyektif dan transparan	Inspektorat; BKPSDM; BPKAD; Badan Pendapatan Daerah; Bappeda; Setda	Seluruh OPD
Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah				
Sasaran 1 Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial	Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,56-8,56% yang didukung dengan daya saing sektor unggulan (perindustrian, perdagangan-jasa) serta peningkatan realisasi investasi daerah.	• Peningkatan daya saing industri • Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan • Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif • Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional • Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi	DISPERINDAG, DISPORBUDPAR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, DPMPTSP	DLHK, Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Sasaran 2 Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD	Meningkatnya skalabilitas usaha ekonomi lokal yang meliputi UMKM, koperasi, BUMD, BUMDes, serta adanya wadah inklusif pengembangan usaha bagi wirausaha baru.	• Meningkatnya daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD • Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	DISPERINDAG, DPMPTSP

TUJUAN / SASARAN RPJMD	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD	STRATEGI PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN/PD UTAMA	BIDANG URUSAN / PD PENDUKUNG
Sasaran 3 Mengendalikan Harga Bahan Pokok	Terjaganya kestabilan kebutuhan pokok agar distribusi barang dan daya beli masyarakat tetap terjaga demi ketahanan sosial-ekonomi daerah.	• Mendorong pengelolaan distribusi rantai pasok dan stabilitas harga bahan pokok	DISPERINDAG	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tujuan 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				
Sasaran 1 Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya jumlah desa dengan status mandiri dalam aspek kemandirian perekonomian, lingkungan berkelanjutan, dan tata keloa pemerintahan desa	• Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa • Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang Berkelanjutan	DPMPD; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Sosial
Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan partisipasi angkatan kerja menjadi 70,56% melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja atau Job Matching dengan pasar kerja	• Meningkatnya kompetensi dan daya saing ketenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja • Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial	DISPERINDAG
Sasaran 3 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Penurunan angka kemiskinan menjadi 4,67-4,88% dan jaminan perlindungan sosial untuk semua utamanya kaum rentan (PPKS, disabilitas, perlindungan perempuan & anak, lansia, dll)	• Optimalisasi implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosia	Dinas Sosial; DP3A	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga yang diukur dengan capaian Indeks Desa sebesar 0,8100	• Penguatan Ekonomi dan kesejahteraan Keluarga	DPPKB; Dinas Sosial; DP3A	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,
Tujuan 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal	Peningkatan angka harapan hidup dan berkurangnya prevalensi stunting secara signifikan	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan • Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar • Meningkatkan akses menuju fasilitas layanan kesehatan • Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil dan anak • Mengoptimalkan pengawasan dan penanganan terhadap kasus stunting	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial	DP3KB
Sasaran 2 Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat	Akses terhadap layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	• Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan • Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit • Meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas hidup	Dinas Kesehatan; DP3KB; Dinas Sosial	DPMPD
Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat				
Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah hingga mendekati 11 tahun	• Meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas • Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan • Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan • Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial; DISPORBUDPAR; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran 2 Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah	• Peningkatan daya saing olahraga	Dinas Pendidikan; DISPORBUDPAR	
Sasaran 3 Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Meningkatnya literasi, numerasi, dan usaha pelestarian terhadap budaya lokal	• Optimalisasi literasi dan numerasi masyarakat • Meningkatkan pengembangan potensi kebudayaan	Dinas Pendidikan; DISPORBUDPAR; Dinas Perpustakaan dan Arsip	Badan Kesbangpol; Setda Bag Kesra; Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan 6 : Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan				
Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas	Akses terhadap layanan dasar (permukiman layak, transportasi terintegrasi, jaringan persampahan dan limbah terpadu, air bersih yang layak, dll) yang melayani mayoritas rumah tangga	• Pengembangan sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu • Optimalisasi manajemen pengelolaan kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu dan ramah lingkungan • Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara • Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi	DBMSDA; Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Dinas Perumahan, Permukiman,dan Pemakaman; Dinas Perhubungan	DISPERINDAG; DLHK
Sasaran 2 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu	Penyelenggaraan pembangunan berlandaskan daya dukung dan daya tampung wilayah yang diatur dalam ketentuan pemanfaatan ruang	• Penegakan regulasi pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya, • Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang,	DLHK; Dinas Tata Ruang dan Bangunan	DBMSDA; Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman; Dinas Perhubungan
Tujuan 7 : Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				

TUJUAN / SASARAN RPJMD	KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD	STRATEGI PEMBANGUNAN	BIDANG URUSAN/PD UTAMA	BIDANG URUSAN / PD PENDUKUNG
Sasaran 1 Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Peningkatan ketahanan daerah (air, energi, dan pangan) yang berkelanjutan dan melayani mayoritas rumah tangga	• Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah • Mendorong pengembangan EBT untuk ketahanan energi yang ramah lingkungan • Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah	DLHK; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; DBMSDA	Dinas Perumahan. Permukiman. dan Pemakaman
Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan	Lingkungan yang bersih, minimnya pencemaran, resilien terhadap bencana, serta sumber daya alam yang lestari	• Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, • Pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup • Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana • Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana	DLHK; BPBD	Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Dinas Perumahan. Permukiman. dan Pemakaman

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

3.2.2 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dapat didefinisikan sebagai rangkaian prioritas kerja yang menjadi dasar rencana dan pedoman untuk pelaksanaan rencana pembangunan pada sebuah periode. Arah kebijakan merupakan bentuk turunan dari strategi untuk dijabarkan menjadi program pembangunan yang secara operasional dan melalui upaya nyata digunakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD selama periode lima tahun. Secara komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan membantu merasionalkan pilihan strategi sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Adapun penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten. Dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 terdapat 8 Misi (Asta Cita) dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins)*. Dalam RPJMD Provinsi Banten memiliki arah pembangunan kewilayah untuk masing-masing kabupaten/kota. Penyelarasan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang tergadap RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Banten terdapat pada Tabel 3.1 atau pada subbab sebelumnya.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Mempertimbangkan Periode Pertama RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Berdasarkan Dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada Penguatan Modal Dasar. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Peningkatan ketersediaan, kualitas, aksesibilitas sarana serta kelembagaan pembangunan SDM; (2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan komoditas sektor ekonomi; (3) Penguatan Kualitas Aparatur Pemerintahan; (4) Penataan regulasi hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi dan keuangan daerah; (5) Penguatan nilai agama dan budaya serta peningkatan kelembagaan masyarakat yang tangguh dalam membentuk lingkungan hidup berkelanjutan; (6) Pemenuhan infrastruktur dasar serta infrastruktur penghubung perdesaan-perkotaan dan antar wilayah; (7) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengentasan permukiman kumuh; serta (8) Reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

Dalam perumusan arah kebijakan dan/atau tema pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 juga merujuk pada RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Penyelarasan Arah Kebijakan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

	Nasional	Provinsi Banten	Kabupaten Tangerang
	VISI RPJMN Tahun 2025-2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	VISI RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi	VISI RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)
Arah Kebijakan RPJP 2025-2045 (Periode 1)	"Penguatan Transformasi"	"Penguatan Modal Dasar"	"Penguatan Modal Dasar"
Arah Kebijakan RPJM 2025-2029 dan/atau Tema Tahunan RKP			
2026	Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalu Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	Penguatan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kolaborasi antar sektor untuk menciptakan pondasi ketahanan pangan
2027	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegrasi dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Optimalisasi sektor industri. perdagangan. dan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan.
2028	-	Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian	Pengembangan Riset. Inovasi. dan Daya Saing Tenaga Kerja
2029	-	Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi	Akselerasi Pembangunan Daerah yang Inklusif untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
2030	-	Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing

Sumber : Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029; Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 (diolah)

3.2.2.2 Arah Kebijakan Mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025-2029

Perumusan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 turut mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025-2029 utamanya pada Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Banten. Tema pembangunan Provinsi Banten yaitu sebagai Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa-Sumatera dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional, indikasi dan intervensi RPJMN terhadap rekomendasi kerja Provinsi Banten, khusus untuk wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6
Arah Pembangunan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi *(khusus Kabupaten Tangerang)
Kawasan Aglomerasi Jakarta	
Kawasan Aglomerasi Jakarta / WM Jakarta • Provinsi DKI Jakarta • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur • Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	✓ Pemantapan dan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta ✓ Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya), termasuk penerapan SIH3 dan FEWS
Jakarta-Tangerang International Business Corridor & Jakarta Global City Urban Tourism (Central-South) • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Selatan • Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang	✓ Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD) ✓ Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja ✓ Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja ✓ Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan ✓ Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya
Northern Coast New Economic Hub & Jakarta Global City Urban Tourism (North) • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Utara	✓ Penyediaan SPAM perpipaan pada kawasan permukiman di sepanjang pesisir utara Kawasan Aglomerasi Jakarta

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi *(khusus Kabupaten Tangerang)
• Provinsi Banten: Kab. Tangerang • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi	
Wilayah Provinsi Banten	
• Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang (A1), • Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-SerangTangerang (A2), dan Jakarta-Tangerang International Business Corridor • Kota Cilegon • Kota Serang • Kab. Serang • Kab. Tangerang • Kota Tangerang • Kota Tangerang Selatan	✓ Pengembangan koridor industri Cilegon-Serang-Tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, Industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi, & baja) ✓ Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas ✓ Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Banten (PHTC) ✓ Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan ✓ Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD) ✓ Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja ✓ Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja ✓ Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan ✓ Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten	✓ Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah ✓ Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) ✓ Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) ✓ Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura ✓ Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura ✓ Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung,DAS Cikadubuluh-Cipuntenageung-Cibama ✓ Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS CidurianCimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh Cipuntenageung-Cibama ✓ Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik ✓ Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih & bibit berkualitas/pupuk & pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen ✓ Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar & pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi & korporasi petani; pembiayaan dana bergulir & kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama ✓ Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi *(khusus Kabupaten Tangerang)
	budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
• Kab. Pandeglang • Kab. Tangerang • Kab. Lebak • Kab. Serang	✓ Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

3.2.2.3 Arah Kebijakan Mempertimbangkan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 juga perlu memerhatikan pembangunan kewilayahan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Selaras dengan Dokumen RPJMN tahun 2025-2029, Kabupaten Tangerang memiliki beberapa lokasi prioritas, yakni 1) Kawasan Pertumbuhan, yaitu Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang Kawasan Perkotaan Tangerang Raya (Bagian dari Aglomerasi DKJ); dan 2) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi. Arah kebijakan kewilayahan dan indikasi intervensi lokasi prioritas di Kabupaten Tangerang adalah:

Tabel 3.7
Arah Pembangunan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Lokasi Prioritas	Arah Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang
• Kawasan Pertumbuhan Perdesaan Mandiri Dan Bagian Pertumbuhan Kawasan Aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta • Kawasan Pertumbuhan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang • Jakarta-Tangerang *International Bussiness Corridor* • Kawasan Swasembada Pangan, Air, Dan Energi Banten	Tata Kelola Pemerintahan Tidak Korupsi Dan Sistem Merit Dalam Birokrasi	✓ Pembentukan Unit Layanan Berpredikat Zona Integritas ✓ Sinergi Peningkatan Pendapatan Daerah ✓ Dukungan Transformasi, Efisiensi Reformasi Birokrasi Dan Perkuatan Reformasi Hukum, Melalui: I) Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu); Ii) Penanggulangan Judi Dan Penyelundupan; Dan Iii) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) ✓ Dukungan Pengembangan Dan Transformasi Pemerintahan Digital, Melalui: I) Penguatan Tata Kelola Dan Infrastruktur Pemerintahan Digital; Ii) Pengembangan Kompetensi Dan Budaya Digital Asn; Iii) Digitalisasi Layanan Publik Prioritas; Dan Iv) Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Digital ✓ Percepatan Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Terkait Akses Layanan Pemerintahan Dan Pengembangan Wilayah Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
	Investasi, Kemudahan Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja	✓ Dukungan Kemudahan Izin Usaha Dalam Mendorong Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Padat Karya, Akses Dukungan Permodalan Bagi Tuna Karya Serta Pengutamaan Tenaga Kerja Lokal ✓ Dukungan Pengelolaan Kawasan Industri Berbasis Padat Karya Berprinsip Esg (Environmental, Social, Governance) Dan Penyediaan Infrastruktur Ramah Lingkungan, Mencangkup: Transportasi Hijau, Energi Terbarukan, Pengelolaan Air Dan Limbah, Serta Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan Dan Ekonomi Sirkular ✓ Dukungan Hilirisasi Lanjutan Sawit Bioplastik, Bioavtur, Graphene, Surfaktan, Kelapa, Perikanan Tangkap Dan Produk Unggulan Sesuai Karakteristik Wilayah Lainnya ✓ Dukungan Pembangunan Dan Pengembangan Industri Halal/Industri Hijau/Industri Biru Khususnya Pada Industri Unggulan, Potensial, Dan Berorientasi Ekspor Sesuai Potensi Daerah Yang Ditetapkan Oleh Rtrw Daerah ✓ Dukungan Pengembangan Koridor Industri Cilegon-Serang-Tangerang (Sektor Industri

Lokasi Prioritas	Arah Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang
		Prioritas: Industri Kimia, Industri Makanan Dan Minuman, Industri Logam, Besi, Dan Baja)
	Zona Ekonomi Baru, Penguatan Umkm, Dan Pemerataan Ekonomi	✓ Dukungan Pengembangan Umkm Terhadap Akses Pasar, Perbankan, Peningkatan Kompetensi Dan Kualitas Produk Usaha Sesuai Unggulan Wilayah, Pendampingan Terhadap Inovasi Produk Dan Layanan, Menciptakan Regulasi Yang Mendukung Pertumbuhan Wirausaha ✓ Dukungan Pembangunan/Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (Ikm) Sebagai Rantai Pasok Industri Sedang Besar Yang Ada Di Kawasan Industri (Ki)/Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Prioritas ✓ Dukungan Optimalisasi Koperasi Merah Putih
	Pengembangan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	✓ Dukungan Pelestarian Dan Pemajuan Kebudayaan Di Banten, Melalui: I) Desa Budaya; Ii) Pelindungan, Pelestarian, Dan Revitalisasi Warisan Budaya; Iii) Pemanfaatan Khazanah Budaya Dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan (Cagar Budaya, Permuseuman, Dan Pusat Kebudayaan Lainnya); Dan Iv) Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, Sertifikasi Kompetensi Pelaku Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat ✓ Dukungan Pengembangan Pariwisata Yang Terintegrasi, Berkualitas, Berbasis Masyarakat Lokal Dan Berkelanjutan ✓ Pengembangan Pariwisata Berupa Event Tourism Internasional, Wisata Alam, Wisata Sejarah/Budaya, Wisata Religi, Wisata Buatan Dan Event Lainnya Yang Akan Diintervensi Lintas Sektoral ✓ Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau, Maupun Ekosistem Ekonomi Lainnya ✓ Dukungan Pengembangan Infrastruktur Dan Sistem Informasi Wisata Memanfaatkan Percepatan Transformasi Digital, Melalui: I) Perluasan Infrastruktur Digital; Dan Ii) Peningkatan Kapasitas Sdm Digital Dan Literasi Digital ✓ Dukungan Pengembangan Dan Peningkatan Event, Infrastruktur, Dan Sistem Informasi Destinasi Wisata Berbasis Mice (Meetings, Incentives, Conventions, And Exhibitions)
	Sekolah Gratis Untuk Sma/Smk/Ma Negeri Dan Swasta Di Provinsi Banten	✓ Dukungan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah Dan 12 Tahun Pendidikan Dasar Dan Menengah) Melalui: I) Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud); Ii) Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Dan Madrasah Yang Berkualitas; Iii) Penyaluran Bantuan Pendidikan Yang Tepat Sasaran; Iv) Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah; V) Revitalisasi Pendidikan Nonformal; Vi) Penguatan Pengelolaan Dan Akselerasi Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berkualitas; Vii) Modernisasi Dan Akselerasi Stem (Science, Technology, Engineering, And Mathematics) ✓ Dukungan Pemberian Makan Bergizi Di Sekolah, Madrasah, Dan Dayah/Pesantren, Serta Pemberian Makan Bergizi Untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Balita ✓ Dukungan Percepatan Transformasi Digital, Melalui: I) Penyederhanaan Proses Bisnis; Ii) Perluasan Jaringan Telekomunikasi Dan Akses Internet Cepat; Iii) Pengembangan Sdm Tik Dan Digitalisasi Masyarakat; Iv) Perluasan Layanan Penyiaran Digital; Dan V) Layanan Digital Terpadu, Terpersonalisasi Dan Berfokus Pada User Centric ✓ Dukungan Penguatan Pendidikan, Pelatihan Vokasi, Penyediaan, Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maupun Layanan Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kerja Yang Terintegrasi Dengan Sektor Ketenagakerjaan,

Lokasi Prioritas	Arah Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang
		Melalui Pembangunan/Pengembangan/Peningkatan Balai Latihan Kerja Sesuai Kebutuhan Wilayah ✓ Pelaksanaan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Menengah Dan Khusus Ditunjang Dengan Tenaga Pendidik Yang Berkompeten Sesuai Keahlian ✓ Pembangunan Unit Sekolah Baru Sma, Smk Dan Pendidikan Khusus (Untuk Anak Berkebutuhan Khusus) Dengan Memperhatikan Kondisi Wilayah ✓ Dukungan Pengembangan Kek Edukasi, Teknologi, Dan Kesehatan Internasional Banten (Kek Bsd) ✓ Dukungan Pembangunan Sdm Perdesaan Kabupaten Tangerang
	Akses Kesehatan Bagi Warga Dan Pelayanan Sosial Tanpa Diskriminasi	✓ Dukungan Optimalisasi Fasilitas Kesehatan (Sarana Dan Prasarana Yang Memadai) Dan Program Kesehatan Yang Adil Dan Merata ✓ Dukungan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk Menangani Kasus Gigi Dan Mulut/Kasus Kesehatan Mental/Kasus Multi-Penyakit Pada Lanjut Usia/Kasus Ketergantungan Obat Serta Pembudayaan Hidup Sehat ✓ Dukungan Peningkatan Kesehatan Dan Gizi Masyarakat, Melalui: I) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Promotif, Preventif, Rehabilitatif, Dan Kuratif; Ii) Penyediaan Sarana-Prasarana Kesehatan Primer Dan Rujukan; Iii) Pemerataan Pelayanan Kesehatan Serta Penuntasan Eliminasi Penyakit Prioritas, Menular, Dan Tropis Terabaikan; Iv) Penurunan Kematian Ibu Dan Anak; V) Pencegahan Dan Penurunan Stunting Dan Penuntasan Tbc; Vi) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Gizi Bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, Dan Lansia Serta Kb Dan Kesehatan Reproduksi; Dan Vii) Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis ✓ Dukungan Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Dari Kekerasan, Melalui: I) Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas Dari Kekerasan; Dan Ii) Penguatan Tata Kelola Dan Pelembagaan Pug (Pengarusutamaan Gender) Dalam Proses Pembangunan ✓ Dukungan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Terahdap Hak Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Secara Inklusif Dalam Proses Pembangunan ✓ Dukungan Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif Sebagai Salah Satu Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Mengupayakan Pengoptimalan Pemanfaatan Satu Sistem Regsosek Maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Dtsen) ✓ Dukungan Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi Di Rsud Provinsi Dan Kab/Kota ✓ Dukungan pencapaian UHC ✓ Dukungan Pemberian Makan Bergizi Untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Balita ✓ Dukungan Pengembangan Kek Edukasi, Teknologi, Dan Kesehatan Internasional Banten (Kek Bsd) ✓ Dukungan Pembangunan Dan Pelaksanaan Sekolah Rakyat
	Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan	✓ Dukungan Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, Dan Penanganan Rawan Pangan (Phtc) ✓ Dukungan Peningkatan Ketahanan Air, Energi, Dan Pangan Yang Berkelanjutan ✓ Dukungan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang, Dan Aman Sesuai Karakteristik Dan Potensi Daerah Guna Mendukung Kemandirian Pangan (Seperti Pangan Akuatik/*Blue Food*, Dsb)

Lokasi Prioritas	Arah Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang
		✓ Peningkatan Manajemen Usaha Tani, Perluasan Akses Pasar Dan Pembiayaan Usaha Tani, Perluasan Akses Asuransi Pertanian Dan Perikanan, Serta Pengendalian Kepastian Pasar, Melalui: I) Peningkatan Literasi Keuangan Petani Dan Penguatan Manajeman Poktan/Gapoktan; Ii) Penguatan Kelembagaan Koperasi Dan Korporasi Petani; Iii) Pembiayaan Dana Bergulir Dan Kredit Lunak Petani; Iv) Perluasan Akses Asuransi Usaha Tani; V) Peningkatan Infrastruktur Logistik Dan Perluasan Akses Layanan Sistem Resi Gudang; Vi) Pengelolaan Dan Pengendalian Penyerapan Hasil Panen Komoditas Pangan Utama ✓ Dukungan Peningkatan Produktivitas Peternakan/Pangan Hewani (Termasuk Pengembangan Kawasan Peternakan, Pengembangan Serta Peningkatan Produktivitas Hortikultura Dan Peningkatan Produktivitas Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) ✓ Dukungan Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian Dan Produktivitas Melalui Intensifikasi Dan Peningkatan Prasarana Produksi, Melalui: I) Penyediaan Dan Perluasan Akses Alsintan *Modern*/Benih Dan Bibit Berkualitas/Pupuk Dan Pestisida Berkualitas; Ii) Mitigasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) DanmKesehatan Hewan; Iii) Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Dan Digital Bagi Petani; Dan Iv) Peningkatan Kualitas Pascapanen Melalui Peningkatan Prasarana Pascapanen ✓ Dukungan Pengelolaan Dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Melalui: I) Kebijakan Tata Ruang Untuk Perlindungan Lahan Pertanian; Ii) Reforma Agraria, Redistribusi, Dan Konsolidasi Lahan Pertanian; Iii) Optimalisasi Dan Revitalisasi Lahan Pertanian; Dan Iv) Peningkatan Penggunaan Pupuk/Pestisida/Pakan Organik ✓ Penguatan Kawasan Agrikultur Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pendekatan Terpadu Few Nexus *(Food, Energy, Water)* ✓ Dukungan Pengembangan Pusat/Laboratorium Riset Pertanian Skala Lokal Dalam Rangka Pengembangan Varietas Unggul Dan Budidaya Lokal, Peningkatan Produktivitas Petani, Serta Penguatan Implementasi Hasil Riset Pertanian ✓ Dukungan Pemberdayaan Aktivitas Ekonomi *High Value* Unggulan: Perikanan, Pertanian Tanaman Pangan, Dan Pertanian Hortikultura ✓ Dukungan Optimalisasi Kawasan Agrikultur Kabupaten Tangerang ✓ Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai
	Pembangunan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Sumber Daya Air Dan Hunian Layak	✓ Dukungan Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Dan Rencana Tata Ruang Yang Mengintegrasikan Potensi Dan Masalah Secara Terpadu ✓ Pembangunan Konektivitas Kawasan Produktif Ekonomi (Infrastruktur Dan Sistem Logistik) ✓ Pembangunan Pju, Sarana Dan Prasarana Perhubungan Serta Transportasi Publik Massal Yang Ramah Lingkungan, Nyaman, Mudah Diakses, Aman, Dan Efisien ✓ Dukungan Pembangunan Spam Regional Karian Timur ✓ Dukungan Pembangunan Iplt/Ipal Dan Spal ✓ Pembangunan Kebinamargaan ✓ Pembangunan Psu Permukiman, Pos Layanan Desa Sejahtera, Dan Penataan Permukiman Kumuh Terpadu Kewenangan Provinsi ✓ Dukungan Pembangunan Rumah/Hunian Murah Bersanitasi Baik Bagi Pekerja, Mbr, Gen Z, Dan Milenial ✓ Dukungan Penyelesaian Masalah Persampahan Terintegrasi Hulu-Hilir

Lokasi Prioritas	Arah Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang
		✓ Dukungan Pengembangan Kawasan Tangerang Raya (Bagian Dari Kawasan Aglomerasi Jakarta) ✓ Dukungan Rintisan Kerata Api Tangerang Raya-Serang ✓ Dukungan Penyediaan Infrastrukur Layanan Dasar (Air Baku, Air Minum, Penanganan Limbah/Sanitasi, Infrastruktur Jaringan Transmisi, Infrastruktur Distribusi Dan Listrik Perdesaan, Rumah/Hunian Layak Huni Dan Ruang Terbuka Hijau) ✓ Dukungan Reformasi Pengelolaan Sampah Dan Sanitasi Yang Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir Yang Berkelanjutan, Melalui: I) Perubahan Perilaku Dan Penguatan Tata Kelola Persampahan; Ii) Peningkatan Pengumpulan Dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Di Tpa/Lur; Dan Iii) Adopsi Teknologi Pemrosesan Sampah Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan ✓ Dukungan Rehabilitasi Dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kewenangan Daerah ✓ Dukungan Konservasi Sumber Daya Air Melalui Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pada *Cathment Area*, Terutama Pada Das Ciujung, Das Cibanten, Das Cidurian- Cimanceuri, Das Cibungur-Ciliman, Das Cibaliung, Das Cikadubuluh- Cipuntenageung-Cibama ✓ Dukungan Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Kualitas Air Di Sungai Dan Danau, Terutama Pada Das Ciujung, Das Cibanten, Das Cidurian-Cimanceuri, Das Cibungur-Ciliman, Das Cibaliung, Das Cikadubuluh Cipuntenageung-Cibama ✓ Dukungan Pembangunan Transportasi Massal Aglomerasi Dkj (Mrt East-West Dan Transjakarta), Transportasi Massal Perkotaan, Dan Tod *(Transit Oriented Development)* ✓ Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja Dan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja ✓ Dukungan Optimalisasi Wilayah Sungai Cisadane Dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Konservasi, Air Minum Dan Air Pertanian ✓ Dukungan Pembangunan Perlindungan Abrasi Pantura Tangerang Pembangunan Dermaga Penyebarangan Pelabuhan Cituis Dukungan Pembangunan Waduk Lepas Pantai Muara Cisadane, Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut Pesisir Utara Jakarta/Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa ✓ Dukungan Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa
	Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Berkelanjutan Serta Resiliensi Terhadap Bencana	✓ Dukungan Peningkatan Ketahanan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Khususnya Ketangguhan Terhadap Banjir Periode Kala-Ulang 25-50 Tahunan Di Kawasan Aglomerasi Jakarta (Tangerang Raya) Termasuk Penerapan Sih3 Dan Fews) ✓ Dukungan Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Dan Danau Melalui Pengurangan Beban Pencemar Dari Sumber Domestik, Industri, Peternakan, Pertanian Dan Hal Lainnya Sebagai Upaya Mengembalikan Mutu Air ✓ Resiliensi Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Daerah Melalui Proses Pendidikan Dan Penyadaran Sejak Dini ✓ Dukungan Nature-Based Solution Dan Gray Infrastructure Untuk Mitigasi Ancaman Tsunami ✓ Dukungan Percepatan Transisi Energi Menuju Emisi Karbon Yang Lebih Rendah, Melalui: I) Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan; Ii) Penerapan Jaringan Cerdas (Smart Grid) Untuk Memaksimalkan Efisiensi Dan Pemantauan Konsumsi Energi; Iii) Adopsi Teknologi Penyimpanan Energi Untuk Menjaga Stabilitas Pasokan Listrik; Iv) Penerapan Internet Of Things (Iot) Di Sektor Energi Guna Meningkatkan Keterhubungan Dan Analitik

Lokasi Prioritas	Arah Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang
		Data Secara Real-Time; Dan V) Perluasan Penggunaan Kendaraan Listrik ✓ Dukungan Perlindungan, Pemulihan, Pengelolaan Ekosistem Dan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi ✓ Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan Mendukung Bioekonomi ✓ Dukungan Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, Serta Akses Dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik ✓ Dukungan Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Kota, Dan Hutan Mangrove Sesuai Kondisi Daerah) ✓ Dukungan Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Kota, Dan Hutan Mangrove Sesuai Kondisi Daerah) ✓ Dukungan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Kota, Dan Hutan Mangrove Sesuai Kondisi Daerah) ✓ Dukungan Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri

Sumber : Peyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Oleh karena itu, berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 serta penyelarasan dengan arah kebijakan dari RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 (Periode 1), RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, disusun arah kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.8
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien			
Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar	Optimalisasi sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan
			Optimalisasi waktu penyelesaian pelayanan publik
			Meningkatkan layanan penanganan dan pengaduan
			Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
			Mengimplementasikan sistem *e-governance* untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi
		Optimalisasi digitalisasi kearsipan	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi srikandi di level OPD
		Optimalisasi interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah	Mendorong penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang mengacu kepada Proses Bisnis Statistik
		Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) yang responsif gender dan inklusif terhadap seluruh kelompok masyarakat	Integrasi sistem data kependudukan secara optimal
			Meningkatkan sosialisasi terkait KB dan kependudukan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat
		Optimalisasi pengelolaan administrasi kependudukan yang menjamin pemenuhan hak identitas hukum yang setara bagi setiap warga negara	Mendorong terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi teknologi/elektronik yang menjamin kesetaraan akses bagi setiap warga
		Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang adil, sensitif dan inklusif	Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak
		Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS yang berkeadilan dan inklusif melalui pendekatan berbasis hak	Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPKS terutama pemenuhan hak kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas
		Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal
			Optimalisasi penindakan gangguan kamtibmas
			Optimalisasi penanganan konflik di masyarakat
		Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif, dengan melibatkan kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif dan akuntabel yang melibatkan kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
			Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
		Mendorong pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada prinsip demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik	Meningkatkan pemahaman politik dalam negeri
			Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (ormas)
			Menekan kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD	Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi
		Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE	Mendorong peningkatan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan prosedur bagi seluruh pegawai lingkup Kabupaten Tangerang
		Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika	Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu
		Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal	Optimalisasi pengisian jabatan melalui fleksibilitas mutasi dan rotasi dalam memenuhi kebutuhan ASN
			Mendorong pengembangan kompetensi ASN
			Optimalisasi uji kompetensi ASN
			Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM
		Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pelaksanaan perencanaan kinerja
			Optimalisasi pelaksanaan pengukuran kinerja
			Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja
			Optimalisasi konsistensi penjabaran dokumen perencanaan
		Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan	Optimalisasi kebijakan disertai dengan basis data riset dan inovasi
		Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah	Optimalisasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)
			Mendorong penguatan dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
		Meningkatkan kinerja pengawasan daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan SPIP
		Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang obyektif dan transparan	Optimalisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Optimalisasi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan
			Optimalisasi kebijakan administrasi umum
MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial	Peningkatan daya saing industri dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial	Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas yang menjamin kesetaraan kesempatan usaha bagi semua warga
			Penegakan regulasi pengembangan perindustrian dan kawasan industri
			Meningkatkan sinkronisasi antar lembaga serta pelaku industri hingga terbentuk klaster guna menerapkan *predict and prevent*
			Mendorong daya saing dan diversifikasi produk perdagangan-jasa (skala domestik dan global)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
		Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok	Meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern
			Pengembangan dan optimalisasi rantai yang menjembatani UKM dengan pasar
			Menjamin ketersediaan barang dan kebutuhan pokok daerah
		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan	Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian
			Mendorong produktivitas hasil pertanian dan peternakan
			Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro/agribisnis) pertanian dan peternakan
		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan	Pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan bina kelompok nelayan
			Pengembangan sarana-prasarana dan teknologi yang mendukung sektor perikanan (e.g. peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai)
			Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro) hasil perikanan
		Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan tata kelola kawasan strategis pariwisata serta pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan wisata
			Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata berbasis MICE (*Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions*)
			Optimalisasi pengelolaan pelestarian cagar budaya dan objek budaya tak benda
			Peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan daya tarik objek dan produk ekonomi kreatif (e.g. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital)
		Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional	Sinkronisasi regulasi dan kewenangan lintas hirarki vertikal (nasional - daerah) dan horizontal (daerah, K/L)
			Optimalisasi tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi
		Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi	Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penanaman modal dan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan insentif terhadap investor
			Optimalisasi pengelolaan penanaman modal daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif
	Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD	Meningkatnya daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD	Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas UMKM, koperasi, BUMD dengan menjembatani pelaku usaha dan pasar domestik/internasional serta akses terhadap permodalan usaha dan digitalisasi
			Pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi desa
			Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi koperasi, UMKM, dan BUMD
		Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausahaan yang memberi kesempatan setara untuk kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas	Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas wirausaha yang menjangkau usaha kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas
			Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi wirausahaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
	Mengendalikan Harga Bahan Pokok	Mendorong pengelolaan distribusi rantai pasok dan stabilitas harga bahan pokok	Pengembangan infrastruktur distribusi dan tata kelola yang terintegrasi antara produksi (suplier) dengan distributor serta pasar
			Digitalisasi pemantauan harga dan stok pangan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kemandirian Desa	Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa berdasar prinsip kesetaraan	Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES
			Pengembangan infrastruktur dasar serta pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi desa mandiri
		Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang Berkelanjutan	Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (pokdarwis, PKK, karang taruna Bank Sampah, BUMDes,dll)
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenagakerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang memberi kesempatan setara bagi kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas	Pengembangan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan vokasi secara inklusif
			Peningkatan kesempatan kerja dengan menjembatani supply-demand tenaga kerja melalui kebijakan Job Matching antara vokasi dan industri termasuk kesempatan yang setara bagi kelompok rentan dan kelompok minoritas
		Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi semua, tanpa diskriminasi bagi pekerja penyandang disabilitas dan kelompok rentan	Peningkatan cakupan dan jangkauan penerima layanan jamsostek
			Menekan kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Optimalisasi implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Pengembangan upaya perlindungan sosial dan bantuan sosial adaptif bagi penduduk miskin dan kelompok rentan, perempuan kepala keluarga dan anak tanpa pengasuhan
			Mensinergikan pemberdayaan masyarakat utamanya kaum rentan (PPKS, disabilitas, anak terlantar, dll)
		Penguatan Ekonomi dan kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			Peningkatan partisipasi remaja dan kelompok rentan dalam program kependudukan dan pembangunan keluarga
			Penguatan ketahanan dan keluarga berkualitas melalui pemberdayaan dan edukasi berkelanjutan
			Pengembangan keterampilan untuk perempuan, terutama dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
MISI 3 : Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas			
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan	Pemerataan distribusi tenaga kesehatan
			Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
			Mendorong integrasi antar layanan kesehatan menjadi satu sistem layanan inklusif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
		Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar dan ramah kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas	Meningkatkan pemerataan alat kesehatan dan ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan
			Optimalisasi respon kegawatdaruratan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan
		Meningkatkan akses menuju fasilitas layanan kesehatan yang ramah kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas	Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan fasilitas kesehatan sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk
		Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil dan anak	Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi terutama perempuan kelompok rentan, perempuan kepala keluarga dan perempuan dari kelompok minoritas
			Dukungan pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita
		Mengoptimalkan pengawasan dan penanganan terhadap kasus *stunting*	Meningkatkan integrasi sistem *monitoring stunting*
	Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat	Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan tanpa diskriminasi	Mendorong peningkatan lliterasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan
			Meningkatkan kemudahan/aksesibilitas masyarakat menuju layanan kesehatan
			Mengoptimalkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat
		Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit	Mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat dan PHBS
		Meningkatnya ketahanan dan kualitas hidup keluarga	Penguatan kemitraan strategis dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan keluarga dan pencegahan stunting
MISI 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas			
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan inklusif	Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan aksesibilitas untuk kelompok rentan dan perempuan
			Meningkatkan dukungan percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
			Mendorong pelaksanaan Pendidikan gratis tingkat Pendidikan Menengah dan Khusus
		Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan	Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum
			Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi
			Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan
			Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama	Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif
			Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
	Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Peningkatan daya saing olahraga	Mengoptimalkan upaya pembinaan terhadap atlet yang berkualitas
	Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Optimalisasi literasi dan numerasi masyarakat	Meningkatkan minat baca masyarakat
		Meningkatkan pengembangan potensi kebudayaan	Mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal
			Meningkatkan fasilitasi pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana kesenian
MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur			
Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas	Pengembangan sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu	Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni
			Pengembangan sarana-prasarana permukiman yang memadai dan terjangkau untuk kelompok rentan, perempuan, dan kelompok minoritas
		Optimalisasi manajemen pengelolaan kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu dan responsif bagi kebutuhan kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas	Optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan
			Pemenuhan serta pengembangan sarana-prasarana jalan (PJU) dan pengawasan ketertiban lalu lintas
			Pembangunan dan pengembangan konektivitas antar kawasan produktif ekonomi (e.g. Pembangunan Dermaga Penyebarangan Pelabuhan Cituis)
			Pengembangan sistem dan moda transportasi umum yang terintegrasinya (e.g. MRT, BRT, Kawasan TOD dan lain sebagainya)
		Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara	Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah (e.g. insinerator) yang terintegrasi hulu ke hilir dan bersertifikasi
			Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur persampahan dan limbah (e.g. skema KPBU)
			Penegakan regulasi dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah dan limbah
		Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi	Penyediaan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi melalui kerjasama dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu	Penegakan regulasi pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya,	Penegakan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang,
			Penegakan bangunan yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh,
			Peningkatan luas dan pengelolaan RTH publik
		Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang,	Pengembangan kapasitas SDM dalam pendataan dan pengolahaan sistem informasi spasial
MISI 6 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas		Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah	Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih
			Pengembangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air baku dan air bersih

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)			
Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		Mendukung pengembangan SPAM Regional (lintas wilayah) (ie. pemanfaatan air Beku Bendungan Karian dan Rencana Bendung Lepas Pantai Muara Sungai Cisadane)
			Optimalisasi Wilayah Sungai Cisadane dalam mendukung pemenuhan kebutuhan konservasi, air minum dan air pertanian
		Mendorong pengembangan EBT untuk ketahanan energi yang ramah lingkungan	Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT
			Pengembangan sarana dan prasarana pendukung elektrifikasi berbasis EBT
		Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas
			Pemerataan cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan	Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup,	Pengembangan sistem terintegrasi dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup
			Pemetaan kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan penyangga di tingkat detail (di tingkat persil lahan) dan sinkronisasi dengan aturan penataan ruang
		Pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup	Mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup
			Penegakan regulasi untuk mendorong pengadaan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Optimalisasi tata kelola manajemen penangggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana
			Pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terpadu (eg. penerapan SIH3 dan FEWS untuk bencana banjir serta pembangunan Perlindungan Abrasi Pantura Tangerang)
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana	Optimalisasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

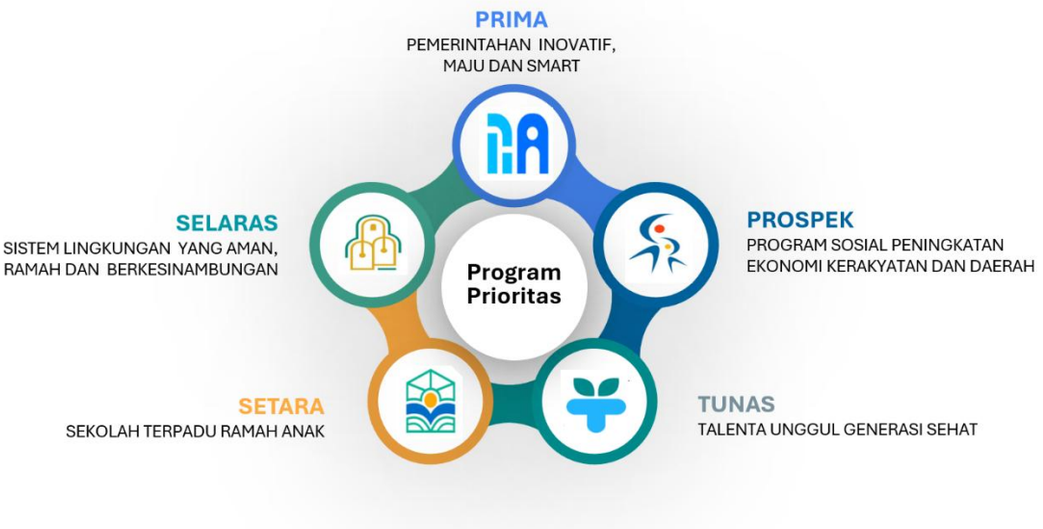
Tabel 3.9
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Periode 1 (2025-2029) "Penguatan Modal Dasar"				
	Arah Kebijakan Tahun 2026	Arah Kebijakan Tahun 2027	Arah Kebijakan Tahun 2028	Arah Kebijakan Tahun 2029	Arah Kebijakan Tahun 2030
	Penguatan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kolaborasi antar sektor untuk menciptakan pondasi ketahanan pangan	Optimalisasi sektor industri. perdagangan. dan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan.	Pengembangan Riset. Inovasi. dan Daya Saing Tenaga Kerja	Akselerasi Pembangunan Daerah yang Inklusif untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Mendorong digitalisasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif	Penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam rangka mendorong efektivitas kebijakan dan akselerasi pembangunan	Penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik	Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan inklusif yang merata	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah
Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing	Penguatan kemandirian desa. peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi	Mendorong implementasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mendorong perekonomian yang kuat. produktif. dan berdaya saing
Misi 3 Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas	Peningkatan kapasitas tenaga medis dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan mengawal penurunan stunting	Mendorong optimalisasi sistem kesehatan yang terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Pengembangan inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan	Pemantapan akses dan integrasi layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan daerah	Optimalisasi sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat
Misi 4 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Penguatan kolaborasi dalam dunia pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas kompeten	Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan	Percepatan pemerataan pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan wilayah maupun kelompok rentan	Optimalisasi pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata dalam rangka memperkuat daya saing sumber daya manusia
Misi 5 Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui integrasi angkutan umum serta infrastruktur penghubung perdesaan-perkotaan dan antar wilayah	Pengelolaan infrastruktur berbasis lingkungan berkelanjutan dan sirkular serta peningkatan ketaatan kesesuaian penataan ruang dengan daya dukung dan daya tampung wilayah	Pengembangan Infrastruktur berbasis riset dan inovasi serta Peningkatan kerja sama lintas wilayah dan investasi infrastruktur.	Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur guna memperkuat konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah	Optimalisasi pembangunan infrastruktur yang merata untuk peningkatan daya saing wilayah
Misi 6 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan ketahanan daerah (ketahanan air. pangan. energi) dan konervasi keanekaragaman hayati	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon	Pengembangan infrastruktur transisi EBT dan transformasi sistem pangan berkelanjutan	Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui konservasi lingkungan dan ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Optimalisasi ketahanan lingkungan hidup dan penguatan daya dukung wilayah

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 mengacu pada rumusan indikator kinerja program dan sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Pada Bab ini, dijabarkan program pembangunan daeerah prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang terdiri atas lima program prioritas dengan beberapa kegiatan prioritas turunannya, yaitu:



Gambar 3.3
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029
Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang

Tabel 3.10
Penjabaran Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan Prioritas	Target 2025-2029
PRIMA - PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART		
1	Digitalisasi Akses Layanan Kemasyarakatan kecamatan	• Pemenuhan pelayanan terpadu di kecamatan untuk pencetakan KTP dan KK di seluruh Kecamatan Target Tahun 2026 seluruh kecamatan sudah mulai percetakan mandiri • Rehab Ruang Pelayanan Target sampai dengan Tahun 2030 semua ruang pelayan di kecamatan sudah sesuai dengan stamdar pelayanan
2	Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu	• Penyiapan Rancang Bangun Command Centre Target Tahun 2025 • Penyiapan ruang command centre dan design interior target Tahun 2026 • Penyediaan Sarana Prasarana Command Centre Target Tahun 2027-2029
3	Penyediaan Mobile Training Unit (MTU)	• MTU Tata Busana dan otomotif Target Tahun 2025 • MTU Las dan Referifrasi (AC) Target Tahun 2026 • MTU Design Grafis, Barista dan Basic Office Target Tahun 2027 • MTU Tata Boga, Tata Rias dan Tata Busana Target Tahun 2028 • MTU Bahasa, Teknik Listrik dan Multimedia Target Tahun 2029
4	Pembangunan Gedung Diorama Daerah	• Pembangunan Gedung Diorama Tahun 2026 dan Tahun 2027 • Digital Konten Diorama Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2029
5	Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda	• Renovasi Gedung Graha Pemuda (Eksterior, Interior) Tahun 2025 • Pembangunan Inovator Hub (Ruang/tempat berkumpulnya komunitas wira usaha baru yang dibangun oleh para pemuda) Tahun 2026
PROSPEK - PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH		
1	Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM	• Pembangunan kawasan ekonomi kreatif di setiap kecamatan target sampai dengan tahun

No.	Kegiatan Prioritas	Target 2025-2029
		20230 terbentuknya Kawasan ekonomi kreatif di seluruh kecamatan (KECAMATAN) • Inkubasi usaha Mikro pada Pelaku UMKM (DINKOP) • Pengembangan Produk unggulan Daerah di 10 Kecamatan (DINKOP)
2	Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan,Perkebunan, dan Perikanan)	• Desa Mandiri Pangan Pertanian Target Pertahun 5 desa (DPKP) • Desa Mandiri Pangan Perkebunan Target Pertahun 5 desa (DPKP) • Desa Mandiri Pangan Peternakan Target Pertahun 5 desa (DPKP) • Desa Mandiri Pangan Perikanan Target pertahun 5 desa (DISKAN)
3	Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan	• Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif (UWEP) target 50 desa sampai dengan 2029 (DINSOS) • Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah target 50 unit sampai dengan tahun 2029 (KECAMATAN) • Pengembangan Budidaya ikan target 50 desa sampai dengan tahun 2029 (DISKAN) • Penyediaan pangan dan nutrisi untuk MBR (masyarakat berpenghasilan Rendah) Target 50 desa sampai dengan 2029 (DPKP)
4	Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan	Bazar murah di 29 kecamatan 4 kali dalam 1 tahun
5	Pembangunan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)	• Pembangunan dan pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park) Target Tahun 2026-Tahun 2029 (BAPPEDA, DTRB) • Pengembangan sarana prasarana Target Tahun 2028-2030 (DTRB)
TUNAS - TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT		
1	Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia	• Penanganan 32.650 balita stunting/gizi buruk melalui PMT target selama 5 tahun (DINKES, BLUD) • Penanganan 6150 ibu hamil KEK melalui PMT lokal target selama 5 tahun (DINKES, BLUD) • Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas target 12.500 keluarga risiko stunting selama 5 tahun (DPPKB)
2	Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan	• Penambahan Sarana Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD pada 4 RSUD (4 RSUD) • Relokasi Puskesmas target 5 puskesmas selama 5 tahun (DINKES) • Penyediaan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance target selama 5 tahun 57 mobil (DINKES)
3	Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih	• Sanitasi Target selama 5 tahun 1250 unit, pertahun 250 unit yang dibangun (DPPP) • Sarana Air Bersih selama 5 tahun 250 unit, per tahun 50 unit yang dibangun (DPPP) • Pembangunan PA Komunal Target selama 5 tahun 10 unit, 2 unit pertahun yang akan dibangun (DPPP)
4	Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan (DPMPD)	Mobil Siaga Desa dan Kelurahan
5	Penambahan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu, dan Posyandu	• Penambahan Sarana Prasarana untuk peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas Target sampai dengan tahun 2030, 44 puskesmas (DINKES, BLUD) • Penambahan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Pustu dan Posyandu target sampai dengan tahun 2030, 43 pustu (DINKES, BLUD)
SETARA - SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK		
1	Pembangunan Perpustakaan Modern di Setiap Kecamatan	• Pembangunan pojok baca/gedung Perpustakaan target salam 5 tahun di 29 kecamatan • Penyediaan Sarana dan prasarana target selama 5 tahun di 29 kecamatan

No.	Kegiatan Prioritas	Target 2025-2029
2	Pembangunan *Trauma Healing Centre* dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten	• Pembangunan Rumah Trauma Healing Target Tahun 2025 • Penyediaan Sarpras dan SDM Target Tahun 2026-2027 • Pembangunan Sentra Olahraga Kabupaten Target Tahun 2026-2027 • Pengembangan Sarana Prasarana Sentra Olahraga target Tahun 2027-2028
3	Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN)	• Pembangunan aspontren beserta sarana pendukung Target selama 5 tahun 915 Aspontren • Sekolah inklusif Target selama 5 tahun 5 sekolah inklusif • Pembangunan boarding School Target Tahun 2026-2027 • Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Target Tahun 2027-2029
4	Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan	• Pembangunan Pusat pembelajaran dan inovasi pendidikan target tahun 2026-2027 • Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Target Tahun 2027-2028
5	Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta	• Beasiswa Sekolah Swasta Gratis Tingkat SD dan Sederajat Target selama 5 tahun 67.000 siswa • Beasiswa Sekolah Swasta Gratis tingkat SMP dan Sederajat Target selama 5 tahun 25.869 siswa • Beasiswa Perguruan Tinggi Target Selama 5 Tahun 1.735 Mahasiswa/siswi
SELARAS - SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH, DAN BERKESINAMBUNGAN		
1	Pembangunan Rumah Layak Huni, Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional	• Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Target selama 5 tahun 5.000 rumah, 1 tahun 1.000 rumah • Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional -Pembangunan Pusat Riset Mangrove Target Tahun 2027 -Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Target Tahun 2027-2029
2	Pengelolaan dan Pengolahan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir	• Optimalisasi TPS3R target selama 5 tahun 25 TPS3R Pertahun 5 unit • Pembentukan Bank Sampah Target Selama 5 tahun 150 Bank Sampah pertahun 30 bank Sampah • Revitalisasi TPA Jatiwaringin target selama 5 tahun
3	Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Rekonstruksi Jalan, rehabilitasi jalan Penghubung antar kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik	• Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Target selama 5 tahun 15 km • Pembangunan Jalan, Drainase, dan Pedestrian Bojong-Pemda Target 5 tahun • Bus Sekolah Gratis Target selama 5 tahun 84 Bus Sekolah Gratis • Bus rapid Transit (BRT) transportasi umum gratis Target selama 5 tahun 30 bus
4	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 29 kecamatan selama 5 tahun
5	Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, sekaligus Kawasan Wisata Baru	• Lanjutan Tandon Sudirman Target Tahun 2025-2027 • Polder Cibadak Baru Target Tahun 2025-2026 • Tandon Solear Target Tahun 2027

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang

Tabel 3.11
Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	TARGET CAPAIAN		Program Prioritas	Program Prioritas Kepala Daerah
					2025	2030		
Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Mewujudkan Birokrasi yang Responsif. Akuntabel. dan Inovatif			Indeks Reformasi Birokrasi	85,12	88,54		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,23	4,40	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PRIMA 1) Penyediaan Mobil Training Unit (MTU) 2) Digital Konten Gedung Diorama 3) Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kematangan penerapan pemerintah digital	Indeks PEMDI	N/A	2,7	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PRIMA 1) Digitalisasi Akses Layanan Kemasyarakatan di kecamatan 2) Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu
			Meningkatnya kompetensi. kinerja dan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	82,40	83,00	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	74,46	76,96	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	TARGET CAPAIAN		Program Prioritas	Program Prioritas Kepala Daerah
					2025	2030		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP	76	80,20	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya elektonifikasi transaksi pemerintah daerah	Indeks Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	91	96	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3,370	3,500	6.01.07 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEDAMPINGAN DAN ASISTENSI 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,27-6,27	8,27		
				Tingkat Inflasi (%)	2,00	2,00		
		Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	33,55 - 33,75	33.70 - 33.90	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROSPEK 1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian. Peternakan. Perkebunan dan Perikanan) 2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	11,15 - 11,35	11.33 - 11.50	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	TARGET CAPAIAN		Program Prioritas	Program Prioritas Kepala Daerah
					2025	2030		
			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian. peternakan. dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian. kehutanan. dan perikanan terhadap PDRB (%)	6,07 - 6,30	6.21	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (%)	1,76	2,15	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (% PDRB)	27,02	27,32	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD	Meningkatnya peran koperasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,26	1,33	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROSPEK 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan. Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan 3) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)
		Mengendalikan Harga Bahan Pokok	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5,11	5,28	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN	PROSPEK 1) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	TARGET CAPAIAN		Program Prioritas	Program Prioritas Kepala Daerah
					2025	2030		
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			Tingkat Kemiskinan (%)	5,94-6,17	4,40		
		Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya status desa dan capaian Indeks Desa	Indeks Desa (Indeks)	0,783	0,819	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	PROSPEK 1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian. Peternakan. Perkebunan dan Perikanan)
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatnya serapan tenaga kerja daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,08	71,19	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROSPEK 1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan. Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM 2) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	58	63	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROSPEK 1) Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan
			Meningkatnya kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,397	0,388	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup (tahun)	77,7	83,89		
		Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal	Meningkatnya kemajuan pembangunan layanan kesehatan masyarakat	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis)	20	70	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	TUNAS 1) Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia 2) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan 3) Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih 4) Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan (DPMPD) 5) Penambahan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu, dan Posyandu
			Menurunnya angka stunting pada balita	Prevalensi Stunting	20,09	15,5	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	TARGET CAPAIAN		Program Prioritas	Program Prioritas Kepala Daerah
					2025	2030		
		Meningkatnya kesehatan individu. keluarga. dan masyarakat	Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	99	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	TUNAS 1) Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia 2) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan 3) Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih 4) Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan (DPMPD) 5) Penambahan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu, dan Posyandu
			Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65	70	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat			Indeks Pendidikan (indeks)	0,68	0,72		
				Indeks Harmoni (indeks)	7,09	7,24		
		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia produktif	Rata Rata Lama Sekolah	9,63	10,66	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	SETARA 1) Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN) 2) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan 3) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta
			Meningkatnya ekspektasi lama waktu pendidikan formal	Harapan lama sekolah (tahun)	13,43	14,24	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pembangunan bidang keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)	5,11	5,28	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	SETARA 1) Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten
		Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama	Meningkatnya tata kelola dan keberlanjutan pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	52	56	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	SETARA 1) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan 2) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta 3) Pojok baca digital dan internet gratis di setiap kecamatan
			Meningkatnya budaya membaca dan akses masyarakat terhadap literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60	65	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya pembentukan karakter	Indeks Karakter Masyarakat	69	91,5	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER	

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	TARGET CAPAIAN		Program Prioritas	Program Prioritas Kepala Daerah
					2025	2030		
			dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat				KEBANGSAAN 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu. Berkualitas. dan Berkelanjutan			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	88		
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas	Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur	38,98	65,33	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	SELARAS 1) Pembangunan Rumah Layak Huni, Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional 2) Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Rekonstruksi Jalan, rehabilitasi jalan Penghubung antar kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu	Meningkatnya kepatuhan dan kesesuaian terhadap tata ruang daerah	Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW (%)	96	98,52	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	SELARAS 1) Pembangunan Rumah Layak Huni, Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional 2) Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Rekonstruksi Jalan, rehabilitasi jalan Penghubung antar kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik 3) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)"
			Meningkatnya penyediaan ruang terbuka hijau	Persentase RTH (%)	21,10	25	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
Mewujudkan Lingkungan	Meningkatnya Ketahanan			Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	18,21	19,99		

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang)								
MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN - SASARAN	TARGET CAPAIAN		Program Prioritas	Program Prioritas Kepala Daerah
					2025	2030		
Hidup yang Berkelanjutan	Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	78,16	82,49		
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,57	62,43	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	SELARAS 1) Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, sekaligus Kawasan Wisata Baru 2) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	125	120	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		Meningkatnya Ketahanan Energi. Air. dan Pangan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	65,59	90,41	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	SELARAS 1) Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, sekaligus Kawasan Wisata Baru PROSPEK 1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian. Peternakan. Perkebunan dan Perikanan) 2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan
			Meningkatnya pemenuhan konsumsi pangan berkualitas	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	2,2	1,56	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

Tabel 3.12
Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx		xx
1	PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART (PRIMA)																	
1		Digitalisasi Sistem Pelayan kependudukan di kecamatan																
	07.01.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*																
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	7.01.01.2.06.0002	sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		- Pengadaan Sarana Prasarana Pencetakan	Kecamatan	23	6.900.000.000	-		23	6.900.000.000									Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Percetakan	Kecamatan	29				29	2.000.000.000	29	2.000.000.000	29	2.000.000.000	29	2.000.000.000	29	2.000.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		a. Digitalisasi Pelayanan Penduduk	Unit	1						1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	
	07.01.02	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK,*															1.281.701.801.936	
	7.01.2.2.02	*Keg : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*															8.778.004.357.822	
	7.01.02.2.02.0003	*Sub Keg :Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*																
		- Rehab Ruang Pelayanan	Kecamatan	29	5.800.000.000	-		6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	5	1.000.000.000	Kecamatan
2		Penyelenggaraan *Command Center* Data Terpadu																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	07.01.02	*PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA*																
	7.01.2.2.02	*PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*																
	7.01.02.2.02.0003	*Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas*																
		- Penyiapan Rancang Bangun Command Centre	Unit	1	250.000.000	1	250.000.000											Diskominfo
		- Penyiapan ruang command centre dan design interior	Unit	1	1.000.000.000			1	1.000.000.000									Diskominfo
		- Penyediaan Sarana Prasarana Command Centre	Unit	4	4.000.000.000					1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Diskominfo
3		Penyediaan *Mobil Training Unit* (MTU)		13	19.406.858.000													
	02.07.03	Program : pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja																
	02.07.03.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi																
	02.07.03.2.01.0001	Sub kegiatan : Pengadaan Sarana pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																
		-MTU Tata Busana dan Otomotif	unit	2		2	2.000.000.000											Disnaker
		-MTU Las dan Referifrasi (AC)	unit	2				2	4.418.585.000									Disnaker
		-MTU Design Grafis, Barista dan Basic Office	unit	3						3	4.855.316.000							Disnaker
		-MTU Tata Boga, Tata Rias dan Tata Busana	unit	3								3	3.159.557.000					Disnaker
		-MTU Bahasa, Teknik Listrik dan Multimedia	unit	3										3	4.973.400.000			Disnaker
4		Pembangunan Gedung diorama																DTRB, Disperpusip
	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
		- Review DED	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000											Disperpusip
		- Penyusunan PERBUP Kearsipan	Perbup	1				1	200.000.000									
		- Penyusunan Arsip Stattis Untuk Isi Konten Diorama	Dokumen					1	400.000.000									
		- DED Konten Diorama	Dokumen					1	900.000.000									
	2.24.03	*PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP*																
	2.24.03.2.05	Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang																
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																
		- Digital Konten Gedung Diorama	Unit	1	30.000.000.000					1	15.000.000.000	1	15.000.000.000					Disperpusip
5		Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda																Disporabudpar
	02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																
	2.19.02.2.01.00016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Kabupaten / Kota																
		- DED	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000											Disporabudpar
	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		- Renovasi Gedung Graha Pemuda (Eksterior, Interior)	Unit	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000											DTRB
		Pengadaan Sarana Prasarana																
	02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																
	2.19.02.2.01.00016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Kabupaten / Kota																
		- Pembangunan Inovator Hub (Ruang/tempat berkumpulnya komunitas wira usaha baru yang dibangun oleh para pemuda)	Unit	1	2.000.000.000	-			2.000.000.000									Disporabudpar
		a. Ruang Diskusi dan rapat																
		b. Ruang pelatihan																
		c. Ruang Laboratorium																
		d. Ruang Auditorium																
		e. Ruang Teknologi Informasi																
2	PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH (PROSPEK)																	
1		Pembentukan dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan dan Pusat Pengembangan UMKM dan IKM:																DINKOP
	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
		a. Pembangunan kawasan ekonomi kreatif di setiap kecamatan	Kecamatan	29	14.500.000.000			12	6.000.000.000	12	6.000.000.000	5	2.500.000.000					Kecamatan

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		b. Pembangunan Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM	Unit			1	500.000.000											
	02.17.18	*PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM*																
	02.17.08.2.01	*Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*																
	02.17.08.2.01.0006	*Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi*																
		- penambahan Sarana dan Prasarana	Unit	5	1.500.000.000			1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha kecil Memengah
		- Inkubasi usaha Mikro pada Pelaku UMKM	UMKM	250	5.000.000.000			50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	50	1.000.000.000	
		- Pengembangan Produk Unggulan Daerah di 10 Kecamatan	Kecamatan	29	1.875.000.000			10	750.000.000	6	375.000.000	6	375.000.000	7	375.000.000			
2		Pembangunan Desa Mandiri Pangan pada 25 desa pertahun																
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat																
		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN																
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
		- Desa Mandiri Pangan Pertanian	Desa	25	5.000.000.000			5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	DPKP
		- Desa Mandiri Pangan Perkebunan	Desa	25	5.000.000.000			5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	DPKP
		- Desa Mandiri Pangan Perternakan	Desa	25	5.000.000.000			5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	DPKP
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
		Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
		- Desa Mandiri Pangan Perikanan	Desa	25	25.000.000.000			5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	Dinas Perikanan
		a. Pelatihan budidaya Perikanan Kepada Masyarakat																
		b. bantuan Sarana Pendukung (Cold Storage)																
		c. Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan																
		d. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pemasaran Produk Perikanan																
		e. Pembentukan Kelembagaan Pembudidaya Perikanan																
		f. Pengadaan Mobile Training Unit Untuk Budidaya Perikanan																
		- Revitalisasi TPI (Rehab Bangunan, Pembangunan Sumur Bor, Pembangunan Depot Es, Sarpras pendukung Lainnya)	Unit	3				1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000			
		a. Kronjo																
		b. Cituis																
		c. Tanjung Pasir																
		- Pembangunan Balai Benih Skala Kabupaten (TPI Banyawakan) Kec. Kemeri	Kemiri															
		a. MasterPlan dan DED	Dokumen															
		b. Pembangunan Fisik (Gedung Kantor, Laboratorium, Gudang Pemagaran, Kolam Benih, Kolam Induk, Mess Diklat, Sasrana Air Bersih, Akses Jalan, Parkir, Aula Pelatihan)	Unit	4				1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000			
		- Pembangunan Wana Mina (Silvo Fisheries) Skala Kabupaten Di Desa Karang Anyar-Kemiri)																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		a. MasterPlan dan DED	Dokumen															
		b. Pembangunan Fisik (Gedung Kantor, Laboratorium, Gudang Pemagaran, Kolam Benih, Kolam Induk, Mess Diklat, Sasrana Air Bersih, Akses Jalan, Parkir, Aula Pelatihan)	Unit	4				1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000			
3		Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan di 50 desa																Bappeda, Dinsos, Kecamatan
	01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																
	1.06.02.02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosia																
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	\															
		- Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi (Pembentukan UWEP Usaha Ekonomi Produktif)	Desa	50	13.000.000.000	10	2.600.000.000	10	2.600.000.000	10	2.600.000.000	10	2.600.000.000	10	2.600.000.000			Dinas Sosial
	07.01.02	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK,*																
	7.01.2.2.02	*Keg : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*																
	7.01.02.2.02.0003	*Sub Keg :Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*																
		- Pembangunan Rumah Layak huni Bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Unit	50	8.750.000.000	10	1.750.000.000	10	1.750.000.000	10	1.750.000.000	10	1.750.000.000	10	1.750.000.000			Kecamatan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																
		Keg Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Subkeg Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																
		- Pengembangan Budidaya Ikan	Unit	50	10.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000			Dinas Perikanan
	03.27.02	*PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*																
	3.27.02.2.01	*PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN*																
	3.27.02.2.01.0001	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*																
		- Budidaya Pertanian Skala Rumah Tangga	Lokasi	50				10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	02.09.04	*PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN*																
	2.09.04.2.02	*PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA*																
	2.09.04.2.02.0004	*Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi*																
		- Penyediaan pangan dan nutrisi untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)	Lokasi	50				10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4		Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan																Kecamatan
	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
		- Bazar Murah Di 29 Kecamatan 4 Kali setiap TW	Kecamatan	29	69.600.000.000	29	11.600.000.000	29	11.600.000.000	29	11.600.000.000	29	11.600.000.000	29	11.600.000.000	29	11.600.000.000	Kecamatan
5		Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park)																
		DED Tekno Park	Ded	1	200.000.000	1	200.000.000											Bappeda

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
		Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park)	Unit	1	40.000.000.000			1	5.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	5.000.000.000	DTRB
		Pengembangan sarana prasarana	Paket	1	3.000.000.000							1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	DTRB
3	TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT (TUNAS)																	
	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
	1.02.02.2.02.00015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
1		Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia dengan pemberian makanan tambahan ;	Desa	60,00														Dinkes, DPPKB, Kecamatan
		- Penanganan 32.650 ribu balita stunting/gizi buruk melalui PMT	Balita	32.650	23.549.500.408	6.520	3.269.281.000	6.620	3.923.137.200	6720	4.707.764.640	6820	5.649.317.568	2920	3.000.000.000	3050	3.000.000.000	Dinkes dan BLUD
		- Penanganan 6150 Ibu hamil KEK melalui PMT Lokal	Ibu Hami	6.150	24.315.376.237	900	2.448.698.100	950	2.938.437.720	1000	3.526.125.264	1050	4.231.350.317	1100	5.077.620.380	1150	6.093.144.456	Dinkes dan BLUD
		- Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Krs	12.500	12.500.000.000			2.500	2.500.000.000	2.500	2.500.000.000	2.500	2.500.000.000	2.500	2.500.000.000	2.500	2.500.000.000	DPPKB
2		Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia;																
	01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
	1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																
	1.02.02.2.01.00014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
	1.02.02.2.01.00020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
	1.02.02.2.02.00022	Pengembangan Rumah Sakit																
		- Penambahan Sasrana Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD pada 4 RSUD:																4 RSUD
		- RSUD Tangerang	RSUD	1	210.000.000.000			1,00	10.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	- RSUD Tangerang
		- RSUD Balaraja	RSUD	1	230.000.000.000			1,00	30.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	- RSUD Balaraja
		- RSUD Pakuhaji	RSUD	1	215.000.000.000			1,00	15.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	- RSUD Pakuhaji
		- RSUD Tigaraksa	RSUD	1	240.000.000.000			1,00	40.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	1,00	50.000.000.000	- RSUD Tigaraksa
3		- Penambahan Sasrana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu dan Posyandu (rehabiltasi dan penambahan alkes dan pemeliharaan alkes) :	Puskesmas	44	88.000.000.000	8	16.000.000.000	8	16.000.000.000	7	14.000.000.000	7	14.000.000.000	7	14.000.000.000	7	14.000.000.000	Puskesmas
			Pustu	43	64.500.000.000	8	12.000.000.000	7	10.500.000.000	7	10.500.000.000	7	10.500.000.000	7	10.500.000.000	7	10.500.000.000	Dinas Kesehatan
		- Relokasi Puskesmas	Unit	5	119.150.000.000			1,00	23.000.000.000	1,00	24.000.000.000	1,00	24.000.000.000	1,00	24.150.000.000	1,00	24.000.000.000	Dinas Kesehatan

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		- Penyediaan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance :	Mobil	57	25.183.344.600	32,00	12.086.819.600	5,00	2.619.305.000	5,00	2.619.305.000	5,00	2.619.305.000	5,00	2.619.305.000	5,00	2.619.305.000	Dinas Kesehatan
4		Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih;																
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																
		- Sanitasi	Unit	16.377	63.161.927.338	11.377	13.161.927.338	250	2.500.000.000	1.250	12.500.000.000	1.250	12.500.000.000	1.250	12.500.000.000	1.000	10.000.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
		- Air Bersih	Unit	1.558	165.003.843.630	1.308	115.003.843.630	50	10.000.000.000	50	10.000.000.000	50	10.000.000.000	50	10.000.000.000	50	10.000.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
		- Pembangunan IPA Komunal	Unit	10				2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
5		Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan																
		PROGRAM …																
		KEG..																
		SUBKEG…																
		Mobil Siaga Kelurahan	Unit	28	7.980.000.000													DINKES dan DPMPD
		Operasional dan Pemeliharaan Mobil Siaga	Mobil		14.000.000.000			28	2.800.000.000	28	2.800.000.000	28	2.800.000.000	28	2.800.000.000	28	2.800.000.000	Kelurahan
4	SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK (SETARA)																	
1		Pembangunan Perpustakaan Modern Di Setiap Kecamatan																Disperpusip, Kecamatan
	07.01.01	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*																
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Urusan Pemerintahan Daerah																
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
		- Pembangunan Gedung Perpustakaan	Kecamatan	29	12.700.000.000			6	1.200.000.000	6	3.000.000.000	6	3.000.000.000	6	3.000.000.000	5	2.500.000.000	Kecamatan
	02.23.02	*PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN*																
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
		- Penyediaan Sarana dan Prasarana	Unit	29				6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	5	1.000.000.000	Disperpusip
2		Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten																DPPPA
		- Trauma Healing Centre																
	01.03.09	*PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA*																
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
		a. DED	Dokumen	1		1	200.000.000											DTRB
	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
		b. Pembangunan Rumah Trauma Healing	Unit	1		1	1.500.000.000											DTRB
	2.08.07	*PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK*																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.08.07.2.02	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*																
	2.08.07.2.02.0008	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan*																
		C. Penyediaan Sarpras dan SDM	Orang	12				1	2.500.000.000	1	2.500.000.000							DPPA
		- Sentra Olahraga Kabupaten																
	02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																
		a. Master Plan dan DED	Dokumen	1		1	500.000.000											Disporabudpar
	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
		b. Pembangunan Sentra Olahraga Kabupaten	Unit	1	50.000.000.000			1	25.000.000.000	1	25.000.000.000							DTRB
		c. Pembangunan SPORT Centre																
		- Master Plan/DED Sport Centre	Unit	1	500.000.000			1	500.000.000									
		- Pembangunan Sport Centre Gemilang	Unit	1	150.000.000.000					1	50.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		30.000.000.000	
	02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																
		c. Pengembangan Sarana Prasarana	Unit	1	10.000.000.000							1	10.000.000.000					DISPORABUDPAR
3		Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN)																
	04.01.02	*PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT*																
		Keg Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																
		Sub kegiatan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																
		- Pembangunan Aspontren beserta sarana pendukung	Unit	915	183.000.000.000	60	12.000.000.000	200	40.000.000.000	200	40.000.000.000	155	31.000.000.000	150	30.000.000.000	150	30.000.000.000	Setda
		- BOP Aspontren	Orang					1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Setda
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM																
		KEG - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																
		SUBKEG Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																
		-Sekolah Inlusif																
		a. menyusun regulasi inklusi	Perbup			1	75.000.000											Dinas Pendidikan
		b. pendataan siswa inklusi	Laporan			1	150.000.000											Dinas Pendidikan
		c. menyusun master plan penentuan Sekolah Inklusi	Dokumen			1	80.000.000											Dinas Pendidikan

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		d. Modifikasi sarana prasrana sekolah inklusi	Sekolah					5	350.000.000									Dinas Pendidikan
		e. peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan pada Pendidikan formal	Orang			15	375.000.000											Dinas Pendidikan
		f. peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan baik pada Pendidikan pelatihan	Orang			500	200.000.000											Dinas Pendidikan
		g. penyediaan layanan konsultasi atas layanan inklusi kepada sekolah dan masyarakat	Orang			3	360.000.000											Dinas Pendidikan
		h. penyediaan layanan klinis kepada peserta didik penyandang disabilitas pembentukan komunitas belajar Pendidikan inklusif pada masing-masing jenjang	Paket			1	500.000.000											Dinas Pendidikan
		i. Pembentukan komunitas belajar pendidikan inklusi	Kegiatan			1	100.000.000											Dinas Pendidikan
		-Boarding School																Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
		KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																
		a. Penyiapan DED	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000											Dinas Pendidikan
		b. Pembangunan Boarding Scholl	Unit	1	20.000.000.000					1	20.000.000.000							Dinas Pendidikan
		c. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung	Paket	1	3.000.000.000					1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000			Dinas Pendidikan
		-Rehabilitasi SD dan SMP																
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
		KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama																
		Rehabiltasi																
		a. Penyiapan DED	Dokumen	1	-	1												
		b. Rehabilitasi SD dan SMP	Unit	1	50.000.000.000			1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4		Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan																
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
		KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																
		a. Penyiapan DED	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000											Dinas Pendidikan
		b. Pembangunan Pusat pembelajaran dan Inovasi Pendidikan	Unit	1	40.000.000.000			1	20.000.000.000	1	20.000.000.000							Dinas Pendidikan
		c. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung	Paket	1	3.000.000.000					1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000			Dinas Pendidikan
5		Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta																
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
		KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama																
		SUBKEG Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																
		- Beasiswa Sekolah Swasta Gratis			795.000.000.000		40.000.000.000		105.000.000.000		120.000.000.000		160.000.000.000		180.000.000.000		190.000.000.000	Dinas Pendidikan
		a. Tingkat SD dan Sederajat	Siswa	67.000														
		b. Tingkat SMP dan Sederajat	Siswa	25.869														
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
		Keg Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																
		Sub kegiatan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																
		- Beasiswa Perguruan Tinggi	Mahasiswa	1.735	275.000.000.000	235	25.000.000.000	300	50.000.000.000	300	50.000.000.000	300	50.000.000.000	300	50.000.000.000	300	50.000.000.000	SETDA Kesra
		- BOP Beasiswa	Orang					1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	
5	SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH DAN BERKESINAMBUNGAN (SELARAS)																	
1		Pembangunan Rumah Layak Huni bagi																DPPP

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional																
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																
		KEG Peningkatan KualitasKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
		SUBKEG Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																
		a. Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi MBR	Rumah	5.000	234.812.200.693	1.197	42.312.200.693	1000	35.000.000.000	1000	35.000.000.000	1000	35.000.000.000	1500	52.500.000.000	1000	35.000.000.000	DPPP
	01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
		b. Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala nasional																
		- Penyiapan DED	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000											DTRB
		- Pembangunan Pusat Riset Mangrove	Unit	1	22.000.000.000			1	2.000.000.000	1	20.000.000.000							DTRB
		- Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung	Paket	1	2.000.000.000					1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
2		Pengelolaan dan Pengolahan Sampah secara terpadu dari hulu ke hilir :																
	02.19.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah																
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																
		Optimalisasi TPS3R Baru 5 Unit Pertahun	Unit	25	25.000.000.000			5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	DLHK
	02.19.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah																
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																
		Pembentukan Bank Sampah	Unit	150	2.500.000.000			30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	DLHK
	02.19.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah																
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																
		Revitalisasi TPA Jatiwaringin	unit	1	15.000.000.000												15.000.000.000	
		1. Pembangunan Akses Jalan	Km					1	12.000.000.000									DLHK
		2. Pengadaan Lahan 1.5 Ha	Ha					1	7.500.000.000									DLHK
		3. Pengembangan Jaringan Listrik	Jaringan					1	500.000.000									DLHK
		4. Pembangunan Instalasi Pengolaan Air Limbah (LEACHATE)	Unit					1	3.000.000.000									DLHK
		5. Teknologi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan	Unit					1	17.000.000.000									DLHK
3		Rekonstruksi, Pelebaran, Pedestrian dan Drainase Jalan Bojong-Pemda (Syekh Nawawi) serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik																
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																
		Pembangunan Drainase Jalan Syech Nawawi						3500	10.777.508.000	2700	8.026.166.000	3375	9.819.754.000	2400	7.046.402.000	2400	6.936.552.000	DBMSDA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																
		- Pembangunan Akses Jalan Pusat Riset Mangrove	Km					1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000					
		Rekonstruksi Jalan																DBMSDA
		Pelebaran Jalan Menuju Standar (Pelebaran Jalan, Pedestrian)	Km			0,4	4.684.966.000	1,50	14.962.500.000	2,0	12.076.215.888	2	12.680.026.681	2	13.314.028.015	2	13.979.729.416	DBMSDA
		Rehabilitasi Jembatan																DBMSDA
		-Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik																
	2.15.02	*PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*																
	2.15.02.2.09	*KEG. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota*																
	2.15.02.2.09.0003	*Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota*																
		Sewa Kendaraan																
		- Bus Sekolah	Bus	84	25.200.000.000			13	3.900.000.000	19	5.700.000.000	23	6.900.000.000	29	8.700.000.000	29	8.700.000.000	Dinas Perhubungan
		- Bus Rapid Transit (BRT)	Bus	30	9.000.000.000			0	-	5	1.500.000.000	10	3.000.000.000	15	4.500.000.000	20	6.000.000.000	Dinas Perhubungan
4		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																
	02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																
	2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA																

No	Program Unggulan	Kegiatan	Satuan	Target 5 Tahun		Target												OPD Penanggung jawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																
		- Penyiapan Design RTH		29	500.000.000	5	500.000.000											DLHK
		- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kecamatan	29	15.000.000.000			5	3.750.000.000	5	3.750.000.000	5	3.750.000.000	5	3.750.000.000	6	4.500.000.000	DLHK
5		Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung /Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, Sekaligus Kawasan Wisata Baru																
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										-	-	-	-	-	-	DBMSDA
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										-	-	-	-	-	-	DBMSDA
		Pembangunan Polder/Kolam Retensi										-	-	-	-	-	-	DBMSDA
		1.Lanjutan Tandon sudirman	Unit	1	26.000.000.000	1	5.000.000.000	1	14.000.000.000	1	7.000.000.000							DBMSDA
		2. polder cibadak baru	Unit	1	8.500.000.000	1	7.000.000.000	1	1.500.000.000									DBMSDA
		3. Tandon Solear	Unit	1	14.000.000.000	-	-			1	14.000.000.000							DBMSDA

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat rangkaian program perangkat daerah menurut urusan (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan). Rangkaian program tersebut menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab.

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Selain mencakup pemenuhan urusan konkuren dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.400.000.000.000		2.450.000.000.000		2.500.000.000.000		2.550.000.000.000		2.600.000.000.000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.299.650.882.964		1.299.348.886.464		1.299.848.886.464		1.299.348.886.464		1.299.848.886.464	
Meningkatnya pemenuhan penunjang urusan pemerintah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	1.299.650.882.964	100	1.299.348.886.464	100	1.299.848.886.464	100	1.299.348.886.464	100	1.299.848.886.464	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.098.296.277.036		1.148.598.273.536		1.198.098.273.536		1.248.598.273.536		1.298.098.273.536	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	98,99	99,23	99,48	1.098.296.277.036	99,72	1.148.598.273.536	99,97	1.198.098.273.536	100	1.248.598.273.536	100	1.298.098.273.536	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	64,99	68,03	71,07		74,11		77,15		80,19		83,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	13,43	14,19	14,95		15,72		16,48		17,24		18,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik (%)	58,26	62,26	64,26		64,26		66,26		68,26		70,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap	27,06	28,06	28,56		28,56		29,06		29,56		30,06		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	penduduk usia sekolah (%)													Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.052.840.000		1.052.840.000		1.052.840.000		1.052.840.000		1.052.840.000	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	8,55	28,55	43,55	1.052.840.000	58,55	1.052.840.000	68,55	1.052.840.000	78,55	1.052.840.000	88,55	1.052.840.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 (%)	89,14	90,64	91,64	700.000.000	92,64	700.000.000	93,64	700.000.000	94,64	700.000.000	95,64	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Instansi Pendidikan	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal) (%)	80,08	80,58	81,58	300.000.000	82,58	300.000.000	83,58	300.000.000	84,58	300.000.000	85,58	300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.000.000.000.000		2.100.000.000.000		2.200.000.000.000		2.300.000.000.000		2.300.000.000.000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.268.985.414.129		1.271.386.197.342		1.294.365.122.408		1.344.781.569.946		1.278.588.546.991	
Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	1.268.985.414.129	100	1.271.386.197.342	100	1.294.365.122.408	100	1.344.781.569.946	100	1.278.588.546.991	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/ Kota														
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					711.297.680.109		808.859.594.639		885.523.633.712		934.323.838.838		1.001.545.338.228	
Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	39	38	37		36		35		34		32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persetase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	85	88	88		90		90		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	5,8	5,2	5,1		5		4,9		4,8		4,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA					9.752.199.333		9.770.649.441		9.947.243.321		10.334.695.564		9.825.999.761	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	22	22	25	9.752.199.333	27	9.770.649.441	27	9.947.243.321	29	10.334.695.564	29	9.825.999.761	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	0	10	11		50		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	69	69	69		76		76		84		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					899.958.896		901.661.522		917.958.075		953.713.198		906.769.397	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	80	85	899.958.896	85	901.661.522	87,5	917.958.075	87,5	953.713.198	88	906.769.397	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					9.064.747.533		9.081.897.056		9.246.042.484		9.606.182.454		9.133.345.623	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	85	85	85	9.064.747.533	87	9.081.897.056	87	9.246.042.484	89	9.606.182.454	89	9.133.345.623	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
bidang kesehatan														
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	85	85	85		87		87		89		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	85	85	87		87		87		89		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	85	85	85		87		87		89		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	85	85	85		87		87		89		89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.058.338.100.000		1.084.024.867.513		1.118.880.476.592		1.153.809.863.089		1.179.247.263.081	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					69.408.497.633		72.859.873.197		74.273.818.082		76.216.570.775		77.504.521.145	
Meningkatnya pemenuhan penunjang urusan pemerintah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	44.949.827.633	100	46.183.934.997	100	47.474.558.943	100	48.641.157.482	100	49.765.827.072	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	15	16	24.458.670.000	17	26.675.938.200	17	26.799.259.139	18	27.575.413.293	18	27.738.694.073	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					126.616.754.898		141.551.700.645		151.519.044.580		153.006.344.686		170.003.984.037	
Meningkatnya Panjang Tanggul Sungai, Infrastruktur Pengendali banjir dan Layanan Irigasi Permukaan yang Tertangani	Persentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang Terbangun (%)	9,98	7,02	10,72	126.616.754.898	14,42	141.551.700.645	18,11	151.519.044.580	21,81	153.006.344.686	25,51	170.003.984.037	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Hektar)	879,9	920,4	950		976		991		1,006		1,021		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					55.000.000.000		55.000.000.000		55.000.000.000		55.000.000.000		55.000.000.000	
Meningkatnya Fasilitas Air bersih bagi masyarakat	Cakupan Sarana Air Bersih (%)	62,48	64,98	67,48	55.000.000.000	69,98	55.000.000.000	72,48	55.000.000.000	74,98	55.000.000.000	77,48	55.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					23.337.500.000		25.524.867.513		26.880.476.592		28.309.863.089		30.247.263.081	
Meningkatnya sanitasi layak dan aman	Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun (%)	98,89	99,01	99,12	23.337.500.000	99,22	25.524.867.513	99,33	26.880.476.592	99,44	28.309.863.089	99,54	30.247.263.081	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase cakupan layanan penyedotan lumpur tinja (%)	0,521	1,063	1,695		2,417		3,229		4,132		5,126		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					64.877.000.000		68.287.100.000		72.567.205.000		76.228.065.250		79.865.718.513	
Meningkatnya Drainase Jalan yang Tertangani	Persentase Drainase Jalan yang tertangani (%)	4,18	7,99	11,87	64.877.000.000	15,75	68.287.100.000	19,63	72.567.205.000	23,51	76.228.065.250	27,39	79.865.718.513	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					331.288.330.000		333.913.091.800		339.017.980.861		342.400.195.707		345.098.347.352	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan (Angka)	85	15	17	331.288.330.000	17	333.913.091.800	17	339.017.980.861	17	342.400.195.707	17	345.098.347.352	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					15.960.000.000		16.160.000.000		16.989.000.000		17.656.755.000		18.354.558.975	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang terselenggara (%)	100	11	17	15.960.000.000	17	16.160.000.000	18	16.989.000.000	18	17.656.755.000	19	18.354.558.975	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					363.556.417.469		363.977.264.358		378.439.191.477		402.124.432.582		400.364.470.378	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Preservasi Jalan Kabupaten Tertangani (%)	4,67	6,13	16,63	363.556.417.469	27,13	363.977.264.358	37,63	378.439.191.477	48,13	402.124.432.582	58,63	400.364.470.378	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					156.600.000		170.970.000		188.760.000		207.636.000		228.399.600	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kosntruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	0	0	16	156.600.000	18	170.970.000	20	188.760.000	22	207.636.000	24	228.399.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					8.137.000.000		6.580.000.000		4.005.000.000		2.660.000.000		2.580.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	100	17	28	8.137.000.000	23	6.580.000.000	14	4.005.000.000	9	2.660.000.000	9	2.580.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					151.270.448.888		164.099.130.247		170.429.893.261		176.320.944.427		181.671.428.202	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.615.154.243		21.645.911.955		22.728.207.552		23.864.617.930		25.057.848.827	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	20.615.154.243	100	21.645.911.955	100	22.728.207.552	100	23.864.617.930	100	25.057.848.827	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.975.569.850		2.569.348.343		2.692.815.760		3.322.456.548		3.488.579.375	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan. pendataan dan Perencanaan	100	100	100	1.975.569.850	100	2.569.348.343	100	2.692.815.760	100	3.322.456.548	100	3.488.579.375	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Perumahan. rumah susun dan Apartemen (%)													Permukiman
	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					44.625.000.000		46.750.000.000		48.875.000.000		51.000.000.000		53.125.000.000	
Meningkatnya hunian layak yang terhuni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	97,11	97,22	97,33	44.625.000.000	97,44	46.750.000.000	97,55	48.875.000.000	97,65	51.000.000.000	97,76	53.125.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					84.054.724.795		93.133.869.949		96.133.869.949		98.133.869.949		100.000.000.000	
Meningkatnya Prasarana sarana utilitas	Persentase PSU dalam Asset (%)	47,05	50,08	53,1	84.054.724.795	56,13	93.133.869.949	59,15	96.133.869.949	62,18	98.133.869.949	65,2	100.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
perumahan dan permukiman														Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Presentase Peningkatan Kualitas Permukiman Yang dibangun (%)	99,17	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase sarana dan prasarana TPU yang terpelihara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					94.674.994.715		101.285.572.775		99.834.538.093		102.071.727.543		101.740.446.730	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG					65.387.744.715		64.632.322.775		67.236.288.093		65.152.477.543		65.721.196.730	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	33.000.000.000	100	33.000.000.000	100	33.000.000.000	100	33.000.000.000	100	33.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pemenuhan penunjan urusan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	32.387.744.715	100	31.632.322.775	100	34.236.288.093	100	32.152.477.543	100	32.721.196.730	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					9.847.250.000		16.053.250.000		9.863.250.000		12.069.250.000		12.069.250.000	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Gangguan	Persentase Penyelenggaraan	100	100	100	6.071.250.000	100	6.071.250.000	100	6.071.250.000	100	6.071.250.000	100	6.071.250.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tibumtranmas (Persentase)													Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	1.176.000.000	100	7.382.000.000	100	1.192.000.000	100	3.398.000.000	100	3.398.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.940.000.000		3.100.000.000		3.235.000.000		4.350.000.000		3.450.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	50	50	50	1.250.000.000	50	1.405.000.000	50	1.525.000.000	50	1.640.000.000	50	1.740.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	690.000.000	100	695.000.000	100	710.000.000	100	710.000.000	100	710.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM					16.500.000.000		17.500.000.000		19.500.000.000		20.500.000.000		20.500.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	15.500.000.000	100	16.500.000.000	100	17.500.000.000	100	19.500.000.000	100	19.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					78.027.627.320		89.938.027.000		91.449.499.000		92.197.999.000		92.609.999.000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.298.000.000		17.323.500.000		17.932.500.000		18.508.000.000		18.508.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	17.298.000.000	100	17.323.500.000	100	17.932.500.000	100	18.508.000.000	100	18.508.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM					3.836.999.000		3.901.999.000		3.901.999.000		3.904.999.000		3.914.999.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMBERDAYAAN SOSIAL														
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	49,14	79,40	83,71	3.836.999.000	88,88	3.901.999.000	88,88	3.901.999.000	88,88	3.904.999.000	89,74	3.914.999.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.740.000.000		3.210.000.000		3.695.000.000		3.865.000.000		4.215.000.000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00	100,00	100,00	2.090.000.000	100,00	2.560.000.000	100,00	2.995.000.000	100,00	3.165.000.000	100,00	3.515.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya (%)	5,28	13,21	18,19		23,36		28,72		34,26		39,81		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
Meningkatnya Layanan Rehabilitasi UPTD PMKS	Persentase Pemenuhan Pelayanan UPT Rehabilitasi PMKS (%)	100,00	100,00	100,00	650.000.000	100,00	650.000.000	100,00	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					52.947.463.920		64.200.000.000		64.500.000.000		64.500.000.000		64.500.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah Yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	16,6	27,17	37,74	52.947.463.920	48,31	64.200.000.000	58,88	64.500.000.000	69,45	64.500.000.000	69,45	64.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemenuhan Anak-anak yang Dijangkau dan Dipelihara (%)	0	0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	52,16	53,57	55,72		59,15		59,15		60,86		60,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					877.528.000		917.528.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	v
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100,00	100,00	100,00	877.528.000	100,00	917.528.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					317.636.400		375.000.000		410.000.000		410.000.000		462.000.000	
Meningkatnya tata kelola	Persentase Taman Makam Pahlawan	100,00	100,00	100,00	317.636.400	100,00	375.000.000	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	462.000.000	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
taman makam pahlawan	Nasional yang terkelola dengan Baik (%)													menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					57.415.299.169		62.248.847.050		66.017.154.148		69.941.086.393		72.534.076.177	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.418.137.514		20.274.751.724		20.428.326.093		20.274.751.724		20.439.533.530	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	20.418.137.514	100	20.274.751.724	100	20.428.326.093	100	20.274.751.724	100	20.439.533.530	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					13.771.739.080		16.407.186.000		17.173.186.000		18.313.186.000		19.803.186.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	13.771.739.080	100	16.407.186.000	100	17.173.186.000	100	18.313.186.000	100	19.803.186.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					16.407.186.000		18.003.931.000		20.103.931.000		22.203.931.000		22.203.931.000	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Lulusan Pelatihan Yang Kompenten (%)	94,8	75	77,78	16.407.186.000	80	18.003.931.000	82,5	20.103.931.000	85	22.203.931.000	87,5	22.203.931.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Presentase Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) Yang terakreditasi (%)	14,5	17	20		23		26		29		32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
														Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					3.687.730.895		3.962.896.794		4.171.617.293		4.388.109.843		4.612.151.647	
Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	75,76	76,76	78,76	3.687.730.895	79,76	3.962.896.794	80,76	4.171.617.293	81,76	4.388.109.843	82,76	4.612.151.647	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.130.505.680		3.600.081.532		4.140.093.762		4.761.107.826		5.475.274.000	
Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Presentase Angka sengketa pengusaha dan pekerja (%)	2,6	2,6	2,4	3.130.505.680	2,3	3.600.081.532	2,2	4.140.093.762	2,1	4.761.107.826	2	5.475.274.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					21.413.000.000		22.470.000.000		22.925.000.000		23.450.000.000		23.725.000.000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.548.000.000		16.570.000.000		17.000.000.000		17.500.000.000		17.750.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	15.548.000.000	100	16.570.000.000	100	17.000.000.000	100	17.500.000.000	100	17.750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	53	53	53,25	1.200.000.000	53,5	1.200.000.000	53,75	1.200.000.000	54	1.200.000.000	54	1.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					565.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000		675.000.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	298	298	299	565.000.000	300	600.000.000	310	625.000.000	325	650.000.000	325	675.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,17	60,2	60,26	1.000.000.000	60,31	1.000.000.000	60,37	1.000.000.000	60,42	1.000.000.000	60,42	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					9.860.000.000		10.053.000.000		10.255.650.000		10.468.432.500		10.691.854.125	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI					1.300.000.000		1.365.000.000		1.433.250.000		1.504.912.500		1.580.158.125	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif (Persentase)	39,47	67,34	70	1.300.000.000	72,66	1.365.000.000	75,32	1.433.250.000	77,98	1.504.912.500	80,64	1.580.158.125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					5.950.000.000		6.047.500.000		6.149.875.000		6.257.368.750		6.370.237.188	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang terbentuk (Angka)	3	5	5	5.950.000.000	5	6.047.500.000	5	6.149.875.000	5	6.257.368.750	5	6.370.237.188	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Cadangan Pangan (Persentase)	95,68	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	0	85,5	86		87		88		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					2.445.000.000		2.467.250.000		2.490.612.500		2.515.143.125		2.540.900.281	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani (Persentase)	50,91	83,63	85,2	2.445.000.000	86,77	2.467.250.000	88,34	2.490.612.500	89,91	2.515.143.125	91,48	2.540.900.281	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase jumlah desa rentan rawan pangan berdasarkan peta FSVA (Persentase)	38	35	33		31		29		27		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN					165.000.000		173.250.000		181.912.500		191.008.125		200.558.531	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEAMANAN PANGAN														
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persentase)	0	30	35	165.000.000	40	173.250.000	45	181.912.500	50	191.008.125	55	200.558.531	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (Persentase)	75	80	82,35		84,7		87,05		89,4		91,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					170.392.051.112		175.376.002.240		187.689.630.147		200.369.192.484		193.081.308.717	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					170.392.051.112		175.376.002.240		187.689.630.147		200.369.192.484		193.081.308.717	
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Presentase Kebutuhan Luas Lahan Bagi Kepentingan umum (%)	81,31	83,97	86,9	170.392.051.112	90,01	175.376.002.240	93,21	187.689.630.147	97,5	200.369.192.484	100	193.081.308.717	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					187.000.000.000		188.500.000.000		190.700.000.000		192.500.000.000		194.200.000.000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					72.000.000.000		73.000.000.000		75.000.000.000		76.500.000.000		78.000.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	72.000.000.000	100	73.000.000.000	100	75.000.000.000	100	76.500.000.000	100	78.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya efektivitas kajian	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup	100	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	yang Ditindaklanjuti (Persentase)													Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					4.500.000.000		5.000.000.000		5.200.000.000		5.500.000.000		5.700.000.000	
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	55,87	61,57	61,74	4.500.000.000	61,91	5.000.000.000	62,09	5.200.000.000	62,26	5.500.000.000	62,43	5.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	0,5	0,55	1,11	2.000.000.000	1,66	2.000.000.000	2,21	2.000.000.000	2,76	2.000.000.000	3,31	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	60	76	77	2.000.000.000	78	2.000.000.000	79	2.000.000.000	80	2.000.000.000	81	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)														Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	75	76	77	2.000.000.000	78	2.000.000.000	79	2.000.000.000	80	2.000.000.000	81	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	14,2	14,2	22,12	2.000.000.000	27,9	2.000.000.000	32,21	2.000.000.000	35,64	2.000.000.000	40	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Pencemaran	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lingkungan Hidup														
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					100.000.000.000		100.000.000.000		100.000.000.000		100.000.000.000		100.000.000.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	50,27	50,28	60	100.000.000.000	65	100.000.000.000	70	100.000.000.000	73	100.000.000.000	75	100.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	63,5	65	67		69		71		73		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					39.000.000.000		42.500.000.000		46.000.000.000		49.500.000.000		53.000.000.000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.921.515.713		33.220.153.820		34.598.927.448		36.065.651.100		37.629.237.789	
Meningkatnya pemenuhan	Persentase pemenuhan	100	100	100	31.921.515.713	100	33.220.153.820	100	34.598.927.448	100	36.065.651.100	100	37.629.237.789	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
penunjang perangkat daerah	penunjang perangkat daerah (%)													menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					5.698.399.287		7.729.752.680		9.670.469.702		11.510.885.765		13.208.277.818	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	10	10	20	5.698.399.287	30	7.729.752.680	40	9.670.469.702	50	11.510.885.765	50	13.208.277.818	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	60	60	62		64		66		68		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					250.085.000		275.093.500		302.602.850		332.863.135		402.764.393	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	250.085.000	100	275.093.500	100	302.602.850	100	332.863.135	100	402.764.393	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Catatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Pengesahaan anak yang terbit bagi yang melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Catatan Pinggir Naturalisasi yang terbit bagi yang melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.050.000.000		1.190.000.000		1.338.000.000		1.495.600.000		1.664.720.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	1.050.000.000	100	1.190.000.000	100	1.338.000.000	100	1.495.600.000	100	1.664.720.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administra

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														si Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK dalam Kondisi Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Operator SIAK (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		95.000.000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					23.808.389.429		24.929.144.839		25.823.540.404		26.069.969.709		26.580.704.930	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					11.902.141.320		12.197.469.853		12.500.081.598		12.810.158.639		13.127.887.604	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	11.902.141.320	100	12.197.469.853	100	12.500.081.598	100	12.810.158.639	100	13.127.887.604	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					1.017.972.367		1.043.421.676		1.069.507.218		1.096.244.898		1.123.651.021	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Desa yang tertata (%)	0,81	0,81	2,50	1.017.972.367	5,00	1.043.421.676	10,00	1.069.507.218	15,00	1.096.244.898	20,00	1.123.651.021	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					288.025.257		295.225.889		302.606.537		310.171.701		317.925.994	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa (%)	0,81	0,81	2,50	288.025.257	5,00	295.225.889	10,00	302.606.537	15,00	310.171.701	20,00	317.925.994	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					7.685.415.072		8.405.204.917		8.901.779.487		8.774.470.367		8.868.295.607	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa dengan Tatakelola Pemerintaha Desa yang Baik (%)	12,2	12,2	34,55	7.685.415.072	56,91	8.405.204.917	79,27	8.901.779.487	100	8.774.470.367	100	8.868.295.607	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA					2.914.835.413		2.987.822.504		3.049.565.564		3.078.924.104		3.142.944.704	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%)	12,20	12,20	34,55	2.914.835.413	56,91	2.987.822.504	79,27	3.049.565.564	100	3.078.924.104	100	3.142.944.704	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					49.967.323.616		50.329.807.241		50.158.380.550		50.351.741.404		50.232.771.303	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.318.737.216		19.712.124.871		19.271.757.362		19.376.465.962		19.379.857.362	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)	82,5	83,5	84,5		86,5		87,5		88,5		89,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendali

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														an Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.296.847.400		1.141.455.370		1.158.051.188		1.172.083.742		1.097.502.741	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	66,7	67,9	69,1	1.296.847.400	70,3	1.141.455.370	71,5	1.158.051.188	72,7	1.172.083.742	73,9	1.097.502.741	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase Ketersediaan Data Menuju Integrasi Satu Data Keluarga (%)	1.84-1.84	1.84 - 1.84	1.84-1.84		1.84-1.84		1.84-1.84		1.84-1.84		1.84-1.84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					13.471.739.000		12.823.727.000		13.091.072.000		13.323.191.700		13.400.411.200	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	1	2	3	13.471.739.000	4	12.823.727.000	5	13.091.072.000	6	13.323.191.700	7	13.400.411.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutanrga (%)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Keluarga Berencana
	Angka Prevelensi Kontrasepsi Mordern / Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	75,74	75,84	75,94		76,09		76,24		76,39		76,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program bangga kencana (advokasi dan KIE) (%)	82,75	82,75	83,2		83,65		84,1		84,55		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / Unmet Need (%)	12,6	12,2	12,08		11,52		11,16		10,8		10,44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					14.880.000.000		16.652.500.000		16.637.500.000		16.480.000.000		16.355.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	38,78	39	40	14.880.000.000	41	16.652.500.000	42	16.637.500.000	43	16.480.000.000	44	16.355.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Ketahanan Keluarga (Persentase)													Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Presentase Intervensi Keluarga Resiko yang didampingi (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					168.563.605.279		176.487.653.312		184.411.701.344		212.411.330.000		238.109.480.000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					70.000.000.000		70.000.000.000		70.000.000.000		70.000.000.000		70.000.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	70.000.000.000	100	70.000.000.000	100	70.000.000.000	100	70.000.000.000	100	70.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					98.563.605.279		106.487.653.312		114.411.701.344		142.411.330.000		168.109.480.000	
Meningkatnya kualitas	Rasio Jaringan Konektivitas	0,41	0,41	0,55	98.563.605.279	0,63	106.487.653.312	0,69	114.411.701.344	0,78	142.411.330.000	0,80	168.109.480.000	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
layanan transportasi darat	Transportasi (Angka)													menangani Bidang Perhubungan
	Rasio Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten (Rasio)	0,35	0,37	0,42		0,40		0,38		0,36		0,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Jumlah Ruas Jalan yang Terfasilitasi (%)	0	0	14%		15%		16%		18%		19%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Keselamatan Transporatsi Kabupaten (%)	0	0	69%		71%		72%		73%		74%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					73.115.604.000		73.405.128.000		74.023.271.040		74.223.271.040		74.423.271.040	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	22.000.000.000	100	22.000.000.000	100	22.000.000.000	100	22.000.000.000	100	22.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI					5.587.288.000		5.837.288.000		6.388.271.040		6.588.271.040		6.788.271.040	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	98,4	94,3	95,1	5.587.288.000	95,3	5.837.288.000	95,5	6.388.271.040	95,7	6.588.271.040	96,1	6.788.271.040	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					45.528.316.000		45.567.840.000		45.635.000.000		45.635.000.000		45.635.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase penyediaan layanan aplikasi (%)	100	100	100	45.528.316.000	100	45.567.840.000	100	45.635.000.000	100	45.635.000.000	100	45.635.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika
	Persentase penyediaan layanan internet (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					40.405.284.296		41.473.850.171		42.461.630.190		43.660.568.386		44.589.266.362	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.473.081.589		23.845.842.397		24.227.922.222		24.619.554.047		25.020.976.664	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	23.473.081.589	100	23.845.842.397	100	24.227.922.222	100	24.619.554.047	100	25.020.976.664	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Kecil dan Menengah
	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					250.000.000		256.250.000		262.656.250		269.222.656		275.953.223	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan Pelayanan Usaha Simpan Pinjam (%)	0	0	12,82	250.000.000	25,62	256.250.000	38,46	262.656.250	51,28	269.222.656	64,1	275.953.223	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus (%)	-	22,22	32,48	200.000.000	42,74	250.000.000	52,99	300.000.000	63,25	350.000.000	73,50	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					300.000.000		400.000.000		450.000.000		550.000.000		550.000.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan kooperasi	Persentase Koperasi predikat Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup Berkualitas, Tidak Berkualitas (%)	-	14,36	16,92	300.000.000	19,49	400.000.000	22,05	450.000.000	24,62	550.000.000	27,18	550.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM					450.000.000		550.000.000		600.000.000		750.000.000		750.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (%)	-	3,83	6,85	450.000.000	10,11	550.000.000	13,38	600.000.000	16,64	750.000.000	19,91	750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					1.275.000.000		1.353.125.000		1.431.953.125		1.552.965.625		1.634.289.766	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	-	13,89	38,77	1.275.000.000	41,09	1.353.125.000	43,40	1.431.953.125	45,72	1.552.965.625	48,03	1.634.289.766	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					6.907.626.375		7.080.317.034		7.257.324.959		7.438.758.083		7.624.727.035	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertrasnformasi dari Informal ke Formal (%)	3,19	3,38	3,61	6.907.626.375	3,83	7.080.317.034	4,06	7.257.324.959	4,29	7.438.758.083	4,38	7.624.727.035	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					7.549.576.332		7.738.315.740		7.931.773.634		8.130.067.975		8.333.319.674	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan dan promosi (%)	1,27	1,61	2,76	7.549.576.332	3,99	7.738.315.740	5,3	7.931.773.634	6,69	8.130.067.975	8,08	8.333.319.674	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pertumbuhan Wirausaha (%)	2,61	2,81	2,99		3,17		3,35		3,53		3,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase Koperasi yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB (%)	2,05	2,05	2,05		2,05		2,05		2,05		2,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Persentase usaha Mikro yang terfasilitasi Dana pemerintah melalui UPDB (%)	8,2	8,2	8,2		8,2		8,2		8,2		8,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					60.238.800.000		49.880.780.000		57.445.125.000		65.362.038.000		73.430.300.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.480.413.000		38.385.780.000		45.920.125.000		53.487.038.000		61.245.300.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	36.480.413.000	100	38.385.780.000	100	45.920.125.000	100	53.487.038.000	100	61.245.300.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					11.098.387.000		1.270.000.000		1.040.000.000		920.000.000		970.000.000	
Meningkatnya Kemudahan Investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	11.098.387.000	100	1.270.000.000	100	1.040.000.000	100	920.000.000	100	970.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					400.000.000		600.000.000		600.000.000		800.000.000		800.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	17	19,05	38,1	400.000.000	57,14	600.000.000	71,43	600.000.000	85,71	800.000.000	100	800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					11.000.000.000		8.300.000.000		8.500.000.000		8.700.000.000		8.900.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	89	90	91	11.000.000.000	92	8.300.000.000	93	8.500.000.000	94	8.700.000.000	95	8.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					740.000.000		775.000.000		815.000.000		855.000.000		895.000.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	39	40	43	740.000.000	43	775.000.000	43	815.000.000	43	855.000.000	43	895.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					520.000.000		550.000.000		570.000.000		600.000.000		620.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	78	80	86	520.000.000	90	550.000.000	93	570.000.000	95	600.000.000	96	620.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					29.171.500.000		30.442.000.000		30.742.000.000		30.792.000.000		32.192.000.000	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.142.000.000		13.142.000.000		13.142.000.000		13.142.000.000		13.142.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	13.142.000.000	100	13.142.000.000	100	13.142.000.000	100	13.142.000.000	100	13.142.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					6.150.000.000		6.100.000.000		6.400.000.000		6.450.000.000		9.700.000.000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina (%)	0	45	55	6.150.000.000	64	6.100.000.000	73	6.400.000.000	91	6.450.000.000	100	9.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					9.879.500.000		11.200.000.000		11.200.000.000		11.200.000.000		9.350.000.000	
Meningkatnya Pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	0	5	10	9.879.500.000	11	11.200.000.000	20	11.200.000.000	10	11.200.000.000	11	9.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					1.346.336.000		1.454.042.880		1.570.366.310		1.695.995.615		1.831.675.265	
2.20.02 - PROGRAM					1.346.336.000		1.454.042.880		1.570.366.310		1.695.995.615		1.831.675.265	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaran Sistem Statistik Nasional (SSN)	Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral (%)	91,68	75	76	1.346.336.000	77	1.454.042.880	78	1.570.366.310	79	1.695.995.615	80	1.831.675.265	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					9.110.710.455		9.135.170.455		9.239.170.455		9.239.170.455		9.239.170.455	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					9.110.710.455		9.135.170.455		9.239.170.455		9.239.170.455		9.239.170.455	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	55	65	65	9.110.710.455	70	9.135.170.455	70	9.239.170.455	70	9.239.170.455	75	9.239.170.455	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.750.000.000		1.750.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.750.000.000		1.750.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	0,15	0,188	1.750.000.000	0,225	1.750.000.000	0,263	2.500.000.000	0,3	2.500.000.000	0,3	2.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					24.086.297.703		24.078.455.145		25.023.641.524		25.955.107.562		26.899.110.251	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					19.431.297.703		20.141.455.145		20.892.641.524		21.636.107.562		22.394.110.251	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	19.431.297.703	100	20.141.455.145	100	20.892.641.524	100	21.636.107.562	100	22.394.110.251	Dinas/Badan yang menangani Bidang Prpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					4.655.000.000		3.937.000.000		4.131.000.000		4.319.000.000		4.505.000.000	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat Kabupaten Tangerang (dalam satuan persen) (%)	2	3	3	4.655.000.000	3	3.937.000.000	4	4.131.000.000	4	4.319.000.000	5	4.505.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Prpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					635.000.000		20.732.000.000		20.831.000.000		20.929.000.000		2.027.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					435.000.000		502.000.000		571.000.000		639.000.000		707.000.000	
Meningkatkan pengelolaan arsip daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	100	100	100	435.000.000	100	502.000.000	100	571.000.000	100	639.000.000	100	707.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					200.000.000		20.230.000.000		20.260.000.000		20.290.000.000		1.320.000.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	20	20	20	200.000.000	20	20.230.000.000	20	20.260.000.000	20	20.290.000.000	20	1.320.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					39.400.000.000		39.970.000.000		40.575.000.000		41.120.000.000		41.490.000.000	
3.25.01 - PROGRAM					15.300.000.000		15.300.000.000		15.300.000.000		15.300.000.000		15.300.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	15.300.000.000	100	15.300.000.000	100	15.300.000.000	100	15.300.000.000	100	15.300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					8.900.000.000		8.900.000.000		8.900.000.000		8.900.000.000		8.700.000.000	
Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.962	22.073	22.250	8.900.000.000	22.450	8.900.000.000	22.675	8.900.000.000	22.924	8.900.000.000	23.199	8.700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.920	22.073	22.250		22.450		22.675		22.924		23.199		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					10.000.000.000		10.070.000.000		10.175.000.000		10.220.000.000		10.290.000.000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	21.683,79	22.058	22.196	9.100.000.000	22.333	9.100.000.000	22.471	9.100.000.000	22.609	9.100.000.000	22.746	9.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produksi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	21.683,79	22.058	22.196	900.000.000	22.333	970.000.000	22.471	1.075.000.000	22.609	1.120.000.000	22.746	1.190.000.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
perikanan budidaya														Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					0		0		0		0		0	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati					0		0		0		0		0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					5.200.000.000		5.700.000.000		6.200.000.000		6.700.000.000		7.200.000.000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	41,26	41,67	42,3	5.200.000.000	42,93	5.700.000.000	43,58	6.200.000.000	44,23	6.700.000.000	44,89	7.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.319.290.000		2.092.259.000		2.305.175.000		2.365.475.000		2.400.000.000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					409.290.000		482.259.000		605.175.000		665.475.000		700.000.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	5	5,1	6,15	409.290.000	7,2	482.259.000	8,25	605.175.000	9,3	665.475.000	9,3	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
Meningkatnya Jangkauan	Persentase Peningkatan Media Pemasaran	4	4,41	5,18	1.000.000.000	6,21	1.000.000.000	7,25	1.000.000.000	8,28	1.000.000.000	8,28	1.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Pemasaran Pariwisata	Pariwisata (Persentase)													Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					910.000.000		610.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	2,11	2,41	910.000.000	2,71	610.000.000	3,01	700.000.000	3,31	700.000.000	3,31	700.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					56.950.000.000		57.047.500.000		58.239.875.000		60.005.368.750		60.649.987.188	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.000.000.000		38.000.000.000		38.000.000.000		38.000.000.000		38.000.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	38.000.000.000	100	38.000.000.000	100	38.000.000.000	100	38.000.000.000	100	38.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					9.950.000.000		10.347.500.000		10.764.875.000		11.203.118.750		11.663.274.688	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian (Persentase)	15	11	13	9.950.000.000	15	10.347.500.000	17	10.764.875.000	19	11.203.118.750	21	11.663.274.688	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Persentase)	1	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Pertanian
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Kuintal/Ha)	49	49,4	49,6		49,8		50		50,2		50,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					4.500.000.000		4.700.000.000		5.170.000.000		5.687.000.000		6.255.700.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Ketersediaan Prasarana Pertanian (Unit)	3	8	8	4.500.000.000	8	4.700.000.000	8	5.170.000.000	8	5.687.000.000	8	6.255.700.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (Persentase)	1	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.800.000.000		1.890.000.000		1.984.500.000		2.083.725.000		2.187.911.250	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyararak veteriner	Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan (Persentase)	70	70	75	1.800.000.000	80	1.890.000.000	85	1.984.500.000	90	2.083.725.000	95	2.187.911.250	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI (Persentase)	80	80	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250	
Meningkatnya pengendalian dan	Persentase area terdampak perubahan iklim	0	0	75	200.000.000	80	210.000.000	85	220.500.000	90	231.525.000	95	243.101.250	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
penanggulangan bencana pertanian	yang dapat ditangani (%)													Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.500.000.000		1.900.000.000		2.100.000.000		2.800.000.000		2.300.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani (Kelompok)	0	1.331	1.331	2.500.000.000	1.331	1.900.000.000	1.331	2.100.000.000	1.331	2.800.000.000	1.331	2.300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (Persentase)	70	75	75		75		75		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.645.120.000		4.775.000.000		4.920.000.000		5.080.000.000		5.185.000.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Pelaku Usaha yang diawasi pada Sektor Perdagangan (Persentase)	0	0	19,9	500.000.000	19,9	500.000.000	19,9	500.000.000	19,9	500.000.000	20,2	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					45.120.000		60.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Presentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dilakukan pembinaan (%)	80	90	92	45.120.000	94	60.000.000	96	70.000.000	98	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN					2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
BARANG PENTING														
Meningkatnya pasar yang dilakukan monitoring terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	50	75	82,5	2.000.000.000	87,5	2.000.000.000	92,5	2.000.000.000	95	2.000.000.000	100	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					895.000.000		900.000.000		910.000.000		925.000.000		930.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	13.445.516.882.700	0	13.446.861.434.388	895.000.000	13.448.206.120.532	900.000.000	13.582.688.181.737	910.000.000	13.584.046.450.555	925.000.000	13.585.404.855.200	930.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					885.000.000		975.000.000		1.080.000.000		1.200.000.000		1.280.000.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	52	84,18	86,81	885.000.000	89,43	975.000.000	92,06	1.080.000.000	94,68	1.200.000.000	100	1.280.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					320.000.000		340.000.000		360.000.000		380.000.000		400.000.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	26,67	30	17,97	320.000.000	21,24	340.000.000	24,51	360.000.000	27,78	380.000.000	31,05	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					25.945.000.000		25.965.000.000		26.015.000.000		26.045.000.000		26.080.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000		22.000.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	22.000.000.000	100	22.000.000.000	100	22.000.000.000	100	22.000.000.000	100	22.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Indrustri dan Kawasan Indrustri (%)	0	7,71	8,22	1.800.000.000	8,74	1.800.000.000	9,25	1.800.000.000	9,76	1.800.000.000	10,28	1.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					275.000.000		285.000.000		300.000.000		310.000.000		320.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi (Persentase)	24,95	25,05	25,27	275.000.000	27,08	285.000.000	28,88	300.000.000	30,69	310.000.000	32,49	320.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					1.870.000.000		1.880.000.000		1.915.000.000		1.935.000.000		1.960.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	100	100	100	1.870.000.000	100	1.880.000.000	100	1.915.000.000	100	1.935.000.000	100	1.960.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					60.864.000		60.864.000		60.864.000		60.864.000		60.864.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					60.864.000		60.864.000		60.864.000		60.864.000		60.864.000	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Transmigrasi	Angka Animo Masyarakat Bertransmigran (Angka)	7	7	7	60.864.000	7	60.864.000	7	60.864.000	7	60.864.000	7	60.864.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					196.116.006.940		209.488.932.050		223.858.413.391		239.308.440.020		255.930.692.581	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					124.714.874.905		131.113.118.650		137.818.774.583		144.847.213.311		152.214.573.978	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	122.964.874.905	100	129.113.118.650	100	135.568.774.583	100	142.347.213.311	100	149.464.573.978	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah					1.750.000.000		2.000.000.000		2.250.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	48,23	48,5	48,75		49		49,25		49,5		49,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM					67.640.921.530		74.361.277.660		81.751.482.600		89.878.411.895		98.815.623.169	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah					1.625.338.890		1.706.605.835		1.791.936.126		1.881.532.933		1.975.609.579	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	3,36	3,41	3,6		3,79		3,98		4,2		4,36		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijkan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	63.946.775.898	100	70.482.424.747	100	77.678.687.044	100	85.601.976.562	100	94.325.366.071	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100	2.068.806.742	100	2.172.247.078	100	2.280.859.430	100	2.394.902.400	100	2.514.647.519	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Dihasilkan (Persentase)													menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.760.210.505		4.014.535.740		4.288.156.208		4.582.814.814		4.900.495.434	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.326.294.200	100	1.458.923.620	100	1.604.815.982	100	1.765.297.576	100	1.941.827.335	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	75	80		90		95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	40	40	40	1.332.916.305	40	1.399.562.120	40	1.469.540.226	40	1.543.017.238	40	1.620.168.099	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	40	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.101.000.000	100	1.156.050.000	100	1.213.800.000	100	1.274.500.000	100	1.338.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					115.070.661.000		119.219.995.320		122.679.451.052		126.139.852.358		129.639.852.358	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG					81.235.797.880		81.568.192.010		82.907.246.160		84.220.310.902		84.516.112.901	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah (Nilai)	79,95	80	80,5	81.235.797.880	81	81.568.192.010	81,5	82.907.246.160	82	84.220.310.902	82,5	84.516.112.901	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					33.834.863.120		37.651.803.310		39.772.204.892		41.919.541.456		45.123.739.457	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	33.723.463.920	100	37.531.807.990	100	39.642.753.840	100	41.779.689.099	100	44.983.887.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	84,14	85	90		91		92		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	111.399.200	100	119.995.320	100	129.451.052	100	139.852.357	100	139.852.357	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					43.841.403.158		43.383.221.533		44.682.344.459		44.444.291.073		46.314.494.414	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.906.403.158		25.348.221.533		26.547.344.459		26.209.291.073		27.279.494.414	
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	25.906.403.158	100	25.348.221.533	100	26.547.344.459	100	26.209.291.073	100	27.279.494.414	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM					5.600.000.000		5.600.000.000		5.600.000.000		5.600.000.000		5.600.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100	5.600.000.000	100	5.600.000.000	100	5.600.000.000	100	5.600.000.000	100	5.600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Ketersedian Data Pembangunan (%)	64	66	68		70		72		75		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					12.335.000.000		12.435.000.000		12.535.000.000		12.635.000.000		13.435.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	3.700.000.000	100	3.800.000.000	100	3.900.000.000	100	4.000.000.000	100	4.800.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	4.100.000.000	100	4.100.000.000	100	4.100.000.000	100	4.100.000.000	100	4.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	100	100	100	4.535.000.000	100	4.535.000.000	100	4.535.000.000	100	4.535.000.000	100	4.535.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
bidang perekonomian dan sda	Perekonomian dan SDA (Persentase)													Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					800.465.008.609		658.636.605.120		601.979.610.032		600.002.583.349		590.579.732.503	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					158.000.000.000		158.000.000.000		158.000.000.000		158.000.000.000		158.000.000.000	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	130.000.000.000	100	130.000.000.000	100	130.000.000.000	100	130.000.000.000	100	130.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	28.000.000.000	100	28.000.000.000	100	28.000.000.000	100	28.000.000.000	100	28.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					618.093.148.984		475.264.745.495		417.607.750.407		414.630.723.724		404.207.872.878	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	2,34	2,34	2,35	1.900.000.000	2,4	1.900.000.000	2,45	1.900.000.000	2,5	1.900.000.000	2,55	1.900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	32,78	33	33,1		33,2		33,3		33,4		33,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95,31	95,33	95,35	1.200.000.000	95,37	1.200.000.000	95,39	1.200.000.000	95,41	1.200.000.000	95,43	1.200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	0	2,5	2,4		2,3		2,2		2,1		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	100	3.100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah					611.893.148.984		469.064.745.495		411.407.750.407		408.430.723.724		398.007.872.878	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					12.439.160.275		12.439.160.275		12.439.160.275		12.439.160.275		12.439.160.275	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	4,41	4,42	4,43	12.439.160.275	4,44	12.439.160.275	4,45	12.439.160.275	4,46	12.439.160.275	4,47	12.439.160.275	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	0,05	1	1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	0,5	1	1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					11.932.699.350		12.932.699.350		13.932.699.350		14.932.699.350		15.932.699.350	
Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD (Rasio)	65.5-66.5	66.5 - 67.5	67.5-68.5	11.932.699.350	68.5-69.5	12.932.699.350	69.5-70.5	13.932.699.350	70.5-71.5	14.932.699.350	71.5-72.5	15.932.699.350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan (Indeks)	90,96	91	91,25		91,7		91,95		92,2		92,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Kepatuhan wajib pajak (%)	78	78,2	78,5		79		79,35		79,5		79,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Jumlah objek Pajak Baru yang diterbitkan NPWPD dan/atau NOPD (Angka)	1,353	1,853	2,353		2,853		3,353		3,853		4,353		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					34.773.303.710		36.080.311.940		39.465.508.040		43.186.780.090		47.137.138.340	
5.03.01 - PROGRAM					28.275.843.470		29.624.900.000		32.764.645.000		36.244.206.450		40.194.564.700	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	28.275.843.470	100	29.624.900.000	100	32.764.645.000	100	36.244.206.450	100	40.194.564.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					6.497.460.240		6.455.411.940		6.700.863.040		6.942.573.640		6.942.573.640	
Meningkatkan pengelolaan kepegawaian daerah	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi (%)	84	85	86	6.497.460.240	87	6.455.411.940	88	6.700.863.040	89	6.942.573.640	90	6.942.573.640	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (%)	0	21,31	38,8		56,28		65,03		73,77		82,51		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	91,48	97,69	98,79		99,34		99,78		99,89		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	98	98,3	98,5		98,8		99		99,3		99,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					6.653.210.980		6.924.238.980		7.212.884.610		7.520.236.980		7.520.236.980	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					6.653.210.980		6.924.238.980		7.212.884.610		7.520.236.980		7.520.236.980	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar,	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial,	94	95	96	6.653.210.980	97	6.924.238.980	98	7.212.884.610	99	7.520.236.980	100	7.520.236.980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
manajerial, fungsional dan teknis	Fungsional, dan Teknis (%)													dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					5.420.000.000		6.420.000.000		6.420.000.000		6.420.000.000		6.420.000.000	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					5.420.000.000		6.420.000.000		6.420.000.000		6.420.000.000		6.420.000.000	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan (%)	-	-	52	5.420.000.000	54	6.420.000.000	56	6.420.000.000	57	6.420.000.000	60	6.420.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian dan Pengembangan
	persentase hasil kajian yg diterapkan dalam bentuk regulasi (%)	50	50	52		54		56		57		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					59.528.541.678		64.548.828.427		70.079.682.793		76.008.938.397		83.112.483.856	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					45.839.414.957		48.348.609.422		51.045.334.447		53.920.169.321		56.017.116.619	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	45.839.414.957	100	48.348.609.422	100	51.045.334.447	100	53.920.169.321	100	56.017.116.619	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					8.936.848.420		10.710.157.362		12.819.870.505		15.256.415.911		18.800.479.662	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan (%)	100	100	100	8.936.848.420	100	10.710.157.362	100	12.819.870.505	100	15.256.415.911	100	18.800.479.662	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					4.752.278.301		5.490.061.643		6.214.477.841		6.832.353.165		8.294.887.575	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (%)	100	100	100	4.752.278.301	100	5.490.061.643	100	6.214.477.841	100	6.832.353.165	100	8.294.887.575	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					591.569.966.005		609.816.791.889		623.267.550.692		640.795.759.503		654.371.419.269	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					330.563.900.496		337.100.545.438		344.896.806.356		353.180.056.017		360.649.855.719	
Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Tigaraksa	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan (%)	100	100	100	12.885.000.000	100	13.510.000.000	100	13.510.000.000	100	13.510.000.000	100	13.510.000.000	Kecamatan Tigaraksa
														Kelurahan Tigaraksa
Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Cikupa	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100	12.305.787.005	100	13.536.365.705	100	14.890.002.276	100	16.379.002.503	100	18.016.902.753	Kecamatan Cikupa
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Sukamulya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Bunder
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Panongan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah kecamatan panongan (%)	100	100	100	11.658.889.791	100	12.167.596.097	100	12.827.282.476	100	13.625.152.551	100	14.360.689.540	Kecamatan Panongan
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Perangkat daerah kecamatan panongan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Keluaraha n Mekar Bakti
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Curug	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Curug (%)	100	100	100	17.642.668.872	100	18.108.668.872	100	18.574.668.872	100	19.040.668.872	100	19.506.668.872	Kecamatan Curug
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Curug (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Sukabakti
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Curug (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Binong
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Curug (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Curug Kulon
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Legok	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Legok (%)	100	100	100	12.241.499.451	100	12.826.233.402	100	13.401.356.818	100	13.995.640.434	100	14.619.619.293	Kecamatan Legok
														Kelurahan Babakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pasar Kemis	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pasar Kemis (%)	100	100	100	18.092.000.000	100	18.092.000.000	100	18.092.000.000	100	18.092.000.000	100	18.092.000.000	Kecamatan Pasar Kemis
														Kelurahan Sindang Sari
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja (%)	100	100	100	11.386.805.929	100	12.070.014.285	100	12.794.215.142	100	13.561.868.050	100	14.375.580.133	Kecamatan Balaraja
														Kelurahan Balaraja
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kresek	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kresek (%)	100	100	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	100	8.000.000.000	Kecamatan Kresek
Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Kronjo	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kronjo (%)	100	100	100	8.031.000.000	100	8.192.000.000	100	8.320.000.000	100	8.446.075.000	100	8.575.301.875	Kecamatan Kronjo
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Mauk	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Mauk (%)	100	100	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	Kecamatan Mauk
														Kelurahan Mauk Timur
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Rajeg (%)	100	100	100	11.767.938.000	100	11.727.938.000	100	11.711.938.000	100	11.814.608.000	100	11.814.608.000	Kecamatan Rajeg
														Kelurahan Sukatani
Meningkatnya pemenuhan penunjang	Persentase pemenuhan penunjang urusan	100	100	100	11.785.310.942	100	12.307.746.315	100	12.994.047.938	100	13.574.996.523	100	14.333.222.789	Kecamatan Sepatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
perangkat daerah Kecamatan Sepatan	pemerintahan Kecamatan Sepatan (%)													
	Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sepatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Sepatan
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Teluknaga	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Teluknaga (%)	98,7	100	100	11.725.000.000	100	12.025.000.000	100	12.125.000.000	100	12.300.000.000	100	12.350.000.000	Kecamatan Teluknaga
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Cisoka	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cisoka (%)	100	100	100	9.113.623.929	100	9.335.889.148	100	9.522.475.822	100	9.625.000.000	100	9.635.000.000	Kecamatan Cisoka
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pakuhaji (%)	100	100	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	Kecamatan Pakuhaji
														Kelurahan Pakuhaji
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100	19.613.016.403	100	19.634.368.742	100	19.671.667.903	100	19.697.717.903	100	19.700.717.742	Kecamatan Kosambi
	Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Kosambi Barat
	Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Salembaran Jaya
	Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Keluarahan Dadap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pagedangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pagedangan (%)	100	100	100	15.106.756.212	100	15.211.756.212	100	15.416.756.212	100	15.621.756.212	100	16.326.756.212	Kecamatan Pagedangan
	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pagedangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Medang
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Jambe	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Jambe (%)	90,00	100,00	90,00	8.557.532.466	91,00	8.739.585.597	91,50	9.352.068.436	92,00	9.563.804.270	92,50	10.231.284.763	Kecamatan Jambe
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Jayanti	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Jayanti (%)	100	100	100	6.885.029.107	100	7.097.509.844	100	7.384.775.158	100	7.542.815.158	100	7.645.600.445	Kecamatan Jayanti
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kemiri	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kemiri (%)	100	100	100	8.650.000.000	100	8.650.000.000	100	8.650.000.000	100	8.650.000.000	100	8.650.000.000	Kecamatan Kemiri
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sukadiri	Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sukadiri (%)	100	100	100	10.599.000.000	100	10.676.000.000	100	10.780.000.000	100	10.890.000.000	100	10.975.000.000	Kecamatan Sukadiri
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Cisauk	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cisauk (%)	100	100	100	10.599.000.000	100	10.676.000.000	100	10.780.000.000	100	10.890.000.000	100	10.975.000.000	Kecamatan Cisauk
														Kelurahan Cisauk
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	7.898.541.351	100	7.998.137.547	100	8.295.685.571	100	8.298.582.868	100	8.141.582.868	Kecamatan Sepatan Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
daerah Kecamatan Sepatan Timur	Kecamatan Sepatan Timur (%)													
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sindang Jaya	Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sindang Jaya (%)	100	100	100	9.808.000.000	100	9.179.000.000	100	9.352.000.000	100	9.578.075.000	100	9.307.301.875	Kecamatan Sindang Jaya
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kelapa Dua	Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kelapa Dua (%)	100	100	100	22.352.183.485	100	22.799.227.154	100	23.255.211.697	100	23.720.315.931	100	24.194.722.250	Kecamatan Kelapa Dua
														Kelurahan Kelapa Dua
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Solear	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Solear (%)	100	100	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	Kecamatan Solear
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Mekar Baru	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Mekar Baru (%)	100	100	100	9.086.170.202	100	9.279.156.651	100	9.331.041.622	100	9.383.180.517	100	9.436.686.208	Kecamatan Mekar Baru
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sukamulya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Sukamulya (%)	100	100	100	8.338.147.351	100	8.475.351.867	100	8.729.612.413	100	9.893.796.225	100	10.190.610.101	Kecamatan Sukamulya
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Gunung Kaler	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Gunung Kaler (%)	100	100	100	7.435.000.000	100	7.785.000.000	100	8.135.000.000	100	8.485.000.000	100	8.685.000.000	Kecamatan Gunung Kaler
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN					153.742.660.918		157.693.236.699		161.738.654.079		165.677.001.194		170.326.188.410	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Tigaraksa	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa (%)	70	75	80	5.000.000.000	85	5.000.000.000	90	5.000.000.000	95	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Kecamatan Tigaraksa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tigaraksa
														Kelurahan Tigaraksa
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cikupa	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa (%)	95	95	98	12.474.962.752	99	13.722.459.027	100	15.094.704.929	100	16.604.175.422	100	18.264.592.965	Kecamatan Cikupa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Cikupa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Sukamulya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Bunder
Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Panongan	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan (%)	93	94	95	3.429.712.500	96	3.930.198.125	97	4.430.708.031	98	4.931.243.432	99	5.431.805.604	Kecamatan Panongan
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Kecamatan Panongan (%)	85	86	87		88		89		90		91		Kecamatan Panongan
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Curug	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug (%)	98,15	98,3	98	5.276.288.200	98,1	5.931.288.200	98,15	6.586.288.200	98,2	7.241.288.200	98,25	7.896.288.200	Kecamatan Curug

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug (%)	83	83,5	84		84,5		85		85,5		86		Kecamatan Curug
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug (%)	98,15	98,3	98		98,1		98,15		98,2		98,25		Kelurahan Sukabakti
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug (%)	83	83,5	84		84,5		85		85,5		86		Kelurahan Sukabakti
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug (%)	98,15	98,3	98		98,1		98,15		98,2		98,25		Kelurahan Binong
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug (%)	83	83,5	84		84,5		85		85,5		86		Kelurahan Binong
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug (%)	98,15	98,3	98		98,1		98,15		98,2		98,25		Kelurahan Curug Kulon
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug (%)	83	83,5	84		84,5		85		85,5		86		Kelurahan Curug Kulon
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Legok	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Legok (%)	91,95	91,95	92	5.000.000.000	92,1	5.000.000.000	92,2	5.000.000.000	92,3	5.000.000.000	92,4	5.000.000.000	Kecamatan Legok
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Legok (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Legok
														Kelurahan Babakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pasar Kemis	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pasar Kemis (%)	100	100	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Kecamatan Pasar Kemis
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pasar Kemis (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pasar Kemis
														Kelurahan Sindang Sari
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Balaraja	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Balaraja (%)	88	100	100	3.000.000.000	100	3.100.000.000	100	3.400.000.000	100	3.600.000.000	100	4.000.000.000	Kecamatan Balaraja
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Balaraja (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Balaraja
														Kelurahan Balaraja
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kresek	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kresek (%)	100	100	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	Kecamatan Kresek
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kresek (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kresek
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kronjo	Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kronjo (%)	100	100	100	3.560.000.000	100	3.560.000.000	100	3.560.000.000	100	3.560.000.000	100	3.560.000.000	Kecamatan Kronjo
	Persentrase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kronjo (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kronjo
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Mauk	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Mauk (%)	100	100	100	7.054.500.000	100	7.054.500.000	100	7.054.500.000	100	7.054.500.000	100	7.054.500.000	Kecamatan Mauk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Mauk (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mauk
														Kelurahan Mauk Timur
Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Rajeg	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Rajeg (%)	100	100	100	5.118.000.000	100	5.118.000.000	100	5.120.000.000	100	5.120.000.000	100	5.120.000.000	Kecamatan Rajeg
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Rajeg (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rajeg
														Kelurahan Sukatani
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sepatan	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan (%)	93	75	78	4.249.786.800	80	4.462.276.140	83	4.685.389.947	85	4.919.659.444	88	5.165.642.417	Kecamatan Sepatan
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan (%)	92	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sepatan
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan (%)	91,35	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Sepatan
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Teluknaga	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Teluknaga (%)	99,68	100	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Kecamatan Teluknaga
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Telunaga (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Teluknaga
Meningkatkan pelayanan publik di	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100	100	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.000.000.000	Kecamatan Cisoka

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
kecamatan Cisoka	Kecamatan Cisoka (%)													
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Cisoka
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pakuhaji	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pakuhaji (%)	100	100	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	Kecamatan Pakuhaji
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pakuhaji (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Pakuhaji
														Kelurahan Pakuhaji
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kosambi	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100	5.213.954.510	100	5.213.954.510	100	5.213.954.510	100	5.213.954.510	100	5.213.954.510	Kecamatan Kosambi
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kosambi
														Kelurahan Kosambi Barat
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pagedangan	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan (%)	90	92	93	5.250.000.000	94	5.280.000.000	95	5.300.000.000	96	5.330.000.000	97	5.370.000.000	Kecamatan Pagedangan
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan (%)	89,5	89,7	89,9		90		90,3		90,5		90,7		Kecamatan Pagedangan
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan (%)	89,5	89,7	89,9		90		90,3		90,5		90,7		Kelurahan Medang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Jambe	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe (%)	90,00	90,00	90,05	2.500.000.000	90,15	2.500.000.000	90,25	2.500.000.000	90,40	2.500.000.000	90,50	2.500.000.000	Kecamatan Jambe
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe (%)	89,50	89,50	89.,55		90,00		90,11		90,15		90,25		Kecamatan Jambe
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Jayanti	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jayanti (%)	95	98	98	4.046.728.240	100	4.220.540.091	100	4.432.342.205	100	4.434.342.205	100	4.435.444.405	Kecamatan Jayanti
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jayanti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Jayanti
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kemiri	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kemiri (%)	100	100	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Kecamatan Kemiri
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kemiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kemiri
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sukadiri	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri (%)	91	92	93	3.000.000.000	94	3.000.000.000	95	3.000.000.000	96	3.000.000.000	97	3.000.000.000	Kecamatan Sukadiri
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukadiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sukadiri
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cisauk	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)	85,2	85,5	85,75	4.675.742.000	86	4.985.000.000	86,2	5.171.080.000	86,5	5.291.080.000	86,7	5.591.080.000	Kecamatan Cisauk
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisauk (%)	95	98	98		100		100		100		100		Kecamatan Cisauk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisauk (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Cisauk
														Kelurahan Cisauk
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sepatan Timur	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan Timur (%)	98,15	98,30	98,00	3.709.836.700	98,10	3.709.722.000	98,15	3.710.701.500	98,20	3.810.717.450	98,3	4.056.080.120	Kecamatan Sepatan Timur
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan Timur (%)	83,00	83,50	84,00		84,50		85,00		85,50		86,0		Kecamatan Sepatan Timur
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sindang Jaya	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sindang Jaya (%)	60	64	66	6.030.000.000	68	6.050.000.000	70	6.050.000.000	75	6.050.000.000	80	6.050.000.000	Kecamatan Sindang Jaya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sindang Jaya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sindang Jaya
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kelapa Dua	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua (%)	60	65	70	15.562.727.520	85	15.873.982.070	90	16.191.461.712	95	16.515.290.946	95	16.845.596.765	Kecamatan Kelapa Dua
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kelapa Dua
														Kelurahan Kelapa Dua
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Solear	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Solear (%)	100	100	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	Kecamatan Solear
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Solear

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kecamatan Solear (%)													
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Mekar Baru	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar (%)	60	63	66	5.302.805.426	69	5.329.319.453	72	5.355.966.050	75	5.382.745.881	78	5.409.659.610	Kecamatan Mekar Baru
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Mekar Baru (%)	55	60	65		70		75		80		85		Kecamatan Mekar Baru
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sukamulya	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukamulya (%)	100	100	100	7.287.616.270	100	7.651.997.083	100	7.881.556.995	100	8.118.003.704	100	8.361.543.814	Kecamatan Sukamulya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukamulya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sukamulya
Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Gunung Kaler	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Gunung Kaler (%)	100	100	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	Kecamatan Gunung Kaler
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Gunung Kaler (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gunung Kaler
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					77.821.821.859		80.937.996.160		84.544.310.017		86.885.668.345		89.302.009.715	
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Tigaraksa	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Tigaraksa (%)	85,00	87,00	90,00	2.300.000.000	100,00	2.600.000.000	100,00	2.900.000.000	100,00	2.900.000.000	100,00	3.000.000.000	Kecamatan Tigaraksa
														Kelurahan Tigaraksa
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat	85,00	87,00	88,00	4.054.333.630	90,00	4.459.766.993	92,00	4.905.743.692	100,00	5.396.318.061	100,00	5.935.949.867	Kecamatan Cikupa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
kelurahan Kecamatan Cikupa	pembinaan/pemberdayaa Kec. Cikupa (%)													
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Cikupa (%)	78,00	85,00	88,00		90,00		92,00		94,00		96,00		Kelurahan Sukamulya
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Cikupa (%)	78,00	85,00	88,00		90,00		92,00		94,00		96,00		Kelurahan Bunder
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Panongan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Panongan (%)	28,57	80,00	80,50	2.716.318.237	81,00	2.800.541.308	81,50	2.888.975.533	82,00	2.981.831.470	82,5	3.079.330.203	Kecamatan Panongan
	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Panongan (%)	28,57	80	80,5		81		81,5		82		82		Keluarahan Mekar Bakti
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Curug	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug (%)	79	80	80,5	3.805.689.000	81	4.520.689.000	81,5	5.235.689.000	82	5.950.689.000	82,5	6.665.689.000	Kecamatan Curug
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug (%)	79	80	80,5		81		81,5		82		82,5		Kelurahan Sukabakti
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug (%)	79	80	80,5		81		81,5		82		82,5		Kelurahan Binong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug (%)	79	80	80,5		81		81,5		82		82,5		Kelurahan Curug Kulon
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Legok	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Legok (%)	100,00	100,00	100,00	2.640.000.000	100,00	2.955.000.000	100,00	2.955.000.000	100,00	2.955.000.000	100,00	2.955.000.000	Kecamatan Legok
														Kelurahan Babakan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pasar Kemis	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pasar Kemis (%)	85,00	85,00	85,00	3.700.000.000	85,00	3.700.000.000	85,00	3.700.000.000	85,00	3.700.000.000	85,00	3.700.000.000	Kecamatan Pasar Kemis
														Kelurahan Sindang Sari
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Balaraja (%)	100,00	100,00	100,00	3.783.744.624	100,00	4.010.769.301	100,00	4.251.415.459	100,00	4.506.500.387	100,00	4.776.890.410	Kecamatan Balaraja
														Kelurahan Balaraja
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kresek	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kresek (%)	100,00	100,00	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	Kecamatan Kresek
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kronjo	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kronjo (%)	100,00	100,00	100,00	1.720.000.000	100,00	1.720.000.000	100,00	1.720.000.000	100,00	1.720.000.000	100,00	1.720.000.000	Kecamatan Kronjo
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember	85,00	85,00	85,00	1.635.000.000	85,00	2.366.000.000	85,00	2.366.000.000	85,00	2.366.000.000	85,00	2.366.000.000	Kecamatan Mauk

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kecamatan Mauk	dayaa Kec. Mauk (%)													
														Kelurahan Mauk Timur
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Rajeg	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Rajeg (%)	100,00	100,00	100,00	2.940.000.000	100,00	2.940.000.000	100,00	3.240.000.000	100,00	3.255.000.000	100,00	3.255.000.000	Kecamatan Rajeg
														Kelurahan Sukatani
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sepatan	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sepatan (%)	90,00	90,00	90,00	2.531.377.409	90,00	2.657.946.279	90,00	2.790.843.593	90,00	2.930.385.773	90,00	3.076.905.061	Kecamatan Sepatan
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sepatan (%)	85	90	90		90		90		90		90		Kelurahan Sepatan
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Teluknaga	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Teluknaga (%)	99,98	100,00	100,00	1.000.000.000	100,00	1.100.000.000	100,00	1.100.000.000	100,00	1.100.000.000	100,00	1.100.000.000	Kecamatan Teluknaga
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cisoka	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Cisoka (%)	100,00	100,00	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	Kecamatan Cisoka
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pakuhaji	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pakuhaji (%)	100,00	100,00	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100,00	2.000.000.000	Kecamatan Pakuhaji
														Kelurahan Pakuhaji
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Prosentase kelompok masyarakat yang	100,00	100,00	100,00	4.605.003.207	100,00	4.019.241.271	100,00	4.655.003.207	100,00	4.570.003.207	100,00	4.705.003.207	Kecamatan Kosambi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
desa dan kelurahan Kecamatan Kosambi	mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi (%)													
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Kosambi Barat
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Salembaran Jaya
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Keluaraha n Dadap
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pagedangan	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pagedangan (%)	88	90	91	3.000.000.000	92	3.000.000.000	93	3.000.000.000	94	3.000.000.000	95	3.000.000.000	Kecamatan Pagedangan
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Pagedangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Medang
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jambe	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Jambe (%)	85,00	92,00	92,00	1.312.026.313	92,50	1.373.951.120	92,75	1.455.770.715	93,00	1.507.016.837	95,00	1.569.566.492	Kecamatan Jambe
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Jayanti	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Jayanti (%)	100,00	100,00	100,00	1.727.119.468	100,00	1.814.734.496	100,00	1.903.891.221	100,00	1.904.491.221	100,00	1.906.091.221	Kecamatan Jayanti

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kemiri	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kemiri (%)	85,00	85,00	85,00	2.500.000.000	85,00	2.500.000.000	85,00	2.500.000.000	85,00	2.500.000.000	85,00	2.500.000.000	Kecamatan Kemiri
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukadiri	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sukadiri (%)	89	89,5	90	1.370.000.000	90,5	1.395.000.000	91	1.415.500.000	91,5	1.496.500.000	92	1.525.000.000	Kecamatan Sukadiri
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cisauk	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)	85,2	85,5	85,75	1.370.000.000	86	1.395.000.000	86,2	1.415.500.000	86,5	1.496.500.000	86,7	1.525.000.000	Kecamatan Cisauk
														Kelurahan Cisauk
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sepatan Timur	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sepatan Timur (%)	79,00	80,00	80,50	2.845.817.825	81,00	2.851.692.360	81,50	2.921.643.130	82,00	2.955.165.450	82,5	2.985.007.500	Kecamatan Sepatan Timur
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sindang Jaya	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Sindang Jaya (%)	100	100	100	2.320.000.000	100	2.320.000.000	100	2.320.000.000	100	2.320.000.000	100	2.320.000.000	Kecamatan Sindang Jaya
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kelapa Dua	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kelapa Dua (%)	100,00	100,00	100,00	10.217.505.240	100,00	10.421.855.345	100,00	10.630.292.452	100,00	10.842.898.301	100,00	11.059.756.267	Kecamatan Kelapa Dua
														Kelurahan Kelapa Dua
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Solear	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Solear (%)	75,00	87,00	90,00	2.100.000.000	100,00	2.100.000.000	100,00	2.100.000.000	100,00	2.100.000.000	100,00	2.100.000.000	Kecamatan Solear

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Mekar Baru	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan (%)	55	58	61	1.382.723.620	64	1.389.637.238	67	1.396.585.424	70	1.403.568.351	73	1.410.586.193	Kecamatan Mekar Baru
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukamulya	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sukamulya (%)	100,00	100,00	100,00	1.120.163.286	100,00	1.176.171.449	100,00	1.211.456.591	100,00	1.247.800.287	100,00	1.285.234.294	Kecamatan Sukamulya
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Gunung Kaler	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberday Kec. Gunung Kaler (%)	100,00	100,00	100,00	2.625.000.000	100,00	2.850.000.000	100,00	3.065.000.000	100,00	3.280.000.000	100,00	3.280.000.000	Kecamatan Gunung Kaler
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					9.486.674.903		9.785.732.611		10.063.726.208		10.370.907.021		10.630.584.640	
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa (%)	100,00	100,00	100,00	596.750.000	100,00	656.425.000	100,00	722.067.500	100,00	794.274.250	100,00	873.701.675	Kecamatan Cikupa
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Sukamulya
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Bunder
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Tigaraksa	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa (%)	100	100	100	630.000.000	100	660.000.000	100	690.000.000	100	720.000.000	100	720.000.000	Kecamatan Tigaraksa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														Kelurahan Tigaraksa
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Panongan	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan (%)	100	100	100	224.552.895	100	235.780.539	100	247.569.566	100	259.948.044	100	272.945.447	Kecamatan Panongan
	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Keluarahan Mekar Bakti
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Curug	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Curug (%)	72,5	73	73,5	320.021.000	74	340.021.000	74,5	360.021.000	75	380.021.000	75,5	400.021.000	Kecamatan Curug
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Curug (%)	72,5	73	73,5		74		74,5		75		75,5		Kelurahan Sukabakti
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Curug (%)	72,5	73	73,5		74		74,5		75		75,5		Kelurahan Binong
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Curug (%)	72,5	73	73,5		74		74,5		75		75,5		Kelurahan Curug Kulon
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Legok	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Legok (%)	100,00	100,00	100,00	230.816.643	100,00	230.816.643	100,00	230.816.643	100,00	230.816.643	100,00	230.816.643	Kecamatan Legok
														Kelurahan Babakan
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	Kecamatan Pasar Kemis

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kecamatan pasar Kemis	Kecamatan Pasar Kemis (%)													
														Kelurahan Sindang Sari
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Balaraja	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja (%)	100,00	100,00	100,00	172.087.502	100,00	182.412.752	100,00	193.357.517	100,00	204.958.968	100,00	217.256.506	Kecamatan Balaraja
														Kelurahan Balaraja
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kresek	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kresek (%)	100,00	100,00	100,00	79.113.000	100,00	89.113.000	100,00	99.113.000	100,00	109.113.000	100,00	119.113.000	Kecamatan Kresek
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kronjo	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kronjo (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	Kecamatan Kronjo
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mauk	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Mauk (%)	100,00	100,00	100,00	420.000.000	100,00	440.000.000	100,00	460.000.000	100,00	480.000.000	100,00	480.000.000	Kecamatan Mauk
														Kelurahan Mauk Timur
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Rajeg	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Rajeg (%)	100,00	100,00	100,00	105.000.000	100,00	105.000.000	100,00	105.000.000	100,00	105.000.000	100,00	105.000.000	Kecamatan Rajeg
														Kelurahan Sukatani
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sepatan	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan (%)	100	100	100	252.581.700	100	265.210.785	100	278.471.324	100	292.394.890	100	307.014.634	Kecamatan Sepatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Sepatan
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Teluknaga	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Teluknaga (%)	99,88	100,00	100,00	300.000.000	100,00	350.000.000	100,00	400.000.000	100,00	450.000.000	100,00	500.000.000	Kecamatan Teluknaga
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cisoka	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cisoka (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	Kecamatan Cisoka
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pakuhaji	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakuhaji (%)	100,00	100,00	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	Kecamatan Pakuhaji
														Kelurahan Pakuhaji
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)	100,00	100,00	100,00	610.250.448	100,00	610.250.448	100,00	610.250.448	100,00	610.250.448	100,00	610.250.448	Kecamatan Kosambi
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Kosambi Barat
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Salembaran Jaya
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Keluaraha n Dadap

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pagedangan	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan (%)	75	80	85	300.000.000	90	300.000.000	95	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	Kecamatan Pagedangan
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan (%)	80	85	90		95		100		100		100		Kelurahan Medang
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Jambe	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Jambe (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	Kecamatan Jambe
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Jayanti	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Jayanti (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	Kecamatan Jayanti
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kemiri	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kemiri (%)	100,00	100,00	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	Kecamatan Kemiri
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sukadiri	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri (%)	77	79	81	180.000.000	81,5	200.000.000	82	210.000.000	82,5	230.000.000	83	240.000.000	Kecamatan Sukadiri
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cisauk	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)	85,2	85,5	85,75	180.000.000	86	200.000.000	86,2	210.000.000	86,5	230.000.000	86,7	250.000.000	Kecamatan Cisauk
														Kelurahan Cisauk
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	72,50	73,00	73,50	183.120.115	74,00	183.987.400	74,50	184.818.230	75,00	185.715.800	75,5	189.213.800	Kecamatan Sepatan Timur

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
umum Kecamatan Sepatan Timur	Kecamatan Sepatan TImur (%)													
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sindang Jaya	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sindang Jaya (%)	100	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Sindang Jaya
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kelapa Dua	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kelapa Dua (%)	100,00	100,00	100,00	446.661.264	100,00	455.594.489	100,00	464.706.379	100,00	474.000.507	100,00	483.480.517	Kecamatan Kelapa Dua
														Kelurahan Kelapa Dua
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Solear	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Solear (%)	57,00	70,00	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	Kecamatan Solear
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Mekar Baru	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	219.684.390	100	220.782.812	100	221.886.726	100	222.996.160	100	224.111.140	Kecamatan Mekar Baru
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sukamulya	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukamulya (%)	100,00	100,00	100,00	486.035.946	100,00	510.337.743	100,00	525.647.875	100,00	541.417.311	100,00	557.659.830	Kecamatan Sukamulya
Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Gunung Kaler	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler (%)	100,00	100,00	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	Kecamatan Gunung Kaler
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.577.516.831		11.134.879.350		11.598.001.120		12.123.712.791		12.515.646.676	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Cikupa	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa (%)	100	100	100	378.375.000	100	416.212.500	100	457.833.750	100	503.617.125	100	495.231.825	Kecamatan Cikupa
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Tigaraksa	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa (%)	100	100	100	500.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	Kecamatan Tigaraksa
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Panongan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Panongan (%)	100	100	100	507.553.725	100	532.931.410	100	559.577.981	100	587.556.880	100	616.934.723	Kecamatan Panongan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Curug	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Curug (%)	80	81	81,5	425.521.500	82	500.521.500	82,50	575.521.500	83,00	650.521.500	83,5	725.521.500	Kecamatan Curug
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Legok	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Legok (%)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Kecamatan Legok
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Pasar Kemis	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pasar Kemis (%)	100	100	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	Kecamatan Pasar Kemis
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Balaraja	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Balaraja (%)	100	100	100	236.105.036	100	250.271.338	100	265.287.618	100	281.204.875	100	298.077.168	Kecamatan Balaraja
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Kresek	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kresek (%)	100	100	100	310.030.800	100	330.030.800	100	350.030.800	100	370.030.800	100	390.030.800	Kecamatan Kresek
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Kronjo	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kronjo (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Kronjo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Mauk	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Mauk (%)	100	100	100	145.000.000	100	165.000.000	100	190.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	Kecamatan Mauk
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Rajeg	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Rajeg (%)	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Kecamatan Rajeg
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sepatan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan (%)	70	70	70	298.979.520	70	313.928.496	70	329.624.921	70	346.106.167	70	346.106.166	Kecamatan Sepatan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Teluknaga	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Teluknaga (%)	100	100	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	Kecamatan Teluknaga
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Cisoka	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Cisoka (%)	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Kecamatan Cisoka
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Pakuhaji	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakuhaji (%)	100	100	100	145.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	Kecamatan Pakuhaji
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Kosambi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Kosambi
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Pagedangan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan (%)	100	100	100	255.000.000	100	285.000.000	100	320.000.000	100	360.000.000	100	390.000.000	Kecamatan Pagedangan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Jambe	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Jambe (%)	85,00	85,00	86,00	234.000.000	87,00	228.000.000	88,00	246.561.902	89,00	305.000.000	90,00	340.000.000	Kecamatan Jambe

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Jayanti	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sindang Jaya (%)	100	100	100	323.040.000	100	335.040.000	100	347.040.000	100	351.340.000	100	358.040.000	Kecamatan Jayanti
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Kemiri	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kemiri (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kecamatan Kemiri
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sukadiri	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri (%)	70	75	80	350.000.000	81	360.000.000	82	365.000.000	83	370.000.000	84	380.000.000	Kecamatan Sukadiri
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Cisauk	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)	85,2	85,5	85,75	350.000.000	86	360.000.000	86,2	365.000.000	86,5	370.000.000	86,7	380.000.000	Kecamatan Cisauk
	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Cisauk (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kelurahan Cisauk
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sepatan Timur	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan TImur (%)	80,00	81,00	81,50	300.000.000	82,00	300.000.000	82,50	300.000.000	83,00	300.000.000	83,50	300.000.000	Kecamatan Sepatan Timur
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sindang Jaya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sindang Jaya (%)	100	100	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	Kecamatan Sindang Jaya
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Kelapa Dua	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kelapa Dua (%)	100	100	100	330.000.000	100	336.600.000	100	343.332.000	100	363.000.000	100	370.260.000	Kecamatan Kelapa Dua
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Solear	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Solear (%)	100	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Kecamatan Solear

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Mekar Baru	Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	50	55	60	461.411.250	65	463.718.306	70	466.036.898	75	468.367.082	80	468.367.082	Kecamatan Mekar Baru
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Sukamulya	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukamulya (%)	100	100	100	302.500.000	100	317.625.000	100	327.153.750	100	336.968.362	100	347.077.412	Kecamatan Sukamulya
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Gunung Kaler	Persentase rekomendasi urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler (%)	100	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	Kecamatan Gunung Kaler
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					9.377.390.998		13.164.401.631		10.426.052.912		12.558.414.135		10.947.134.109	
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Tigaraksa	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Tigaraksa (%)	100	100	100	460.000.000	100	470.000.000	100	480.000.000	100	490.000.000	100	500.000.000	Kecamatan Tigaraksa
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Cikupa	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cikupa (%)	90,10	90,25	90,40	217.784.160	91,00	304.562.576	94,00	263.518.834	96,00	289.870.717	98,0	318.857.788	Kecamatan Cikupa
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Panongan	Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Panongan (%)	100	89,30	89,35	146.038.872	89,40	153.340.815	89,45	461.007.855	89,50	469.058.248	89,6	177.511.161	Kecamatan Panongan
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Curug (%)	89,15	89,30	89,35	117.698.400	89,40	142.698.400	89,45	167.698.400	89,50	192.698.400	89,55	197.698.400	Kecamatan Curug

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kecamatan Curug														
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Legok	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Legok (%)	100	100	100	180.000.000	100	300.000.000	100	180.000.000	100	300.000.000	100	180.000.000	Kecamatan Legok
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Pasar Kemis	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Pasar Kemis (%)	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	Kecamatan Pasar Kemis
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Balaraja	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Balaraja (%)	100	100	100	175.829.852	100	186.379.643	100	197.562.421	100	209.416.167	100	221.981.137	Kecamatan Balaraja
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Kresek	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kresek (%)	100	100	100	84.912.000	100	194.912.000	100	104.912.000	100	199.912.000	100	124.912.000	Kecamatan Kresek
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Kronjo	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kronjo (%)	100	100	100	380.000.000	100	845.000.000	100	380.000.000	100	580.000.000	100	380.000.000	Kecamatan Kronjo
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Mauk	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Mauk (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kecamatan Mauk
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Rajeg	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Rajeg (%)	100	100	100	150.000.000	100	320.000.000	100	150.000.000	100	720.000.000	100	150.000.000	Kecamatan Rajeg
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	95	95	95	172.793.250	95	561.432.913	95	190.504.558	95	200.029.786	95	210.031.275	Kecamatan Sepatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pemerintahan desa Kecamatan Sepatan	Kecamatan Sepatan (%)													
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Teluknaga	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Kecamatan Teluknaga (%)	99,99	100	100	650.000.000	100	700.000.000	100	750.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000	Kecamatan Teluknaga
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Cisoka	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cisoka (%)	100	100	100	200.000.000	100	260.000.000	100	200.000.000	100	260.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Cisoka
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Pakuhaji	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Pakuhaji (%)	100	100	100	350.000.000	100	550.000.000	100	450.000.000	100	630.000.000	100	550.000.000	Kecamatan Pakuhaji
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Kosambi	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kosambi (%)	100	100	100	239.874.015	100	389.874.015	100	239.874.015	100	239.874.015	100	239.874.015	Kecamatan Kosambi
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Pagedangan	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Pagedangan (%)	100	100	100	420.000.000	100	820.000.000	100	500.000.000	100	570.000.000	100	530.000.000	Kecamatan Pagedangan
														Kelurahan Medang
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Jambe	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Jambe (%)	85,89	85,89	85,95	140.000.000	86,00	384.200.000	86,10	199.372.500	86,15	336.641.124	86,25	234.233.525	Kecamatan Jambe
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Jayanti (%)	100	100	100	88.768.000	100	194.768.000	100	101.968.000	100	108.868.000	100	265.068.000	Kecamatan Jayanti

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kecamatan jayanti														
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Kemiri	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baikKecamatan Kemiri (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kecamatan Kemiri
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sukadiri	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Sukadiri (%)	89	90	92	180.000.000	93	240.000.000	94	230.000.000	95	270.000.000	96	260.000.000	Kecamatan Sukadiri
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Cisauk	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)	85,2	85,5	85,75	180.000.000	86	240.000.000	86,2	230.000.000	86,5	270.000.000	86,7	260.000.000	Kecamatan Cisauk
	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cisauk (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Cisauk
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sepatan Timur	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Sepatan TImur (%)	89,15	89,30	89,35	219.698.400	89,40	568.548.600	89,45	267.698.400	89,50	365.849.200	89,6	365.849.200	Kecamatan Sepatan Timur
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kec. Sindang Jaya	Persentase dengan Tata Kelola Desa yang Baik Kecamatan Sindang Jaya (%)	100	100	100	395.000.000	100	810.000.000	100	395.000.000	100	545.000.000	100	395.000.000	Kecamatan Sindang Jaya
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Kelapa Dua	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Kelapa Dua (%)	100	100	100	211.444.190	100	215.673.074	100	219.986.535	100	224.386.266	100	228.873.991	Kecamatan Kelapa Dua
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Solear (%)	25	70	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	Kecamatan Solear

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kecamatan Solear														
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Mekar Baru	Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	65	67	70	184.061.250	73	250.348.556	76	185.906.464	79	186.835.996	81	187.770.176	Kecamatan Mekar Baru
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Sukamulya	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Sukamulya (%)	100	100	100	583.488.609	100	812.663.039	100	631.042.930	100	849.974.216	100	669.473.441	Kecamatan Sukamulya
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Gunung Kelar	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa Kecamatan Gunung Kaler (%)	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Kecamatan Gunung Kaler
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					39.866.621.760		39.866.621.760		39.866.621.760		39.866.621.760		39.866.621.760	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.971.621.760		13.971.621.760		13.971.621.760		13.971.621.760		13.971.621.760	
Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)	100,00	100,00	100,00	13.971.621.760	100,00	13.971.621.760	100,00	13.971.621.760	100,00	13.971.621.760	100,00	13.971.621.760	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					12.055.000.000		12.055.000.000		12.055.000.000		12.055.000.000		12.055.000.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	0,09	1	2	12.055.000.000	3	12.055.000.000	5	12.055.000.000	7	12.055.000.000	9	12.055.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
karakter kebangsaan														
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.190.000.000		2.190.000.000		2.190.000.000		2.190.000.000		2.190.000.000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8,61	8,61	8,61	2.190.000.000	8,61	2.190.000.000	8,61	2.190.000.000	8,61	2.190.000.000	8,61	2.190.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.640.000.000		1.640.000.000		1.640.000.000		1.640.000.000		1.640.000.000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	14,29	14,29	14,29	1.640.000.000	14,29	1.640.000.000	14,29	1.640.000.000	14,29	1.640.000.000	14,29	1.640.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					4.140.000.000		4.140.000.000		4.140.000.000		4.140.000.000		4.140.000.000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi (%)	80	80	80	4.140.000.000	80	4.140.000.000	80	4.140.000.000	80	4.140.000.000	80	4.140.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN					5.870.000.000		5.870.000.000		5.870.000.000		5.870.000.000		5.870.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	35	35	35	5.870.000.000	35	5.870.000.000	35	5.870.000.000	35	5.870.000.000	35	5.870.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					8.772.215.369.822		8.918.889.648.887		9.140.039.648.887		9.442.189.648.887		9.581.314.648.887	

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 berdasarkan target pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 utamanya pada Periode 1 (2025-2029).

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	78,90	80,12	81,37	82,63	83,89	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,77	6,31	6,91	7,56	8,27	
3.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	80	82	84	86	88	
4.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	85,68	86,24	87,38	87,96	88,54	
5.	Indeks Pendidikan	Angka	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	
6.	Tingkat Inflasi	(%)	2	2	2	2	2	
7.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79,01	79,87	80,73	81,61	82,49	
8.	Tingkat Kemiskinan	(%)	5,59	5,27	4,96	4,67	4,40	
9.	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	18,55	18,9	19,26	19,62	19,99	
10.	Indeks Harmoni	Indeks	6,61	6,64	6,67	6,70	6,73	
11.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	5,14	5,16	5,18	5,23	5,28	
12.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,36	11,37	11,38	11,39	11,40	
13.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,27	4,30	4,34	4,37	4,40	
14.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	9,88	10,13	10,39	10,66	10,66	
15.	Indeks PEMDI	%	1,91	2,1	2,3	2,5	2,7	
16.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	66,25	68,75	71,25	73,75	76,25	
17.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	6,1	6,14	6,14	6,2	6,21	
18.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52,73	53,48	54,23	54,55	56	
19.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
20.	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	46	55	61	70	70	
21.	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	5,14	5,16	5,18	5,23	5,28	
22.	Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW	%	96,49	96,98	97,48	98	98,52	
23.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	59	60	61	62	63	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
24.	Indeks Infrastruktur	Angka	46,44	52,66	58,23	62,05	65,33	
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	61,74	61,91	62,09	62,26	62,43	
26.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	61	62	63	64	65	
27.	Prevalensi Stunting	%	17,5	17	16,5	16	15,5	
28.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,69	69,31	69,93	70,56	71,19	
29.	Persentase RTH kawasan perkotaan	%	21,10	22,45	21,10	22,50	25,00	
30.	Indek Professionalitas ASN	%	82,50	82,55	82,60	82,70	83,00	
31.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	13,63	13,83	14,03	14,24	14,24	
32.	Indeks Desa	Indeks	78,88	79,24	79,61	79,99	80,13	
33.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,395	0,392	0,390	0,388	0,388	
34.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	124,00	123,00	122,00	121,00	120,00	
35.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	74,96	75,46	75,96	76,46	76,96	
36.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,27	1,29	1,30	1,31	1,33	
37.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	2,06	1,92	1,80	1,68	1,56	
38.	Indeks Karakter Masyarakat	Indeks	73,50	78,00	82,50	87,00	91,50	
39.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Index	66	67	68	69	70	
40.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,83	1,91	1,99	2,07	2,15	
41.	Nilai AKIP	Angka	77	78	79	80,10	80,20	
42.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	33,76	33,77	33,78	33,79	33,80	
43.	Indeks Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	%	92	93	94	95	96	
44.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,400	3,420	3,450	3,480	3,500	
45.	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	%	27,08	27,14	27,20	27,26	27,32	

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pendidikan	Angka	0,68	0,68	0,69	0,69	0,7	0,71	0,72	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,27	5,77	6,31	6,91	7,56	8,27	
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,34	77,7	78,9	80,12	81,37	82,63	83,89	
4	Tingkat Inflasi	(%)	1,8	2	2	2	2	2	2	
5	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,55	5,94	5,59	5,27	4,96	4,67	4,4	
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,8	58	59	60	61	62	63	
7	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	20	46	55	61	70	70	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,88	68,08	68,69	69,31	69,93	70,56	71,19	
9	Indeks Desa	Indeks	78,15	78,53	78,88	79,24	79,61	79,99	80,13	
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	0:0	65:0	66:0	67:0	68:0	69:0	70:0	
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	,400	0,397	0,395	0,392	0,390	0,388	0,388	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	55,87	61,57	64,24	66,92	69,59	72,26	72,27	
13	Nilai AKIP	Angka	75,2	76,00	77,00	78,00	79,00	80,10	80,20	
14	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	0	9,56	9,89	10,24	10,6	10,97	11,35	
15	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	66	65	64	63	62	61	60	
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,06	6,06	5,91	5,77	5,63	5,5	5,37	
17	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	0	15,33	17,37	19,67	22,28	25,24	28,59	
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,67	3,75	3,78	3,82	3,86	3,9	3,91	
19	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,79	0,79	0,8	0,81	0,82	0,83	0,83	
20	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0	2,69	2,75	2,81	2,87	2,9	2,93	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	0	77,5	81,13	84,94	88,92	93,09	97,45	
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0	33,14	34,28	35,45	36,66	37,92	39,22	
23	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	26,4	20,9	17,5	17	16,5	16	15,5	
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	98	98	99	99	99	99	99	
25	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	84,7	84,9	85	85,1	85,2	85,3	85,4	
26	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,41	0,41	0,55	0,63	0,69	0,78	0,8	
31	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	1,25	1,26	1,27	1,29	1,3	1,31	1,33	
32	persentase permukiman kumuh	%	5,47	5,45	5,43	5,41	5,38	5,36	5,34	
33	Persentase PPKS yang Berdaya	%	1,44	1,13	1,22	1,29	1,34	1,36	1,41	
34	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,06	9,63	9,88	10,13	10,39	10,66	10,66	
35	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	%	76,73	77,73	78,73	79,73	80,73	81,73	82,73	
36	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,88	13,43	13,63	13,83	14,03	14,24	14,24	
37	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60,17	60,2	60,26	60,31	60,37	60,42	60,42	
38	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,69	91,71	91,73	91,75	91,77	91,79	91,79	
39	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,64	65	66	67	68	69	69	
40	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,6	12,2	11,88	11,52	11,16	10,08	10,44	
41	Indeks Karakter Masyarakat	Indeks	-	69	73,50	78	82,50	87	91,50	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	-	78	80	82	84	86	88	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	77,6	78,16	79,01	79,87	80,73	81,61	82,49	
3	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	4,13	5,11	5,14	5,16	5,18	5,23	5,28	
4	Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW	%	-	96	96,49	96,98	97,48	98	98,52	
5	Indeks PEMDI	%	-	-	1,91	2,1	2,3	2,5	2,7	
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	-	5,11	5,14	5,16	5,18	5,23	5,28	
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	-	52	52,73	53,48	54,23	54,55	56	
8	Persentase RTH kawasan perkotaan	%	-	21,1	21,1	22,45	21,1	22,5	25	
9	Indek Professionalitas ASN	%	81,81	82,4	82,5	82,55	82,6	82,7	83	
10	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	52,7	63	70	75	77	80,5	81	
11	Indeks Karakter Masyarakat	Indeks	-	69	73,5	78	82,5	87	91,5	
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB	%	26,97	27,02	27,08	27,14	27,20	27,26	27,32	
13	Indeks Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	%	99,8	91	92	93	94	95	96	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,359	3,370	3,400	3,420	3,450	3,480	3,500	
15	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,74	0,74	0,76	0,78	0,8	0,82	0,82	
16	Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten	Kuantitas	0	0	1	1	1	1	1	
17	indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	%	0	6,5	6,56	6,62	6,68	6,74	6,8	
18	Persentase rumah layak huni	%	87,25	89,66	90,89	92,14	93,41	94,69	95,99	
19	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0	2,5	2,6	2,71	2,82	2,93	3,05	
20	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	0	17,55	18,17	18,81	19,47	20,15	20,86	
21	Indeks Demokrasi Daerah	Indeks	0	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0	2,01	2,01	2,2	2,3	2,41	2,52	
23	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,15	63,64	64,37	65,11	65,86	66,62	67,39	
24	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	0	24	25,36	26,79	28,31	29,91	31,6	
25	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	
26	Persentase Desa Mandiri	%	0	5	5,66	6,41	7,26	8,22	9,31	
27	Kontribusi sektor koperasi dan Usaha Mikro terhadap PDRB	%	4,12	4,28	4,44	4,61	4,79	4,98	5,18	
29	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	6,16	6,07	6,1	6,14	6,14	6,2	6,21	
30	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	98,4	94,3	95,1	95,3	95,5	95,7	96,1	
31	Rasio Wirausaha	%	2,66	2,86	3,08	3,31	3,56	3,82	4,11	
32	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,93	4,23	4,27	4,3	4,34	4,37	4,4	
33	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum,Ketentraman masyarakat, dan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani	%	99,69	100	100	100	100	100	100	
34	Indeks SPBE	Indeks	3,91	3,19	3,39	3,69	3,99	4,15	4,25	
35	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	14,67	14,67	14,65	14,6	14,5	14,3	14,25	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	84,56	85,12	85,68	86,24	87,38	87,96	88,54	
2	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	-	18,21	18,55	18,9	19,26	19,62	19,99	
3	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	63,91	65,59	71,47	83,17	87,05	88,73	90,41	
4	Indeks Infrastruktur	Angka	0	38,98	46,44	52,66	58,23	62,05	65,33	
5	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	6,16	6,07	6,1	6,14	6,14	6,2	6,21	
6	Indeks Risiko Bencana	Indeks	125,22	125	124	123	122	121	120	
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	-	2,2	2,06	1,92	1,8	1,68	1,56	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Numerasi SMP	%	57,41	67,04	67,63	68,23	68,84	69,45	70,07	
9	Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita	kWh	0	1.247,8	1.313,84	1.383,37	1.456,58	1.533,66	1.614,82	
10	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	%	70	75	77,38	79,84	82,38	85	87,7	
11	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	0	11,73	12,05	12,37	12,71	13,05	13,4	
12	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3	4	4	4	4	4	4	
13	Nilai Literasi SMP	%	63,14	68,12	68,88	69,64	70,42	71,2	71,99	
14	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	0	88,27	88,82	89,38	89,94	90,5	91,07	
15	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	0	86,73	87,35	87,98	88,61	89,24	89,88	
16	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	0	90	90,79	91,6	92,4	93,22	94,04	
17	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	0	98,74	99,05	99,37	99,68	100	100	
18	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks	0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
19	Rasio Elektrifikasi	%	97,31	97,66	97,77	97,89	98	98,12	98,24	
20	Persentase timbulan sampah yang terkelola	%	57,53	64,75	66,17	67,63	69,11	70,63	72,18	
21	Numerasi SD	%	45,97	46,7	47,4	48,19	48,95	49,73	50,52	
22	Nilai Sistem Merit	Indeks	296,5	308,31	312,35	316,44	320,59	324,79	329,05	
23	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	Nilai Literasi SD	%	56,18	60,6	61,45	62,31	63,18	64,06	64,96	
25	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0	1,76	1,83	1,91	1,99	2,15	2,15	
26	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	6,16	6,07	6,1	6,14	6,17	6,2	6,21	
27	Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Rasio	0,9453	0,9455	0,9457	0,9453	0,9453	0,9453	0,9453	
28	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	70	75	80	85	90	92	
29	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	79,07	79,16	79,32	79,48	79,64	79,8	80	
30	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	84,15	84,65	85,15	85,65	86,15	86,65	87,15	
31	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	11,35	11,35	11,36	11,37	11,38	11,39	11,4	
32	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Indeks	99,8	91	92	93	94	95	96	
34	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		4,23	4,23	4,27	4,3	4,34	4,37	4,37	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
35	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%	73,96	74,46	74,96	75,46	75,96	76,46	76,96	
36	V/C Rasio	Angka	0,46	0,44	0,42	0,4	0,38	0,36	0,34	
37	Indeks harmoni	Indeks	6,58	6,6	6,61	6,64	6,67	6,7	6,73	
38	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	83,32	96,5	97,25	97,78	98,25	99,25	99,5	
39	Persentase Penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	20	46	55	61	70	70	
40	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	%	-	10,66	11,48	12,3	12,3	13,11	13,11	
41	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	33,74	33,75	33,76	33,77	33,78	33,79	33,8	
42	Persentase Pemuda Yang Berwirausaha	%	-	12	34	56	78	100	100	
43	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	0,544	0,53	0,535	0,54	0,545	0,55	0,555	
44	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	92,25	87,5	87,55	87,6	87,65	87,7	87,7	
61	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	4	5,04	5,39	6,09	6,65	6,84	7	
62	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,3	90,5	91,9	93,5	95,3	97,3	99,5	
63	Persentase Atlet Berprestasi	%	3	4	56	62	94	100	100	
64	Jumlah Desa Mandiri	Desa	78	105	113	122	132	143	155	
65	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	64,71	67,9	69,1	70,3	71,5	72,7	73,9	
66	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		4,41	4,42	4,43	4,44	4,45	4,46	4,47	
67	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	93,95	58,13	94	94,2	94,4	94,6	94,8	
68	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	80,26	71	71,05	71,1	71,15	71,2	71,25	
69	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
70	Indeks Kualitas Air	Indeks	55,69	61,86	62,06	62,26	62,46	62,66	62,86	
71	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	95,68	100	100	100	100	100	100	
72	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	69,34	70	72	73,5	74	75,2	76	
73	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	
74	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	43.737	44.131	44.446	44.783	45.145	45.533	45.945	
75	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,43	-	3,45	-	3,47	-	3,49	
76	Nilai Realisasi Investasi	Angka	23,71	24,42	25,15	25,9	26,68	27,48	28,31	
77	Jumlah Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB)	Kasus	12.391	11.881	10.202	8.795	7.792	7.029	6.441	
78	Produksi Olahan Perikanan	Produk	0	22.042	22.373	22.708	23.049	23.395	23.741	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
79	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	9,5	9,4	9,3	9,2	9,1	9	9	
81	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
82	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	84,14	85	90	91	92	95	95	
84	Persentase hasil riset yang dijadikan dasar perumusan kebijakan daerah	%	50	52	53	54	55	56	57	
85	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	-	73	77	81	85	89	93	
86	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	13,8	13,5	13	12,8	12,5	12	11,5	
87	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	89,4	85,5	86	87	88	89	90	
88	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	86,67	86,8	87	87,25	87,5	87,75	88	
89	Indeks Kualitas Udara	Indeks	73,33	69,36	69,56	69,76	69,96	70,16	70,36	
90	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		0,05	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
91	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kabupaten Tangerang	%	98	98	99	99	99	99	99	
92	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		2,34	2,34	2,35	2,4	2,45	2,5	2,55	
93	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	89	89,05	89,1	89,15	89,3	89,45	89,6	
94	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	23,86	46,67	46,74	46,81	46,88	46,95	47,02	
95	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	75,84	75,74	75,94	76,34	76,54	76,74	76,94	
96	Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah	Nilai	12,02	12,5	13	13,5	14	14,5	15	
97	Peningkatan Produksi Komoditas Perternakan	%	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
98	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		32,78	33	33,1	33,2	33,3	33,4	33,5	
99	Persentase laporan keuangan tepat waktu		100	100	100	100	100	100	100	
100	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Pemda	Nilai	25	26	27	28	29	30	30	
101	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TB)	%	90	90	90	90	90	90	90	
102	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	45	48	52	55	57	60	62	
103	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	0	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
104	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		95,31	95,33	95,35	95,37	95,39	33,41	95,43	
105	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Pemda	Nilai	18,55	20	21	22	23	24	25	
106	Jumlah Kematian Balita	Orang	256	669	655	641	627	613	599	
107	Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan	%	80	80	81	82	83	84	85	
108	Indeks Sistem Merit	Nilai	350,5	350,5	352,5	355	357	360	362,5	
111	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
113	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,99	99,23	99,48	99,72	99,97	100	100	
114	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	64,99	68,03	71,07	74,11	77,15	80,19	83,16	
116	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	13,43	14,19	14,95	15,72	16,48	17,24	18,01	
118	Persentase Pemenuhan Anak-anak yang Dijangkau dan Dipelihara	%	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
119	Persentase Pemenuhan Pelayanan UPT Rehabilitasi PMKS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
122	Persentase Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik	%	58,26	62,26	64,26	64,26	66,26	68,26	70,26	
123	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	27,06	28,06	28,56	28,56	29,06	29,56	30,06	
125	Cakupan Sarana Air Bersih	%	62,48	64,98	67,48	69,98	72,48	74,98	77,48	
126	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
127	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	49,14	79,40	83,71	88,88	88,88	88,88	89,74	
129	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
131	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
132	Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
133	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
134	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	%	89,14	90,64	91,64	92,64	93,64	94,64	95,64	
135	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	97,11	97,22	97,33	97,44	97,55	97,65	97,76	
136	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
137	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,93	1,92	1,91	1,9	1,89	1,88	1,87	

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	positif	%	13,43	14,19	14,95	15,72	16,48	17,24	18,01	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	positif	%	64,99	68,03	71,07	74,11	77,15	80,19	83,16	
4.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
12.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
15.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	positif	%	0,86	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	
18.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
19.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
20.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	positif	%	61,25	63,75	66,25	68,75	71,28	73,75	76,25	
21.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	%	97,02	97,69	98,42	99,25	100	100	100	
22.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	positif	%	99,25	100	100	100	100	100	100	
23.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	6,41	6,71	6,93	7,12	7,23	7,34	7,45	
24.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
25.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	positif	%	74	78	80	82	84	86	88	
26.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
27.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
28.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	komulatif	%	38,44	38,59	37,74	38,9	39,06	39,22	39,39	
29.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
30.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
31.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	negatif	%	2,89	2,78	2,67	2,56	2,45	2,35	2,24	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
32.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
33.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
34.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
35.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Orang	2.436.222	2.436.222	2.436.222	2.436.222	2.436.222	2.436.222	2.436.222	
36.	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
37.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Orang	2.452.679	2.452.679	2.452.679	2.452.679	2.452.679	2.452.679	2.452.679	
38.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	negatif	Orang	208	200	200	200	200	200	200	
39.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
40.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
41.	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
42.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
43.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	positif	%	60	100	100	100	100	100	100	
44.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	positif	%	0,13	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	
45.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	positif	%	76,73	77,33	78,73	79,73	80,73	81,73	82,73	
46.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	positif	%	48,08	48,09	48,24	48,40	48,56	48,72	48,88	
47.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
48.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	positif	%	77,94	69	69,50	70	70,50	71	71,50	
49.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
50.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	negatif	%	4,06	4,05	4,03	4,01	3,99	3,97	3,95	
51.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
52.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	positif	%	95,68	100	100	100	100	100	100	
53.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
54.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	positif	Indeks	55,87	61,57	61,74	61,91	62,09	62,26	62,43	
55.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	75	76	77	78	79	80	81	
56.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	positif	%	63,50	50,28	60	65	70	73	75	
57.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
58.	Kepemilikan Akta Kelahiran	positif	%	92,76	97	97,50	98	98,50	99	99	
59.	Perekaman KTP elektronik	positif	%	99,99	99,4	99,42	99,44	99,46	99,48	99,48	
60.	Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	positif	%	60,73	60	55	60	65	70	70	
61.	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	positif	%	72,88	81,36	89,83	100	100	100	100	
62.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
63.	Persentase pengentasan desa tertinggal	positif	%	0	0	0	0	0	0	0	
64.	Persentase peningkatan status desa mandiri	positif	%	31,71	40,24	44,72	49,59	54,88	60,57	66,67	
65.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
66.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	positif	%	78,84	75,74	75,94	76,34	76,54	76,74	76,94	
67.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
68.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	positif	Rasio	0,41	0,45	0,55	0,60	0,69	0,78	0,80	
69.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
70.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
71.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	positif	%	92,45	92,5	92,75	93	93,5	93,8	94	
72.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
73.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
74.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	positif	%	8,68	13,89	38,77	41,09	43,3	45,72	48,03	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
75.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	positif	%	2,66	2,86	3,08	3,31	3,56	3,82	4,11	
76.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
77.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	positif	%	-11,51	3	3	3	3	3	3	
78.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
79.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	positif	Nilai	1,14	1,21	1,22	1,23	1,23	1,24	1,24	
80.	Peningkatan Prestasi Olahraga	positif	% Indeks	37	38	40	42	44	46	48	
81.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	positif	% Nilai	0,01948	0,01982	0,01994	0,02002	0,02027	0,02039	0,02051	
82.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
83.	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
84.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
85.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
86.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	positif	%	50,39	54,26	58,14	62,02	63	63,5	63,8	
87.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
88.	Terlestarikannya Cagar Budaya	positif	Angka	0	1	1	1	1	1	1	
89.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
90.	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	positif	%	52,7	70,00	72,00	73,5	74,00	75,2	76,00	
91.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	positif	Indeks	52,70	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	
92.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
93.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		%	100,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
94.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	positif	%	100,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
95.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
96.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	positif	Ton	43,737	44,131	44,446	44,783	45,145	45,533	45,945	
97.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
98.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		%	19,93	20,18	20,26	20,34	20,42	20,5	20,58	
99.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	positif	%	19,95	20,10	20,15	20,19	20,24	20,29	20,34	
100.	Tingkat hunian akomodasi	positif	Nilai	96,60	96,68	96,76	96,84	96,93	97,91	98,01	
101.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
102.	Persentase kinerja realisasi pupuk		%	47,52	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00	
103.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	positif	%	30,78	10	10	10	10	10	10	
104.	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	positif	Ton/Ha	4,94	4,94	4,96	4,98	5,00	5,02	5,04	
105.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
106.	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	komulatif	Persentase	52	84,18	86,81	89,43	92,06	94,68	100	
107.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
108.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		%	100	100	100	100	100	100	100	
109.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota		%	22,51	8,12	8,35	8,47	8,52	8,84	9,02	
110.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
111.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
112.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	positif	%	35,77	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
113.	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	positif	%	0	0	0	0	0	0	0	
114.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	positif	%	38,29	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
115.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah	positif	%	22,45	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
116.	5.02 - KEUANGAN										
117.	Manajemen Aset	positif	Kategori	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
118.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	positif	%	13,48	93,7	93,8	93,9	94	94,1	94,2	
119.	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	negatif	%	10,02	2,81	1,96	1,11	0,26	-0,59	-1,44	
120.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
121.	Opini Laporan Keuangan		%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
122.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	negatif	%	8,59	8,7	8,43	8,23	8	7,90	7,80	
123.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	positif	%	62,23	84,1	84,3	84,5	84,7	84,7	84,9	
124.	Rasio PAD		%	54,29	52	52,5	53	53,5	54	54,5	
125.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	positif	%	24	120	121	122	123	124	125	
126.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
127.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	22,77	22,87	22,97	23,07	23,17	23,27	23,37	
128.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	79,28	79,48	79,68	79,88	80,08	80,28	80,48	
129.	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
130.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
131.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
132.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Nilai	3,359	3,370	3,400	3,420	3,450	3,480	3,500	
133.	Nilai Kapabilitas APIP	positif	Nilai	3	4	4	4	4	4	4	

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

BAB V
PENUTUP

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tangerang untuk periode lima tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2025–2029 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045, serta memperhatikan RPJM Nasional 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Banten. Dokumen RJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sementara itu, untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah, dalam penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan RPJMD, maka penyusunan RKPD pada tahun transisi berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045 yang disesuaikan periode waktunya.
2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten, penyusunan RKPD tahun 2025 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang dan mengacu RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi.
3. RKPD disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Kepala Daerah terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
4. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 mematuhi kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Kaidah-kaidah ini menekankan pada pengarusutamaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara holistik, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Implementasi RPJMD ini akan mengintegrasikan lima pengarusutamaan pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Pembangunan di Kabupaten Tangerang akan memastikan bahwa program dan kegiatan dapat diakses dan memberikan manfaat yang setara bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, usia, etnis, atau status sosial.
    - Pengarusutamaan Gender: Mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
    - Inklusi Sosial: Memastikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.
2. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Seluruh program pembangunan akan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs. RPJMD ini akan berkontribusi pada pencapaian target SDGs melalui program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan lingkungan.
3. Pengarusutamaan Transformasi Digital: Pemanfaatan teknologi digital akan dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
4. Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon: Pembangunan akan diarahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang efektif.
5. Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim: Seluruh rencana pembangunan akan memperhitungkan risiko perubahan iklim, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi bencana. Hal ini untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim.

Kaidah pelaksanaan disusun untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Tangerang, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025–2029 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025 hingga 2029.
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Tangerang, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit satuan kerja (Renja SKPD).

4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja.
5. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil RPJMD 2025– 2029, baik tahunan maupun di akhir masa jabatan Kepala Daerah.
6. Kepala Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029.

5.3 MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau segala kemungkinan kejadian atau kondisi (risiko) yang berpotensi menghambat atau bahkan menggagalkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sumber daya, dan faktor eksternal yang tidak selalu bisa dikontrol.

Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan monitoring secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD; mengindentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program Perangkat Daerah; memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang; serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pengendalian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah proses menjamin bahwa dokumen RPJMD selalu akurat, relevan, mudah diakses, dan terlindungi dari perubahan yang tidak sah. Hal ini sangat penting karena RPJMD adalah dokumen strategis yang menjadi dasar bagi seluruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di daerah selama lima tahun, meskipun senantiasa terdapat dinamika karena adanya kebijakan nasional maupun daerah sehingga perlu penyesuaian. Pengendalian pelaksanaan dokumen RPJMD untuk memastikan:

a. Program setiap Perangkat Daerah tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD;
b. Sumber daya daerah, terutama terkait dengan anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang direncanakan;
c. Potensi, kendala, hambatan, maupun risiko dapat diidentifikasi lebih awal; serta
d. Setiap Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan RPJMD.

Selain pengendalian pelaksanaan yang berfokus pada proses untuk memastikan selama periode perencanaan, semua rencana berjalan *on track*, perlu diperhatikan juga evaluasi yang dilakukan pada periode tertentu (tengah atau akhir periode) untuk menilai efektivitas dan efisiensi keseluruhan rencana.

BUPATI TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID